WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan program prioritas pembangunan daerah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2022 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
36. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 8);

45. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 40);

46. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 40) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Rewanda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2022

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2022



surabaya.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar xiii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11
1.4 Maksud dan Tujuan I-15
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-15
BAB II EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2022 ..... II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-166
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-724
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ..... IV-3
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 ... V-1
5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022 ..... V-108
Bab VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan II–6
Tabel II.2 Luasan Kawasan RTH Tahun 2018 – Triwulan II 2022..... II–7
Tabel II.3 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–13
Tabel II.4 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–13
Tabel II.5 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan II–14
Tabel II.6 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Triwulan II 2022 ..... II–15
Tabel II.7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama II–16
Tabel II.8 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Triwulan II 2022..... II–17
Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Triwulan II 2022 ... II–18
Tabel II.10 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–19
Tabel II.11 Pengeluaran per Kapita disesuaikan di kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–19
Tabel II.12 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – Triwulan II 2022 (dalam Juta Rp) II–21
Tabel II.13 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – Triwulan II 2022 (dalam Juta Rp) II–22
Tabel II.14 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) II–23
Tabel II.15 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–25
Tabel II.16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – Triwulan II 2022 (dalam persen) II–26
Tabel II.17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–28
Tabel II.18 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–29
Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan 2022 ..... II–30
Tabel II.20 Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022..... II–31

Tabel II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–32
Tabel II.22 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–33
Tabel II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–33
Tabel II.24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–34
Tabel II.25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–34
Tabel II.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–35
Tabel II.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–35
Tabel II.28 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–35
Tabel II.29 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–36
Tabel II.30 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–38
Tabel II.31 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–38
Tabel II.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–40
Tabel II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 208 – Triwulan II 2022 ..... II–40
Tabel II.34 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–41
Tabel II.35 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Triwulan II 2022 ..... II–43
Tabel II.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Triwulan II 2022 ..... II–48
Tabel II.37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Triwulan II 2022 ..... II–50
Tabel II.38 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–51
Tabel II.39 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–52

Tabel II.40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–53
Tabel II.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Triwulan II 2022 ..... II–53
Tabel II.42 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022..... II–56
Tabel II.43 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Triwulan II 2022 ..... II–56
Tabel II.44 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Triwulan II 2022 ..... II–56
Tabel II.45 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Triwulan II 2022 ..... II–57
Tabel II.46 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–57
Tabel II.47 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–58
Tabel II.48 Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2021..... II–58
Tabel II.49 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–60
Tabel II.50 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–60
Tabel II.51 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2018 – Triwulan II 2022..... II–61
Tabel II.52 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–62
Tabel II.53 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022II–62
Tabel II.54 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–63
Tabel II.55 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–63
Tabel II.56 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022..... II–64
Tabel II.57 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–64
Tabel II.58 Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–66
Tabel II.59 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–67
Tabel II.60 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–68
Tabel II.61 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan II 2022 ..... II–68
Tabel II.62 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–69

Tabel II.63 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–70
Tabel II.64 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–71
Tabel II.65 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–72
Tabel II.66 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa II–73
Tabel II.67 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–75
Tabel II.68 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–76
Tabel II.69 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–76
Tabel II.70 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–77
Tabel II.71 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–78
Tabel II.72 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–78
Tabel II.73 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022..... II–79
Tabel II.74 PMKS Penduduk non Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–80
Tabel II.75 PSKS Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–80
Tabel II.76 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–81
Tabel II.77 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–81
Tabel II.78 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir II–82
Tabel II.79 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–83
Tabel II.80 Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan 2022 ..... II–84
Tabel II.81 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–84
Tabel II.82 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–85
Tabel II.83 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–86

Tabel II.84 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–86
Tabel II.85 KDRT Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–87
Tabel II.86 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–88
Tabel II.87 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–88
Tabel II.88 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–89
Tabel II.89 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022II–89
Tabel II.90 Pola Pangan Harapan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–90
Tabel II.91 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .. II–90
Tabel II.92 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–92
Tabel II.93 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–92
Tabel II.94 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–93
Tabel II.95 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–94
Tabel II.96 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–94
Tabel II.97 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–95
Tabel II.98 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018 – Triwulan II 2022 II–95
Tabel II.99 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–97
Tabel II.100 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–97
Tabel II.101 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 II–98
Tabel II.102 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .. II–99
Tabel II.103 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–101
Tabel II.104 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–102
Tabel II.105 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–102

Tabel II.106 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–104
Tabel II.107 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022II–104
Tabel II.108 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–105
Tabel II.109 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022.II–106
Tabel II.110 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–107
Tabel II.111 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–108
Tabel II.112 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–108
Tabel II.113 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–110
Tabel II.114 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2018 – Triwulan II 2022.II–110
Tabel II.115 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota SurabayaTahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–111
Tabel II.116 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–112
Tabel II.117 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022.....II–112
Tabel II.118 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–113
Tabel II.119 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Daring Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–113
Tabel II.120 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022.....II–114
Tabel II.121 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022II–114
Tabel II.122 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2018 – TW II 2022 ...II–115
Tabel II.123 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–116
Tabel II.124 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–116
Tabel II.125 UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–116
Tabel II.126 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–117
Tabel II.127 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–118
Tabel II.128 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–118

Tabel II.129 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–119
Tabel II.130 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 – TW II 2022 .....II–121
Tabel II.131 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–122
Tabel II.132 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–123
Tabel II.133 Kelompok Seni Terdaftar Yang Belum Layak Tampil Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–124
Tabel II.134 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022.....II–125
Tabel II.135 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–125
Tabel II.136 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2018 – Triwulan II 2022.....II–127
Tabel II.137 Perkembangan Nilai Tambah Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–128
Tabel II.138 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–129
Tabel II.139 Pembudidaya Perikanan dan Kelautan Binaan Yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Serta Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–129
Tabel II.140 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022.....II–130
Tabel II.141 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–130
Tabel II.142 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–132
Tabel II.143 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–134
Tabel II.144 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–135
Tabel II.145 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–135
Tabel II.146 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–136
Tabel II.147 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–136
Tabel II.148 Pembudidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .....II–136

Tabel II.149 Pembudidaya Pertanian yang Mengaplikasikan TTG Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–137
Tabel II.150 Pembudidaya Peternakan yang Mengaplikasikan TTG Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–137
Tabel II.151 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–138
Tabel II.152 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 . II–138
Tabel II.153 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–139
Tabel II.154 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–139
Tabel II.155 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–139
Tabel II.156 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 . II–140
Tabel II.157 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 II–141
Tabel II.158 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–142
Tabel II.159 SOP Dievaluasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–142
Tabel II.160 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–142
Tabel II.161 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–143
Tabel II.162 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–144
Tabel II.163 MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Triwulan II 2022 ..... II–145
Tabel II.164 MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Triwulan II 2022 ..... II–145
Tabel II.165 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–145
Tabel II.166 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .. II–146
Tabel II.167 Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–147
Tabel II.168 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–147
Tabel II.169 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–148
Tabel II.170 Pelaksanaan Sub Kegiatan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–148

Tabel II.171 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–149
Tabel II.172 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–150
Tabel II.173 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–150
Tabel II.174 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–151
Tabel II.175 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–151
Tabel II.176 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–152
Tabel II.177 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–153
Tabel II.178 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–153
Tabel II.179 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–154
Tabel II.180 Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–154
Tabel II.181 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–156
Tabel II.182 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–156
Tabel II.183 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–157
Tabel II.184 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–158
Tabel II.185 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–158
Tabel II.186 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–159
Tabel II.187 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–160
Tabel II.188 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–160
Tabel II.189 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–161
Tabel II.190 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–162
Tabel II.191 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–164

Tabel II.192 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–164
Tabel II.193 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–165
Tabel II.194 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 .... II–165
Tabel II.195 Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan, Kegiatan, dan Kinerja Hasil Program Tahun 2022 sampai dengan Semester I II–167
Tabel II.196 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2022 Kota Surabaya II–168
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2017 - Tahun 2021 (dalam juta) III-12
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021 (dalam juta) III-13
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 – 2021 (dalam persen) III-16
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021 (dalam persen) III-18
Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 ..... III-20
Tabel III.6 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 ..... III-21
Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2017 - Tahun 2021 ..... III-22
Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2018 - Tahun 2023 ..... III-28
Tabel III.9 Perubahan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 ..... III-30
Tabel III.10 Perubahan Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 ..... III-31
Tabel III.11 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun 2022 ..... III-32
Tabel III.12 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun 2022 ..... III-33
Tabel III.13 Perubahan Perubahan Transfer Kota Surabaya Tahun 2022 ..... III-34
Tabel III.14 Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun 2019 - Tahun 2021 ..... III-35
Tabel III.15 Perubahan Target Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 ..... III-36
Tabel III.16 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2019 - Tahun 2023 . III-39
Tabel III.17 Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 - Tahun 2022 ..... III-41
Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IV-2

Tabel IV.2 Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi Jawa Timur IV-9
Tabel IV.3 Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022..... IV-10
Tabel IV.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 ..... IV-10
Tabel IV.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ..... IV-12
Tabel IV.6 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Pembangunan IV-13
Tabel IV.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 ..... IV-99
Tabel V.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 . V-2
Tabel V.2 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 ..... V-109

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Penyusunan Perubahan RKPD I-12
Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya II–1
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya II–3
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya II–4
Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya II–8
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng II–10
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara II–11
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya II–11
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya II–12
Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia II–15
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–27
Gambar II.11 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2021 ..... II–38
Gambar II.12 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018 – Triwulan II 2022 ..... II–39
Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2017–2021 ..... II–42
Gambar II.14 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Triwulan II 2022 ..... II–60
Gambar II.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Triwulan II 2022 ..... II–61
Gambar II.16 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Triwulan II 2022 ..... II–65
Gambar II.17 Persentase Atlet Berprestasi II–120
Gambar II.18 Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng II–126
Gambar II.19 Perangkat Smart Water Level II–162
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – Tahun 2021 (dalam persen) III-19

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 66 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JULI 2022

BAB I
PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (5), dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas :

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
c. Penetapan.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2019 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan

bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi sampai

dengan –4,85%. Seiring dengan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif sehingga tahun 2021 ekonomi tumbuh pada angka 4,29%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum diiringi oleh perbaikan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka 9,68% dan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi 5,23%. Kondisi ini disebabkan karena sektor yang tumbuh cepat pada tahun 2021 berada pada sektor padat modal serta kondisi perekonomian utamanya sektor perdaganagan dan jasa yang belum sepenuhnya pulih, oleh sebab itu pada tahun 2022 fokus pembangunan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang ditekankan pada perbaikan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Seiring dengan percepatan vaksinasi booster ke-3 serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, yang menempatkan Kota Surabaya berada pada level 1, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka serta peningkatan aspek pembangunan manusia yang disinergikan dengan arah kebijakan tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ***"Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Penguatan Sektor Strategis dan Dukungan Terhadap Usaha Mikro dan Sektor Informal".***

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
41. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);

50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 8);
52. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 20201 Nomor 40);
53. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 33).

2.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 mempedomani RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 serta mengacu pada

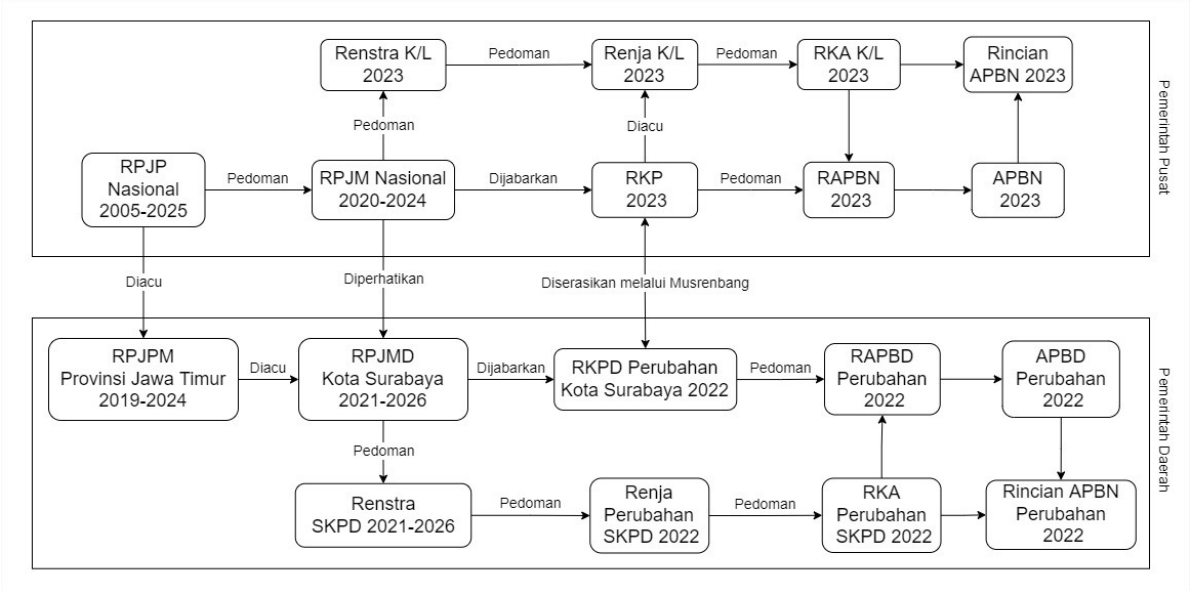
Rencana Kerja Pemerintah, RKPD Provinsi Jawa Timur, program strategis nasional serta pedoman penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kota.

Secara substansial, Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2022. Secara normatif, Perubahan RKPD Kota Surabaya dijadikan sebagai :

a. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya;
b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daeran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara operasional, Perubahan RKPD tahun 2022 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1



Gambar I.1
Alur Penyusunan Perubahan RKPD
Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daera berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, program prioritas nasional dalam RKP 2022, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD memuat perubahan pada sisi pendapatan yang diakibatkan oleh perubahan sisa lebih pagu anggaran tahun anggaran 2021 sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan melalui surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 10 Mei 2022 serta penyesuaian terhadap nomenkelatur sub kegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes. Perubahan atas sisi pendapatan serta kondisi terkini dengan memperhatikan upaya ketercapaian terhadap target indikator program, sasaran, dan tujuan yang telah tercantum pada dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada pencapaian output.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

2.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2022;
2. Sebagai respon terhadap pemulihan ekonomi utamanya bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

2.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RKPD, proses penyusunan perubahan RKPD, kedudukan perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara

dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2021 Triwulan II, selain itu juga memperhatikan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan dokumen RKPD tahun 2021 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok.

VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

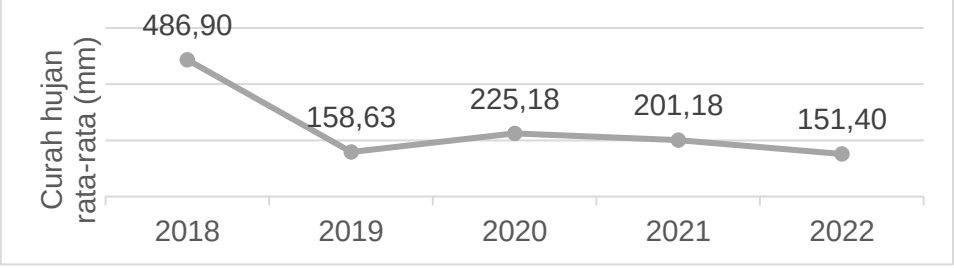
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km^2 yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di Tahun 2022, sampai dengan bulan Juni, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yakni sebesar 258,4 mm, dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C. Gambar II.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya
Sumber: Stasiun Meteorologi BMKG Perak, 2022

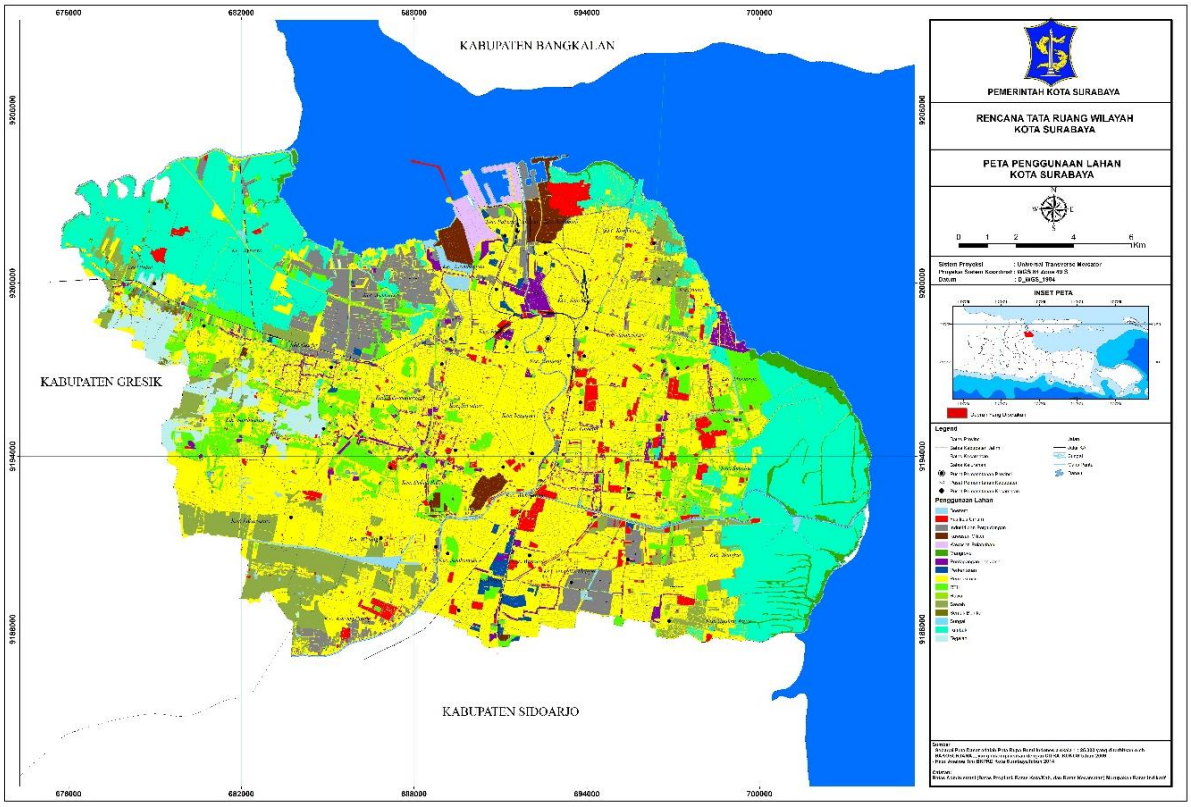
Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1.361 Rukun Warga (RW) dan 9.131 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

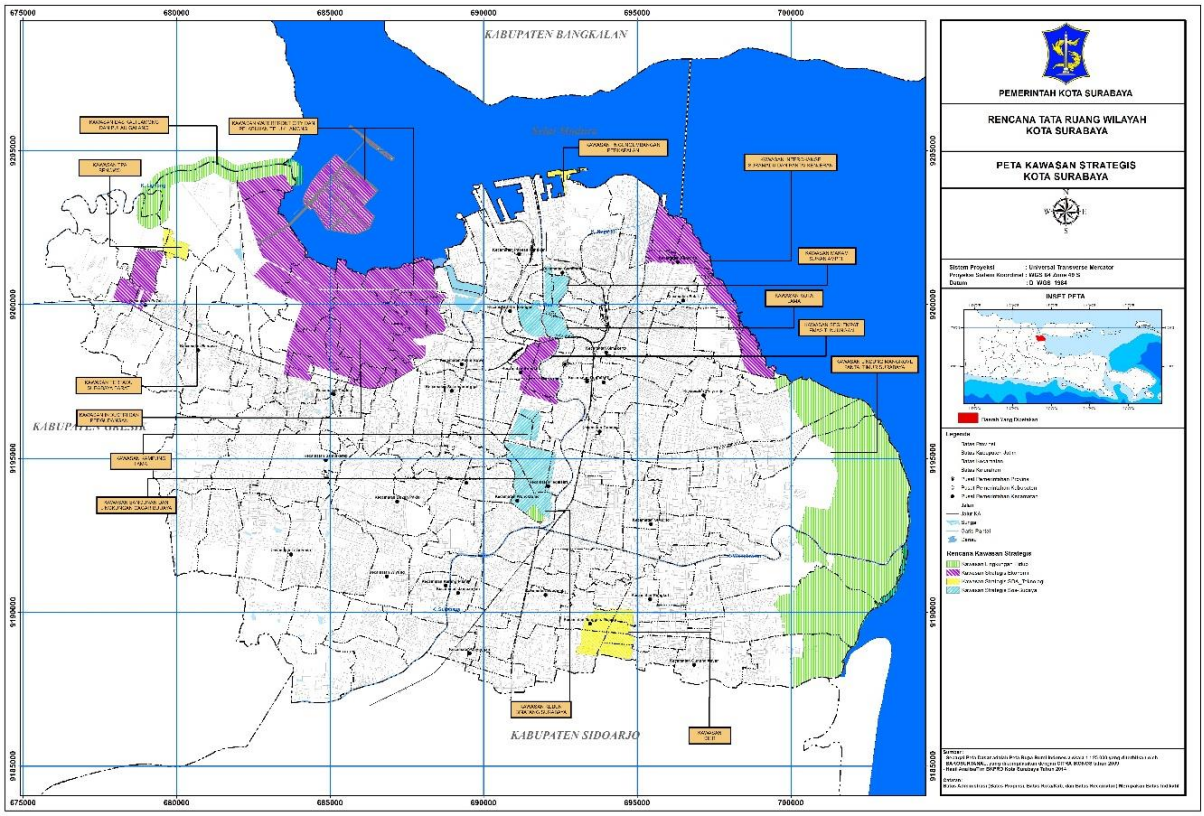
2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta kawasan strategis kota Surabaya.



Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan.

  Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada

dekade 1940 hingga akhir 1970-an dengan karakteristik *shopping-street dan shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdagangan Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	70
2	Krembangan	58
3	Pabean Cantian	37
4	Tegalsari	30
5	Bubutan	23
6	Wonokromo	23
7	Gubeng	11
8	Sawahan	9
9	Semampir	8
10	Simokerto	7
11	Tambaksari	6
12	Dukuh Pakis	2
13	Lakarsantri	2
14	Bulak	1
15	Gayungan	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		**289**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan

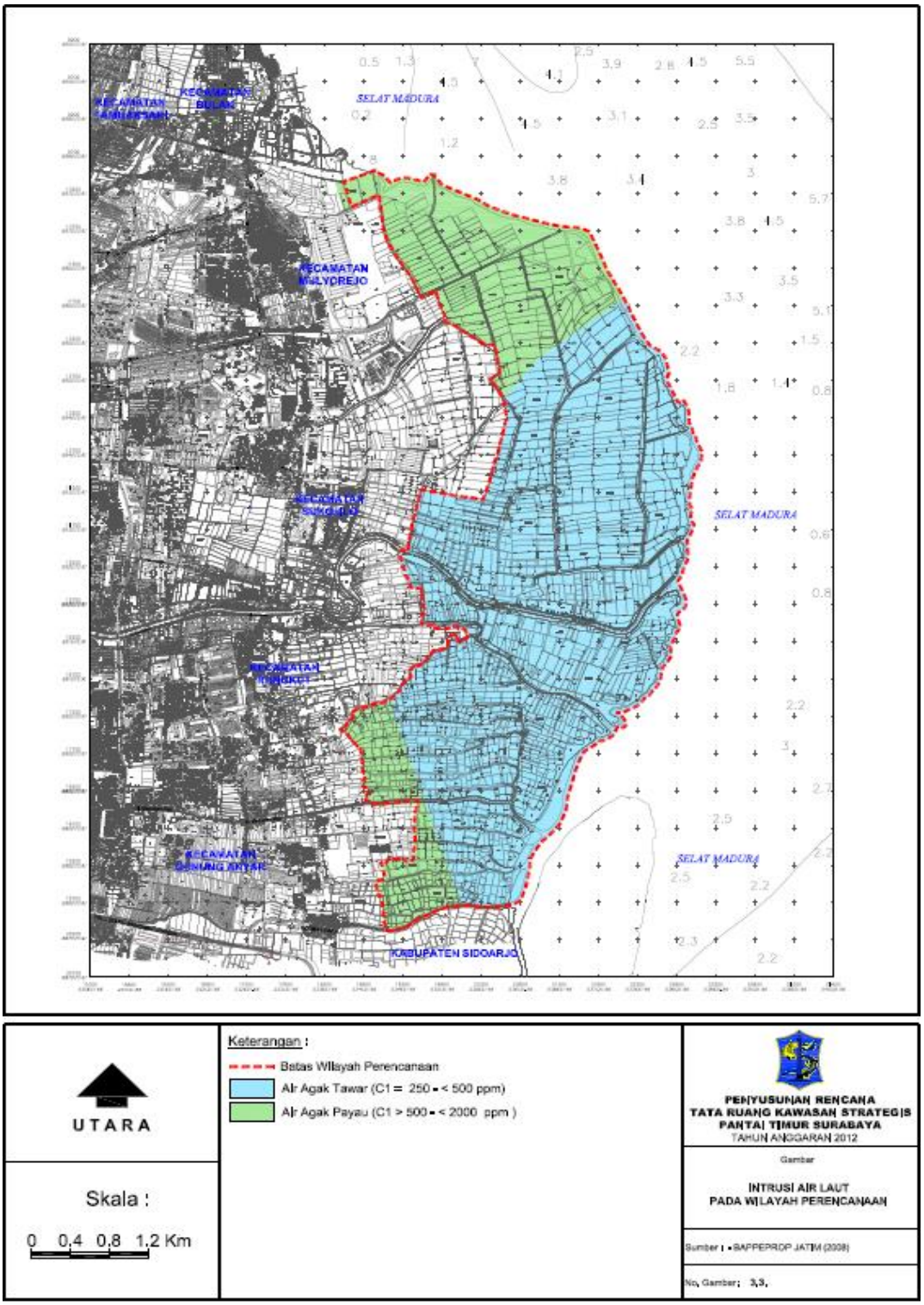
Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Tabel II.2
Luasan Kawasan RTH Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Jenis RTH	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33
2	Taman hutan raya	55,81	57,55	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.604,40	4.624,95	4.636,36	4.636,36	4.636,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022



Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada Tabel II.2.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) da-tau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: *"Waste to Energy".*

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.

3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman“ dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.

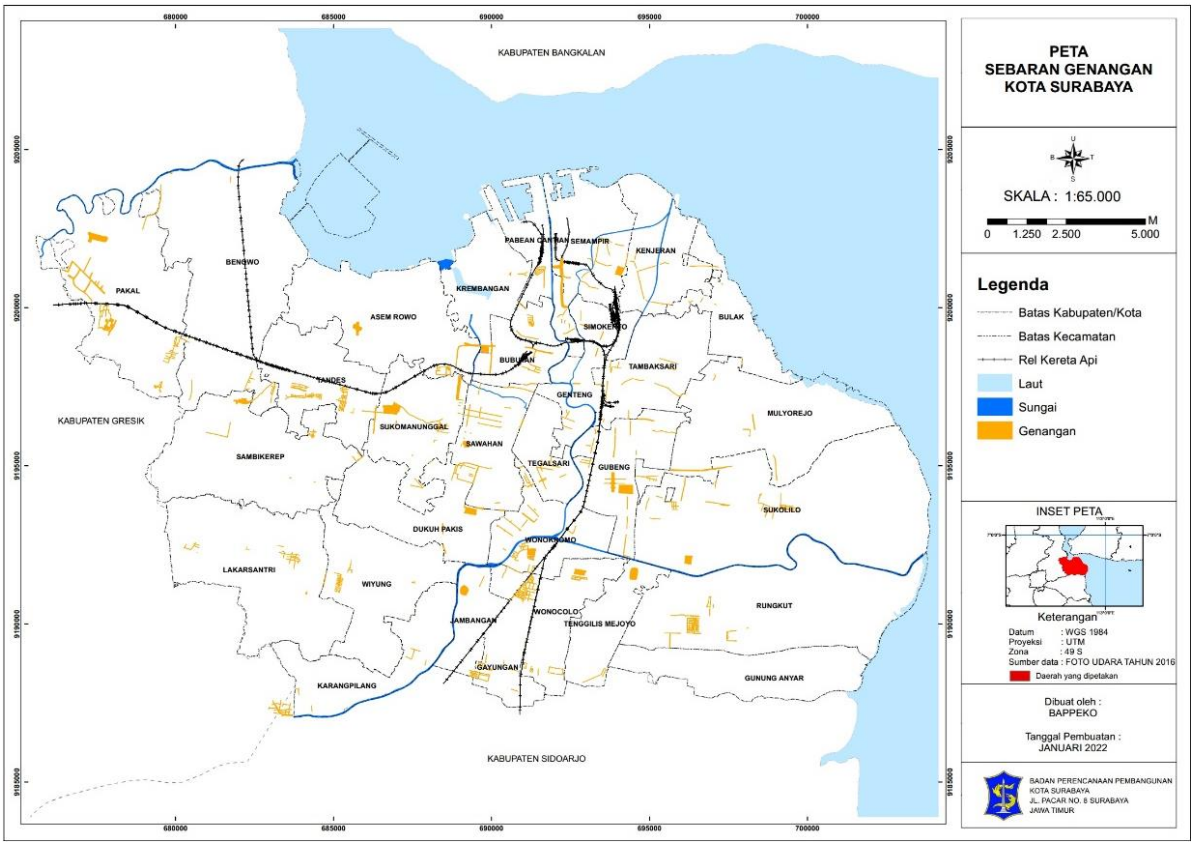


Gambar II.5
Peta Sesar Kendeng
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.



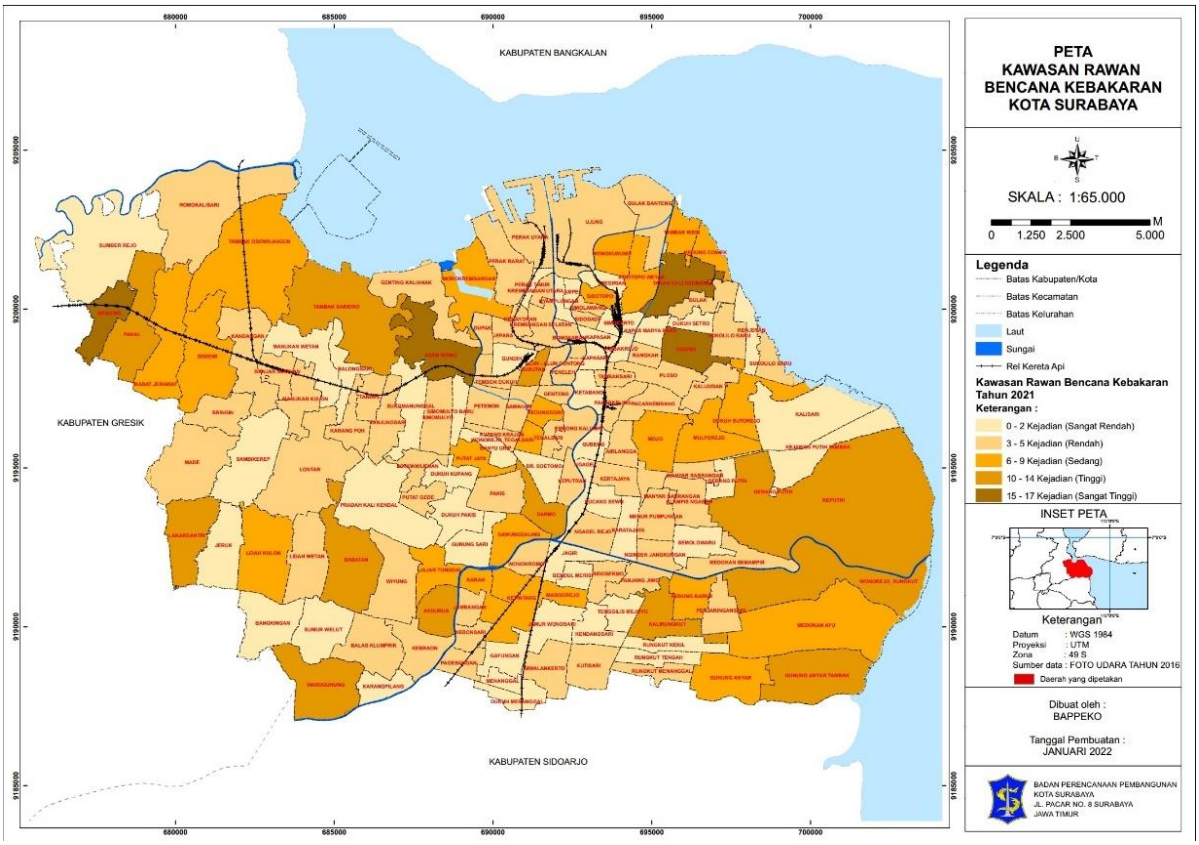
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara



Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya
Sumber: BAPPEDALITBANG Surabaya, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan

terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya
Sumber: BAPPEDALITBANG Surabaya, 2022

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang

dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dengan melakukan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.3
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung/ Angin Kencang	3	7	2	4	0
3	Kebakaran	496	515	608	705	248

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk 154 Kelurahan Tangguh bencana. Kelurahan tangguh bencana ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, upaya mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Data kelurahan Tangguh bencana Tahun 2017 – 2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	47	154	154	154	154

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2021 sebesar 2.970.952 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.5. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km^2 yaitu Kecamatan Bubutan, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan,

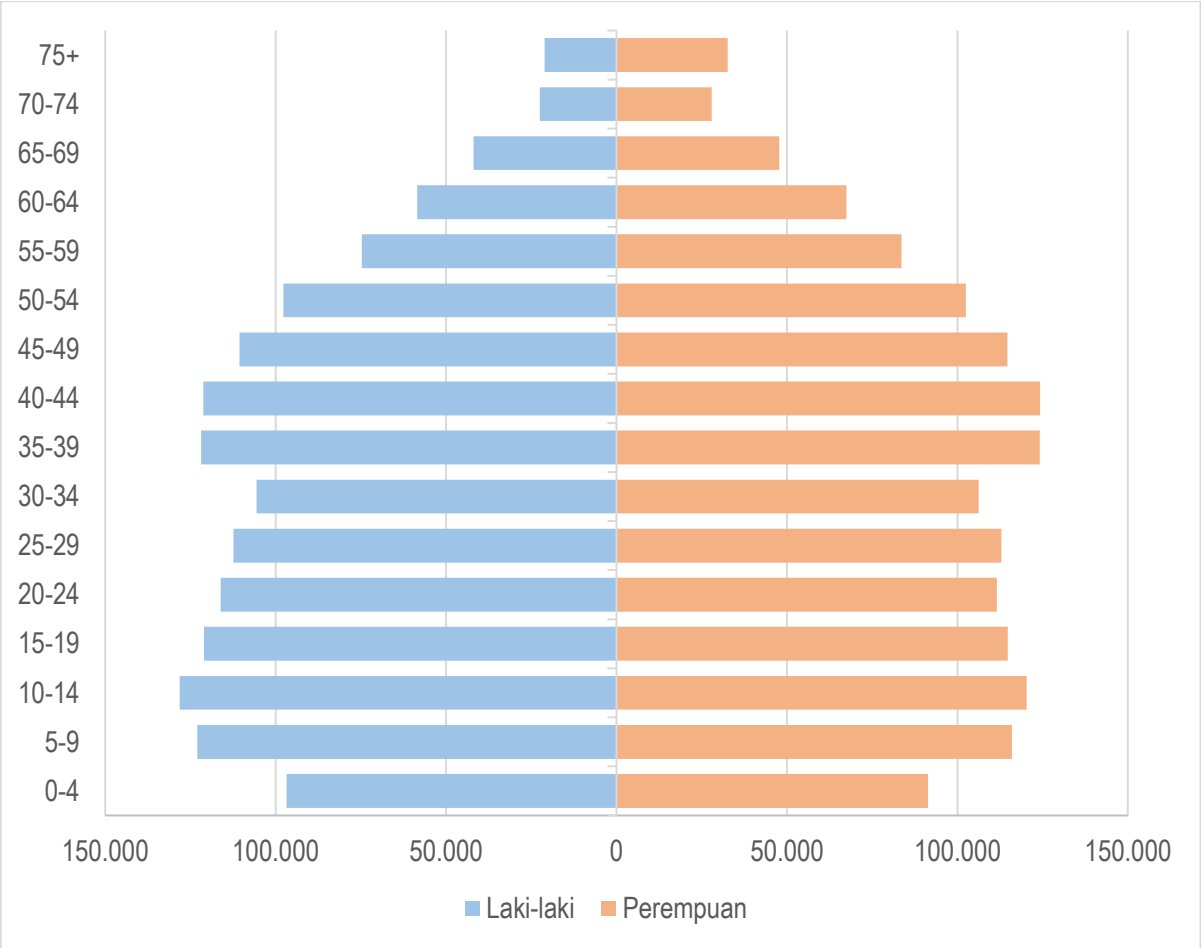
keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.5
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Asemrowo	15,32	47.036	3.069
2	Benowo	25,11	68.643	2.734
3	Bubutan	3,95	97.573	24.721
4	Bulak	5,66	45.420	8.020
5	Dukuh Pakis	10,95	59.564	5.438
6	Gayungan	5,51	43.336	7.859
7	Genteng	14,12	58.114	4.115
8	Gubeng	7,80	134.467	17.237
9	Gunung Anyar	9,77	59.673	6.109
10	Jambangan	4,54	52.851	11.645
11	Karang Pilang	9,98	74.341	7.452
12	Kenjeran	8,73	174.180	19.949
13	Krembangan	8,73	114.618	13.136
14	Lakarsantri	19,27	61.422	3.187
15	Mulyorejo	12,77	86.469	6.769
16	Pabean Cantian	5,58	74.820	13.418
17	Pakal	19,07	58.865	3.086
18	Rungkut	22,74	117.983	5.189
19	Sambikerep	16,72	65.638	3.926
20	Sawahan	7,07	200.341	28.350
21	Semampir	8,70	183.344	21.068
22	Simokerto	2,77	93.793	33.832
23	Sukolilo	28,72	111.762	3.891
24	Sukomanunggal	9,29	103.831	11.172
25	Tambaksari	9,30	225.180	24.207
26	Tandes	9,76	91.462	9.375
27	Tegalsari	4,29	98.288	22.908
28	Tenggilis Mejoyo	5,85	58.329	9.975
29	Wiyung	11,39	73.223	6.429
30	Wonocolo	6,54	79.260	12.128
31	Wonokromo	8,32	157.126	18.891

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.498.135 jiwa atau 50,43% penduduk perempuan dan 1.472.817 jiwa atau 49,57% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.



Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2021 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 177.135 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 297.369 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 148.573 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 138.779 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Triwulan II 2022

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	4.300	7.171	3.613	3.375
2	Benowo	4.744	7.789	3.920	3.580
3	Bubutan	7.117	11.761	5.597	5.128
4	Bulak	8.470	14.799	7.739	7.724
5	Dukuh Pakis	5.507	9.619	4.755	4.452
6	Gayungan	11.063	19.961	9.978	9.408
7	Genteng	3.151	5.375	2.847	2.634

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
8	Gubeng	7.092	12.412	6.369	6.030
9	Gunung Anyar	6.856	11.069	5.311	5.062
10	Jambangan	13.019	22.120	10.914	10.318
11	Karang Pilang	5.508	9.384	4.527	4.425
12	Kenjeran	4.507	7.440	3.788	3.613
13	Krembangan	5.658	9.627	4.963	4.624
14	Lakar Santri	5.528	9.435	4.755	4.288
15	Mulyorejo	6.933	11.590	5.794	5.465
16	Pabean Cantian	12.250	20.275	9.945	9.079
17	Pakal	11.932	19.014	9.326	8.517
18	Rungkut	3.769	6.220	3.211	2.908
19	Sambikerep	4.301	7.276	3.705	3.273
20	Sawahan	4.225	7.096	3.505	3.356
21	Semampir	3.455	5.802	2.893	2.613
22	Simokerto	2.507	4.145	2.167	2.033
23	Sukolilo	3.231	5.427	2.688	2.489
24	Sukomanunggal	3.538	5.610	2.821	2.560
25	Tambak Sari	3.772	6.015	2.870	2.664
26	Tandes	4.884	8.187	4.101	3.920
27	Tegalsari	6.139	10.378	5.019	4.698
28	Tenggilis Mejoyo	3.184	5.028	2.635	2.304
29	Wiyung	2.887	4.698	2.396	2.330
30	Wonocolo	3.690	6.026	3.129	2.849
31	Wonokromo	3.918	6.620	3.292	3.060
Jumlah		**177.135**	**297.369**	**148.573**	**138.779**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel II.7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2017	2018	2019	2020	2021
1. Islam	85,11%	85,35%	85,51%	85,70%	85,83%
2. Kristen	9,12%	8,98%	8,89%	8,75%	8,68%
3. Katholik	3,96%	3,94%	3,91%	3,90%	3,87%
4. Budha	1,50%	1,45%	1,42%	1,40%	1,37%

Agama	2017	2018	2019	2020	2021
5. Hindu	0,28%	0,25%	0,24%	0,22%	0,22%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2021, Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,83% sedangkan sebesar 14,17% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasayarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 83 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah penduduk dengan status Belum/tidak bekerja, sebesar 29,09 persen. Posisi kedua ditempati oleh Karyawan swasta yakni sebesar 27,04 persen, dan di posisi ketiga adalah Mengurus rumah tangga sebesar 17,83 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Triwulan II 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum / Tidak Bekerja	864.333	29,09280
2	Karyawan Swasta	803.328	27,03941
3	Mengurus Rumah Tangga	529.790	17,83233
4	Pelajar Mahasiswa	440.088	14,81303
5	Wiraswasta	155.692	5,24048
6	Pegawai Negeri Sipil	37.967	1,27794
7	Lainnya	29.885	1,00591
8	Guru	23.029	0,77514
9	Pensiunan	17.109	0,57588
10	Tentara Nasional Indonesia	10.827	0,36443
11	Pedagang	7.268	0,24464
12	Dosen	6.222	0,20943
13	Dokter	6.188	0,20828
14	Karyawan BUMN	6.113	0,20576
15	Buruh Harian Lepas	5.134	0,17281
16	Kepolisian RI	4.432	0,14918
17	Petani Pekebun	3.059	0,10296
18	Perawat	2.836	0,09546
19	Perdagangan	2.781	0,09361
20	Karyawan Honorer	2.258	0,07600
21	Sopir	1.915	0,06446
22	Tukang Batu	1.417	0,04770
23	Nelayan Perikanan	1.081	0,03639
24	Bidan	889	0,02992
25	Karyawan BUMD	645	0,02171
26	Pembantu Rumah Tangga	536	0,01804
27	Industri	505	0,01700
28	Tukang Jahit	493	0,01659
29	Pendeta	490	0,01649
30	Mekanik	391	0,01316
31	Apoteker	387	0,01303
32	Pelaut	323	0,01087
33	Buruh Tani Perkebunan	308	0,01037
34	Transportasi	276	0,00929
35	Konstruksi	266	0,00895
36	Tukang Kayu	264	0,00889
37	Wartawan	224	0,00754
38	Pengacara	221	0,00744
39	Notaris	189	0,00636
40	Konsultan	177	0,00596
41	Biarawati	154	0,00518

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
42	Tukang Las Pandai Besi	152	0,00512
43	Seniman	147	0,00495
44	Arsitek	125	0,00421
45	Tukang Listrik	117	0,00394
46	Buruh Nelayan Perikanan	88	0,00296
47	Juru Masak	82	0,00276
48	Akuntan	73	0,00246
49	Ustadz Mubaligh	72	0,00242
50	Penata Rias	71	0,00239
51	Penata Rambut	67	0,00226
52	Tukang Sol Sepatu	57	0,00192
53	Psikiater Psikolog	54	0,00182
54	Tukang Cukur	44	0,00148
55	Peneliti	44	0,00148
56	Peternak	30	0,00101
57	Pastor	26	0,00088
58	Pilot	20	0,00067
59	Penata Busana	18	0,00061
60	Penterjemah	18	0,00061
61	Anggota DPRD Kabupaten Kota	18	0,00061
62	Buruh Peternakan	16	0,00054
63	Penyiar Radio	16	0,00054
64	Perancang Busana	15	0,00050
65	Imam Masjid	14	0,00047
66	Tabib	10	0,00034
67	Anggota DPRD Provinsi	10	0,00034
68	Pialang	9	0,00030
69	Penyiar Televisi	8	0,00027
70	Tukang Gigi	7	0,00024
71	Anggota DPR RI	7	0,00024
72	Paraji	4	0,00013
73	Perangkat Desa	4	0,00013
74	Anggota Kabinet Kementerian	3	0,00010
75	Paranormal	3	0,00010
76	Promotor Acara	2	0,00007
77	Gubernur	2	0,00007
78	Walikota	2	0,00007
79	Wakil Walikota	2	0,00007
80	Kepala Desa	2	0,00007
81	Anggota BPK	1	0,00003
82	Bupati	1	0,00003
83	Wakil Bupati	1	0,00003

Sumber : Data Penduduk WNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (27,55 persen), merupakan lulusan SMA-sederajat. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 26,50 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD-sederajat sebanyak 14,07 persen.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan
Triwulan II 2022

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	787.338	26,50
Belum Tamat SD/setara	223.414	7,52
Tamat SD/setara	417.981	14,07
SMP/setara	357.518	12,04
SMA/setara	818.549	27,55
D1/D2	17.361	0,58
D3/Sarjana Muda	39.887	1,34
D4/S1	287.516	9,68
S2	19.976	0,67
S3	1.412	0,05
Total	**2.970.952**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kota Surabaya meningkat dari 81,07 pada tahun 2017 menjadi 82,31 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,55 % per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, dan merupakan angka tertinggi level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.10
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
IPM Kota Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	N/A
IPM Provinsi Jawa Timur	70,77	71,5	71,71	72,14	N/A
IPM Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022

Standar hidup layak dapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.11
Pengeluaran per Kapita disesuaikan di kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pengeluaran per Kapita (Rp 000)	17.157	17.854	17.755	17.826	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 17,826 juta rupiah per tahun.

2.1.2.1.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tabels* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2021, sebesar Rp590.249.836,50 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020, sebesar Rp554.509.457,38 juta. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2021 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp163.509.913,20 juta atau sebesar 27,70%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp113.544.581,10 juta atau sebesar 19,24% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.12.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp390.936.424,98 juta meningkat menjadi sebesar juta di Rp407.726.799,20 tahun 2021. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp114.183.332,30 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp79.366.597,60 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp57.221.633,10 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.13 berikut.

Tabel II.12
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – Triwulan II 2022 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		TW II 2022	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	101.196.564,52	18,78	109.245.937,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.167.327,31	27,68	161.141.233,33	27,75	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.056.324,46	16,15	95.537.038,24	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,06	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	N/A	N/A
L	Real Estate	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	1,36	8.154.990,77	1,40	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,40	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		**538.954.457,78**	**100,00**	**580.756.010,69**	**100,00**	**554.509.457,38**	**100,00**	**590.227.966,81**	**100,00**	**N/A**	**N/A**

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Tabel II.13

Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – Triwulan II 2022 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		TW II 2022	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	73.328.747,38	18,93	77.312.368,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	N/A	N/A
F	Konstruksi	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.870.324,37	28,37	116.343.590,22	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.419.739,39	15,08	62.898.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74	N/A	N/A
L	Real Estate	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		**387.340.042,93**	**100,00**	**410.969.893,87**	**100,00**	**390.936.424,98**	**100,00**	**407.726.799,20**	**100,00**	**N/A**	**N/A**

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Tabel II.14
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		TW II 2022	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	18,78	18,93	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	0,40	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	N/A	N/A
F	Konstruksi	9,82	9,93	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,68	28,37	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	5,35	4,92	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,15	15,08	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	5,27	6,61	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,22	4,79	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74	N/A	N/A
L	Real Estate	2,56	2,62	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	2,52	2,29	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,36	1,21	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	2,39	2,34	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,78	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,41	1,42	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**N/A**	**N/A**

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan

minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Di samping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2017-2021 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 26-27 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11.5. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2021, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan

jaminan sosial wajib. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi pada masa pandemi ini adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; kategori pengadaan listrik dan gas; kategori informasi dan komunikasi; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori pertambangan dan penggalian; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori jasa pendidikan; serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan asli daerah yang disebabkan belum pulihnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayarkan kewajiban berupa pajak dan retribusi lainnya.

Tabel II.15
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,44	-0,90	-4,90	1,11	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	1,06	0,09	-6,34	0,08	N/A
C	Industri Pengolahan	4,93	5,43	-1,15	3,90	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,07	0,41	-6,25	6,10	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,32	3,92	4,02	5,63	N/A
F	Konstruksi	6,28	5,45	-5,39	4,38	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	5,89	-8,57	7,37	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	7,56	7,62	-4,98	2,05	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,80	7,67	-10,87	2,08	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	6,83	7,49	7,19	6,00	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	3,49	0,23	0,49	N/A
L	Real Estate	5,78	6,09	2,00	1,63	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	7,12	6,84	-7,11	1,97	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,17	3,64	-2,33	-0,12	N/A
P	Jasa Pendidikan	6,24	6,66	2,75	0,59	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,81	7,64	8,75	5,17	N/A

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,18	5,94	-16,30	2,76	N/A
PDRB		**6,20**	**6,10**	**-4,85**	**4,29**	**N/A**
PDRB TANPA MIGAS		**6,20**	**6,10**	**-4,85**	**4,29**	**N/A**

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya bergerak positif sehingga pada tahun 2021 tercapai pada angka 4,29. Kendati demikian, belum seluruh sektor kembali pulih pada kondisi sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 utamanya pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu, dalam pelaksananaan anggaran tahun 2022 tetap difokuskan pada pemulihan ekonomi utamanya sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

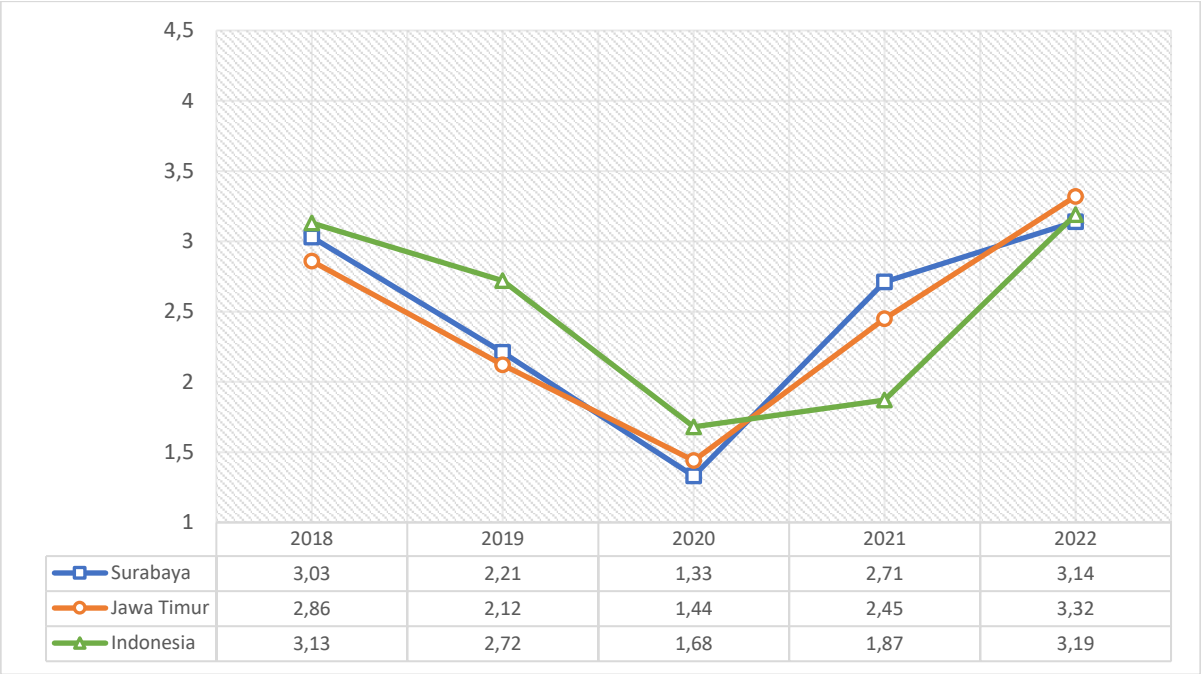
Tabel II.16
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018 – Triwulan II 2022 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Surabaya	6,19	6,10	-4,85	4,29	N/A
Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,57	5,20
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,01

Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2022

2.1.2.1.4 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2022, sampai dengan bulan Juni, tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 3,14 persen. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan inflasi di tahun 2021 sebesar 2,71 persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



	2018	2019	2020	2021	2022
Surabaya	3,03	2,21	1,33	2,71	3,14
Jawa Timur	2,86	2,12	1,44	2,45	3,32
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	3,19

Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2018 – Triwulan II 2022
Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2022

Berdasarkan data rilis BPS Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni sebesar 3,14 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 2,71 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga tetap perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

2.1.2.1.5 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per

kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2018 – Triwulan II 2022.

Tabel II.17
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	186,74	200,43	193,01	204,92	N/A
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	387.303,94	410.879,31	390.936,42	407.726,80	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	134,22	141,87	136,07	141,56	N/A
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.886	2.897	2.873	2.880	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, versi Bulan September yang dirilis BPS,

indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan keduanya. Meski demikian, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.18
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Indeks Gini	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Kota Surabaya	0,358	0,406	0,344	0,351	N/A
Jawa Timur	0,379	0,369	0,366	0,364	0,371
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,384

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

2.1.2.1.7 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp474.365 dan meningkat menjadi Rp530.178 pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehinggga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,54%. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2019 meningkat menjadi Rp567.474, tetapi jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2018 sebanyak 140.810 menjadi 130.550 sehingga angka kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2019 turun menjadi 4,51 persen. Sedangkan pada tahun 2020, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp592.197 dan angka kemiskinan juga meningkat menjadi 5,02 persen. Demikian juga yang terjadi di tahun 2021, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp592.197 dan angka kemiskinan ikut meningkat menjadi 5,23 persen. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 masih berlangsung pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi

dan daya serap tenaga kerja. Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan 2022

Uraian	Lingkup	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya	4,88	4,51	5,02	5,23	N/A
	Jawa Timur	10,98	10,37	11,09	11,40	10,38
	Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	Surabaya	530.178	567.474	592.137	611.466	N/A
	Jawa Timur	373.574	397.687	416.001	429.133	460.909
	Nasional	401.220	425.250	454.652	472.525	505.469
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya	140,81	130,55	145,67	152,489	N/A
	Jawa Timur	4.332,59	4.112,25	4.419,10	4.572,73	4.181,29
	Nasional	25.949,80	25.144.72	26.424,02	27.542,77	26.161,16

Sumber: BPS, Maret 2022

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity)* per hari. Menggunakan definisi tersebut, kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya pada Tahun 2020 yaitu sebesar 69.330 jiwa atau 2,39% (data Susenas 2020). Pada tahun 2021 jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 152.490 jiwa atau 5,23% (data Susenas 2021). Kota Surabaya sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem antara lain dengan cara mendorong pelaksanaan padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sudah sebesar 100 persen sejak tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.157.098 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 2.458.655, pada tahun 2020 sebanyak 2.460.443 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 2.295.394 jiwa, pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni sebanyak 2.295.394 jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 sampai dengan bulan Juni disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394	2.295.394
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394	2.295.394
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat

partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM jenjang SD/MI pada tahun 2017 sebesar 95,02 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 85,06 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 97,24 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,17 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebesar 98,88 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 84,58 persen. Sedangkan pada tahun 2020, APM jenjang SD/MI sebesar 98,46 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,58 persen. Kemudian pada tahun 2021 APM jenjang SD/MI sebesar 100,82 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,34 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	APM SD/MI (persen)	97,24	98,88	98,46	100,82	90,95
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	274.104	291.907	295.357	299.814	270.461
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	286.373	303.021	299.966	297.369	297.369
2	APM SMP/MTs (persen)	87,17	84,58	87,58	87,34	78,66
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	118.636	123.398	126.874	129.763	116.864
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.554	146.952	144.872	148.573	148.573

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	101,73	94,34	92,73	99,80	100,12
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	105,49	100,04	90,59	103,13	102,20

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	APK PAUD (persen)	66,36	68,07	69,36	69,59	55,46
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	119.047	125.941	124.883	123.269	98.243
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	179.389	185.012	180.053	177.135	177.135
2.	APK SD/MI (persen)	103,79	105,86	104,30	106,90	105,42
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	287.830	310.982	312.873	317.885	313.472
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	286.373	303.021	299.966	297.369	297.369
3.	APK SMP/MTs (persen)	94,39	86,49	98,93	110,64	108,36
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	129.136	135.629	143.329	164.376	161.064
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.554	146.952	144.872	148.573	148.573

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-Rata Lama Sekolah	10,46	10,47	10,49	10,5	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Angka Harapan Lama Sekolah	14,78	14,79	14,8	14,81	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2021 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1).

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, bahkan hingga Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks pendidikan bagi masyarakat/warga Kota Surabaya.

2.1.2.2.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.26
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Angka Harapan Hidup	73,98	74,13	74,18	74,18	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 73,98 tahun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 74,13 tahun, serta meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,18 tahun. Sedangkan di tahun 2021, meski kondisi pandemi, AHH penduduk Kota Surabaya dapat dipertahankan di 74,18 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2018 sebesar 0,14 persen, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,12 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 0,11 persen, serta pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,10 persen. Sedangkan sampai dengan bulan Juni 2022, persentasenya sebesar 0,04 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2018 hingga Triwulan II tahun 2022.

Tabel II.27
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	254	224	196	148	60
2	Jumlah balita yang ditimbang	181.842	183.286	178.043	148.720	151.461
3	Persentase (persen)	0,14	0,12	0,11	0,10	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Tabel II.28
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	15.274	15.060	14.813	6.348	1.409
2	Jumlah balita yang ditimbang	181.842	180.328	178.043	148.720	151.461
3	Persentase (persen)	8,39	8,35	8,32	4,27	0,93

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Tabel II.29
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			TW II 2022		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	4	3.369	0,12%	3	3.228	0,09%	3	2.875	0,10%	12	3.257	0,37%	2	3.306	0,06%
2	Kec. Benowo	4	4.559	0,09%	4	4.392	0,09%	1	4.577	0,02%	1	3.475	0,03%	0	4.259	0,00%
3	Kec. Bubutan	3	5.989	0,05%	1	5.793	0,02%	3	5.567	0,05%	4	5.008	0,08%	2	5.007	0,04%
4	Kec. Bulak	4	2.839	0,14%	5	2.802	0,18%	2	2.774	0,07%	6	2.645	0,23%	0	2.662	0,00%
5	Kec. Dukuh Pakis	4	3.293	0,12%	3	3.148	0,10%	1	3.084	0,03%	6	2.167	0,28%	3	1.901	0,16%
6	Kec. Gayungan	2	2.338	0,09%	4	2.249	0,18%	1	2.210	0,05%	1	1.828	0,05%	1	1.752	0,06%
7	Kec. Genteng	11	3.257	0,34%	11	3.265	0,34%	7	3.211	0,22%	5	3.181	0,16%	0	3.381	0,00%
8	Kec. Gubeng	0	7.268	0,00%	0	7.592	0,00%	2	6.878	0,03%	1	6.056	0,02%	0	6.164	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	2	3.483	0,06%	0	4.087	0,00%	2	3.895	0,05%	0	3.383	0,00%	0	1.592	0,00%
10	Kec. Jambangan	3	3.587	0,08%	0	3.529	0,00%	2	3.479	0,06%	0	3.280	0,00%	0	3.355	0,00%
11	Kec. Karang Pilang	2	4.347	0,05%	5	4.372	0,11%	5	4.390	0,11%	0	4.552	0,00%	0	4.072	0,00%
12	Kec. Kenjeran	15	11.822	0,13%	15	14.034	0,11%	12	13.647	0,09%	8	10.635	0,08%	10	9.990	0,10%
13	Kec. Krembangan	2	7.987	0,03%	2	7.832	0,03%	4	7.480	0,05%	3	6.197	0,05%	1	6.131	0,02%
14	Kec. Lakarsantri	9	3.670	0,25%	4	4.158	0,10%	4	4.209	0,10%	5	2.857	0,18%	14	2.808	0,50%
15	Kec. Mulyorejo	4	5.589	0,07%	0	5.616	0,00%	4	5.513	0,07%	3	2.368	0,13%	0	2.929	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	5	4.357	0,11%	2	4.249	0,05%	1	4.195	0,02%	1	3.478	0,03%	0	3.390	0,00%
17	Kec. Pakal	16	4.394	0,36%	36	4.093	0,88%	20	3.895	0,51%	8	3.841	0,21%	2	3.854	0,05%
18	Kec. Rungkut	8	7.304	0,11%	8	7.163	0,11%	5	7.154	0,07%	2	5.186	0,04%	0	5.585	0,00%
19	Kec. Sambikerep	5	4.229	0,12%	5	3.400	0,15%	2	4.350	0,05%	4	3.317	0,12%	1	3.760	0,03%
20	Kec. Sawahan	14	12.380	0,11%	15	12.064	0,12%	21	11.869	0,18%	10	10.349	0,10%	2	10.110	0,02%
21	Kec. Semampir	24	11.740	0,20%	21	11.680	0,18%	10	11.719	0,09%	11	9.578	0,11%	2	10.926	0,02%
22	Kec. Simokerto	9	5.694	0,16%	8	3.626	0,22%	3	3.754	0,08%	7	4.887	0,14%	2	4.875	0,04%

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			TW II 2022		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
23	Kec. Sukolilo	2	6.540	0,03%	3	6.845	0,04%	7	6.760	0,10%	1	4.759	0,02%	0	5.855	0,00%
24	Kec. Sukomanunggal	60	6.657	0,90%	59	6.405	0,92%	43	6.387	0,67%	22	5.558	0,40%	1	5.557	0,02%
25	Kec. Tambaksari	18	12.229	0,15%	6	11.963	0,05%	9	12.227	0,07%	6	10.767	0,06%	0	11.040	0,00%
26	Kec. Tandes	4	6.108	0,07%	4	6.263	0,06%	5	6.125	0,08%	2	5.864	0,03%	0	6.013	0,00%
27	Kec. Tegalsari	7	5.884	0,12%	7	5.646	0,12%	7	5.594	0,13%	12	3.960	0,30%	9	3.238	0,28%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	3.022	0,00%	0	3.058	0,00%	1	2.947	0,03%	0	2.714	0,00%	0	2.714	0,00%
29	Kec. Wiyung	3	4.318	0,07%	3	4.316	0,07%	1	4.324	0,02%	3	2.395	0,13%	1	2.867	0,03%
30	Kec. Wonocolo	5	4.859	0,10%	4	4.925	0,08%	3	4.959	0,06%	2	4.261	0,05%	0	4.237	0,00%
31	Kec. Wonokromo	5	8.730	0,06%	4	8.535	0,05%	5	7.995	0,06%	2	6.917	0,03%	7	8.131	0,09%
Total		**254**	**181.842**	**0,14%**	**242**	**180.328**	**0,13%**	**196**	**178.043**	**0,11%**	**148**	**148.720**	**0,10%**	**60**	**151.461**	**0,04%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.30
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	31	25	24	17	N/A
2	Kelahiran Hidup	42.474	42.145	41.814	40.158	80.024
3	AKI per 100.000 KH	72,99	59,32	57,40	42,33	N/A

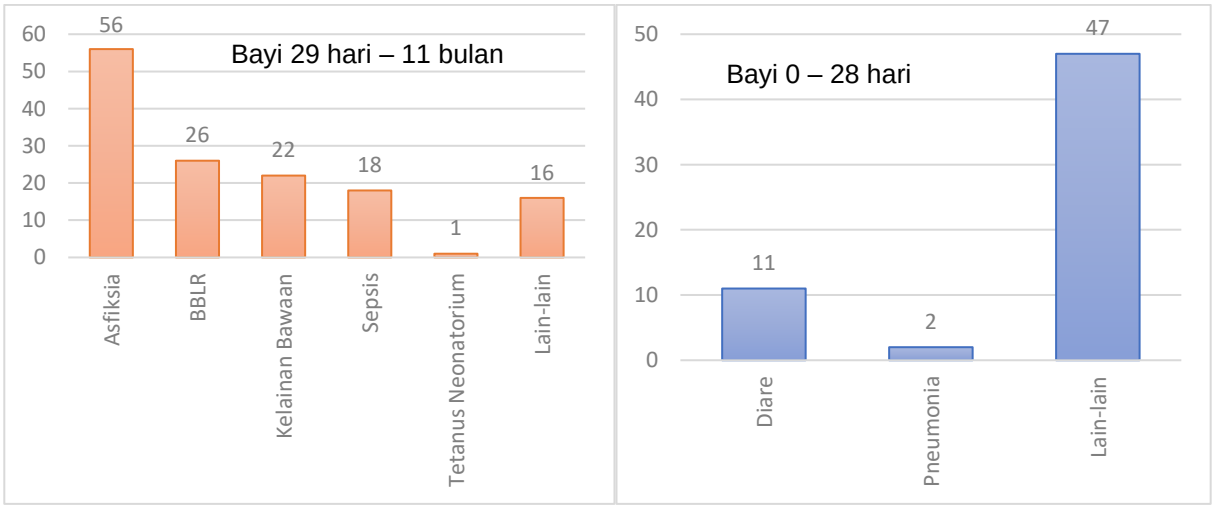
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup terus berkurang dari tahun 2017 sebesar 79,40 menjadi 42,33 pada tahun 2021. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sebesar 5,11 terus berkurang menjadi 4,96 pada tahun 2021. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan, ketiganya menyumbang 58,65 persen dari 208 bayi yang meninggal di tahun 2020.

Tabel II.31
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah bayi lahir meninggal	214	211	208	199	N/A
2	Kelahiran Hidup	42.474	42.145	41.814	40.158	40.012
3	AKB per 1.000 KH	5,04	5,01	4,97	4,96	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

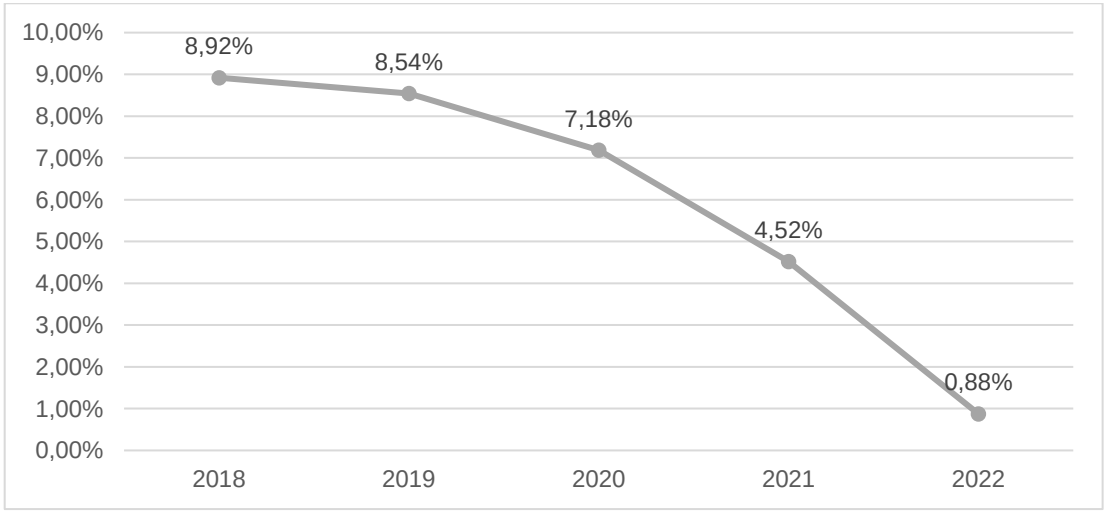


Gambar II.11
Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2021
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 diolah

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2018 sebesar 8,92 persen menjadi hanya 4,52 persen pada tahun 2021, serta sampai dengan bulan Juni tahun 2022, tercatat sebesar 0,88 persen. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.12 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2018 – Triwulan II 2022
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat,

namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2021 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,68 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 – Triwulan II 2022.

Tabel II.32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	93.096	130.459	154.933	152.273	N/A
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.520.041	2.222.469	1.582.564	1.572.888	N/A
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,12	5,87	9,79	9,68	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 2.222.469 di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79 persen. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2021, namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 9,68 persen.

Tabel II.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 208 – Triwulan II 2022

TPT	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Kota Surabaya	6,12	5,87	9,79	9,68	N/A
Jawa Timur	3,91	3,82	5,84	5,74	4,81

TPT	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Nasional	5,30	5,23	7,07	6,50	5,83

Sumber data: BPS, 2022

Dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT kota Surabaya cukup fluktuatif. Namun pada tahun 2020 angka TPT sangat tinggi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak adanya pandemi Covid-19.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

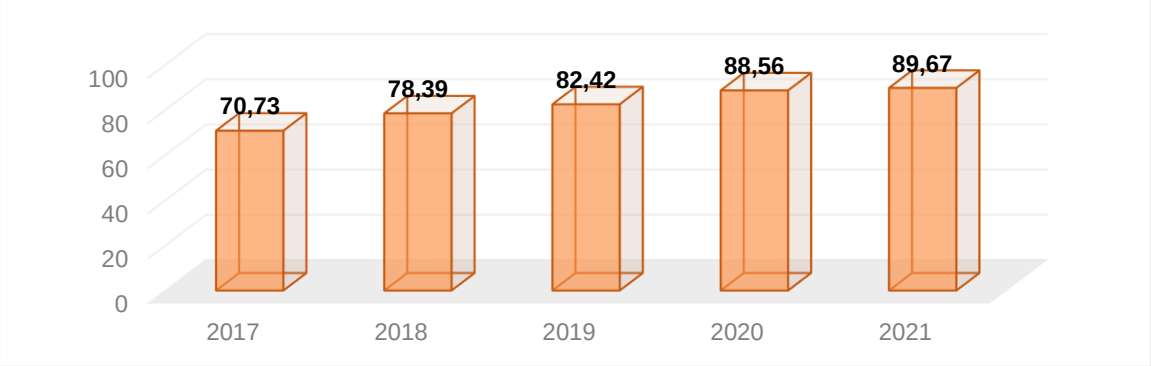
Tabel II.34
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Grup Kesenian	611	731	771	743	743
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	42	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2018 sebanyak 611 grup kesenian, tahun 2019 meningkat menjadi 731 grup kesenian dan sampai dengan triwulan II tahun 2022 meningkat menjadi 743 grup kesenian. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/pertunjukan seni di ruang publik. Adapun even pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Surabaya Vaganza, Mlaku-mlaku Nang Tunjungan, Festival Rujak Uleg, Festival Cipta Karya Tari serta Festival *Cross Culture*.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2017 hingga 2021, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2017–2021
(sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022)

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2021 realisasinya 89,67%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 70,73%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2021 sebanyak 42 cabang olahraga. Pada tahun 2021 sejumlah 416 orang atlet dari 31 cabang olahraga meraih prestasi di kejuaraan skala provinsi, nasional dan internasional. Dengan keterbatasan even kejuaraan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, capaian tersebut cukup memuaskan. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2021, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 5 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila. Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2021 lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 586 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan menembak. Pembinaan atlet

juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk Tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.35
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya
Triwulan II 2022

No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini; Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah total yang terlayani	97.142 orang	106,81%
			Jumlah total yang harus dilayani	90.951 orang	
		Pendidikan Dasar; Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Jumlah total yang terlayani	450.043 orang	100,85%
			Jumlah total yang harus dilayani	446.251 orang	
		Pendidikan Kesetaraan; Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah total yang terlayani	2.142 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	2.142 orang	
2	Kesehatan	Kesehatan Ibu Hamil; Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	43.901 orang	99,38%
			Jumlah total yang harus dilayani	44.174 orang	
		Kesehatan Ibu Bersalin; Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	42.008 orang	99,63%
			Jumlah total yang harus dilayani	42.164 orang	

No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
		Kesehatan Bayi Baru Lahir; Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pela-yanan kesehatan bayi baru lahirsesuai standar	Jumlah total yang terlayani	41.967 bayi	104,50%
			Jumlah total yang harus dilayani	40.158 bayi	
		Kesehatan Balita; Cakupan balita usia 0- 59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	151.550 orang	91,59%
			Jumlah total yang harus dilayani	165.467 orang	
		Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah total yang terlayani	358.605 orang	107,68%
			Jumlah total yang harus dilayani	333.018 orang	
		Kesehatan pada Usia Produktif; Persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	1.804.530 orang	88,33%
			Jumlah total yang harus dilayani	2.042.911 orang	
		Kesehatan pada Usia Lanjut; Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	316.075 orang	108,23%
			Jumlah total yang harus dilayani	292.030 orang	
		Kesehatan Penderita Hipertensi; Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	625.943 orang	84,90%
			Jumlah total yang harus dilayani	737.254 orang	
		Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Persentase penyandang	Jumlah total yang terlayani	103.819 orang	107,83%

No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
		DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang harus dilayani	96.280 orang	
		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	4.605 orang	83,05%
			Jumlah total yang harus dilayani	5.545 orang	
		Kesehatan Orang dengan TB; Persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	68.623 orang	126,09%
			Jumlah total yang harus dilayani	54.422 orang	
		Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV; Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah total yang terlayani	52.598 orang	107,16%
			Jumlah total yang harus dilayani	49.084 orang	
3	Pekerjaan Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah total yang terlayani	2.822.902 orang	98,21%
			Jumlah total yang harus dilayani	2.874.314 orang	
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestic	Jumlah total yang terlayani	400 rumah	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	400 rumah	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Jumlah total yang terlayani	26 orang	100,00%

No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
		bencana provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah total yang harus dilayani	26 orang	
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total yang terlayani	-	Pada tahun 2021 tidak ada Program Pemerintah Kota Surabaya yang memindah rumah tinggal masyarakat
			Jumlah total yang harus dilayani	-	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah total yang terlayani	-	Tidak ada penegakan perda yang membutuhkan ganti rugi kerugian materil dan kerugian pengobatan
			Jumlah total yang harus dilayani	-	
		Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah total yang terlayani	14.818 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	14.818 orang	
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah total yang terlayani	57.148 orang	98, 57 %
			Jumlah total yang harus dilayani	57.978 orang	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah total yang terlayani	-	Indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan kepada seluruh kelurahan tangguh bencana dengan melibatkan seluruh warga
			Jumlah total yang harus dilayani	-	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah total yang terlayani	324 orang	100,00%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah total yang terlayani	669 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	669 orang	

No.	Bidang Urusan	Indikator Capaian	Rumus	Elemen Data	Capaian
6	Sosial	Pelayanan sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	480 orang	72,73%
			Jumlah total yang harus dilayani	660 orang	
		Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	225 orang	55,55%
			Jumlah total yang harus dilayani	405 orang	
		Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	960 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	960 orang	
		Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah total yang terlayani	5.233 orang	76,50%
			Jumlah total yang harus dilayani	6.840 orang	
		Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah total yang terlayani	266 orang	100,00%
			Jumlah total yang harus dilayani	266 orang	

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.36
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Triwulan II 2022

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.184	1.633	51,29%	5.028	4.326	86,04%	2.635	2.264	85,92%
Benowo	4.301	2.835	65,91%	7.276	7.686	105,63%	3.705	4.008	108,18%
Bubutan	5.658	2.902	51,29%	9.627	9.744	101,22%	4.963	2.550	51,38%
Bulak	2.887	1.612	55,84%	4.698	6.756	143,81%	2.396	3.280	136,89%
Dukuh Pakis	3.455	2.474	71,61%	5.802	6.937	119,56%	2.893	4.428	153,06%
Gayungan	2.507	1.415	56,44%	4.145	6.343	153,03%	2.167	2.765	127,60%
Genteng	3.151	2.155	68,39%	5.375	6.772	125,99%	2.847	6.298	221,22%
Gubeng	7.092	4.257	60,03%	12.412	14.646	118,00%	6.369	5.178	81,30%
Gunung Anyar	3.772	2.492	66,07%	6.015	5.212	86,65%	2.870	2.151	74,95%
Jambangan	3.231	1.513	46,83%	5.427	5.528	101,86%	2.688	4.553	169,38%
Karangpilang	4.300	2.667	62,02%	7.171	7.093	98,91%	3.613	3.977	110,07%
Kenjeran	11.932	5.537	46,40%	19.014	19.299	101,50%	9.326	11.192	120,01%
Krembangan	6.933	3.501	50,50%	11.590	14.284	123,24%	5.794	9.570	165,17%
Lakarsantri	3.769	2.298	60,97%	6.220	9.437	151,72%	3.211	5.669	176,55%
Mulyorejo	4.884	3.636	74,45%	8.187	11.559	141,19%	4.101	6.785	165,45%
Pabean Cantian	4.507	1.860	41,27%	7.440	4.738	63,68%	3.788	1.860	49,10%
Pakal	3.690	2.673	72,44%	6.026	8.139	135,06%	3.129	3.927	125,50%
Rungkut	7.117	4.421	62,12%	11.761	12.194	103,68%	5.597	6.242	111,52%
Sambikerep	3.918	2.160	55,13%	6.620	6.845	103,40%	3.292	5.215	158,41%
Sawahan	11.063	5.011	45,30%	19.961	16.716	83,74%	9.978	4.860	48,71%
Semampir	12.250	5.300	43,27%	20.275	21.330	105,20%	9.945	6.919	69,57%

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	5.508	3.680	66,81%	9.384	7.637	81,38%	4.527	4.044	89,33%
Sukolilo	6.856	3.782	55,16%	11.069	13.456	121,56%	5.311	8.447	159,05%
Sukomanunggal	6.139	3.483	56,74%	10.378	10.858	104,63%	5.019	7.315	145,75%
Tambaksari	13.019	6.479	49,77%	22.120	19.010	85,94%	10.914	7.109	65,14%
Tandes	5.528	4.243	76,75%	9.435	12.347	130,86%	4.755	4.153	87,34%
Tegalsari	5.507	2.692	48,88%	9.619	10.576	109,95%	4.755	3.701	77,83%
Tenggilis Mejoyo	3.538	2.152	60,83%	5.610	5.831	103,94%	2.821	3.558	126,13%
Wiyung	4.225	2.679	63,41%	7.096	7.514	105,89%	3.505	3.510	100,14%
Wonocolo	4.744	2.355	49,64%	7.789	8.417	108,06%	3.920	6.088	155,31%
Wonokromo	8.470	4.333	51,16%	14.799	12.242	82,72%	7.739	9.448	122,08%
Total	**177.135**	**98.230**	55,45%	**297.369**	**313.472**	**105,42%**	**148.573**	**161.064**	**108,41%**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022 diolah

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.37
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Triwulan II 2022

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.028	3.666	72,91%	2.635	1.685	63,95%
Benowo	7.276	6.688	91,92%	3.705	3.010	81,24%
Bubutan	9.627	8.477	88,05%	4.963	1.814	36,55%
Bulak	4.698	5.917	125,95%	2.396	2.422	101,09%
Dukuh Pakis	5.802	5.960	102,72%	2.893	3.157	109,13%
Gayungan	4.145	5.511	132,96%	2.167	2.062	95,15%
Genteng	5.375	5.817	108,22%	2.847	4.802	168,67%
Gubeng	12.412	12.744	102,67%	6.369	3.711	58,27%
Gunung Anyar	6.015	4.501	74,83%	2.870	1.562	54,43%
Jambangan	5.427	4.816	88,74%	2.688	3.347	124,52%
Karangpilang	7.171	6.145	85,69%	3.613	2.968	82,15%
Kenjeran	19.014	16.730	87,99%	9.326	8.049	86,31%
Krembangan	11.590	12.243	105,63%	5.794	6.996	120,75%
Lakarsantri	6.220	8.094	130,13%	3.211	4.098	127,62%
Mulyorejo	8.187	9.792	119,60%	4.101	4.666	113,78%
Pabean Cantian	7.440	4.084	54,89%	3.788	1.380	36,43%
Pakal	6.026	7.030	116,66%	3.129	2.805	89,65%
Rungkut	11.761	10.482	89,13%	5.597	4.638	82,87%
Sambikerep	6.620	5.891	88,99%	3.292	3.717	112,91%
Sawahan	19.961	14.505	72,67%	9.978	3.446	34,54%
Semampir	20.275	18.172	89,63%	9.945	4.813	48,40%
Simokerto	9.384	6.634	70,69%	4.527	2.945	65,05%
Sukolilo	11.069	11.541	104,26%	5.311	6.099	114,84%
Sukomanunggal	10.378	9.270	89,32%	5.019	5.497	109,52%
Tambaksari	22.120	16.658	75,31%	10.914	5.036	46,14%
Tandes	9.435	10.653	112,91%	4.755	3.003	63,15%
Tegalsari	9.619	9.110	94,71%	4.755	2.657	55,88%
Tenggilis Mejoyo	5.610	5.037	89,79%	2.821	2.621	92,91%
Wiyung	7.096	6.419	90,46%	3.505	2.604	74,29%
Wonocolo	7.789	7.302	93,75%	3.920	4.302	109,74%
Wonokromo	14.799	10.572	71,44%	7.739	6.952	89,83%
Total	**297.369**	**270.461**	**90,95%**	**148.573**	**116.864**	**78,66%**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Dari data di atas terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2018 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2022. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2018 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2022. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.38
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	44.223	46.127	41.677	41.182	43.778
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	44.223	46.127	41.677	41.182	43.778
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	42.282	40.965	38.403	37.413	38.385
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	42.282	40.965	38.403	37.413	38.385

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.1 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2018 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sampai dengan tahun 2022. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 0,00% dan konsisten sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2	Jumlah Siswa SD/MI	287.830	309.427	312.873	317.885	313.472
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs	129.136	134.215	143.329	156.083	160.991

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

2.1.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar

masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:339	1:356	1:325	1:358	1:358
1.1.	Jumlah gedung sekolah	846	851	857	831	831
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	286.373	303.021	278.601	297.369	297.369
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:350	1:357	1:357	1:372	1:372
2.1.	Jumlah gedung sekolah	404	412	413	399	399
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	141.554	146.952	147.458	148.573	148.573

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Tabel II.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Triwulan II 2022

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	10	17	5.028	1:306	3	4	7	2.635	1:376
Benowo	14	5	19	7.276	1:383	4	2	6	3.705	1:617
Bubutan	29	2	31	9.627	1:310	8	0	8	4.963	1:620
Bulak	12	6	18	4.698	1:261	4	2	6	2.396	1:399
Dukuh Pakis	22	1	23	5.802	1:252	12	1	13	2.893	1:222
Gayungan	14	1	15	4.145	1:276	5	1	6	2.167	1:361
Genteng	20	1	21	5.375	1:256	12	0	12	2.847	1:237
Gubeng	24	5	29	12.412	1:428	13	0	13	6.369	1:490
Gununganyar	14	1	15	6.015	1:401	8	1	9	2.870	1:319
Jambangan	7	5	12	5.427	1:452	6	1	7	2.688	1:384
Karangpilang	12	3	15	7.171	1:478	8	0	8	3.613	1:452
Kenjeran	18	20	38	19.014	1:500	13	9	22	9.326	1:424
Krembangan	31	7	38	11.590	1:305	17	2	19	5.794	1:305
Lakarsantri	22	5	27	6.220	1:230	10	2	12	3.211	1:268
Mulyorejo	24	0	24	8.187	1:341	15	0	15	4.101	1:273
Pabean Cantian	14	4	18	7.440	1:413	5	1	6	3.788	1:631
Pakal	15	6	21	6.026	1:287	7	3	10	3.129	1:312

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Rungkut	24	5	29	11.761	1:405	10	2	12	5.597	1:466
Sambikerep	15	6	21	6.620	1:315	16	3	19	3.292	1:173
Sawahan	42	0	42	19.961	1:475	13	1	14	9.978	1:713
Semampir	34	34	68	20.275	1:298	15	16	31	9.945	1:321
Simokerto	18	6	24	9.384	1:391	9	3	12	4.527	1:377
Sukolilo	32	1	33	11.069	1:335	16	2	18	5.311	1:295
Sukomanunggal	27	1	28	10.378	1:371	16	2	18	5.019	1:279
Tambaksari	36	10	46	22.120	1:481	18	4	22	10.914	1:496
Tandes	20	10	30	9.435	1:314	12	2	14	4.755	1:340
Tegalsari	30	2	32	9.619	1:301	10	0	10	4.755	1:475
Tenggilis Mejoyo	17	1	18	5.610	1:312	7	0	7	2.821	1:403
Wiyung	16	1	17	7.096	1:417	11	0	11	3.505	1:319
Wonocolo	18	2	20	7.789	1:389	9	1	10	3.920	1:392
Wonokromo	33	8	41	14.799	1:361	19	2	21	7.739	1:368

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Kenjeran dengan nilai rasio sebesar 1:500, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:230. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Sawahan memiliki rasio tertinggi yaitu 1:713 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:173.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut.

Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2020 terdapat 371 sekolah SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 232 sekolah yang terakreditasi A, 124 sekolah terakreditasi B dan terdapat 15 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/sederajat terdapat 806 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 516 sekolah yang terakreditasi A, 252 sekolah terakreditasi B dan 38 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2020, terdapat 204 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 67 lembaga, dan sebanyak 137 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2020 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 938 peserta, sebanyak 304 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 91,78%. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1.697 peserta, sebanyak 726 peserta mengikuti ujian dengan tingkat kelulusan 89,67%. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 3.644 peserta, sebanyak 1.638 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Rendahnya tingkat kelulusan peserta ujian Paket A dan B banyak disebabkan karena kurangnya motivasi peserta didik dalam menuntaskan pendidikan kesetaraannya. Hal ini seharusnya dapat menjadi masukan bagi tenaga pendidik di PKBM untuk lebih meningkatkan motivasi peserta didiknya.

2.1.3.1.1.3 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan

akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.42
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Rasio Guru SD/MI	1:21	1:19	1:24	1:23	1:23
1.1.	Guru SD/MI	14.132	13.798	12.806	13.725	13.340
1.2.	Murid SD/MI	287.830	310.283	312.873	317.885	313.472
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:18	1:19	1:23	1:23	1:25
2.1.	Guru SMP/MTs	7524	6.887	6.250	6.862	6.512
2.2.	Murid SMP/MTs	129.136	134.215	143.329	156.083	161.064

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.43
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Triwulan II 2022

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	11	0	7	0	0	204	30	0	252
SD	37	2	37	6	2	3.415	509	1	4.009
SMP	0	2	3	8	1	1.249	387	3	1.653
Total	48	4	47	14	3	4.868	926	4	5.914

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Tabel II.44
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Triwulan II 2022

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	3.874	90	160	161	5	5.658	178	0	10.126
SD	235	11	43	38	15	8.533	415	4	9.294
SMP	24	4	3	17	4	4.317	431	3	4.803
Total	4.133	105	206	216	24	18.508	1024	7	24.223

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.45
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Triwulan II 2022

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.332	2.791	6.123	4.009	9.331	13.340	677	6.540	7.217
2	SMP	1.498	1.835	3.333	1.653	4.859	6.512	155	3.024	3.179
Jumlah		**4.830**	**4.626**	**9.456**	**5.662**	**14.190**	**19.852**	**832**	**9.564**	**10.396**

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 6.982 guru SD/MI/setara dan 3.132 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.46
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Penyakit	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	TBC	3.003	7.950	4.151	4.628	N/A
2.	COVID-19	0	N/A	18.164	67.073*	N/A
3.	HIV/AIDS	1.096	1.343	786	749	N/A

No	Penyakit	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
4.	Kusta	97	97	47	45	N/A
5.	DBD	321	277	73	111	N/A
6.	Hipertensi	399.435	720.378*	724.582*	737.258	N/A
7.	Diabetes Melitus	N/A	94.076	94.624	96.279	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022
*Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi*

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.47
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	49	4	154	154	154
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	49	4	154	154	154
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di kota Surabaya telah membentuk Kampung Tangguh Wani Covid-19 ditiap RW nya sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19. Data Kampung Tangguh Covid-19 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.48
Daftar Kampung Tangguh Covid-19 Kota Surabaya 2021

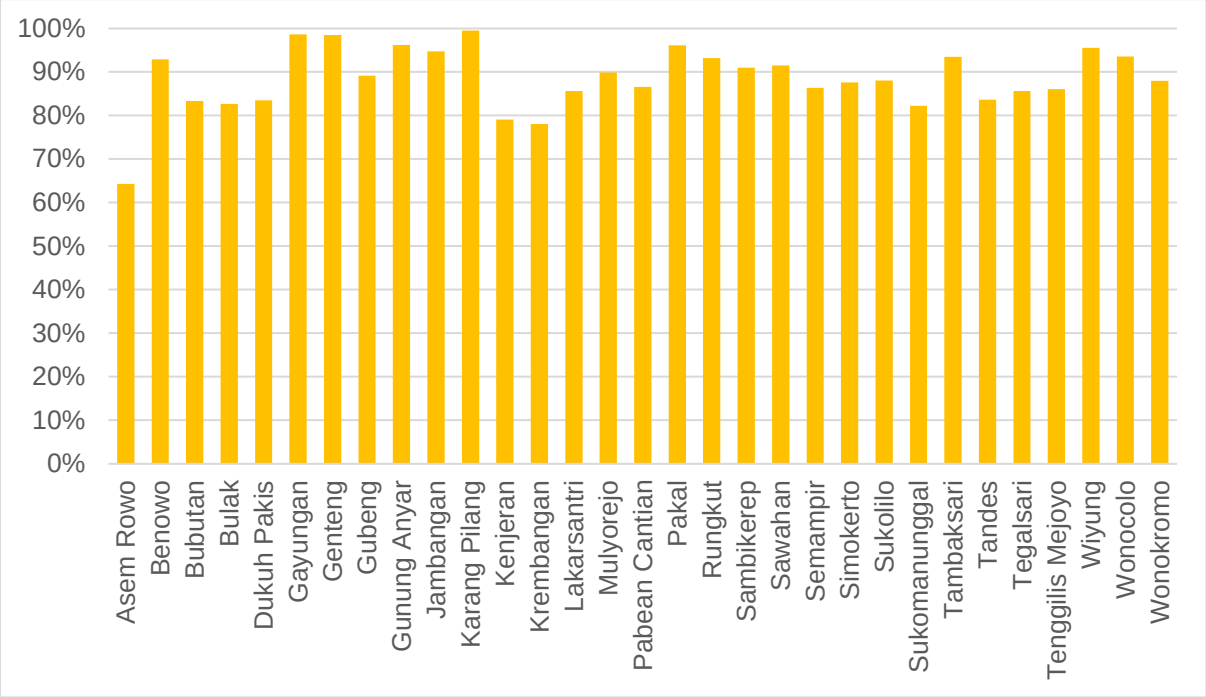
No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
1	Asemrowo	17
2	Benowo	26
3	Bubutan	44
4	Bulak	21
5	Dukuh Pakis	31
6	Gayungan	28

No	Kecamatan	Jumlah Kampung Tangguh
7	Genteng	51
8	Gubeng	51
9	Gunung Anyar	29
10	Jambangan	26
11	Karangpilang	29
12	Kenjeran	37
13	Krembangan	43
14	Lakarsantri	29
15	Mulyorejo	52
16	Pakal	26
17	Pabean Cantian	52
18	Rungkut	74
19	Sambikerep	31
20	Sawahan	68
21	Simokerto	48
22	Semampir	49
23	Sukolilo	67
24	Sukomanunggal	36
25	Tambaksari	73
26	Tandes	51
27	Tegalsari	48
29	Tenggilis Mejoyo	25
29	Wiyung	34
30	Wonocolo	44
31	Wonokromo	58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2022

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m^2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan dimasyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II.14
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Triwulan II 2022

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2022

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2022 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.49
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Tabel II.50
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.791	42.783	35.657	42.100	21.461

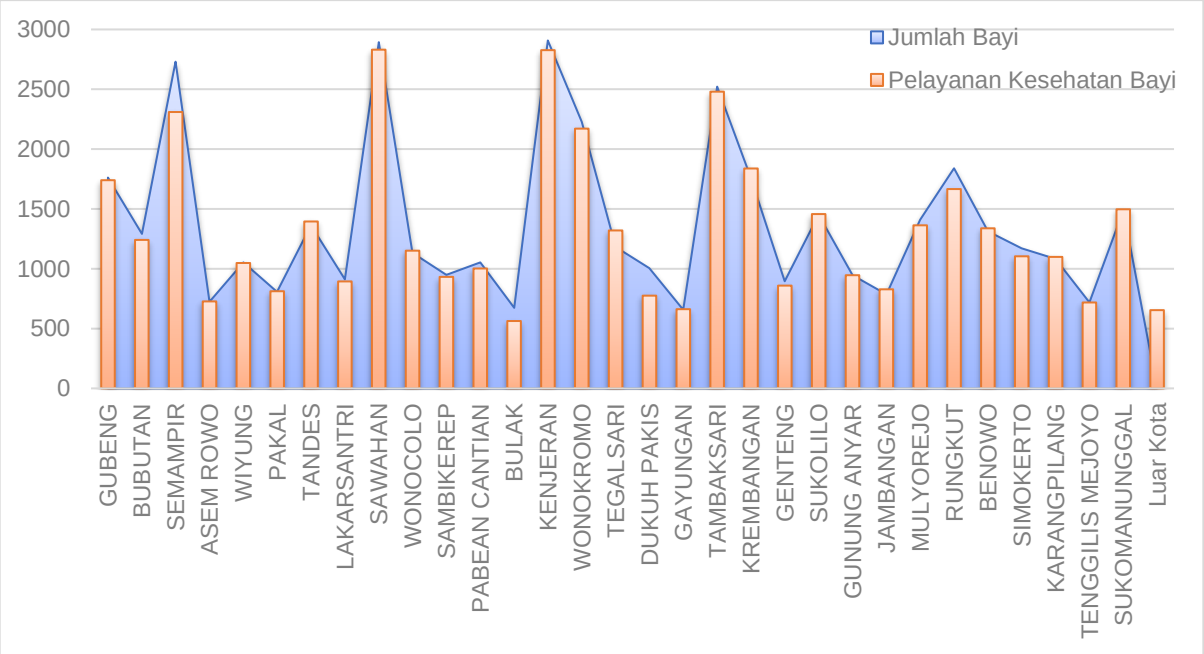
No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
2	Jumlah ibu nifas	44.598	44.252	43.904	42.164	N/A
3	Persentase (persen)	95,95	96,68	81,22	99,85	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Tabel II.51
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	41.070	40.813	40.448	42.248	21.420
2	Jumlah bayi	42.003	41.646	42.034	42.708	N/A
3	Persentase (persen)	97,78%	98.00%	96,23%	98,92%	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Gambar II.15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Triwulan II 2022
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2022

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Kenjeran. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II.52
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	254	242	196	148	60
2	Jumlah balita gizi buruk	254	242	196	148	60
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Sejak tahun 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing. Di tahun 2019 dan 2020 jumlah posyandu balita sebanyak 2.776 dan 2.764. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah posyandu balita sebanyak 2.764 posyandu. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.53
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah posyandu	2.797	2.776	2.764	2.734	2.731
2	Jumlah balita	211.564	209.706	207.881	208.175	206.810
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,25	13,37	13,30	13,1	13,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap.Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 60 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan

tahun 2021 sejumlah 2.970.952 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.158 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.54
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	352	286	348	358	442
3	Jumlah pustu	59	59	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.55
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	4	5	5	5
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6.	Rumah Sakit Swasta	43	43	42	43	43
Jumlah Rumah Sakit		**59**	**59**	**60**	**60**	**60**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		**0,0191**	**0,0187**	**0,0209**	**0,0209**	**0,0209**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio 1,38 per 1000 penduduk. Pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak

2.066 orang, dengan rasio 1,44 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2021 , jumlah dokter sebanyak 7.484, dengan rasio 2,52 per 1000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2021, Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selain kecukupan kuantitas SDM Kesehatan, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.56
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
2	Jumlah dokter	4.295	2.093	1.561	7.484	N/A
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1,38	0,66	0,53	2,52	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.57
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

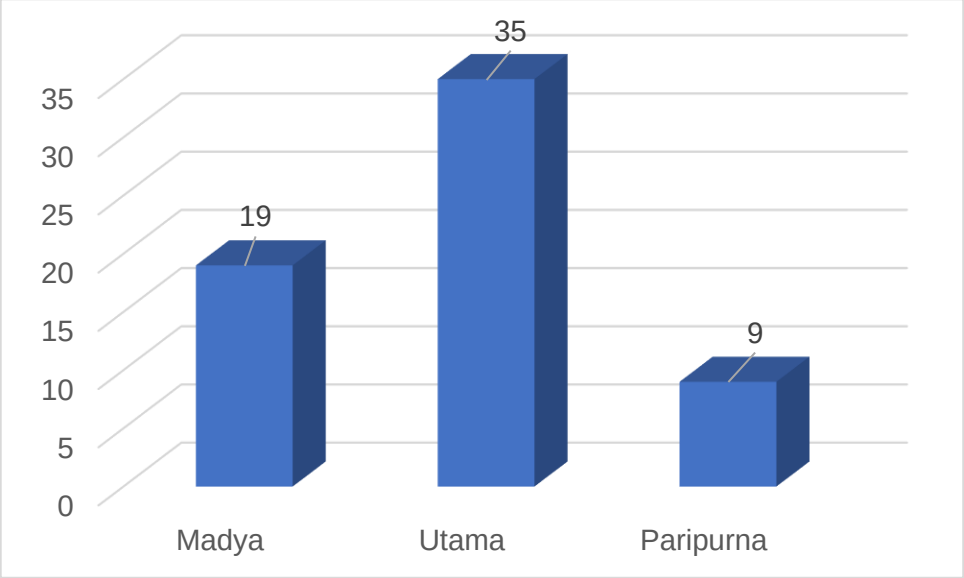
Instansi	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,41	86,43	88,76	79,89	N/A
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	87,72	88,80	83,48	88,85	N/A
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,73	77,98	81,55	86,39	N/A
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	82,65	83,67	82,83	84,85	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas.Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.16
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Triwulan II 2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2017 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018, terdata

sebanyak 291.686 orang MBR dan lebih dari 99 persennya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian di tahun 2019, jumlah MBR diperbarui menjadi 799.540 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR turun menjadi 84,17 persen, meski jumlah MBR yang mendapatkan jaminan bertambah menjadi 672 ribu orang. Lalu di tahun 2020, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR kembali ditingkatkan menjadi 92,55 persen, meski jumlah data MBR juga kembali dilakukan pembaruan menjadi 822.105 orang. Kemudian di tahun 2021 jumlah MBR diperbarui menjadi 1.566.307 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan MBR turun menjadi 69,80 persen, meski jumlah MBR yang mendapatkan jaminan bertambah menjadi 1.093.374 orang. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi MBR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.58
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah MBR	291.686	799.540	822.105	1.566.307	935.329
2	Jumlah MBR mendapatkan jaminan kesehatan	290.153	672.998	760.882	1.093.374	534.383
3	Persentase (%)	99,47	84,17	92,55	69,80	57,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan hingga tahun 2021 sebanyak 48,7 persen atau sejumlah 75 kelurahan. Permasalahan yang paling sering ditemui dalam penanganan BABS menuju kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah banyaknya rumah yang berada pada tanah ilegal dan tidak adanya lahan yang tersedia untuk dilakukan pembangunan jamban sehat sehingga sulit untuk dilakukan intervensi dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah dan/atau swasta.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) selengkapnya dapat dilihat pada

tabel berikut. Masih adanya 10 persen lebih TPM yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi merupakan masalah yang cukup penting untuk segera diperbaiki.

Tabel II.59
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah TPM	1.700	1.834	1.846	1.797	2.132
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.114	1.380	1.408	1.532	1.867
3	Persentase (%)	65,53	75,25	76,27	85,25	87,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697.394 meter melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.952 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Pada tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Pada tahun 2019, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.683,11 km dari panjang jalan 1.694,38 km, dengan persentase 99,33%. Sedangkan pada tahun 2020, panjang jalan kondisi baik juga meningkat menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km, dengan persentase 99,38%. Pada Tahun 2021, panjang jalan kondisi baik menjadi 1.686,88 km dari panjang jalan 1.697,39 km,

dengan persentase 99,38%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.60
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.678,86	1.683,11	1.686,88	1.686,88	1.686,88
Panjang Jalan (Km)	1.692,53	1.694,38	1.697,39	1.697,39	1.697,39
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	99,19%	99,33%	99,38%	99,38%	99,38%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2022, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.61
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan II 2022

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018

Uraian	Tahun Penyusunan
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	*(belum disusun)*
15. Masterplan Industri	*(belum disusun)*
16. Strategi Sanitasi Kota	2019
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	*(belum disusun)*
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	*(belum disusun)*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.62
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Rumah Tinggal	7.638	4.923	5.723	5.783	6.615	2.844
2	Non Rumah Tinggal	1.717	1.773	1.944	1.807	1.572	394
3	Reklame	1.576	1.148	454	436	101	0
Total		10.931	7.844	8.121	8.026	8.288	3.238

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Tabel II.63
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	29 persil	9 persil	401 persil	412 persil	85 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Karena itu, sejak tahun 2017, seluruh luas kawasan prioritas berhasil ditingkatkan kualitasnya hingga semua kawasan tersebut memiliki kualitas permukiman yang sesuai standar. Meski demikian, pengembangan dan pemeliharaan

lingkungan permukiman tetap harus dilakukan guna meningkatkan derajat hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu dalam menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi. Meski demikian, usaha tersebut seringkali terhambat dengan kepemilikan hak atas tanah.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.64
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.648	1.090	461	623	150
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	97,97%	98,10%	98,27%	98,27%	N/A
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,54%	99,48%	99,12%	99,12%	N/A
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	98,97%	99,90%	99,46%	99,46%	N/A

Sumber: Dinas Sosial dan PDAM Surya Sembada, 2022

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat daN/Atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat *(community based development)*. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Pemohon Rusun	1.360	1.633	2.105	1.141	1.234	279

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi dan pada tahun 2021, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 105 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 21 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.66
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m^2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak, Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang, Kec. Simokerto	18	10	± 41.044	Dibangun 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin, Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun 1975 direhab 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari, Kec.Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung, Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun 1996 kerjasama Perumnas
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel. dr Soetomo, Kec. Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan, Kec. Jambangan	24	2	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12	TPI/PPI Romokalisari	Kel. Romokalisari, Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14	Bandarejo	Kel. Sememi, Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15	Gununganyar	Kel. Gununganyar Tambak, Kec. Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
			24	1	± 4.282	Dibangun 2019 (APBN)
16	Dukuh Menanggal	Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBN)
			36	1		Dibangun 2020
17	Keputih	Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBN)
			36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	Pondok Benowo	Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBN)
19	Indrapura 135	Kec. Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBN)
20	Tambak Wedi	Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran	36	3		Dibangun 2017 (APBN)
21	Gunung Anyar Sawah	Kec. Gununganyar	24	2		Dibangun 2020
Total				**105**		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2022

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.35 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 14.818 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, respon cepat penyakit KLB dan/atau wabah zoonosis, serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan cara Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	677	781	781	783	978
2	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,18	2,47	2,62	2,63	3,29

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.68
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	24.095	16.382	5.274	4.124	5.767
2	Jumlah pelanggaran K3	24.095	16.382	5.274	4.124	7.810
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	73,84

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran sebanyak 5.274 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pelanggaran sebanyak 4.124 dan pelanggaran telah diselesaikan. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut. Khusus di tahun 2020, jumlah pelanggaran terbesar adalah pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, yakni sebanyak 829 pelanggar.

Tabel II.69
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	236	227	215	297	226
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	11	13	10	8	9

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 11 kejadian

anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, ada 10 kejadian anarkis dari 215 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2021 ada 8 kejadian anarkis dari 297 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.70
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Penyebab	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Hubungan Listrik	107	75	157	200	136
2	Api Terbuka	301	186	220	246	70
3	Api Mekanis	4	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	70	254	241	257	42
5	Tidak Ada Keterangan	14	0	0	2	0
Total		496	515	617	705	248

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Penyebab kebakaran di tahun 2022 sampai dengan bulan Juni, dari total 248 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka, sebanyak 70 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang di buang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik, sebanyak 136 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun

2022, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	496	515	617	705	248
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	496	515	617	705	248

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2022

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.72
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	74	86	86	86	86
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
4	Cakupan Pelayanan WMK	93%	94%	95,6%	95,6%	95,6%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2022

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).

c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.6.1 PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa,dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II.73
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah PMKS yang ada	58.129	77.808	73.176	62.243	31.833
2	Jumlah PMKS yang ditangani	36.098	46.765	44.435	31.516	2.774
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	62,09	60,10	60,72	50,63	8,71

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Secara umum, jumlah PMKS menurun dari tahun 2019 sebanyak 77.808 orang menjadi 73.176 orang pada tahun 2020 dan menjadi 62.243 orang di Tahun 2021. Prosentase PMKS yang ditangani sepanjang tahun 2019-2020 semakin meningkat yaitu dari 60,10 persen menjadi 60,72 persen dan pada tahun 2021 sebesar 50,63 persen. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PMKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PMKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PMKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Banyaknya pendatang ini rentan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.74
PMKS Penduduk non Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah PMKS non Surabaya	650	669	1.137	1.252	69

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PMKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.75
PSKS Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Total PSKS	3.312	1.551	1.090	1.159	1.457
PSKS Aktif	N/A	1.016	645	996	920

Sumber: Dinas Sosial, 2022

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.566.846 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 1.582.564. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.76
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.269.293	2.283.861	2.325.749	2.337.229	N/A
3	Rasio angkatan kerja	0,67	0,69	0,68	0,67	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, Januari 2022

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.77
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	226	235	347	283	55
2	Jumlah Sengketa Selesai	120	112	125	117	54

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
3	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782	10.592
4	Rasio sengketa	1,77	1,84	2,72	2,21	0,52

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2021

Pada tahun 2018 terdapat 226 sengketa, yang sebagian besarnya dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Tahun 2019 naik menjadi 235 sengketa dengan kasus yang sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 347 kasus, hal ini dipicu oleh gelombang PHK yang cukup besar dikarenakan banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.78
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2019
1	Tidak/belum pernah sekolah	8.738
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	9.803
5	SMA	56.371
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	17.000
8	Universitas	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 4.507 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.570 orang. Pada tahun 2021, pencari kerja yang difasilitasi sebesar 5.132 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 2.815 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.79
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	5.805	6.065	2.570	2.815	3.580
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	8.288	9.235	4.507	5.132	34.230

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2022

Penurunan jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Diharapkan kegiatan fasilitasi yang terus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah penempatan peserta pelatihan pada pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja hasil pelatihan Pemerintah Kota Surabaya masih tergolong rendah. Data peserta pelatihan yang ditempatkan pada pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.80
Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah peserta pelatihan	2872	1085	126	441	64
Peserta pelatihan ditempatkan	560	14	3	0	N/A
Persentase (%)	19,50	1,29	2,38	0	N/A

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	6.689	7.801	9.335	12.746	N/A
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.780	10.592
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	52,33	61,03	73,03	99,73	N/A

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

Pada tahun 2017 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 9.335 perusahaan atau 73,03% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2017 hingga 2021, nilai IPG cenderung meningkat dikarenakan keterkaitannya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya yang semakin meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.82
Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,57	93,68	93,70*	93,90*	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,29	83,88	82,86	82,82	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, 2022
**) angka sementara*

2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 24.476 orang. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 23.903 orang. Dan untuk tahun 2021 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.167 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Pekerja Perempuan	587.684	617.965	600.845	312.338	N/A
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	21.365	24.476	29.380	12.167	N/A
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	3,63	3,96	4,89	3,89	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2019, sebesar 617.965 orang atau 94,05% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	617.096	657.039	655.746	584.465	N/A
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	587.684	617.965	600.845	312.338	N/A
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	94,05	91,63	53,43	N/A

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

2.1.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/Atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.85
KDRT Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Rumah Tangga	953.888	974.740	957.188	974.298	974.298
2	Jumlah KDRT	37	10	13	34	30
3	Rasio KDRT	1:25.781	1:97.474	1:73.630	1:28.656	1:32.477

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2018 sebanyak 37 kejadian dan sempat menurun di 2019 dengan 10 kasus. Akan tetapi di tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah kasusnya cenderung meningkat. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak. Meski demikian, kualitas pelayanan pengaduan tersebut masih perlu ditingkatkan karena nilai kepuasan terhadap pelayanan PPTP2A di tahun 2020 masih sebesar 84 persen. Meski sudah baik, namun pada tahun 2018 hingga 2019 kualitas pelayanan masih sebesar 72,7 persen dan 75,43 persen berturut-turut.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	123	342	235	138	99
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	123	342	235	138	99
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada tahun 2017- 2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.87
Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	56	62	63	70	N/A

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak.

Sampai dengan tahun 2021, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi tahun 2018 – 2022 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	177	197	0	50	14

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat yaitu pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 310,95 kg/kapita/th. Selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 216,55 kg/kapita/th dan pada tahun 2021 sebesar 248,28 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun.

Tabel II.89
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	1.613.871.200	982.443.190	643.307.412	737.617.453	N/A
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	N/A
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	521,49	310,95	216,55	248,28	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan

seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Namun, pada tahun 2019 PPH masyarakat kota Surabaya menurun menjadi 96,1. Hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Pada tahun 2020 PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat lagi menjadi 96,25 dan pada tahun 2021 PPH masyarakat Kota Surabaya menurun menjadi 94,48.

Tabel II.90
Pola Pangan Harapan Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pola Pangan Harapan	96,76	96,1	96,25	94,48	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah sampel pangan segzar	1.920	2.003	2.060	2.061	720
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	210	210	44	149	40

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan

lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Sedangkan pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada tahun 2020, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 44,20 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Sedangkan untuk tahun 2021 tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 50,04 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur diantaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur diantaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Tabel II.92
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	1.317	1.323	1.505	199	N/A
Total aset pemerintah	6.497	6.497	3.405	3.405	N/A
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	20,27	20,36	44,20	50,04	N/A

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022
Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
Total aset 2020 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2018 mencapai 15.247.124 m^2 dan sampai dengan tahun 2019 luas lahan aset yang bersertifikat menjadi 16.337.822 m^2. Sedangkan sampai dengan tahun 2020, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat mencapai 16.798.212 m^2 dan sampai dengan tahun 2021 luas lahan aset yang bersertifikat meningkat menjadi 17.763.111 m^2. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni, luas lahan aset yang bersertifikat kembali bertambah menjadi seluas 18.570.032 m^2. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Akumulasi Luas Lahan Aset Bersertifikat (m^2)	15.247.124	16.337.822	16.798.212	17.763.111	18.570.032
Jumlah Luas Wilayah Aset (m^2)	63.173.396	64.552.306	64.688.802	65.653.701	64.546.810
Presentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	24,14	25,31	25,97	27,06	28,77

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan

Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Tabel II.94
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	30	30	33	44	14
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	2	6	2	28	14
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	6,67%	20%	6,06%	63,64%	100%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 3.234,41 ton/hari, pada tahun 2018 sebanyak 2.164,43

ton/hari, pada tahun 2019 sebanyak 2.224,27 ton/hari, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.222,62 ton/hari. Pada tahun 2021 sebanyak 1.752,50 ton/hari, sedangkan pada triwulan II tahun 2022 volume produksi sampah adalah 1.783 ton/hari, sebagaimana rekap data pada tabel berikut.

Tabel II.95
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.164,43	2.224,27	2.222,62	1.752,50	1.783
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.666,83	1.969,87	1.958,41	1.585,26	1.646

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.96
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
2	Jumlah TPS (unit)	185	187	187	190	190
3	Jumlah TPS 3R	3	4	9	9	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan Kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.97
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	922	1.028	1.082	909	661

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 dan triwulan II tahun 2022 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,00 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.358,87 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.98
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenis RTH Publik	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	355,86	359,86	360,58	361,08	361,08
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	192,08	196,29	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50

No.	Jenis RTH Publik	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.570,33
6	RTH hutan	55,81	57,55	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.646,10	1.672,75	1.672,75	1.672,75	1.672,75
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		**7.287,48**	**7.345,82**	**7.356,96**	**7.358,87**	**7.358,87**
Luas Kota Surabaya		**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.451**
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		**21,79**	**21,96**	**21,99**	**22,00**	**22,00**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2018 adalah sebanyak 66 kasus dan sebanyak 66 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 5 kasus, dan sebanyak 5 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2018 sampai dengan triwulan II tahun 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.99
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah permasalahan lingkungan	66	59	43	51	5
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	66	59	43	51	5
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.100
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	200	200	200	200
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	200	200	180	190	73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada

yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km^2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78. Sedangkan nilai IKLH Nasional sebesar 71,43. Berikut capaian nilai IKLH kota Surabaya, provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

Tabel II.101
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
IKLH Kota Surabaya	61,34	61,43	60,96	67,78	N/A
IKLH Provinsi Jawa Timur	66,36	67,10	67,04	N/A	N/A

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
IKLH Nasional	71,67	66,55	70,27	71,43	N/A

Sumber data: DLH Surabaya, 2022

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga indeks menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2017-2021.

Tabel II.102
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Indeks	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,62	57,68	56,05	58,18	N/A
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,26	90,30	90,35	90,28	N/A
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,44	42,45	42,63	42,63	N/A
Indeks Persampahan	74,98	75,09	75,84	76,62	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	64,91	64,97	65,08	65,71	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2022

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah daN/Atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2017 sampai 2021, dimana pada tahun 2017 IKLHS sebesar 64,88, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 IKLHS telah mencapai 65,71. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2021, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu kualitas udara mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan berkurangnya pemakaian kendaraan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir

angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II.103
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah PJU LED	Unit	13.499	19.589	20.598	20.598	775
Solar cell di Sekolah Adiwiyata	Unit	28	29	29	29	29
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	19	28	35	40	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	18	18	4	8	8
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	24	59	71	77	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2021, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.104
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2018	2.348.598	2.020.291
2019	2.355.489	2.108.476
2020	2.188.680	2.147.337
2021	2.217.423	2.181.345
TW II 2022	2.217.423	2.181.345

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.105
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	70.502	45.248	51.368	75.253	94.614
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	91.006	45.248	51.368	75.253	94.614
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	20.504	45.248	23.212	42.717	15.623
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	20.504	45.248	23.212	42.717	15.623

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, dimana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas,

dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 adalah 8.483 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 829.725 jiwa. Selanjutnya kepemilikan KIA sampai tahun 2020 yaitu 197.486 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 752.020 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 kepemilikan KIA bertambah menjadi 368.802 jiwa, dari 768.210 jiwa (jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun). Sedangkan di tahun 2022 sampai dengan bulan Juni, kepemilikan KIA sebesar 515.198 jiwa, atau sebesar 66,77 persen dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 771.656 jiwa.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2017 sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Di tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah akseptor KB juga meningkat sebesar 434.983 atau 82,37 persen. Pada tahun 2021, jumlah akseptor KB sebesar 429.350 atau 81,33 persen. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.106
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	513.412	526.329	528.086	527.912	330.673
2	Jumlah Akseptor KB	67.972	426.024	434.983	429.350	177.369
3	Rasio Akseptor KB (persen)	13,23	80,94	82,37	81,33	53,64

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Adapun angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebanyak 415.241 pasangan, Tahun 2017 sebanyak 416.634 pasangan, Tahun 2018 sebanyak 412.170 pasangan, Tahun 2019 sebanyak 416.205 pasangan, dan Tahun 2020 sebanyak 434.983 pasangan. Meski fluktuatif namun terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020. Data mCPR di tahun 2021 adalah sebanyak 435.479 pasangan, sedangkan untuk triwulan II tahun 2022 angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah 18.457 pasangan.

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 mencapai 13,62; Tahun 2018 mencapai 21,98; dan Tahun 2019 mencapai 19,88. Sedangkan data ASFR untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 juga belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.107
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	513.412	526.329	528.086	527.912	330.673
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	412.170	426.024	434.983	429.350	172.217

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
3	Cakupan Peserta KB Aktif	80,28	80,94	82,37	81,33	52,08

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2017 terdapat 512.066 PUS, tahun 2018 terdapat 513.412 PUS, tahun 2019 terdapat 526.329 PUS, dan tahun 2020 terdapat 528.086 dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 434.983. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 527.912 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 429.350. Untuk triwulan II tahun 2022 terdapat 330.673 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 172.217.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimana banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.108
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	13.180	1.271	712	937	61
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	101.555	100.576	93.103	98.562	70.270
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	334	15	12	14	12

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2022

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata

yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Total Fertility Rate (TFR)	1,731	1,729	1,705**	N/A	N/A

Sumber : Bappeko, 2021 diolah
***angka sangat sementara*
Catatan : Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2017, sebanyak 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR, dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan, tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2020 terdapat 1000 BKB yang aktif melakukan kegiatan. Untuk tahun 2021 terdapat 675 BKB, 50 BKR, dan 150 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1.017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet di atas 1 juta atau sebesar 82,68%. Tahun 2019 terdapat 190 PMKS yang dilatih dan dalam masa belajar untuk melakukan produksi, dan pada tahun 2020 terdapat 23 yang didampingi. Pada tahun 2021 akan dilaksanakan pendampingan pada 50 orang, dan pada triwulan II tahun 2022 terdapat 14 orang yang didampingi. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.110
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	464	190	23	50	14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel di atas. Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah

terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 14 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun 2018 menjadi 8.001 kendaraan, berlanjut ke tahun 2019, menjadi 7.349 kendaraan, lalu tahun 2020 menjadi 1.999 kendaraan, kemudian tahun 2021 ini menjadi 1.870 kendaraan, dan di triwulan II tahun 2022 menjadi 2.259 kendaraan. Dalam rangka peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.111
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	2	2	2
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	11	11	11	11
4	Jumlah Angkutan Darat	8.001	7.349	1.999	1.870	2.259

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.112
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	3.341	2435	3.257	2.869	698
3	Rasio Izin Trayek	0,0011	0,00077	0,00109	0,00096	0,00023

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Pada tahun tahun 2017, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Untuk tahun 2018, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Pada tahun 2019, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00077. Sedangkan pada tahun 2020, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.257 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.730 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00109. Pada tahun 2021, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.869 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022 izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 698 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam, yakni sebanyak 16 dan 23 kendaraan angkutan umum pada tahun 2018 dan 2019 secara berurutan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun semakin singkat. Pada tahun 2018, rata-rata waktu tunggu untuk Angkutan Kota (angkot) adalah 15,24 menit, pada tahun 2019 rata-rata waktu tunggunya menjadi 14,14 menit, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 12,61 menit, pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 12,61 menit, dan pada triwulan II 2022 rata-rata waktu tunggu angkutan kota (angkot) adalah 14,49 menit. Sedangkan rata-rata waktu tunggu untuk bus pada tahun 2018 adalah 21 menit, kemudian turun menjadi 19,82 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 13 menit,

begitu juga pada tahun 2021 menjadi 13 menit, dan pada triwulan II tahun 2022 rata-rata waktu tunggu untuk bus adalah 15 menit. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.113
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum (Angkutan Kota dan Bus)
Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	15,24	14,14	12,61	12,61	14,49
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	21,00	19,82	13,00	13	15

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2018, rata-rata *load factor* angkutan kota (angkot) di Kota Surabaya adalah sebesar 29,60, kemudian naik menjadi 34,37 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai *load factor* angkutan kota mengalami penurunan yang cukup siginifikan akibat menurunnya jumlah penumpang/pengguna angkutan umum karena penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Namun pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota mengalami kenaikan menjadi 33,02, begitu juga pada triwulan II tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 36,81.

Begitupun dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. Load factor bus pada tahun 2018 berada pada angka 36,14, kemudian naik menjadi 42,06 pada tahun 2019, turun menjadi 40,58 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 44,65. Jika dibandingkan dengan penurunan *load factor* angkutan kota, penurunan *load factor* bus di tahun 2020 relatif lebih kecil. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022 nilai *load factor* bus adalah 47,78. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.114
Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Load factor angkutan kota (persen)	29,6	34,37	29,69	33,02	36,81
Load factor bus (persen)	36,1	42,06	40,58	44,65	47,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2018 sebanyak 150.494 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 149.446 kendaraan. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 141.663 kendaraan. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 135.905 kendaraan. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022 jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 65.780 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.115
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota SurabayaTahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	46.989	47.605	45.582	43.135	21.173
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	155.450	157.768	159.116	151.064	73.377
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	158.619	158.249	147.708	142.532	67.948
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	150.494	149.446	141.663	135.905	65.780

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.337 unit. Sampai dengan tahun 2019, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.915 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2020 pemasangan rambu mencapai 17.439 unit. Samapai dengan tahun 2021, pemasangan rambu meningkat menjadi 18.140 unit. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.116
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	16.337	16.915	17.439	18.140	18.595

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.653 unit. Demikian juga pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.753 unit. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.838 unit. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower, dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.938 unit. Selain menggunakan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.117
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Menara (Tower) (unit)	29	0	0	0	0
Alat Komunikasi (HT)	1.542	2.653	2.753	2.838	2.938

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.surabaya.go.id*. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-

kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II.118
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan website resmi milik Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perijinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun dan pada tahun 2020 terdapat 63 sistem informasi pelayanan perijinan dan 18 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem pelayanan non perijinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.119
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Daring Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta

pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 271.267 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi turun menjadi 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.120
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah anggota koperasi	266.396	271.267	221.968	256.946	150.875

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484 koperasi, sedangkan pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi, sedangkan pada tahun 2020, jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan menjadi 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Untuk tahun 2021 jumlah koperasi meningkat sebanyak 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.121
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah koperasi	1.750	1.784	1.817	1.834	1.986

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
2	Jumlah koperasi aktif	1.487	1.521	1.554	1.571	592
3	Persen koperasi aktif	84,97	85,26	85,52	85,66	30,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.122
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2018 – TW II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jasa Angkutan Darat	13	13	13	13	18
Jasa Angkutan Laut	1	1	1	1	0
Jasa Lain-Lain	87	90	91	105	668
KJKS	23	23	23	23	18
Kopinkra	7	7	7	7	7
Kopkar	325	326	327	328	376
Kopma	21	21	21	21	22
Koppas	14	21	24	24	15
Koppontren	22	22	22	22	23
Kopwan	171	171	171	171	142
KPRI	185	185	185	186	182
KSP	106	107	108	110	114
KSU	617	639	666	665	235
KUD	5	5	5	5	5
Pemuda	4	4	4	4	6
Perikanan	4	4	4	4	0
Pertanian	4	4	4	4	5
PK 5	33	33	33	33	26
Primkopabri	12	12	12	12	12
Primkopad	18	18	18	18	18
Primkopal	17	17	17	17	17
Primkopau	1	1	1	1	1
Primkoppol	11	11	11	11	11
Primkoptama	30	30	30	30	30
Profesi	18	18	18	18	26
Sekunder	1	1	1	1	3
Kelompok Koperasi	1	-	-	-	-
Nelayan	-	-	-	-	4
Tenaga Kerja Bongkar	-	-	-	-	2
TOTAL	**1751**	**1784**	**1817**	**1834**	**1986**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2022

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 volume usaha koperasi adalah sebesar 1.797 milyar dari 1.484 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.092 milyar dari 1.487 koperasi, dan pada tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2.128 milyar dari

1.521 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 volume usaha koperasi turun menjadi 1.864 milyar dari 1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi meningkat menjadi 2.147 milyar dari 1.571 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.123
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Koperasi Aktif	1.487	1.521	1.554	1.571	592
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	2.092	2.128	1.864	2.147	2.147
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,41	1,40	1,20	1,37	1,37

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan tahun 2021 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.124
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854	26.854	26.854
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924	22.924	22.924
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

Jumlah UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan intervensi yang dilakukan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.125
UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Intervensi	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Merek	118	250	140	200	200
Halal	105	200	70	165	165
Pelatihan UMKM	448	769	88	505	505
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	156	45	187	260	260

Intervensi	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pameran/Bazar/Gelar Produk	897	893	9	346	346
Total	**1.781**	**2.237**	**534**	**1.476**	**1.476**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2022

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.126
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Proyek PMDN	251	119	541	1.764	161
Jumlah Proyek PMA	42	3	124	233	31
Total	**293**	**122**	**655**	**1.997**	**192**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2018 tercatat sejumlah 293 proyek. Tahun 2019 tercatat menurun menjadi 122 proyek, sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 655 proyek, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 1.997 proyek. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 192 proyek.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2018 sebesar Rp4.740,23 Miliar, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp19.219,90 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 Miliar. Di tahun 2021 nilai investasi PMA dan PMDN sebesar Rp29.037,08 Miliar dan pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 24.199,45 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.127
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Persetujuan (USD Juta)	774,57	379,90	-	-	-
1.1	Jumlah Proyek	293	122	665	1.997	194
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	10.379,22	5.689,61	384,95	-	-
2	Realisasi (USD Juta)	53,28	1.281,32	-	-	-
2.1	Jumlah Proyek	122	379	588	1.844	1.151
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	5.690,23	19.219,90	22.152,03	29.037,08	24.119,45

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, di mana rekap tabel dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.128
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah PMA/PMDN	122	379	588	1.844	1.151
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	10.607	37.040	8.500	19.523	19.755
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	86,94	97,73	14,46	10,59	17,16

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya

terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 123.705 orang dari 6081 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 20,34. Untuk tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 19.523 orang dari 1.844 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 10,59.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka *(outdoor)* maupun tertutup *(indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 665 lapangan olahraga. Untuk tahun 2021, jumlah lapangan olahraga tersebut masih sejumlah 665 lapangan olahraga. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.129
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah lapangan olahraga	479	630	665	665	665
2	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 6.461	1 : 5.015	1:4.467	1:4.467	1:4.467

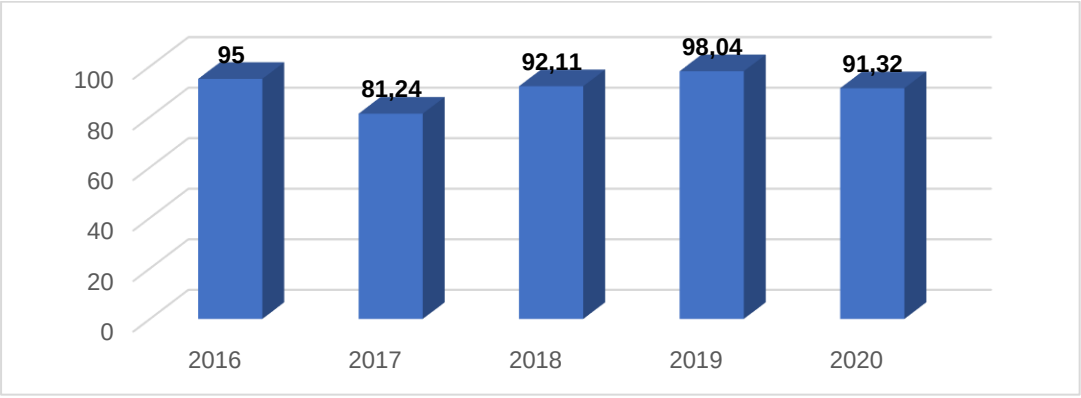
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan

pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentasi atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlet yang dibina dan sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 92,11% terdapat 2307 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 98,04% terdapat 2,852 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2,796 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%.



Gambar II.17 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2021

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II.130
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2018 – TW II 2022

No.	Dokumen	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	-
2.	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	-
3.	Statistik Sektoral Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	-

Sumber : Bappedalitbang Surabaya, 2022

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di Perangkat Daerah masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, seperti Dinas Sosial terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Sekretariat Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.14.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.131
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	984	805	520	4	N/A

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Tahun 2017, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 445 festival, dan pada tahun 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi 805 festival karena beberapa festival melakukan kolaborasi menjadi satu festival yang lebih besar. Namun pada tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya berkurang drastis menjadi hanya 502 kali dan di tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi hanya 4 festival seni dan budaya yang diselenggarakan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

2.1.3.2.14.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.14.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Sedangkan pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Selanjutnya pada tahun 2020, Situs dan Kawasan Cagar Budaya menjadi 288 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2021, terdapat penambahan 1 Bangunan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2021 sebanyak 289 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan pada triwulan II tahun 2022 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 289 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.132
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	277	288	289	289

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	277	288	289	289
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu dimana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni yang terdaftar sebanyak 498 pada tahun 2016, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya. Adapun kelompok seni yang layak tampil pada tabel di bawah ini.

Tabel II.133
Kelompok Seni Terdaftar Yang Belum Layak Tampil
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Kelompok Seni Layak Tampil	287	399	406	415	N/A
Kelompok Seni Belum Layak Tampil	211	99	92	92	N/A

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

2.1.3.2.15 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/Atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman

kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota dari tahun 2018 sampai dengan triwulan II tahun 2022 berjumlah sama yaitu 2 perpustakaan. Selain itu terdapat 61 Perpustakaan milik non Pemda yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.134
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	61	61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung layanan baca sebanyak 729.877 orang. Pada tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi 1.762.516 pengunjung dan seluruhnya meminjam buku. Jumlah pengunjung terus meningkat hingga tahun 2020. Sedangkan pada triwulan II 2021, pengunjung perpustakaan turun menjadi 141.563. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.135
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Kunjungan layanan baca per bulan (kali)	6.061.413	6.715.104	7.718.590	162.050	80.388

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Mengacu kepada sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui program 15 menit membaca di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, kegiatan Tantangan Membaca Surabaya, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat guna, hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur prosedur didalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun hasil survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada triwulan II tahun 2022 adalah 97,5. Survey pelayanan kearsipan ini dilaksanakan secara langsung kepada responden melalu *Google Form.*



Gambar II.18
Nilai Terhadap Pelayanan dan Kemampuan Petugas TBM/Perpusatakaan dalam Membimbing Bibit Penulis dan Pendongeng

2.1.3.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta

pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.136
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri	899	641	580	583	30
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	284	432	531	583	30
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	43,89	67,39	91,55	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 432 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2020, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 531 lembaga. Sedangkan, pada tahun 2021, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menjadi 583 lembaga dan prosentasenya meningkat menjadi 100 persen. Untuk triwulan II tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menjadi 30 lembaga dan persentasenya menjadi 100 persen.

Peningkatan yang signifikan didukung oleh adanya pendampingan dan pembinaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2020, dilakukan pembinaan sistem kearsipan kepada 84 SDN di Kota Surabaya.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 537 arsip dan pada tahun 2021, jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 175 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 139,88% terhadap target 1.725 arsip diakusisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada kedua tabel di bawah ini.

Tabel II.137
Perkembangan Nilai Tambah Sektor Usaha Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Total Nilai Tambah PDRB (miliar rupiah)	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan (miliar rupiah)	913,36	928,40	889,33	917,60	N/A
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB (persen)	0,17	0,16	0,16	0,16	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sepanjang tahun 2017 hingga 2021 relatif stabil pada kisaran 0,16-0,18 persen, meski cenderung menurun kontribusinya. Menurunnya kontribusi sub kategori perikanan

tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.138
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Perikanan Laut	8.151,50	7.165,30	8.057,63	7.805,50	3623,5
2.	Perikanan Tambak	6.956,58	7.249,88	7.305,01	7.943.564	4029,54
3.	Perairan umum	91,80	114,90	-	100,20	51
4.	Kolam	1.104,94	1.014,17	1.021,57	990.547	652,7
5.	Jaring Apung	138	125,97	115,89	120.060	56,17
Jumlah		**16.576,83**	**15.670,22**	**16.500,11**	**9.062.076,7**	**8412,91**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah produksi pada jenis usaha perikanan laut, dan kolam mengalami penurunan di tahun 2021. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sedangkan kenaikan terjadi pada jumlah produksi perikanan tambak dan perairan umum, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan teknologi tepat guna dan fasilitasi penyediaan sarana produksi dalam budidaya perikanan.

Tabel II.139
Pembudidaya Perikanan dan Kelautan Binaan Yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Serta Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pembudidaya perikanan dan kelautan binaan	1.428	1.932	1.932	1.932	1.414
Pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	191	276	275	314	N/A
Pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang mengaplikasikan TTG dalam proses budidaya	506	966	965	1.644	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 47,35 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 87,69% dari yang ditargetkan nasional yaitu 54 kg/kapita/th. Adapun upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Surabaya melalui memasyarakatkan gemar makan ikan, sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan

diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.140
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	45,85	47,35	N/A	N/A	N/A
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	50,65	54,00	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	90,52	87,69	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 28.827.160 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.901.671 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 26.925.489 wisatawan. Kemudian pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan ke kota Surabaya menurun drastis menjadi sebanyak 10.681.318 kunjungan saja, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Sedangkan sampai tahun 2021, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 20.016.799 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 10.681.318 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 9.335.841 wisatawan. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.141
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.728.194	1.901.671	319.082	10.681.318	N/A

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	27.575.125	26.925.489	10.362.236	9.335.841	N/A
Jumlah		**29.283.022**	**28.827.160**	**10.681.318**	**20.016.799**	**N/A**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2022

Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, *mall*, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata pada tahun 2017 sebanyak 5.811.227 kunjungan. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 7.215.914 kunjungan dan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 6.524.456 kunjungan. Di tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek–obyek wisata hanya sebanyak 3.517.009 kunjungan, jumlah ini mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.

Tabel II.142
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		TW II 2022	
	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%
THP Kenjeran	408.976	8,26	460.552	7,11	102.162	5,87	87.687	8,63	N/A	N/A
Kenjeran Park	583.275	11,79	722.336	11,16	404.600	23,26	49.576	4,88	N/A	N/A
Taman Prestasi	78.135	1,58	103.998	1,61	22.182	1,28	11.932	1,17	N/A	N/A
Taman Hiburan Rakyat	8.122	0,16	872	0,01	0	0,00	0	0	N/A	N/A
Taman Remaja Surabaya	132.185	2,67	0	0,00	0	0,00	0	0	N/A	N/A
Monumen Tugu Pahlawan	245.208	4,96	328.588	5,08	71.521	4,11	28.981	2,85	N/A	N/A
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.164.745	23,54	1.439.185	22,23	348.168	20,02	112.299	11,05	N/A	N/A
Masjid Al-Akbar	24.204	0,49	62.253	0,96	30.761	1,77	413	0,04	N/A	N/A
Masjid Cheng Ho	14.620	0,30	18.507	0,29	3.861	0,22	2.480	0,24	N/A	N/A
Kebun Binatang	1.590.761	32,15	2.412.604	37,26	570.855	32,82	619.861	61,00	N/A	N/A
Monumen Kapal Selam	220.409	4,45	310.111	4,79	79.320	4,56	72.643	7,15	N/A	N/A
Monumen Jalesveva Jayamahe	28.939	0,58	25.132	0,39	0	0,00	0	0	N/A	N/A
Loka Jala Srana	4.789	0,10	12.900	0,20	2.138	0,12	0	0	N/A	N/A
Rumah wafat WR. Soepratman	5.786	0,12	12.695	0,20	2.811	0,16	435	0,04	N/A	N/A

Uraian	2018		2019		2020		2021		TW II 2022	
	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%	Jumlah Kunjungan	%
Makam DR. Soetomo	1.111	0,02	970	0,01	582	0,03	1.085	0,11	N/A	N/A
Patung Djoko Dolog	177.999	3,60	313.616	4,84	64.602	3,71	586	0,06	N/A	N/A
Balai Pemuda	156.300	3,16	171.600	2,65	35.800	2,06	28.130	2,77	N/A	N/A
House Of Sampoerna	95.844	1,94	69.826	1,08	0	0,00	0	0	N/A	N/A
Ciputra Water Park	6.912	0,14	8.711	0,13	0	0,00	0	0	N/A	N/A
Museum Kesehatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	N/A	N/A
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	**4.948.320**	**100**	**6.474.456**	**100**	**1.739.363**	**100**	**1.016.108**	**100**	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2022

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Terjadi penurunan jumlah kunjungan di obyek wisata di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.143
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah kunjungan di objek wisata	7.558.967	10.161.859	3.517.009	2.967.996	N/A
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	6	10	11	13	N/A
Jumlah ODTW yang dikelola	13	14	14	15	N/A

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2022

Untuk menggenjot perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata di Kota Surabaya saat ini menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga triwulan II tahun 2022 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.144
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	3	7	7	9	N/A

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2022

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.145
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Total Nilai Tambah PDRB (miliar rupiah)	538.845,46	580.488,53	554.509,46	590.227,97	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian (miliar rupiah)	913,36	928,40	889,33	917,60	N/A
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB (persen)	0,17	0,16	0,16	0,16	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,16%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II.146
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.082,50	3.448,58
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.844	1.750	1.854,90	1.242,8	556,95
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,44	5,53	6,49	6,51	6,19

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Pada tabel di bawah ini disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya dari tahun 2018 – TW II 2022.

Tabel II.147
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.076,12	3.448,58
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	400,49	109,54	323,86	162,219	43,65
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	471	528,10	307,33	N/A	25,84
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	352,24	718,40	855,91	202,8	97,44
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	3.182,5	2.083,50	3.781,61	6763,71	2.515,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2022

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2021 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi dan buah, sedangkan produksi sayur dan jagung mengalami penurunan. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas. Sedangkan untuk pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.148
Pembudidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Memanfaatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah pembudidaya	1848	1077	1494	1494	N/A

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	283	213	451	451	N/A
Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	15,31%	19,78%	30,19%	30,19%	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan masih belum optimal karena masih banyak pembudidaya yang belum memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi.

Selain pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan agar pembudidaya pertanian dan peternakan juga menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Namun sampai dengan tahun 2021, belum semua pembudidaya pertanian dan peternakan telah mengaplikasikan TTG. Data pembudidaya pertanian dan peternakan yang telah mengplikasikan TTG bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.149
Pembudidaya Pertanian yang Mengaplikasikan TTG
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pembudidaya pertanian	1.848	1.077	1.494	1.494	N/A
Pembudidaya pertanian yang mengaplikasikan TTG	671	562	992	1.248	N/A
Persentase pembudidaya yang mengaplikasikan TTG	36,31%	52,18%	66,40%	83,53%	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Tabel II.150
Pembudidaya Peternakan yang Mengaplikasikan TTG
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pembudidaya peternakan	320	312	116	99	N/A
Jumlah Pembudidaya peternakan yang mengaplikasikan TTG	121	162	78	85	N/A

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Persentase Pembudidaya peternakan yang mengaplikasikan TTG	37,81%	51,92%	67,24%	85,85%	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.151
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Ternak	27.390	47.516	91.609	23.870	7.407
Jumlah ternak diintervensi	25.039	43.332	81.398	21.128	6.962
Persentase ternak yang diintervensi (%)	91,42%	91,19%	88,85%	88,51%	93,99%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.152
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Jenis Pasar Modern	2017	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Supermarket	61	67	63	83	83	90
2	Minimarket	566	593	601	709	709	573
3	Departement Store	9	12	12	13	13	16
4	Mall/Plaza	33	34	34	34	34	38
Total		**669**	**669**	**728**	**839**	**839**	**717**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2022

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar

tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.153
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1			-	-	-
2					
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)				
4		Pasar Penjaringansari (lanjutan)			
5					
6					
7					
8	Pasar Kapasari				
9	Pasar Kutisari	Pasar Kutisari (lanjutan)			
10		Pasar Burung Dolly			
11		Pasar Loak Gembong (rehab)			

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022

Tabel II.154
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan ijin usaha perdagangan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.155
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Jenis Perusahaan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Perdagangan	13.887	9.336	13.562	13.562	13.562

No	Jenis Perusahaan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
2	Industri	185	139	253	253	253
Total		**14.072**	**9.475**	**13.815**	**13.815**	**13.815**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

Aktivitas perdagangan dikota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari tabel berikut.

Tabel II.156
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Nilai Ekspor (juta USD)	18.120,06	17.278,97	17.278,97	22.780,68	N/A
Nilai Impor (juta USD)	17.368,05	15.382,23	15.382,23	19.568,40	N/A
Nilai Ekspor Bersih (juta USD)	752,02	1.896,74	1.896,74	3.212,27	N/A

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, 2022

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat surplus sebesar US$ 3.212.272.002. Hal tersebut didorong oleh permintaan eksternal, yaitu sebesar US$ 22.780.677.395 dan impor sebesar US$ 19.568 405.393. Adanya peningkatan nilai realisasi ekspor dan impor Kota Surabaya tahun 2021 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya sudah lebih produktif yang ditunjukkan dari permintaan akan input produksi yang meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di Kota Surabaya. Permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2021.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah

melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.157
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	N/A
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	70,03	73,47	75,13	75,34	N/A

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) untuk Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 68,86 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP untuk Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 70,03 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Meski demikian, nilai evaluasi SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 361 jenis pelayanan, sebanyak 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.158
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329	361	361
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	124	172	182	215	N/A
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (persen)	37,69	52,28	55,32	59,56	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.159
SOP Dievaluasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah SOP	868	868	868	906	906
SOP dievaluasi	76	561	10	68	68

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari keseluruhan 906 SOP yang ada, 40 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terdapat 76 SOP lagi yang dievaluasi, sedangkan di tahun 2019 ada 561 SOP dievaluasi. Selanjutnya di tahun 2020 ada 10 SOP dievaluasi dan di tahun 2021 ada 68 SOP yang dievaluasi.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2017 hingga 2021, setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Sementara itu, produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2018 hingga triwulan II tahun 2022 sebanyak 441 produk hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.160
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah rancangan produk hukum	89	75	72	149	56

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	89	75	72	149	56
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2018 hingga triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.161
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Nama BUMD	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP	N/A
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
PD Rumah Potong Hewan	WDP	WTP	WDP	WDP	N/A
PT BPR Surya Artha Utama	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
PT Surya Karsa Utama	WTP	WDP	WDP	TMP	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiiki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 antara lain PDAM Surya Sembada, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan PT. BPR Surya Artha Utama.

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.162
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	83,74	82,43	86,05	88,37	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2018 hingga 2021, mayoritas berada di atas nilai 80, yakni “Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada triwulan II tahun 2022 terdapat 22 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 22 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 13 MoU dan keseluruhan 13 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.163
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Triwulan II 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti TW II 2022	22
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan TW II 2022	22
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti TW II 2022	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Tabel II.164
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Triwulan II 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti TW II 2022	13
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan TW II 2022	13
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti TW II 2022	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah Kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.165
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah kerjasama	215	262	161	125	35
Jumlah kerjasama dievaluasi	21	27	29	21	20

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2021, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.166
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Jenis Dokumen	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2016-2021 untuk dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, namun dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka khusus untuk tahun 2021 dilaksanakan pemetaan program sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga terdapat perubahan jumlah program dalam RPJMD Tahun 2021. Akan tetapi, meski jumlah program berkurang, namun esensi program, berupa indikator-indikator versi *Review* RPJMD 2016-2021, seluruhnya tetap dimasukkan ke 121 program hasil konversi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada triwulan II tahun 2022 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 123 program.

Tabel II.167
Penjabaran Program RPJMD Dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	102	102	177	177	123
2	Jumlah Program RKPD	102	102	177	121	124
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100*	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022
*Keterangan: *) Jumlah program RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020*

Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program pada tahun 2018 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,04%. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat capaian keberhasilan program meningkat menjadi 99,02%, dan di tahun 2021 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 98,13%. Sedangkan pada Triwulan II tahun 2022 tingkat capaian keberhasilan program mencapai 95,27%. Data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan tahun 2018 - TW II 2022 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.168
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	98,04%	99,02%	99,02%	98,13%	95,27%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 mencapai 90,18%. Sedangkan pada tahun 2021, rata-rata penyerapan anggaran mencapai 80,17%, dan pada triwulan II tahun 2022 rata-rata penyerapan anggaran mencapai 20,54%.

Tabel II.169
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	90,19	95,95	90,18	80,17	20,54

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kinerja dan perbaikan pada pelayanan publik perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengendalian. Dari tahun 2018 hingga 2020 masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum tepat waktu. Pada tahun 2018, terdapat 93 kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau 7,70% dari keseluruhan 1.207 kegiatan. Pada tahun 2019, terdapat 166 kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau 13,52% dari keseluruhan 1.227 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 153 kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau 15,43% dari keseluruhan 838 kegiatan. Jumlah kegiatan yang belum tepat waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.170
Pelaksanaan Sub Kegiatan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Pelaksanaan sub kegiatan tepat waktu	1.114	1.061	838	N/A	N/A
Pelaksanaan sub kegiatan tidak tepat waktu	93	166	153	N/A	N/A
Jumlah sub kegiatan	1.207	1.227	991	1.206	2.031
Persentase sub kegiatan tidak tepat waktu	7,70%	13,52%	15,43%	N/A	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

Persentase pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang belum tepat waktu dari tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Untuk itu perlu adanya

penekanan dan evaluasi agar tahun kedepannya dapat memperkecil persentase kegiatan yang tidak tepat waktu.

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Pada tahun 2018, jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.834 pegawai, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 5.803 pegawai. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.503 pegawai, pada tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai dan di triwulan II tahun 2022 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 6.220 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel II.171
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah pegawai kompeten	4.834	5.803	4.503	4.725	6.220
2	Jumlah pegawai belum kompeten	3.341	2.734	2.033	1.636	0

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Dari data di atas, sejak tahun 2018 - Triwulan II 2022, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.172
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah pejabat struktural	1.577	1.580	1.461	1.414	1.162
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.255	1.174	1.048	944	685
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	78,24%	74,30%	71,73%	66,76%	58,95%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016 – 2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2018 – TW II 2022 sebagai berikut.

Tabel II.173
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	0	0	10	12	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan

administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukannya pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.174
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	73	38	24	19	N/A

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas tahun 2018 sampai tahun 2020 pelanggaran tata kelola administrasi mengalami penurunan, dari 73 Dinas Daerah yang melakukan pelanggaran administrasi menurun pada tahun 2019 hanya terjadi 38 pelanggaran, begitu pula pada tahun 2020 terjadi penurunan pelanggaran tata kelola administrasi hanya 24 pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Daerah kota Surabaya. Dan pada tahun 2021, pelanggaran tata kelola administrasi berkurang menjadi 19 pelanggaran.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel II.175
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Jenis Hukuman Disiplin	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	5	2	8	13	40
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	3	2	7	0	27
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	10	23	15	24	84
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	18	27	30	37	151

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakat lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam medukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2018 – TW II 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.176
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah Ormas Aktif	25	21	15	38	38
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan UHOrmas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada

pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2020, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 24 lembaga.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintah kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi dimasyarakat. Data potensi konflik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.177
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah potensi konflik	236	227	215	297	227
2	Jumlah konflik	11	13	10	8	9

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.178
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	Konsumi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2018	776.985	40,94	1.120.876	59,06	1.897.861	100%
2019	742.013	36,60	1.285.586	63,40	2.027.599	100%

Tahun	Konsumi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41.52	1.141.846	54.48	1.952.589	100%
TW II 2022	810.743	41.52	1.141.846	54.48	1.952.589	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020 dan 2021. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.179
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Angkatan Kerja (orang)	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888	N/A
PDRB (Juta Rp)	538.845.465	580.488.529	554.509.457	590.227.967	N/A
Produktivitas (Juta Rp per orang)	354,49	370,48	350,39	375,25	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II.180
Perkembangan PDRB Kategori Tranportasi dan Pergudangan
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	19.046,86	20.497,98	19.477,42	19.875,91	N/A
Laju Pertumbuhan (persen)	7,56	7,62	-4,98	2,05	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2022

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur kota merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kota. Indeks ini juga digunakan untuk

menunjang pemantapan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Komponen penyusun Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari tiga komponen, yaitu Tingkat Mobilitas, Tingkat Konektivitas dan Tingkat Aksesibilitas. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020, yakni sebesar 0,95. Sedangkan pada tahun 2021, sebesar 0,995.

Tingkat Mobilitas didapatkan dari Layanan Kinerja Ruas Jalan di Kota Surabaya dengan melakukan survey lapangan pada ruas jalan protokol yang ada di Kota Surabaya. Layanan Kinerja Ruas Jalan tersebut berupa Derajat Kejenuhan (V/C Ratio), Level of Service (LOS) dan Lama Jam Sibuk. Kota Surabaya telah berhasil mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota, di antaranya menyediakan alternatif rute perjalanan karena memiliki kehandalan jaringan jalan, dan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Tingkat Konektivitas didapatkan dari Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Penurunan Luas Kawasan Tergenang. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mempercepat waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana alam kurang dari 24 jam dan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit serta pencegahan kejadian kebakaran bangunan/lahan. Pembangunan, peningkatan, serta operasional sarana dan prasarana pematusan dalam rangka penanganan genangan juga berperan penting dalam capaian tingkat konektivitas.

Tingkat Aksesibilitas didapatkan dari Persentase Cakupan Penyebaran dan Layanan Jaringan Utilitas Kota dan Persentase Sinkronisasi Sistem Penataan Ruang dalam Kebijakan Satu Peta Tata Ruang Kota. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, di antaranya:

a. Meningkatkan dan mengelola sistem jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat energi melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
b. Menyediakan layanan air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya Sembada;
c. Menyediakan layanan rekomendasi utilitas yang mencakup rekomendasi penempatan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan gas,

jaringan listrik maupun utilitas lainnya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2017, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.181
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2022

Tabel II.182
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2018 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.183
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2022

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2022, terdapat 49 jalan kewenangan kota dan 2 jalan kewenangan nasional yang memiliki V/C Ratio ≤0,90 dari total 51 ruas jalan yang disampling. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,56. Kemudian turun menjadi 0,54 pada tahun 2019, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,47 dan di tahun 2021 menjadi 0,42. Namun pada triwulan II tahun 2022 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 0,75. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.184
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata V/C Ratio	0,56	0,54	0,47	0,42	0,75

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Tabel II.185
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,3	0,28	0,295	0,54
2	Jl. Bengawan	kota	0,15	0,16	0,13	0,155	0,69
3	Jl. Blauran	kota	1,03	0,95	0,72	0,57	0,71
4	Jl. Bubutan	kota	0,54	0,67	0,4	0,82	0,81
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,55	0,51	0,4	0,27	0,72
6	Jl. Darmo	kota	0,55	0,47	0,5	0,545	0,88
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,17	0,14	0,12	0,065	0,58
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,32	0,38	0,34	0,27	0,89
9	Jl. Dinoyo	kota	0,25	0,13	0,28	0,195	0,69
10	Jl. Diponegoro	kota	0,51	0,44	0,42	0,45	0,58
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,43	0,42	0,49	0,86
12	Jl. Dr.Soetomo	kota	0,37	3,19	0,42	0,3	0,61
13	Jl. Embong Malang	kota	0,52	0,37	0,44	0,55	0,65
14	Jl. Gemblongan	kota	0,58	0,61	0,48	0,53	0,95
16	Jl. Gubeng pojok	kota	0,73	0,34	0,47	0,28	0,65
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	1,59	0,91	0,67	0,32	0,69
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,26	0,17	0,14	0,52
19	Jl. Indragiri	kota	0,27	0,2	0,18	0,375	0,69
20	Jl. Indrapura	kota	0,94	0,55	0,83	0,8	0,76
21	Jl. Jagir Wonokromo	kota	0,32	0,29	0,18	0,315	0,61
22	Jl. Jakarta	kota	0,54	0,66	0,6	0,385	0,80
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,46	0,64	0,22	0,545	0,78
24	Jl. Kapuas	kota	0,05	0,01	0,01	0,035	0,64
25	Jl. Kayoon	kota	0,43	0,23	0,23	0,25	0,64
26	Jl. Kedungdoro	kota	0,29	0,23	0,27	0,41	0,82
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,13	0,27	0,2	0,71
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,75	0,36	0,57	0,55	0,74
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,36	0,58	0,45	0,53	0,74
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,69	0,63	0,49	0,47	0,75
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,23	0,22	0,25	0,67
32	Jl. Mayjend HR. Muhammad	kota	0,63	0,34	0,26	0,565	0,72
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,52	0,43	0,44	0,475	0,92
35	Jl. Ngagel	kota	0,44	0,46	0,5	0,27	0,70
36	Jl. Pahlawan	kota	1,09	0,74	1,11	0,53	0,80

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
37	Jl. Pemuda	kota	0,78	0,51	0,79	0,83	0,86
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,68	0,85	0,63	0,71	1,03
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,88	0,87	0,54	0,41	1,16
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,19	0,16	0,22	0,79
41	Jl. Prof. Dr. Moestopo	kota	0,75	0,66	0,72	0,565	0,88
42	Jl. Rajawali	kota	0,96	0,85	0,83	0,51	0,76
43	Jl. Raya ITS	kota	0,34	0,58	0,19	0,23	0,49
44	Jl. Stasiun Wonokromo	kota	0,51	0,29	0,5	0,42	0,77
45	Jl. Sumatra	kota	0,55	0,52	0,37	0,02	0,72
46	Jl. Tunjungan	kota	0,85	0,82	1,03	0,58	0,66
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,66	0,89	0,55	0,475	0,87
48	Jl. Jendral Basuki Rachmat	kota	1,34	1,18	1,38	1,2	0,82
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl. Veteran	kota	0,95	0,86	1,01	1,05	0,71
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,74	0,22	0,96	0,27	0,85
51	Jl. Keputran	kota	0,12	0,12	0,05	0,035	0,72
Rata-rata di jalan kewenangan kota			**0,56**	**0,55**	**0,48**	**0,43**	**0,73**
Rata-rata total			**0,56**	**0,54**	**0,47**	**0,42**	**0,75**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Pada tabel di atas, meskipun rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang semakin menurun, namun masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap tertib saat berkendara, pemasangan rambu dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.186
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	1.191	1.345	874	932	577

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk

mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.970.952 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2018 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,43 menit, hingga Triwulan II tahun 2022 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 19,88 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.187
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,43	22,01	22,22	22,04	19,88

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan sebesar 12,49 cm. Hingga pada Triwulan II tahun 2022 ini, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 10,72 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.188
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	12,49	9,20	10,92	10,92	10,72

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 697,79 ha. Hingga pada Tahun 2021, luas wilayah genangan Kota Surabaya terus menurun menjadi sebesar 452,57 hektar. Namun pada Triwulan II Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 475,65 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.189
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Luas Wilayah Genangan (ha)	697,79	688,96	462,64	452,57	475,65

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 61 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II.19
Perangkat Smart Water Level

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 93.252 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.190
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2018 – Triwulan II 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	5.372	6.090	6.400	1.324	775

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi

sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/ konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Meski mengalami peningkatan, nilai BB dapat dikatakan masih jauh harapan. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dalam pemahaman dan penerapan maupun pengawasan internal yang dilaksanakan. Di sisi lain, pentingnya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi menjadi syarat mutlak bagi kepuasan masyarakat sekaligus semakin meningkatkan potensi masuknya investasi di Kota Surabaya.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.191
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Bidang Politik	67	78	64	67	53
2	Bidang Ekonomi	64	68	81	142	104
3	Bidang Sosial Budaya	105	81	70	87	69
4	Psikotropika	0	0	0	0	1
Jumlah unjuk rasa		**236**	**227**	**215**	**296**	**227**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2018 ke 2019 mengalami mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa sebanyak 296 kejadian dan didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Tetapi meskipun angka unjuk rasa di 2021 meningkat, keseluruhan unjuk rasa bisa tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya. Sedangkan jumlah unjuk rasa di kota Surabaya hingga Triwulan II tahun 2022 sebanyak 227 kejadian.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel II.192
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	0	1	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	1	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.193
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah lulusan D4/S1	303.549	305.315	303.41	287.516	287.516
2	Jumlah lulusan S2	21.010	21.363	21.179	19.976	19.976
3	Jumlah lulusan S3	1.353	1.376	1.405	1.412	1.412
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	325.912	328.054	325.994	308.904	308.904
5	Jumlah penduduk	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.970.952
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,105	0,104	0,109	0,104	0,104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.194
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan II 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	672.334	700.826	688.478	675.558	675.558
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	216.158	229.491	186.272	193.749	193.749

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	TW II 2022
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	888.492	930.317	874.750	869.307	869.307
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.206.240	2,229,164	2.095.980	2.101.645	2.101.645
6	Rasio ketergantungan	0,402	0,417	0,417	0,414	0,414

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada Tahun 2021 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,71%. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,414 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 hingga 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 dan realisasi tahun pertama RPJMD 2021-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2021, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 sampai dengan Semester I, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2022 sampai dengan Semester I, secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.195
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan, Kegiatan, dan Kinerja Hasil Program Tahun 2022 sampai dengan Semester I

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja hasil)		Kegiatan (indikator kinerja *output*)		Sub Kegiatan (indikator kinerja *output*)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)	270	53,25	506	30,48	1.229	59,46
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100% - 300%)	231	45,57	360	21,69	727	35,17
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 300%)	6	1,18	794	47,83	111	5,37
Total		**507**	**100**	**1.660**	**100**	**2.067**	**100**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 sampai dengan Semester I, dijelaskan pada tabel berikut ini tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2022.

Tabel II.196
Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2022
Kota Surabaya

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=6+12		15=13/5x100%		16
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.065.645.443		902.172		977.653.641		88.988.755		90.445.684	-	-		179.434.438		179.434.438		18,35 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,13%		N/A		90,96%		90,85%		91%		-	-		91%		91%		100,04%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.442.377				2.251.435		77.200		972.300	-	-		1.049.500		1.049.500		46,61 %		
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	14 dokumen		N/A		14 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		-	-		2 dokumen		2 dokumen		14,29%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.442.377				2.251.435		77.200		972.300	-	-		1.049.500		1.049.500		46,61 %		
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	2 Dokumen		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		-	-		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		Dinas Pendidikan
				jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	1213 lembaga		N/A		1213 lembaga		0 lembaga		969 lembaga		-	-		969 lembaga		969 lembaga		79,88%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.029.406.176				947.162.358		85.741.803		80.736.693	-	-		166.478.497		166.478.497		17,58 %		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-		100%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.029.406.176				947.162.358		85.741.803		80.736.693	-	-		166.478.497		166.478.497		17,58 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1.331.194				1.041.558		88.749		287.835	-	-		376.584		376.584		36,16 %	
				Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06 .02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.331.194				1.041.558		88.749		287.835	-	-		376.584		376.584		36,16 %	
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 jenis		N/A		17 jenis		23 jenis		24 jenis		-	-	24 jenis		24 jenis		141,18%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			4.870.126				4.606.231		189.641		946.767	-	-		1.136.408		1.136.408		24,67 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.07 .11	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			4.870.126				4.606.231		189.641		946.767	-	-		1.136.408		1.136.408		24,67 %	
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 jenis		100%		36 jenis		13 jenis		27 jenis		-	-	27 jenis		27 jenis		75,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			25.595.570				22.592.060		2.891.361		7.502.089	-	-		10.393.450		10.393.450		46,00 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		75%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.08 .02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			2.477.487				2.367.821		100.839		635.568	-	-		736.407		736.407		31,10 %	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan		75%		4 laporan		2 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.08 .04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			23.118.083				20.224.238		2.790.522		6.866.521	-	-		9.657.043		9.657.043		47,75 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan		75%		4 laporan		16 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Dinas Pendidikan
2	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			1.282.862.768		106.451		1.159.311.410		49.853.828		238.102.600	-	-		287.956.428		287.956.428		24,84 %	
				Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		N/A		100%		100%		89,02%		-	-	89,02%		89,02%		89,02%		Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,85 %		N/A		83,33%		82,71%		82,47%		-	-	82,47%		82,47%		98,97%		Dinas Pendidikan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pendidikan
				Persentase SD terakreditasi minimal B	95,04 %		N/A		93,24%		94,38%		93,96%		-	-	93,96%		93,96%		100,77%		Dinas Pendidikan
				Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	57%		N/A		19%		8,93%		20,66%		-	-	20,66%		20,66%		108,74%		Dinas Pendidikan
				Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91,43 %		N/A		85,44%		94,29%		100%		-	-	100%		100%		117,04%		Dinas Pendidikan
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	97,44 %		N/A		96,79%		94,17%		94,17%		-	-	94,17%		94,17%		97,29%		Dinas Pendidikan
				Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100%		100%		99,73%		99,42%		-	-	99,42%		99,42%		99,42%		Dinas Pendidikan
				Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pendidikan
				Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		N/A		80%		100%		100%		-	-	100%		100%		125,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			644.994.591				599.328.584		35.544.115		142.438.554	-	-		177.982.669		177.982.669		29,70 %	
				Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan		N/A		4 laporan		2 laporan		1 laporan		-	-	1 laporan		1 laporan		25,00%		Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga		N/A		692 Lembaga		690 Lembaga		690 Lembaga		-		-		690 Lembaga		690 Lembaga		99,71%		Dinas Pendidikan
				Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		200,00%		Dinas Pendidikan
				Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		N/A		100%		100%		94,12%		-		-		94,12%		94,12%		94,12%		Dinas Pendidikan
				Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-		-		0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.06	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			102.209.068				24.010.045		65.155		159.373		-		-		224.528		224.528		0,94%	
				Jumlah sekolah yang dibangun	38 Lokasi		N/A		19 Lokasi		0 Lokasi		6 Lokasi		-		-		6 Lokasi		6 Lokasi		31,58%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.28	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			188.257				141.800		16.200		56.900		-		-		73.100		73.100		51,55 %	
				Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	274 lembaga		N/A		260 lembaga		0 lembaga		111 lembaga		-		-		111 lembaga		111 lembaga		42,69%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.25	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			6.043.654				2.954.577		101.186		263.414		-		-		364.599		364.599		12,34 %	
				Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali		N/A		13 kali		1 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		46,15%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.22	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**			2.901.710				1.308.475		0		0		-		-		0		0		0,00%	
				Jumlah lembaga yang mendapat alokasi Penyediaan Sarana Prasarana yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	19 lembaga		N/A		10 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		-		-		0 lembaga		0 lembaga		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.16	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			7.328.937				5.687.234		5.600		139.821		-		-		145.421		145.421		2,56%	
				Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	64 lembaga		N/A		56 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		-		-		0 lembaga		0 lembaga		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.29	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**			148.042.295				224.162.380		5.600		16.800		-		-		22.400		22.400		0,01%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Jumlah Lembaga SD Penerima BOS	285 lembaga		N/A		285 lembaga		460 lembaga		460 lembaga		-	-	460 lembaga		460 lembaga		161,40%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.27	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**			30.802.004				831.988		13.600		134.264	-	-		147.864		147.864		17,77%	
			Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	1842 Orang		N/A		1842 Orang		1303 Orang		2908 Orang		-	-	2908 Orang		2908 Orang		157,87%		Dinas Pendidikan
			Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	10243 orang		N/A		11376 orang		10319 orang		10319 orang		-	-	10319 orang		10319 orang		90,71%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.21	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**			320.001.367				316.581.664		35.311.437		140.475.585	-	-		175.787.022		175.787.022		55,53%	
			Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar tepat waktu	689 lembaga		N/A		667 lembaga		690 lembaga		690 lembaga		-	-	690 lembaga		690 lembaga		103,45%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.23	**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**			320.597				291.900		19.737		76.814	-	-		96.551		96.551		33,08%	
			Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	650 lembaga		N/A		650 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		-	-	0 lembaga		0 lembaga		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.12	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			27.156.702				23.358.522		5.600		1.115.584	-	-		1.121.184		1.121.184		4,80%	
			Jumlah sekolah yang direhabilitasi	247 Lokasi		N/A		266 Lokasi		0 Lokasi		133 Lokasi		-	-	133 Lokasi		133 Lokasi		50,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			364.472.635				360.169.280		14.052.945		59.394.788	-	-		73.447.733		73.447.733		20,39%	
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan		N/A		4 laporan		0 laporan		1 laporan		-	-	1 laporan		1 laporan		25,00%		Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga		N/A		305 Lembaga		312 Lembaga		312 Lembaga		-		-		312 Lembaga		312 Lembaga		102,30%		Dinas Pendidikan
				Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		N/A		1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		200,00%		Dinas Pendidikan
				Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		N/A		100%		100%		80,65%		-		-		80,65%		80,65%		80,65%		Dinas Pendidikan
				Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-		-		0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.12	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			68.139.379				22.481.059		58.489		4.267.256		-		-		4.325.745		4.325.745		19,24 %	
				Jumlah sekolah yang dibangun	25 lokasi		N/A		12 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.41	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			441.521				401.942		16.000		117.500		-		-		133.500		133.500		33,21 %	
				Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah	258 Lembaga		N/A		254 Lembaga		154 Lembaga		154 Lembaga		-		-		154 Lembaga		154 Lembaga		60,63%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.38	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			4.584.334				4.496.066		154.822		539.634		-		-		694.456		694.456		15,45 %	
				Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali		N/A		13 kali		3 kali		8 kali		-		-		8 kali		8 kali		61,54%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.27	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			6.779.353				6.811.618		5.600		45.300		-		-		50.900		50.900		0,75%	
				Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	16 Lembaga		N/A		12 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.42	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**			80.429.498				137.885.100		5.600		16.800		-		-		22.400		22.400		0,02%	
				Jumlah Lembaga SMP Penerima BOS	63 lembaga		N/A		63 lembaga		340 lembaga		340 lembaga		-		-		340 lembaga		340 lembaga		539,68%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.40	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			13.494.310				620.451		29.600		102.800		-		-		132.400		132.400		21,34 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	641 Orang		N/A		641 Orang		257 Orang		705 Orang		-	-	705 Orang		705 Orang		109,98%		Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	4963 orang		N/A		5745 orang		5134 orang		5134 orang		-	-	5134 orang		5134 orang		89,36%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.32	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**			170.635.719				176.398.779		13.727.465		53.762.382	-	-		67.489.848		67.489.848		38,26 %	
				Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah tepat waktu	294 lembaga		N/A		293 lembaga		312 lembaga		312 lembaga		-	-	312 lembaga		312 lembaga		106,48%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.36	**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**			243.465				217.865		49.770		123.570	-	-		173.340		173.340		79,56 %	
				Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300 lembaga		N/A		300 lembaga		0 lembaga		240 lembaga		-	-	240 lembaga		240 lembaga		80,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.24	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			18.104.473				10.856.400		5.600		419.545	-	-		425.145		425.145		3,92%	
				Jumlah sekolah yang direhabiltasi	38 lokasi		N/A		51 lokasi		61 lokasi		93 lokasi		-	-	93 lokasi		93 lokasi		182,35%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			157.486.742				129.446.263		113.210		16.735.273	-	-		16.848.483		16.848.483		13,02 %	
				Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		N/A		4 laporan		0 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Dinas Pendidikan
				Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-	-	0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Dinas Pendidikan
				Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-	-	0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.17	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**			1.689.686				644.543		39.810		171.059	-	-		210.869		210.869		32,72 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	918 lembaga		N/A		878 lembaga		0 lembaga		449 lembaga		-	-	449 lembaga		449 lembaga		51,14%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD			290.799				8.023.369		5.600		65.391	-	-		70.991		70.991		0,88%	
				Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan PAUD	2 Lembaga		N/A		2 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		-	-	1 Lembaga		1 Lembaga		50,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			71.419.826				71.337.040		0		0	-	-		0		0		0,00%	
				Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2636 lembaga		N/A		2592 lembaga		0 lembaga		2515 lembaga		-	-	2515 lembaga		2515 lembaga		97,03%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			8.420.251				1.895.400		5.600		16.800	-	-		22.400		22.400		1,18%	
				Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan Pengembangan Karir	9142 orang		N/A		9142 orang		4 orang		4 orang		-	-	4 orang		4 orang		0,04%		Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	4930 Orang		N/A		5163 Orang		4608 Orang		4608 Orang		-	-	4608 Orang		4608 Orang		89,25%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			161.215				167.400		5.600		141.600	-	-		147.200		147.200		87,93 %	
				Jumlah Lembaga yang mendapatkan Biaya personil Peserta Didik PAUD	2 Lembaga		N/A		2 Lembaga		0 Lembaga		2 Lembaga		-	-	2 Lembaga		2 Lembaga		100,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			75.504.964				47.378.511		56.600		16.340.423	-	-		16.397.023		16.397.023		34,61 %	
				Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan proses belajar PAUD	1326 lembaga		N/A		1316 lembaga		0 lembaga		2642 lembaga		-	-	2642 lembaga		2642 lembaga		200,76%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			115.908.801				70.367.283		143.557		19.533.985	-	-		19.677.543		19.677.543		27,96 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan		N/A		4 laporan		0 laporan		2 laporan		-		-		2 laporan		2 laporan		50,00%		Dinas Pendidikan
				Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari		N/A		5 hari		1.31 hari		1.35 hari		-		-		1.35 hari		1.35 hari		27,00%		Dinas Pendidikan
				Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.16	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			135.580				79.000		5.600		26.000		-		-		31.600		31.600		40,00 %	
				jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina	102 lembaga		N/A		102 lembaga		0 lembaga		190 lembaga		-		-		190 lembaga		190 lembaga		186,27%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.09	**Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			122.398				104.651		0		38.307		-		-		38.307		38.307		36,60 %	
				Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 lembaga		N/A		1 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		-		-		1 lembaga		1 lembaga		100,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.17	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			6.791.865				5.144.650		0		0		-		-		0		0		0,00%	
				jumlah lembaga yang mendapatkan BOP	35 lembaga		N/A		34 lembaga		0 lembaga		24 lembaga		-		-		24 lembaga		24 lembaga		70,59%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.15	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			113.511				103.104		5.600		16.800		-		-		22.400		22.400		21,73 %	
				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non formal yang mendapatkan pelatihan	250 orang		N/A		250 orang		0 orang		0 orang		-		-		0 orang		0 orang		0,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.10	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**			849.600				707.087		82.757		226.233		-		-		308.990		308.990		43,70 %	
				Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat penyediaan biaya personil	1 lembaga		N/A		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		-		-		1 lembaga		1 lembaga		100,00%		Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			107.696.876				64.228.791		49.600		19.226.646	-	-		19.276.246		19.276.246		30,01 %		
				Jumlah Tenaga Pendidik Keagamaan yang Difasilitasi dalam Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik Keagamaan	13000 Orang		N/A		13000 Orang		0 Orang		11562 Orang		-	-	11562 Orang		11562 Orang		88,94%		Dinas Pendidikan
				Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan proses Belajar mengajar pendidikan Kesetaraan	34 Lembaga		N/A		34 Lembaga		0 Lembaga		35 Lembaga		-	-	35 Lembaga		35 Lembaga		102,94%		Dinas Pendidikan
3	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			134.346.197		287.822		33.234.077		5.349.200		13.462.800	-	-		18.812.000		18.812.000		56,60 %		
				Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	01:20		N/A		0,05		0,05		0,05		-	-	0,05		0,05		100,00%		Dinas Pendidikan
				Rasio Guru/ Murid jenjang SD	01:20		N/A		0,05		0,05		0,05		-	-	0,05		0,05		100,00%		Dinas Pendidikan
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			134.346.197				33.234.077		5.349.200		13.462.800	-	-		18.812.000		18.812.000		56,60 %		
				Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang		N/A		12685 orang		23104 orang		34632 orang		-	-	34632 orang		34632 orang		273,02%		Dinas Pendidikan
				Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang		N/A		7725 orang		11840 orang		17752 orang		-	-	17752 orang		17752 orang		229,80%		Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			133.374.035				32.681.667		5.327.600		13.414.800	-	-		18.742.400		18.742.400		57,35 %		
				Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	350 lembaga		N/A		350 lembaga		458 lembaga		461 lembaga		-	-	461 lembaga		461 lembaga		131,71%		Dinas Pendidikan
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			972.162				552.409		21.600		48.000	-	-		69.600		69.600		12,60 %		
				Dokumen perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Dinas Pendidikan
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.121.682.948		123.237.749		1.191.573.113		60.081.466		343.915.251	-	-		403.996.717		403.996.717		33,90 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		N/A		100%		83,31%		84,33%		-	-	84,33%		84,33%		84,33%		Dinas Kesehatan
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	84%		N/A		82%		85,80%		87,65%		-	-	87,65%		87,65%		106,89%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		N/A		88%		93,98%		94,67%		-	-	94,67%		94,67%		107,58%		RSUD Bhakti Dharma Husada

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	83%		N/A		82,85%		0%		85,86%		-	-	85,86%		85,86%		103,63%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		N/A		87,85%		92,63%		91%		-	-	91%		91%		103,59%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			374.216.829				366.843.056		23.598.985		24.169.572	-	-		47.768.557		47.768.557		13,02 %	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.01.2.02 .01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			374.216.829				366.843.056		23.598.985		24.169.572	-	-		47.768.557		47.768.557		13,02 %	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			8.082.258				3.763.181		230.275		623.035	-	-		853.310		853.310		22,68 %	
				Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.07 .10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			8.082.258				3.763.181		230.275		623.035	-	-		853.310		853.310		22,68 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	4 jenis		N/A		4 jenis		3 jenis		12 jenis		-	-	12 jenis		12 jenis		300,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			250.892.529				241.950.187		34.760.590		87.057.140	-	-		121.817.730		121.817.730		50,35 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.01.2.08 .04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			117.186.045				97.234.787		12.182.926		31.431.084	-	-		43.614.010		43.614.010		44,85 %	
				Persentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.01.2.08 .03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			133.706.483				144.715.400		22.577.665		55.626.056	-	-		78.203.720		78.203.720		54,04 %	
				Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis		100%		5 jenis		2 jenis		11 jenis		-	-	11 jenis		11 jenis		220,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			488.491.332				579.016.689		1.491.616		232.065.504	-	-		233.557.120		233.557.120		40,34 %	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		3 Puskesmas		-	-	3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		9 Puskesmas		-		-		9 Puskesmas		9 Puskesmas		900,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.01.2.10.01	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**			488.491.332				579.016.689		1.491.616		232.065.504		-	-	233.557.120		233.557.120		40,34 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		2 Jenis		15 Jenis		18 Jenis		-	-	18 Jenis		18 Jenis		900,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		15 Jenis		-	-	15 Jenis		15 Jenis		750,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		-	-	4 Jenis		4 Jenis		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		-	-	6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		2 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		-	-	4 Jenis		4 Jenis		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		-	-	2 Jenis		2 Jenis		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Made)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		2 Jenis		8 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		6 Jenis		-		-		6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		8 Jenis		-		-		8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		10 Jenis		-		-		10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		10 Jenis		-		-		10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		-		-		7 Jenis		7 Jenis		350,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		-		-		6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		9 Jenis		-		-		9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		350,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		2 Jenis		2 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		6 Jenis		-	-	6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		-	-	5 Jenis		5 Jenis		250,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		11 Jenis		-	-	11 Jenis		11 Jenis		550,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		-	-	6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		13 Jenis		-	-	13 Jenis		13 Jenis		650,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		2 Jenis		2 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		350,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		-	-	5 Jenis		5 Jenis		250,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		11 Jenis		-	-	11 Jenis		11 Jenis		550,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		12 Jenis		-	-	12 Jenis		12 Jenis		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		11 Jenis		-	-	11 Jenis		11 Jenis		550,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		350,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		350,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		2 Jenis		9 Jenis		11 Jenis		-	-	11 Jenis		11 Jenis		550,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		2 Jenis		7 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		-	-	6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		9 Jenis		-	-	9 Jenis		9 Jenis		450,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		2 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		-	-	3 Jenis		3 Jenis		150,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		2 Jenis		5 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		2 Jenis		8 Jenis		16 Jenis		-	-	16 Jenis		16 Jenis		800,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		350,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		10 Jenis		-	-	10 Jenis		10 Jenis		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		2 Jenis		9 Jenis		13 Jenis		-	-	13 Jenis		13 Jenis		650,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		2 Jenis		6 Jenis		12 Jenis		-	-	12 Jenis		12 Jenis		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		2 Jenis		4 Jenis		6 Jenis		-	-	6 Jenis		6 Jenis		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	12 Jenis		N/A		12 Jenis		11 Jenis		17 Jenis		-	-	17 Jenis		17 Jenis		141,67%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	14 jenis		N/A		14 jenis		13 jenis		13 jenis		-	-	13 jenis		13 jenis		92,86%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
5	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			804.671.719		24.687.926		885.534.350		83.981.922		156.338.136	-	-		240.320.058		240.320.058		27,14 %	
				Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,65 %		N/A		82,45%		25,61%		60,97%		-	-	60,97%		60,97%		73,95%		Dinas Kesehatan
				Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,07 %		N/A		99,03%		24,82%		51,02%		-	-	51,02%		51,02%		51,52%		Dinas Kesehatan
				Persentase Jaminan Kesehatan	98,00 %		N/A		96,64%		36,16%		37,32%		-	-	37,32%		37,32%		38,62%		Dinas Kesehatan
				Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%		N/A		100%		1,64%		40,98%		-	-	40,98%		40,98%		40,98%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase Rumah Sehat	88,22 %		N/A		88,18%		88,30%		88,31%		-	-	88,31%		88,31%		100,15%		Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		N/A		100%		51,64%		63,41%		-	-	63,41%		63,41%		63,41%		Dinas Kesehatan
				Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,21 %		N/A		99,17%		24,96%		51,08%		-	-	51,08%		51,08%		51,51%		Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84,13 %		N/A		77,78%		98,41%		98,41%		-	-	98,41%		98,41%		126,52%		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60%		N/A		53%		69,84%		69,84%		-	-	69,84%		69,84%		131,77%		Dinas Kesehatan
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,100 %		N/A		0,10%		0,26%		0,39%		-	-	0,39%		0,39%		375,00%		Dinas Kesehatan
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	100%		N/A		98%		100,08%		100%		-	-	100%		100%		102,04%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08 %		N/A		98,08%		100%		100%		-	-	100%		100%		101,96%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			254.493.459				418.709.158		3.072.194		12.133.889		-	-	15.206.083		15.206.083		3,63%	
				Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		64 Puskesmas		66 Puskesmas		-	-	66 Puskesmas		66 Puskesmas		104,76%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat pengembangan sarana	1 lembaga		N/A		1 lembaga		0 lembaga		3 lembaga		-	-	3 lembaga		3 lembaga		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1 lembaga		N/A		1 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		-	-	0 lembaga		0 lembaga		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		0 Puskesmas		63 Puskesmas		-	-	63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 Bangunan		N/A		14 Bangunan		17 Bangunan		34 Bangunan		-	-	34 Bangunan		34 Bangunan		242,86%		Dinas Kesehatan
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.02.2.01.01	**Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**			110.381.289				158.814.635		0		0		-	-	0		0		0,00%		
				Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 Bangunan		N/A		1 Bangunan		0 Bangunan		0 Bangunan		-	-	0 Bangunan		0 Bangunan		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.20	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			20.455.226				19.762.376		171.746		1.445.583		-	-	1.617.329		1.617.329		8,18%		
				Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan diadakan	33 Jenis		N/A		33 Jenis		0 Jenis		23 Jenis		-	-	23 Jenis		23 Jenis		69,70%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			8.617.456				160.248.142		14.000		1.980.704	-	-		1.994.704		1.994.704		1,24%		
				Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	1 Jenis		N/A		2 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		-		-		5 Jenis		5 Jenis		250,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	2 Kelompok		N/A		2 Kelompok		0 Kelompok		1 Kelompok		-		-		1 Kelompok		1 Kelompok		50,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
				Jumlah kelompok alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang diadakan	1 kelompok		N/A		1 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		-		-		0 kelompok		0 kelompok		0,00%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			77.584.596				25.507.504		2.833.142		5.436.677	-	-		8.269.819		8.269.819		32,42 %		
				Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	90 Jenis		N/A		61 Jenis		3 Jenis		6 Jenis		-		-		6 Jenis		6 Jenis		9,84%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			9.369.667				2.476.613		27.906		727.690	-	-		755.596		755.596		30,51 %		
				Jumlah jenis obat yang diadakan	14 Jenis		N/A		4 Jenis		2 Jenis		5 Jenis		-		-		5 Jenis		5 Jenis		125,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			3.663.107				4.210.150		0		0	-	-		0		0		0,00%		
				Jumlah jenis prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 Jenis		N/A		1 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		-		-		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	1 Kelompok		N/A		1 Kelompok		0 Kelompok		0 Kelompok		-		-		0 Kelompok		0 Kelompok		0,00%		RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			101.369				224.988		25.400		70.355	-	-		95.755		95.755		42,56 %		
				Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 Dokumen		N/A		6 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		50,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			926.120				942.328		0		0	-	-		0		0		0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Bangunan		N/A		1 Bangunan		0 Bangunan		0 Bangunan		-	-	0 Bangunan		0 Bangunan		0,00%		Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.09	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas**			22.802.988				46.522.422		0		2.472.879	-	-		2.472.879		2.472.879		5,32%		
			Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	12 Bangunan		N/A		12 Bangunan		2 Bangunan		11 Bangunan		-	-	11 Bangunan		11 Bangunan		91,67%		Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			491.248.798				464.929.637		80.768.567		143.796.944	-	-		224.565.510		224.565.510		48,30 %		
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		154 Kelurahan		308 Kelurahan		-		-		308 Kelurahan		308 Kelurahan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		189 Puskesmas		378 Puskesmas		-		-		378 Puskesmas		378 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		-		-		154 Kelurahan		154 Kelurahan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		-		-		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		185 Puskesmas		368 Puskesmas		-		-		368 Puskesmas		368 Puskesmas		584,13%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		N/A		105 jiwa		2034427 jiwa		57385 jiwa		-		-		57385 jiwa		57385 jiwa		54652,38 %		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		3 Puskesmas		-	-	3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		189 Puskesmas		378 Puskesmas		-	-	378 Puskesmas		378 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		128 Puskesmas		-	-	128 Puskesmas		128 Puskesmas		203,17%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		65 Puskesmas		-	-	65 Puskesmas		65 Puskesmas		103,17%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		-	-	63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		2 Puskesmas		-		-		2 Puskesmas		2 Puskesmas		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		2 Puskesmas		-		-		2 Puskesmas		2 Puskesmas		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		3 Puskesmas		-		-		3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah dokumen kegawatdaruratan yang pada posko terpadu	7 dokumen		N/A		7 dokumen		3 dokumen		6 dokumen		-		-		6 dokumen		6 dokumen		85,71%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	N/A		N/A		63 puskesmas		63 puskesmas		67 puskesmas		-		-		67 puskesmas		67 puskesmas		106,35%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		399 Kelurahan		801 Kelurahan		-		-		801 Kelurahan		801 Kelurahan		520,13%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		3 Puskesmas		-		-		3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		3 Puskesmas		-	-	3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-	-	5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.34	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			37.406.886				4.411.357		8.400		16.800		-		-		25.200		25.200		0,57%	
				Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana operasional pelayanan puskesmas	1 Jenis		N/A		1 Jenis		3 Jenis		6 Jenis		-		-		6 Jenis		6 Jenis		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			0				21.928.506		4.280.750		11.226.547	-	-				15.507.297		15.507.297		70,72 %	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		11,11%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		11 Kegiatan		-		-		11 Kegiatan		11 Kegiatan		122,22%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		44,44%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		9 Kegiatan		-		-		9 Kegiatan		9 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		9 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		22,22%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		8 Kegiatan		-		-		8 Kegiatan		8 Kegiatan		88,89%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		44,44%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Made)	N/A		N/A		9 Kegiatan		6 Kegiatan		7 Kegiatan		-		-		7 Kegiatan		7 Kegiatan		77,78%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		9 Kegiatan		5 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		9 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		10 Kegiatan		-		-		10 Kegiatan		10 Kegiatan		111,11%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		5 Kegiatan		8 Kegiatan		-		-		8 Kegiatan		8 Kegiatan		88,89%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		8 Kegiatan		-		-		8 Kegiatan		8 Kegiatan		88,89%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		22,22%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		12 Kegiatan		-		-		12 Kegiatan		12 Kegiatan		133,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		9 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		22,22%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		11,11%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		11,11%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		11,11%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		9 Kegiatan		3 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		22,22%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		22,22%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		55,56%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		13 Kegiatan		-		-		13 Kegiatan		13 Kegiatan		144,44%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		1 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		9 Kegiatan		4 Kegiatan		7 Kegiatan		-		-		7 Kegiatan		7 Kegiatan		77,78%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		9 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		9 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		44,44%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.25	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			19.900.499				9.011.800		712.354		3.637.632		-		-		4.349.985		4.349.985		48,27 %	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		2 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kelurahan yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		-		-		154 Kelurahan		154 Kelurahan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Made)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.26	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**			402.936.446				389.742.510		73.554.411		118.510.644		-		-		192.065.054		192.065.054		49,28 %	
				Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	1046167 jiwa		N/A		1045749 jiwa		3085880 jiwa		1108838 jiwa		-		-		1108838 jiwa		1108838 jiwa		106,03%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.15	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**			4.191.821				5.327.663		643.119		1.985.201		-		-		2.628.320		2.628.320		49,33 %	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		3 Kegiatan		9 Kegiatan		-		-		9 Kegiatan		9 Kegiatan		900,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	196 Balita		N/A		196 Balita		0 Balita		108 Balita		-		-		108 Balita		108 Balita		55,10%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.02	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**			3.281.051				457.501		0		0		-		-		0		0		0,00%	
				Jumlah Kunjungan Ibu dan Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	724 Kunjungan		N/A		138 Kunjungan		0 Kunjungan		0 Kunjungan		-		-		0 Kunjungan		0 Kunjungan		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.01	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**			7.496.159				7.804.210		1.097.289		3.033.889		-		-		4.131.178		4.131.178		52,94 %	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		125,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		125,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		-	-	63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		-	-	5 Kegiatan		5 Kegiatan		125,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Made)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		125,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		-	-	5 Kegiatan		5 Kegiatan		125,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.16	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**			0				635.292		2.035		118.158	-	-		120.193		120.193		18,92 %	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Made)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		-	-	5 Kegiatan		5 Kegiatan		250,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02 .17	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**			2.942.877				3.092.904		200.158		1.337.719		-		-		1.537.877		1.537.877		49,72 %	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Kegiatan		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Made)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.07	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**			4.295.627				3.727.700		11.700		670.655		-		-		682.355		682.355		18,30 %	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**			3.245.021				2.191.549		61.716		1.730.785		-		-		1.792.501		1.792.501		81,79 %	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		6 Kegiatan		-		-		6 Kegiatan		6 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Made)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		3 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		3 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		33,33%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		3 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		3 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		66,67%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu PTM)	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		67 Puskesmas		-		-		67 Puskesmas		67 Puskesmas		106,35%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.19	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya**			315.144				259.631		21.128		78.066		-		-		99.194		99.194		38,21 %	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		186 Puskesmas		372 Puskesmas		-		-		372 Puskesmas		372 Puskesmas		590,48%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.20	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			438.104				13.883.563		59.465		1.031.070		-		-		1.090.535		1.090.535		7,85%	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		4 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Kegiatan		N/A		63 Kegiatan		63 Kegiatan		67 Kegiatan		-	-	67 Kegiatan		67 Kegiatan		106,35%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		125,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		4 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		75,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		4 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Made)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		25,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.24	**Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan**			1.194.159				964.466		116.043		419.778	-	-		535.821		535.821		55,56 %	
				Jumlah Lokasi Kegawatdaruratan yang dilayani	900 Lokasi		N/A		900 Lokasi		145 Lokasi		428 Lokasi		-	-	428 Lokasi		428 Lokasi		47,56%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.30	**Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			0				1.490.986		0		0	-	-		0		0		0,00%	
				Jumlah Puskesmas dengan pelayanan Telemedicine	N/A		N/A		41 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			363.311				358.204		49.887		91.587	-	-		141.474		141.474		39,50 %	
				Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi		N/A		3 Aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		-	-	0 Aplikasi		0 Aplikasi		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.03.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**			363.311				358.204		49.887		91.587	-	-		141.474		141.474		39,50 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan	1 Aplikasi		N/A		1 Aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		-	-	0 Aplikasi		0 Aplikasi		0,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			58.566.151				1.537.351		91.274		315.716	-	-		406.991		406.991		26,47 %	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		2 Puskesmas		-	-	2 Puskesmas		2 Puskesmas		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		3 Puskesmas		-		-		3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		3 Puskesmas		-		-		3 Puskesmas		3 Puskesmas		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-	-	0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-	-	1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga		N/A		122 Lembaga		63 Lembaga		78 Lembaga		-	-	78 Lembaga		78 Lembaga		63,93%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		1 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		-		-		0 Puskesmas		0 Puskesmas		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		0 Puskesmas		1 Puskesmas		-		-		1 Puskesmas		1 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04.03	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**			57.934.571				1.275.949		81.797		261.409		-		-		343.206		343.206		26,90 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melakukan pemantapan mutu fasilitas kesehatan	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		57 Puskesmas		63 Puskesmas		-		-		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		-		-		4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		300,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		2 Kegiatan		5 Kegiatan		-		-		5 Kegiatan		5 Kegiatan		500,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04.04	**Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan**			631.580				261.403		9.477		54.307		-	-	63.784		63.784		24,40 %	
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi	59 lembaga		N/A		59 lembaga		14 lembaga		41 lembaga		-	-	41 lembaga		41 lembaga		69,49%		Dinas Kesehatan
6	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			8.028.738		1.418.144		35.673.279		1.860.015		16.319.983		-	-	18.179.998		18.179.998		50,96 %	
				Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53,52 %		N/A		46,82%		0,35%		4,21%		-	-	4,21%		4,21%		8,99%		Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			8.028.738				35.673.279		1.860.015		16.319.983		-	-	18.179.998		18.179.998		50,96 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		2 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1794 Orang		N/A		1794 Orang		10 Orang		138 Orang		-		-		138 Orang		138 Orang		7,69%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			8.028.738				2.241.809		118.450		215.781	-	-		334.231		334.231		14,91 %	
				Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	32 Kali		N/A		28 Kali		11 Kali		18 Kali		-	-	18 Kali		18 Kali		64,29%		Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			0				33.431.470		1.741.565		16.104.202	-	-		17.845.767		17.845.767		53,38 %	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		3 Orang		-		-		3 Orang		3 Orang		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		3 Orang		-		-		3 Orang		3 Orang		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		2 Orang		1 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		3 Orang		-	-	3 Orang		3 Orang		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		2 Orang		3 Orang		3 Orang		-	-	3 Orang		3 Orang		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Puskesmas dengan pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	N/A		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		64 Puskesmas		-		-		64 Puskesmas		64 Puskesmas		101,59%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		4 Orang		-		-		4 Orang		4 Orang		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Made)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		3 Orang		-		-		3 Orang		3 Orang		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-		-		2 Orang		2 Orang		100,00%		Dinas Kesehatan
7	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			2.842.589		178.706		2.396.027		11.621		235.096		-		-		246.717		246.717		10,30 %	
				Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			2.842.589				2.396.027		11.621		235.096		-		-		246.717		246.717		10,30 %	
				Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT		N/A		217 PIRT		30 PIRT		74 PIRT		-		-		74 PIRT		74 PIRT		34,10%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			2.842.589				2.396.027		11.621		235.096	-	-		246.717		246.717		10,30 %		
				Jumlah sampel yang diperiksa	3775 Sampel		N/A		2230 Sampel		396 Sampel		1293 Sampel		-	-	1293 Sampel		1293 Sampel		57,98%		Dinas Kesehatan
8	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			66.842.725		73.795.819		58.862.489		25.505.594		59.253.745	-	-		84.759.339		84.759.339		144,00 %		
				Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%		N/A		100%		100%		103,87%		-	-	103,87%		103,87%		103,87%		Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.118.740				500.414		48.027		66.827	-	-		114.854		114.854		22,95 %		
				Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		154 Kelurahan		616 Kelurahan		-	-	616 Kelurahan		616 Kelurahan		400,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			10.118.740				500.414		48.027		66.827	-	-		114.854		114.854		22,95 %		
				Jumlah Puskesmas dengan penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		65 Puskesmas		-	-	65 Puskesmas		65 Puskesmas		103,17%		Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.652.582				58.362.075		25.457.567		59.186.918	-	-		84.644.485		84.644.485		145,03 %		
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Made)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		5 Puskesmas		-		-		5 Puskesmas		5 Puskesmas		500,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III									
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		-	-	154 Kelurahan		154 Kelurahan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-	-	4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		4 Puskesmas		-		-		4 Puskesmas		4 Puskesmas		400,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-		-		6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		1 Puskesmas		3 Puskesmas		6 Puskesmas		-	-	6 Puskesmas		6 Puskesmas		600,00%		Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**			16.652.582				58.362.075		25.457.567		59.186.918	-	-		84.644.485		84.644.485		145,03%	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pucangsewu)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Putat Jaya)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sawah Pulo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidosermo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedurus)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manukan Kulon)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pegirian)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Perak Timur)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Menur)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Klampis Ngasem)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dr. Soetomo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banyu Urip)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedungdoro)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kenjeran)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Krembangan Selatan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lidah Kulon)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gading)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kebonsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dupak)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gundih)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambak Wedi)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Simomulyo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Siwalankerto)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambakrejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokusumo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokromo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Peneleh)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sawahan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-		-		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanjungsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		3 Kegiatan		-		-		3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wiyung)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Mojo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bangkingan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Moro Krembangan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pakis)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Benowo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bulak Banteng)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dukuh Kupang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sememi)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidotopo Wetan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gunung Anyar)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jemursari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalirungkut)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jagir)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jeruk)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalijudan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Mulyorejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Asemrowo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Balas Klumprik)	N/A		N/A		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah Jenis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	6 Jenis		N/A		6 Jenis		6 Jenis		8 Jenis		-	-	8 Jenis		8 Jenis		133,33%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Balongsari)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gayungan)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Keputih)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ketabang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lontar)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		200,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Made)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Medokan Ayu)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngagel Rejo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pacar Keling)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Rangkah)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidotopo)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		-	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Simolawang)	N/A		N/A		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tembok Dukuh)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		-	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tenggilis)	N/A		N/A		2 Kegiatan		1 Kegiatan		3 Kegiatan		-	-	3 Kegiatan		3 Kegiatan		150,00%		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
9	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			135.419.812		49.299.519		115.516.605		14.345.082		31.501.769		-		-		45.846.851		45.846.851		39,69 %	
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,75 %		N/A		86,00%		89,01%		89%		-		-		89%		89%		103,49%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%		N/A		90%		96,70%		96,70%		-		-		96,70%		96,70%		107,44%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344.372				119.813		29.707		50.826		-		-		80.533		80.533		67,22 %	
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			344.372				119.813		29.707		50.826		-		-		80.533		80.533		67,22 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 dokumen		N/A		8 dokumen		2 dokumen		5 dokumen		-		-		5 dokumen		5 dokumen		62,50%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.347.173				49.129.284		2.342.520		2.355.160		-		-		4.697.680		4.697.680		9,56%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.347.173				49.129.284		2.342.520		2.355.160		-		-		4.697.680		4.697.680		9,56%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			10.691.809				7.331.639		1.135.155		2.743.563	-	-				3.878.718		3.878.718		52,90 %	
				Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.06 .02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			10.691.809				7.331.639		1.135.155		2.743.563	-	-				3.878.718		3.878.718		52,90 %	
				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			66.036.458				58.935.870		10.837.700		26.352.220	-	-				37.189.920		37.189.920		63,10 %	
				Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		N/A		315 unit		49 unit		142 unit		-		-		142 unit		142 unit		45,08%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.09 .09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			34.268.991				30.831.145		9.238.223		17.568.372	-	-				26.806.594		26.806.594		86,95 %	
				Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.01.2.09 .03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**			17.184.882				14.688.559		269.891		3.356.774	-	-				3.626.665		3.626.665		24,69 %	
				Jumlah peralatan dan alat besar yang dipelihara selama 12 bulan	76 unit		N/A		72 unit		7 unit		28 unit		-		-		28 unit		28 unit		38,89%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.582.585				13.416.166		1.329.586		5.427.074	-	-		6.756.661		6.756.661		50,36 %	
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan	256 unit		N/A		243 unit		42 unit		114 unit		-	-	114 unit		114 unit		46,91%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
10	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			50.157.841		42.274.867		53.064.987		10.816.439		31.935.151	-	-		42.751.590		42.751.590		80,56 %	
				Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.157.841				53.064.987		10.816.439		31.935.151	-	-		42.751.590		42.751.590		80,56 %	
				Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		N/A		60 unit		12 unit		54 unit		-	-	54 unit		54 unit		90,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			50.157.841				53.064.987		10.816.439		31.935.151	-	-		42.751.590		42.751.590		80,56 %	
				Jumlah unit pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	282 unit		N/A		264 unit		26 unit		105 unit		-	-	105 unit		105 unit		39,77%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			0		75.047		34.985.625		0		0	-	-		0		0		0,00%	
				Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan	%		N/A		99%		99,39%		99,25%		-	-	99,25%		99,25%		100,25%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			0				34.985.625		0		0	-	-		0		0		0,00%		
				Jumlah lokasi penerima intervensi jaringan perpipaan	N/A		N/A		2 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		-	-	0 Kecamatan		0 Kecamatan		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			0				34.985.625		0		0	-	-		0		0		0,00%		
				Jumlah lokasi perluasan SPAM jaringan perpipaan (DAK Air Minum)	N/A		N/A		1 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		-	-	0 Lokasi		0 Lokasi		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
11	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			9.306.760		818.570		6.676.150		505.207		2.456.063	-	-		2.961.270		2.961.270		44,36 %		
				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		N/A		901 m3		279 m3		130 m3		-	-	130 m3		130 m3		14,43%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.306.760				6.676.150		505.207		2.456.063	-	-		2.961.270		2.961.270		44,36 %		
				jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan		N/A		2 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		N/A		4 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		-	-	3 Jenis		3 Jenis		75,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			7.156.794				5.462.051		461.387		2.356.094	-	-		2.817.480		2.817.480		51,58 %		
				Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi		N/A		96 lokasi		24 lokasi		48 lokasi		-	-	48 lokasi		48 lokasi		50,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			0				1.214.098		43.821		99.969		-		143.789		143.789		11,84 %		
				Jumlah prasarana sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	N/A		N/A		2 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		-	-	0 Lokasi		0 Lokasi		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
12	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			582.830.777		3.261.149		456.679.398		14.014.704		47.006.154		-		61.020.857		61.020.857		13,36 %		
				Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			582.830.777				456.679.398		14.014.704		47.006.154		-		61.020.857		61.020.857		13,36 %		
				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		N/A		1099 lokasi		362 lokasi		679 lokasi		-	-	679 lokasi		679 lokasi		61,78%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		N/A		80 dokumen		0 dokumen		28 dokumen		-	-	28 dokumen		28 dokumen		35,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 Lokasi		N/A		200 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		-	-	2 Lokasi		2 Lokasi		1,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			103.393.336				74.664.851		13.503.057		35.432.042		-		48.935.098		48.935.098		65,54 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lokasi pengerukan saluran	1.160 lokasi		N/A		1050 lokasi		362 lokasi		672 lokasi		-	-	672 lokasi		672 lokasi		64,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01.12	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**			125.161.494				128.309.225		32.125		725.586	-	-		757.711		757.711		0,59%	
				Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun	200 Lokasi		N/A		200 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		-	-	2 Lokasi		2 Lokasi		1,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01.05	**Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**			246.834.073				150.873.092		122.365		2.447.002	-	-		2.569.367		2.569.367		1,70%	
				Jumlah lokasi sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun	30 lokasi		N/A		24 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		-	-	2 lokasi		2 lokasi		8,33%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01.01	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**			8.038.411				13.449.537		135.133		3.317.173	-	-		3.452.307		3.452.307		25,67 %	
				Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun	50 dokumen		N/A		50 dokumen		0 dokumen		28 dokumen		-	-	28 dokumen		28 dokumen		56,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01.07	**Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan**			89.285.275				78.939.391		173.499		4.919.345	-	-		5.092.844		5.092.844		6,45%	
				Jumlah lokasi saluran yang direhabilitasi	33 lokasi		N/A		25 lokasi		0 lokasi		5 lokasi		-	-	5 lokasi		5 lokasi		20,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.06.2.01.03	**Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**			10.118.188				10.443.302		48.525		165.006	-	-		213.531		213.531		2,04%	
				Jumlah dokumen supervisi sistem drainase perkotaan yang disusun	30 dokumen		N/A		30 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-	-	0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
13	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			3.183.407		1.058.886		3.182.728		500.576		1.053.637	-	-		1.554.213		1.554.213		48,83 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11%		N/A		7%		2,78%		2,64%		-	-	2,64%		2,64%		37,71%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			3.183.407				3.182.728		500.576		1.053.637	-	-		1.554.213		1.554.213		48,83 %	
				Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas		N/A		240 berkas		60 berkas		120 berkas		-	-	120 berkas		120 berkas		50,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Dokumen		N/A		12 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		16,67%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.07.2.01 .02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.412.391				1.092.985		118.690		295.803	-	-		414.493		414.493		37,92 %	
				Jumlah Surat Pemberitahuan Nilai Sewa kepada pemohon	14 Dokumen		N/A		12 Dokumen		1 Dokumen		8 Dokumen		-	-	8 Dokumen		8 Dokumen		66,67%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.07.2.01 .03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.771.015				2.089.743		381.886		757.834	-	-		1.139.720		1.139.720		54,54 %	
				Jumlah permohonan masuk yang memenuhi syarat	240 berkas		N/A		240 berkas		60 berkas		120 berkas		-	-	120 berkas		120 berkas		50,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
14	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			315.023.875		867.810		230.573.663		11.590.099		54.477.016	-	-		66.067.116		66.067.116		28,65 %	
				Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	91,25 %		N/A		90,22%		54,29%		68,04%		-	-	68,04%		68,04%		75,42%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase bangunan yang ber IMB	2,69 %		N/A		2,06%		0,43%		0,94%		-	-	0,94%		0,94%		45,63%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	90%		N/A		80%		86,16%		82,03%		-	-	82,03%		82,03%		102,54%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			315.023.875				230.573.663		11.590.099		54.477.016	-	-		66.067.116		66.067.116		28,65 %	
				Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	248 Bangunan		N/A		241 Bangunan		72 Bangunan		195 Bangunan		-	-	195 Bangunan		195 Bangunan		80,91%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	7921 Berkas		N/A		2281 Berkas		1143 Berkas		2446 Berkas		-	-	2446 Berkas		2446 Berkas		107,23%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	125 Berkas		N/A		75 Berkas		24 Berkas		93 Berkas		-		-		93 Berkas		93 Berkas		124,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		2 Dokumen		4 Dokumen		-		-		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	7921 Berkas		7767 %		2281 Berkas		535 Berkas		1218 Berkas		-		-		1218 Berkas		1218 Berkas		53,40%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	380 Lokasi		412%		150 Lokasi		43 Lokasi		85 Lokasi		-		-		85 Lokasi		85 Lokasi		56,67%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.08.2.01.13	**Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			38.016.233				43.389.380		6.064.500		20.391.069		-		-		26.455.569		26.455.569		60,97 %	
				Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah	270 Bangunan		N/A		173 Bangunan		60 Bangunan		126 Bangunan		-		-		126 Bangunan		126 Bangunan		72,83%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.08.2.01.09	**Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan**			3.517.554				1.716.111		264.791		689.405		-		-		954.197		954.197		55,60 %	
				Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan kedalam peta	5941 Data		7767 %		1711 Data		535 Data		1218 Data		-		-		1218 Data		1218 Data		71,19%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti	380 Lokasi		412%		150 Lokasi		43 Lokasi		85 Lokasi		-	-	85 Lokasi		85 Lokasi		56,67%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.08.2.01.01	**Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG**			6.187.321				3.676.450		508.741		1.114.873	-	-		1.623.614		1.623.614		44,16 %		
				Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang terbit dan telah disahkan	5941 Berkas		N/A		1711 Berkas		863 Berkas		1664 Berkas		-	-	1664 Berkas		1664 Berkas		97,25%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah berkas permohonan SLF yang terbit dan telah disahkan	25 Berkas		N/A		15 Berkas		2 Berkas		16 Berkas		-	-	16 Berkas		16 Berkas		106,67%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.08.2.01.03	**Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota**			744.126				584.845		111.600		224.500	-	-		336.100		336.100		57,47 %		
				Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.08.2.01.02	**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			266.558.642				181.206.877		4.640.467		32.057.169	-	-		36.697.636		36.697.636		20,25 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun	65 Dokumen		N/A		58 Dokumen		0 Dokumen		15 Dokumen		-	-	15 Dokumen		15 Dokumen		25,86%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun/Direhab	141 Bangunan		N/A		140 Bangunan		12 Bangunan		69 Bangunan		-	-	69 Bangunan		69 Bangunan		49,29%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
15	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			610.347.180		36.870.567		669.063.693		125.048.401		185.619.903	-	-		310.668.304		310.668.304		46,43 %	
				Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter		N/A		10.850 meter		0 meter		0 meter		-	-	0 meter		0 meter		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Luas jalan yang diperbaiki	210.000 m2		N/A		130000 m2		123584.4 m2		203000.87 m2		-	-	203000.87 m2		203000.87 m2		156,15%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			610.347.180				669.063.693		125.048.401		185.619.903	-	-		310.668.304		310.668.304		46,43 %	
				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	338 lokasi		N/A		309 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-	-	0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur	5.550 m2		N/A		5550 m2		0 m2		18683 m2		-	-	18683 m2		18683 m2		336,63%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		N/A		130 dokumen		38 dokumen		93 dokumen		-	-	93 dokumen		93 dokumen		71,54%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.501 lokasi		N/A		1081 lokasi		1180 lokasi		2286 lokasi		-	-	2286 lokasi		2286 lokasi		211,47%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			273.886.986				387.962.561		137.572		5.739.901		-		-		5.877.472		5.877.472		1,51%	
				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	38 lokasi		N/A		9 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun	300 Lokasi		N/A		300 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		-		-		0 Lokasi		0 Lokasi		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			221.175.434				183.049.649		116.743.644		159.536.431		-		-		276.280.075		276.280.075		150,93%	
				Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		N/A		2 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		-		-		3 lokasi		3 lokasi		150,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			87.885.919				72.076.166		5.877.668		15.003.082		-		-		20.880.750		20.880.750		28,97%	
				Jumlah lokasi jalan yang dilakukan pemeliharaan	1.500 lokasi		N/A		1080 lokasi		1180 lokasi		2286 lokasi		-		-		2286 lokasi		2286 lokasi		211,67%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			14.182.828				13.337.578		67.848		93.848		-		-		161.695		161.695		1,21%	
				Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	67 dokumen		N/A		65 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-		-		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			7.385.767				9.080.406		2.221.669		5.246.642		-		-		7.468.311		7.468.311		82,25%	
				Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	70 dokumen		N/A		65 dokumen		38 dokumen		93 dokumen		-		-		93 dokumen		93 dokumen		143,08%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan			5.830.246				3.557.334		0		0		-		-		0		0		0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lokasi pembangunan / rekonstruksi jalan (DAK Fisik)	1 lokasi		N/A		1 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-	-	0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
16	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			982.825		259.436		815.230		124.804		227.725	-	-		352.528		352.528		43,24 %	
				Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	100%		N/A		91%		10%		42%		-	-	42%		42%		46,15%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			982.825				815.230		124.804		227.725	-	-		352.528		352.528		43,24 %	
				Jenis perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis		N/A		5 jenis		4 jenis		5 jenis		-	-	5 jenis		5 jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.11.2.01 .07	**Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi**			982.825				815.230		124.804		227.725	-	-		352.528		352.528		43,24 %	
				Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	120 perusahaan		N/A		100 perusahaan		10 perusahaan		42 perusahaan		-	-	42 perusahaan		42 perusahaan		42,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
17	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			14.227.131		641.704		3.814.626		735.491		1.715.093	-	-		2.450.584		2.450.584		64,24 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pelayanan penataan ruang	96%		N/A		95%		35,68%		60,24%		-	-	60,24%		60,24%		63,41%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota			3.956.284				1.971.698		366.637		859.015	-	-		1.225.652		1.225.652		62,16 %	
				Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen		N/A		3 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		33,33%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.12.2.01 .03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			3.956.284				1.971.698		366.637		859.015	-	-		1.225.652		1.225.652		62,16 %	
				Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau kajian teknis pendukung penataan ruang daerah yang disusun	3 dokumen		N/A		3 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		33,33%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10.270.847				1.842.928		368.855		856.078	-	-		1.224.933		1.224.933		66,47 %	
				Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen		N/A		3 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-	-	0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			2.713.270				844.027		162.824		385.187	-	-		548.011		548.011		64,93 %		
				Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen		N/A		2 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-	-	0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			7.557.576				998.900		206.030		470.891	-	-		676.921		676.921		67,77 %		
				Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang	154 Kelurahan		N/A		154 Kelurahan		34 Kelurahan		76 Kelurahan		-	-	76 Kelurahan		76 Kelurahan		49,35%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					
18	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.352.356		0		35.301.175		2.808.110		4.907.728	-	-		7.715.837		7.715.837		21,86 %		
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,5 %		N/A		87,50%		91,72%		91,33%		-	-	91,33%		91,33%		104,38%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.425				60.698		13.160		49.680	-	-		62.840		62.840		103,53 %		
				Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		2 jenis		-	-	2 jenis		2 jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.425				60.698		13.160		49.680	-	-		62.840		62.840		103,53 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 dokumen		N/A		8 dokumen		2 dokumen		5 dokumen		-	-	5 dokumen		5 dokumen		62,50%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43.233.748				28.339.379		1.017.559		1.039.118	-	-		2.056.678		2.056.678		7,26%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.233.748				28.339.379		1.017.559		1.039.118	-	-		2.056.678		2.056.678		7,26%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.664.298				4.638.608		1.333.392		2.542.564	-	-		3.875.955		3.875.955		83,56 %	
				Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis		N/A		15 Jenis		12 Jenis		15 Jenis		-	-	15 Jenis		15 Jenis		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.664.298				4.638.608		1.333.392		2.542.564	-	-		3.875.955		3.875.955		83,56 %	
				Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	85%		N/A		85%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.333.885				2.262.490		443.999		1.276.366	-	-		1.720.365		1.720.365		76,04 %		
				Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 Jenis		N/A		6 Jenis		5 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		116,67%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.333.885				2.262.490		443.999		1.276.366	-	-		1.720.365		1.720.365		76,04 %		
				Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
19	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			40.719.101		6.664.637		21.816.144		4.836.298		9.484.977	-	-		14.321.275		14.321.275		65,65 %		
				Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%		N/A		50%		67,48%		69,98%		-	-	69,98%		69,98%		139,96%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101				21.816.144		4.836.298		9.484.977	-	-		14.321.275		14.321.275		65,65 %		
				Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya	5.708 ijin/sewa		N/A		5708 ijin/sewa		4582 ijin/sewa		4718 ijin/sewa		-	-	4718 ijin/sewa		4718 ijin/sewa		82,66%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.02.2.05 .02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101				21.816.144		4.836.298		9.484.977	-	-		14.321.275		14.321.275		65,65 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok		N/A		105 blok		105 blok		105 blok		-	-	105 blok		105 blok		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
20	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			18.599.004		5.444.395		34.172.222		2.111.907		12.707.934	-	-		14.819.841		14.819.841		43,37 %	
				Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	100%		N/A		89%		0%		18,75%		-	-	18,75%		18,75%		21,07%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			18.599.004				34.172.222		2.111.907		12.707.934	-	-		14.819.841		14.819.841		43,37 %	
				Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis		N/A		2 jenis		0 jenis		4 jenis		-	-	4 jenis		4 jenis		200,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.03.2.03 .02	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**			18.599.004				34.172.222		2.111.907		12.707.934	-	-		14.819.841		14.819.841		43,37 %	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	405 unit		N/A		800 unit		0 unit		150 unit		-	-	150 unit		150 unit		18,75%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
21	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			96.664.080		34.040.185		67.425.781		2.888.405		9.720.356	-	-		12.608.761		12.608.761		18,70 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**			96.664.080				67.425.781		2.888.405		9.720.356	-	-		12.608.761		12.608.761		18,70 %	
				Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi		N/A		7 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-	-	0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.04.2.01 .01	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			96.664.080				67.425.781		2.888.405		9.720.356	-	-		12.608.761		12.608.761		18,70 %	
				Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi	10 Bangunan		N/A		7 Bangunan		0 Bangunan		0 Bangunan		-	-	0 Bangunan		0 Bangunan		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
22	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			1.260.047		1.112.775		1.004.664		233.315		506.230	-	-		739.544		739.544		73,61 %	
				Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	100%		N/A		20%		0%		15,07%		-	-	15,07%		15,07%		75,35%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.260.047				1.004.664		233.315		506.230	-	-		739.544		739.544		73,61 %	
				Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen		N/A		11 dokumen		2 dokumen		8 dokumen		-	-	8 dokumen		8 dokumen		72,73%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.260.047				1.004.664		233.315		506.230	-	-		739.544		739.544		73,61 %	
				Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang disusun	12 dokumen		N/A		11 dokumen		2 dokumen		8 dokumen		-	-	8 dokumen		8 dokumen		72,73%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				
23	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96.085.239		390.288		81.886.954		5.302.081		7.785.565	-	-		13.087.646		13.087.646		15,98 %	
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%		N/A		93%		94,61%		95%		-	-	95%		95%		102,15%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%		N/A		88%		92,74%		91,67%		-	-	91,67%		91,67%		104,17%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		N/A		96%		97,54%		97%		-	-	97%		97%		101,04%		Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.722.492				70.724.188		3.455.765		3.436.613		-		-		6.892.378		6.892.378		9,75%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			79.722.492				70.724.188		3.455.765		3.436.613		-		-		6.892.378		6.892.378		9,75%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.872.334				4.325.767		590.152		1.733.112		-		-		2.323.265		2.323.265		53,71 %	
				Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.872.334				4.325.767		590.152		1.733.112		-		-		2.323.265		2.323.265		53,71 %	
				Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.490.413				6.836.999		1.256.164		2.615.840		-		-		3.872.004		3.872.004		56,63 %	
				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase jasa pelayanan perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.490.413				6.836.999		1.256.164		2.615.840		-		-		3.872.004		3.872.004		56,63 %	
				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyediaan jasa pelayanan kantor	12 Bulan		N/A		12 Bulan		3 Bulan		6 Bulan		-		-		6 Bulan		6 Bulan		50,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
24	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			37.177.337		34.186.752		22.651.071		4.575.234		10.886.098	-	-		15.461.332		15.461.332		68,26 %	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase PPNS yang dibina	100%		N/A		100%		28,89%		56,52%		-	-	56,52%		56,52%		56,52%		Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		N/A		100%		59,71%		107,98%		-	-	107,98%		107,98%		107,98%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			34.779.392				20.763.564		4.209.528		10.140.744	-	-		14.350.272		14.350.272		69,11 %	
				Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	116 Titik/Lokasi		N/A		92 Titik/Lokasi		92 Titik/Lokasi		92 Titik/Lokasi		-	-	92 Titik/Lokasi		92 Titik/Lokasi		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
				Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	978 Orang		N/A		978 Orang		584 Orang		1056 Orang		-	-	1056 Orang		1056 Orang		107,98%		Satuan Polisi Pamong Praja
				Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga		N/A		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		-	-	11 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1520 Orang		N/A		1040 Orang		320 Orang		640 Orang		-	-	640 Orang		640 Orang		61,54%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.06	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			527.904				366.923		77.458		172.804	-	-		250.263		250.263		68,21 %	
				Jumlah kegiatan hasil kerjasama antar lembaga dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	132 Kali		N/A		132 Kali		72 Kali		147 Kali		-	-	147 Kali		147 Kali		111,36%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.01	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**			31.434.907				17.541.912		3.578.485		8.762.744	-	-		12.341.229		12.341.229		70,35 %	
				Jumlah objek Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan yang ditangani	10080 Objek		N/A		10080 Objek		2487 Objek		5112 Objek		-	-	5112 Objek		5112 Objek		50,71%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.02	**Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**			2.167.280				1.699.225		391.889		789.000	-	-		1.180.889		1.180.889		69,50 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi unjuk rasa dan kerusuhan massa akibat penertiban pelanggaran perda/perkada yang ditangani	36 Penertiban		N/A		36 Penertiban		8 Penertiban		25 Penertiban		-	-	25 Penertiban		25 Penertiban		69,44%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.05	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**			464.625				928.408		123.555		337.277	-	-		460.832		460.832		49,64 %		
				Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP	192 Kali		N/A		192 Kali		46 Kali		91 Kali		-	-	91 Kali		91 Kali		47,40%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.09	**Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada**			124.031				135.205		21.528		43.094	-	-		64.622		64.622		47,80 %		
				jumlah frekuensi pemberian layanan dalam rangka penegakan perda/perkada kepada masyarakat	74 Kali		N/A		74 Kali		18 Kali		37 Kali		-	-	37 Kali		37 Kali		50,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.08	**Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**			60.646				91.890		16.613		35.825	-	-		52.438		52.438		57,07 %		
				Jumlah SOP terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan perda/perkada yang disusun	18 SOP		N/A		18 SOP		3 SOP		7 SOP		-	-	7 SOP		7 SOP		38,89%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			2.282.865				1.764.677		345.335		699.682	-	-		1.045.017		1.045.017		59,22 %		
				Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan	11 Perda/perkada		N/A		11 Perda/perkada		7 Perda/perkada		14 Perda/perkada		-	-	14 Perda/perkada		14 Perda/perkada		127,27%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.03	**Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			1.865.433				1.373.250		275.229		551.517	-	-		826.746		826.746		60,20 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	530 Objek		N/A		530 Objek		334 Objek		655 Objek		-		-		655 Objek		655 Objek		123,58%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			417.432				391.427		70.106		148.165		-		-		218.272		218.272		55,76 %	
				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	250 Objek		N/A		250 Objek		40 Objek		147 Objek		-		-		147 Objek		147 Objek		58,80%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			115.079				122.830		20.371		45.672		-		-		66.043		66.043		53,77 %	
				Jumlah Lembaga yang memberikan Pembinaan PPNS	7 Lembaga		N/A		7 Lembaga		2 Lembaga		4 Lembaga		-		-		4 Lembaga		4 Lembaga		57,14%		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			115.079				122.830		20.371		45.672		-		-		66.043		66.043		53,77 %	
				Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	72 Orang		N/A		92 Orang		26 Orang		52 Orang		-		-		52 Orang		52 Orang		56,52%		Satuan Polisi Pamong Praja
25	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			48.680.383		136.700		44.633.564		8.346.194		20.903.188		-		-		29.249.383		29.249.383		65,53 %	
				Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		N/A		100%		52,50%		41,77%		-		-		41,77%		41,77%		41,77%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%		N/A		100%		97,44%		97,89%		-		-		97,89%		97,89%		97,89%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			20.320.538				21.757.085		4.168.095		10.583.041		-		-		14.751.136		14.751.136		67,80 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	30 Kawasan		N/A		31 Kawasan		10 Kawasan		16 Kawasan		-	-	16 Kawasan		16 Kawasan		51,61%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			1.390.837				1.079.051		103.029		445.297	-	-		548.326		548.326		50,82 %	
				Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1650 orang		N/A		1650 orang		280 orang		620 orang		-	-	620 orang		620 orang		37,58%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			18.597.142				20.446.036		4.017.066		10.051.977	-	-		14.069.043		14.069.043		68,81 %	
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		5 Kali		-	-	5 Kali		5 Kali		41,67%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			332.559				231.999		48.000		85.768	-	-		133.768		133.768		57,66 %	
				Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	5 jenis		N/A		5 jenis		1 jenis		2 jenis		-	-	2 jenis		2 jenis		40,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			28.359.846				22.876.479		4.178.099		10.320.147	-	-		14.498.247		14.498.247		63,38 %	
				Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1200 Orang		N/A		1200 Orang		1329 Orang		3748 Orang		-	-	3748 Orang		3748 Orang		312,33%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.268.308				2.195.436		344.185		754.835	-	-		1.099.019		1.099.019		50,06 %	
				Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	4 Jenis		N/A		4 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		-	-	4 Jenis		4 Jenis		100,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			26.091.537				20.681.043		3.833.915		9.565.313	-	-		13.399.227		13.399.227		64,79 %	
				Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat	10 jenis		N/A		10 jenis		11 jenis		11 jenis		-	-	11 jenis		11 jenis		110,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			64.034.041		4.624.155		69.963.693		8.401.242		24.238.857	-	-		32.640.099		32.640.099		46,65 %	
				Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46		46,11 %		48		11,78		31,98		-	-	31,98		31,98		133,38%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.884.592				69.021.911		8.244.242		23.909.995	-	-		32.154.237		32.154.237		46,59 %	
				Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	810 Petugas Pemadam Terlatih		N/A		810 Petugas Pemadam Terlatih		0 Petugas Pemadam Terlatih		0 Petugas Pemadam Terlatih		-	-	0 Petugas Pemadam Terlatih		0 Petugas Pemadam Terlatih		0,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			42.696.091				33.989.688		6.253.217		15.501.268	-	-		21.754.485		21.754.485		64,00 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran dan Penyelamatan yang dipenuhi kebutuhannya	756 Orang		N/A		756 Orang		619 Orang		641 Orang		-	-	641 Orang		641 Orang		84,79%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.01.07	**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**			1.006.458				842.502		126.167		230.954	-	-		357.122		357.122		42,39 %	
				Peningkatan kompetensi aparatur	18 Kali		N/A		10 Kali		2 Kali		5 Kali		-	-	5 Kali		5 Kali		50,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.01.06	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**			10.493.247				27.021.269		196.310		4.351.898	-	-		4.548.209		4.548.209		16,83 %	
				Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan	910 Unit		N/A		785 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		0,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.01.05	**Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**			8.688.797				7.168.451		1.668.548		3.825.874	-	-		5.494.422		5.494.422		76,65 %	
				Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya	260 Unit		N/A		220 Unit		11 Unit		85 Unit		-	-	85 Unit		85 Unit		38,64%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			550.836				402.795		48.596		140.219	-	-		188.816		188.816		46,88 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Berkas permohonan pemeriksaan siaten proteksi kebakaran pemilik bangunan/gedung guna pencegahan kebakaran di Kota Surabaya	520 Berkas		N/A		440 Berkas		132 Berkas		222 Berkas		-		-		222 Berkas		222 Berkas		50,45%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.02.02	**Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**			550.836				402.795		48.596		140.219		-		-		188.816		188.816		46,88 %	
				Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran	600 Bangunan/Gedung		N/A		520 Bangunan/Gedung		130 Bangunan/Gedung		250 Bangunan/Gedung		-		-		250 Bangunan/Gedung		250 Bangunan/Gedung		48,08%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			598.613				538.987		108.404		188.642		-		-		297.046		297.046		55,11 %	
				Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	110 Kegiatan		N/A		70 Kegiatan		15 Kegiatan		29 Kegiatan		-		-		29 Kegiatan		29 Kegiatan		41,43%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04.2.04.01	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**			598.613				538.987		108.404		188.642		-		-		297.046		297.046		55,11 %	
				Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan	120 Kali		N/A		120 Kali		40 Kali		70 Kali		-		-		70 Kali		70 Kali		58,33%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																					
27	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			24.100.497		15.370.719		18.443.572		1.057.490		1.757.579		-		-		2.815.069		2.815.069		15,26 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		N/A		88%		89,89%		87,67%		-	-	87,67%		87,67%		99,63%		Dinas Sosial
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.227.230				14.633.143		643.313		654.938	-	-		1.298.251		1.298.251		8,87%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.227.230				14.633.143		643.313		654.938	-	-		1.298.251		1.298.251		8,87%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.354.427				2.138.650		189.585		541.744	-	-		731.329		731.329		34,20 %	
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.354.427				2.138.650		189.585		541.744	-	-		731.329		731.329		34,20 %	
				Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dan dipelihara	135 unit		N/A		135 unit		19 unit		32 unit		-	-	32 unit		32 unit		23,70%		Dinas Sosial
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.518.840				1.671.780		224.592		560.897	-	-		785.489		785.489		46,99 %	
				Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Sosial
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.518.840				1.671.780		224.592		560.897	-	-		785.489		785.489		46,99 %	
				Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Sosial
28	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			8.489.757		199.289		6.823.521		1.166.424		2.318.533	-	-		3.484.957		3.484.957		51,07 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		N/A		76,47%		66,67%		91,67%		-	-	91,67%		91,67%		119,88%		Dinas Sosial
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88,98%		N/A		84,94%		61%		78,06%		-	-	78,06%		78,06%		91,90%		Dinas Sosial
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			8.489.757				6.823.521		1.166.424		2.318.533	-	-		3.484.957		3.484.957		51,07 %	
				Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS	969 orang		N/A		925 orang		631 orang		1333 orang		-	-	1333 orang		1333 orang		144,11%		Dinas Sosial
				Jumlah jenis PSKS dan lembaga kepahlawanan yang dibina	17 jenis		N/A		13 jenis		9 jenis		12 jenis		-	-	12 jenis		12 jenis		92,31%		Dinas Sosial
		1.06.02.2.03 .01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			6.940.781				5.549.186		1.023.125		2.067.821	-	-		3.090.946		3.090.946		55,70 %	
				Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS perorangan	597 orang		N/A		570 orang		264 orang		445 orang		-	-	445 orang		445 orang		78,07%		Dinas Sosial
				Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	7 jenis		N/A		5 jenis		3 jenis		4 jenis		-	-	4 jenis		4 jenis		80,00%		Dinas Sosial
		1.06.02.2.03 .04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.548.976				1.274.335		143.299		250.712	-	-		394.011		394.011		30,92 %	
				Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	372 orang		N/A		355 orang		367 orang		888 orang		-	-	888 orang		888 orang		250,14%		Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina	10 jenis		N/A		8 jenis		6 jenis		8 jenis		-	-	8 jenis		8 jenis		100,00%		Dinas Sosial
29	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			67.098.483		5.495.545		35.290.455		4.454.848		10.910.856	-	-		15.365.704		15.365.704		43,54 %	
				Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
				Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
		1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			45.567.674				15.518.371		1.724.908		4.459.173	-	-		6.184.081		6.184.081		39,85 %	
				Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Sosial
				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Sosial
				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			45.091.099				15.073.751		1.688.776		4.385.242		-		-		6.074.018		6.074.018		40,30 %	
				Jumlah Anak yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	130 orang		N/A		130 orang		102 orang		102 orang		-		-		102 orang		102 orang		78,46%		Dinas Sosial
				Jumlah Lanjut Usia yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	160 orang		N/A		160 orang		160 orang		167 orang		-		-		167 orang		167 orang		104,38%		Dinas Sosial
				Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	95 orang		N/A		95 orang		95 orang		69 orang		-		-		69 orang		69 orang		72,63%		Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			476.574				444.619		36.132		73.931		-		-		110.063		110.063		24,75 %	
				Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi	795 orang		N/A		795 orang		645 orang		1028 orang		-		-		1028 orang		1028 orang		129,31%		Dinas Sosial
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			21.530.809				19.772.085		2.729.940		6.451.683		-		-		9.181.623		9.181.623		46,44 %	
				Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-		-		6 laporan		6 laporan		50,00%		Dinas Sosial
				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			17.475.588				16.421.570		2.250.446		5.301.392		-		-		7.551.838		7.551.838		45,99 %	
				Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1100 orang		N/A		1100 orang		955 orang		836 orang		-		-		836 orang		836 orang		76,00%		Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan			4.055.221				3.350.515		479.495		1.150.291	-	-		1.629.785		1.629.785		48,64 %	
				Jumlah fasilitasi layanan kedaruratan	4716 kali		N/A		4716 kali		1100 kali		2282 kali		-	-	2282 kali		2282 kali		48,39%		Dinas Sosial
30	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			10.901.678		4.244.083		14.048.133		1.274.233		3.425.273	-	-		4.699.507		4.699.507		33,45 %	
				Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%		N/A		87%		62,96%		57,13%		-	-	57,13%		57,13%		65,67%		Dinas Sosial
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			10.901.678				14.048.133		1.274.233		3.425.273	-	-		4.699.507		4.699.507		33,45 %	
				Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		7 laporan		-	-	7 laporan		7 laporan		58,33%		Dinas Sosial
				Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-	-	6 laporan		6 laporan		50,00%		Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			5.982.128				6.076.595		497.222		1.454.595	-	-		1.951.817		1.951.817		32,12 %	
				Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	24 kali		N/A		24 kali		6 kali		12 kali		-	-	12 kali		12 kali		50,00%		Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.681.621				7.632.105		746.225		1.883.140	-	-		2.629.366		2.629.366		34,45 %	
				Jumlah kegiatan pemutakhiran data MBR dan PMKS	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			237.929				339.433		30.786		87.538	-	-		118.324		118.324		34,86 %	
				Jumlah jenis data yang dikelola	24 data		N/A		24 data		24 data		51 data		-	-	51 data		51 data		212,50%		Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
31	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			1.980.041		1.222.852		1.669.599		197.859		751.331	-	-		949.189		949.189		56,85 %	
				Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Sosial
		1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			1.980.041				1.669.599		197.859		751.331	-	-		949.189		949.189		56,85 %	
				Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	7 lokasi		N/A		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		-	-	7 lokasi		7 lokasi		100,00%		Dinas Sosial
		1.06.07.2.01 .02	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			1.980.041				1.669.599		197.859		751.331	-	-		949.189		949.189		56,85 %	
				Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 jenis		N/A		3 jenis		3 jenis		3 jenis		-	-	3 jenis		3 jenis		100,00%		Dinas Sosial
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																				
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																				
32	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			14.606.977		0		13.841.589		811.928		1.203.855	-	-		2.015.783		2.015.783		14,56 %	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		N/A		91%		93,05%		92,33%		-	-	92,33%		92,33%		101,46%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12.701.619				12.322.315		481.252		492.919	-	-		974.171		974.171		7,91%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			12.701.619				12.322.315		481.252		492.919		-		-		974.171		974.171		7,91%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.905.358				1.519.274		330.676		710.935		-		-		1.041.612		1.041.612		68,56 %	
				Jumlah Laporan Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			1.596.618				1.222.795		289.916		617.913		-		-		907.829		907.829		74,24 %	
				Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			308.739				296.479		40.761		93.022		-		-		133.782		133.782		45,12 %	
				Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
33	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			11.303.582		2.468.025		8.975.006		386.702		1.482.074		-		-		1.868.776		1.868.776		20,82 %	
				Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	91,7 %		N/A		90,05%		100%		98,44%		-		-		98,44%		98,44%		109,32%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85,02 %		N/A		77,02%		100%		82,81%		-	-	82,81%		82,81%		107,52%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			6.876.862				5.546.578		90.275		701.547	-	-		791.822		791.822		14,28 %	
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	720 Orang		N/A		720 Orang		16 Orang		64 Orang		-	-	64 Orang		64 Orang		8,89%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan atau pemagangan	720 Orang		N/A		720 Orang		16 Orang		64 Orang		-	-	64 Orang		64 Orang		8,89%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.01 .02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			434.813				378.087		14.400		45.400	-	-		59.800		59.800		15,82 %	
				Jumlah pencari kerja yang mengikuti magang	120 Orang		N/A		120 Orang		0 Orang		0 Orang		-	-	0 Orang		0 Orang		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.01 .01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			6.442.049				5.168.491		75.875		656.147	-	-		732.022		732.022		14,16 %	
				Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang		N/A		720 Orang		16 Orang		64 Orang		-	-	64 Orang		64 Orang		8,89%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			305.648				510.668		94.400		234.800	-	-		329.200		329.200		64,46 %	
				Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.04 .01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			305.648				510.668		94.400		234.800	-	-		329.200		329.200		64,46 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			4.121.071				2.917.761		202.027		545.727	-	-				747.754		747.754		25,63 %	
				Jumlah peserta yang difasilitasi uji sertifikasi kompetensi	912 Orang		N/A		912 Orang		16 Orang		62 Orang		-		-		62 Orang		62 Orang		6,80%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.03.2.05 .01	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**			4.121.071				2.917.761		202.027		545.727	-	-				747.754		747.754		25,63 %	
				Jumlah pencari kerja yang mengikuti sertifikasi	912 Orang		N/A		912 Orang		16 Orang		62 Orang		-		-		62 Orang		62 Orang		6,80%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
34	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			3.690.000		398.120		2.721.618		315.822		869.190	-	-				1.185.011		1.185.011		43,54 %	
				Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	5%		N/A		2%		-100%		-100%		-		-		-100%		-100%		- 5000,00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**			2.280.264				1.542.962		228.832		569.106	-	-				797.938		797.938		51,71 %	
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1.810 orang		N/A		1460 orang		63 orang		392 orang		-		-		392 orang		392 orang		26,85%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.01 .02	**Pelayanan antar Kerja**			24.068				63.540		8.400		16.870	-	-				25.270		25.270		39,77 %	
				Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja	60 orang		N/A		60 orang		0 orang		0 orang		-		-		0 orang		0 orang		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.01 .03	**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**			1.151.313				662.267		95.332		233.231	-	-				328.562		328.562		49,61 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan	1.500 orang		N/A		1000 orang		25 orang		199 orang		-		-		199 orang		199 orang		19,90%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.01.05	**Perluasan Kesempatan Kerja**			1.104.883				817.154		125.100		319.005	-	-				444.106		444.106		54,35 %	
				Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja	250 orang		N/A		400 orang		38 orang		193 orang		-		-		193 orang		193 orang		48,25%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**			338.718				305.536		1.364		99.391	-	-				100.755		100.755		32,98 %	
				Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		3 Laporan		-		-		3 Laporan		3 Laporan		75,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.03.03	**Job Fair/Bursa Kerja**			338.718				305.536		1.364		99.391	-	-				100.755		100.755		32,98 %	
				Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Kali		N/A		4 Kali		1 Kali		3 Kali		-		-		3 Kali		3 Kali		75,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**			1.071.018				873.120		85.625		200.692	-	-				286.318		286.318		32,79 %	
				Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	7 Laporan		N/A		2 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.04.2.04.01	**Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)**			1.071.018				873.120		85.625		200.692	-	-				286.318		286.318		32,79 %	
				Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	350 Orang		N/A		100 Orang		0 Orang		50 Orang		-		-		50 Orang		50 Orang		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
35	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			2.216.940		431.760		2.065.866		325.474		814.593	-	-		1.140.067		1.140.067		55,19 %	
				Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	60%		N/A		20%		5%		11,11%		-	-	11,11%		11,11%		55,55%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	15,04 %		N/A		12,51%		11,65%		12,06%		-	-	12,06%		12,06%		96,40%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.358.206				1.189.226		177.017		449.681	-	-		626.697		626.697		52,70 %	
				Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.05.2.01 .01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**			62.206				47.800		9.150		19.800	-	-		28.950		28.950		60,56 %	
				Jumlah Peraturan Perusahaan yang mendapatkan Pengesahan	220 Berkas		N/A		220 Berkas		66 Berkas		127 Berkas		-	-	127 Berkas		127 Berkas		57,73%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			1.296.000				1.141.426		167.867		429.881	-	-		597.747		597.747		52,37 %		
				Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	500 Lembaga		N/A		500 Lembaga		100 Lembaga		300 Lembaga		-	-	300 Lembaga		300 Lembaga		60,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			858.734				876.640		148.457		364.912	-	-		513.369		513.369		58,56 %		
				Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			525.521				609.497		91.033		229.194	-	-		320.226		320.226		52,54 %		
				Jumlah peserta bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	500 Orang		N/A		500 Orang		100 Orang		200 Orang		-	-	200 Orang		200 Orang		40,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			333.213				267.143		57.424		135.718	-	-		193.143		193.143		72,30 %		
				Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus		N/A		110 Kasus		25 Kasus		54 Kasus		-	-	54 Kasus		54 Kasus		49,09%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
36	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.557.497		300.803		13.619.806		972.363		1.671.510	-	-		2.643.873		2.643.873		19,41 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		N/A		100%		92,90%		93%		-	-	93%		93%		93,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.968.828				10.489.743		370.536		368.328	-	-		738.864		738.864		7,04%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.968.828				10.489.743		370.536		368.328	-	-		738.864		738.864		7,04%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.012.046				2.645.194		503.251		1.129.141	-	-		1.632.392		1.632.392		61,71 %	
				Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.012.046				2.645.194		503.251		1.129.141	-	-		1.632.392		1.632.392		61,71 %	
				Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	15 Rekening		N/A		15 Rekening		15 Rekening		19 Rekening		-	-	19 Rekening		19 Rekening		126,67%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			576.622				484.870		98.577		174.040	-	-		272.617		272.617		56,22 %	
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			576.622				484.870		98.577		174.040	-	-		272.617		272.617		56,22 %	
				Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	6 Rekening		N/A		6 Rekening		3 Rekening		9 Rekening		-	-	9 Rekening		9 Rekening		150,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.324.452		598.273		2.033.390		141.702		597.262	-	-		738.964		738.964		36,34 %	
				Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%		N/A		100%		3,03%		93,94%		-	-	93,94%		93,94%		93,94%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		N/A		100%		0%		55,17%		-	-	55,17%		55,17%		55,17%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			782.126				701.935		41.029		185.135	-	-		226.163		226.163		32,22 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen		N/A		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.01.03	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG**			782.126				701.935		41.029		185.135	-	-		226.163		226.163		32,22 %	
				Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58 Lembaga		N/A		58 Lembaga		0 Lembaga		32 Lembaga		-	-	32 Lembaga		32 Lembaga		55,17%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			467.797				371.499		57.533		156.614	-	-		214.146		214.146		57,64 %	
				Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		N/A		600 Orang		147 Orang		284 Orang		-	-	284 Orang		284 Orang		47,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.02.02	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**			467.797				371.499		57.533		156.614	-	-		214.146		214.146		57,64 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4 Kali		N/A		4 Kali		1 Kali		2 Kali		-	-	2 Kali		2 Kali		50,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529				959.956		43.141		255.514	-	-		298.654		298.654		31,11 %	
				Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan		N/A		21 Kegiatan		3 Kegiatan		5 Kegiatan		-	-	5 Kegiatan		5 Kegiatan		23,81%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.02.2.03 .02	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529				959.956		43.141		255.514	-	-		298.654		298.654		31,11 %	
				jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	740 Orang		N/A		740 Orang		307 Orang		407 Orang		-	-	407 Orang		407 Orang		55,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
38	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			704.009		55.335		497.874		87.483		171.329		-		-		258.812		258.812		51,98 %	
				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100%		N/A		32,25%		0%		0%						0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100%						100%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**			270.626				247.914		29.000		61.060		-		-		90.060		90.060		36,33 %	
				Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus		N/A		20 kasus		9 kasus		18 kasus						18 kasus		18 kasus		90,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			165.098				149.399		0		9.460		-		-		9.460		9.460		6,33%	
				Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	17 kasus		N/A		17 kasus		9 kasus		18 kasus		-		-		18 kasus		18 kasus		105,88%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			105.528				98.515		29.000		51.600		-		-		80.600		80.600		81,81 %	
				Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	20 kasus		N/A		20 kasus		9 kasus		18 kasus		-		-		18 kasus		18 kasus		90,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			433.382				249.960		58.483		110.269		-		-		168.752		168.752		67,51 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	31 kecamatan		N/A		10 kecamatan		0 kecamatan		0 kecamatan		-	-	0 kecamatan		0 kecamatan		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.03.2.03.04	**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			433.382				249.960		58.483		110.269	-	-		168.752		168.752		67,51 %	
				Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	310 orang		N/A		100 orang		0 orang		0 orang		-	-	0 orang		0 orang		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			619.665		0		507.503		91.125		198.621	-	-		289.746		289.746		57,09 %	
				Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283		N/A		209		0		0		-	-	0		0		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			619.665				507.503		91.125		198.621	-	-		289.746		289.746		57,09 %	
				Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-	-	6 laporan		6 laporan		50,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.04.2.03 .01	**Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			619.665				507.503		91.125		198.621	-	-		289.746		289.746		57,09 %	
				Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga		N/A		2 lembaga		2 lembaga		2 lembaga		-	-	2 lembaga		2 lembaga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			468.442		226.180		296.170		50.555		122.888	-	-		173.443		173.443		58,56 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%		N/A		100%		0%		1,72%		-	-	1,72%		1,72%		1,72%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			468.442				296.170		50.555		122.888	-	-		173.443		173.443		58,56 %	
				Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga		N/A		58 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		-	-	1 Lembaga		1 Lembaga		1,72%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.05.2.01 .01	**Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**			468.442				296.170		50.555		122.888	-	-		173.443		173.443		58,56 %	
				Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2 Kali		N/A		2 Kali		0 Kali		1 Kali		-	-	1 Kali		1 Kali		50,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			3.918.987		204.019		2.247.248		240.820		733.230	-	-		974.050		974.050		43,34 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		N/A		47,40%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			911.497				558.257		9.500		44.206		-		-		53.706		53.706		9,62%	
				Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan		N/A		1 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		-		-		2 kegiatan		2 kegiatan		200,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.06.2.01 .01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			911.497				558.257		9.500		44.206		-		-		53.706		53.706		9,62%	
				Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	21 Kelurahan		N/A		20 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3.007.491				1.688.991		231.320		689.024		-		-		920.344		920.344		54,49 %	
				Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		-		-		2 kegiatan		2 kegiatan		66,67%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.06.2.02 .03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.431.215				534.925		46.293		168.490		-		-		214.782		214.782		40,15 %	
				Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga		N/A		431 Lembaga		224 Lembaga		237 Lembaga		-		-		237 Lembaga		237 Lembaga		54,99%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.06.2.02 .01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1.576.276				1.154.066		185.028		520.534		-		-		705.562		705.562		61,14 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2 Lembaga		N/A		2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		-		-		2 Lembaga		2 Lembaga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			1.765.939		3.754.411		1.125.590		152.226		396.294		-		-		548.520		548.520		48,73 %	
				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100%		N/A		32,25%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.765.939				1.125.590		152.226		396.294		-		-		548.520		548.520		48,73 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		N/A		150 kasus		53 kasus		81 kasus		-	-	81 kasus		81 kasus		54,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	31 lembaga		N/A		10 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		-	-	0 lembaga		0 lembaga		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.02.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota**			408.819				345.001		0		28.134	-	-		28.134		28.134		8,15%	
				Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		N/A		150 kasus		53 kasus		81 kasus		-	-	81 kasus		81 kasus		54,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.07.2.02.01	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.357.120				780.589		152.226		368.160	-	-		520.386		520.386		66,67 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pengaduan yang diterima	150 kasus		N/A		150 kasus		53 kasus		81 kasus		-	-	81 kasus		81 kasus		54,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																				
43	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			26.817.816		15.806.586		24.717.049		1.454.473		2.452.123	-	-		3.906.596		3.906.596		15,81 %	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		N/A		93%		93,52%		93%		-	-	93%		93%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			22.173.111				20.549.828		717.303		724.160	-	-		1.441.463		1.441.463		7,01%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01.2.02 .01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			22.173.111				20.549.828		717.303		724.160	-	-		1.441.463		1.441.463		7,01%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			4.644.705				4.167.221		737.170		1.727.963	-	-		2.465.133		2.465.133		59,16 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.01.2.08 .04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			3.681.649				3.369.586		659.753		1.469.461	-	-		2.129.213		2.129.213		63,19 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			963.056				797.635		77.417		258.502	-	-		335.920		335.920		42,11 %	
				Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkup DKPP	80%		100%		80%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
44	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.185.139		929.595		2.034.936		264.531		571.489	-	-		836.020		836.020		41,08 %	
				Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,26		N/A		1,11		0		1,08		-	-	1,08		1,08		97,30%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			931.260				721.837		101.180		206.481	-	-		307.661		307.661		42,62 %	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Laporan		N/A		15 Laporan		4 Laporan		7 Laporan		-	-	7 Laporan		7 Laporan		46,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			931.260				721.837		101.180		206.481	-	-		307.661		307.661		42,62 %	
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Kali		N/A		15 Kali		4 Kali		7 Kali		-	-	7 Kali		7 Kali		46,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.253.879				1.313.100		163.351		365.008	-	-		528.359		528.359		40,24 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.03.2.04.02	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**			1.253.879				1.313.100		163.351		365.008		-		-		528.359		528.359		40,24 %	
				Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan dan Jumlah pelaksanaan pengembangan Diversifikasi Pangan	31 Kali		N/A		31 Kali		6 Kali		15 Kali		-		-		15 Kali		15 Kali		48,39%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
45	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			973.715		649.805		860.970		155.856		322.084		-		-		477.941		477.941		55,51 %	
				Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,91 %		N/A		97,87%		90,77%		94,44%		-		-		94,44%		94,44%		96,50%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			973.715				860.970		155.856		322.084		-		-		477.941		477.941		55,51 %	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan		N/A		4 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.09.05.2.01.04	**Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota**			973.715				860.970		155.856		322.084		-		-		477.941		477.941		55,51 %	
				Jumlah Sampel pangan segar yang diperiksa	1.500 sampel		N/A		1500 sampel		390 sampel		720 sampel		-		-		720 sampel		720 sampel		48,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																					

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
46	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			153.598.241		20.724.191		42.745.296		4.008.546		4.216.797	-	-		8.225.343		8.225.343		19,24 %		
				Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	55.265,71 M2		N/A		30081.90 M2		1 M2		1 M2		-	-	1 M2		1 M2		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			153.598.241				42.745.296		4.008.546		4.216.797	-	-		8.225.343		8.225.343		19,24 %		
				Jumlah dokumen tahap pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur	1 dokumen		N/A		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		2.10.05.2.01 .02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			153.598.241				42.745.296		4.008.546		4.216.797	-	-		8.225.343		8.225.343		19,24 %		
				Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	1 lokasi		N/A		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		-	-	1 lokasi		1 lokasi		100,00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																				
47	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			98.611.737		114.676		70.836.622		5.528.344		9.184.637	-	-		14.712.982		14.712.982		20,77 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		N/A		85%		87,59%		87%		-		-		87%		87%		102,35%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81.736.755				52.190.224		2.382.379		2.328.884		-		-		4.711.263		4.711.263		9,03%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			81.736.755				52.190.224		2.382.379		2.328.884		-		-		4.711.263		4.711.263		9,03%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.689.324				18.053.794		3.071.365		6.655.491		-		-		9.726.856		9.726.856		53,88 %	
				Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.689.324				18.053.794		3.071.365		6.655.491		-		-		9.726.856		9.726.856		53,88 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.185.658				592.604		74.600		200.262		-		-		274.862		274.862		46,38 %	
				Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.185.658				592.604		74.600		200.262		-		-		274.862		274.862		46,38 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
48	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			6.731.441		944.028		4.633.961		418.750		1.300.411		-		-		1.719.161		1.719.161		37,10 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	50%		N/A		42%		50,82%		54,92%		-	-	54,92%		54,92%		130,76%		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	90%		N/A		82%		100%		100%		-	-	100%		100%		121,95%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.963.234				1.912.356		295.700		790.207	-	-		1.085.906		1.085.906		56,78 %	
				jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		-	-	2 kegiatan		2 kegiatan		66,67%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		3 jenis		-	-	3 jenis		3 jenis		150,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01 .01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.002.892				463.849		98.919		227.649	-	-		326.568		326.568		70,40 %	
				Jumlah data kualitas air dan data kualitas udara ambien sesaat selama 1 tahun	1010 data		N/A		1010 data		260 data		523 data		-	-	523 data		523 data		51,78%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01 .02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			1.960.342				1.448.507		196.781		562.558	-	-		759.338		759.338		52,42 %	
				jumlah lokasi pendampingan audit energi, pelaksanaan CFD dan pendampingan proklim	23 lokasi		N/A		23 lokasi		4 lokasi		11 lokasi		-	-	11 lokasi		11 lokasi		47,83%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.768.206				2.721.605		123.051		510.204	-	-		633.255		633.255		23,27 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	3 stasiun		N/A		2 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		-	-	2 stasiun		2 stasiun		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.02.01	**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**			1.378.750				839.188		48.562		100.800	-	-		149.362		149.362		17,80 %	
				Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	730 data		N/A		365 data		90 data		181 data		-	-	181 data		181 data		49,59%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.02.03	**Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**			2.389.456				1.882.417		74.489		409.404	-	-		483.893		483.893		25,71 %	
				Jumlah jamban termasuk instalasi septic tank yang terpasang	300 unit		N/A		300 unit		0 unit		67 unit		-	-	67 unit		67 unit		22,33%		Dinas Lingkungan Hidup
49	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			114.572.766		323.732		87.562.522		11.676.404		32.382.390	-	-		44.058.794		44.058.794		50,32 %	
				Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	100%		N/A		98,98%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			114.572.766				87.562.522		11.676.404		32.382.390	-	-		44.058.794		44.058.794		50,32 %	
				Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen		3%		3 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		33,33%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2,87 Ha		N/A		2.79 Ha		2 Ha		2 Ha		-		-		2 Ha		2 Ha		71,68%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01.04	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**			88.616.171				64.933.180		8.836.083		24.240.885		-		-		33.076.968		33.076.968		50,94 %	
				Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	467 lokasi		N/A		463 lokasi		463 lokasi		463 lokasi		-		-		463 lokasi		463 lokasi		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01.07	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati**			9.689.511				9.093.927		969.352		3.182.321		-		-		4.151.673		4.151.673		45,65 %	
				Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	79 Lokasi		N/A		79 Lokasi		148 Lokasi		178 Lokasi		-		-		178 Lokasi		178 Lokasi		225,32%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01.05	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**			15.911.738				13.318.926		1.832.159		4.866.635		-		-		6.698.794		6.698.794		50,30 %	
				Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara	14 lokasi		N/A		14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		-		-		14 lokasi		14 lokasi		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01.01	**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**			355.347				216.488		38.811		92.548		-		-		131.359		131.359		60,68 %	
				Jumlah ekosistem keanekaragaman hayati yang disurvey	7 ekosistem		3%		7 ekosistem		0 ekosistem		0 ekosistem		-		-		0 ekosistem		0 ekosistem		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
50	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			5.250.677		472.364		4.465.785		229.276		493.592		-		-		722.868		722.868		16,19 %	
				Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		N/A		80%		80%		80%		-		-		80%		80%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%		N/A		80%		100%		100%		-		-		100%		100%		125,00%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			779.119				268.318		52.733		120.415		-		-		173.148		173.148		64,53 %	
				Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	350 berkas		N/A		250 berkas		9 berkas		74 berkas		-		-		74 berkas		74 berkas		29,60%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			779.119				268.318		52.733		120.415		-		-		173.148		173.148		64,53 %	
				Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses	400 Berkas		N/A		300 Berkas		30 Berkas		80 Berkas		-		-		80 Berkas		80 Berkas		26,67%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.471.557				4.197.467		176.543		373.177		-		-		549.720		549.720		13,10 %	
				Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan		1%		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		-		-		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.02 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			4.471.557				4.197.467		176.543		373.177		-		-		549.720		549.720		13,10 %	
				Jumlah lokasi penanganan limbah B3 atau sampah spesifik yang dilakukan	10 lokasi		1%		8 lokasi		1 lokasi		16 lokasi		-		-		16 lokasi		16 lokasi		200,00%		Dinas Lingkungan Hidup
51	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			4.000.329		972.244		1.374.520		218.668		557.692		-		-		776.360		776.360		56,48 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	95%		N/A		50%		17%		36,50%		-	-	36,50%		36,50%		73,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.000.329				1.374.520		218.668		557.692	-	-		776.360		776.360		56,48 %	
				Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek		N/A		432 obyek		118 obyek		230 obyek		-	-	230 obyek		230 obyek		53,24%		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%		N/A		80%		100%		16,46%		-	-	16,46%		16,46%		20,58%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			2.406.414				905.785		148.038		364.859	-	-		512.897		512.897		56,62 %	
				Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan	350 Berkas		N/A		250 Berkas		6 Berkas		79 Berkas		-	-	79 Berkas		79 Berkas		31,60%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang diterbitkan	300 Berkas		N/A		200 Berkas		15 Berkas		59 Berkas		-	-	59 Berkas		59 Berkas		29,50%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01 .03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.593.914				468.735		70.630		192.833	-	-		263.463		263.463		56,21 %	
				Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 Lembaga		N/A		254 Lembaga		50 Lembaga		124 Lembaga		-	-	124 Lembaga		124 Lembaga		48,82%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	178 lokasi		N/A		178 lokasi		68 lokasi		106 lokasi		-	-	106 lokasi		106 lokasi		59,55%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
52	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			8.194.978		759.509		6.735.545		307.992		604.311	-	-		912.303		912.303		13,54 %		
				Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	71,81 %		96,51 %		50,27%		46,68%		62,37%		-	-	62,37%		62,37%		124,07%		Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	63,84 %		N/A		55,70%		54,03%		54,59%		-	-	54,59%		54,59%		98,01%		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			8.194.978				6.735.545		307.992		604.311		-		912.303		912.303		13,54 %		
				Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis		N/A		1 jenis		4 jenis		5 jenis		-	-	5 jenis		5 jenis		500,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01 .02	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**			8.194.978				6.735.545		307.992		604.311		-		912.303		912.303		13,54 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	12 kali		N/A		12 kali		4 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kader lingkungan	3 kegiatan		N/A		3 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		-	-	1 kegiatan		1 kegiatan		33,33%		Dinas Lingkungan Hidup
53	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			687.892		0		389.485		103.784		152.942	-	-		256.726		256.726		65,91 %	
				Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	92,00 %		N/A		50,40%		0%		0,40%		-	-	0,40%		0,40%		0,79%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			687.892				389.485		103.784		152.942	-	-		256.726		256.726		65,91 %	
				Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan		N/A		4 penghargaan		0 penghargaan		1 penghargaan		-	-	1 penghargaan		1 penghargaan		25,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.2.01 .01	**Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			687.892				389.485		103.784		152.942	-	-		256.726		256.726		65,91 %	
				Jumlah lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10 lokasi		N/A		10 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-	-	0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen		N/A		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-	-	0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup
54	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			732.771		408.408		321.551		38.908		94.472	-	-		133.379		133.379		41,48 %	
				Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	46 obyek		N/A		50 obyek		16 obyek		24 obyek		-	-	24 obyek		24 obyek		48,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**			732.771				321.551		38.908		94.472	-	-		133.379		133.379		41,48 %	
				Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10.2.01 .02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan**			732.771				321.551		38.908		94.472	-	-		133.379		133.379		41,48 %	
				Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	46 Obyek		N/A		50 Obyek		16 Obyek		24 Obyek		-	-	24 Obyek		24 Obyek		48,00%		Dinas Lingkungan Hidup
55	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			445.929.165		146.898		388.310.433		59.861.935		139.163.042	-	-		199.024.977		199.024.977		51,25 %	
				Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12 %		N/A		2,56%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	52%		N/A		50%		74,62%		74,62%		-		-		74,62%		74,62%		149,24%		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88,76 %		N/A		87,27%		91,05%		91,05%		-		-		91,05%		91,05%		104,33%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			445.929.165				388.310.433		59.861.935		139.163.042	-		-			199.024.977		199.024.977		51,25 %	
				Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis		N/A		3 jenis		3 jenis		3 jenis		-		-		3 jenis		3 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis		N/A		4 jenis		1 jenis		3 jenis		-		-		3 jenis		3 jenis		75,00%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		2 jenis		-		-		2 jenis		2 jenis		100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota			218.327.727				154.713.440		22.809.056		62.214.900	-		-			85.023.956		85.023.956		54,96 %	
				Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi		N/A		267 lokasi		267 lokasi		282 lokasi		-		-		282 lokasi		282 lokasi		105,62%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah	939 lokasi		N/A		939 lokasi		952 lokasi		1271 lokasi		-		-		1271 lokasi		1271 lokasi		135,36%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			182.639.754				138.259.008		34.726.161		69.926.725	-		-			104.652.885		104.652.885		75,69 %	
				Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	39 lokasi		N/A		39 lokasi		3 lokasi		37 lokasi		-		-		37 lokasi		37 lokasi		94,87%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			44.961.684				95.337.985		2.326.718		7.021.417	-	-		9.348.136		9.348.136		9,81%		
				Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	190 lokasi		N/A		190 lokasi		1 lokasi		192 lokasi		-	-	192 lokasi		192 lokasi		101,05%		Dinas Lingkungan Hidup
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
56	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.618.623		12.271.683		22.890.895		1.554.161		4.969.032	-	-		6.523.193		6.523.193		28,50 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,58%		N/A		85,77%		88,01%		87%		-	-		87%		87%		101,43%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.692				69.983		10.400		18.200	-	-		28.600		28.600		40,87 %		
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen		12%		12 dokumen		2 dokumen		5 dokumen		-	-		5 dokumen		5 dokumen		41,67%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			16.846				13.692		0		2.600	-	-		2.600		2.600		18,99 %		
				Dokumen Pelaksanaan Pembahasan, konsultasi dan koordinasi DAK Non Fisik	2 Dokumen		12%		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.846				56.292		10.400		15.600	-	-		26.000		26.000		46,19 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen		12%		12 dokumen		2 dokumen		5 dokumen		-		-		5 dokumen		5 dokumen		41,67%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			15.703.038				15.318.948		563.880		559.025		-		-		1.122.906		1.122.906		7,33%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.703.038				15.318.948		563.880		559.025		-		-		1.122.906		1.122.906		7,33%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			642.869				525.059		149.280		169.585		-		-		318.865		318.865		60,73 %	
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.05.10	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**			642.869				525.059		149.280		169.585		-		-		318.865		318.865		60,73 %	
				Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			9.676.578				3.798.386		182.034		2.670.333		-		-		2.852.367		2.852.367		75,09 %	
				Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			9.658.664				3.798.386		182.034		2.670.333		-		-		2.852.367		2.852.367		75,09 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			562.446				3.178.519		648.567		1.551.888	-	-		2.200.455		2.200.455		69,23 %		
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.01.2.08 .04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			562.446				3.178.519		648.567		1.551.888	-	-		2.200.455		2.200.455		69,23 %		
				Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			3.481.298		688.565		2.975.891		587.976		1.397.276	-	-		1.985.251		1.985.251		66,71 %		
				Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%		N/A		95%		100%		100%		-		-		100%		100%		105,26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			2.655.892				2.267.906		446.064		1.059.357	-	-		1.505.421		1.505.421		66,38 %		
				Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas		N/A		318500 berkas		93737 berkas		163633 berkas		-		-		163633 berkas		163633 berkas		51,38%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.01 .02	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk**			2.655.892				2.267.906		446.064		1.059.357	-	-		1.505.421		1.505.421		66,38 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas		N/A		318500 berkas		93737 berkas		163633 berkas		-	-	163633 berkas		163633 berkas		51,38%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			825.406				707.985		141.912		337.919	-	-		479.831		479.831		67,77 %	
				Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	171500 berkas		N/A		171500 berkas		91571 berkas		209893 berkas		-	-	209893 berkas		209893 berkas		122,39%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.03 .02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			825.406				707.985		141.912		337.919	-	-		479.831		479.831		67,77 %	
				Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	171500 berkas		N/A		171500 berkas		91571 berkas		209893 berkas		-	-	209893 berkas		209893 berkas		122,39%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.969.905		1.387.848		1.774.831		338.872		827.090	-	-		1.165.962		1.165.962		65,69 %	
				Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%		N/A		95%		100%		100%		-	-	100%		100%		105,26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			1.524.354				1.280.098		235.991		610.737	-	-		846.728		846.728		66,15 %	
				Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas		N/A		70080 berkas		20643 berkas		34763 berkas		-	-	34763 berkas		34763 berkas		49,60%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.01 .01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			1.524.354				1.280.098		235.991		610.737	-	-		846.728		846.728		66,15 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas		N/A		70080 berkas		20643 berkas		34763 berkas		-	-	34763 berkas		34763 berkas		49,60%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			445.551				494.732		102.881		216.352	-	-		319.234		319.234		64,53 %	
				Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	37000 berkas		N/A		37000 berkas		47803 berkas		76758 berkas		-	-	76758 berkas		76758 berkas		207,45%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.02 .04	**Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil**			445.551				494.732		102.881		216.352	-	-		319.234		319.234		64,53 %	
				Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	37000 berkas		N/A		37000 berkas		47803 berkas		76758 berkas		-	-	76758 berkas		76758 berkas		207,45%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
59	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			2.941.983		1.587.593		3.000.857		529.115		1.636.824	-	-		2.165.940		2.165.940		72,18 %	
				Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100%		N/A		20%		18,18%		54,55%		-	-	54,55%		54,55%		272,75%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99%		N/A		95%		98,80%		98,80%		-	-	98,80%		98,80%		104,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77%		N/A		65%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			431.627				379.347		87.349		212.200		-		-		299.549		299.549		78,96 %	
				Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144000 data		N/A		144000 data		38575 data		77413 data		-		-		77413 data		77413 data		53,76%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.01 .01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			431.627				379.347		87.349		212.200		-		-		299.549		299.549		78,96 %	
				Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144000 data		N/A		144000 data		38575 data		77413 data		-		-		77413 data		77413 data		53,76%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			653.293				593.833		97.692		235.629		-		-		333.321		333.321		56,13 %	
				Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		N/A		5 Lembaga		3 Lembaga		12 Lembaga		-		-		12 Lembaga		12 Lembaga		240,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.03 .06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			362.799				322.114		43.729		118.501		-		-		162.230		162.230		50,36 %	
				Jumlah Lembaga yang bekerjasama	5 Lembaga		N/A		5 Lembaga		1 Lembaga		10 Lembaga		-		-		10 Lembaga		10 Lembaga		200,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.03 .04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			290.494				271.719		53.964		117.128		-		-		171.091		171.091		62,97 %	
				Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		N/A		5 Lembaga		3 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		6 Lembaga		120,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063				2.027.677		344.074		1.188.995	-	-		1.533.070		1.533.070		75,61 %		
				Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		N/A		32 unit layanan		34 unit layanan		34 unit layanan		-	-	34 unit layanan		34 unit layanan		106,25%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.04 .01	**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063				2.027.677		344.074		1.188.995	-	-		1.533.070		1.533.070		75,61 %		
				Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		N/A		32 unit layanan		34 unit layanan		34 unit layanan		-	-	34 unit layanan		34 unit layanan		106,25%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			89.414		0		115.271		11.000		41.025	-	-		52.025		52.025		45,13 %		
				Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**			89.414				115.271		11.000		41.025	-	-		52.025		52.025		45,13 %		
				Jumlah dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.05.2.01 .02	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain**			89.414				115.271		11.000		41.025	-	-		52.025		52.025		45,13 %		
				Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan	2 kali		N/A		2 kali		1 kali		1 kali		-	-	1 kali		1 kali		50,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																						
61	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			393.981		0		373.774		14.000		84.512	-	-		98.512		98.512		26,36 %		
				Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100%		N/A		30,15%		0%		15,42%		-	-		15,42%		15,42%		51,14%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			231.497				251.752		8.400		54.712	-	-		63.112		63.112		25,07 %		
				Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	89 Sekolah		N/A		70 Sekolah		0 Sekolah		70 Sekolah		-	-		70 Sekolah		70 Sekolah		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			231.497				251.752		8.400		54.712	-	-		63.112		63.112		25,07 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	178 Orang		N/A		140 Orang		0 Orang		100 Orang		-		-		100 Orang		100 Orang		71,43%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			162.484				122.022		5.600		29.800		-		-		35.400		35.400		29,01 %	
				Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah		N/A		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		-		-		0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02 .13	**Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**			162.484				122.022		5.600		29.800		-		-		35.400		35.400		29,01 %	
				Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
62	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			10.106.307		305.621		10.825.256		194.564		1.239.647		-		-		1.434.211		1.434.211		13,25 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86%		N/A		82%		24,56%		59,99%		-	-	59,99%		59,99%		73,16%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17,60%		N/A		18,55%		21,59%		21,25%		-	-	21,25%		21,25%		85,44%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3.015.408				1.946.460		124.268		655.709	-	-		779.977		779.977		40,07 %	
				Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		5 Kali		-	-	5 Kali		5 Kali		41,67%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.02 .04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.797.554				840.465		49.357		305.707	-	-		355.064		355.064		42,25 %	
				Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1566 Orang		N/A		1566 Orang		1566 Orang		1305 Orang		-	-	1305 Orang		1305 Orang		83,33%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			1.217.854				1.105.995		74.911		350.001	-	-		424.913		424.913		38,42 %		
				Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		5 kali		-	-	5 kali		5 kali		41,67%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4.520.722				8.247.196		30.554		394.510	-	-		425.064		425.064		5,15%		
				Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417096 Orang		N/A		416911 Orang		164852 Orang		198372 Orang		-	-	198372 Orang		198372 Orang		47,58%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			2.353.459				1.932.653		14.889		158.611	-	-		173.500		173.500		8,98%		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	415146 Orang		N/A		414961 Orang		164852 Orang		198372 Orang		-	-	198372 Orang		198372 Orang		47,80%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03.03	**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**			1.749.975				5.294.543		15.665		235.899	-	-		251.564		251.564		4,75%	
				Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950 orang		N/A		1950 orang		473 orang		1032 orang		-	-	1032 orang		1032 orang		52,92%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03.06	**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**			417.288				1.020.000		0		0	-	-		0		0		0,00%	
				Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	19 Unit		N/A		19 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			2.570.177				631.600		39.742		189.428	-	-		229.170		229.170		36,28 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.04.04	**Pembinaan Terpadu Kampung KB**			2.570.177				631.600		39.742		189.428	-	-		229.170		229.170		36,28 %	
				Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31 Kecamatan		N/A		31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		-	-	31 Kecamatan		31 Kecamatan		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
63	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			4.687.035		376.675		15.881.716		241.199		1.296.957	-	-		1.538.157		1.538.157		9,69%	
				Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55,76%		N/A		39,24%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase balita yang mengikuti PAUD	41,58%		N/A		41,53%		41,54%		42,27%		-	-	42,27%		42,27%		101,78%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44%		N/A		40%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun		N/A		20 tahun		0 tahun		0 tahun		-		-		0 tahun		0 tahun		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.687.035				15.881.716		241.199		1.296.957		-		-		1.538.157		1.538.157		9,69%	
				Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	1 laporan		N/A		1 laporan		1 laporan		0 laporan		-		-		0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-		-		0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-	-	0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-	-	0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.04	**Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			608.785				354.269		79.866		170.787		-	-		250.654		250.654		70,75 %	
				Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	119 keluarga		N/A		54 keluarga		54 keluarga		54 keluarga		-	-	54 keluarga		54 keluarga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	765 keluarga		N/A		344 keluarga		344 keluarga		344 keluarga		-	-	344 keluarga		344 keluarga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	252 keluarga		N/A		113 keluarga		113 keluarga		113 keluarga		-		-		113 keluarga		113 keluarga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.01	**Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)**			1.202.795				938.745		115.331		292.646		-		-		407.977		407.977		43,46 %		
				Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	228 keluarga		N/A		160 keluarga		0 keluarga		0 keluarga		-		-		0 keluarga		0 keluarga		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.02	**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			412.985				790.466		0		505.982		-		-		505.982		505.982		64,01 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	10 paket		N/A		10 paket		0 paket		0 paket		-	-			0 paket		0 paket		0,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28 paket		N/A		28 paket		0 paket		28 paket		-	-			28 paket		28 paket		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.05	**Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			1.002.109				13.432.070		0		179.100		-	-		179.100		179.100		1,33%		
				Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31 kecamatan		N/A		31 kecamatan		32 kecamatan		32 kecamatan		-	-			32 kecamatan		32 kecamatan		103,23%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.07	**Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**			1.460.361				366.166		46.002		148.442		-	-		194.444		194.444		53,10 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	18 keluarga		N/A		14 keluarga		0 keluarga		14 keluarga		-	-	14 keluarga		14 keluarga		100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																				
64	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			93.715.342		59.612.600		85.459.389		6.375.395		9.226.631	-	-		15.602.026		15.602.026		18,26 %	
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%		N/A		92%		92,28%		91%		-	-	91%		91%		98,91%		Dinas Perhubungan
		2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			73.040.321				67.276.920		3.494.433		3.480.288	-	-		6.974.722		6.974.722		10,37 %	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.01.2.02 .01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			73.040.321				67.276.920		3.494.433		3.480.288	-	-		6.974.722		6.974.722		10,37 %	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			5.949.269				6.078.052		946.261		2.127.455	-	-		3.073.717		3.073.717		50,57 %	
				Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.01.2.06 .02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			5.949.269				6.078.052		946.261		2.127.455	-	-		3.073.717		3.073.717		50,57 %	
				Persentase Ketepatan Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			14.725.751				12.104.417		1.934.700		3.618.887	-	-		5.553.587		5.553.587		45,88 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			14.725.751				12.104.417		1.934.700		3.618.887	-		-			5.553.587		5.553.587		45,88%	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perhubungan
65	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			472.129.235		2.613.619		387.921.767		47.489.158		114.126.382	-		-			161.615.540		161.615.540		41,66%	
				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,75 %		43,38 %		48,65%		0%		37,89%		-		-		37,89%		37,89%		77,88%		Dinas Perhubungan
				Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		41,24 %		40 km/jam		0 km/jam		40.29 km/jam		-		-		40.29 km/jam		40.29 km/jam		100,73%		Dinas Perhubungan
				Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%		N/A		80%		0%		80,22%		-		-		80,22%		80,22%		100,28%		Dinas Perhubungan
				Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%		N/A		80%		82,60%		82,74%		-		-		82,74%		82,74%		103,43%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			323.533.151				240.592.477		31.039.114		68.990.790	-		-			100.029.903		100.029.903		41,58%	
				Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		N/A		15 Lokasi		0 Lokasi		4 Lokasi		-		-		4 Lokasi		4 Lokasi		26,67%		Dinas Perhubungan
				Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		N/A		31 Kawasan		3 Kawasan		16 Kawasan		-		-		16 Kawasan		16 Kawasan		51,61%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02.01	**Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			117.251.786				79.709.518		682.232		1.587.714	-		-			2.269.946		2.269.946		2,85%	
				Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	3 Bangunan		N/A		3 Bangunan		0 Bangunan		0 Bangunan		-		-		0 Bangunan		0 Bangunan		0,00%		Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	3000 Unit		N/A		3000 Unit		0 Unit		775 Unit		-	-	775 Unit		775 Unit		25,83%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			28.689.292				20.014.219		334.825		2.841.859	-	-		3.176.684		3.176.684		15,87 %	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan dan Dipasang	2500 Unit		N/A		2500 Unit		0 Unit		582 Unit		-	-	582 Unit		582 Unit		23,28%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			35.134.102				29.861.278		2.488.372		9.675.093	-	-		12.163.465		12.163.465		40,73 %	
			Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis		N/A		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		-	-	5 Jenis		5 Jenis		100,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			142.457.971				111.007.462		27.533.685		54.886.124	-	-		82.419.809		82.419.809		74,25 %	
			Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	8647 Rekening		N/A		7447 Rekening		7221 Rekening		7238 Rekening		-	-	7238 Rekening		7238 Rekening		97,19%		Dinas Perhubungan
			Jumlah titik PJU yang dipelihara	105252 Titik		N/A		93252 Titik		93252 Titik		93252 Titik		-	-	93252 Titik		93252 Titik		100,00%		Dinas Perhubungan
			Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi	6 Lokasi		N/A		6 Lokasi		0 Lokasi		4 Lokasi		-	-	4 Lokasi		4 Lokasi		66,67%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			29.006.404				19.923.025		3.167.785		7.951.048	-	-		11.118.833		11.118.833		55,81 %	
			Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		14%		14 Lokasi		14 Lokasi		15 Lokasi		-	-	15 Lokasi		15 Lokasi		107,14%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			29.006.404				19.923.025		3.167.785		7.951.048	-	-		11.118.833		11.118.833		55,81 %	
			Jam Pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Kota Surabaya	14 Jam		14%		14 Jam		14 Jam		14 Jam		-	-	14 Jam		14 Jam		100,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			20.323.724				22.629.225		3.491.938		8.152.156	-	-		11.644.093		11.644.093		51,46 %	
			Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		N/A		60 Berkas		4 Berkas		21 Berkas		-	-	21 Berkas		21 Berkas		35,00%		Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			20.323.724				22.629.225		3.491.938		8.152.156		-		-		11.644.093		11.644.093		51,46 %		
				Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK)	1821 Titik		N/A		1821 Titik		1824 Titik		1824 Titik		-		-		1824 Titik		1824 Titik		100,16%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371				12.170.520		1.301.771		6.266.778		-		-		7.568.549		7.568.549		62,19 %		
				Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit		N/A		134525 Unit		34825 Unit		65780 Unit		-		-		65780 Unit		65780 Unit		48,90%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371				12.170.520		1.301.771		6.266.778		-		-		7.568.549		7.568.549		62,19 %		
				Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR di Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor	149.069 Unit		N/A		149069 Unit		36130 Unit		67948 Unit		-		-		67948 Unit		67948 Unit		45,58%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			21.001.558				17.209.176		2.746.641		7.485.220		-		-		10.231.861		10.231.861		59,46 %		
				Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		N/A		10 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		-		-		2 Lokasi		2 Lokasi		20,00%		Dinas Perhubungan
				Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis		7%		7 Jenis		7 Jenis		8 Jenis		-		-		8 Jenis		8 Jenis		114,29%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.153.675				3.451.976		187.155		899.007		-		-		1.086.162		1.086.162		31,46 %		
				Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 Dokumen		N/A		13 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		15,38%		Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			16.847.884				13.757.200		2.559.486		6.586.212	-	-		9.145.699		9.145.699		66,48 %		
				Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan	365 Kali		7%		365 Kali		90 Kali		181 Kali		-	-		181 Kali		181 Kali		49,59%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.033.247				70.988.485		5.411.562		14.075.804	-	-		19.487.366		19.487.366		27,45 %		
				Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		N/A		3 Koridor		4 Koridor		4 Koridor		-	-		4 Koridor		4 Koridor		133,33%		Dinas Perhubungan
				Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		N/A		75 Orang		0 Orang		0 Orang		-	-		0 Orang		0 Orang		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			32.542.203				37.136.441		320.084		717.115	-	-		1.037.199		1.037.199		2,79%		
				Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan	365 Kali		N/A		365 Kali		90 Kali		181 Kali		-	-		181 Kali		181 Kali		49,59%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			32.491.043				33.852.044		5.091.478		13.358.689	-	-		18.450.167		18.450.167		54,50 %		
				Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	28 Unit		N/A		28 Unit		28 Unit		28 Unit		-	-		28 Unit		28 Unit		100,00%		Dinas Perhubungan
				Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan	8 Unit		N/A		8 Unit		8 Unit		8 Unit		-	-		8 Unit		8 Unit		100,00%		Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782				4.408.858		330.347		1.204.588	-	-		1.534.935		1.534.935		34,81 %		
				Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		N/A		1 Jaringan		0 Jaringan		0 Jaringan		-	-	0 Jaringan		0 Jaringan		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.11 .01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782				4.408.858		330.347		1.204.588	-	-		1.534.935		1.534.935		34,81 %		
				Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10 Dokumen		N/A		10 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		20,00%		Dinas Perhubungan
66	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			3.518.992		497.113		2.799.080		175.595		614.947	-	-		790.541		790.541		28,24 %		
				Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			3.518.992				2.799.080		175.595		614.947	-	-		790.541		790.541		28,24 %		
				Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		N/A		2 Kali		0 Kali		2 Kali		-	-	2 Kali		2 Kali		100,00%		Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			3.518.992				2.799.080		175.595		614.947	-	-		790.541		790.541		28,24 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Transportasi Perairan	500 Orang		N/A		100 Orang		0 Orang		200 Orang		-		-		200 Orang		200 Orang		200,00%		Dinas Perhubungan
67	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			5.874.008		4.962.591		5.009.197		691.347		1.723.017	-	-		2.414.364		2.414.364		48,20 %		
				Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			5.874.008				5.009.197		691.347		1.723.017	-	-		2.414.364		2.414.364		48,20 %		
				Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	2 Kali		N/A		2 Kali		0 Kali		0 Kali		-		-		0 Kali		0 Kali		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			5.874.008				5.009.197		691.347		1.723.017	-	-		2.414.364		2.414.364		48,20 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Perkeretaapian	50 Orang		N/A		50 Orang		0 Orang		0 Orang		-		-		0 Orang		0 Orang		0,00%		Dinas Perhubungan
		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
68	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			18.550.501		12.605.384		16.345.808		848.948		1.241.887	-	-		2.090.835		2.090.835		12,79 %	
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,58 %		N/A		89,54%		89,55%		90%		-	-	90%		90%		100,51%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			15.330.201				14.351.452		463.954		473.802	-	-		937.756		937.756		6,53%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.330.201				14.351.452		463.954		473.802	-	-		937.756		937.756		6,53%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1.996.579				1.445.749		337.109		628.729	-	-		965.838		965.838		66,81 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.996.579				1.445.749		337.109		628.729	-	-		965.838		965.838		66,81 %	
				Jumlah jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis		100%		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		-	-	4 Jenis		4 Jenis		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			1.223.721				548.607		47.885		139.356	-	-		187.241		187.241		34,13 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			1.223.721				548.607		47.885		139.356	-	-		187.241		187.241		34,13 %	
				Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis		100%		2 jenis		2 jenis		2 jenis		-	-	2 jenis		2 jenis		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
69	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			16.438.816		10.471		14.491.383		2.466.002		6.000.994	-	-				8.466.996		8.466.996		58,43 %	
				Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	89%		N/A		85%		85,21%		89,84%		-	-			89,84%		89,84%		105,69%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			16.438.816				14.491.383		2.466.002		6.000.994	-	-				8.466.996		8.466.996		58,43 %	
				Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis		N/A		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		-	-			4 Jenis		4 Jenis		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-			100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.02.2.01 .08	**Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**			2.943.703				2.709.141		322.536		845.401	-	-				1.167.936		1.167.936		43,11 %	
				Jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100 Kali		N/A		100 Kali		25 Kali		48 Kali		-	-			48 Kali		48 Kali		48,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.02.2.01 .06	**Pelayanan Informasi Publik**			849.870				859.037		83.421		270.793	-	-				354.214		354.214		41,23 %	
				Jumlah kegiatan koordinasi dalam pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik	50 Kali		N/A		50 Kali		10 Kali		31 Kali		-	-			31 Kali		31 Kali		62,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.02.2.01 .05	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**			12.645.244				10.923.204		2.060.045		4.884.801	-	-				6.944.845		6.944.845		63,58 %	
				Jumlah pelaksanaan publikasi melalui media	2834 Kali		N/A		2834 Kali		940 Kali		1837 Kali		-	-			1837 Kali		1837 Kali		64,82%		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun	360 Konten		N/A		360 Konten		90 Konten		184 Konten		-	-	184 Konten		184 Konten		51,11%		Dinas Komunikasi dan Informatika
70	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			74.293.471		1.177.510		72.216.783		1.468.878		17.291.103	-	-		18.759.981		18.759.981		25,98 %	
				Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			31.347.122				34.825.257		605.562		8.643.641	-	-		9.249.203		9.249.203		26,56 %	
				Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.01 .03	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**			31.347.122				34.825.257		605.562		8.643.641	-	-		9.249.203		9.249.203		26,56 %	
				Jumlah lokasi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara dan pengembangan sarana dan prasarana TIK	415 lokasi		N/A		220 lokasi		54 lokasi		108 lokasi		-	-	108 lokasi		108 lokasi		49,09%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			42.946.350				37.391.525		863.316		8.647.462	-	-		9.510.778		9.510.778		25,44 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		37,08%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah pusat data yang mengelola satu server	2 Pusat data		N/A		2 Pusat data		2 Pusat data		2 Pusat data		-		-		2 Pusat data		2 Pusat data		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.01	**Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			498.811				385.933		102.691		206.999		-		-		309.689		309.689		80,24 %	
				Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TIK	58 PD		N/A		58 PD		0 PD		0 PD		-		-		0 PD		0 PD		0,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.03	**Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**			5.641.236				4.036.197		93.328		1.062.201		-		-		1.155.529		1.155.529		28,63 %	
				Jumlah pengecekan Pusat Data yang dikelola	364 Kali		N/A		364 Kali		94 Kali		185 Kali		-		-		185 Kali		185 Kali		50,82%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.07	**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**			5.046.132				5.705.595		303.774		656.088		-		-		959.862		959.862		16,82 %	
				Jumlah pengelolaan / pengembangan aplikasi / proses bisnis	230 Aplikasi		N/A		190 Aplikasi		180 Aplikasi		180 Aplikasi		-		-		180 Aplikasi		180 Aplikasi		94,74%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.10	**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**			31.760.170				27.263.800		363.524		6.722.175		-		-		7.085.698		7.085.698		25,99 %	
				Jumlah PD yang mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya TIK (service desk tier 1 dan tier 2)	58 PD		N/A		58 PD		6 PD		1 PD		-		-		1 PD		1 PD		1,72%		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																					
71	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.889.705		94.100		33.439.545		2.100.575		3.269.044	-	-		5.369.619		5.369.619		16,06 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		N/A		89%		89,08%		89%		-	-	89%		89%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.133.950				27.395.111		1.132.501		1.135.159	-	-		2.267.660		2.267.660		8,28%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		2.17.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34.133.950				27.395.111		1.132.501		1.135.159	-	-		2.267.660		2.267.660		8,28%		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.755.756				6.044.434		968.074		2.133.884	-	-		3.101.958		3.101.958		51,32 %		
				Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III									
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.759.388				5.109.174		779.674		1.753.604	-	-		2.533.279		2.533.279		49,58 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			996.368				935.260		188.399		380.280	-	-		568.679		568.679		60,80 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
72	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			778.729		359.988		442.600		60.102		133.515	-	-		193.617		193.617		43,75 %	
				Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	44%		N/A		15%		10,12%		12,29%		-	-	12,29%		12,29%		81,93%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			778.729				442.600		60.102		133.515	-	-		193.617		193.617		43,75 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		N/A		30 koperasi		6 koperasi		15 koperasi		-	-	15 koperasi		15 koperasi		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.02.2.01.01	**Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			778.729				442.600		60.102		133.515	-	-		193.617		193.617		43,75 %		
				Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi guna memperoleh izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		N/A		30 koperasi		6 koperasi		15 koperasi		-	-	15 koperasi		15 koperasi		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
73	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			1.063.751		736.154		750.496		133.274		299.863	-	-		433.137		433.137		57,71 %		
				Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	71%		N/A		67%		51,25%		80%		-	-	80%		80%		119,40%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			1.063.751				750.496		133.274		299.863	-	-		433.137		433.137		57,71 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi		629%		415 koperasi		80 koperasi		205 koperasi		-		-		205 koperasi		205 koperasi		49,40%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.03.2.01.02	**Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.063.751				750.496		133.274		299.863		-		-		433.137		433.137		57,71 %	
				Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	415 koperasi		629%		415 koperasi		80 koperasi		205 koperasi		-		-		205 koperasi		205 koperasi		49,40%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
74	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			565.398		458.626		404.200		0		201.074		-		-		201.074		201.074		49,75 %	
				Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	72%		N/A		14%		0%		6,75%		-		-		6,75%		6,75%		48,21%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			565.398				404.200		0		201.074		-		-		201.074		201.074		49,75 %	
				Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	179 Orang		N/A		179 Orang		0 Orang		84 Orang		-		-		84 Orang		84 Orang		46,93%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			565.398				404.200		0		201.074	-	-		201.074		201.074		49,75 %		
				Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	179 orang		N/A		179 orang		0 orang		84 orang		-	-	84 orang		84 orang		46,93%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
75	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			559.292		349.063		393.865		57.910		175.364	-	-		233.274		233.274		59,23 %		
				Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	100%		N/A		20%		0%		10,12%		-	-	10,12%		10,12%		50,60%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			559.292				393.865		57.910		175.364	-	-		233.274		233.274		59,23 %		
				Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi		N/A		83 koperasi		0 koperasi		42 koperasi		-	-	42 koperasi		42 koperasi		50,60%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			559.292				393.865		57.910		175.364	-	-		233.274		233.274		59,23 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	83 koperasi		N/A		83 koperasi		0 koperasi		42 koperasi		-		-		42 koperasi		42 koperasi		50,60%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
76	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			3.423.539		5.648.478		4.280.057		384.342		1.021.546	-	-				1.405.888		1.405.888		32,85 %	
				Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	50%		N/A		9,97%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%		N/A		69%		69,39%		77,55%		-		-		77,55%		77,55%		112,39%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**			3.423.539				4.280.057		384.342		1.021.546	-	-				1.405.888		1.405.888		32,85 %	
				Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	9 sentra		N/A		10 sentra		2 sentra		4 sentra		-		-		4 sentra		4 sentra		40,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 0rang		N/A		135 0rang		0 0rang		0 0rang		-		-		0 0rang		0 0rang		0,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			3.048.602				4.020.810		335.787		895.001	-	-		1.230.788		1.230.788		30,61 %		
				Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produk	9 sentra		N/A		10 sentra		2 sentra		4 sentra		-	-	4 sentra		4 sentra		40,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			374.936				259.247		48.555		126.545	-	-		175.100		175.100		67,54 %		
				Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	136 orang		N/A		135 orang		0 orang		0 orang		-	-	0 orang		0 orang		0,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
77	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.548.127		695.207		1.171.794		106.024		278.629	-	-		384.653		384.653		32,83 %		
				Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	100%		N/A		52%		9,72%		32,56%		-	-	32,56%		32,56%		62,62%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			1.548.127				1.171.794		106.024		278.629	-	-		384.653		384.653		32,83 %		
				Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang		N/A		500 orang		50 orang		191 orang		-	-	191 orang		191 orang		38,20%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			1.548.127				1.171.794		106.024		278.629	-	-		384.653		384.653		32,83 %		
				Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen usaha	500 orang		N/A		500 orang		50 orang		191 orang		-	-	191 orang		191 orang		38,20%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																				
78	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.852.455		188.732		12.918.283		893.783		1.810.360	-	-		2.704.143		2.704.143		20,93 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		N/A		89%		88,71%		89%		-	-	89%		89%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.545.528				9.986.927		382.524		372.227	-	-		754.751		754.751		7,56%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.545.528				9.986.927		382.524		372.227	-	-		754.751		754.751		7,56%		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.306.927				2.931.356		511.259		1.438.133	-	-		1.949.392		1.949.392		66,50 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.125.937				2.749.360		479.929		1.368.616		-	-			1.848.546		1.848.546		67,24 %	
				Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			180.990				181.996		31.330		69.517		-	-			100.847		100.847		55,41 %	
				Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			665.825		400.290		414.451		55.768		143.451		-	-			199.219		199.219		48,07 %	
				Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		N/A		150 Perusahaan		0 Perusahaan		54 Perusahaan		-	-			54 Perusahaan		54 Perusahaan		36,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			665.825				414.451		55.768		143.451		-	-			199.219		199.219		48,07 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78%		N/A		70%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02.2.02.02	**Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**			665.825				414.451		55.768		143.451	-	-		199.219		199.219		48,07 %	
				Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
80	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			738.216		476.150		559.335		67.690		156.238	-	-		223.928		223.928		40,03 %	
				Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%		N/A		50%		0%		49,28%		-	-	49,28%		49,28%		98,56%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			738.216				559.335		67.690		156.238	-	-		223.928		223.928		40,03 %	
				Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		N/A		200 Calon Investor / Investor		0 Calon Investor / Investor		69 Calon Investor / Investor		-	-	69 Calon Investor / Investor		69 Calon Investor / Investor		34,50%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.03.2.01.02	**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**			738.216				559.335		67.690		156.238	-	-		223.928		223.928		40,03 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	3 Pameran		N/A		3 Pameran		0 Pameran		1 Pameran		-	-	1 Pameran		1 Pameran		33,33%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
81	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			5.864.492		10.396		3.618.919		704.885		1.704.076	-	-		2.408.961		2.408.961		66,57 %	
				Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		N/A		100%		100%		99,02%		-	-	99,02%		99,02%		99,02%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			5.864.492				3.618.919		704.885		1.704.076	-	-		2.408.961		2.408.961		66,57 %	
				jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100.000 berkas		N/A		80000 berkas		17639 berkas		36446 berkas		-	-	36446 berkas		36446 berkas		45,56%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	12.000 pelaku usaha		N/A		11000 pelaku usaha		1976 pelaku usaha		4988 pelaku usaha		-	-	4988 pelaku usaha		4988 pelaku usaha		45,35%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04.2.01 .02	**Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**			1.092.027				778.280		144.033		353.704	-	-		497.738		497.738		63,95 %	
				Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	12.000 Pelaku Usaha		N/A		11000 Pelaku Usaha		1976 Pelaku Usaha		4988 Pelaku Usaha		-	-	4988 Pelaku Usaha		4988 Pelaku Usaha		45,35%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			4.772.465				2.840.640		560.852		1.350.372	-	-		1.911.224		1.911.224		67,28 %	
				jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100.000 berkas		N/A		80000 berkas		17639 berkas		36446 berkas		-	-	36446 berkas		36446 berkas		45,56%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
82	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.056.164		790.334		919.851		90.210		307.196	-	-		397.406		397.406		43,20 %	
				Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%		N/A		42%		0%		9,17%		-	-	9,17%		9,17%		21,83%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.056.164				919.851		90.210		307.196	-	-		397.406		397.406		43,20 %	
				Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.500 perusahaan		N/A		1100 perusahaan		448 perusahaan		603 perusahaan		-	-	603 perusahaan		603 perusahaan		54,82%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			48.147				43.539		0		0	-	-		0		0		0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal	500 proyek		N/A		500 proyek		139 proyek		316 proyek		-	-	316 proyek		316 proyek		63,20%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05.2.01.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**			235.524				253.234		0		95.482	-	-		95.482		95.482		37,71 %	
				Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	190 peserta		N/A		190 peserta		0 peserta		109 peserta		-	-	109 peserta		109 peserta		57,37%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05.2.01.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**			772.494				623.079		90.210		211.714	-	-		301.924		301.924		48,46 %	
				Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK)	170 proyek		N/A		170 proyek		0 proyek		35 proyek		-	-	35 proyek		35 proyek		20,59%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD)	2.700 perusahaan		N/A		2700 perusahaan		751 perusahaan		1315 perusahaan		-	-	1315 perusahaan		1315 perusahaan		48,70%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
83	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			377.020		6.229.401		244.419		44.013		102.698	-	-		146.711		146.711		60,02 %	
				jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga		N/A		20 lembaga		1 lembaga		2 lembaga		-	-	2 lembaga		2 lembaga		10,00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			377.020				244.419		44.013		102.698	-	-		146.711		146.711		60,02 %	
				Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		N/A		300 perusahaan		78 perusahaan		157 perusahaan		-	-	157 perusahaan		157 perusahaan		52,33%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.06.2.01 .01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			377.020				244.419		44.013		102.698	-	-		146.711		146.711		60,02 %	
				Jumlah data investasi yang dikelola	49.850 data		N/A		46054 data		10917 data		22609 data		-	-	22609 data		22609 data		49,09%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				
84	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			51.083.842		28.924.836		87.517.913		368.267		10.426.438	-	-		10.794.705		10.794.705		12,33 %	
				Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47,98 %		N/A		46,48%		0%		64,43%		-	-	64,43%		64,43%		138,62%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		N/A		20%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28%		N/A		20%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			51.083.842				87.517.913		368.267		10.426.438	-	-		10.794.705		10.794.705		12,33 %	
				Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	24 jenis		N/A		35 jenis		10 jenis		13 jenis		-	-	13 jenis		13 jenis		37,14%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Jumlah laporan hasil studi mahasiswa yang diterima	2.434 laporan		N/A		15449 laporan		0 laporan		1344 laporan		-	-	1344 laporan		1344 laporan		8,70%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	3 jenis		N/A		3 jenis		2 jenis		2 jenis		-	-	2 jenis		2 jenis		66,67%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.02.2.01 .03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.715.027				1.329.883		73.759		198.878	-	-		272.637		272.637		20,50 %	
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Saing Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	35 kegiatan		N/A		35 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		-	-	8 kegiatan		8 kegiatan		22,86%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			1.758.202				1.691.966		81.915		274.580	-	-		356.495		356.495		21,07 %		
				Jumlah Kegiatan Wirausaha Muda Pemula	14 Kegiatan		N/A		17 Kegiatan		4 Kegiatan		6 Kegiatan		-	-	6 Kegiatan		6 Kegiatan		35,29%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			45.009.330				81.147.423		53.300		9.201.350	-	-		9.254.650		9.254.650		11,40 %		
				Jumlah penerima beasiswa pendidikan	2.434 orang		N/A		15449 orang		0 orang		1344 orang		-	-	1344 orang		1344 orang		8,70%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			2.601.283				3.348.640		159.293		751.630	-	-		910.923		910.923		27,20 %		
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	30 kegiatan		N/A		41 kegiatan		9 kegiatan		12 kegiatan		-	-	12 kegiatan		12 kegiatan		29,27%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
85	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			99.950.462		385.600		72.208.937		1.802.929		17.742.477	-	-		19.545.406		19.545.406		27,07 %		
				Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205 medali		N/A		164 medali		0 medali		0 medali		-	-	0 medali		0 medali		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28%		N/A		10%		0%		2,33%		-	-	2,33%		2,33%		23,30%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			24.739.225				17.585.610		154.073		1.613.693	-	-		1.767.766		1.767.766		10,05 %	
				Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	9 kecamatan		N/A		4 kecamatan		0 kecamatan		3 kecamatan		-	-	3 kecamatan		3 kecamatan		75,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.01 .03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			24.739.225				17.585.610		154.073		1.613.693	-	-		1.767.766		1.767.766		10,05 %	
				Jumlah Prasarana Olahraga yang Dibangun dan Ditingkatkan	84 unit		N/A		30 unit		0 unit		7 unit		-	-	7 unit		7 unit		23,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.576.316				28.602.123		152.920		10.872.275	-	-		11.025.195		11.025.195		38,55 %	
				Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	48 cabang olahraga		N/A		42 cabang olahraga		0 cabang olahraga		0 cabang olahraga		-	-	0 cabang olahraga		0 cabang olahraga		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.03 .03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota			41.576.316				28.602.123		152.920		10.872.275	-	-		11.025.195		11.025.195		38,55 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	54 kegiatan		N/A		50 kegiatan		1 kegiatan		46 kegiatan		-	-	46 kegiatan		46 kegiatan		92,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			33.634.920				26.021.204		1.495.935		5.256.509	-	-		6.752.444		6.752.444		25,95 %	
				Jumlah jenis pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	13 jenis		N/A		12 jenis		2 jenis		5 jenis		-	-	5 jenis		5 jenis		41,67%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	166 lokasi		N/A		149 lokasi		80 lokasi		147 lokasi		-	-	147 lokasi		147 lokasi		98,66%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.05 .03	**Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi**			27.850.024				22.814.212		1.455.445		4.382.851	-	-		5.838.296		5.838.296		25,59 %	
				Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana olahraga yang dilakukan	206 kali		N/A		189 kali		81 kali		157 kali		-	-	157 kali		157 kali		83,07%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.19.03.2.05 .01	**Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**			5.784.896				3.206.992		40.490		873.658	-	-		914.148		914.148		28,50 %	
				Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	13 kegiatan		N/A		12 kegiatan		2 kegiatan		5 kegiatan		-	-	5 kegiatan		5 kegiatan		41,67%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																				
86	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			695.275		128.830		516.378		52.373		132.890	-	-		185.263		185.263		35,88 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			695.275				516.378		52.373		132.890	-	-		185.263		185.263		35,88 %	
				Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor		N/A		5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		-	-	5 Sektor		5 Sektor		100,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.20.02.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			695.275				516.378		52.373		132.890	-	-		185.263		185.263		35,88 %	
				Jumlah kegiatan pengumpulan data statistik sektoral	12 Kali		N/A		12 Kali		2 Kali		5 Kali		-	-	5 Kali		5 Kali		41,67%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
87	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			7.177.846		1.854.329		5.636.788		1.361.290		2.612.709	-	-		3.973.998		3.973.998		70,50 %	
				Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	41%		N/A		8%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291				3.421.526		833.185		1.131.232	-	-		1.964.417		1.964.417		57,41 %	
				Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari		N/A		3 kali/per hari		3.02 kali/per hari		3.02 kali/per hari		-	-	3.02 kali/per hari		3.02 kali/per hari		100,67%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21.02.2.01 .04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291				3.421.526		833.185		1.131.232	-	-		1.964.417		1.964.417		57,41 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lokasi pengawasan keamanan informasi	13 PD		N/A		13 PD		3 PD		6 PD		-	-	6 PD		6 PD		46,15%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**			2.703.556				2.215.262		528.105		1.481.477	-	-		2.009.582		2.009.582		90,72 %	
				Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali		N/A		6 Kali		18 Kali		31 Kali		-	-	31 Kali		31 Kali		516,67%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21.02.2.02 .01	**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			2.703.556				2.215.262		528.105		1.481.477	-	-		2.009.582		2.009.582		90,72 %	
				Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola	1889 Unit		N/A		1489 Unit		446 Unit		822 Unit		-	-	822 Unit		822 Unit		55,20%		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																				
88	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			51.347.778		0		40.230.488		3.091.624		6.792.006	-	-		9.883.630		9.883.630		24,57 %	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		N/A		89%		90,37%		90%		-	-	90%		90%		101,12%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			32.124.462				22.803.904		934.359		944.856	-	-		1.879.215		1.879.215		8,24%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.124.462				22.803.904		934.359		944.856		-		-		1.879.215		1.879.215		8,24%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.223.316				17.426.584		2.157.265		5.847.150		-		-		8.004.415		8.004.415		45,93 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.544.444				15.429.358		2.112.863		5.534.246		-		-		7.647.108		7.647.108		49,56 %	
				Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 jenis		N/A		3 jenis		6 jenis		6 jenis		-		-		6 jenis		6 jenis		200,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.678.872				1.997.227		44.402		312.904		-		-		357.306		357.306		17,89 %	
				Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis		100%		3 jenis		5 jenis		7 jenis		-		-		7 jenis		7 jenis		233,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
89	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			6.343.173		1.715.476		6.810.598		108.912		1.854.781	-	-		1.963.693		1.963.693		28,83 %		
				Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	100%		45%		60%		30%		45%		-	-	45%		45%		75,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			5.879.413				6.421.130		103.312		1.597.863	-	-		1.701.175		1.701.175		26,49 %		
				Jumlah pemanfaatan budaya daerah	480 kali		N/A		440 kali		188 kali		319 kali		-	-	319 kali		319 kali		72,50%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		2.22.02.2.01 .01	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**			5.879.413				6.421.130		103.312		1.597.863	-	-		1.701.175		1.701.175		26,49 %		
				Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	480 kali		N/A		440 kali		188 kali		319 kali		-	-	319 kali		319 kali		72,50%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			463.759				389.468		5.600		256.918	-	-		262.518		262.518		67,40 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pengembangan tradisi budaya lokal	3 kali		N/A		3 kali		0 kali		1 kali		-		-		1 kali		1 kali		33,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.02.2.02.01	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**			463.759				389.468		5.600		256.918	-	-		262.518		262.518		67,40 %		
				Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali		N/A		3 kali		0 kali		1 kali		-		-		1 kali		1 kali		33,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
90	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			2.443.046		681.547		2.040.129		114.734		496.977	-	-		611.711		611.711		29,98 %		
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62,00 %		83,33 %		59,10%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			2.443.046				2.040.129		114.734		496.977	-	-		611.711		611.711		29,98 %		
				Jumlah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	850 kali		N/A		770 kali		192 kali		384 kali		-		-		384 kali		384 kali		49,87%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			2.443.046				2.040.129		114.734		496.977	-	-		611.711		611.711		29,98 %		
				Jumlah pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional yg difasilitasi	850 kali		N/A		770 kali		192 kali		384 kali		-	-	384 kali		384 kali		49,87%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
91	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			1.292.538		83.621		1.164.427		13.600		98.322	-	-		111.922		111.922		9,61%		
				Persentase siswa yang memahami materi sejarah	80%		N/A		72%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.292.538				1.164.427		13.600		98.322	-	-		111.922		111.922		9,61%		
				Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali		N/A		10 kali		0 kali		3 kali		-	-	3 kali		3 kali		30,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			1.292.538				1.164.427		13.600		98.322	-	-		111.922		111.922		9,61%		
				Jumlah pelaksanaan event peningkatan akses masyarakat terhadap nilai sejarah	10 kali		N/A		10 kali		0 kali		3 kali		-	-	3 kali		3 kali		30,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
92	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			1.514.094		826.692		1.600.506		174.872		506.237	-	-		681.110		681.110		42,56 %	
				Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04 %		N/A		92,04%		25,94%		53,38%		-	-	53,38%		53,38%		58,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			1.514.094				1.600.506		174.872		506.237	-	-		681.110		681.110		42,56 %	
				Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		250%		266 lokasi		69 lokasi		142 lokasi		-	-	142 lokasi		142 lokasi		53,38%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.05.2.02 .01	**Pelindungan Cagar Budaya**			1.514.094				1.600.506		174.872		506.237	-	-		681.110		681.110		42,56 %	
				Jumlah cagar budaya yang dimonitoring sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		250%		266 lokasi		69 lokasi		142 lokasi		-	-	142 lokasi		142 lokasi		53,38%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
93	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			3.477.181		156.594		4.397.661		205.341		1.586.013	-	-		1.791.354		1.791.354		40,73 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III									
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%		N/A		100%		25%		25%		-	-	25%		25%		25,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			3.477.181				4.397.661		205.341		1.586.013	-	-		1.791.354		1.791.354		40,73 %	
				Jumlah museum yang dikembangkan, dipelihara dan disediakan sarana penunjang	8 lokasi		N/A		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi		-	-	8 lokasi		8 lokasi		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.06.2.01 .01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu			223.926				450.849		0		235.528	-	-		235.528		235.528		52,24 %	
				Jumlah museum yang dikembangkan	1 lokasi		N/A		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		-	-	2 lokasi		2 lokasi		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.06.2.01 .03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			433.529				807.609		0		253.296	-	-		253.296		253.296		31,36 %	
				Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo	4 kegiatan		N/A		8 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		-	-	2 kegiatan		2 kegiatan		25,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.06.2.01 .04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			135.342				241.542		0		170.120	-	-		170.120		170.120		70,43 %	
				Jumlah museum yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	1 lokasi		N/A		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		-	-	2 lokasi		2 lokasi		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.22.06.2.01 .05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			2.684.384				2.897.661		205.341		927.069	-	-		1.132.410		1.132.410		39,08 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah museum yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	7 lokasi		N/A		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		-	-			7 lokasi		7 lokasi		100,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
94	*	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.264.534		10.481.323		18.162.054		1.167.899		1.773.063	-	-		2.940.962		2.940.962		16,19 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02 %		N/A		95,05%		94,14%		94%		-	-	94%		94%		98,90%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.905.797				15.485.556		701.027		673.003	-	-		1.374.030		1.374.030		8,87%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.905.797				15.485.556		701.027		673.003	-	-		1.374.030		1.374.030		8,87%		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.838				205.731		40.674		82.664	-	-		123.338		123.338		59,95 %		
				Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			227.838				205.731		40.674		82.664	-	-		123.338		123.338		59,95 %		
				Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			754.718				700.670		81.422		194.561	-	-		275.983		275.983		39,39 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			754.718				700.670		81.422		194.561		-		-		275.983		275.983		39,39 %	
				Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.376.181				1.770.097		344.775		822.835		-		-		1.167.610		1.167.610		65,96 %	
				Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			214.853				359.694		55.634		108.596		-		-		164.230		164.230		45,66 %	
				Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.161.328				1.410.403		289.141		714.240		-		-		1.003.381		1.003.381		71,14 %	
				Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
95	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			32.318.230		261.828		13.807.419		2.637.536		6.654.516		-		-		9.292.052		9.292.052		67,30 %	
				Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%		N/A		56,28%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase event literasi yang diselenggarakan	100%		N/A		19,20%		5,20%		8,40%		-	-	8,40%		8,40%		43,75%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	100%		N/A		19,95%		7,05%		21,72%		-	-	21,72%		21,72%		108,87%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.664.882				13.319.539		2.552.262		6.429.664	-	-		8.981.925		8.981.925		67,43 %	
				Jenis buku yang disediakan	2 Jenis		N/A		2 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		-	-	1 Jenis		1 Jenis		50,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Tingkat Kepuasan Pemustaka	83,5 nilai		N/A		815 nilai		0 nilai		0 nilai		-	-	0 nilai		0 nilai		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga		N/A		230 Lembaga		0 Lembaga		251 Lembaga		-	-	251 Lembaga		251 Lembaga		109,13%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01 .05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			241.070				208.115		47.075		85.570	-	-		132.645		132.645		63,74 %	
				Jumlah layanan baca yang dibina	200 lembaga		N/A		200 lembaga		0 lembaga		201 lembaga		-	-	201 lembaga		201 lembaga		100,50%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01 .04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			76.506				67.348		18.308		30.545	-	-		48.853		48.853		72,54 %	
				Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya yang dibina	30 lembaga		N/A		30 lembaga		0 lembaga		50 lembaga		-	-	50 lembaga		50 lembaga		166,67%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			1.665.490				1.003.714		57.759		260.752	-	-		318.511		318.511		31,73 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III									
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah koleksi bahan pustaka	1505 Examplar		N/A		1496 Examplar		529 Examplar		1629 Examplar		-	-	1629 Examplar		1629 Examplar		108,89%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01.02	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			29.394.765				11.775.885		2.392.006		5.937.741	-	-		8.329.747		8.329.747		70,74 %	
				Jumlah layanan baca yang dikelola	1505 lokasi		N/A		1494 lokasi		1494 lokasi		1500 lokasi		-	-	1500 lokasi		1500 lokasi		100,40%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01.06	**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			287.051				264.478		37.114		115.056	-	-		152.170		152.170		57,54 %	
				Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina	500 orang		N/A		500 orang		0 orang		502 orang		-	-	502 orang		502 orang		100,40%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			653.349				487.880		85.274		224.852	-	-		310.127		310.127		63,57 %	
				Jumlah bibit penulis dan pendongeng	7429 orang		N/A		3493 orang		466 orang		1673 orang		-	-	1673 orang		1673 orang		47,90%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.02.01	**Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat**			653.349				487.880		85.274		224.852	-	-		310.127		310.127		63,57 %	
				Jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	260 kali		N/A		240 kali		75 kali		105 kali		-	-	105 kali		105 kali		43,75%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																				
96	*	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			3.079.365		282.972		2.848.664		616.505		1.597.280	-	-		2.213.785		2.213.785		77,71 %	
				Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%		N/A		52,07%		39,72%		43,21%		-	-	43,21%		43,21%		82,98%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30,01 %		N/A		27,66%		27,24%		27,44%		-	-	27,44%		27,44%		99,20%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17,98 %		N/A		10,16%		8,70%		9,18%		-	-	9,18%		9,18%		90,35%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			943.857				801.723		151.936		552.858	-	-		704.794		704.794		87,91 %	
				Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item		N/A		9000 item		2252 item		5083 item		-	-	5083 item		5083 item		56,48%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	66 lembaga		N/A		42 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		-	-	0 lembaga		0 lembaga		0,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.01 .02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			783.408				656.186		119.343		484.414	-	-		603.756		603.756		92,01 %	
				Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	11 Item		N/A		11 Item		2 Item		19 Item		-	-	19 Item		19 Item		172,73%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			160.449				145.538		32.594		68.445	-	-		101.038		101.038		69,42 %	
				Jumlah frekuensi pengawasan kearsipan internal perangkat Daerah dan BUMD yang dilakukan	66 Kali		N/A		66 Kali		33 Kali		66 Kali		-	-	66 Kali		66 Kali		100,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			1.743.109				1.657.744		363.166		840.820	-	-		1.203.986		1.203.986		72,63 %	
				Arsip yang dialih mediakan	7500 Lembar		N/A		7500 Lembar		2192 Lembar		4999 Lembar		-	-	4999 Lembar		4999 Lembar		66,65%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			1.743.109				1.657.744		363.166		840.820	-	-		1.203.986		1.203.986		72,63 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	5 Kegiatan		N/A		5 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		-	-	4 Kegiatan		4 Kegiatan		80,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**			392.398				389.196		101.403		203.601	-	-		305.004		305.004		78,37 %	
				Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	9200 item		N/A		5200 item		4449 item		4698 item		-	-	4698 item		4698 item		90,35%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga		N/A		70 Lembaga		0 Lembaga		30 Lembaga		-	-	30 Lembaga		30 Lembaga		42,86%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.03 .02	**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**			152.577				184.390		36.700		77.447	-	-		114.147		114.147		61,91 %	
				PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	69 Lembaga		N/A		70 Lembaga		10 Lembaga		30 Lembaga		-	-	30 Lembaga		30 Lembaga		42,86%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.03 .01	**Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN**			239.821				204.806		64.703		126.155	-	-		190.857		190.857		93,19 %	
				Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali		N/A		40 kali		11 kali		25 kali		-	-	25 kali		25 kali		62,50%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
97	*	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			178.274		0		211.484		19.550		35.750	-	-		55.300		55.300		26,15 %	
				Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	100%		N/A		19,95%		0%		47,64%		-	-	47,64%		47,64%		238,80%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			178.274				211.484		19.550		35.750	-	-		55.300		55.300		26,15 %		
				Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.03.2.01 .01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			178.274				211.484		19.550		35.750	-	-		55.300		55.300		26,15 %		
				Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian, penetapan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	339 Item arsip		N/A		338 Item arsip		0 Item arsip		1234 Item arsip		-	-		1234 Item arsip		1234 Item arsip		365,09%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
98	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.094.028		2.729.616		5.134.878		302.027		924.587	-	-		1.226.613		1.226.613		23,89 %		
				Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	50%		N/A		30%		0%		0%		-	-		0%		0%		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			4.094.028				5.134.878		302.027		924.587	-	-		1.226.613		1.226.613		23,89 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-		-		0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			4.094.028				5.134.878		302.027		924.587		-		-		1.226.613		1.226.613		23,89 %	
				Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap	70 unit		N/A		50 unit		0 unit		0 unit		-		-		0 unit		0 unit		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
99	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.687.007		206.755		2.010.960		217.015		716.378		-		-		933.393		933.393		46,42 %	
				Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang/kelompok		N/A		20 orang/kelompok		0 orang/kelompok		0 orang/kelompok		-		-		0 orang/kelompok		0 orang/kelompok		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			379.056				359.917		71.585		154.964		-		-		226.549		226.549		62,94 %	
				Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	40 kali		N/A		32 kali		4 kali		13 kali		-		-		13 kali		13 kali		40,63%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			379.056				359.917		71.585		154.964		-		-		226.549		226.549		62,94 %	
				Jumlah peserta pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	800 orang		N/A		640 orang		121 orang		363 orang		-		-		363 orang		363 orang		56,72%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.307.951				1.651.043		145.430		561.414		-		-		706.844		706.844		42,81 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan		N/A		1 laporan		0 laporan		0 laporan		-	-	0 laporan		0 laporan		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.307.951				1.651.043		145.430		561.414	-	-		706.844		706.844		42,81 %	
				Jumlah sarana budidaya ikan yang diadakan	102 unit		N/A		86 unit		0 unit		15 unit		-	-	15 unit		15 unit		17,44%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
100	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			45.590.707		0		12.499.780		72.623		682.886	-	-		755.509		755.509		6,04%	
				Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus		N/A		0 kasus		0 kasus		0 kasus		-	-	0 kasus		0 kasus		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707				12.499.780		72.623		682.886	-	-		755.509		755.509		6,04%	
				Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707				12.499.780		72.623		682.886	-	-		755.509		755.509		6,04%	
				Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
101	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			820.823		0		1.179.675		79.106		190.423	-	-		269.530		269.530		22,85 %	
				Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	80%		N/A		60%		70,80%		58%		-	-	58%		58%		96,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			820.823				1.179.675		79.106		190.423	-	-		269.530		269.530		22,85 %	
				Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra		N/A		3 sentra		3 sentra		3 sentra		-	-	3 sentra		3 sentra		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.25.06.2.03 .02	**Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			820.823				1.179.675		79.106		190.423	-	-		269.530		269.530		22,85 %	
				Jumlah pelaku usaha perikanan yang diberikan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	250 pelaku usaha		N/A		250 pelaku usaha		250 pelaku usaha		250 pelaku usaha		-	-	250 pelaku usaha		250 pelaku usaha		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																				
102	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			6.263.210		281.175		5.944.973		354.186		1.361.063	-	-		1.715.249		1.715.249		28,85 %	
				Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	78,57 %		N/A		35,71%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			5.272.929				4.928.028		283.027		1.162.143	-	-		1.445.170		1.445.170		29,33 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi		N/A		2 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.02.2.01.04	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			150.212				130.948		7.305		27.613		-		-		34.918		34.918		26,67 %	
				Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	60 kali		N/A		60 kali		38 kali		50 kali		-		-		50 kali		50 kali		83,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.02.2.01.03	**Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			5.122.716				4.797.080		275.722		1.134.530		-		-		1.410.252		1.410.252		29,40 %	
				Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2 lokasi		N/A		2 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			990.281				1.016.946		71.159		198.920		-		-		270.079		270.079		26,56 %	
				Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi		N/A		1 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.02.2.03.03	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**			598.043				491.674		27.110		110.348		-		-		137.458		137.458		27,96 %	
				Jumlah kampung wisata dan wisata terintegrasi yang dikembangkan	2 lokasi		N/A		1 lokasi		0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		0 lokasi		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.02.2.03.02	**Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			392.238				525.272		44.049		88.572		-		-		132.621		132.621		25,25 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata	1 dokumen		N/A		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-	-			0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
103	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			6.583.809		368.894		8.830.941		128.835		1.259.271	-	-		1.388.106		1.388.106		15,72 %		
				Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	47%		N/A		41,50%		0%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			6.583.809				8.830.941		128.835		1.259.271	-	-		1.388.106		1.388.106		15,72 %		
				Jumlah dokumen laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	3 dokumen		N/A		3 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-			1 dokumen		1 dokumen		33,33%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.03.2.01 .02	**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**			6.583.809				8.830.941		128.835		1.259.271	-	-		1.388.106		1.388.106		15,72 %		
				Jumlah penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri	257 kali		N/A		206 kali		24 kali		73 kali		-	-			73 kali		73 kali		35,44%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
104	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			2.802.104		148.217		4.833.409		226.762		764.765	-	-		991.527		991.527		20,51 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%		N/A		60%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	28%		N/A		20%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	100%		N/A		20%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			822.352				727.751		75.398		248.619	-		-			324.016		324.016		44,52 %	
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan	9 kali		N/A		9 kali		1 kali		4 kali		-		-		4 kali		4 kali		44,44%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Jumlah pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 kelompok		N/A		2 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		-		-		1 kelompok		1 kelompok		50,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.05.2.01 .03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			398.118				366.538		24.199		127.574	-		-			151.773		151.773		41,41 %	
				Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan yang dilaksanakan	3 kali		N/A		3 kali		0 kali		0 kali		-		-		0 kali		0 kali		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			424.235				361.213		51.199		121.044	-	-		172.243		172.243		47,68 %	
				Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	6 kali		N/A		6 kali		1 kali		4 kali		-	-	4 kali		4 kali		66,67%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			1.979.752				4.105.659		151.364		516.147	-	-		667.510		667.510		16,26 %	
				Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk		N/A		3 Produk		0 Produk		0 Produk		-	-	0 Produk		0 Produk		0,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			1.979.752				4.105.659		151.364		516.147	-	-		667.510		667.510		16,26 %	
				Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	20 Kali		N/A		20 Kali		11 Kali		16 Kali		-	-	16 Kali		16 Kali		80,00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
105	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			7.660.760		814.316		7.360.998		529.200		1.823.858	-	-		2.353.058		2.353.058		31,97 %	
				Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	45 Orang		N/A		25 Orang		0 Orang		0 Orang		-	-	0 Orang		0 Orang		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			6.792.603				5.857.700		472.615		1.558.487	-	-		2.031.102		2.031.102		34,67 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis		N/A		10 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		-	-	6 Jenis		6 Jenis		60,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.02.2.01.02	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**			6.792.603				5.857.700		472.615		1.558.487	-	-		2.031.102		2.031.102		34,67 %	
				Jumlah Peserta Pembinaan Pengguna Sarana Pemanfaatan Lahan Pekarangan	500 Orang		N/A		500 Orang		462 Orang		462 Orang		-	-	462 Orang		462 Orang		92,40%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**			868.157				1.503.298		56.585		265.372	-	-		321.956		321.956		21,42 %	
				Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis		5%		6 jenis		0 jenis		4 jenis		-	-	4 jenis		4 jenis		66,67%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.02.2.05.05	**Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**			868.157				1.503.298		56.585		265.372	-	-		321.956		321.956		21,42 %	
				Monitoring penyediaan benih/bibit ternak	12 kali		5%		12 kali		3 kali		6 kali		-	-	6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
106	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			21.217.227		0		27.225.263		1.512.146		4.572.783	-	-		6.084.929		6.084.929		22,35 %	
				Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha		N/A		2 Ha		0 Ha		0.9 Ha		-	-	0.9 Ha		0.9 Ha		45,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	35 Lokasi		N/A		14 Lokasi		11 Lokasi		13 Lokasi		-	-	13 Lokasi		13 Lokasi		92,86%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.309.313				10.579.026		8.400		232.132		-		-		240.532		240.532		2,27%	
				Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis		N/A		4 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		-		-		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			1.309.313				10.579.026		8.400		232.132		-		-		240.532		240.532		2,27%	
				Jumlah lahan aset yang direalisasikan untuk kegiatan budidaya pertanian	6 Lokasi		N/A		4 Lokasi		1 Lokasi		3 Lokasi		-		-		3 Lokasi		3 Lokasi		75,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			19.907.914				16.646.237		1.503.746		4.340.651		-		-		5.844.397		5.844.397		35,11 %	
				Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan		N/A		13 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			19.907.914				16.646.237		1.503.746		4.340.651		-		-		5.844.397		5.844.397		35,11 %	
				Jumlah lokasi taman hutan raya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	13 lokasi		N/A		13 lokasi		13 lokasi		13 lokasi		-		-		13 lokasi		13 lokasi		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
107	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.140.798		722.181		1.171.965		119.773		314.832		-		-		434.605		434.605		37,08 %	
				Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5 %		N/A		89,38%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 kelompok		N/A		3 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		-		-		0 kelompok		0 kelompok		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			845.362				868.027		108.773		275.648	-	-		384.421		384.421		44,29 %		
				Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%		N/A		80%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3.27.04.2.01 .01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			845.362				868.027		108.773		275.648	-	-		384.421		384.421		44,29 %		
				Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	3.750 ekor		N/A		2750 ekor		572 ekor		1733 ekor		-	-	1733 ekor		1733 ekor		63,02%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			295.436				303.938		11.000		39.184	-	-		50.184		50.184		16,51 %		
				Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit		N/A		25 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3.27.04.2.04 .01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			295.436				303.938		11.000		39.184	-	-		50.184		50.184		16,51 %		
				Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya peternakan	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
108	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			113.553		34.105		110.149		8.400		43.287	-	-		51.687		51.687		46,92 %		
				Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.553				110.149		8.400		43.287	-	-		51.687		51.687		46,92 %		
				Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses	80%		N/A		80%		100%		100%		-	-	100%		100%		125,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3.27.06.2.01 .02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			113.553				110.149		8.400		43.287	-	-		51.687		51.687		46,92 %		
				Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian	80%		N/A		80%		100%		95,24%		-	-	95,24%		95,24%		119,05%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
109	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.709.423		281.109		2.726.997		263.310		935.418	-	-		1.198.728		1.198.728		43,96 %		
				Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Tingkat Produktivitas Pertanian	6,05 ton/ha		N/A		5.8 ton/ha		6.65 ton/ha		6.19 ton/ha		-	-	6.19 ton/ha		6.19 ton/ha		106,72%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.709.423				2.726.997		263.310		935.418	-	-		1.198.728		1.198.728		43,96 %		
				Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	34 Kelompok		N/A		6 Kelompok		0 Kelompok		3 Kelompok		-	-	3 Kelompok		3 Kelompok		50,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang		N/A		25 orang		25 orang		25 orang		-	-	25 orang		25 orang		100,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.702.059				1.730.407		108.842		574.165	-	-		683.007		683.007		39,47 %	
				Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	6 Kali		N/A		6 Kali		0 Kali		3 Kali		-	-	3 Kali		3 Kali		50,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.007.364				996.590		154.468		361.253	-	-		515.721		515.721		51,75 %	
				Jumlah pelaksanaan bimtek/pelatihan untuk penguatan SDM Penyuluh	9 kali		N/A		5 kali		1 kali		2 kali		-	-	2 kali		2 kali		40,00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
110	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.879.526		331.128		1.005.200		212.332		465.553	-	-		677.885		677.885		67,44 %	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan	96%		97,92 %		92%		100%		100%		-	-	100%		100%		108,70%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			501.503				259.582		55.720		119.512	-	-		175.232		175.232		67,51 %	
				Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha		N/A		3 Sektor Usaha		2 Sektor Usaha		2 Sektor Usaha		-	-	2 Sektor Usaha		2 Sektor Usaha		66,67%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			501.503				259.582		55.720		119.512	-	-		175.232		175.232		67,51 %		
				Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	450 pelaku usaha		N/A		450 pelaku usaha		114 pelaku usaha		195 pelaku usaha		-	-	195 pelaku usaha		195 pelaku usaha		43,33%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			441.246				184.536		36.249		84.438	-	-		120.687		120.687		65,40 %		
				Jumlah sektor usaha pergudangan yang difasilitasi	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan		N/A		1 Sektor usahaUsaha Perdagangan		1 Sektor usahaUsaha Perdagangan		1 Sektor usahaUsaha Perdagangan		-	-	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan		1 Sektor usahaUsaha Perdagangan		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			441.246				184.536		36.249		84.438	-	-		120.687		120.687		65,40 %		
				Jumlah gudang yang difasilitasi	450 Pelaku usaha		N/A		450 Pelaku usaha		115 Pelaku usaha		259 Pelaku usaha		-	-	259 Pelaku usaha		259 Pelaku usaha		57,56%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			127.369				100.748		18.383		45.289	-	-		63.673		63.673		63,20 %		
				Jumlah sektor usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	1 Sektor usaha		N/A		1 Sektor usaha		1 Sektor usaha		1 Sektor usaha		-	-	1 Sektor usaha		1 Sektor usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik			127.369				100.748		18.383		45.289	-	-		63.673		63.673		63,20 %		
				Jumlah usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	55 Pelaku usaha		N/A		55 Pelaku usaha		13 Pelaku usaha		24 Pelaku usaha		-	-	24 Pelaku usaha		24 Pelaku usaha		43,64%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			127.369				49.847		11.000		22.000	-	-		33.000		33.000		66,20 %		
				Jumlah sektor usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	1 Sektor Usaha		N/A		1 Sektor Usaha		1 Sektor Usaha		1 Sektor Usaha		-	-	1 Sektor Usaha		1 Sektor Usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri			127.369				49.847		11.000		22.000	-	-		33.000		33.000		66,20 %		
				Jumlah usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	24 Pelaku Usaha		N/A		24 Pelaku Usaha		6 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha		-	-	12 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			537.406				295.938		71.597		146.676	-	-		218.273		218.273		73,76 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah sektor usaha penjualan Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	1 Pelaku usaha		N/A		1 Pelaku usaha		1 Pelaku usaha		1 Pelaku usaha		-	-	1 Pelaku usaha		1 Pelaku usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.05.01	**Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C**			537.406				295.938		71.597		146.676	-	-		218.273		218.273		73,76 %	
				Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	380 Pelaku usaha		N/A		380 Pelaku usaha		107 Pelaku usaha		195 Pelaku usaha		-	-	195 Pelaku usaha		195 Pelaku usaha		51,32%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			144.633				114.548		19.383		47.637	-	-		67.020		67.020		58,51 %	
				Jumlah sektor usaha fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	1 Sektor usaha		N/A		1 Sektor usaha		1 Sektor usaha		1 Sektor usaha		-	-	1 Sektor usaha		1 Sektor usaha		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.02.2.06.01	**Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya**			144.633				114.548		19.383		47.637	-	-		67.020		67.020		58,51 %	
				Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa	20 lokasi		N/A		20 lokasi		4 lokasi		10 lokasi		-	-	10 lokasi		10 lokasi		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
111	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			4.968.209		751.104		3.154.373		557.322		1.287.350	-	-		1.844.671		1.844.671		58,48 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.03.2.02	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**			4.968.209				3.154.373		557.322		1.287.350	-	-		1.844.671		1.844.671		58,48 %	
				Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.03.2.02 .01	**Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**			4.968.209				3.154.373		557.322		1.287.350	-	-		1.844.671		1.844.671		58,48 %	
				Jumlah pasar yang dikelola	12 lokasi		N/A		12 lokasi		9 lokasi		10 lokasi		-	-	10 lokasi		10 lokasi		83,33%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		N/A		500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		144 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		461 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		-	-	461 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		461 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan		92,20%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
112	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			1.309.691		5.985		812.252		133.856		292.105	-	-		425.961		425.961		52,44 %	
				Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.309.691				812.252		133.856		292.105	-	-		425.961		425.961		52,44 %		
				Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-		6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-		6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.04.2.02 .03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			425.952				244.079		52.285		101.590	-	-		153.875		153.875		63,04 %		
				Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	217 kali		N/A		217 kali		78 kali		152 kali		-	-		152 kali		152 kali		70,05%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.04.2.02 .01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			883.738				568.173		81.571		190.515	-	-		272.086		272.086		47,89 %		
				Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-	-		6 kali		6 kali		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
113	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			2.045.562		1.074.614		1.126.580		313.951		684.203	-	-		998.154		998.154		88,60 %	
				Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			2.045.562				1.126.580		313.951		684.203	-	-		998.154		998.154		88,60 %	
				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.06.2.01 .01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang			1.898.815				1.013.188		292.158		638.321	-	-		930.479		930.479		91,84 %	
				Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	24.290 Unit		N/A		22430 Unit		7785 Unit		13249 Unit		-	-	13249 Unit		13249 Unit		59,07%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.06.2.01 .02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			146.747				113.392		21.793		45.882	-	-		67.675		67.675		59,68 %	
				Jumlah alat UTTP yang diawasi	4.750 unit		N/A		4750 unit		1240 unit		2561 unit		-	-	2561 unit		2561 unit		53,92%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
114	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			6.660.120		232.884		4.931.043		836.451		1.991.668	-	-		2.828.119		2.828.119		57,35 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%		N/A		100%		100%		98,78%		-	-	98,78%		98,78%		98,78%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**			6.660.120				4.931.043		836.451		1.991.668	-	-		2.828.119		2.828.119		57,35 %	
				Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-	-	6 laporan		6 laporan		50,00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.30.07.2.01 .02	**Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**			6.660.120				4.931.043		836.451		1.991.668	-	-		2.828.119		2.828.119		57,35 %	
				Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	5.220 orang		N/A		5220 orang		690 orang		2100 orang		-	-	2100 orang		2100 orang		40,23%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																				
115	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			589.753		0		784.331		76.029		188.308	-	-		264.337		264.337		33,70 %	
				Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	26%		N/A		15%		41,67%		42,95%		-	-	42,95%		42,95%		286,33%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3.31.02.2.01	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**			589.753				784.331		76.029		188.308	-	-		264.337		264.337		33,70 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3.31.02.2.01 .05	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**			589.753				784.331		76.029		188.308	-	-		264.337		264.337		33,70 %	
				Jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	770 Pelaku usaha		N/A		444 Pelaku usaha		100 Pelaku usaha		198 Pelaku usaha		-	-	198 Pelaku usaha		198 Pelaku usaha		44,59%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
116	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			331.422		0		281.259		24.026		80.597	-	-		104.623		104.623		37,20 %	
				Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	90%		N/A		80%		58,75%		57,92%		-	-	57,92%		57,92%		72,40%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**			331.422				281.259		24.026		80.597		-		104.623		104.623		37,20 %	
				Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)			331.422				281.259		24.026		80.597	-	-		104.623		104.623		37,20 %		
				Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinannya	450 Pelaku usaha		N/A		350 Pelaku usaha		141 Pelaku usaha		267 Pelaku usaha		-	-	267 Pelaku usaha		267 Pelaku usaha		76,29%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
117	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			213.589		0		222.839		11.891		33.630	-	-		45.521		45.521		20,43 %		
				Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213.589				222.839		11.891		33.630	-	-		45.521		45.521		20,43 %		
				Jumlah laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-	-	0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			213.589				222.839		11.891		33.630	-	-		45.521		45.521		20,43 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	1 dokumen		N/A		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		-	-	0 dokumen		0 dokumen		0,00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																				
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																				
118	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			262.195.831		31.948.387		188.381.010		17.043.494		48.554.102	-	-		65.597.596		65.597.596		34,82 %	
				Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		N/A		97%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%		N/A		80%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		96,71 %		100%		93,23%		93%		-	-	93%		93%		93,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75%		N/A		63,88%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	98%		N/A		90%		97,09%		97,68%		-		-		97,68%		97,68%		108,53%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			91.628.677				73.506.906		2.037.487		2.125.366		-		-		4.162.852		4.162.852		5,66%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.02 .01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			91.628.677				73.506.906		2.037.487		2.125.366		-		-		4.162.852		4.162.852		5,66%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			4.083.838				3.149.058		159.625		259.152		-		-		418.777		418.777		13,30 %	
				Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-		-		6 laporan		6 laporan		50,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			4.083.838				3.149.058		159.625		259.152	-	-		418.777		418.777		13,30 %	
				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8.800 Stel		N/A		8800 Stel		1000 Stel		1350 Stel		-	-	1350 Stel		1350 Stel		15,34%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33.982.990				20.902.305		4.130.288		11.722.553	-	-		15.852.841		15.852.841		75,84 %	
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-	-	6 laporan		6 laporan		50,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.982.990				20.902.305		4.130.288		11.722.553	-	-		15.852.841		15.852.841		75,84 %	
				Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1.200 Unit		N/A		6018 Unit		5317 Unit		6677 Unit		-	-	6677 Unit		6677 Unit		110,95%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.205.968				70.992.323		8.216.000		27.019.252	-	-		35.235.253		35.235.253		49,63 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52.008.578				65.945.177		6.967.674		24.825.788	-	-		31.793.461		31.793.461		48,21 %	
				Persentase Ketersediaan jasa pelayanan umum kantor yang tepat waktu dan sasaran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.349.570				2.993.235		951.916		1.565.698	-	-		2.517.614		2.517.614		84,11 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			4.847.821				2.053.911		296.411		627.767	-	-		924.178		924.178		45,00 %	
				Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			9.302.988				6.832.617		1.558.290		2.417.894	-	-		3.976.184		3.976.184		58,19 %	
				Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.11.04	**Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			8.072.880				6.434.940		1.523.880		2.361.450	-	-		3.885.330		3.885.330		60,38 %	
				Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan dana penunjang operasiol	2 Orang		N/A		2 Orang		2 Orang		4 Orang		-	-	4 Orang		4 Orang		200,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.11.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			1.230.108				397.676		34.410		56.444	-	-		90.854		90.854		22,85 %	
				Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan gaji dan/atau tunjangan	2 Orang		N/A		2 Orang		2 Orang		2 Orang		-	-	2 Orang		2 Orang		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**			3.818.611				2.179.014		401.685		866.635	-	-		1.268.320		1.268.320		58,21 %	
				Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		N/A		58 instansi		15 instansi		30 instansi		-	-	30 instansi		30 instansi		51,72%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		N/A		58 instansi		13 instansi		27 instansi		-	-	27 instansi		27 instansi		46,55%		Sekretariat Daerah
				Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		N/A		253 unit		0 unit		0 unit		-	-	0 unit		0 unit		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.13.04	**Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**			1.545.079				620.973		114.192		198.751		-	-		312.943		312.943		50,40 %	
				Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas unit penyelenggara pelayanan publik	253 kegiatan		N/A		253 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		-	-	0 kegiatan		0 kegiatan		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.13.01	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**			1.005.337				772.380		160.297		332.517		-	-		492.813		492.813		63,80 %	
				Jumlah kegiatan pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah	58 kegiatan		N/A		58 kegiatan		15 kegiatan		30 kegiatan		-	-	30 kegiatan		30 kegiatan		51,72%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.13.03	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**			1.268.196				785.661		127.196		335.368		-	-		462.563		462.563		58,88 %	
				Jumlah kegiatan pendampingan penerapan SAKIP perangkat daerah	58 kegiatan		N/A		58 kegiatan		13 kegiatan		27 kegiatan		-	-	27 kegiatan		27 kegiatan		46,55%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			56.172.758				17.651.404		2.098.409		6.561.144		-	-		8.659.553		8.659.553		49,06 %	
				Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-	-	6 laporan		6 laporan		50,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			54.169.994				16.277.133		1.848.314		6.137.282	-	-		7.985.596		7.985.596		49,06 %	
				Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%		100%		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			2.002.763				1.374.272		250.095		423.862	-	-		673.957		673.957		49,04 %	
				Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan	89 kali		N/A		89 kali		28 kali		56 kali		-	-	56 kali		56 kali		62,92%		Sekretariat Daerah
119	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			40.046.015		797.445		57.749.432		6.785.380		16.809.728	-	-		23.595.107		23.595.107		40,86 %	
				Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		N/A		14 hari		0 hari		0 hari		-	-	0 hari		0 hari		200,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100%		N/A		90%		100%		100%		-	-	100%		100%		111,11%		Sekretariat Daerah
				Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100%		51,61 %		70,96%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100%		N/A		97,50%		100%		100%		-	-	100%		100%		102,56%		Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100%		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100%		N/A		19,45%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100%		N/A		82%		100%		100%		-		-		100%		100%		121,95%		Sekretariat Daerah
				Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah
				Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		N/A		2 hari		0 hari		0 hari		-		-		0 hari		0 hari		200,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			14.579.943				6.592.494		856.653		2.339.396		-		-		3.196.048		3.196.048		48,48 %	
				Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		N/A		22 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		-		-		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 dokumen		N/A		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		-		-		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		N/A		36 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.01 .03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.403.004				3.142.679		274.269		1.146.894		-		-		1.421.163		1.421.163		45,22 %	
				Jumlah laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Berkas		N/A		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		-		-		2 Berkas		2 Berkas		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.01 .01	Penataan Administrasi Pemerintahan			4.813.183				2.057.377		373.082		727.619		-		-		1.100.701		1.100.701		53,50 %	
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan	185 Peserta		N/A		185 Peserta		185 Peserta		185 Peserta		-		-		185 Peserta		185 Peserta		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.01 .02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4.363.756				1.392.438		209.302		464.883		-		-		674.184		674.184		48,42 %	
				Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		N/A		22 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		-		-		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			4.931.081				30.512.616		3.988.946		10.388.730		-		-		14.377.676		14.377.676		47,12 %	
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.02 .01	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**			3.101.912				28.660.203		3.903.402		10.160.403		-		-		14.063.805		14.063.805		49,07 %	
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.02 .02	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**			1.829.169				1.852.413		85.544		228.327		-		-		313.871		313.871		16,94 %	
				Jumlah dokumen laporan outreach	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen		N/A		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			17.480.417				9.406.080		1.523.314		3.225.089		-		-		4.748.403		4.748.403		50,48 %	
				Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	35 rancangan produk hukum		137%		35 rancangan produk hukum		24 rancangan produk hukum		56 rancangan produk hukum		-		-		56 rancangan produk hukum		56 rancangan produk hukum		160,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum		65%		25 permasalahan hukum		6 permasalahan hukum		12 permasalahan hukum		-		-		12 permasalahan hukum		12 permasalahan hukum		48,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah produk hukum yang dipublikasi	35 produk hukum		137%		35 produk hukum		24 produk hukum		56 produk hukum		-		-		56 produk hukum		56 produk hukum		160,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.03 .02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**			8.163.200				2.747.406		540.853		1.217.736		-		-		1.758.589		1.758.589		64,01 %	
				Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum		65%		25 permasalahan hukum		6 permasalahan hukum		12 permasalahan hukum		-		-		12 permasalahan hukum		12 permasalahan hukum		48,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			7.357.890				5.013.808		686.013		1.367.706	-	-		2.053.719		2.053.719		40,96 %		
				Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	35 rancangan produk hukum		137%		35 rancangan produk hukum		24 rancangan produk hukum		56 rancangan produk hukum		-	-	56 rancangan produk hukum		56 rancangan produk hukum		160,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			1.959.326				1.644.866		296.448		639.647	-	-		936.095		936.095		56,91 %		
				Jumlah produk hukum yang dipublikasi	35 produk hukum		137%		35 produk hukum		24 produk hukum		56 produk hukum		-	-	56 produk hukum		56 produk hukum		160,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			3.054.574				11.238.243		416.467		856.512	-	-		1.272.980		1.272.980		11,33 %		
				Jumlah laporan kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah laporan kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah laporan evaluasi kerjasama yang dilakukan	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		50,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1.103.677				894.377		175.764		371.642	-	-		547.406		547.406		61,21 %		
				Jumlah kerjasama dalam negeri yang dievaluasi	25 Lembaga		N/A		25 Lembaga		7 Lembaga		13 Lembaga		-	-	13 Lembaga		13 Lembaga		52,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang difasilitasi	20 Lembaga		N/A		20 Lembaga		5 Lembaga		9 Lembaga		-	-	9 Lembaga		9 Lembaga		45,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			1.950.897				10.343.866		240.703		484.870	-	-		725.574		725.574		7,01%		
				Jumlah kerja sama luar negeri yang dievaluasi	11 Lembaga		N/A		11 Lembaga		4 Lembaga		7 Lembaga		-	-	7 Lembaga		7 Lembaga		63,64%		Sekretariat Daerah
				Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		N/A		11 Lembaga		3 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		54,55%		Sekretariat Daerah
120	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			34.422.025		7.755.804		33.193.421		3.127.562		6.481.233	-	-		9.608.794		9.608.794		28,95 %		
				Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	100%		N/A		75%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	86%		78,79 %		84%		1,07%		2,70%		-	-	2,70%		2,70%		3,21%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.841.875				19.537.471		496.062		1.418.213	-	-		1.914.276		1.914.276		9,80%	
				Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		N/A		12 laporan		0 laporan		3 laporan		-	-	3 laporan		3 laporan		25,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.01 .01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2.272.753				2.337.648		257.500		717.350	-	-		974.850		974.850		41,70 %	
				Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD		N/A		9 BUMD		0 BUMD		0 BUMD		-	-	0 BUMD		0 BUMD		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.01 .02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1.863.337				6.287.322		197.995		555.215	-	-		753.210		753.210		11,98 %	
				Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		6 laporan		-	-	6 laporan		6 laporan		50,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.01 .03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			705.786				10.912.500		40.567		145.648	-	-		186.216		186.216		1,71%	
				Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			16.052.307				8.429.783		1.632.451		2.911.686	-	-		4.544.137		4.544.137		53,91 %	
				Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	3 Dokumen		N/A		3 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		33,33%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.02 .01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			4.712.321				4.091.159		697.218		1.199.498	-	-		1.896.716		1.896.716		46,36 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 Dokumen		N/A		6 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		16,67%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.02.03	**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**			3.715.446				1.724.388		343.300		627.486	-	-		970.786		970.786		56,30 %		
				Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen		N/A		16 dokumen		4 dokumen		9 dokumen		-	-	9 dokumen		9 dokumen		56,25%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.02.02	**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**			7.624.540				2.614.236		591.933		1.084.702	-	-		1.676.635		1.676.635		64,13 %		
				Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	58 lembaga		N/A		58 lembaga		58 lembaga		58 lembaga		-	-	58 lembaga		58 lembaga		100,00%		Sekretariat Daerah
				Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem		N/A		6 sistem		6 sistem		6 sistem		-	-	6 sistem		6 sistem		100,00%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			13.527.842				5.226.167		999.048		2.151.334	-	-		3.150.382		3.150.382		60,28 %		
				Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
				Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	98%		N/A		90%		100%		100,44%		-	-	100,44%		100,44%		111,60%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.03.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**			11.720.292				537.218		53.900		115.600	-	-		169.500		169.500		31,55 %		
				Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	500 Dokumen		N/A		500 Dokumen		113 Dokumen		226 Dokumen		-	-	226 Dokumen		226 Dokumen		45,20%		Sekretariat Daerah
		4.01.03.2.03.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			1.807.550				4.688.949		945.148		2.035.734	-	-		2.980.882		2.980.882		63,57 %		
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat Daerah
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**																					

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
121	*	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			211.561.797		20.767.773		129.481.924		13.018.461		25.980.572	-	-		38.999.033		38.999.033		30,12 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		N/A		92%		85,55%		86%		-	-	86%		86%		93,48%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.979.496				14.424.824		788.654		803.390		-		1.592.044		1.592.044		11,04 %		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.979.496				14.424.824		788.654		803.390		-		1.592.044		1.592.044		11,04 %		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.164.551				30.791.760		5.749.245		12.918.447		-		18.667.692		18.667.692		60,63 %		
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.164.551				30.791.760		5.749.245		12.918.447		-		18.667.692		18.667.692		60,63 %		
				Jumlah jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran	11 Jenis		100%		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		-	-	11 Jenis		11 Jenis		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.459.328				6.179.161		611.858		1.741.248		-		2.353.106		2.353.106		38,08 %		
				Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari		N/A		1 Hari		0 Hari		1 Hari		-	-	1 Hari		1 Hari		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.459.328				6.179.161		611.858		1.741.248		-		2.353.106		2.353.106		38,08 %		
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			96.495.857				75.087.610		5.754.257		10.114.643	-	-		15.868.899		15.868.899		21,13 %		
				Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari		N/A		1 Hari		1.33 Hari		1 Hari		-	-		1 Hari		1 Hari		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.14 .01	Fasilitasi Keprotokolan			96.495.857				75.087.610		5.754.257		10.114.643	-	-		15.868.899		15.868.899		21,13 %		
				Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang di dilaksanakan	426 Kali		N/A		426 Kali		108 Kali		38 Kali		-	-		38 Kali		38 Kali		8,92%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			59.974.263				46.517.638		9.365.978		9.828.642	-	-		19.194.620		19.194.620		41,26 %		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-		100%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.15 .01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			59.974.263				46.517.638		9.365.978		9.828.642	-	-		19.194.620		19.194.620		41,26 %		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-		100%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			3.488.302				2.998.568		114.447		402.845	-	-		517.292		517.292		17,25 %		
				Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari		N/A		2 Hari		2 Hari		2 Hari		-	-		2 Hari		2 Hari		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.16 .03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3.488.302				2.998.568		114.447		402.845	-	-		517.292		517.292		17,25 %		
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya	36 Kali		N/A		36 Kali		2 Kali		8 Kali		-	-		8 Kali		8 Kali		22,22%		Sekretariat DPRD
122	*	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			50.604.084		21.128.055		45.354.964		5.395.626		20.768.512	-	-		26.164.137		26.164.137		57,69 %		
				Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100,35%		100%		-	-		100%		100%		100,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.204.429				4.300.436		143.531		349.630	-	-		493.161		493.161		11,47 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen		3%		6 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.01.01	**Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**			5.204.429				4.300.436		143.531		349.630	-	-		493.161		493.161		11,47 %	
				Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Disusun	6 Dokumen		3%		6 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**			23.981.751				22.132.404		4.628.845		10.014.041	-	-		14.642.886		14.642.886		66,16 %	
				Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		N/A		50 Orang		25 Orang		60 Orang		-	-	60 Orang		60 Orang		120,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.02	**Pendalaman Tugas DPRD**			1.976.169				1.650.000		123.000		349.000	-	-		472.000		472.000		28,61 %	
				Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan	2 Kali		N/A		2 Kali		4 Kali		7 Kali		-	-	7 Kali		7 Kali		350,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.03	**Publikasi dan Dokumentasi Dewan**			22.005.582				20.482.404		4.505.845		9.665.041	-	-		14.170.886		14.170.886		69,19 %	
				Jumlah Pelaksanaan Publikasi DPRD	4 Media		N/A		4 Media		4 Media		6 Media		-	-	6 Media		6 Media		150,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			16.446.120				14.511.214		15.551		9.202.408	-	-		9.217.959		9.217.959		63,52 %	
				Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen		N/A		3 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05.03	**Pelaksanaan Reses**			16.446.120				14.511.214		15.551		9.202.408	-	-		9.217.959		9.217.959		63,52 %	
				Jumlah Fasilitasi Reses	3 Kali		N/A		3 Kali		1 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**			4.971.784				4.410.910		607.699		1.202.432	-	-		1.810.131		1.810.131		41,04 %	
				Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari		N/A		2 Hari		1 Hari		1 Hari		-	-	1 Hari		1 Hari		50,00%		Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.08.01	**Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**			4.971.784				4.410.910		607.699		1.202.432	-	-		1.810.131		1.810.131		41,04 %	
				Jumlah Rapat–Rapat Alat Kelengkapan Dewan	875 Kali		N/A		875 Kali		229 Kali		110 Kali		-	-	110 Kali		110 Kali		12,57%		Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
		5.01	PERENCANAAN																						
123	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.308.369		242.362		27.722.137		1.144.592		1.896.908	-	-		3.041.500		3.041.500		10,97 %		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %		N/A		95,40%		94,58%		94,33%		-	-	94,33%		94,33%		98,88%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.672				181.738		49.600		84.176	-	-		133.776		133.776		73,61 %		
				Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		N/A		2 jenis		2 jenis		3 jenis		-	-	3 jenis		3 jenis		150,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			210.672				181.738		49.600		84.176	-	-		133.776		133.776		73,61 %		
				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	9 dokumen		N/A		8 dokumen		2 dokumen		3 dokumen		-	-	3 dokumen		3 dokumen		37,50%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.185.574				24.582.712		559.802		585.851	-	-		1.145.653		1.145.653		4,66%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.185.574				24.582.712		559.802		585.851		-		-		1.145.653		1.145.653		4,66%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.912.122				2.957.687		535.190		1.226.881		-		-		1.762.071		1.762.071		59,58 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.386.893				2.628.930		476.658		1.094.703		-		-		1.571.361		1.571.361		59,77 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			525.229				328.757		58.532		132.178		-		-		190.710		190.710		58,01 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
124	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.929.602		1.352.178		3.754.755		506.084		1.668.592		-		-		2.174.676		2.174.676		57,92 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%		100%		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100%		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			1.402.991				1.425.094		223.735		717.325	-	-		941.059		941.059		66,03 %	
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah	3 dokumen		N/A		2 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.02.2.01 .07	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**			1.402.991				1.425.094		223.735		717.325	-	-		941.059		941.059		66,03 %	
				Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen		N/A		6 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		-	-	4 dokumen		4 dokumen		66,67%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.519.411				1.426.211		158.984		522.465	-	-		681.450		681.450		47,78 %		
				Jumlah data urusan yang dikelola	33 data urusan		17%		33 data urusan		38 data urusan		38 data urusan		-	-	38 data urusan		38 data urusan		115,15%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.02.2.02 .01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.519.411				1.426.211		158.984		522.465	-	-		681.450		681.450		47,78 %		
				Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD		17%		58 PD		58 PD		58 PD		-	-	58 PD		58 PD		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.007.199				903.450		123.365		428.802	-	-		552.167		552.167		61,12 %		
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen		N/A		5 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		20,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.02.2.03 .03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.007.199				903.450		123.365		428.802	-	-		552.167		552.167		61,12 %		
				Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD		N/A		58 PD		58 PD		58 PD		-	-	58 PD		58 PD		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
125	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			10.791.670		534.805		6.515.407		931.329		2.406.237	-	-		3.337.566		3.337.566		51,23 %		
				Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,63 %		N/A		98,23%		95,07%		95,27%		-	-	95,27%		95,27%		96,99%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3.064.620				1.700.800		262.498		716.411	-	-		978.910		978.910		57,56 %		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dokumen		N/A		4 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		-	-	2 dokumen		2 dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.742.848				1.037.879		144.543		426.666	-	-		571.210		571.210		55,04 %		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen		N/A		2 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1.321.772				662.921		117.955		289.745	-	-		407.700		407.700		61,50 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dokumen		N/A		2 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		-	-	1 dokumen		1 dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			3.728.973				2.132.473		294.839		773.750	-	-		1.068.589		1.068.589		50,11 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.03.2.02 .04	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**			2.300.253				1.113.410		151.959		371.262	-	-		523.221		523.221		46,99 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.03.2.02 .08	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**			1.428.720				1.019.063		142.879		402.488	-	-		545.367		545.367		53,52 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3.998.078				2.682.135		373.992		916.076	-	-		1.290.068		1.290.068		48,10 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.03.2.03 .04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			2.288.163				1.417.122		185.592		458.855	-	-		644.448		644.448		45,48 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.01.03.2.03 .08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1.709.914				1.265.013		188.399		457.221	-	-		645.620		645.620		51,04 %	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.02	KEUANGAN																				
126	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			158.554.798		102.599		163.574.238		6.193.330		11.085.746	-	-		17.279.075		17.279.075		10,56 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		N/A		90%		88,07%		89%		-		-		89%		89%		98,89%		Badan Pendapatan Daerah
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		N/A		90%		90,44%		90%		-		-		90%		90%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			138.590.122				143.025.299		2.631.973		2.637.264	-		-			5.269.237		5.269.237		3,68%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			138.590.122				143.025.299		2.631.973		2.637.264	-		-			5.269.237		5.269.237		3,68%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			302.277				241.272		46.596		110.789	-		-			157.385		157.385		65,23 %	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			302.277				241.272		46.596		110.789	-		-			157.385		157.385		65,23 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			2.257.261				674.556		38.335		91.614		-		-		129.949		129.949		19,26 %	
				jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	98%		N/A		90%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.07 .10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			2.257.261				674.556		38.335		91.614		-		-		129.949		129.949		19,26 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			8.380.438				12.395.301		2.475.127		5.422.993		-		-		7.898.120		7.898.120		63,72 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08 .04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			8.083.598				9.544.837		1.907.119		4.219.053		-		-		6.126.172		6.126.172		64,18 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			296.840				2.850.464		568.008		1.203.939	-	-		1.771.947		1.771.947		62,16 %	
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			9.024.700				7.237.810		1.001.299		2.823.086	-	-		3.824.385		3.824.385		52,84 %	
				Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			9.024.700				7.237.810		1.001.299		2.823.086	-	-		3.824.385		3.824.385		52,84 %	
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2.240 Unit		N/A		2800 Unit		448 Unit		1781 Unit		-	-			1781 Unit		1781 Unit		63,61%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
127	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			23.003.236		1.229.069		6.141.547		937.131		2.513.651	-	-		3.450.783		3.450.783		56,19 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-			100%		100%		100,00%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%		100%		100%		100%		100%		-	-			100%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			2.377.973				2.883.789		332.938		1.116.540	-	-		1.449.477		1.449.477		50,26 %	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen		N/A		7 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-			0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01 .01	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**			570.265				600.807		27.900		55.800	-	-		83.700		83.700		13,93 %	
				Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-			0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01 .07	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**			595.726				807.387		130.556		264.550	-	-		395.106		395.106		48,94 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-	-	0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01 .08	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**			637.253				751.225		112.582		311.791	-	-		424.373		424.373		56,49 %	
				Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Laporan		N/A		2 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-	-	0 Laporan		0 Laporan		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01 .02	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**			574.729				724.370		61.900		484.398	-	-		546.298		546.298		75,42 %	
				Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			3.181.881				2.175.621		403.525		943.219	-	-		1.346.745		1.346.745		61,90 %	
				Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen		N/A		4 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		-	-	2 dokumen		2 dokumen		50,00%		Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.	96.339 berkas		N/A		76318 berkas		16086 berkas		43919 berkas		-	-	43919 berkas		43919 berkas		57,55%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.01	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**			625.752				494.685		98.975		226.850	-	-		325.825		325.825		65,87 %	
				Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen		N/A		244 Dokumen		61 Dokumen		117 Dokumen		-	-	117 Dokumen		117 Dokumen		47,95%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.05	**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**			376.596				338.408		75.060		164.767	-	-		239.827		239.827		70,87 %	
				Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		-	-	2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.02.2.02.09	**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait**			2.179.533				1.342.528		229.490		551.602		-		781.092		781.092		58,18 %	
				Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.	96.339 Berkas		N/A		76318 Berkas		16086 Berkas		43919 Berkas		-	-	43919 Berkas		43919 Berkas		57,55%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.193.382				1.082.136		200.668		453.893	-	-		654.561		654.561		60,49 %		
				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen		22%		22 Dokumen		7 Dokumen		18 Dokumen		-	-	18 Dokumen		18 Dokumen		81,82%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03 .08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1.193.382				1.082.136		200.668		453.893	-	-		654.561		654.561		60,49 %		
				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen		22%		22 Dokumen		7 Dokumen		18 Dokumen		-	-	18 Dokumen		18 Dokumen		81,82%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			16.250.000				38.250.000		0		0	-	-		0		0		0,00%		
				Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		38,75 %		25%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%		100%		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04 .08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			500.000				500.000		0		0	-	-		0		0		0,00%		
				Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04 .10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			750.000				750.000		0		0	-	-		0		0		0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%		100%		100%		0%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04.09	**Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**			15.000.000				37.000.000		0		0		-	-			0		0		0,00%	
				Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		38,75 %		25%		0%		0%		-	-			0%		0%		0,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
128	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			50.448.426		4.178.193		37.538.875		6.286.829		14.442.451		-	-			20.729.280		20.729.280		55,22 %	
				Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %		N/A		26,70%		4,78%		9,94%		-	-			9,94%		9,94%		37,23%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**			50.448.426				37.538.875		6.286.829		14.442.451		-	-			20.729.280		20.729.280		55,22 %	
				Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-			100%		100%		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	19 Dokumen		N/A		30 Dokumen		7 Dokumen		16 Dokumen		-	-			16 Dokumen		16 Dokumen		53,33%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.10	**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**			10.102.386				18.935.656		3.759.354		8.740.837		-	-			12.500.191		12.500.191		66,01 %	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan	7.679 lokasi		N/A		7679 lokasi		1323 lokasi		3153 lokasi		-	-			3153 lokasi		3153 lokasi		41,06%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.02.03.2.01.13	**Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**			3.138.336				4.665.881		557.557		1.375.781	-	-		1.933.338		1.933.338		41,44 %		
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring pencatatan Barang Milik Daerah	58 Lembaga		N/A		58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		-	-		58 Lembaga		58 Lembaga		100,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.07	**Pengamanan Barang Milik Daerah**			9.289.359				11.610.541		1.580.079		3.390.184	-	-		4.970.263		4.970.263		42,81 %		
				Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diamankan	100 bidang		N/A		100 bidang		25 bidang		52 bidang		-	-		52 bidang		52 bidang		52,00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Jumlah tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	200 dokumen		N/A		700 dokumen		125 dokumen		295 dokumen		-	-		295 dokumen		295 dokumen		42,14%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.09	**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**			27.918.345				2.326.797		389.839		935.649	-	-		1.325.488		1.325.488		56,97 %		
				Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	19 Kasus/Obyek		N/A		30 Kasus/Obyek		7 Kasus/Obyek		16 Kasus/Obyek		-	-		16 Kasus/Obyek		16 Kasus/Obyek		53,33%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
129	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			37.665.666		113.600		13.874.986		3.363.384		7.034.497	-	-		10.397.881		10.397.881		74,94 %		
				Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%		61,94 %		55%		178,38%		83,57%		-	-		83,57%		83,57%		151,95%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85%		N/A		80%		82,42%		62,54%		-	-		62,54%		62,54%		78,18%		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%		N/A		65%		39,16%		38,16%		-	-		38,16%		38,16%		58,71%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			37.665.666				13.874.986		3.363.384		7.034.497	-	-		10.397.881		10.397.881		74,94 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Objek Pajak Penagihan Pajak Daerah	280.250 Objek Pajak		N/A		297650 Objek Pajak		123276 Objek Pajak		404412 Objek Pajak		-		-		404412 Objek Pajak		404412 Objek Pajak		135,87%		Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	23.360 Objek Pajak		N/A		22537 Objek Pajak		28711 Objek Pajak		56792 Objek Pajak		-		-		56792 Objek Pajak		56792 Objek Pajak		251,99%		Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	227.926 Objek Pajak		N/A		219036 Objek Pajak		57956 Objek Pajak		135648 Objek Pajak		-		-		135648 Objek Pajak		135648 Objek Pajak		61,93%		Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	855.641 Objek Pajak		N/A		823518 Objek Pajak		806301 Objek Pajak		814750 Objek Pajak		-		-		814750 Objek Pajak		814750 Objek Pajak		98,94%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.14	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			697.318				266.095		54.649		138.393		-		-		193.043		193.043		72,55 %		
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 bulan		N/A		12 bulan		3 bulan		6 bulan		-		-		6 bulan		6 bulan		50,00%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.11	**Penagihan Pajak Daerah**			4.872.361				1.199.670		282.346		613.704		-		-		896.050		896.050		74,69 %		
				Jumlah Objek Pajak Penagihan PBB dan BPHTB	280.250 Objek Pajak		N/A		297650 Objek Pajak		123276 Objek Pajak		404412 Objek Pajak		-		-		404412 Objek Pajak		404412 Objek Pajak		135,87%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.05	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**			17.564.766				4.147.888		1.048.103		2.166.927		-		-		3.215.030		3.215.030		77,51 %		
				Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerahh Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	227.926 Objek Pajak		N/A		219036 Objek Pajak		57956 Objek Pajak		135648 Objek Pajak		-		-		135648 Objek Pajak		135648 Objek Pajak		61,93%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.13	**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**			1.397.431				1.781.630		407.851		889.678		-		-		1.297.529		1.297.529		72,83 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani	23.360 Objek Pajak		N/A		22537 Objek Pajak		28711 Objek Pajak		56792 Objek Pajak		-	-	56792 Objek Pajak		56792 Objek Pajak		251,99%		Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.07	**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**			13.133.790				6.479.703		1.570.435		3.225.795	-	-		4.796.230		4.796.230		74,02 %	
				Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	855.641 Objek Pajak		N/A		823518 Objek Pajak		806301 Objek Pajak		814750 Objek Pajak		-	-	814750 Objek Pajak		814750 Objek Pajak		98,94%		Badan Pendapatan Daerah
		5.03	**KEPEGAWAIAN**																				
130	*	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			19.003.190		13.528.081		15.395.499		658.091		799.569	-	-		1.457.660		1.457.660		9,47%	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		N/A		89%		91,31%		91%		-	-	91%		91%		102,25%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			16.673.062				14.888.040		567.418		573.696	-	-		1.141.114		1.141.114		7,66%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.673.062				14.888.040		567.418		573.696	-	-		1.141.114		1.141.114		7,66%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.624.599				1.065.636		214.064		548.111	-	-		762.175		762.175		71,52 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.624.599				1.065.636		214.064		548.111	-	-		762.175		762.175		71,52 %	
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			705.530				507.459		90.673		225.873	-	-		316.546		316.546		62,38 %	
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			705.530				507.459		90.673		225.873	-	-		316.546		316.546		62,38 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
131	*	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			7.304.388		35.370.043		6.474.828		942.882		1.779.315	-	-		2.722.197		2.722.197		42,04 %	
				Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	95%		N/A		91%		48,13%		100%		-	-	100%		100%		109,89%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase pegawai yang disiplin	96,99%		N/A		96,21%		96,54%		96,66%		-	-	96,66%		96,66%		100,47%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	37,94%		N/A		29,64%		19,04%		18,70%		-	-	18,70%		18,70%		63,09%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			2.823.680				2.355.388		196.769		381.152	-	-		577.921		577.921		24,54 %	
				Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	94%		N/A		90%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			2.014.416				1.662.557		54.182		118.088	-	-		172.270		172.270		10,36 %	
				Jumlah tahapan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Tahap Seleksi		N/A		4 Tahap Seleksi		0 Tahap Seleksi		0 Tahap Seleksi		-	-	0 Tahap Seleksi		0 Tahap Seleksi		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			483.991				403.272		71.123		153.301	-	-		224.424		224.424		55,65 %	
				Jumlah data pegawai yang dikelola	8537 Data pegawai		N/A		8537 Data pegawai		1594 Data pegawai		4034 Data pegawai		-	-	4034 Data pegawai		4034 Data pegawai		47,25%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			325.274				289.559		71.463		109.763	-	-		181.227		181.227		62,59 %	
				Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan yang dikirim tepat waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	1 Dokumen		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.935.060				1.683.090		400.641		706.808	-	-		1.107.449		1.107.449		65,80 %	
				Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas		N/A		8555 berkas		1594 berkas		4034 berkas		-	-	4034 berkas		4034 berkas		47,15%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			695.225				594.228		114.357		225.433	-	-		339.791		339.791		57,18 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8437 berkas		N/A		8437 berkas		1536 berkas		3957 berkas		-	-	3957 berkas		3957 berkas		46,90%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02.01	**Pengelolaan Mutasi ASN**			649.787				587.214		106.684		234.175	-	-		340.859		340.859		58,05 %	
				Jumlah berkas mutasi ASN	100 berkas		N/A		100 berkas		58 berkas		77 berkas		-	-	77 berkas		77 berkas		77,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02.03	**Pengelolaan Promosi ASN**			590.048				501.648		179.600		247.200	-	-		426.800		426.800		85,08 %	
				Jumlah berkas promosi dan rotasi jabatan ASN	18 berkas		N/A		18 berkas		0 berkas		0 berkas		-	-	0 berkas		0 berkas		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			2.545.648				2.436.350		345.472		691.355	-	-		1.036.827		1.036.827		42,56 %	
				Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis		N/A		2 jenis		0 jenis		3 jenis		-	-	3 jenis		3 jenis		150,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		N/A		5 jenis		3 jenis		4 jenis		-	-	4 jenis		4 jenis		80,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		N/A		1 jenis		278 jenis		0 jenis		-	-	0 jenis		0 jenis		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			933.164				904.664		38.300		79.800	-	-		118.100		118.100		13,05 %	
				Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai	5 kali		N/A		5 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			684.603				630.976		118.323		231.289	-	-		349.612		349.612		55,41 %	
				Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	5199 orang		N/A		6398 orang		2225 orang		7227 orang		-	-	7227 orang		7227 orang		112,96%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			927.881				900.710		188.849		380.266	-	-		569.115		569.115		63,19 %	
				Jumlah jenis intervensi pengelolaan disiplin pegawai yang diberikan	5 jenis		N/A		5 jenis		3 jenis		5 jenis		-	-	5 jenis		5 jenis		100,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
132	*	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.535.107		2.759.803		6.729.463		702.905		3.003.344	-	-		3.706.249		3.706.249		55,07 %	
				Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96%		N/A		94%		100%		85,65%		-	-	85,65%		85,65%		91,12%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			2.027.793				1.765.364		124.096		836.629	-	-		960.724		960.724		54,42 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		N/A		1770 orang		568 orang		1777 orang		-	-	1777 orang		1777 orang		100,40%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.01.03	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**			2.027.793				1.765.364		124.096		836.629	-	-		960.724		960.724		54,42 %		
				Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		N/A		1770 orang		568 orang		1777 orang		-	-	1777 orang		1777 orang		100,40%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			7.507.314				4.964.100		578.809		2.166.715	-	-		2.745.524		2.745.524		55,31 %		
				Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		N/A		630 orang		100 orang		512 orang		-	-	512 orang		512 orang		81,27%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.02.07	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**			7.507.314				4.964.100		578.809		2.166.715	-	-		2.745.524		2.745.524		55,31 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		N/A		630 orang		100 orang		512 orang		-		-		512 orang		512 orang		81,27%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																					
133	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			689.355		87.600		952.703		208.847		442.729		-		-		651.576		651.576		68,39 %	
				Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		0%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			689.355				952.703		208.847		442.729		-		-		651.576		651.576		68,39 %	
				Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun	4 Dokumen		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.05.02.2.04 .03	**Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif**			292.621				444.333		85.500		204.580		-		-		290.080		290.080		65,28 %	
				Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5.05.02.2.04 .01	**Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**			396.735				508.369		123.347		238.149		-		-		361.496		361.496		71,11 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah dokumen penelitian yang disusun	2 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH																				
134	*	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.555.889		71.020		25.428.326		963.133		1.331.060	-	-		2.294.193		2.294.193		9,02%	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		N/A		100%		89,06%		89%		-	-	89%		89%		89,00%		Inspektorat
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.567.135				24.170.324		707.054		736.982	-	-		1.444.036		1.444.036		5,97%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Inspektorat
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.567.135				24.170.324		707.054		736.982	-	-		1.444.036		1.444.036		5,97%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Inspektorat
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			802.437				243.296		54.686		110.796	-	-		165.482		165.482		68,02 %	
				Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Inspektorat
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			802.437				243.296		54.686		110.796	-	-		165.482		165.482		68,02 %	
				Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Inspektorat
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.186.316				1.014.706		201.394		483.282	-	-		684.676		684.676		67,48 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Inspektorat
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.186.316				1.014.706		201.394		483.282		-		-		684.676		684.676		67,48 %	
				Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Inspektorat
135	*	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.764.043		75.860		1.781.634		432.340		726.760		-		-		1.159.100		1.159.100		65,06 %	
				Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Inspektorat
				Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Inspektorat
				Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Inspektorat
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.115.113				1.526.290		365.940		604.440		-		-		970.380		970.380		63,58 %	
				Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	69 lembaga		N/A		69 lembaga		18 lembaga		35 lembaga		-		-		35 lembaga		35 lembaga		50,72%		Inspektorat
				Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	12 Rekomendasi		N/A		12 Rekomendasi		7 Rekomendasi		14 Rekomendasi		-		-		14 Rekomendasi		14 Rekomendasi		116,67%		Inspektorat
				Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	12 Dokumen		N/A		12 Dokumen		6 Dokumen		7 Dokumen		-		-		7 Dokumen		7 Dokumen		58,33%		Inspektorat
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.440.287				1.129.020		276.700		426.100		-		-		702.800		702.800		62,25 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lembaga atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang dimonitoring	60 Lembaga		N/A		60 Lembaga		5 Lembaga		39 Lembaga		-	-	39 Lembaga		39 Lembaga		65,00%		Inspektorat
		6.01.02.2.01.02	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**			598.536				141.530		33.440		61.340	-	-		94.780		94.780		66,97 %	
				Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan keuangan	69 Kali		N/A		69 Kali		19 Kali		37 Kali		-	-	37 Kali		37 Kali		53,62%		Inspektorat
		6.01.02.2.01.04	**Reviu Laporan Keuangan**			36.351				126.240		27.900		61.200	-	-		89.100		89.100		70,58 %	
				Jumlah frekuensi reviu laporan keuangan	5 Kali		N/A		5 Kali		6 Kali		7 Kali		-	-	7 Kali		7 Kali		140,00%		Inspektorat
		6.01.02.2.01.03	**Reviu Laporan Kinerja**			39.940				129.500		27.900		55.800	-	-		83.700		83.700		64,63 %	
				Jumlah frekuensi reviu laporan kinerja	10 Kali		N/A		10 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Inspektorat
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			648.930				255.344		66.400		122.320	-	-		188.720		188.720		73,91 %	
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga		N/A		20 lembaga		5 lembaga		12 lembaga		-	-	12 lembaga		12 lembaga		60,00%		Inspektorat
		6.01.02.2.02.01	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**			35.956				126.064		30.500		58.520	-	-		89.020		89.020		70,61 %	
				Jumlah laporan penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Kali		N/A		4 Kali		1 Kali		1 Kali		-	-	1 Kali		1 Kali		25,00%		Inspektorat
		6.01.02.2.02.02	**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**			612.973				129.280		35.900		63.800	-	-		99.700		99.700		77,12 %	
				Jumlah frekuensi pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 kali		N/A		20 kali		5 kali		12 kali		-	-	12 kali		12 kali		60,00%		Inspektorat
136	*	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			1.127.801		83.600		869.518		198.480		427.500	-	-		625.980		625.980		71,99 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%		N/A		100%		8,62%		60,34%		-	-	60,34%		60,34%		60,34%		Inspektorat
				Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		N/A		100%		12,07%		72,41%		-	-	72,41%		72,41%		72,41%		Inspektorat
				Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Inspektorat
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			522.100				337.044		75.300		180.980	-	-		256.280		256.280		76,04 %	
				Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen		N/A		4 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		-	-	3 dokumen		3 dokumen		75,00%		Inspektorat
		6.01.03.2.01 .02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			78.860				129.522		27.900		56.080	-	-		83.980		83.980		64,84 %	
				Jumlah frekuensi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4 kali		N/A		4 kali		1 kali		2 kali		-	-	2 kali		2 kali		50,00%		Inspektorat
		6.01.03.2.01 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			443.240				207.522		47.400		124.900	-	-		172.300		172.300		83,03 %	
				Jumlah frekuensi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	4 kali		N/A		4 kali		1 kali		2 kali		-	-	2 kali		2 kali		50,00%		Inspektorat
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			605.701				532.474		123.180		246.520	-	-		369.700		369.700		69,43 %	
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Lembaga		N/A		60 Lembaga		7 Lembaga		42 Lembaga		-	-	42 Lembaga		42 Lembaga		70,00%		Inspektorat

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	60 Lembaga		N/A		60 Lembaga		21 Lembaga		62 Lembaga		-	-	62 Lembaga		62 Lembaga		103,33%		Inspektorat
		6.01.03.2.02.03	**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**			56.261				124.938		28.300		59.200	-	-		87.500		87.500		70,03 %	
				Jumlah frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48 Kali		N/A		48 Kali		11 Kali		24 Kali		-	-	24 Kali		24 Kali		50,00%		Inspektorat
		6.01.03.2.02.04	**Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**			36.045				124.918		27.900		55.960		-		83.860		83.860		67,13 %	
				Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		10 Kali		-	-	10 Kali		10 Kali		83,33%		Inspektorat
		6.01.03.2.02.02	**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**			70.353				124.080		30.680		58.760		-		89.440		89.440		72,08 %	
				Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Kali		N/A		20 Kali		2 Kali		13 Kali		-	-	13 Kali		13 Kali		65,00%		Inspektorat
		6.01.03.2.02.01	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**			443.042				158.538		36.300		72.600		-		108.900		108.900		68,69 %	
				Jumlah frekuensi pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	60 Kali		N/A		60 Kali		7 Kali		42 Kali		-	-	42 Kali		42 Kali		70,00%		Inspektorat
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																				
		7.01	**KECAMATAN**																				

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
137	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			627.261.662		92.072		774.795.359		62.144.594		106.163.463	-	-		168.308.057		168.308.057		21,72 %	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100,60%		N/A		98,98%		92,76%		92,33%		-	-	92,33%		92,33%		93,28%		Kec. Asemrowo
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09%		N/A		97,72%		91,90%		91,67%		-	-	91,67%		91,67%		93,81%		Kec. Benowo
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,19%		N/A		95,94%		91,27%		90%		-	-	90%		90%		93,81%		Kec. Bubutan
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,82%		N/A		97,98%		92,27%		92%		-	-	92%		92%		93,90%		Kec. Bulak
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,29%		N/A		96,31%		90,58%		90%		-	-	90%		90%		93,45%		Kec. Dukuh Pakis
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,65%		N/A		97,98%		91,58%		91,33%		-	-	91,33%		91,33%		93,21%		Kec. Gayungan
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,70%		N/A		97,30%		91,27%		91%		-	-	91%		91%		93,53%		Kec. Genteng
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,08%		N/A		96,85%		92,82%		92%		-	-	92%		92%		94,99%		Kec. Gubeng
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09%		N/A		97,96%		93,31%		92%		-	-	92%		92%		93,92%		Kec. Gunung Anyar
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,58%		N/A		98,21%		93,19%		93,67%		-	-	93,67%		93,67%		95,38%		Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,81%		N/A		96,76%		92,01%		92%		-	-	92%		92%		95,08%		Kec. Karangpilang
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,76%		N/A		98,69%		96,24%		96%		-	-	96%		96%		97,27%		Kec. Kenjeran
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44%		N/A		97,25%		93,83%		93%		-	-	93%		93%		95,63%		Kec. Krembangan
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26%		N/A		97,23%		91,52%		91,33%		-	-	91,33%		91,33%		93,93%		Kec. Lakarsantri
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,99%		N/A		96,94%		90,59%		90,67%		-	-	90,67%		90,67%		93,53%		Kec. Mulyorejo
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,05 %		N/A		97,55%		91,76%		91,33%		-	-	91,33%		91,33%		93,62%		Kec. Pabean Cantian
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,48 %		N/A		97,31%		91,29%		91%		-	-	91%		91%		93,52%		Kec. Pakal
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,45 %		N/A		96,66%		89,14%		88,33%		-	-	88,33%		88,33%		91,38%		Kec. Rungkut
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,10 %		N/A		98,79%		95,25%		95%		-	-	95%		95%		96,16%		Kec. Sambikerep
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,93 %		N/A		96,48%		91,86%		90,67%		-	-	90,67%		90,67%		93,98%		Kec. Sawahan
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,92 %		N/A		94,92%		88,98%		92%		-	-	92%		92%		96,92%		Kec. Semampir
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,56 %		N/A		97,43%		95,36%		95%		-	-	95%		95%		97,51%		Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %		N/A		96,95%		91,71%		92%		-	-	92%		92%		94,89%		Kec. Sukolilo
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,92 %		N/A		97,84%		93,58%		93,67%		-	-	93,67%		93,67%		95,74%		Kec. Sukomanunggal
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,15 %		N/A		97,20%		92,60%		92,67%		-	-	92,67%		92,67%		95,34%		Kec. Tambaksari
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36 %		N/A		96,39%		91,31%		91,33%		-	-	91,33%		91,33%		94,75%		Kec. Tandes
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,35 %		N/A		97,95%		91,86%		91%		-	-	91%		91%		92,90%		Kec. Tegalsari
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,04 %		N/A		95,93%		90,36%		152,22%		-	-	152,22%		152,22%		158,68%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,46 %		N/A		98,37%		93,04%		93%		-	-	93%		93%		94,54%		Kec. Wiyung
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,43 %		N/A		97,18%		91,33%		91,33%		-	-	91,33%		91,33%		93,98%		Kec. Wonocolo
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,36 %		N/A		97,84%		93,68%		93%		-	-	93%		93%		95,05%		Kec. Wonokromo
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			546.130.426				591.574.020		30.977.913		30.492.501	-	-		61.470.414		61.470.414		10,39 %	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Benowo
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Bulak
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gayungan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Genteng
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gubeng
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Jambangan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Krembangan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Pakal
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Rungkut
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sawahan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Semampir
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Simokerto
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tandes
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wiyung
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			546.130.426				591.574.020		30.977.913		30.492.501	-	-		61.470.414		61.470.414		10,39 %	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Benowo
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Bulak
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gayungan
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Genteng
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gubeng
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Jambangan
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Krembangan
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Pakal
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Rungkut
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sawahan
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Semampir
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Simokerto
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tandes
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wiyung
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			76.007.353				178.279.977		30.458.305		74.161.095	-	-		104.619.400		104.619.400		58,68 %	
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bubutan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bulak
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gayungan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Genteng
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gubeng
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Jambangan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Krembangan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pakal
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Rungkut
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sawahan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Semampir
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		86,82%		-		-		86,82%		86,82%		86,82%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tandes
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wiyung
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			76.007.353				178.279.977		30.458.305		74.161.095		-		-		104.619.400		104.619.400		58,68%	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Benowo
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bubutan
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bulak
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gayungan
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Genteng
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gubeng
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Jambangan
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Krembangan
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pakal
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Rungkut
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sawahan
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Semampir
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Simokerto
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		86,82%		-		-		86,82%		86,82%		86,82%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tandes
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wiyung
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			5.123.883				4.941.362		708.375		1.509.868		-		-		2.218.243		2.218.243		44,89 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Benowo
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bubutan
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bulak
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gayungan
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Genteng
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gubeng
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Krembangan
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pakal
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Rungkut
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Semampir
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Simokerto
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Tandes
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Wiyung
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			5.123.883				4.941.362		708.375		1.509.868		-		-		2.218.243		2.218.243		44,89 %	
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Benowo
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bubutan
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bulak
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gayungan
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Genteng
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gubeng
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Krembangan
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pakal
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Rungkut
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sawahan
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Semampir
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tandes
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wiyung
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonokromo
138	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			1.265.386		4.653.969		704.233		48.226		197.941		-		-		246.168		246.168		34,96 %	
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Benowo
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Bubutan
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Bulak
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gayungan
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Genteng
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gubeng
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		75%		-		-		75%		75%		75,00%		Kec. Jambangan
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		0%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Krembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Pakal
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Rungkut
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sawahan
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Semampir
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Simokerto
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		0%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		90%		-	-	90%		90%		90,00%		Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		88,24%		-		-		88,24%		88,24%		88,24%		Kec. Tandes
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		0%		92,31%		-		-		92,31%		92,31%		92,31%		Kec. Tegalsari
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Wiyung
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**1.265.386**				**704.233**		**48.226**		**197.941**		-		-		**246.168**		**246.168**		**34,96 %**	
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		N/A		20 Kasus		3 Kasus		11 Kasus		-		-		11 Kasus		11 Kasus		55,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		N/A		24 Kasus		1 Kasus		4 Kasus		-	-	4 Kasus		4 Kasus		16,67%		Kec. Benowo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		2 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	19 Kasus		N/A		39 Kasus		5 Kasus		14 Kasus		-	-	14 Kasus		14 Kasus		35,90%		Kec. Bubutan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		N/A		12 Kasus		4 Kasus		8 Kasus		-	-	8 Kasus		8 Kasus		66,67%		Kec. Bulak
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Bulak
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-	-	0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	72 Kasus		N/A		72 Kasus		14 Kasus		31 Kasus		-	-	31 Kasus		31 Kasus		43,06%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus		N/A		45 Kasus		3 Kasus		5 Kasus		-	-	5 Kasus		5 Kasus		11,11%		Kec. Gayungan
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik		N/A		2 topik		1 topik		1 topik		-	-	1 topik		1 topik		50,00%		Kec. Gayungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus		N/A		9 Kasus		3 Kasus		5 Kasus		-		-		5 Kasus		5 Kasus		55,56%		Kec. Genteng
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		N/A		24 Kasus		2 Kasus		8 Kasus		-		-		8 Kasus		8 Kasus		33,33%		Kec. Gubeng
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		N/A		24 kasus		3 kasus		10 kasus		-		-		10 kasus		10 kasus		41,67%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	28 Kasus		N/A		40 Kasus		3 Kasus		18 Kasus		-		-		18 Kasus		18 Kasus		45,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Karangpilang

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus		N/A		73 Kasus		18 Kasus		36 Kasus		-	-	36 Kasus		36 Kasus		49,32%		Kec. Karangpilang
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		2 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		N/A		24 Kasus		5 Kasus		18 Kasus		-	-	18 Kasus		18 Kasus		75,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		N/A		24 Kasus		0 Kasus		3 Kasus		-	-	3 Kasus		3 Kasus		12,50%		Kec. Krembangan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus		N/A		44 Kasus		5 Kasus		18 Kasus		-	-	18 Kasus		18 Kasus		40,91%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-	-	0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus		N/A		24 Kasus		0 Kasus		4 Kasus		-	-	4 Kasus		4 Kasus		16,67%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		1 Topik		-	-	1 Topik		1 Topik		50,00%		Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		N/A		20 Kasus		4 Kasus		14 Kasus		-		-		14 Kasus		14 Kasus		70,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		1 Topik		-		-		1 Topik		1 Topik		50,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		2 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Pakal
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		N/A		24 Kasus		4 Kasus		9 Kasus		-		-		9 Kasus		9 Kasus		37,50%		Kec. Pakal
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		N/A		150 Kasus		1 Kasus		7 Kasus		-		-		7 Kasus		7 Kasus		4,67%		Kec. Rungkut
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus		N/A		37 Kasus		9 Kasus		18 Kasus		-		-		18 Kasus		18 Kasus		48,65%		Kec. Sambikerep
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		1 Topik		-		-		1 Topik		1 Topik		50,00%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus		N/A		144 Kasus		13 Kasus		29 Kasus		-	-	29 Kasus		29 Kasus		20,14%		Kec. Sawahan
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-	-	0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus		N/A		210 Kasus		4 Kasus		9 Kasus		-	-	9 Kasus		9 Kasus		4,29%		Kec. Semampir
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus		N/A		7 Kasus		1 Kasus		2 Kasus		-	-	2 Kasus		2 Kasus		28,57%		Kec. Simokerto
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus		N/A		2 Kasus		0 Kasus		3 Kasus		-	-	3 Kasus		3 Kasus		150,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus		N/A		24 kasus		2 kasus		7 kasus		-	-	7 kasus		7 kasus		29,17%		Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 kasus		N/A		36 kasus		4 kasus		9 kasus		-		-		9 kasus		9 kasus		25,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		N/A		20 Kasus		3 Kasus		15 Kasus		-		-		15 Kasus		15 Kasus		75,00%		Kec. Tandes
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus		N/A		62 Kasus		0 Kasus		12 Kasus		-		-		12 Kasus		12 Kasus		19,35%		Kec. Tegalsari
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		N/A		24 kasus		3 kasus		12 kasus		-		-		12 kasus		12 kasus		50,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Wiyung

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		N/A		24 kasus		6 kasus		12 kasus		-	-	12 kasus		12 kasus		50,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus		N/A		88 Kasus		3 Kasus		14 Kasus		-	-	14 Kasus		14 Kasus		15,91%		Kec. Wonocolo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-	-	0 Topik		0 Topik		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		N/A		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	116 Kasus		N/A		116 Kasus		3 Kasus		32 Kasus		-	-	32 Kasus		32 Kasus		27,59%		Kec. Wonokromo
		7.01.05.2.01.02	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			531.842				294.258		16.570		83.610		-		100.180		100.180		34,04 %	
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		2 Kali		2 Kali		-	-	2 Kali		2 Kali		50,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	2 kali		N/A		2 kali		0 kali		1 kali		-	-	1 kali		1 kali		50,00%		Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali		N/A		5 Kali		0 Kali		0 Kali		-		-		0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	10 Kali		N/A		10 Kali		2 Kali		1 Kali		-		-		1 Kali		1 Kali		10,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		2 Kali		-		-		2 Kali		2 Kali		50,00%		Kec. Genteng
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-		-		0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		0 kali		-		-		0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-		-		0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-		-		0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		1 kali		2 kali		-		-		2 kali		2 kali		50,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		1 kali		-		-		1 kali		1 kali		25,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		0 kali		-		-		0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		2 kali		-		-		2 kali		2 kali		50,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		1 Kali		1 Kali		-		-		1 Kali		1 Kali		25,00%		Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		1 Kali		2 Kali		-	-	2 Kali		2 Kali		50,00%		Kec. Pakal
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		2 kali		-	-	2 kali		2 kali		50,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali		N/A		5 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		4 kali		-	-	4 kali		4 kali		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		2 Kali		-	-	2 Kali		2 Kali		50,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		1 kali		-	-	1 kali		1 kali		25,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		1 kali		-	-	1 kali		1 kali		25,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	20 Kali		N/A		20 Kali		0 Kali		1 Kali		-	-	1 Kali		1 Kali		5,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali		N/A		4 kali		0 kali		0 kali		-		-		0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali		N/A		4 Kali		0 Kali		0 Kali		-		-		0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali		N/A		5 Kali		0 Kali		2 Kali		-		-		2 Kali		2 Kali		40,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.05.2.01.05	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			733.544				409.974		31.656		114.331		-		-		145.988		145.988		35,61 %	
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 Kasus		N/A		6 Kasus		3 Kasus		11 Kasus		-		-		11 Kasus		11 Kasus		183,33%		Kec. Asemrowo
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus		N/A		7 Kasus		1 Kasus		4 Kasus		-		-		4 Kasus		4 Kasus		57,14%		Kec. Benowo
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 Kasus		N/A		44 Kasus		5 Kasus		14 Kasus		-		-		14 Kasus		14 Kasus		31,82%		Kec. Bubutan
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus		N/A		12 kasus		4 kasus		8 kasus		-		-		8 kasus		8 kasus		66,67%		Kec. Bulak
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	72 Kasus		N/A		72 Kasus		14 Kasus		31 Kasus		-		-		31 Kasus		31 Kasus		43,06%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	45 Kasus		N/A		45 Kasus		3 Kasus		5 Kasus		-		-		5 Kasus		5 Kasus		11,11%		Kec. Gayungan
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	9 Kasus		N/A		9 Kasus		3 Kasus		5 Kasus		-		-		5 Kasus		5 Kasus		55,56%		Kec. Genteng
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	10 Kasus		N/A		10 Kasus		2 Kasus		8 Kasus		-		-		8 Kasus		8 Kasus		80,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 kasus		N/A		7 kasus		3 kasus		10 kasus		-		-		10 kasus		10 kasus		142,86%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	28 Kasus		N/A		40 Kasus		3 Kasus		24 Kasus		-		-		24 Kasus		24 Kasus		60,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	73 Kasus		N/A		73 Kasus		18 Kasus		36 Kasus		-		-		36 Kasus		36 Kasus		49,32%		Kec. Karangpilang
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus		N/A		12 kasus		5 kasus		18 kasus		-		-		18 kasus		18 kasus		150,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 kasus		N/A		7 kasus		0 kasus		3 kasus		-		-		3 kasus		3 kasus		42,86%		Kec. Krembangan
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 kasus		N/A		44 kasus		5 kasus		18 kasus		-		-		18 kasus		18 kasus		40,91%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	8 kasus		N/A		8 kasus		0 kasus		4 kasus		-		-		4 kasus		4 kasus		50,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	20 Kasus		N/A		20 Kasus		4 Kasus		14 Kasus		-		-		14 Kasus		14 Kasus		70,00%		Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 Kasus		N/A		6 Kasus		4 Kasus		9 Kasus		-		-		9 Kasus		9 Kasus		150,00%		Kec. Pakal
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	10 Kasus		N/A		10 Kasus		1 Kasus		7 Kasus		-		-		7 Kasus		7 Kasus		70,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	37 Kasus		N/A		37 Kasus		9 Kasus		18 Kasus		-		-		18 Kasus		18 Kasus		48,65%		Kec. Sambikerep
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	144 Kasus		N/A		144 Kasus		13 Kasus		29 Kasus		-		-		29 Kasus		29 Kasus		20,14%		Kec. Sawahan
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	210 Kasus		N/A		210 Kasus		4 Kasus		9 Kasus		-		-		9 Kasus		9 Kasus		4,29%		Kec. Semampir
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus		N/A		7 Kasus		1 Kasus		2 Kasus		-		-		2 Kasus		2 Kasus		28,57%		Kec. Simokerto
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus		N/A		7 Kasus		0 Kasus		3 Kasus		-		-		3 Kasus		3 Kasus		42,86%		Kec. Sukolilo
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	8 kasus		N/A		8 kasus		2 kasus		7 kasus		-		-		7 kasus		7 kasus		87,50%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	5 kasus		N/A		5 kasus		4 kasus		10 kasus		-		-		10 kasus		10 kasus		200,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	30 Kasus		N/A		30 Kasus		3 Kasus		17 Kasus		-		-		17 Kasus		17 Kasus		56,67%		Kec. Tandes
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	62 Kasus		N/A		62 Kasus		0 Kasus		13 Kasus		-		-		13 Kasus		13 Kasus		20,97%		Kec. Tegalsari
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 kasus		N/A		6 kasus		3 kasus		12 kasus		-		-		12 kasus		12 kasus		200,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	2 kasus		N/A		2 kasus		6 kasus		12 kasus		-		-		12 kasus		12 kasus		600,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	88 Kasus		N/A		88 Kasus		3 Kasus		14 Kasus		-		-		14 Kasus		14 Kasus		15,91%		Kec. Wonocolo
				Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	116 Kasus		N/A		116 Kasus		3 Kasus		32 Kasus		-		-		32 Kasus		32 Kasus		27,59%		Kec. Wonokromo
139	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			638.675.286		737.912		418.147.279		46.107.647		87.334.525		-		-		133.442.172		133.442.172		31,91 %	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		1,43%		41,91%		-		-		41,91%		41,91%		41,91%		Kec. Benowo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Benowo
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bubutan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Bubutan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Bulak
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Bulak
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gayungan
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gayungan
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Genteng
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Genteng
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gubeng
				Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Jambangan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Jambangan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		12,50%		-		-		12,50%		12,50%		100,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Kenjeran
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Krembangan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Krembangan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Pakal
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Pakal
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Rungkut
				Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		0%		56,88%		-		-		56,88%		56,88%		56,88%		Kec. Rungkut
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Sawahan
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sawahan
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Semampir
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Semampir
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Simokerto
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		0%		43,69%		-		-		43,69%		43,69%		43,69%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Tandes
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tandes
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		148,48%		-		-		148,48%		148,48%		148,48%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Kec. Wiyung
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wiyung

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		N/A		12,50%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Wonokromo
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			638.035.070				417.685.308		46.020.652		87.129.537	-	-		133.150.188		133.150.188		31,88 %	
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan		N/A		3 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Sarioso)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Benowo
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tembok Dukuh)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Bubutan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan		N/A		5 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Bulak
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sukolilo Baru)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		-	-	4 Kelurahan		4 Kelurahan		400,00%		Kec. Bulak
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pradah Kalikendal)	1 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		N/A		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Menanggal)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		-	-	1 Kelurahan		1 Kelurahan		100,00%		Kec. Gayungan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Peneleh)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Genteng
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Genteng
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pucang Sewu)	2 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Tengah)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pagesangan)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Jambangan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		4 kelurahan		-	-	4 kelurahan		4 kelurahan		100,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Waru Gunung)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		-	-	4 Kelurahan		4 Kelurahan		400,00%		Kec. Karangpilang
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Kenjeran
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Barat)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Krembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sumurwelut)	1 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Lakarsantri
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Mulyorejo)	1 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		-		-		2 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Utara)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sumberejo)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Pakal
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		N/A		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Pakal
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonorejo)	1 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sambikerep)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Sambikerep
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		N/A		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sawahan)	1 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Sawahan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Sawahan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonokusumo)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambakrejo)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Simokerto
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Simokerto
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan		N/A		7 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Semolowaru)	2 Kelurahan		N/A		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tanjungsari)	1 Kelurahan		N/A		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambaksari)	2 kelurahan		N/A		2 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Tambaksari
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		N/A		8 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Tambaksari
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tandes)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		-	-	1 Kelurahan		1 Kelurahan		100,00%		Kec. Tandes
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonorejo)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Tegalsari
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		N/A		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		N/A		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wiyung)	1 Kelurahan		N/A		0 Kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		-	-	3 Kelurahan		3 Kelurahan		0,00%		Kec. Wiyung
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		N/A		5 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Siwalankerto)	1 Kelurahan		N/A		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonokromo)	2 Kelurahan		N/A		3 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0,00%		Kec. Wonokromo
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		N/A		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.03.2.02.02	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			396.579.154				189.095.881		0		1.440.961	-	-		1.440.961		1.440.961		0,76%	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Sarioso)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Asemrowo)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Genting Kalianak)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Asemrowo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kandangan)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Romokalisari)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sememi)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Alun-Alun Contong)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jepara)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tembok Dukuh)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bubutan)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gundih)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sukolilo Baru)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bulak)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kenjeran)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		133,33%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedung Cowek)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		100,00%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pradah Kalikendal)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunungsari)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Kupang)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		150,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Pakis)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Dukuh Pakis

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gayungan)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ketintang)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Menanggal)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		2 RW		-		-		2 RW		2 RW		33,33%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Menanggal)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Peneleh)	16 RW		N/A		16 RW		0 RW		17 RW		-		-		17 RW		17 RW		106,25%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasari)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ketabang)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		137,50%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Embong Kaliasin)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Genteng)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gubeng)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pucang Sewu)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Baratajaya)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kertajaya)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Mojo)	13 RW		N/A		13 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Airlangga)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Menanggal)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gunung Anyar

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Tengah)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jambangan)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kebonsari)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karah)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pagesangan)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedurus)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karang Pilang)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kebraon)	13 RW		N/A		13 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Waru Gunung)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Karangpilang

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bulak Banteng)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Wedi)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo Wetan)	14 RW		N/A		14 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Barat)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kemayoran)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Selatan)	13 RW		N/A		13 RW		0 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		69,23%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Morokrembangan)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Krembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dupak)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lidah Wetan)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sumurwelut)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jeruk)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lidah Kulon)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bangkingan)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lakarsantri)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manyar Sabrangan)	13 RW		N/A		13 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalijudan)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalisari)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Mulyorejo)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		27,27%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Timur)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Utara)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bongkaran)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Utara)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Nyamplungan)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sumberejo)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Benowo)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Babat Jerawat)	14 RW		N/A		14 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pakal)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Medokan Ayu)	15 RW		N/A		15 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Kidul)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Penjaringansari)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalirungkut)	15 RW		N/A		15 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedung Baruk)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Beringin)	3 RW		N/A		3 RW		0 RW		3 RW		-	-	3 RW		3 RW		100,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sambikerep)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Made)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lontar)	16 RW		N/A		16 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Banyu Urip)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kupang Krajan)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pakis)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Putat Jaya)	14 RW		N/A		14 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Petemon)	18 RW		N/A		18 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sawahan)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonokusumo)	16 RW		N/A		16 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ujung)	14 RW		N/A		14 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ampel)	17 RW		N/A		17 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Semampir

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pegirian)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambakrejo)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidodadi)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simokerto)	14 RW		N/A		14 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasan)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simolawang)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gebang Putih)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Medokan Semampir)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Menur Pumpungan)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Keputih)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Klampis Ngasem)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Semolowaru)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Nginden Jangkungan)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sonokwijenan)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		5 RW		-	-	5 RW		5 RW		83,33%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tanjungsari)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sukomanunggal)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Putat Gede)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo Baru)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		60,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gading)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pacarkeling)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rangkah)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambaksari)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasmadya Baru)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		87,50%		Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ploso)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pacarkembang)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Setro)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karangpoh)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Balongsari)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tandes)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Banjar Sugihan)	4 RW		N/A		4 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manukan Kulon)	15 RW		N/A		15 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tandes

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manukan Wetan)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Keputran)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedungdoro)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		30,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tegalsari)	7 RW		N/A		7 RW		0 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		42,86%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		90,91%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dr. Soetomo)	14 RW		N/A		14 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kendangsari)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Panjang Jiwo)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		2 RW		-	-	2 RW		2 RW		25,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kutisari)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Balas Klumprik)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Babatan)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wiyung)	9 RW		N/A		9 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jajar Tunggal)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Margorejo)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bendul Merisi)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jemur Wonosari)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-	-	0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidosermo)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Siwalankerto)	6 RW		N/A		6 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Darmo)	10 RW		N/A		10 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonokromo)	8 RW		N/A		8 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ngagel)	5 RW		N/A		5 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ngagel Rejo)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jagir)	11 RW		N/A		11 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sawunggaling)	12 RW		N/A		12 RW		0 RW		0 RW		-		-		0 RW		0 RW		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.03.2.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			240.929.127				228.149.519		46.015.612		85.671.926		-		-		131.687.537		131.687.537		57,72 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Asemrowo)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		16 RW		-		-		16 RW		16 RW		200,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Sarioso)	6 RW		N/A		6 RW		6 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		200,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Genting Kalianak)	3 RW		N/A		3 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		100,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	4 RW		N/A		4 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kandangan)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sememi)	10 RW		N/A		10 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		90,00%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Romokalisari)	3 RW		N/A		3 RW		2 RW		2 RW		-		-		2 RW		2 RW		66,67%		Kec. Benowo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tembok Dukuh)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bubutan)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gundih)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Alun-Alun Contong)	6 RW		N/A		6 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jepara)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sukolilo Baru)	4 RW		N/A		4 RW		6 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		300,00%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bulak)	5 RW		N/A		5 RW		6 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		240,00%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedung Cowek)	3 RW		N/A		3 RW		5 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		366,67%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kenjeran)	3 RW		N/A		3 RW		3 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		200,00%		Kec. Bulak
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Pakis)	5 RW		N/A		5 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		100,00%		Kec. Dukuh Pakis

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pradah Kalikendal)	7 RW		N/A		7 RW		4 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunungsari)	6 RW		N/A		6 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		116,67%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Kupang)	6 RW		N/A		6 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		116,67%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ketintang)	8 RW		N/A		8 RW		6 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gayungan)	4 RW		N/A		4 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		125,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Menanggal)	6 RW		N/A		6 RW		5 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Menanggal)	9 RW		N/A		9 RW		7 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Peneleh)	16 RW		N/A		16 RW		14 RW		16 RW		-		-		16 RW		16 RW		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Genteng)	5 RW		N/A		5 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		200,00%		Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ketabang)	8 RW		N/A		8 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		75,00%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Embong Kaliasin)	5 RW		N/A		5 RW		5 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		120,00%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasari)	11 RW		N/A		11 RW		11 RW		22 RW		-		-		22 RW		22 RW		200,00%		Kec. Genteng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Airlangga)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Baratajaya)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Mojo)	13 RW		N/A		13 RW		13 RW		13 RW		-		-		13 RW		13 RW		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kertajaya)	11 RW		N/A		11 RW		11 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pucang Sewu)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gubeng)	4 RW		N/A		4 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Menanggal)	4 RW		N/A		4 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		75,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Tengah)	9 RW		N/A		9 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		55,56%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar)	8 RW		N/A		8 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		50,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)	8 RW		N/A		8 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		37,50%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pagesangan)	4 RW		N/A		4 RW		3 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		175,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karah)	12 RW		N/A		12 RW		7 RW		15 RW		-		-		15 RW		15 RW		125,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kebonsari)	3 RW		N/A		3 RW		3 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		200,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jambangan)	7 RW		N/A		7 RW		5 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		142,86%		Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Waru Gunung)	3 RW		N/A		3 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		100,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kebraon)	13 RW		N/A		13 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		61,54%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedurus)	9 RW		N/A		9 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		66,67%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karang Pilang)	4 RW		N/A		4 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		75,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bulak Banteng)	8 RW		N/A		8 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		87,50%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo Wetan)	14 RW		N/A		14 RW		13 RW		14 RW		-		-		14 RW		14 RW		100,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Wedi)	4 RW		N/A		4 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	12 RW		N/A		12 RW		12 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Morokrembangan)	9 RW		N/A		9 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		88,89%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dupak)	5 RW		N/A		5 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kemayoran)	9 RW		N/A		9 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		88,89%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Barat)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Selatan)	13 RW		N/A		13 RW		13 RW		13 RW		-		-		13 RW		13 RW		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jeruk)	4 RW		N/A		4 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		75,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sumurwelut)	3 RW		N/A		3 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lidah Wetan)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Lakarsantri

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lidah Kulon)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		112,50%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bangkingan)	5 RW		N/A		5 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		80,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lakarsantri)	4 RW		N/A		4 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalijudan)	10 RW		N/A		10 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		60,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalisari)	8 RW		N/A		8 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		50,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Mulyorejo)	11 RW		N/A		11 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		36,36%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	10 RW		N/A		10 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		70,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	4 RW		N/A		4 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		75,00%		Kec. Mulyorejo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manyar Sabrangan)	13 RW		N/A		13 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		38,46%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Timur)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Utara)	10 RW		N/A		10 RW		7 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bongkaran)	10 RW		N/A		10 RW		9 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Utara)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Nyamplungan)	12 RW		N/A		12 RW		12 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sumberejo)	8 RW		N/A		8 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		87,50%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pakal)	6 RW		N/A		6 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		100,00%		Kec. Pakal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Babat Jerawat)	14 RW		N/A		14 RW		13 RW		13 RW		-		-		13 RW		13 RW		92,86%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Benowo)	6 RW		N/A		6 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		83,33%		Kec. Pakal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalirungkut)	15 RW		N/A		15 RW		11 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		73,33%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Penjaringansari)	12 RW		N/A		12 RW		6 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		58,33%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Medokan Ayu)	15 RW		N/A		15 RW		12 RW		14 RW		-		-		14 RW		14 RW		93,33%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	10 RW		N/A		10 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		40,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Kidul)	12 RW		N/A		12 RW		6 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedung Baruk)	10 RW		N/A		10 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		40,00%		Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sambikerep)	11 RW		N/A		11 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		63,64%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lontar)	16 RW		N/A		16 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		62,50%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Made)	7 RW		N/A		7 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		85,71%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Beringin)	3 RW		N/A		3 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		100,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pakis)	10 RW		N/A		10 RW		9 RW		18 RW		-		-		18 RW		18 RW		180,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Banyu Urip)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Putat Jaya)	14 RW		N/A		14 RW		15 RW		15 RW		-		-		15 RW		15 RW		107,14%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kupang Krajan)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sawahan)	10 RW		N/A		10 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		90,00%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Petemon)	18 RW		N/A		18 RW		15 RW		16 RW		-		-		16 RW		16 RW		88,89%		Kec. Sawahan
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ujung)	14 RW		N/A		14 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		50,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pegirian)	11 RW		N/A		11 RW		11 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo)	12 RW		N/A		12 RW		12 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ampel)	17 RW		N/A		17 RW		17 RW		17 RW		-		-		17 RW		17 RW		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonokusumo)	16 RW		N/A		16 RW		16 RW		16 RW		-		-		16 RW		16 RW		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasan)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simokerto)	14 RW		N/A		14 RW		13 RW		13 RW		-		-		13 RW		13 RW		92,86%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidodadi)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Simokerto

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambakrejo)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simolawang)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Semolowaru)	12 RW		N/A		12 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		58,33%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gebang Putih)	7 RW		N/A		7 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		57,14%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Klampis Ngasem)	9 RW		N/A		9 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		66,67%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Menur Pumpungan)	10 RW		N/A		10 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		50,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Nginden Jangkungan)	11 RW		N/A		11 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		63,64%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Keputih)	9 RW		N/A		9 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		55,56%		Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Medokan Semampir)	9 RW		N/A		9 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		77,78%		Kec. Sukolilo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Putat Gede)	4 RW		N/A		4 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sonokwijenan)	6 RW		N/A		6 RW		3 RW		3 RW		-		-		3 RW		3 RW		50,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tanjungsari)	4 RW		N/A		4 RW		1 RW		1 RW		-		-		1 RW		1 RW		25,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo Baru)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sukomanunggal)	5 RW		N/A		5 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambaksari)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Setro)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-	-	7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pacarkembang)	11 RW		N/A		11 RW		11 RW		11 RW		-	-	11 RW		11 RW		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pacarkeling)	12 RW		N/A		12 RW		12 RW		12 RW		-	-	12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gading)	11 RW		N/A		11 RW		10 RW		10 RW		-	-	10 RW		10 RW		90,91%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasmadya Baru)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-	-	8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rangkah)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-	-	9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ploso)	11 RW		N/A		11 RW		11 RW		11 RW		-	-	11 RW		11 RW		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karangpoh)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-	-	9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tandes)	9 RW		N/A		9 RW		9 RW		9 RW		-	-	9 RW		9 RW		100,00%		Kec. Tandes

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manukan Wetan)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-	-	7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Balongsari)	7 RW		N/A		7 RW		7 RW		7 RW		-	-	7 RW		7 RW		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Banjar Sugihan)	4 RW		N/A		4 RW		4 RW		4 RW		-	-	4 RW		4 RW		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manukan Kulon)	15 RW		N/A		15 RW		15 RW		15 RW		-	-	15 RW		15 RW		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dr. Soetomo)	14 RW		N/A		14 RW		7 RW		7 RW		-	-	7 RW		7 RW		50,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tegalsari)	7 RW		N/A		7 RW		4 RW		4 RW		-	-	4 RW		4 RW		57,14%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	11 RW		N/A		11 RW		9 RW		9 RW		-	-	9 RW		9 RW		81,82%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Keputran)	6 RW		N/A		6 RW		5 RW		5 RW		-	-	5 RW		5 RW		83,33%		Kec. Tegalsari
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedungdoro)	10 RW		N/A		10 RW		9 RW		9 RW		-	-	9 RW		9 RW		90,00%		Kec. Tegalsari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kendangsari)	5 RW		N/A		5 RW		5 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		200,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	6 RW		N/A		6 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		83,33%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Panjang Jiwo)	8 RW		N/A		8 RW		6 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		150,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kutisari)	6 RW		N/A		6 RW		3 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		116,67%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jajar Tunggal)	6 RW		N/A		6 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		66,67%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wiyung)	9 RW		N/A		9 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		66,67%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Balas Klumprik)	8 RW		N/A		8 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		50,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Babatan)	11 RW		N/A		11 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		36,36%		Kec. Wiyung

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Siwalankerto)	6 RW		N/A		6 RW		5 RW		5 RW		-		-		5 RW		5 RW		83,33%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jemur Wonosari)	10 RW		N/A		10 RW		9 RW		9 RW		-		-		9 RW		9 RW		90,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bendul Merisi)	12 RW		N/A		12 RW		10 RW		12 RW		-		-		12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Margorejo)	8 RW		N/A		8 RW		7 RW		7 RW		-		-		7 RW		7 RW		87,50%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidosermo)	8 RW		N/A		8 RW		6 RW		6 RW		-		-		6 RW		6 RW		75,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ngagel)	5 RW		N/A		5 RW		4 RW		4 RW		-		-		4 RW		4 RW		80,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Darmo)	10 RW		N/A		10 RW		10 RW		10 RW		-		-		10 RW		10 RW		100,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sawunggaling)	12 RW		N/A		12 RW		11 RW		11 RW		-		-		11 RW		11 RW		91,67%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonokromo)	8 RW		N/A		8 RW		8 RW		8 RW		-		-		8 RW		8 RW		100,00%		Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jagir)	11 RW		N/A		11 RW		10 RW		10 RW		-	-	10 RW		10 RW		90,91%		Kec. Wonokromo
				Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ngagel Rejo)	12 RW		N/A		12 RW		12 RW		12 RW		-	-	12 RW		12 RW		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			526.790				439.908		5.040		16.650	-	-		21.690		21.690		4,93%	
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	6 Kali		N/A		6 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali		N/A		8 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Benowo
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali		N/A		10 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Bulak
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali		N/A		8 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali		N/A		10 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Genteng
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali		N/A		12 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali		N/A		8 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		4 Kali		-	-	4 Kali		4 Kali		50,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali		N/A		10 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali		N/A		12 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali		N/A		12 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali		N/A		10 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Pakal
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali		N/A		12 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali		N/A		12 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali		N/A		10 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Semampir
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali		N/A		10 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	14 Kali		N/A		14 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali		N/A		12 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	16 kali		N/A		16 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali		N/A		12 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Tandes
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali		N/A		10 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali		N/A		8 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali		N/A		8 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali		N/A		10 kali		0 kali		0 kali		-	-	0 kali		0 kali		0,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali		N/A		12 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		0 Kali		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			640.216				461.971		86.996		204.988		-		291.984		291.984		63,20 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	62 Unit Usaha		N/A		62 Unit Usaha		40 Unit Usaha		81 Unit Usaha		-		-		81 Unit Usaha		81 Unit Usaha		130,65%		Kec. Asemrowo
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		N/A		50 Potensi usaha		6 Potensi usaha		298 Potensi usaha		-		-		298 Potensi usaha		298 Potensi usaha		596,00%		Kec. Benowo
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga		N/A		400 Lembaga		61 Lembaga		145 Lembaga		-		-		145 Lembaga		145 Lembaga		36,25%		Kec. Bubutan
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga		N/A		400 Lembaga		103 Lembaga		210 Lembaga		-		-		210 Lembaga		210 Lembaga		52,50%		Kec. Bulak
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	25 Lembaga		N/A		25 Lembaga		12 Lembaga		60 Lembaga		-		-		60 Lembaga		60 Lembaga		240,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		N/A		120 Lembaga		31 Lembaga		65 Lembaga		-		-		65 Lembaga		65 Lembaga		54,17%		Kec. Gayungan
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	29 Lembaga		N/A		8 Lembaga		10 Lembaga		24 Lembaga		-		-		24 Lembaga		24 Lembaga		300,00%		Kec. Genteng
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	90 Unit Kerja		N/A		90 Unit Kerja		9 Unit Kerja		41 Unit Kerja		-		-		41 Unit Kerja		41 Unit Kerja		45,56%		Kec. Gubeng
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		N/A		100 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha		48 Pelaku Usaha		-		-		48 Pelaku Usaha		48 Pelaku Usaha		48,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Lembaga		N/A		100 Lembaga		48 Lembaga		67 Lembaga		-		-		67 Lembaga		67 Lembaga		67,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga		N/A		116 Lembaga		26 Lembaga		46 Lembaga		-		-		46 Lembaga		46 Lembaga		39,66%		Kec. Karangpilang
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		N/A		100 pelaku usaha		21 pelaku usaha		158 pelaku usaha		-		-		158 pelaku usaha		158 pelaku usaha		158,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		N/A		100 Pelaku Usaha		130 Pelaku Usaha		178 Pelaku Usaha		-		-		178 Pelaku Usaha		178 Pelaku Usaha		178,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	124 Lembaga		N/A		124 Lembaga		12 Lembaga		54 Lembaga		-		-		54 Lembaga		54 Lembaga		43,55%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		N/A		100 Pelaku Usaha		21 Pelaku Usaha		43 Pelaku Usaha		-		-		43 Pelaku Usaha		43 Pelaku Usaha		43,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga		N/A		50 Lembaga		8 Lembaga		24 Lembaga		-		-		24 Lembaga		24 Lembaga		48,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		N/A		100 pelaku usaha		33 pelaku usaha		61 pelaku usaha		-		-		61 pelaku usaha		61 pelaku usaha		61,00%		Kec. Pakal
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	110 Unit Usaha		N/A		110 Unit Usaha		0 Unit Usaha		153 Unit Usaha		-		-		153 Unit Usaha		153 Unit Usaha		139,09%		Kec. Rungkut
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	148 Lembaga		N/A		148 Lembaga		26 Lembaga		64 Lembaga		-		-		64 Lembaga		64 Lembaga		43,24%		Kec. Sambikerep
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga		N/A		288 Lembaga		24 Lembaga		136 Lembaga		-		-		136 Lembaga		136 Lembaga		47,22%		Kec. Sawahan
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha		N/A		140 Unit Usaha		34 Unit Usaha		68 Unit Usaha		-		-		68 Unit Usaha		68 Unit Usaha		48,57%		Kec. Semampir
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga		N/A		50 Lembaga		16 Lembaga		31 Lembaga		-		-		31 Lembaga		31 Lembaga		62,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha		N/A		50 Pelaku Usaha		66 Pelaku Usaha		121 Pelaku Usaha		-		-		121 Pelaku Usaha		121 Pelaku Usaha		242,00%		Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		N/A		100 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		90 Pelaku Usaha		-		-		90 Pelaku Usaha		90 Pelaku Usaha		90,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha		N/A		150 pelaku usaha		29 pelaku usaha		70 pelaku usaha		-		-		70 pelaku usaha		70 pelaku usaha		46,67%		Kec. Tambaksari
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		N/A		100 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha		47 Pelaku Usaha		-		-		47 Pelaku Usaha		47 Pelaku Usaha		47,00%		Kec. Tandes
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga		N/A		192 Lembaga		75 Lembaga		145 Lembaga		-		-		145 Lembaga		145 Lembaga		75,52%		Kec. Tegalsari
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		N/A		100 Pelaku Usaha		22 Pelaku Usaha		49 Pelaku Usaha		-		-		49 Pelaku Usaha		49 Pelaku Usaha		49,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha		N/A		20 unit usaha		11 unit usaha		26 unit usaha		-		-		26 unit usaha		26 unit usaha		130,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	156 Lembaga		N/A		156 Lembaga		50 Lembaga		88 Lembaga		-		-		88 Lembaga		88 Lembaga		56,41%		Kec. Wonocolo
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha		N/A		116 Unit Usaha		142 Unit Usaha		424 Unit Usaha		-		-		424 Unit Usaha		424 Unit Usaha		365,52%		Kec. Wonokromo
		7.01.03.2.03 .04	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			640.216				461.971		86.996		204.988	-	-				291.984		291.984		63,20 %	
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		13 Kali		25 Kali		-		-		25 Kali		25 Kali		52,08%		Kec. Asemrowo
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		6 Kali		18 Kali		-		-		18 Kali		18 Kali		37,50%		Kec. Benowo
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		8 Kali		25 Kali		-		-		25 Kali		25 Kali		52,08%		Kec. Bubutan
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		12 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Bulak
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	25 Kali		N/A		25 Kali		6 Kali		25 Kali		-		-		25 Kali		25 Kali		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		12 Kali		30 Kali		-		-		30 Kali		30 Kali		62,50%		Kec. Gayungan
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		10 Kali		25 Kali		-		-		25 Kali		25 Kali		52,08%		Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		4 Kali		23 Kali		-		-		23 Kali		23 Kali		47,92%		Kec. Gubeng
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		14 Kali		29 Kali		-		-		29 Kali		29 Kali		60,42%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		9 Kali		27 Kali		-		-		27 Kali		27 Kali		56,25%		Kec. Jambangan
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		12 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali		N/A		48 kali		8 kali		51 kali		-		-		51 kali		51 kali		106,25%		Kec. Kenjeran
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		10 Kali		22 Kali		-		-		22 Kali		22 Kali		45,83%		Kec. Krembangan
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		12 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		24 Kali		48 Kali		-		-		48 Kali		48 Kali		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		8 Kali		22 Kali		-		-		22 Kali		22 Kali		45,83%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali		N/A		48 kali		38 kali		60 kali		-		-		60 kali		60 kali		125,00%		Kec. Pakal
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		54 Kali		123 Kali		-		-		123 Kali		123 Kali		256,25%		Kec. Rungkut
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		8 Kali		20 Kali		-		-		20 Kali		20 Kali		41,67%		Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		4 Kali		28 Kali		-		-		28 Kali		28 Kali		58,33%		Kec. Sawahan
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		38 Kali		54 Kali		-		-		54 Kali		54 Kali		112,50%		Kec. Semampir
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		13 Kali		38 Kali		-		-		38 Kali		38 Kali		79,17%		Kec. Simokerto
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		9 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		31 Kali		43 Kali		-		-		43 Kali		43 Kali		89,58%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali		N/A		48 kali		10 kali		25 kali		-		-		25 kali		25 kali		52,08%		Kec. Tambaksari
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		8 Kali		48 Kali		-		-		48 Kali		48 Kali		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		24 Kali		35 Kali		-		-		35 Kali		35 Kali		72,92%		Kec. Tegalsari
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		12 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali		N/A		48 kali		6 kali		21 kali		-		-		21 kali		21 kali		43,75%		Kec. Wiyung
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		14 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali		N/A		48 Kali		12 Kali		24 Kali		-		-		24 Kali		24 Kali		50,00%		Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
140	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			5.087.451		12.394.938		4.442.063		969.015		2.090.198	-	-		3.059.213		3.059.213		68,87 %	
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		77,97%		83,46%		-	-	83,46%		83,46%		83,46%		Kec. Benowo
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Bubutan
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		83,48%		88,77%		-	-	88,77%		88,77%		88,77%		Kec. Bulak
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		72,73%		80,30%		-	-	80,30%		80,30%		80,30%		Kec. Gayungan
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Genteng
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		66,67%		87,57%		-	-	87,57%		87,57%		87,57%		Kec. Jambangan
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100,22%		-	-	100,22%		100,22%		100,22%		Kec. Kenjeran
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Krembangan
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		129,73%		-	-	129,73%		129,73%		129,73%		Kec. Pakal
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100,65%		100,32%		-	-	100,32%		100,32%		100,32%		Kec. Rungkut

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sawahan
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Semampir
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Simokerto
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		87,44%		86,43%		-	-	86,43%		86,43%		86,43%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		107,74%		105,98%		-	-	105,98%		105,98%		105,98%		Kec. Tandes
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		82,13%		-	-	82,13%		82,13%		82,13%		Kec. Tegalsari
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		99,65%		-	-	99,65%		99,65%		99,65%		Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wiyung
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		13,89%		56,94%		-	-	56,94%		56,94%		56,94%		Kec. Wonocolo
				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			5.087.451				4.442.063		969.015		2.090.198	-	-		3.059.213		3.059.213		68,87 %	
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi		N/A		5 Lokasi		19 Lokasi		25 Lokasi		-	-	25 Lokasi		25 Lokasi		500,00%		Kec. Asemrowo
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		N/A		14 Lokasi		49 Lokasi		107 Lokasi		-	-	107 Lokasi		107 Lokasi		764,29%		Kec. Benowo
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		N/A		15 Lokasi		79 Lokasi		121 Lokasi		-	-	121 Lokasi		121 Lokasi		806,67%		Kec. Bubutan
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	13 Lokasi		N/A		13 Lokasi		30 Lokasi		58 Lokasi		-	-	58 Lokasi		58 Lokasi		446,15%		Kec. Bulak
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		N/A		12 Lokasi		63 Lokasi		110 Lokasi		-	-	110 Lokasi		110 Lokasi		916,67%		Kec. Dukuh Pakis

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		N/A		24 Lokasi		51 Lokasi		53 Lokasi		-		-		53 Lokasi		53 Lokasi		220,83%		Kec. Gayungan
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		N/A		12 Lokasi		28 Lokasi		59 Lokasi		-		-		59 Lokasi		59 Lokasi		491,67%		Kec. Genteng
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		N/A		24 Lokasi		43 Lokasi		55 Lokasi		-		-		55 Lokasi		55 Lokasi		229,17%		Kec. Gubeng
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		N/A		15 Lokasi		13 Lokasi		72 Lokasi		-		-		72 Lokasi		72 Lokasi		480,00%		Kec. Gunung Anyar
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	82 Lokasi		N/A		8 Lokasi		17 Lokasi		71 Lokasi		-		-		71 Lokasi		71 Lokasi		887,50%		Kec. Jambangan
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		N/A		8 Lokasi		10 Lokasi		12 Lokasi		-		-		12 Lokasi		12 Lokasi		150,00%		Kec. Karangpilang
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi		N/A		10 Lokasi		37 Lokasi		89 Lokasi		-		-		89 Lokasi		89 Lokasi		890,00%		Kec. Kenjeran
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		N/A		14 Lokasi		27 Lokasi		48 Lokasi		-		-		48 Lokasi		48 Lokasi		342,86%		Kec. Krembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		N/A		12 Lokasi		71 Lokasi		125 Lokasi		-	-	125 Lokasi		125 Lokasi		1041,67 %		Kec. Lakarsantri
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi		N/A		26 Lokasi		81 Lokasi		84 Lokasi		-	-	84 Lokasi		84 Lokasi		323,08%		Kec. Mulyorejo
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		N/A		12 Lokasi		14 Lokasi		26 Lokasi		-	-	26 Lokasi		26 Lokasi		216,67%		Kec. Pabean Cantian
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 Lokasi		N/A		17 Lokasi		62 Lokasi		122 Lokasi		-	-	122 Lokasi		122 Lokasi		717,65%		Kec. Pakal
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi		N/A		22 Lokasi		39 Lokasi		51 Lokasi		-	-	51 Lokasi		51 Lokasi		231,82%		Kec. Rungkut
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		N/A		15 Lokasi		52 Lokasi		82 Lokasi		-	-	82 Lokasi		82 Lokasi		546,67%		Kec. Sambikerep
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		N/A		14 Lokasi		51 Lokasi		96 Lokasi		-	-	96 Lokasi		96 Lokasi		685,71%		Kec. Sawahan
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi		N/A		16 Lokasi		33 Lokasi		45 Lokasi		-	-	45 Lokasi		45 Lokasi		281,25%		Kec. Semampir

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		N/A		14 Lokasi		41 Lokasi		44 Lokasi		-		-		44 Lokasi		44 Lokasi		314,29%		Kec. Simokerto
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi		N/A		11 Lokasi		49 Lokasi		68 Lokasi		-		-		68 Lokasi		68 Lokasi		618,18%		Kec. Sukolilo
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		N/A		24 Lokasi		30 Lokasi		30 Lokasi		-		-		30 Lokasi		30 Lokasi		125,00%		Kec. Sukomanunggal
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	25 lokasi		N/A		25 lokasi		34 lokasi		63 lokasi		-		-		63 lokasi		63 lokasi		252,00%		Kec. Tambaksari
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		N/A		15 lokasi		69 lokasi		103 lokasi		-		-		103 lokasi		103 lokasi		686,67%		Kec. Tandes
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi		N/A		21 Lokasi		42 Lokasi		79 Lokasi		-		-		79 Lokasi		79 Lokasi		376,19%		Kec. Tegalsari
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 lokasi		N/A		14 lokasi		36 lokasi		70 lokasi		-		-		70 lokasi		70 lokasi		500,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		N/A		15 lokasi		17 lokasi		33 lokasi		-		-		33 lokasi		33 lokasi		220,00%		Kec. Wiyung

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		N/A		8 Lokasi		19 Lokasi		72 Lokasi		-	-	72 Lokasi		72 Lokasi		900,00%		Kec. Wonocolo
				Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	41 Lokasi		N/A		41 Lokasi		62 Lokasi		162 Lokasi		-	-	162 Lokasi		162 Lokasi		395,12%		Kec. Wonokromo
		7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			5.087.451				4.442.063		969.015		2.090.198	-	-		3.059.213		3.059.213		68,87 %	
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		88 Kali		179 Kali		-	-	179 Kali		179 Kali		49,72%		Kec. Asemrowo
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		89 kali		179 kali		-	-	179 kali		179 kali		49,72%		Kec. Benowo
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		91 Kali		177 Kali		-	-	177 Kali		177 Kali		49,17%		Kec. Bubutan
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		181 Kali		-	-	181 Kali		181 Kali		50,28%		Kec. Bulak
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		88 kali		178 kali		-	-	178 kali		178 kali		49,44%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		89 kali		180 kali		-	-	180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		180 kali		-	-	180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		181 Kali		-	-	181 Kali		181 Kali		50,28%		Kec. Gubeng
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali		N/A		408 Kali		102 Kali		216 Kali		-	-	216 Kali		216 Kali		52,94%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		83 kali		174 kali		-	-	174 kali		174 kali		48,33%		Kec. Jambangan
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		180 kali		-	-	180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		88 Kali		179 Kali		-	-	179 Kali		179 Kali		49,72%		Kec. Kenjeran
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		180 kali		-	-	180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		102 kali		219 kali		-	-	219 kali		219 kali		60,83%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 kali		N/A		408 kali		90 kali		181 kali		-	-	181 kali		181 kali		44,36%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		181 Kali		-	-	181 Kali		181 Kali		50,28%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		180 Kali		-	-	180 Kali		180 Kali		50,00%		Kec. Pakal
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali		N/A		408 Kali		102 Kali		205 Kali		-	-	205 Kali		205 Kali		50,25%		Kec. Rungkut
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		180 kali		-	-	180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		180 Kali		-		-		180 Kali		180 Kali		50,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		88 Kali		179 Kali		-		-		179 Kali		179 Kali		49,72%		Kec. Semampir
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		180 kali		-		-		180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali		N/A		408 Kali		88 Kali		204 Kali		-		-		204 Kali		204 Kali		50,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		181 Kali		-		-		181 Kali		181 Kali		50,28%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		181 kali		-		-		181 kali		181 kali		50,28%		Kec. Tambaksari
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		88 kali		178 kali		-		-		178 kali		178 kali		49,44%		Kec. Tandes
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		51 Kali		127 Kali		-		-		127 Kali		127 Kali		35,28%		Kec. Tegalsari
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		181 Kali		-		-		181 Kali		181 Kali		50,28%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali		N/A		360 kali		90 kali		180 kali		-		-		180 kali		180 kali		50,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		88 Kali		178 Kali		-		-		178 Kali		178 Kali		49,44%		Kec. Wonocolo
				Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali		N/A		360 Kali		90 Kali		182 Kali		-		-		182 Kali		182 Kali		50,56%		Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
141	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			145.220.138		154.322		196.685.263		33.333.120		67.638.319	-	-		100.971.440		100.971.440		51,34 %	
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		93,17%		93,52%		-	-	93,52%		93,52%		93,52%		Kec. Asemrowo
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Asemrowo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27 %		N/A		27,27%		53,93%		53,93%		-	-	53,93%		53,93%		197,76%		Kec. Asemrowo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34,45%		N/A		30,88%		47,33%		47,33%		-	-	47,33%		47,33%		153,27%		Kec. Benowo
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Benowo
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		43,82%		34,98%		-	-	34,98%		34,98%		34,98%		Kec. Benowo
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Bubutan
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%		N/A		22,82%		68,29%		68,29%		-	-	68,29%		68,29%		299,26%		Kec. Bubutan
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		76,80%		73,68%		-	-	73,68%		73,68%		73,68%		Kec. Bubutan
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		N/A		22,82%		43,90%		43,90%		-		-		43,90%		43,90%		192,38%		Kec. Bulak
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		89,90%		68,41%		-		-		68,41%		68,41%		68,41%		Kec. Bulak
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,32%		N/A		26,32%		55,74%		55,74%		-		-		55,74%		55,74%		211,78%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		91,58%		91,87%		-		-		91,87%		91,87%		91,87%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		84,39%		83,08%		-		-		83,08%		83,08%		83,08%		Kec. Gayungan
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32,87%		N/A		24,54%		53,74%		53,74%		-		-		53,74%		53,74%		218,99%		Kec. Gayungan
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gayungan
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Genteng
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		79,64%		79,63%		-		-		79,63%		79,63%		79,63%		Kec. Genteng
				Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23,38%		N/A		16,67%		40,09%		40,09%		-		-		40,09%		40,09%		240,49%		Kec. Genteng
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		90,14%		90,06%		-		-		90,06%		90,06%		90,06%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gubeng
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30,77%		N/A		20,59%		52,99%		52,99%		-		-		52,99%		52,99%		257,36%		Kec. Gubeng
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		91,92%		91,79%		-		-		91,79%		91,79%		91,79%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%		N/A		32,14%		51,90%		51,90%		-		-		51,90%		51,90%		161,48%		Kec. Gunung Anyar
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Jambangan
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		66,97%		67,59%		-		-		67,59%		67,59%		67,59%		Kec. Jambangan
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31,3 %		N/A		24,22%		50%		50%		-		-		50%		50%		206,44%		Kec. Jambangan
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		79,88%		80,18%		-		-		80,18%		80,18%		80,18%		Kec. Karangpilang
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Karangpilang
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%		N/A		23,80%		62,22%		62,22%		-		-		62,22%		62,22%		261,43%		Kec. Karangpilang
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Kenjeran

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33,33%		N/A		17,19%		76,27%		76,27%		-	-	76,27%		76,27%		443,69%		Kec. Kenjeran
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		86,63%		84,65%		-	-	84,65%		84,65%		84,65%		Kec. Kenjeran
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		70,96%		69,25%		-	-	69,25%		69,25%		69,25%		Kec. Krembangan
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Krembangan
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11 %		N/A		37,11%		65,44%		65,44%		-	-	65,44%		65,44%		176,34%		Kec. Krembangan
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Lakarsantri
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		N/A		22,82%		69,37%		69,37%		-	-	69,37%		69,37%		303,99%		Kec. Lakarsantri
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		87,52%		83,02%		-	-	83,02%		83,02%		83,02%		Kec. Lakarsantri
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Mulyorejo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %		N/A		23,91%		54,05%		54,05%		-	-	54,05%		54,05%		226,06%		Kec. Mulyorejo
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		93,97%		94,18%		-	-	94,18%		94,18%		94,18%		Kec. Mulyorejo
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		82,72%		82,03%		-	-	82,03%		82,03%		82,03%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20%		N/A		15%		67,80%		67,80%		-	-	67,80%		67,80%		452,00%		Kec. Pabean Cantian
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		81,34%		81,65%		-	-	81,65%		81,65%		81,65%		Kec. Pakal
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Pakal
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53,19%		N/A		53,19%		62,30%		62,30%		-	-	62,30%		62,30%		117,13%		Kec. Pakal
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,16 %		N/A		28,00%		47,37%		47,37%		-	-	47,37%		47,37%		169,18%		Kec. Rungkut
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Rungkut
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		79,95%		69,57%		-	-	69,57%		69,57%		69,57%		Kec. Rungkut
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		93,06%		90,21%		-	-	90,21%		90,21%		90,21%		Kec. Sambikerep
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,37%		N/A		23,37%		56,67%		56,67%		-	-	56,67%		56,67%		242,49%		Kec. Sambikerep
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Sambikerep
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-	-	0%		0%		0,00%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		80,52%		81,13%		-		-		81,13%		81,13%		81,13%		Kec. Sawahan
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89,61 %		N/A		27,22%		45,45%		45,45%		-		-		45,45%		45,45%		166,97%		Kec. Sawahan
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Semampir
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		78,20%		78,48%		-		-		78,48%		78,48%		78,48%		Kec. Semampir
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		N/A		22,82%		65,34%		65,34%		-		-		65,34%		65,34%		286,33%		Kec. Semampir
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Simokerto
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81,7 %		N/A		39,18%		65,99%		65,99%		-		-		65,99%		65,99%		168,43%		Kec. Simokerto
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		74,64%		74,51%		-		-		74,51%		74,51%		74,51%		Kec. Simokerto
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		88,14%		84,14%		-		-		84,14%		84,14%		84,14%		Kec. Sukolilo
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukolilo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71 %		N/A		24,80%		62,94%		62,94%		-		-		62,94%		62,94%		253,79%		Kec. Sukolilo
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		80,05%		81,46%		-		-		81,46%		81,46%		81,46%		Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		N/A		50%		29,73%		29,73%		-		-		29,73%		29,73%		59,46%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Sukomanunggal
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %		N/A		40,82%		79,70%		79,70%		-		-		79,70%		79,70%		195,25%		Kec. Tambaksari
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tambaksari
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		88,92%		87,88%		-		-		87,88%		87,88%		87,88%		Kec. Tambaksari
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50,51%		N/A		50,51%		45,53%		45,53%		-		-		45,53%		45,53%		90,14%		Kec. Tandes
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tandes
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		84,57%		82,72%		-		-		82,72%		82,72%		82,72%		Kec. Tandes
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23,25%		N/A		23,25%		66,67%		66,67%		-		-		66,67%		66,67%		286,75%		Kec. Tegalsari
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		80,31%		75,47%		-		-		75,47%		75,47%		75,47%		Kec. Tegalsari
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tegalsari
				Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73 %		N/A		35,21%		74,02%		74,02%		-		-		74,02%		74,02%		210,22%		Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		87,67%		88,61%		-		-		88,61%		88,61%		88,61%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55,81 %		N/A		13,21%		55,14%		55,14%		-		-		55,14%		55,14%		417,41%		Kec. Wiyung
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wiyung
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		65,82%		65,07%		-		-		65,07%		65,07%		65,07%		Kec. Wiyung
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonocolo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,94%		N/A		26,74%		65,67%		65,67%		-		-		65,67%		65,67%		245,59%		Kec. Wonocolo
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		72,81%		70,98%		-		-		70,98%		70,98%		70,98%		Kec. Wonocolo
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	65,01%		N/A		35,29%		54,95%		54,95%		-		-		54,95%		54,95%		155,71%		Kec. Wonokromo
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		N/A		100%		89,49%		87,41%		-		-		87,41%		87,41%		87,41%		Kec. Wonokromo
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		N/A		100%		0%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			267.291				174.536		95.972		95.972		-		-		191.944		191.944		109,97 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		N/A		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		-		-		6 lembaga		6 lembaga		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		0 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		N/A		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		-		-		4 Lembaga		4 Lembaga		100,00%		Kec. Bulak
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		N/A		4 Lembaga		7 Lembaga		7 Lembaga		-		-		7 Lembaga		7 Lembaga		175,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		7 Lembaga		7 Lembaga		-		-		7 Lembaga		7 Lembaga		116,67%		Kec. Gubeng
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		0 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		0 Lembaga		4 Lembaga		-		-		4 Lembaga		4 Lembaga		66,67%		Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		-	-	4 Lembaga		4 Lembaga		66,67%		Kec. Kenjeran
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		0 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Pakal
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		7 Lembaga		7 Lembaga		-	-	7 Lembaga		7 Lembaga		116,67%		Kec. Rungkut
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		-	-	5 Lembaga		5 Lembaga		83,33%		Kec. Sambikerep
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		N/A		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		-	-	6 lembaga		6 lembaga		100,00%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		N/A		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		-	-	4 Lembaga		4 Lembaga		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga		N/A		5 lembaga		10 lembaga		10 lembaga		-	-	10 lembaga		10 lembaga		200,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		-	-	3 Lembaga		3 Lembaga		50,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		N/A		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		-	-	6 lembaga		6 lembaga		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	6 Lembaga		6 Lembaga		100,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		-	-	5 Lembaga		5 Lembaga		83,33%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		N/A		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		-	-	6 lembaga		6 lembaga		100,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga		N/A		6 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		-	-	5 Lembaga		5 Lembaga		83,33%		Kec. Wonocolo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		N/A		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		-	-	4 Lembaga		4 Lembaga		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.01.01	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			267.291				174.536		95.972		95.972	-	-		191.944		191.944		109,97 %		
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	40 Orang		N/A		40 Orang		55 Orang		55 Orang		-	-	55 Orang		55 Orang		137,50%		Kec. Asemrowo
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang		N/A		100 orang		100 orang		100 orang		-	-	100 orang		100 orang		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 Orang		N/A		150 Orang		0 Orang		37 Orang		-	-	37 Orang		37 Orang		24,67%		Kec. Bubutan
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	60 Orang		N/A		60 Orang		78 Orang		78 Orang		-	-	78 Orang		78 Orang		130,00%		Kec. Bulak
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang		N/A		100 Orang		119 Orang		119 Orang		-	-	119 Orang		119 Orang		119,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 orang		N/A		200 orang		100 orang		100 orang		-	-	100 orang		100 orang		50,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 Orang		N/A		150 Orang		80 Orang		80 Orang		-	-	80 Orang		80 Orang		53,33%		Kec. Genteng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	86 Orang		N/A		86 Orang		86 Orang		86 Orang		-	-	86 Orang		86 Orang		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	80 orang		N/A		80 orang		0 orang		80 orang		-	-	80 orang		80 orang		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	178 Orang		N/A		178 Orang		0 Orang		39 Orang		-	-	39 Orang		39 Orang		21,91%		Kec. Jambangan
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	270 Orang		N/A		270 Orang		70 Orang		70 Orang		-	-	70 Orang		70 Orang		25,93%		Kec. Karangpilang
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 orang		N/A		150 orang		44 orang		44 orang		-	-	44 orang		44 orang		29,33%		Kec. Kenjeran
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 orang		N/A		150 orang		80 orang		80 orang		-	-	80 orang		80 orang		53,33%		Kec. Krembangan
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	322 Orang		N/A		322 Orang		0 Orang		72 Orang		-	-	72 Orang		72 Orang		22,36%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	120 orang		N/A		120 orang		120 orang		120 orang		-	-	120 orang		120 orang		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	50 Orang		N/A		50 Orang		50 Orang		50 Orang		-	-	50 Orang		50 Orang		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	120 orang		N/A		120 orang		79 orang		79 orang		-	-	79 orang		79 orang		65,83%		Kec. Pakal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	186 Orang		N/A		186 Orang		36 Orang		36 Orang		-	-	36 Orang		36 Orang		19,35%		Kec. Rungkut
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	88 Orang		N/A		88 Orang		85 Orang		85 Orang		-	-	85 Orang		85 Orang		96,59%		Kec. Sambikerep
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	91 orang		N/A		91 orang		91 orang		91 orang		-	-	91 orang		91 orang		100,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	285 Orang		N/A		285 Orang		379 Orang		379 Orang		-	-	379 Orang		379 Orang		132,98%		Kec. Semampir
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang		N/A		100 orang		100 orang		100 orang		-	-	100 orang		100 orang		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	220 Orang		N/A		220 Orang		98 Orang		98 Orang		-	-	98 Orang		98 Orang		44,55%		Kec. Sukolilo
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang		N/A		100 orang		78 orang		78 orang		-	-	78 orang		78 orang		78,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	250 orang		N/A		250 orang		100 orang		100 orang		-	-	100 orang		100 orang		40,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 Orang		N/A		200 Orang		200 Orang		200 Orang		-	-	200 Orang		200 Orang		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang		N/A		100 Orang		100 Orang		100 Orang		-	-	100 Orang		100 Orang		100,00%		Kec. Tegalsari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang		N/A		100 orang		100 orang		100 orang		-	-	100 orang		100 orang		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	75 orang		N/A		75 orang		75 orang		75 orang		-	-	75 orang		75 orang		100,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	110 Orang		N/A		110 Orang		123 Orang		123 Orang		-	-	123 Orang		123 Orang		111,82%		Kec. Wonocolo
				Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	102 Orang		N/A		102 Orang		102 Orang		102 Orang		-	-	102 Orang		102 Orang		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			138.836.407				195.641.078		33.183.000		67.288.402	-	-		100.471.402		100.471.402		51,35 %	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga		N/A		139 Lembaga		140 Lembaga		139 Lembaga		-	-	139 Lembaga		139 Lembaga		100,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		N/A		188 lembaga		188 lembaga		188 lembaga		-	-	188 lembaga		188 lembaga		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga		N/A		414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		-	-	414 Lembaga		414 Lembaga		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga		N/A		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		-	-	158 Lembaga		158 Lembaga		100,00%		Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	195 Lembaga		N/A		195 Lembaga		195 Lembaga		275 Lembaga		-	-	275 Lembaga		275 Lembaga		141,03%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga		N/A		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		-	-	197 Lembaga		197 Lembaga		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga		N/A		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		-	-	364 Lembaga		364 Lembaga		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga		N/A		480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		-	-	480 Lembaga		480 Lembaga		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga		N/A		217 Lembaga		217 Lembaga		217 Lembaga		-	-	217 Lembaga		217 Lembaga		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 lLmbaga		N/A		168 lLmbaga		168 lLmbaga		168 lLmbaga		-	-	168 lLmbaga		168 lLmbaga		100,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga		N/A		220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		-	-	220 Lembaga		220 Lembaga		100,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga		N/A		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		-	-	460 Lembaga		460 Lembaga		100,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga		N/A		431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		-	-	431 Lembaga		431 Lembaga		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga		N/A		205 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		-	-	205 Lembaga		205 Lembaga		100,00%		Kec. Lakarsantri

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga		N/A		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		-	-	346 Lembaga		346 Lembaga		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga		N/A		376 Lembaga		376 Lembaga		376 Lembaga		-	-	376 Lembaga		376 Lembaga		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga		N/A		229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		-	-	229 Lembaga		229 Lembaga		100,00%		Kec. Pakal
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		N/A		488 Lembaga		488 Lembaga		488 Lembaga		-	-	488 Lembaga		488 Lembaga		100,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		N/A		260 Lembaga		260 Lembaga		260 Lembaga		-	-	260 Lembaga		260 Lembaga		100,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga		N/A		627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		-	-	627 lembaga		627 lembaga		100,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga		N/A		636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		-	-	636 Lembaga		636 Lembaga		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga		N/A		356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		-	-	356 lembaga		356 lembaga		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga		N/A		439 Lembaga		439 Lembaga		439 Lembaga		-	-	439 Lembaga		439 Lembaga		100,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		N/A		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		-	-	323 Lembaga		323 Lembaga		100,00%		Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga		N/A		749 Lembaga		749 Lembaga		749 Lembaga		-	-	749 Lembaga		749 Lembaga		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga		N/A		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		-	-	371 lembaga		371 lembaga		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga		N/A		365 Lembaga		365 Lembaga		365 Lembaga		-	-	365 Lembaga		365 Lembaga		100,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga		N/A		185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		-	-	185 Lembaga		185 Lembaga		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga		N/A		211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		-	-	211 lembaga		211 lembaga		100,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga		N/A		280 Lembaga		280 Lembaga		280 Lembaga		-	-	280 Lembaga		280 Lembaga		100,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga		N/A		568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		-	-	568 Lembaga		568 Lembaga		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.02.03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			138.836.407				195.641.078		33.183.000		67.288.402		-	-	100.471.402		100.471.402		51,35 %	
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-	-	6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-	-	6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Benowo
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-	-	6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Bulak
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		1 Kali		-		-		1 Kali		1 Kali		8,33%		Kec. Gayungan
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Genteng
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali		N/A		12 kali		1 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Kec. Pakal
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Sambikerep

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Semampir
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali		N/A		12 kali		1 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali		N/A		12 kali		3 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Kec. Tandes
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		1 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali		N/A		12 kali		1 kali		6 kali		-		-		6 kali		6 kali		50,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		6 Kali		-		-		6 Kali		6 Kali		50,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			6.116.440				869.648		54.148		253.946		-		-		308.094		308.094		35,43 %	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Asemrowo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Benowo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		-		-		3 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50,00%		Kec. Bubutan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Bulak
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Bulak
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		-		-		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		83,33%		Kec. Bulak
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gayungan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Genteng
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		-		-		2 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		200,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gunung Anyar

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		600,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Jambangan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		-		-		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		83,33%		Kec. Jambangan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Karangpilang

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		-		-		3 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		0 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		-		-		2 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		33,33%		Kec. Krembangan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Lakarsantri

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		16,67%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Pakal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-	-	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Pakal
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Pakal
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		-	-	4 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		66,67%		Kec. Rungkut
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		-	-	5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		83,33%		Kec. Sambikerep
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		-	-	2 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		33,33%		Kec. Sawahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Semampir
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sukolilo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		-		-		4 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		66,67%		Kec. Sukolilo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		-		-		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		83,33%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-	-	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tandes
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		0 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		-	-	4 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		66,67%		Kec. Tegalsari
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-	-	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wiyung
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonokromo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-	-	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonokromo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.04 .03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**			435.359				283.713		24.707		90.041	-	-		114.748		114.748		40,45 %	
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Asemrowo
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Benowo
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Bubutan
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Bulak

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Gayungan
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		11 Laporan		12 Laporan		-		-		12 Laporan		12 Laporan		300,00%		Kec. Genteng
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-		-		2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-		-		2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Jambangan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Karangpilang
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		8 laporan		14 laporan		-	-	14 laporan		14 laporan		350,00%		Kec. Kenjeran
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		0 laporan		1 laporan		-	-	1 laporan		1 laporan		25,00%		Kec. Krembangan
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Pabean Cantian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Pakal
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Rungkut
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Sambikerep
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Sawahan
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Simokerto
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		10 laporan		11 laporan		-	-	11 laporan		11 laporan		275,00%		Kec. Sukolilo

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Tambaksari
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Tandes
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		-	-	1 Laporan		1 Laporan		25,00%		Kec. Tegalsari
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan		N/A		4 laporan		1 laporan		2 laporan		-	-	2 laporan		2 laporan		50,00%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		5 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		150,00%		Kec. Wiyung

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-	-	1 Laporan		1 Laporan		25,00%		Kec. Wonocolo
				Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		50,00%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.04.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**			5.207.603				253.738		14.275		104.026	-	-		118.301		118.301		46,62 %	
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1543 berkas		N/A		1543 berkas		1850 berkas		4614 berkas		-	-	4614 berkas		4614 berkas		299,03%		Kec. Asemrowo
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4440 berkas		N/A		4440 berkas		3419 berkas		5920 berkas		-	-	5920 berkas		5920 berkas		133,33%		Kec. Benowo
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2697 Berkas		N/A		2697 Berkas		708 Berkas		1025 Berkas		-	-	1025 Berkas		1025 Berkas		38,01%		Kec. Bubutan
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1983 Berkas		N/A		1983 Berkas		643 Berkas		1316 Berkas		-	-	1316 Berkas		1316 Berkas		66,36%		Kec. Bulak
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2559 berkas		N/A		2559 berkas		1111 berkas		2592 berkas		-	-	2592 berkas		2592 berkas		101,29%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2861 berkas		N/A		2861 berkas		1140 berkas		1944 berkas		-	-	1944 berkas		1944 berkas		67,95%		Kec. Gayungan
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2453 Berkas		N/A		2453 Berkas		1114 Berkas		616 Berkas		-	-	616 Berkas		616 Berkas		25,11%		Kec. Genteng
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 berkas		N/A		3254 berkas		846 berkas		1692 berkas		-	-	1692 berkas		1692 berkas		52,00%		Kec. Gubeng
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2107 berkas		N/A		2107 berkas		1135 berkas		2185 berkas		-	-	2185 berkas		2185 berkas		103,70%		Kec. Gunung Anyar

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4277 berkas		N/A		4277 berkas		1931 berkas		318 berkas		-		-		318 berkas		318 berkas		7,44%		Kec. Jambangan
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 Berkas		N/A		3254 Berkas		2349 Berkas		757 Berkas		-		-		757 Berkas		757 Berkas		23,26%		Kec. Karangpilang
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7044 berkas		N/A		7044 berkas		2586 berkas		796 berkas		-		-		796 berkas		796 berkas		11,30%		Kec. Kenjeran
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6060 berkas		N/A		6060 berkas		2938 berkas		6817 berkas		-		-		6817 berkas		6817 berkas		112,49%		Kec. Krembangan
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2923 berkas		N/A		2923 berkas		830 berkas		1611 berkas		-		-		1611 berkas		1611 berkas		55,11%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 berkas		N/A		4222 berkas		1713 berkas		6871 berkas		-		-		6871 berkas		6871 berkas		162,74%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2734 Berkas		N/A		2734 Berkas		1561 Berkas		553 Berkas		-		-		553 Berkas		553 Berkas		20,23%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3797 Berkas		N/A		3797 Berkas		1271 Berkas		2411 Berkas		-		-		2411 Berkas		2411 Berkas		63,50%		Kec. Pakal
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3612 berkas		N/A		3612 berkas		815 berkas		2922 berkas		-		-		2922 berkas		2922 berkas		80,90%		Kec. Rungkut
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 Berkas		N/A		4222 Berkas		2318 Berkas		6291 Berkas		-		-		6291 Berkas		6291 Berkas		149,01%		Kec. Sambikerep
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6365 berkas		N/A		6365 berkas		3107 berkas		6907 berkas		-		-		6907 berkas		6907 berkas		108,52%		Kec. Sawahan
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7927 Berkas		N/A		7927 Berkas		4028 Berkas		5365 Berkas		-		-		5365 Berkas		5365 Berkas		67,68%		Kec. Semampir
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6249 Berkas		N/A		6249 Berkas		10001 Berkas		10428 Berkas		-		-		10428 Berkas		10428 Berkas		166,87%		Kec. Simokerto
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4622 berkas		N/A		4622 berkas		2007 berkas		3488 berkas		-		-		3488 berkas		3488 berkas		75,47%		Kec. Sukolilo
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5921 berkas		N/A		5921 berkas		1386 berkas		2428 berkas		-		-		2428 berkas		2428 berkas		41,01%		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5991 berkas		N/A		5991 berkas		3524 berkas		7399 berkas		-		-		7399 berkas		7399 berkas		123,50%		Kec. Tambaksari

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3831 berkas		N/A		3831 berkas		319 berkas		320 berkas		-		-		320 berkas		320 berkas		8,35%		Kec. Tandes
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4140 Berkas		N/A		4140 Berkas		1048 Berkas		518 Berkas		-		-		518 Berkas		518 Berkas		12,51%		Kec. Tegalsari
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2685 berkas		N/A		2685 berkas		672 berkas		1342 berkas		-		-		1342 berkas		1342 berkas		49,98%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3324 berkas		N/A		3324 berkas		1867 berkas		3772 berkas		-		-		3772 berkas		3772 berkas		113,48%		Kec. Wiyung
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2763 Berkas		N/A		2763 Berkas		1675 Berkas		3627 Berkas		-		-		3627 Berkas		3627 Berkas		131,27%		Kec. Wonocolo
				Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5758 Berkas		N/A		5758 Berkas		1968 Berkas		3934 Berkas		-		-		3934 Berkas		3934 Berkas		68,32%		Kec. Wonokromo
		7.01.02.2.04.01	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**			473.478				332.197		15.167		59.879		-		-		75.045		75.045		22,59 %	
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	12 berkas		N/A		494 berkas		12 berkas		30 berkas		-		-		30 berkas		30 berkas		6,07%		Kec. Asemrowo
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	15 berkas		N/A		618 berkas		23 berkas		37 berkas		-		-		37 berkas		37 berkas		5,99%		Kec. Benowo
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	40 Berkas		N/A		741 Berkas		6 Berkas		16 Berkas		-		-		16 Berkas		16 Berkas		2,16%		Kec. Bubutan
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	25 Berkas		N/A		618 Berkas		52 Berkas		72 Berkas		-		-		72 Berkas		72 Berkas		11,65%		Kec. Bulak
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	15 Berkas		N/A		618 Berkas		21 Berkas		39 Berkas		-		-		39 Berkas		39 Berkas		6,31%		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	48 berkas		N/A		618 berkas		28 berkas		119 berkas		-		-		119 berkas		119 berkas		19,26%		Kec. Gayungan
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	25 berkas		N/A		741 berkas		5 berkas		2 berkas		-		-		2 berkas		2 berkas		0,27%		Kec. Genteng
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	30 berkas		N/A		865 berkas		19 berkas		47 berkas		-		-		47 berkas		47 berkas		5,43%		Kec. Gubeng

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	30 berkas		N/A		618 berkas		38 berkas		132 berkas		-	-	132 berkas		132 berkas		21,36%		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	16 Berkas		N/A		618 Berkas		78 Berkas		35 Berkas		-	-	35 Berkas		35 Berkas		5,66%		Kec. Jambangan
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	48 berkas		N/A		618 berkas		23 berkas		6 berkas		-	-	6 berkas		6 berkas		0,97%		Kec. Karangpilang
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	40 berkas		N/A		618 berkas		43 berkas		22 berkas		-	-	22 berkas		22 berkas		3,56%		Kec. Kenjeran
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	30 berkas		N/A		741 berkas		16 berkas		56 berkas		-	-	56 berkas		56 berkas		7,56%		Kec. Krembangan
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	50 berkas		N/A		685 berkas		9 berkas		28 berkas		-	-	28 berkas		28 berkas		4,09%		Kec. Lakarsantri
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	30 berkas		N/A		865 berkas		15 berkas		153 berkas		-	-	153 berkas		153 berkas		17,69%		Kec. Mulyorejo
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	12 Berkas		N/A		741 Berkas		6 Berkas		5 Berkas		-	-	5 Berkas		5 Berkas		0,67%		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	20 berkas		N/A		618 berkas		15 berkas		31 berkas		-	-	31 berkas		31 berkas		5,02%		Kec. Pakal
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	48 Berkas		N/A		865 Berkas		66 Berkas		35 Berkas		-	-	35 Berkas		35 Berkas		4,05%		Kec. Rungkut
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	38 Berkas		N/A		618 Berkas		3 Berkas		17 Berkas		-	-	17 Berkas		17 Berkas		2,75%		Kec. Sambikerep
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	12 berkas		N/A		865 berkas		214 berkas		334 berkas		-	-	334 berkas		334 berkas		38,61%		Kec. Sawahan
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	14 Berkas		N/A		741 Berkas		3 Berkas		9 Berkas		-	-	9 Berkas		9 Berkas		1,21%		Kec. Semampir
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	20 Berkas		N/A		741 Berkas		14 Berkas		26 Berkas		-	-	26 Berkas		26 Berkas		3,51%		Kec. Simokerto
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	15 berkas		N/A		988 berkas		40 berkas		72 berkas		-	-	72 berkas		72 berkas		7,29%		Kec. Sukolilo
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	30 Berkas		N/A		865 Berkas		9 Berkas		30 Berkas		-	-	30 Berkas		30 Berkas		3,47%		Kec. Sukomanunggal

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	48 berkas		N/A		1112 berkas		16 berkas		39 berkas		-		-		39 berkas		39 berkas		3,51%		Kec. Tambaksari
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	30 berkas		N/A		865 berkas		2 berkas		8 berkas		-		-		8 berkas		8 berkas		0,92%		Kec. Tandes
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	12 Berkas		N/A		741 Berkas		7 Berkas		9 Berkas		-		-		9 Berkas		9 Berkas		1,21%		Kec. Tegalsari
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	40 berkas		N/A		618 berkas		0 berkas		28 berkas		-		-		28 berkas		28 berkas		4,53%		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	12 berkas		N/A		618 berkas		5 berkas		43 berkas		-		-		43 berkas		43 berkas		6,96%		Kec. Wiyung
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	48 Berkas		N/A		741 Berkas		13 Berkas		37 Berkas		-		-		37 Berkas		37 Berkas		4,99%		Kec. Wonocolo
				Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	25 Berkas		N/A		865 Berkas		70 Berkas		96 Berkas		-		-		96 Berkas		96 Berkas		11,10%		Kec. Wonokromo
		8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																					
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																					
142	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			14.375.109		4.598.843		11.643.088		1.101.624		1.984.896		-		-		3.086.520		3.086.520		26,51 %	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		N/A		100%		93,59%		93,67%		-		-		93,67%		93,67%		93,67%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			9.120.103				8.148.820		374.170		389.177		-		-		763.347		763.347		9,37%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.02 .01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			9.120.103				8.148.820		374.170		389.177		-		-		763.347		763.347		9,37%	
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			191.802				178.809		32.907		74.633		-		-		107.541		107.541		60,14 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		N/A		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			191.802				178.809		32.907		74.633		-		-		107.541		107.541		60,14 %	
				Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			5.063.203				3.315.459		694.547		1.521.085		-		-		2.215.632		2.215.632		66,83 %	
				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.063.203				3.315.459		694.547		1.521.085		-		-		2.215.632		2.215.632		66,83 %	
				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		N/A		100%		100%		0%		-		-		0%		0%		0,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
143	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			846.659		45.600		800.538		70.717		202.992		-		-		273.709		273.709		34,19 %	
				Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94%		N/A		90%		38,33%		14,20%		-		-		14,20%		14,20%		15,78%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			846.659				800.538		70.717		202.992		-		-		273.709		273.709		34,19 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	317 Orang		N/A		317 Orang		60 Orang		162 Orang		-	-	162 Orang		162 Orang		51,10%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.02.2.01.04	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			846.659				800.538		70.717		202.992	-	-		273.709		273.709		34,19 %	
				Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Kali		N/A		12 Kali		3 Kali		7 Kali		-	-	7 Kali		7 Kali		58,33%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
144	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			8.317.287		8.214.450		8.342.439		37.371		73.261	-	-		110.632		110.632		1,33%	
				Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%		N/A		23%		8,46%		17,33%		-	-	17,33%		17,33%		75,35%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			8.317.287				8.342.439		37.371		73.261	-	-		110.632		110.632		1,33%		
				Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga		N/A		60 Lembaga		32 Lembaga		92 Lembaga	-	-		92 Lembaga		92 Lembaga		153,33%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03.2.01 .04	**Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			8.317.287				8.342.439		37.371		73.261	-	-		110.632		110.632		1,33%		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	140 Orang		N/A		120 Orang		100 Orang		154 Orang		-	-	154 Orang		154 Orang		128,33%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
145	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			59.370		11.000		48.746		3.750		19.934	-	-		23.684		23.684		48,59 %	
				Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	100%		N/A		20%		100%		100%		-	-	100%		100%		500,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			59.370				48.746		3.750		19.934	-	-		23.684		23.684		48,59 %	
				Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	30 Lembaga		N/A		31 Lembaga		15 Lembaga		31 Lembaga		-	-	31 Lembaga		31 Lembaga		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04.2.01 .05	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			59.370				48.746		3.750		19.934	-	-		23.684		23.684		48,59 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah frekuensi pengawasan dan/atau pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	2 kali		N/A		2 kali		0 kali		1 kali		-	-	1 kali		1 kali		50,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
146	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			823.293		644.615		651.667		143.890		298.365	-	-		442.255		442.255		67,87 %	
				Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%		N/A		100%		0%		8,33%		-	-	8,33%		8,33%		8,33%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			823.293				651.667		143.890		298.365	-	-		442.255		442.255		67,87 %	
				Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	9 Lembaga		N/A		9 Lembaga		8 Lembaga		10 Lembaga		-	-	10 Lembaga		10 Lembaga		111,11%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			823.293				651.667		143.890		298.365	-	-		442.255		442.255		67,87 %	
				Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42 Kali		N/A		42 Kali		21 Kali		32 Kali		-	-	32 Kali		32 Kali		76,19%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
147	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			12.624.896		8.650.577		8.541.566		1.934.327		4.658.814	-	-		6.593.141		6.593.141		77,19 %	
				Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		100%		100%		-	-	100%		100%		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		100%		99,27%		-	-	99,27%		99,27%		99,27%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			12.624.896				8.541.566		1.934.327		4.658.814	-	-		6.593.141		6.593.141		77,19 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	11 Lembaga		N/A		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		-	-	11 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	10 Lembaga		N/A		10 Lembaga		10 Lembaga		23 Lembaga		-	-	23 Lembaga		23 Lembaga		230,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06.2.01.04	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**			11.875.472				8.067.440		1.840.994		4.439.925		-	-		6.280.920		6.280.920		77,86 %	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	182 Kali		N/A		182 Kali		130 Kali		227 Kali		-	-	227 Kali		227 Kali		124,73%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		8.01.06.2.01.05	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**			749.424				474.125		93.333		218.889		-		-		312.222		312.222		65,85 %		
				Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.	66 Kali		N/A		66 Kali		18 Kali		34 Kali		-		-		34 Kali		34 Kali		51,52%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-rata capaian kinerja (%)											**55,49%**	**9,04%**	**66,96%**	**22,01%**					**66,96%**	**22,01%**					
Predikat Kinerja											**Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sedang**	**Sangat Rendah**					**Sedang**	**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
- Tersedianya aturan dan SOP yang mendasari pelayanan kepada masyarakat.
- Adanya monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan.
- Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan koordinasi dapat dilakukan melalui media daring.
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi pusat maupun jajaran samping dalam rangka mensukseskan kegiatan.
- Adanya kerjasama yang baik antar elemen di dalam Pemerintah Kota Surabaya.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
- Adanya Surat Edaran Bersama No. 027/2929/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang untuk pengadaan barang agar sesuai dengan ketentuan.
- Adanya beberapa kegiatan yang baru dilaksanakan mulai triwulan III.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
Perlu dilakukan identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan penjadwalan ulang karena adanya Surat Edaran Bersama agar bisa dilaksanakan tepat waktu.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya berikutnya *) :
Perlu dilakukan identifikasi detil strategi/metode pelaksanaan kegiatan di awal, agar kegiatan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Semester I Tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19;
2. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19;
3. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka sebagai dampak pandemi Covid-19;
4. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting;
5. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
6. Masih perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.
7. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
8. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase;
9. Belum optimalnya kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
10. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
11. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan;
12. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
13. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
14. Masih ditemukannya pelanggaran Perda dan kejadian gangguan ketentraman umum;

15. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
16. Masih perlunya pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi;
2. Masih belum optimalnya ketersediaan guru yang sesuai antara kualifikasi mata pelajaran dengan ijazah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dikarenakan adanya Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah;
4. Masih terdapat lembaga yang masa berlaku ijin operasionalnya telah berakhir sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BOP;
5. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan lembaga PAUD/TK;
6. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
2. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar;
4. Masih perlunya peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi;
6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan;
7. Perlunya pembangunan rumah sakit untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Surabaya Timur dan/atau Utara;

8. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan;
9. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang;
10. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;
2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
3. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan / atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta ;
4. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota;
5. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal;
6. Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU, sehingga perlunya pemanfaatan energi alternartif untuk mengurangi beban biaya listrik pada PJU.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
3. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
4. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Bencana dan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani);
2. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan;
3. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Perlunya pemutakhiran data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala;
2. Belum optimalnya proses reunifikasi diakibarkan adanya PPKM di daerah asal PMKS;
3. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi;
4. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi Covid- 19;
2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
3. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan;
4. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja;
5. Pengawasan ketenagakerjaan. perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan;
2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak;
3. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat;
2. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan;
3. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya;
3. Belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau;
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan;
5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi;
6. Menurunnya kualitas air baku kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air;
7. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan

adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk lahir dan penduduk meninggal yang belum dicatatkan untuk memperoleh akte kelahiran / akte kematian;
2. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online*.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP);
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya;
2. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Perlunya optimalisasi penggunaan ePeken oleh masyarakat untuk meningkatkan akses pemasaran produk UMKM dan toko kelontong;
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM;
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;

4. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional.

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk;
2. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.

2.3.2.18 Statistik

1. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi.

2.3.2.19 Persandian

1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.2.20 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal;
2. Perlunya fasilitasi kelompok seni untuk dapat tampil di fasilitas publik;
3. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

2.3.2.24 Pariwisata

1. Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi covid-19;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata;
3. Masih belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata;
4. Menurunnya jumlah kegiatan seni dan budaya sebagai dampak pandemi covid-19.

2.3.2.25 Pertanian

1. Masih kurang optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian *(urban farming),* peternakan dan perikanan;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan;
3. Perlunya penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Perlunya optimalisasi pengoperasioan sentra dan pasar;
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah;
3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena masa pemulihan akibat dampak Covid- 19;

2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pendapatan dari dana perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala;
3. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di kecamatan dan kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan munculnya krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian Nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru Covid-19, *permanent scar* yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi. Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi

kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Tahun 2022 merupakan tahun untuk memulai akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal *(herd immunity)* pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2022, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri *(within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi *(between sectors).* Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

Dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh

lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha Penuntasan krisis kesehatan.

Terkendalinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal. Pemberiau bautuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri. Pemberian bantuan untuk menJaga daya beli mmah tangga. Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

(2) Diversifikasi Ekonomi,

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan food estate. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (green recouery). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Struktural,

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada tahun 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan

implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (future of workl, dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Kebijakan ekonomi dalam RKP 2022 diarahkan pada Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan yang dilakukan melalui :

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target kebijakan perekonomian nasional untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,5 persen-6,3 persen. TPT pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan Februari 2021. Penurunan ini disumbang oleh peningkatan penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebesar 4,55 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37 persen). Capaian target TPT pada bulan Februari 2022 ini berada di kisaran target kebijakan perekonomian nasional sehingga diprediksi TPT pada tahun 2022 sesuai dengan target kebijakan perekonomian nasional.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan yang diukur melalui persentase penduduk miskin pada tahun 2022 ditargetkan berada di kisaran 8,5 persen-9 persen. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, turun 0,17 persen terhadap September 2021 dan menurun 0,6 persen terhadap Maret 2021. Capaian pada bulan Maret 2022 ini masih belum berada di kisaran target yang telah ditetapkan secara nasional, akan tetapi terus menunjukkan tren penurunan sejak Maret 2021.

c. Indeks Gini

Indeks Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada tahun 2022 ditargetkan berada di kisaran 0,376-0,378. Pada

Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,384, sedikit meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini September 2021 sebeasr 0,381, namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Maret 2021 yaitu sebesar 0,384. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, diperkirakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada akhir tahun 2022 dapat memenuhi target kebijakan nasional.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Indonesia pada tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin dibandingkan tahun 2020 (71,94). Peningkatan IPM 2021 terjadi di seluruh dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020 dimana peningkatan IPM 2020 hanya didukung oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Selama 2010-2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76. Dengan target kebijakan nasional untuk IPM di kisaran 73,41-73,46 serta kondisi pembangunan manusia yang diharapkan terus membaik pasca pandemi, diprediksi IPM Indonesia pada tahun 2022 dapat berada di kisaran target yang telah ditetapkan.

e. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Indonesia pada bulan Juni 2022 sebesar 105,96 atau naik 0,52 persen dibandingkan bulan Mei 2022. Akan tetapi, NTP ini menurun dibandingkan posisi Desember 2021 sebesar 2,38 persen (108,34). Dengan target kebijakan nasional untuk NTP di kisaran 103-105, diprediksi NTP pada tahun 2022 masih sesuai dengan target kebijakan nasional.

f. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN Indonesia secara rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar 107,07. Angka ini masih lebih tinggi dibanding kisaran target NTN tahun 2022 yaitu di angka 104-106. Dengan kondisi harga komoditas pertanian serta perikanan yang terus membaik seiring pemulihan ekonomi di Indonesia serta meningkatnya daya beli nelayan di Indonesia, diperkirakan capaian indikator NTN tahun 2022 akan sesuai dengan target kebijakan perekonomian nasional.

Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh 3,57% (yoy) atau meningkat dibandingkan 2020 yang tumbuh sebesar -2,33% (yoy). Secara umum, pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2021 seiring berkurangnya kasus Covid-19 dan percepatan vaksinasi Covid-19 mendorong kenaikan mobilitas masyarakat dan dibukanya sektor ekonomi produktif. Hal tersebut mendorong peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global juga turut mendorong masih kuatnya permintaan eksternal yang tercermin dari masih positifnya ekspor luar negeri Jawa Timur pada tahun 2021. Perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal tersebut, serta berlanjutnya proyek strategis Jawa Timur menopang perbaikan pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2021. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh mayoritas lapangan usaha , termasuk lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Konstruksi sebagai respon atas perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategis pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Selain itu Nawa Bhakti Satya sebagai penjabaran program prioritas pembangunan daerah juga akan menjadi bagian dari rencana aksi pembangunan ekonomi Jawa Timur. Di sisi lain dengan diterbitkan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di empat Kawasan (Gresik – Bangkalan – Mojokerto -Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan) diharapkan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya alam yang memadai, mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan infrastruktur dan menjadi akselerator pembangunan Jawa Timur di tahun 2020 dan 2021. Terdapat sekitar 218 proyek strategis yang masuk dalam Perpres nomor 80/2019 yang tersebar di empat kawasan tersebut dengan nilai

investasi sekitar Rp 292,453 triliun. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya *strong partnership* antara dunia usaha dan dunia industri. Di sisi lain perluasan penyebaran pandemi Covid-19 memberikan efek domino khususnya aspek social dan ekonomi. Krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat serta keterbatasan alat dan tenaga medis menjadi pertimbangan bahwa krisis ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Memperhatikan kondisi tersebut serta dilatarbelakangi beberapa uraian diatas, maka perlu dipersiapkan mitigasi kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, safe dan secure dari pandemi melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kebijakan ekonomi makro yaitu dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang harus terjaga yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan di Provinsi Jawa Timur.
2. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
3. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak musim kemarau, memastikan petani untuk bekerja, rantai pasok online dan logistic pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
4. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program padat karya, ketersediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.
5. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak Covid-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.
6. Pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM

melalui optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM, perluasan akses pembiayaan dari berbagai sumber alternatif pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, penguatan kolaborasi dan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.

7. Sektor pariwisata diarahkan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui rebranding pariwisata di era New Normal yang didukung peningkatan aksesibilitas, amenitas dan atraksi pendukung pariwisata, peningkatan wisatawan domestik, pemenuhan protocol kesehatan (prinsip hygiene, health, secure dan safety) di destinasi serta bagi pelaku industri pariwisata, peningkatan pemasaran wisata, kebijakan insentif pariwisata.
8. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022, terdapat beberapa target kebijakan perekonomian provinsi yang telah ditetapkan. Telaah terhadap target arah kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Timur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Timur Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan IV-2021 meningkat sebesar 0,75 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 12,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 24,61 persen. Selain itu, secara *year on year,* Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan I-2021 meningkat sebesar 5,20 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 18,79 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertnggi terjadi pada

Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 35,97 persen. Dengan melihat capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2022 yang menunjukkan adanya keberlanjutan pemulihan ekonomi, maka target capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada rentang 3,42-5,12 persen diperkirakan dapat tercapai.

b. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 10,38 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 1,02 persen poin terhadap Maret 2021. Capaian Maret 2022 telah melebihi target indikator yang berada di rentang 10,39-10,96. Dengan tren persentase penduduk miskin yang terus menurun sejak 2021, diperkirakan capaian indikator ini akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur.

c. Indeks Gini

Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,371. Angka ini naik 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,364 dan turun 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,374. Angka capaian pada bulan Maret 2022 ini masih lebih tinggi dibandingkan target yang tertuang dalam RKPD Jawa Timur 2023 yaitu di interval 0,3682-0,3677. Pergerakan indeks gini diperkirakan akan terus bervariasi terutama pasca pandemi Covid-19 dan terus berlanjut hingga akhir tahun 2022.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 atau tumbuh 0,60 persen poin (meningkat 0,43 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Seiring dengan perekonomian yang terus bergerak kearah pemulihan, pada tahun 2022 IPM diperkirakan akan Kembali naik kearah target yang telah ditetapkan.

e. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,81 persen,

turun 0,36 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021, tapi naik 1,57 persen poin dibandingkan dengan Februari 2020. Apabila dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19, Terdapat 1,64 juta orang (5,04 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (116,65 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (67,97 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (81,76 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (1,37 juta orang). Walaupun masih tergolong tinggi, kondisi TPT Jawa Timur saat ini masih berada pada rentang target TPT pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur yaitu 5,42-3,83 persen.

Perkembangan kondisi perekonomian baik secara Nasional maupun lingkup Provinsi Jawa Timur juga membawa pengaruh terhadap kondisi serta arah kebijakan di Kota Surabaya khususnya di fase *recovery* pasca pandemi. Seiring dengan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif sehingga tahun 2021 ekonomi tumbuh pada angka 4,29%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum diiringi oleh perbaikan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka 9,68% dan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi 5,23%. Indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Surabaya, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selama tahun 2021 PDRB ADHB dan ADHK mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut,

Arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1) **Pemulihan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan.** Ekonomi kerakyatan dilakukanmelalui program padat karya guna memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai segmen yang paling terdampak pandemi Covid-19, peningkatan sektor pariwisata melalui pengembangan obyek potensial wisata dan penataan kawasan pariwisata yang terintegasi guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Surabaya serta Mendorong peningkatan daya saing UMKM

melalui Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian kota Surabaya.

2) **APBD dilaksanakan dengan adaptif,** apabila dibutuhkan penanganan lebih khusus terhadap pandemi Covid-19 maka akan dilakukan *refocusing* anggaran, sedangkan belanja produktif pada sektor infrastruktur akan kembali disesuaikan apabila pandemi Covid-19 dapat teratasi;

3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada sektor Kesehatan namun juga sektor sosial lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan Pendidikan, Kesehatan dan sosial. Intervensi yang dilakukan pada ketiga sektor ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan SDM yang berdaya saing sehingga dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Anggaran pendidikan dialokasikan lebih dari 20% sesuai dengan ketentuan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan, Anggaran kesehatan dianggarkan lebih dari 10% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;

4) **Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas** dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2022 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan diharapkan dapat mendorong pembangunan yang maju dengan mengutamakan lingkungan yang tetap lestari serta mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan perubahan iklim

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 sampai dengan 2021

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Tabel III.1 terlihat bahwa perekonomian Kota Surabaya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya, terkecuali di tahun 2020. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menunjukkan peningkatan dan sedikit mengalami kontraksi di tahun 2020. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh pelemahan kinerja perekonomian secara keseluruhan akibat penyebaran pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Berbagai kebijakan lintas sektoral diupayakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus lebih luas. Dampak perbaikan ekonomi Kota Surabaya sebagai hasil keberhasilan penanganan Covid-19 juga terindikasi dari kinerja PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya tumbuh positif kembali ditahun 2021. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021 secara keseluruhan meningkat dibanding tahun 2020. Kinerja seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami perbaikan selama tahun 2021. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai dampak menurunnya kasus Covid19 sehingga mendorong kembali meningkatnya mobilitas masyarakat dan kembali terbukanya sektor-sektor ekonomi produktif.

Pada tahun 2021, PDRB Kota Surabaya mencapai Rp590.227.966,80 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kota Surabaya didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor masih memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kota Surabaya. Pada tahun 2021, PDRB lapangan usaha kategori ini sebesar Rp163.509.913,20 juta, diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar Rp113.544.581,10 juta. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB sebesar Rp91.418.079,70 juta..

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2017 - Tahun 2021 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,33	913.363,56	928.398,16	889.331,91	917.595,54
B	Pertambangan dan Penggalian	30.638,64	32.568,38	33.531,33	31.943,80	32.761,30
C	Industri Pengolahan	92.745.070,08	101.191.064,52	109.205.137,20	107.416.294,34	113.544.581,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,02	2.311.134,20	2.362.300,29	2.237.615,57	2.417.167,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,38	771.856,00	791.147,83	824.951,94	872.320,90
F	Konstruksi	49.603.60,37	52.920.129,31	54.649.310,30	51.969.408,77	55273538,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.322.725,10	149.052.226,45	161.032.248,06	149.246.755,05	163.509.913,20
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,76	28.811.194,17	31.240.415,60	29.794.090,41	30.520.260,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,92	87.067.932,46	95.519.341,84	85.618.582,64	91.418.079,70
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,77	28.390.748,22	30.770.585,80	33.247.669,54	35.273.340,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,09	28.140.646,05	29.413.339,89	29.183.377,44	30.560.741,60
L	Real Estate	12.495.064,18	13.775.255,11	14.947.568,30	15.354.350,85	15.790.323,10
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,21	13.571.273,11	14.930.184,77	14.116.912,06	14.543.158,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	7.345.115,74	8.054.990,77	8.238.304,23	8.310.975,30
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,23	12.897.475,91	14.007.607,77	14.540.365,94	14.682.371,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,94	4.053.612,67	4.443.228,45	4.880.587,79	5.220.638,20
R,S,T, U	Jasa lainnya	6.995.936,81	7.599.869,06	8.159.192,66	6.918.915,11	7.340.199,70
	Produk Domestik Regional Bruto	**493.026.304,54**	**538.845.464,92**	**580.448.529,01**	**554.509.457,38**	**590.227.966,80**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022 Catatan : *) data sementara*

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2017 - 2021 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,43	581.426,57	576.221,53	547.994,90	554.054,70
B	Pertambangan dan Penggalian	20.544,80	20.762,58	20.782,09	19.464,04	19.479,80
C	Industri Pengolahan	69.881.287,92	73.322.747,38	77.271.868,81	76.384.521,77	79.366.597,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,01	1.540.006,38	1.546.272,08	1.449.668,99	1.538.145,90
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	564.406,83	583.121,24	605.979,60	630.336,37	665.833,70
F	Konstruksi	36.208.179,04	38.480.421,60	40.576.452,62	38.387.739,29	40.070.071,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,79	109.848.223,51	116.305.502,48	106.340.867,71	114.183.332,30
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,22	19.046.861,58	20.497.977,43	19.477.422,82	19.875.912,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,21	58.411.739,39	62.898.688,76	56.053.239,21	57.221.633,10
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,33	25.613.455,86	27.531.903,71	29.511.280,46	31.281.790,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,04	18.541.116,14	19.187.832,54	19.231.210,98	19.324.709,70
L	Real Estate	9.610.228,83	10.165.858,67	10.784.959,46	11.000.304,15	11.179.684,10
M.N	Jasa Perusahaan	8.278.199,91	8.867.969,79	9.474.538,92	8.801.216,28	8.974.255,50
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,29	4.697.025,94	4.867.861,44	4.754.525,35	4.748.920,20
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,66	9.064.164,83	9.668.100,19	9.934.443,75	9.993.043,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,21	3.023.591,50	3.254.593,89	3.539.299,11	3.722.145,30
R.S.T.U	Jasa lainnya	5.224.596,95	5.495.449,09	5.821.770,58	4.872.889,81	5.007.190,10
	Produk Domestik Regional Bruto	**364.714.819,48**	**387.303.942,07**	**410.879.306,14**	**390.936.424,98**	**407.726.799,20**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya. diolah.2022 Catatan : *) data sementara*

Pola PDRB atas dasar harga konstan Kota Surabaya saat ini sama dengan pola PDRB atas dasar harga berlaku. Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp390.936.424,98 juta dan hingga akhir tahun 2021 nilai PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp407.726.799,20 juta. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnnya, yaitu sebesar Rp 114.183.332,30 juta. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Industri Pengolahan dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp79.366.597,60 juta, serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB sebesar Rp57.221.633,10 juta.

b. Sumbangan Sektoral

Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat pergesaran besaran peran dari sektor pembentuk ekonomi Kota Surabaya yang terus berkembang menuju perekonomian perdagangan dan jasa. Semakin berkurangnya peran sektor-sektor primer secara berlahan dan sebaliknya semakin besarnya peran sektor tersier terhdap perekonomian Kota Surabaya menjadi indikasi perubahan struktur perekomian Kota Surabaya secara perlahan. Hal itu ditandai oleh semakin kecilnya nilai tambah yang dihasilkan khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian akibat semakin terbatasnya lahan pertanian yang tersedia di Kota Surabaya.

Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Berdasarakan data BPS Kota Surabaya, nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor hingga tahun 2021 sebesar 28,00 persen, lebih tinggi dibanding peranan selama tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di tahun 2021 mengalami peningkatan. Tumbuhnya sektor ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang mulai kembali normal dengan diberlakukannya kebijakan *new normal* oleh pemerintah mendorong meningkatnya

kembali konsumsi masyarakat akibat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian kedepan yang semakin membaik. Selanjutnya membaiknya kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor akan mendorong tumbuhnya lapangan usaha industri pengolahan. Ditambah lagi, perbaikan ekonomi mitra dagang domestik maupun luar negeri turut mendorong kinerja industri pengolahan.

Lapangan usaha yang memberikan peran tertinggi selanjutnya yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Prospek peningkatan kinerja lapangan usaha ini sejalan dengan perluasan program vaksinasi yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor bisnis dan pariwisata dengan protokol kesehatan diindikasi berdampak terhadap peningkatan sektor ini. Kebijakan pelonggaran PPKM juga membuat aktivitas lapangan usaha ini seperti kegiatan operasional hotel dan restoran dengan pembatasan kapasitas maksimal menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan sektor ini tumbuh lebih tinggi.

Lapangan usaha yang terus menunjukkan peningkatan peran terhadap perekonomian Kota Surabaya yakni sektor informasi dan komunikasi. Semakin berkembang pesatnya perkembangan Kota Surabaya sebagai kota bisnis, peran sektor ini sebagai penunjang berbagai aktivitas masyarakat cukup signifikan. Ditambah lagi, peran sektor ini semakin besar ketika pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat karna menjadi kebutuhan utama disaat aktivitas *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH).

Sektor konstruksi juga terus memberikan kontribusi tinggi. Semakin banyaknya perbaikan fisik Kota Surabaya seiring maraknya permintaan akan hunian, objek pendukung sektor pariwisata dan perjalanan bisnis seperti hotel, convention hall, maupun tempat hiburan sebagai imbas resiko urbanisasi maupun pusat perjalanan bisnis menjadikan sektor kontruksi masih berperan tinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Lebih lanjut, masih berlanjutnya pembangunan proyek – proyek strategis dengan protokol kesehatan mendorong perbaikan kinerja Konstruksi di Kota Surabaya.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 – 2021
(dalam persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
		Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
C	Industri Pengolahan	19,16	18,93	18,81	19,54	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,40	0,38	0,37	0,38
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,93	9,94	9,88	9,82	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,32	28,36	28,31	27,20	28,00
H	Transportasi dan Pergudangan	4,86	4,92	4,99	4,98	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,86	15,08	15,31	14,34	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	6,57	6,61	6,70	7,55	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,85	4,79	4,67	4,92	4,74
L	Real Estate	2,63	2,62	2,62	2,81	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	2,27	2,29	2,31	2,25	2,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,21	1,18	1,22	1,16
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,34	2,35	2,54	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,79	0,91	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,43	1,42	1,42	1,25	1,23
	Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaydiolah, 2022
*Catatan : *) data sementara*

c. Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama ini tumbuh tinggi pada kisaran angka rata-rata diatas 6 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sebesar 6,13, hingga tahun 2019, capaian pertumbuhan masih diangka 6 persen. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perekonomian Kota Surabaya mengalami kontraksi sebesar 4,85 persen, yang jauh lebih rendah dari target awal, yaitu tumbuh pada kisaran 6,3 - 6,8 persen, Hal tersebut disebabkan oleh besarnya dampak pandemi yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas manusia di berbagai aspek, Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan melambat seiring menurunnya permintaan sebagai imbas menurunnya daya beli masyarakat, Terjadinya pandemi Covid-19 juga diperkirakan berimbas terhadap kinerja

investasi serta aktivitas ekspor impor, Dari sisi sektoral, dampak negatif Covid-19 diperkirakan berimbas terhadap hampir seluruh sektor lapangan usaha, Namun perlambatan yang lebih dalam terjadi utamanya pada sektor utama Kota Surabaya seperti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, kontruksi serta sektor jasa, Dari sisi tenaga kerja, menurunnya kinerja perekonomian juga berdampak terhadap banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya.

Selama tahun 2020, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor mengalami perlambatan akibat konsumsi masyarakat yang menurun yang selanjutnya berdampak terhadap menurunnya pemintaan akan barang dan jasa yang selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja sektor industri, Sementara penurunan kinerja akomodasi, makan dan minum, jasa hiburan serta wisata (wisata belanja) dipengaruhi oleh penurunan kunjungan wisata dan aktivitas bepergian sebagai imbas pemberlakuan social distancing dan work from home, sehingga menekan mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain, Kebijakan social distancing telah mengubah kebiasaan masyarakat yang semula sering melakukan wisata kuliner dengan melakukan dine in atau makan di tempat berubah menjadi permintaan delivery (take away), Pembatasan aktivitas bepergian tersebut tentunya juga berdampak terhadap kinerja sektor transportasi,

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha jasa kesehatan dan lapangan usaha komunikasi dan informasi, Kedua lapangan usaha tersebut diperkirakan masih bertahan di tengah besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Tingginya akan permintaan jasa kesehatan seperti jasa perawatan, obat-obatan serta alat kesehatan sebagai bentuk penanganan Covid-19 menjadi faktor utama, Begitu pula dengan tingginya permintaan akan kebutuhan kuota internet selama masa bekerja dan belajar di rumah turut meningkatkan kinerja lapangan usaha komunikasi dan informasi, Dengan melihat hal tersebut di atas, utamanya akibat dampak pandemi Covid-19 yang cukup besar, maka perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami kontraksi.

Ditengah masih berlangsungnya pandemi hingga saat ini, perekonomian Kota Surabaya terus menunjukkan perbaikan secara bertahap dampak keberhasilan penanganan Covid-19. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang ditetapkan pada periode-periode tertentu di tahun 2021 seiring menurunnya penyebaran Covid19 di Surabaya menjadi faktor utama yang mendorong tumbuhnya mayoritas lapangan usaha di Kota Surabaya, dengan capaian pertumbuhan yang bervariatif. Sehingga di akhir tahun 2021

capaian pertumbuhan ekonomi dapat meningkat tinggi hingga mencapai 4,29 persen berdasarkan laporan tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2017 - 2021 (dalam persen)

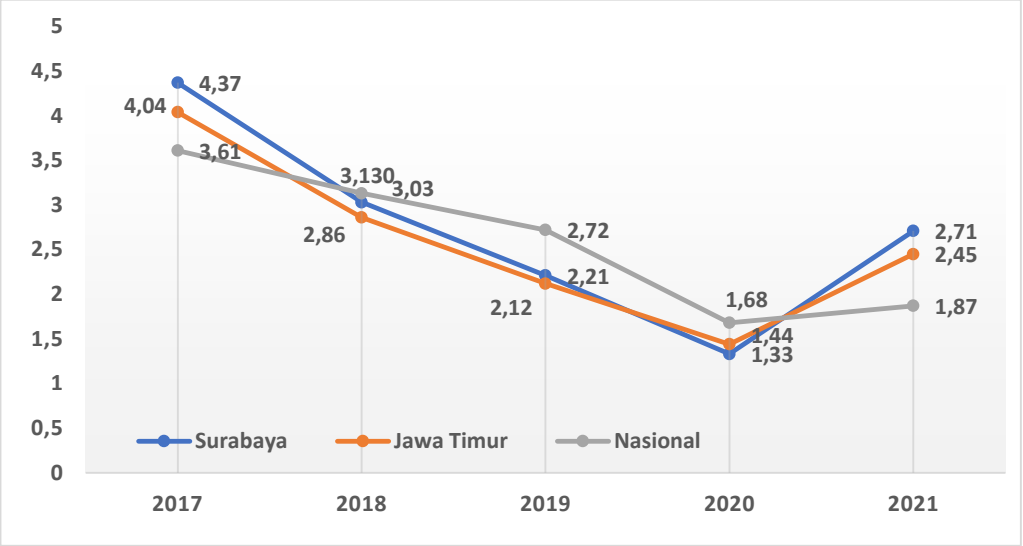
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	6,13
2018	6,19
2019	6,09
2020	-4,85
2021*	4,29

*Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022 *)data sementara*

d. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin menurun, Selama 5 tahun tersebut capaian inflasi Kota Surabaya cukup stabil pada posisi yang rendah dan sejalan dengan inflasi nasional dan Jawa Timur, Berdasarkan pemantauan perkembangan harga oleh BPS, inflasi Kota Surabaya tahun 2020, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 secara kumulatif sebesar 1,33 persen, dimana realisasi tersebut lebih rendah dibanding realisasi inflasi nasional dan Jawa Timur, Secara kumulatif, inflasi kumulatif di tahun 2020 tergolong rendah dan lebih rendah dari sasaran inflasi yang ditargetkan yakni 3 ± 1 persen, Rendahnya inflasi di tahun 2020 juga diperkirakan dipengaruhi oleh imbas adanya Covid-19.

Hingga akhir Desember 2021, Inflasi Kota Surabaya secara kumulatif lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2020. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Inflasi Kota Surabaya tahun 2021 sebesar 2,71 persen, dimana capaian tersebut lebih tinggi dibanding realisasi inflasi Jawa Timur yang sebesar 2,45 persen dan inflasi nasional sebesar 1,87 persen. bahwa Meskipun demikian, inflasi Kota Surabaya 2021 masih selaras dengan arah inflasi Jawa Timur dan Nasional. Lebih tinggi inflasi Kota Surabaya tersebut mengindikasikan bahwa adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga peningkatan inflasi yang lebih tinggi di Kota Surabaya mengindikasikan mulai kemballi pulihnya perekonomian Kota Surabaya yang ditunjukkan dari sisi permintaan masyarakat.



Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017 – Tahun 2021 (dalam persen)

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2022, diolah

e. Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kota Surabaya cukup besar. Peran investasi dalam PDRB menurut pengeluaran tercermin dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besarnya investasi terhadap perekonomian akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2017	Rp. 1.658.419.300.000	Rp 2.725.427.900.000
2018	Rp 3.190.545.316.800	Rp 1.549.687.145.643
2019	Rp 16.777.246.236.711	Rp 2.442.653.778.989
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 25.895.741.771.363	Rp 1.929.023.592.649

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut. nilai investasi Kota Surabaya tahun 2021 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp25.895.741.771.363,-. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) Rp1.929.023.592.649,-. Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya investasi PMDN Kota Surabaya pada tahun 2021 lebih dari 50 persen berasal dari penanaman modal pada bidang usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Kontribusi tertinggi selanjutnya berasal dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi dan sisanya dikontribusi oleh bidang usaha hotel dan restoran, kesehatan, perdagangan dan reparasi serta bidang usaha lainnya. Sementara investasi yang berasal dari PMA sebagian besar bersumber dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan kontribusi lebih dari 70 persen. Sisanya dikontribusi oleh bidang usaha perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, industri kimia dan farmasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta bidang usaha lainnya.

f. Ekspor

Aktivitas perdagangan baik skala domestik maupun internasional juga berkembang cukup baik dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Kota Surabaya. Ditengah kondisi ekonomi global yang cukup berfluktuatif, aktivitas perdagangan di Kota Surabaya masih berjalan cukup baik setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari masih surplusnya neraca perdagangan Kota Surabaya, dimana realisasi nilai ekspor Kota Surabaya lebih besar dibanding nilai impornya. Meskipun mengalami penurunan secara akumulatif niai ekspor dan

impor Kota Surabaya pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 akibat dampak pandemi Covid-19, namun pada tahun 2020, neraca perdagangan Kota Surabaya masih mengalami surplus perdagangan. Hal tersebut karena nilai ekspor Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar USD17.278.974.907 lebih besar daripada nilai impornya sebesar USD15.382.235.848. Pemulihan ekonomi yang terus berlangsung hingga kini mendorong perbaikan ekonomi domestik maupun perekonomian mantra dagang Kota Kota Surabaya mendorong aktivitas perdagangan kembali tumbuh pesat sehingga realisasi capaian kinerja ekspor Kota Surabaya pada akhir tahun 2021 tercatat US$22.780.677.395, sementara kinerja impor Kota Surabaya tercatat sebesar US$19.568.405.393. Sehingga dengan total kinerja ekspor dan impor Kota Surabaya tersebut dengan demikian maka kinerja neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar US$3.212.272.002.

Tabel III.6
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Nilai/Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor (US$)	17.419.331.258	18.156.429.939	18.120.064.879	17.278.974.907	22.780.677.395
Impor (US$)	16.352.163.423	18.892.345.417	17.368.048.068	15.382.235.848	19.568.405.393

Sumber data: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, diolah, 2022

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya selama 5 tahun menunjukkan tren yang berfluktuatif. Hal tersebut terjadi karena disebabkan barbagai faktor yang menyebabkan kondisi pasar tenaga kerja di Kota Surabaya menjadi tidak stabil. Seperti yang diketahui, Kota Surabaya merupakan kota bisnis yang berkembang pesat sehingga menjadi target pasar tenaga kerja baik dari Kota Surabaya maupun dari wilayah luar Kota Surabaya. Peningkatan tertinggi TPT Kota Surabaya terjadi pada tahun 2020 yakni mencapai 9,79 persen yang mulanya sebesar 5,76 persen ditahun 2019. Hal itu disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagai imbas kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang berdampak terhadap menurunnya produktivitas ekonomi di Kota Surabaya. Selanjutnya ,berdasarkan data rilis BPS terkini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 9,68 persen atau turun sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan TPT Kota Surabaya yang belum signifikan disebabkan oleh ketidakpatian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 menjadikan para investor maupun

pelaku usaha melakukan wait and see untuk melakukan ekspansi usahannya kembali.

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2017 - Tahun 2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2017	5,98%
2018	6,01%
2019	5,76%
2020	9,79%
2021	9,68

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pemulihan ekonomi secara global terus berlanjut hingga saat ini . Dari sisi domestik, sejak tahun 2021 beberapa indikator makro ekonomi nasional terus menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih moderat. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari segi banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan trus berlanjut ditahun 2022. Seperti perkiraan sebelumnya, pada tahun 2022 tekanan dampak Covid-19 diperkirakan masih ada namun diperkirakan berangsur menurun. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program vaksinasi, perkembangan kasus Covid-19 yang menurun, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk konsumsi *leisure* yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata.

Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Surabaya tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Sementara kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yakni inflasi pada rentan nilai 3,0 ± 1 persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh signifikan. Sama halnya dengan tahun 2022, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 juga diperkirakan selaras dengan sasaran inflasi nasional.

3.1.3 Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan daerah terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis sehingga kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022 dan sekaligus menyiapkan pondasi dalam pencapaian Visi Kota Surabaya Tahun 2022-2026 *"Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan"*, utamanya untuk mencapai misi pertama "*Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional"* . Upaya pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Surabaya dilakukan dengan pendekatan pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif, melalui :

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa dan industri kreatif, dengan langkah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan fungsi sosial media dan media cetak dalam memperkenalkan dan memasarkan produk usaha mikro dan SWK
b. Melakukan digitalisasi UKM serta penguatan pada platform aplikasi ecommerce
c. Pelatihan bagi pedagang SWK untuk menstandarkan kualitas makanan dan layanan kepada konsumen
d. Melakukan pembinaan UKM dalam lingkup pemasaran produk
e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi start up untuk berkembang
f. Melakukan uji mutu terhadap produk UKM yang akan dipasarkan
g. Melakukan kurasi/menjaga/mengawasi terhadap kualitas produk UKM serta SWK
h. Monitoring dan evaluasi berkala perkembangan pelaku usaha mikro dan SWK

2. Penyerapan tenaga kerja
   a. Melakukan pemutakhiran data pengangguran/pencari kerja
   b. Pelatihan keterampilan/usaha mandiri pembuatan produk/jasa sesuai dengan kebutuhan
   c. Pelatihan kerja formal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
   d. Pemberian sertifikasi bagi peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
   e. Berkoordinasi dengan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja
   f. Pembukaan rumah-rumah padat karya
3. Pemulihan ekonomi lokal melalui pariwisata
   a. Pengembangan dan optimalisasi destinasi wisata
   b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga (perorangan, badan usaha dan organisasi masyarakat) dalam kerjasama pengembangan kawasan wisata.
   c. Promosi destinasi wisata dan event wisata di skala lokal, regional, nasional dan internasional baik secara daring maupun luring
   d. Pengembangan integrasi wisata berdasarkan aksesibilitas dan tematik berbasis ekonomi kerakyatan
   e. Penambahan jumlah koleksi dan pemanfaatan teknologi di museum-museum Kota Surabaya
4. Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting
   a. Mengelola manajemen *city logistic* untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dan penting (Bapokting)
   b. Optimalisasi pasar rakyat guna untuk mendukung transaksi jual beli di lingkup wilayah kecamatan

c. Berkoordinasi dengan daerah lain, pemasok dan dunia usaha terkait ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arahkebijakan keuangan daerah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: 1. Pendapatan Asil Daerah (PAD); 2. PendapatanTransfer; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaaran teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokas Khusus. Dari sisi belanja, dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat serta reformasi pada bidang pendidikan, Kesehatan dan social

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

a. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2022 diperkirakan sekitar Rp9.612,61miliar;
b. Total Belanja Rp 10.427,03 miliar;
c. Pembiayaan untuk penyertaan modal diperkirakan Rp 10 miliar;
d. SILPA sesuai dengan hasil audit BPK RI sebesar 824,42miliar.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 meliputi :

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kota menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui ekonomi kerakyata melalui peningkatan sektor pariwisata terintegrasi, pemberdayaan UMKM,dan program padat karya;
3. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan penanganan lebih khusus terhadap pandemi Covid-19 maka akan dilakukan *refocusing* anggaran, sedangkan belanja produktif pada sektor infrastruktur akan kembali disesuaikan apabila pandemi Covid-19 dapat teratasi;
4. Anggaran pendidikan diprediksikan sebesar 21,68% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
5. Anggaran kesehatan diprediksikan sebesar 23,66% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
6. Anggaran infrastruktur difokuskan untuk penanganan drainase pada wilayah dengan potensi terjadinya genangan pada musim hujan, perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban menuju Surabaya Bebas Buang Air Besar Sembarangan, serta persiapan pelaksanaan U-20 pada tahun 2023;
7. Anggaran Belanja Pegawai tidak melebihi 30% dari total Anggaran Belanja;

8. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2022 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2022 yaitu :

1. Mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian komposisi pendapatan untuk pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Sedangkan arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2022 yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah
   1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
   2) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
   3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
   4) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
   5) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
   6) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
   7) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
   8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
   9) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;

10) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
11) Peningkatan peran dan fungsi UPTSA sebagai ujung tombak pelayanan publik;
12) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
13) Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik .

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.8 sedangkan pendapatan Kota Surabaya per Perangkat Daerah Penghasil terlihat pada tabel III.15

Tabel III.8

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya

Tahun 2019 - Tahun 2023

Uraian	Realisasi			Target		Proyeksi Tahun 2023
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	APBD Tahun 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	
Pendapatan Asli Daerah			**5.381.920.253.810**			
Pajak Daerah	4.018.722.251.948	3.277.053.240.709	3.649.732.215.700	4.768.251.212.053	4.822.712.530.611	4.808.116.511.898
Retribusi Daerah	396.244.802.736	301.268.032.273	235.591.662.263	352.737.274.643	352.558.806.343	352.737.274.643
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	268.575.571.841	48.541.103.496	160.867.394.117	167.621.848.477	167.621.848.477	187.512.698.894
Lain-Lain PAD yang sah	698.377.627.285	663.097.915.895	681.089.357.590	770.360.255.515	772.320.317.080	810.360.255.514
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**5.381.920.253.810**	**4.289.960.292.373**	**4.727.280.629.670**	**6.058.970.590.688**	**6.115.213.502.511**	**6.158.726.740.950**
Pendapatan Transfer						**5.694.014.077.000**
Transfer Pemerintah Pusat	**2.086.963.524.447**	**2.168.177.541.469**	**2.202.536.032.336**	**2.501.585.625.000**	**2.522.767.534.000**	**2.501.585.625.000**
Dana Perimbangan	2.001.327.643.447	2.045.481.662.469	2.154.338.429.336	2.469.347.796.000	2.490.529.705.000	2.469.347.796.000
Dana Transfer Umum	1.620.944.079.176	1.625.440.700.953	1.770.191.478.753	1.608.449.738.000	1.629.631.647.000	1.608.449.738.000
Dana Bagi Hasil	366.599.677.176	421.978.744.953	603.035.148.835	426.010.015.000	447.191.924.000	426.010.015.000
Dana Alokasi Umum	1.254.344.402.000	1.203.461.956.000	1.167.156.329.918	1.182.439.723.000	1.182.439.723.000	1.182.439.723.000
Dana Transfer Khusus	380.383.564.271	420.040.961.516	384.146.950.583	860.898.058.000	860.898.058.000	860.898.058.000
Dana Alokasi Khusus Fisik	25.385.942.058	16.312.498.048	15.584.019.460	65.242.283.000	65.242.283.000	65.242.283.000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	354.997.622.213	403.728.463.468	368.562.931.123	795.655.775.000	795.655.775.000	795.655.775.000
Dana Insentif Daerah	85.635.881.000	122.695.879.000	48.197.603.000	32.237.829.000	32.237.829.000	32.237.829.000
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0
Dana Desa	0	0	0	0	0	0

Uraian	Realisasi			Target		Proyeksi Tahun 2023
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	APBD Tahun 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	
Transfer Antar - Daerah	**1.102.996.942.091**	**680.348.197.455**	**1.016.416.082.323**	**972.878.914.263**	**974.630.630.020**	**990.497.069.513**
Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	1.099.625.542.091	677.024.797.455	1.013.160.682.323	971.727.230.020	971.727.230.020	989.345.385.270
Pendapatan Bantuan Keuangan	3.371.400.000	3.323.400.000	3.255.400.000	1.151.684.243	2.903.400.000	1.151.684.243
Jumlah Pendapatan Transfer	**3.189.960.466.538**	**2.848.525.738.924**	**3.218.952.114.659**	**3.474.464.539.263**	**3.497.398.164.020**	**3.492.082.694.513**
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
Hibah	0	0	15.255.315.784	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	193.272.300.435	406.930.962.879	365.390.016.114	0	0	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**193.272.300.435**	**406.930.962.879**	**380.645.331.898**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan	**8.765.153.020.783**	**7.545.416.994.176**	**8.326.878.076.226**	**9.533.435.129.951**	**9.612.611.666.531**	**9.650.809.435.463**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

Struktur rincian perubahan pendapatan pada tahun 2022 sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp56.242.911.823,- meliputi :
   a) Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp54.461.318.558,- hal ini dikarenakan:
      1. Mempertimbangkan realisasi pajak daerah sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.952.356.526.022,- dengan rincian :
         a. Pajak Hotel tercapai Rp125.918.249.012,- atau 33%
         b. Pajak Restoran tercapai Rp237.504.444.617,- atau 32,41%
         c. Pajak Hiburan tercapai Rp23.595.005.689,- atau 23,08%
         d. Pajak Reklame tercapai Rp54.020.448.000,- atau 36,42%
         e. Pajak Penerangan Jalan tercapai Rp209.736.652.343,- atau 42,78%
         f. Pajak Parkir tercapai Rp38.075.225.978,- atau 34,71%
         g. Pajak Air Tanah tercapai Rp664.126.201,- atau 45,60%
         h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tercapai Rp819.181.076.315,- atau 57,76%
         i. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercapai Rp443.661.297.867,- atau 32,06%
      2. Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 maka untuk meringankan beban masyarakat maka Pemerintah Kota Surabaya mengambil kebijakan dengan menerbitkan:
         a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-729
         b. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya
      3. Masa pemulihan akibat dampak pandemi covid-19 sehingga banyak wajib pajak hiburan yang membuka usaha 50% dari kapasitas normal

Perubahan tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.9
Perubahan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	SELISIH
1	Pajak Hotel	381.588.925.433	381.588.925.433	0
2	Pajak Restoran	732.767.251.792	732.767.251.792	0
3	Pajak Hiburan	102.231.558.207	77.516.340.185	(24.715.218.022)
4	Pajak Reklame	148.319.102.646	148.319.102.646	0
5	Pajak Penerangan Jalan	490.251.911.736	490.251.911.736	0
6	Pajak Parkir	109.709.913.071	109.709.913.071	0
7	Pajak Air Tanah	1.456.546.783	1.456.546.783	0
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.418.130.993.589	1.469.595.742.366	51.464.748.777
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.383.795.008.795	1.411.506.796.598	27.711.787.803
Jumlah Pajak Daerah		**4.768.251.212.053**	**4.822.712.530.611**	**54.461.318.559**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

b) Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp178.468.300,- hal ini mempertimbangkan :

1. Realisasi retribusi sampai dengan triwulan II sebesar Rp119.328.157.757,- dengan rincian :
   a. Retribusi Jasa Umum tercapai Rp49.979.832.148,- atau 40,48% meliputi :
      1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tercapai Rp233.414.500,- atau 31,87%
      2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tercapai Rp31.246.249.017,- atau 51,49%
      3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercapai Rp1.828.220.000,- atau 34,98%
      4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan tercapai Rp7.748.239.000,- atau 22,14%
      5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai Rp7.434.660.000,- atau 39,08%
      6) Retribusi Pengolahan Limbah Cair tercapai Rp269.235.931,- atau 46,17%
      7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercapai Rp1.219.813.700,- atau 55,25%
      8) Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) belum ada realisasi
   b. Retribusi Jasa Usaha tercapai Rp48.867.568.844,- atau 47,94% meliputi :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercapai Rp41.148.469.194,- atau 51,52%
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercapai Rp282.198.000,- atau 50,98%
3) Retribusi Terminal tercapai Rp1.936.817.800,- atau 23,13%
4) Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai Rp2.600.159.000,- atau 36,34%
5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercapai Rp2.899.924.850,- atau 48,56%

c. Retribusi Perizinan Tertentu tercapai Rp20.480.756.765,- atau 16,08% meliputi:
   1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai Rp20.397.938.765,- atau 16,82%
   2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tercapai Rp82.818.000,- atau 26,24%
   3) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) belum ada realisasi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum bisa melakukan pemungutan retribusi IMTA sejak bulan November 2021 sampai dengan triwulan II dikarenakan masih menunggu Perda tentang Perpanjangan IMTA menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang masih belum selesai

2. Pengurangan retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan sebagian besar telah terdaftar sebagai peserta JKN
3. Penambahan retribusi tera/tera ulang dikarenakan ada penambahan obyek retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Perubahan tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.10
Perubahan Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	SELISIH
1	**Retribusi Jasa Umum**			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	732.300.500	429.091.200	(303.209.300)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	60.680.182.458	60.680.182.458	-
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.226.930.000	5.226.930.000	-
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	35.000.000.000	35.000.000.000	-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	19.023.916.220	19.031.041.220	7.125.000
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	583.200.000	583.200.000	-
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.207.955.000	2.316.849.000	108.894.000
	Retribusi Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	1.000.000	1.000.000	-
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	**123.455.484.178**	**123.268.293.878**	**(187.190.300)**
2	**Retribusi Jasa Usaha**			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.875.215.436	79.883.937.436	8.722.000
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	553.584.000	553.584.000	-
	Retribusi Terminal	8.374.646.000	8.374.646.000	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.154.735.000	7.154.735.000	-
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.971.708.000	5.971.708.000	-
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	**101.929.888.436**	**101.938.610.436**	**8.722.000**
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**			
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	121.264.288.029	121.264.288.029	-
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	315.614.000	315.614.000	-
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.772.000.000	5.772.000.000	-
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	**127.351.902.029**	**127.351.902.029**	-
Jumlah Retribusi Daerah		**352.737.274.643**	**352.558.806.343**	**(178.468.300)**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPDPenghasil, 2022

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan hal mempertimbangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp160.867.394.117,- dan realisasi

sampai dengan triwulan II sebesar Rp58.535.254.619,- dengan rincian :

1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN belum ada realisasi dikarenakan pembayaran dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya rencananya akan dibayarkan pada Triwulan III
2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp18.419.392.769,- atau 105,28%
3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp115.861.850,- atau 19,97%
4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) tercapai Rp40.000.000.000,- atau 28,77%

Rincian tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.11
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	SELISIH
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.500.412.948	10.500.412.948	-
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.494.876.392	17.494.876.392	-
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	580.135.418	580.135.418	-
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	139.046.423.719	139.046.423.719	-
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**167.621.848.477**	**167.621.848.477**	**-**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp1.960.061.565,- hal ini mempertimbangkan :

1. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp283.254.056.160,- dengan rincian :
   a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tercapai Rp141.999.998,- atau 5,01%
   b. Hasil Sewa BMD tercapai Rp11.130.283.350,- atau 252,27%
   c. Hasil dari Bangun Guna Serah belum ada realisasi
   d. Jasa Giro pada Kas Daerah tercapai Rp2.279.561.708,- atau 56,09%
   e. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS tercapai Rp127.510.240,- atau 39,94%
   f. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP tercapai Rp2.428.281.341,- atau 0,50%
   g. Jasa Giro pada Kas di Bendahara tercapai Rp19.404.524,- atau 23,99%
   h. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tercapai Rp4.343.835.616,- atau 58,62%
   i. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp69.894.038,-
   j. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Lain sebesar Rp357.912.064,-
   k. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tercapai Rp3.663.997.065,- tercapai 3,29%
   l. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tercapai Rp6.068.624,- atau 0,13%
   m. Pendapatan Denda Pajak Hotel tercapai Rp455.600.634,- atau 75,79%
   n. Pendapatan Denda Pajak Restoran tercapai Rp202.128.398,- atau 53,22%
   o. Pendapatan Denda Pajak Hiburan tercapai Rp11.761.366,- atau 66,11%
   p. Pendapatan Denda Pajak Reklame tercapai Rp166.636.800,- atau 4%
   q. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan tercapai Rp285.762,- atau 43,83%
   r. Pendapatan Denda Pajak Parkir tercapai tercapai Rp14.872.897,- atau 28,54%
   s. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah tercapai Rp406.359,- atau 33,55%
   t. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tercapai Rp6.559.836.895,- atau 103,62%
   u. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum tercapai Rp361.051.920,- atau 103,11%
   v. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha tercapai Rp1.406.752.707,- atau

tercapai 10.048,23%

w. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu tercapai Rp28.046.223,- atau 183,91%
x. Hasil eksekusi atas jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp37.130.068,-
y. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp638.907.258,-
z. Pendapatan BLUD tercapai Rp193.372.787.457,- atau 40,87%
aa. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tercapai Rp46.720.832.810,- atau 40,21%
bb. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tercapai Rp11.134.746.509,- atau 44,61%

2. Penambahan dari pendapatan Dana Kapitasi JKN dikarenakan adanya program Jaminan Kesehatan Semesta, sehingga semakin banyak warga yang terdaftar dalam JKN dan pendapatan dari retribusi umum pelayanan Kesehatan semakin berkurang
3. Pengurangan dari pendapatan klaim BLUD Puskesmas dikarenakan kondisi Covid 19 Kota Surabaya yang mulai terkendali sehingga pasien rawat inap di Puskesmas berkurang.
4. Pengurangan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikarenakan adanya Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran kepada Masyarakat Kota Surabaya sehingga potensi yang dikenakan denda atas pelanggaran peraturan daerah yaitu dari perceraian non muslim dan perceraian non muslim.

Rincian tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.12
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	SELISIH
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.836.687.500	2.836.687.500	-
2	Hasil Sewa BMD	4.412.031.120	4.412.031.120	-
3	Hasil dari Bangun Guna Serah	8.679.637.000	8.679.637.000	-
4	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.064.261.161	4.064.261.161	-
5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	364.909.424	364.909.424	-

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	SELISIH
6	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	362.246.534	362.246.534	-
7	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	80.886.112	80.886.112	-
8	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.409.589.042	7.409.589.042	-
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	111.357.856.133	111.357.856.133	-
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.622.501.418	4.622.501.418	-
11	Pendapatan Denda Pajak Hotel	601.167.798	601.167.798	-
12	Pendapatan Denda Pajak Restoran	379.787.247	379.787.247	-
13	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	17.792.688	17.792.688	-
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.167.691.935	4.167.691.935	-
15	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	651.923	651.923	-
16	Pendapatan Denda Pajak Parkir	52.116.282	52.116.282	-
17	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.211.092	1.211.092	-
18	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.330.579.949	6.330.579.949	-
19	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-
20	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	350.166.200	350.166.200	-
21	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	14.000.000	14.000.000	-
22	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	15.250.000	15.250.000	-
23	Pendapatan BLUD	473.084.177.325	469.762.369.690	(3.321.807.635)
24	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	116.192.512.000	123.001.091.200	6.808.579.200
25	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	24.962.545.632	23.435.835.632	(1.526.710.000)
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	**770.360.255.515**	**772.320.317.080**	**1.960.061.565**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

B. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp22.933.624.757,- berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, tanggal penetapan 27 Juni 2022
2. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747.37/101.1/2022, Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, tanggal penetapan 3 Februari 2022

Rincian tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.13
Perubahan Pendapatan Transfer Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2021	SELISIH
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**			
a	**Dana Perimbangan**			
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	*426.010.015.000*	*447.191.924.000*	*21.181.909.000*
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.575.807.000	8.037.725.000	461.918.000
	DBH PPh Pasal 21	344.197.685.000	289.511.085.000	(54.686.600.000)
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	66.447.260.000	66.447.260.000
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	24.640.014.000	30.440.939.000	5.800.925.000
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) – Provisi Sumber Daya Hutan	343.901.000	344.377.000	476.000
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.206.665.000	2.321.200.000	1.114.535.000
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.958.311.000	39.485.000
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.097.778.000	45.227.568.000	(870.210.000)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	2.873.483.000	2.873.483.000
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.339.000	29.976.000	637.000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	*1.182.439.723.000*	*1.182.439.723.000*	0
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	*860.898.058.000*	*860.898.058.000*	0
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.242.283.000	65.242.283.000	0
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	795.655.775.000	795.655.775.000	0
	Jumlah Dana Perimbangan	**2.469.347.796.000**	**2.490.529.705.000**	**21.181.909.000**
b	**Dana Insentif Daerah (DID)**			
	DID	32.237.829.000	32.237.829.000	0
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	**32.237.829.000**	**32.237.829.000**	0
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.501.585.625.000**	**2.522.767.534.000**	**21.181.909.000**
2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**			
a.	**Pendapatan Bagi Hasil**			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	398.250.952.445	398.250.952.445	0

No	Uraian Penerimaan	APBD TA 2022	RKPD Perubahan Tahun 2021	SELISIH
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	260.042.562.129	260.042.562.129	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	229.670.898.928	229.670.898.928	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.332.074.528	1.332.074.528	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	82.430.741.989	82.430.741.989	0
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	**971.727.230.020**	**971.727.230.020**	**0**
b.	**Bantuan Keuangan**			
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.151.684.243	2.903.400.000	1.751.715.757
	Jumlah Bantuan Keuangan	**1.151.684.243**	**2.903.400.000**	**1.751.715.757**
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**972.878.914.263**	**974.630.630.020**	**1.751.715.757**
	Jumlah Pendapatan Transfer	**3.474.464.539.263**	**3.497.398.164.020**	**22.933.624.757**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya tersaji pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.14
Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun 2019 - Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	7.821.766.271.190	6.632.198.026.068	7.457.577.292.611
2	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	195.595.978.253	253.293.904.358	327.392.879.016
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	185.173.343.493	134.110.064.538	91.645.170.368
4	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	170.914.958.039	109.510.782.446	99.756.045.281
5	Dinas Kesehatan	122.413.084.793	115.363.873.100	2.509.328.000
6	RSUD Bhakti Dharma Husada	103.446.499.437	155.750.319.532	204.992.688.699
7	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	77.641.265.322	82.650.223.500	88.274.192.166
8	Dinas Perhubungan	63.125.076.841	44.463.289.385	38.663.359.372

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.858.816.791	1.498.187.861	948.884.500
10	Dinas Tenaga Kerja	5.388.267.840	7.271.397.300	4.399.749.300
11	Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil	4.439.420.000	3.284.825.000	2.459.620.000
12	Dinas Perdagangan	2.224.876.004	2.302.246.128	2.182.974.904
13	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	3.236.536.930	2.304.389.120	4.713.307.090
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.766.478.000	390.805.000	244.280.000
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	668.637.440	574.039.940	654.215.020
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	435.709.210	440.200.000	444.014.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.981.200	7.420.900,00	1.485.900,00
18	Dinas Pemadam Kebakaran	24.820.000	3.000.000	18.590.000,00
Jumlah Pendapatan		**8.765.153.020.783**	**7.545.416.994.176**	**8.326.878.076.226**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya maka perubahan target pendapatan pada tahun 2022 dan proyeksi pendapatan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15
Perubahan Target Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Target		Proyeksi Tahun 2023
		APBD Tahun 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	
1	Badan Pendapatan Daerah	4.779.802.210.966	4.834.263.529.525	4.819.667.510.813
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.844.157.580.163	3.867.091.204.920	3.904.181.565.964
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	140.142.716.461	140.142.716.461	146.458.489.923

No	Perangkat Daerah	Target		Proyeksi Tahun 2023
		APBD Tahun 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	
4	Dinas Perhubungan	80.988.327.420	80.988.327.420	60.112.181.095
5	Dinas Lingkungan Hidup	90.080.224.915	90.080.224.915	91.108.039.792
6	Dinas Kesehatan	124.050.395.300	127.233.957.565	127.651.539.431
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.500.000	18.525.000	13.000.000
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.772.000.000	5.772.000.000	6.958.043.183
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	2.927.268.200	3.040.984.200	2.976.092.991
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	6.359.018.000	6.359.018.000	6.622.290.000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	553.584.000	553.584.000	700.338.432
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.312.510.000	785.800.000	360.000.000
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	275.643.275.000	275.643.275.000	292.316.171.975
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	180.055.319.525	180.055.319.525	190.946.366.267
15	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	583.200.000	583.200.000	737.805.597
JUMLAH		**9.533.435.129.951**	**9.612.611.666.531**	**9.650.809.435.463**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan OPD Penghasil, 2022

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah

Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakat. Oleh sebab itu Perubahan RKPD Tahun 2022 tetap diarahkan sesuai dengan tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 yaitu ***" Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"*** diprioritaskan untuk:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa industri kreatif dan pariwisata;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utulitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem pendidkan dan Kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
5. Peningkatan ketahanan pangan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan system ketahanan bencana;
7. Peningkatan keamanan, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik

Belanja Daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting;
3. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan data realisasi, Target dan Proyeksi Tahun 2023 serta Rencana Perubahan Tahun 2022 Belanja Daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.16

Tabel III.16
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2019 - Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi			Target		Proyeksi 2023
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	
1	Belanja Operasi						
	Belanja pegawai	2.558.554.756.011	2.399.681.325.080	2.353.630.642.870	2.779.269.027.871	2.753.365.983.903	2.732.788.519.501
	Belanja barang dan jasa	3.748.415.935.136	3.690.051.525.103	3.911.678.188.866	5.214.772.758.757	5.461.230.908.730	4.983.742.513.680
	Belanja hibah	97.544.394.983	340.679.135.528	506.066.200.592	222.505.773.962	237.346.028.576	255.473.866.919
	Belanja Bantuan Sosial			58.944.000			146.135.606.513
	Jumlah Belanja Operasi	**6.406.290.054.129**	**6.439.039.886.246**	**6.771.433.976.328**	**8.216.547.560.590**	**8.451.942.921.209**	**8.118.140.506.613**
2	Belanja Modal						
	Jumlah Belanja Modal	2.754.304.824.082	1.583.663.159.605	1.016.336.503.390	2.140.388.236.523	1.936.843.250.970	2.244.376.832.126
	Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	**9.160.594.878.211**	**8.022.703.045.851**	**1.016.336.503.390**	**2.140.388.236.523**	**1.936.843.250.970**	**2.244.376.832.126**
3	Belanja Tidak Terduga						
	Belanja tidak terduga	1.574.969.146	9.977.942.214	28.251.407.155	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**1.574.969**	**9.977.942.214**	**28.251.407.155**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**
4	Belanja Transfer						
	Belanja Bagi hasil	2.218.293.630	-	3.055.434.672	750.000.000	750.000.000	750.000.000
	Belanja bantuan keuangan	1.774.968.000	8.627.900.535		500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Belanja Transfer	**2.218.293.630**	**-**	**3.055.434.672**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
	Jumlah Belanja	**9.164.388.140.987**	**8.032.680.988.065**	**7.819.077.321.546**	**10.395.185.797.113**	**10.427.036.172.179**	**10.400.767.338.739**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2022 diarahkan pada SILPA dan diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan anggaran.

1. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil audit laporan realisasi anggaran tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
2. Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Surabaya tahun 2022 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Pembayaran kewajiban pada pihak ketiga terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.117

Tabel III.17
Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2019 - Tahun 2023

Uraian	Realisasi			Target		Proyeksi Tahun 2023
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	APBD Tahun 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022	
Penerimaan Daerah						
Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	1.200.284.819.051	803.850.973.368	316.612.578.243	871.750.667.162	824.424.505.647	759.957.903.276
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	33.153.638	25.598.764	11.172.724	0	0	0
Jumlah Penerimaan Daerah	**1.200.317.972.689**	**803.876.572.132**	**316.623.750.967**	**871.750.667.162**	**824.424.505.647**	**759.957.903.276**
Pengeluaran Daerah						
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Daerah	**0**	**0**	**0**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui:
   a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS)/ *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti build operate and transfer (BOT), build transfer operate (BTO) maupun bentuk lainnya.

b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensialuntuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pegolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, guna keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional. Visi pembangunan Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yaitu:

"Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan"

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel IV.1

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan			
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**
1	**Misi 1** : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal
		Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
2	**Misi 2** : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
		Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup
3	**Misi 3** : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi
		Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	**Misi 4** : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
5	**Misi 5** : Menciptakan ketertiban, keamanan,	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan			
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**
	kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kota dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Surabaya juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat.
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System)*
4. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini masih mempertimbangkan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Upaya vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong

peningkatan aktivitas masyarakat sehingga di tahun 2022 dapat memulai akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2022 diprioritaskan pada :

1. *Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata;*

   Penguatan ekonomi rakyat sebagai kunci utama dalam pemulihan ekonomi lokal. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi didorong dengan dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian khusunya warga Kota Surabaya. Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

   a) Mengoptimalkan fungsi sosial media dan media cetak dalam memperkenalkan dan memasarkan produk usaha mikro dan SWK
   b) Melakukan digitalisasi UKM serta penguatan pada platform aplikasi ecommerce
   c) Pelatihan bagi pedagang SWK untuk menstandarkan kualitas makanan dan layanan kepada konsumen
   d) Melakukan kurasi/menjaga/mengawasi terhadap kualitas produk UKM serta SWK
   e) Optimalisasi data terkait ekonomi pada satu aplikasi ecobis
   f) Melakukan updating data pengangguran/pencari kerja
   g) Branding Kota Surabaya sebagai Kota Pariwisata
   h) Pengembangan integrasi wisata berdasarkan aksesibilitas dan tematik berbasis ekonomi kerakyatan
   i) Pengembangan destinasi wisata dan kampung wisata dengan penerapan prinsip 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) serta Sapta Pesona Pariwisata
   j) Pengembangan Kawasan Kota Lama Surabaya, pengembangan wisata air berbasis pemberdayaan ekonomi warga serta revitalisasi Kawasan Putat Jaya
   k) Peningkatan promosi destinasi wisata dan event wisata di skala lokal, regional, nasional dan internasional
   l) Optimalisasi pemanfaatan sentra-sentra hasil pertanian, perikanan dan peternakan

2. *Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;*

Perencanaan spasial kota yang matang dengan didukung sarana dan prasarana kota yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan. Pembangunan kota secara komprehensif dapat menghasilkan kota yang nyaman. Kenyamanan suatu kota diharapkan dapat meningkatkan minat investor dan menjadikan proses pembangunan kota menjadi lebih efisien. Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

a) Optimalisasi penataan ruang melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
b) Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
c) Pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur untuk kepentingan umum
d) Optimalisasi dan peningkatan kuantitas pemasangan PJU hemat energi
e) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta konektivitas antar wilayah
f) Peningkatan sarana dan prasarana drainase kota yang terpadu
g) Pengembangan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, handal dan terjangkau
h) Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. *Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial;*

Kunci utama mewujudkan generasi baru yang mantang dan memiliki daya saing ada pada kuatnya sistem Pendidikan dan Kesehatan khususnya di Kota Surabaya. Sistem Kesehatan dimulai dari sejak bayi di dalam kandungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi baru. Sistem Pendidikan yang matang juga diharapkan dapat membuat generasi baru yang cerdas, inovatif, terampil dan berkarakter. Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

a) Peningkatan akses dan pemerataan mutu layanan pendidikan
b) Peningkatan akses, mutu dan kapasitas pelayanan kesehatan,

c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perubahan perilaku serta pola hidup bersih dan sehat.
d) Peningkatan kualitas data, akses dan mutu pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat
e) Peningkatan kuantitas dan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB)
f) Perlindungan terhadap perempuan dan anak
g) Penguatan ketahanan keluarga

4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Masyarakat diharapkan dapat memiliki cara pandang dan pola berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan, khususnya Kota Surabaya. Kota Surabaya terkenal dengan julukan Kota Pahlawan, diharapkan dengan intervensi program-program Pemerintah Kota Surabaya dapat menanamkan nilai-nilai semangat juang, sehingga dengan adanya kemajuan/moderinasi tetap menjadikan warga Kota Surabaya memiliki nilai-nilai Pancasila.

a) Revitalisasi dan pengembangan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
b) Pengembangan budaya lokal Kota Surabaya melalui pelaksanaan event budaya dan pemilihan duta budaya
c) Pemberdayaan seniman dan budayawan lokal Kota Surabaya
d) Pengembangan dan akreditasi museum
e) Penanaman wawasan kebangsaan, kesetiakawanan, kerukunan dan toleransi beragama untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air yang berbhineka tunggal ika

5. Peningkatan ketahanan pangan;

Kota Surabaya sebagai kawasan perkotaan sudah tidak memiliki kawasan khusus pertanian, sehingga suplai bahan pokok dan penting didapatkan dari Kabupaten pemasok yang berada di sekitar Kota Surabaya. Program-program Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat menjaga suplai dan kebutuhan warga terhdap bahan pokok dan penting yang didukung oleh dikembangkannya

Urban Farming di Kota Surabaya. Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

a) Pengembangan urban farming dan optimalisasi pemasaran produk hasil urban farming
b) Peningkatan diversifikasi pangan
c) Optimalisasi pemanfaatan tanah aset pemerintah maupun masyarakat menjadi lahan produktif urban farming
d) Pengembangan Taman Hutan Raya tematik untuk peningkatan produksi urban farming
e) Peningkatan kerjasama dengan daerah produsen pangan dan pelaksanaan monitoring ketersediaan bahan pangan

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan angka kesakitan 100% yang ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku dengan angka kematian tinggi pada hewan rentan muda/anakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya tidak masuk dalam daerah wabah PMK. Kendati tidak masuk dalam Daerah wabah PMK, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan langkah antisipasi berupa pendataan sebaran ternak, pemberian vaksin serta pengawasan dan pendampingan kepada peternak. Pemantauan kegiatan jual beli ternak juga akan terus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak kecamatan dan kelurahan. Kegiatan antisipasi tersebut terdapat pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

6. *Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;*

Pembangun kawasan perkotaan, khususnya di Kota Surabaya harus mempertimbangkan daya dukung lahan, kualitas lingkungan hidup dan kerentanan bencana. Perencanaan dan pembangunan yang komprehensif

diharapkan dapat mencegah bencana alam maupun bencana non alam. Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

a) Peningkatan kualitas sarana pengolahan air limbah rumah tangga.
b) Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
c) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan layak huni.
d) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hemat energi dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan
e) Peningkatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam/ bencana non alam

7. Peningkatan keamanan, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik;

Pelayanan yang cepat tanggap merupakan jaminan kesejahteraan warga penghuni kota, khususnya di Kota Surabaya. Pembangunan kota yang baik adalah pembangunan yang melibatkan warganya. Perbaikan jalur komunikasi antara pemerintah dan warga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Warga Surabaya. Partisipasi antara warga dengan pemerintah kota juga diharapkan dapat membuat Kota Surabaya selalu aman dan tertib. Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu :

a) Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban melalui penyediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya
b) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan penyediaan SDM yang kompeten
c) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan
d) Penyediaan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan pelayanan dan implementasi pembangunan kota

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Timur	Isu Strategis Kota Surabaya
	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
	Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (Integrated Transportation System)
	Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat
	Demokrasi Kewargaan	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat
		Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
		Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat
	Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, telah diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan yang ada di dokumen RPJMD adalah sebagai berikut;

Tabel IV.3
Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
Pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap Usaha Mikro dan Sektor Informal.	**1.** Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata
	2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
	3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem Pendidikan dan Kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial
	4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
	5. Peningkatan ketahanan pangan
	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana
	7. Peningkatan keamanan, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Tabel IV.4
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Indikator Makro	Target Kota Surabaya	Target Provinsi Jawa Timur	Target Nasional
Persentase Penduduk Miskin	4,62%	10,96-10,39	8,5%-9%
Indeks Pembangunan Manusia	82,50	72,58-73,07	73,44-73,48
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,96%	3,42-5,12	5,4-6,0
Indeks Gini	0,328	0,3682 – 0,3677	0,367-0,378
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,99%	5,42-3,83	5,5-6,2

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester awal tahun 2020 membawa banyak dampak baik pada bidang ekonomi dan sosial. Upaya vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat

mendorong peningkatan aktivitas masyarakat sehingga di tahun 2022 dapat memulai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak di bidang sosial juga perlu dipulihkan secara inklusif melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan penghapusan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2021-2026, penentuan tema pembangunan Kota Surabaya juga disesuaikan dengan tema pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2022 serta tema pembangunan Provinsi Jawa Timur seperti yang telah disampaikan sebagai berikut :



Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 diselarasakan dengan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersaji dalam tabel IV.5 berikut

Tabel IV.5
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Kota Surabaya
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem Pendidikan dan Kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya lokal	Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan ketahanan pangan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan keamanan, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Dalam menjalankan program Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kota Surabaya

Tabel IV.6
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				NON KEBAKARAN	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyelamatan
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				EKONOMI KREATIF	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	dan/atau Siswa)	serta Pariwisata
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan keamanan, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	*	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
						Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
						Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
			Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			kebutuhan dasar lainnya	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Penduduk	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Asemrowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Asemrowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Asemrowo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Benowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Benowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benowo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dukuh Pakis
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dukuh Pakis
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dukuh Pakis
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gayungan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gayungan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gayungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Genteng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Genteng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Genteng
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gubeng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gubeng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gubeng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gunung Anyar
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Gunung Anyar
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Gunung Anyar
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jambangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Jambangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jambangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karangpilang
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangpilang
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karangpilang
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenjeran

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Krembangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Krembangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Krembangan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Lakarsantri
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Lakarsantri
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lakarsantri

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pabean Cantian
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pabean Cantian
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pabean Cantian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rungkut
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rungkut
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rungkut

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerep
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sawahan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sawahan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Simokerto
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Simokerto
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Simokerto
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukolilo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukolilo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukolilo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tambaksari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambaksari
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tandes
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tandes
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tandes
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tegalsari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tegalsari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tegalsari
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wiyung
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wiyung
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wiyung
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonokromo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonokromo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonokromo
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
							Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Penanganan Konflik di Daerah	
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan ketahanan pangan	*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					dalam Kabupaten/Kota		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Keanekaragaman Hayati	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
						Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Dinas Lingkungan Hidup
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Asemrowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bulak
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Kenjeran
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lakarsantri

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Semampir

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Sukomanunggal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Wonokromo
			Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
							Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Kabupaten/Kota	
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM	Pencegahan	Perbaikan Rumah Tidak	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem Pendidikan dan Kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial	*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan
			Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Nonformal/Kesetaraan		
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Pendidikan PAUD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pembinaan dan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Atlet	Dinas Kebudayaan,

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Berprestasi Kabupaten / Kota	Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM	Perencanaan	Pembinaan dan	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan
			Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Meningkatnya pengarusutamaa	PROGRAM PENINGKATAN	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			n gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	KUALITAS KELUARGA	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Kewenangan Kabupaten/Kota		Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan
			Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinas Pendidikan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
						Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

4.2.4 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

Tabel IV.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Target 2022**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target 2022**
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,96%	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,65%
					Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,61%
					Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	4,87%
		Indeks Gini	0,328		Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,24%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	8,30%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,99%	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	4,60%
					Persentase tenaga kerja yang terserap	21,14%
		Persentase Penduduk Miskin	4,62%		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,85
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	82,50	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan	Indeks Pendidikan	77,70

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Target 2022**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target 2022**
(SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya			dan kebutuhan dasar lainnya		
					Angka Harapan Hidup	74,36
					Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,35%
					Skor Pola Pangan Harapan	93,00
				Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,73
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	76,69	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	88,90
					Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	47,97
					Indeks Kepedulian Sosial	89,10
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,626	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,770
					Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,379
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,680

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Target 2022**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target 2022**
serta berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,32	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,07
					Indeks Kualitas Udara	90,32
					Indeks Kualitas Lahan	42,66
					Indeks Persampahan	76,95
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	82,61	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	81,92
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1 (Baik)
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,31%
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,83	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,86
				Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,792

Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, diatur terkait nomenklatur subkegiatan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT sehingga perlu dilakukan pengurangan dan penambahan subkegiatan Perangkat Daerah. Pengurangan subkegiatan telah ditindak lanjuti melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 33). Adanya perubahan terhadap kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta upaya pencapaian target tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, diperlukan penjadwalan serta penyesuaian target indikator pada target sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. sebagai berikut :

Tabel IV.8
Perubahan Target Sasaran Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Indikator	Target		Keterangan
			Semula	Menjadi	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Investasi Daerah	Rp 45 Triliun	Rp 36,6T	Perhitungan realisasi investasi menggunakan nilai realisasi investasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Langkah-langkah yang telah dilakukan guna pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 maka angka proyeksi yaitu 36,6 T

Tabel IV.9
Perubahan Target Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
1	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	3 jenis	2 jenis	Pameran Kewirausahaan dilaksanakan di PD lain
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	35 jenis	33 jenis	Pembatalan kegiatan dengan tema wawasan lingkungan karena disesiaikan tupoksi bidang kepemudaan
2	Dinas Kesehatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah kegiatan pemberian izin apotek,toko obat,toko alat,kesehatan dan optikal,usaha mikro		1 kegiatan	Penambahan kegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

No	Perangkat Daerah	Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			obat tradisional			Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
	Dinas Kesehatan	Penyediaan Faslitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan melalui pendeatan keluarga		1 kegiatan	Penambahan kegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		3 Kegiatan	Penambahan kegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2 Kegiatan	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		1 Kegiatan	

No	Perangkat Daerah	Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Kabupaten/Kota	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya		31 kecamatan	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144.000 data	119.710 data	Pengurangan target karena adanya implementasi SIAK terpusat yang mengakibatkan data kependudukan beralih ke Pemerintah Pusat, sehingga Daerah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan intervensi terhadap data kependudukan jika tidak ada pengajuan permohonan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 lembaga	9 lembaga	Adanya dukungan percepatan proses pemberian hak akses pemanfaatan data oleh Pemerintah Pusat
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	810 Petugas Pemadam Terlatih	764 Petugas Pemadam Terlatih	Pengurangan target karena adanya pemindahan tugas terhadap petugas pemadaman kebakaran ke kecamatan & kelurahan, serta adanya pemisahan pemenuhan kebutuhan nutrisi tambahan antara PNS dan Non PNS
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.200 Orang	6.000 Orang	Penambahan target karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	2281 Berkas	3054 Berkas	Penambahan target karena upaya mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan / non-perizinan berupa IMB maupun SLF berjalan dengan efektif

No	Perangkat Daerah	Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
	Pertanahan	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				sehingga jumlah berkas permohonan IMB maupun SLF menjadi tinggi
			Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	75 Berkas	150 Berkas	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	7 lokasi	9 lokasi	Penambahan target karena adanya penambahan lokasi rehabilitasi yaitu di Rusunawa Keputih dan Romokalisari
8	Dinas Lingkungan Hidup	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	200 berkas	Penambahan target karena adanya dukungan percepatan proses pemberian hak akses pemanfaatan data oleh Pemerintah Pusat
9	Kecamatan Dukuh Pakis	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (pemerintahan_1218)	tetap	195 Lembaga	196 Lembaga	Penambahan target karena adanya pemekaran RT di wilayah Kelurahan Dukuh Pakis

Tabel IV.10
Perubahan Target Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan dan Jumlah pelaksanaan pengembangan Diversifikasi Pangan	31 kali	39 kali	Penambahan target karena adanya penambahan Kegiatan pelatihan dan pengembangan diversifikasi pangan untuk pemberdayaan warga MBR
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Kegiatan Wirausaha Muda Pemula	17 kegiatan	14 kegiatan	Pameran Kewirausahaan dilaksanakan di PD lain
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Saing Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	35 kegiatan	34 kegiatan	Pembatalan kegiatan dengan tema wawasan lingkungan karena disesiaikan tupoksi bidang kepemudaan
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	41 kegiatan	40 kegiatan	Pengurangan output karena kegiatan Jambore Kepemudaan Daerah ditiadakan oleh Dispora Provinsi Jatim
3	Badan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan PBB dan BPHTB	297.650 Objek Pajak	547.650 Objek Pajak	Penambahan ouput karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerahh Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	219.036 Objek Pajak	253.518 Objek Pajak	Penambahan ouput karena berdasarkan evaluasi sampai dnegan triwulan II tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani	22.537 Objek Pajak	71.268 Objek Pajak	Penambahan ouput karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0 Dokumen	1 Dokumen	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	444 Pelaku usaha	450 Pelaku usaha	Penambahan target karena adanya penambahan anggaran dan target yang bersumber dari DBHCHT
5	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan	500 orang	525 orang	Penambahan target karena adanya penambahan anggaran yang digunakan untuk peserta Inkubasi Batik

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Desain dan Teknologi	manajemen usaha			
6	Sekretariat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8800 Stel	33846 Stel	Penambahan karena penyesuaian pengadaan yang akan dilakukan
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	500 dokumen	300 dokumen	Pengurangan target karena terdapat paket pekerjaan dilakukan perubahan metode pekerjaan menjadi pembelian secara elektronik berpedoman pada dengan Perpres 12/2021, adanya kebijakan penggunaan PDN yang ber TKDN sehingga terdapat pekerjaan yang pelaksanaan lelangnya ditunda, serta terdapat perubahan prioritas pembangunan yaitu untuk penanganan genangan dan pemulihan ekonomi sehingga terdapat pengalihan ke pekerjaan tersebut
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	35 rancangan produk hukum	80 rancangan produk hukum	Penambahan target karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	35 produk hukum	80 produk hukum	Penambahan target karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6.018 unit	8.760 unit	Penambahan target disesuaikan dengan kebutuhan
7	Dinas Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	2 Jenis	1 Jenis	Pengurangan anggaran akibat pemindahan output sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
						CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumalh dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	6 Dokumen	5 Dokumen	Pengurangan target dikarenakan Kajian kebutuhan Puskesmas di wilayah Surabaya Utara masih perlu dikoordinasikan lagi lebih lanjut
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 Paket	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga		63 Puskesmas	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin		180 Sarana	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
8	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	160 orang	215 orang	Penambahan target karena adanya penambahan gedung baru Griya Wreda untuk menindaklanjuti usulan/outreach lansia terlantar dari Kelurahan/Kecamatan
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	95 orang	60 orang	Pengurangan target karena disesuaikan dengan jumlah rata-rata penghuni di UPTD Babat Jerawat sampai dengan triwulan II
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	24 kali	27 kali	Penambahan target karena adanya penambahan anggaran dan target yang bersumber dari DBHCHT
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		478 orang	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	414.961 orang	275.739 orang	Pengurangan target karena disesuaikan dengan data riil PUS 2022

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		1 Laporan	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK		31 kecamatan	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
						Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	12 Lokasi	3 Lokasi	Pengurangan target karena terdapat pembangunan yang berdasarkan pengecekan di lapangan dipindah pelaksanaannya di tahun 2023
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	19 Lokasi	8 Lokasi	Pengurangan target karena didasarkan pada perhitungan prioritas kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) serta ketuntasan tahapan pembangunan sebelumnya
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaeraH	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	1213 Lembaga	1207 Lembaga	Pengurangan target berdasarkan pemutakhiran jumlah lembaga yang terdaftar pada aplikasi profil sekolah sampai dengan triwulan II Tahun 2022
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	350 Lembaga	461 Lembaga	Penambahan target karena adanya penambahan jumlah lembaga PAUD, SD dan SMP yang memenuhi ijin operasional
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan Pengembangan Karir	9142 Orang	6176 Orang	Dikarenakan adanya perubahan rencana pelaksanaan dari luring menjadi daring
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik Keagamaan yang Difasilitasi dalam Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik Keagamaan	13000 Orang	11626 Orang	Pengurangan target karena disesuaikan dengan jumlah pendidik yang diusulkan dari lembaga

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
11	Satpol PP	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan hasil kerjasama antar lembaga dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	132 kali	219 Kali	Penambahan target karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	530 Objek	965 Objek	Penambahan target karena berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	92 Orang	88 Orang	Penyesuaian jumlah PPNS yang telah pensiun dan meninggal dunia
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota [Usulan Baru]	jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha		2 Laporan	Penambahan subkegiatan sebagai tindak lanjut atas Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
12	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses	300 berkas	200 berkas	Pengurangan target karena adanya penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban	Jumlah persetujuan teknis pemenuhan	200 berkas	150 berkas	

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	baku mutu air limbah yang diterbitkan			
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144.000 data	119.710 data	Pengurangan target karena adanya implementasi SIAK terpusat yang mengakibatkan data kependudukan beralih ke Pemerintah Pusat, sehingga Daerah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan intervensi terhadap data kependudukan jika tidak ada pengajuan permohonan
		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Lembaga yang bekerjasama	5 lembaga	9 lembaga	Penambahan target karena adanya dukungan percepatan proses pemberian hak akses pemanfaatan data oleh Pemerintah Pusat
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran dan Penyelamatan yang dipenuhi kebutuhannya	756 Orang	632 Orang	Penyesuaian dengan Jumlah Petugas Petugas Pemadaman
15	Dinas Perhubungan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR di Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor	149.069 Unit	146.069 Unit	Pengurangan target karena adanya Surat Edaran Menteri Perhubungan terkait Penertiban Over Dimension Over Loading (ODOL) No. 21 tahun 2019 tentang Pengawasan mobil barang atas pelanggaran muatan lebih (overloading) dan/ atau pelanggaran ukuran lebih over dimension yang menyebabkan masyarakat atau pemilik kendaraan enggan untuk melakukan pengujian kendaraan
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10 Dokumen	9 Dokumen	Satu kajian tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan menunggu dokumen pendahulu diselesaikan

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang terbit dan telah disahkan	1711 Berkas	2437 Berkas	Penambahan target karena upaya mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan / non-perizinan berupa IMB maupun SLF berjalan dengan efektif sehingga jumlah berkas permohonan IMB maupun SLF menjadi tinggi
			Jumlah berkas permohonan SLF yang terbit dan telah disahkan	15 Berkas	30 Berkas	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun	58 Dokumen	68 Dokumen	Penambahan target karena adanya penambahan rencana rehabilitasi maupun pembangunan Rumah Padat Karya di beberapa titik lokasi
			Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun/Direhab	140 Bangunan	156 Bangunan	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi	7 Bangunan	9 Bangunan	Penambahan target karena adanya penambahan lokasi rehabilitasi yaitu di Rusunawa Keputih dan Romokalisari
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	800 unit	900 unit	Penambahan target dalam rangka percepatan pencapaian perbaikan rumah tidak layak huni
17	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun	200 Lokasi	230 Lokasi	Penambahan target karena adanya penambahan pembangunan drainase di kawasan permukiman dalam upaya penanganan genangan
		Pembangunan Jalan	Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun	300 Lokasi	250 Lokasi	Pengurangan target karena adanya perubahan prioritas pada pengembangan infrastruktur kota

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	2 Lokasi	3 Lokasi	Penambahan target karena adanya penambahan lokasi pembangunan IPAL Komunal
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	65 Dokumen	120 Dokumen	Penambahan target karena adanya penambahan dokumen perencanaan untuk pelaksanaan fisik tahun 2023
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dilakukan pemeliharaan	1080 Lokasi	1440 Lokasi	Penambahan target karena adanya penambahan lokasi jalan yang dilakukan pemeliharaan
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun	24 Lokasi	70 Lokasi	Penambahan target karena adanya penambahan lokasi pembangunan drainase di kawasan perkotaan dalam upaya penanganan genangan
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi saluran yang direhabilitasi	25 Lokasi	50 Lokasi	Penambahan target karena adanya penambahan lokasi rehabilitasi saluran di kawasan perkotaan dalam upaya penanganan genangan
		Rehabilitasi Jalan	Jumlah lokasi pembangunan / rekonstruksi jalan (DAK Fisik)		1 Lokasi	Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 dan tindaklanjut hasil rapat koordinasi perubahan nomenklatur Sub Kegiatan yang didanai DAK Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 17 Mei 2022,
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	190	258	Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022
19	Genteng	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam	150 Orang	80 Orang	Penyesuaian jumlah peserta musrenbang Kecamatan, anggaran didrop sesuai realisasi

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
		Pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan			
20	Dukuh Pakis	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	5 RW	7 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	5 RW	7 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	7 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
21	Sambikerep	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	7 RW	6 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	6 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	7 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	11 RW	7 RW	

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			direalisasikan			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	16 RW	14 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (lontar_1229)	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	16 RW	14 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
22	Tegalsari	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	62 Kasus	38 Kasus	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
23	Lakarsantri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	4 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
24	Gayungan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	4 RW	7 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	7 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
25	Semampir	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	210 Kasus	21 Kasus	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
26	Pakal	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	6 RW	2 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			prasarananya direalisasikan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (babatjerawat_1230)	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	14 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (benowo_1230)	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	6 RW	5 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sumberrejo_1230)	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	1 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
27	Sukolilo	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (medokansemampir_1214)	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	8 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	8 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	1 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	8 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	9 RW	6 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			masyarakatnya direalisasikan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
28	Sukomanunggal	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	7 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	9 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	5 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	4 RW	2 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
29	Gubeng	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	13 RW	11 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
30	Kenjeran	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya	12 RW	10 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			direalisasikan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	4 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
31	Rungkut	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	186 Orang	36 Orang	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	12 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	12 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	15 RW	11 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	15 RW	5 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	12 RW	7 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			masyarakatnya direalisasikan			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	15 RW	11 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	15 RW	13 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
32	Tambaksari	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	250 Orang	100 Orang	Penyesuaian jumlah peserta musrenbang Kecamatan, anggaran didrop sesuai realisasi.
33	Wiyung	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	3 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (wiyung_1223)	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	5 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	8 RW	4 RW	Penyesuaian jumlah sasaran penerima intervensi

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
			prasarananya direalisasikan			

4.2.5 Penelaahan Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 tidak ada perubahan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKPD Kota Surabaya tahun 2022 telah disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembanguan Provinsi Jawa Timur serta upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi covid-19, terdapat penambahan dan pengurangan subkegiatan serta perubahan target subkegiatan dan kegiatan sebagai tindak lanjut atas :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 33).
2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 10 Mei 2022 perihal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan.

3. Surat Kemendagri Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
4. Upaya pencapaian target program, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, serta hasil pengendalian dan evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, serta penyesuaian terhadap kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1650 orang	1650 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Kali	12 Kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5 jenis	5 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4 Jenis	4 Jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10 jenis	10 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	756 Orang	632 Orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				N KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	10 Kali	10 Kali	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	785 Unit	785 Unit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	220 Unit	220 Unit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	520 Bangunan/ Gedung	520 Bangunan /Gedung	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	120 Kali	120 Kali	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	120 Orang	120 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	720 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	912 Orang	912 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	60 orang	60 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1000 orang	1000 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Perluasan Kesempatan Kerja	400 orang	400 orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	4 Kali	4 Kali	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100 Orang	100 Orang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	206 kali	206 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	83 koperasi	83 koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 sentra	10 sentra	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	135 orang	135 orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	179 orang	179 orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGAWASAN DAN	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan	415 koperasi	415 koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Perdagangan	Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	3 kali	3 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	6 kali	6 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Kali	20 Kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	500 orang	525 orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Teknologi				
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5220 orang	5220 orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	60 kali	60 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 lokasi	2 lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 lokasi	1 lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Wilayah Kerjanya			an		
							12 lokasi	12 lokasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	217 kali	217 kali	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan keamanan, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	*	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 kali	5 kali	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENGEMBANGA	Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan	1770 orang	1770 orang	Badan Kepegawaian	Badan Kepegawaian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				N SUMBER DAYA MANUSIA	Teknis	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	630 orang	630 orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	69 Kali	69 Kali	Inspektorat	Inspektorat
						Reviu Laporan Keuangan	5 Kali	5 Kali	Inspektorat	Inspektorat
						Reviu Laporan Kinerja	10 Kali	10 Kali	Inspektorat	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Kali	4 Kali	Inspektorat	Inspektorat
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 kali	20 kali	Inspektorat	Inspektorat
			Meningkatnya	PROGRAM	Administrasi Tata	Fasilitasi	2 Berkas	2 Berkas	Sekretariat	Sekretariat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemerintahan	Pelaksanaan Otonomi Daerah			Daerah	Daerah
						Penataan Administrasi Pemerintahan	185 Peserta	185 Peserta	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	220 lokasi	220 lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 PD	58 PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	364 Kali	364 Kali	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	190 Aplikasi	190 Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Berbasis Elektronik				
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 PD	58 PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100 Kali	100 Kali	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pelayanan Informasi Publik	50 Kali	50 Kali	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	360 Konten	360 Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2834 Kali	2834 Kali	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	2 jenis	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Urusan Pemerintahan Daerah					
					Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	253 kegiatan	253 kegiatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	58 kegiatan	58 kegiatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	58 kegiatan	58 kegiatan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	11000 Pelaku Usaha	11000 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	80000 berkas	80000 berkas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Elektronik				
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	70080 berkas	70080 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	37000 berkas	37000 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	318500 berkas	318500 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	171500 berkas	171500 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144000 data	119710 data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Lembaga	9 Lembaga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Lembaga	5 Lembaga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32 unit layanan	32 unit layanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1543 berkas	1543 berkas	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	494 berkas	494 berkas	Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Benowo	Kec. Benowo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Benowo	Kec. Benowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4440 berkas	4440 berkas	Kec. Benowo	Kec. Benowo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Benowo	Kec. Benowo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Kali	12 Kali	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Wilayah Kecamatan				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2697 Berkas	2697 Berkas	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 Berkas	741 Berkas	Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Bulak	Kec. Bulak
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Bulak	Kec. Bulak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1983 Berkas	1983 Berkas	Kec. Bulak	Kec. Bulak
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 Berkas	618 Berkas	Kec. Bulak	Kec. Bulak
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2559 berkas	2559 berkas	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 Berkas	618 Berkas	Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Penyelenggaraa	Peningkatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2861 berkas	2861 berkas	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Genteng	Kec. Genteng
					Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Genteng	Kec. Genteng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2453 Berkas	2453 Berkas	Kec. Genteng	Kec. Genteng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 berkas	741 berkas	Kec. Genteng	Kec. Genteng
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kali	12 kali	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3254 berkas	3254 berkas	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	865 berkas	865 berkas	Kec. Gubeng	Kec. Gubeng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2107 berkas	2107 berkas	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Daerah yang Ada di Kecamatan					
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4277 berkas	4277 berkas	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 Berkas	618 Berkas	Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	3254 Berkas	3254 Berkas	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						terkait dengan Nonperizinan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7044 berkas	7044 berkas	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Kali	12 Kali	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6060 berkas	6060 berkas	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 berkas	741 berkas	Kec. Krembangan	Kec. Krembangan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Dilimpahkan kepada Camat	yang Dilimpahkan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2923 berkas	2923 berkas	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	685 berkas	685 berkas	Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4222 berkas	4222 berkas	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	865 berkas	865 berkas	Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Non Usaha				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2734 Berkas	2734 Berkas	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 Berkas	741 Berkas	Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kali	12 kali	Kec. Pakal	Kec. Pakal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Pakal	Kec. Pakal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3797 Berkas	3797 Berkas	Kec. Pakal	Kec. Pakal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Pakal	Kec. Pakal
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3612 berkas	3612 berkas	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	865 Berkas	865 Berkas	Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4222 Berkas	4222 Berkas	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 Berkas	618 Berkas	Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Kali	12 Kali	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Wilayah Kecamatan				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6365 berkas	6365 berkas	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	865 berkas	865 berkas	Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Semampir	Kec. Semampir
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7927 Berkas	7927 Berkas	Kec. Semampir	Kec. Semampir

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 Berkas	741 Berkas	Kec. Semampir	Kec. Semampir
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6249 Berkas	6249 Berkas	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 Berkas	741 Berkas	Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Kali	12 Kali	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Wilayah Kecamatan				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4622 berkas	4622 berkas	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	988 berkas	988 berkas	Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5921 berkas	5921 berkas	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	865 Berkas	865 Berkas	Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kali	12 kali	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5991 berkas	5991 berkas	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1112 berkas	1112 berkas	Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penyelenggaraa	Peningkatan	12 kali	12 kali	Kec. Tandes	Kec. Tandes

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Tandes	Kec. Tandes
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3831 berkas	3831 berkas	Kec. Tandes	Kec. Tandes
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	865 berkas	865 berkas	Kec. Tandes	Kec. Tandes
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pelaksanaan Urusan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4140 Berkas	4140 Berkas	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 Berkas	741 Berkas	Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kali	12 kali	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2685 berkas	2685 berkas	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	618 berkas	618 berkas	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3324 berkas	3324 berkas	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	618 berkas	618 berkas	Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Daerah yang Ada di Kecamatan					
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2763 Berkas	2763 Berkas	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	741 Berkas	741 Berkas	Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	5758 Berkas	5758 Berkas	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						terkait dengan Nonperizinan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	865 Berkas	865 Berkas	Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	46054 data	46054 data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	190 peserta	258 peserta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	170 proyek	170 proyek	Dinas Penanaman Modal dan	Dinas Penanaman Modal dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Penanaman Modal			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2700 perusahaan	2700 perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Pameran	3 Pameran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 kali	2 kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	132 Kali	219 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Kabupaten/Kota	Ketentraman dan Ketertiban Umum				
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10080 Objek	10080 Objek	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	36 Penertiban	36 Penertiban	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	192 Kali	192 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
						Penyediaan Layanan	74 Kali	74 Kali	Satuan Polisi	Satuan Polisi

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada			Pamong Praja	Pamong Praja
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	18 SOP	18 SOP	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	530 Objek	965 Objek	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	250 Objek	250 Objek	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	92 Orang	88 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	182 Kali	182 Kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	66 Kali	66 Kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	120 Orang	120 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik di Daerah				
			Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42 Kali	42 Kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Kali	12 Kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat struktural untuk mendukung pengembang	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1500 sampel	1500 sampel	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
an ekonomi dan pelayanan dasar	Daya Energi		kebutuhan dasar lainnya		Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	640 orang	640 orang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	86 unit	86 unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan	50 unit	50 unit	Dinas Ketahanan Pangan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				TANGKAP	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tangkap			Pertanian	Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2750 ekor	2750 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	8 Kali	8 Kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250 pelaku usaha	250 pelaku usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Kali	15 Kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	31 Kali	39 Kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80%	80%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4 Lokasi	4 Lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	13 lokasi	13 lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	500 Orang	500 Orang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 kali	12 kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	6 Kali	6 Kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5 kali	5 kali	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PERIZINAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian	80%	80%	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				USAHA PERTANIAN	yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			Pangan dan Pertanian	Pangan dan Pertanian
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	463 lokasi	463 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	79 Lokasi	79 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	14 lokasi	14 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	7 ekosistem	7 ekosistem	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	939 lokasi	939 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sampah di TPA/TPST / SPA Kabupaten/Kota				
							267 lokasi	267 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	
						Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	39 lokasi	39 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	190 lokasi	190 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Asemrowo	Kec. Asemrowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Genting Kalianak	Kec. Asemrowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Kandangan	Kec. Benowo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Romokalisari	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Sememi	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Kec. Benowo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Alun-Alun Contong	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Bubutan	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Gundih	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Jepara	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Tembok Dukuh	Kec. Bubutan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	5 RW	Kelurahan Bulak	Kec. Bulak
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Kedung Cowek	Kec. Bulak
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Kenjeran	Kec. Bulak
						Pembangunan	3 RW	3 RW	Kelurahan	Kec. Bulak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sarana dan Prasarana Kelurahan			Sukolilo Baru	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	7 RW	Kelurahan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Gunungsari	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	4 RW	Kelurahan Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	7 RW	Kelurahan Gayungan	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Ketintang	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Menanggal	Kec. Gayungan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Embong Kaliasin	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	5 RW	Kelurahan Genteng	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan	11 RW	11 RW	Kelurahan Kapasari	Kec. Genteng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Prasarana Kelurahan				
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Ketabang	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	16 RW	16 RW	Kelurahan Peneleh	Kec. Genteng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	4 RW	Kelurahan Airlangga	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Baratajaya	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Gubeng	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Kertajaya	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 RW	11 RW	Kelurahan Mojo	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Pucang Sewu	Kec. Gubeng
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	12 RW	Kelurahan Karah	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Jambangan	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Kebonsari	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Pagesangan	Kec. Jambangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Karang Pilang	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 RW	13 RW	Kelurahan Kebraon	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Kedurus	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Waru Gunung	Kec. Karangpilang
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 RW	14 RW	Kelurahan Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	10 RW	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran
						Pembangunan	8 RW	8 RW	Kelurahan	Kec. Kenjeran

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sarana dan Prasarana Kelurahan			Bulak Banteng	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	3 RW	Kelurahan Tambak Wedi	Kec. Kenjeran
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Perak Barat	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	5 RW	Kelurahan Dupak	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Morokrembangan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 RW	13 RW	Kelurahan Krembangan Selatan	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Kemayoran	Kec. Krembangan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	5 RW	Kelurahan Bangkingan	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	3 RW	Kelurahan Jeruk	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan	7 RW	7 RW	Kelurahan Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Prasarana Kelurahan				
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Sumurwelut	Kec. Lakarsantri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Kalisari	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 RW	13 RW	Kelurahan Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Kalijudan	Kec. Mulyorejo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Bongkaran	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	12 RW	Kelurahan Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Perak Timur	Kec. Pabean Cantian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Perak Utara	Kec. Pabean Cantian
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 RW	3 RW	Kelurahan Babat Jerawat	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	2 RW	Kelurahan Pakal	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	1 RW	Kelurahan Sumberejo	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	5 RW	Kelurahan Benowo	Kec. Pakal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15 RW	11 RW	Kelurahan Kalirungkut	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	4 RW	Kelurahan Rungkut Kidul	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Kedung Baruk	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	4 RW	Kelurahan Penjaringansari	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15 RW	5 RW	Kelurahan Medokan Ayu	Kec. Rungkut
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	3 RW	Kelurahan Wonorejo	Kec. Rungkut
						Pembangunan	16 RW	14 RW	Kelurahan	Kec.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sarana dan Prasarana Kelurahan			Lontar	Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	6 RW	Kelurahan Made	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	7 RW	Kelurahan Sambikerep	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 RW	3 RW	Kelurahan Beringin	Kec. Sambikerep
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Pakis	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 RW	14 RW	Kelurahan Putat Jaya	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Kupang Krajan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Banyu Urip	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Sawahan	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18 RW	18 RW	Kelurahan Petemon	Kec. Sawahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 RW	14 RW	Kelurahan Ujung	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan	12 RW	12 RW	Kelurahan Sidotopo	Kec. Semampir

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Prasarana Kelurahan				
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Pegirian	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	16 RW	16 RW	Kelurahan Wonokusumo	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	17 RW	17 RW	Kelurahan Ampel	Kec. Semampir
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Kapasan	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Sidodadi	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Simolawang	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Tambakrejo	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 RW	14 RW	Kelurahan Simokerto	Kec. Simokerto
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Keputih	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	3 RW	Kelurahan Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	8 RW	Kelurahan Medokan Semampir	Kec. Sukolilo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	1 RW	Kelurahan Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	12 RW	Kelurahan Semolowaru	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Gebang Putih	Kec. Sukolilo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Putat Gede	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	3 RW	Kelurahan Simomulyo	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	9 RW	Kelurahan Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	3 RW	Kelurahan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	2 RW	Kelurahan Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Dukuh Setro	Kec. Tambaksari
						Pembangunan	11 RW	11 RW	Kelurahan	Kec.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sarana dan Prasarana Kelurahan			Gading	Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	12 RW	Kelurahan Pacarkeling	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Pacarkembang	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Ploso	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Rangkah	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Tambaksari	Kec. Tambaksari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Tandes	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	9 RW	Kelurahan Karangpoh	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Balongsari	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Manukan Wetan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan	15 RW	15 RW	Kelurahan Manukan Kulon	Kec. Tandes

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Prasarana Kelurahan				
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 RW	4 RW	Kelurahan Banjar Sugihan	Kec. Tandes
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 RW	7 RW	Kelurahan Tegalsari	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Keputran	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Wonorejo	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Kedungdoro	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	14 RW	14 RW	Kelurahan Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	5 RW	Kelurahan Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Jajar Tunggal	Kec. Wiyung

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	4 RW	Kelurahan Balas Klumprik	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 RW	5 RW	Kelurahan Wiyung	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	3 RW	Kelurahan Babatan	Kec. Wiyung
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 RW	6 RW	Kelurahan Siwalankerto	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Sidosermo	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	12 RW	Kelurahan Bendul Merisi	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Margorejo	Kec. Wonocolo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 RW	10 RW	Kelurahan Darmo	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 RW	11 RW	Kelurahan Jagir	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 RW	5 RW	Kelurahan Ngagel	Kec. Wonokromo
						Pembangunan	12 RW	12 RW	Kelurahan	Kec.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sarana dan Prasarana Kelurahan			Ngagel Rejo	Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 RW	12 RW	Kelurahan Sawunggaling	Kec. Wonokromo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 RW	8 RW	Kelurahan Wonokromo	Kec. Wonokromo
			Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	800 unit	900 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	173 Bangunan	173 Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	1711 Data	1711 Data	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
							150 Lokasi	150 Lokasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1711 Berkas	2437 Berkas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
							15 Berkas	30 Berkas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
						Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Perencanaan, Pembangunan,	58 Dokumen	68 Dokumen	Dinas Perumahan	Dinas Perumahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
							140 Bangunan	156 Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	96 lokasi	96 lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2 Lokasi	3 Lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1050 lokasi	1050 lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	200 Lokasi	230 Lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan	24 lokasi	70 lokasi	Dinas Sumber	Dinas Sumber

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Sistem Drainase Perkotaan			Daya Air dan Bina Marga	Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	50 dokumen	50 dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	25 lokasi	50 lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 dokumen	30 dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	264 unit	264 unit	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100 perusahaan	100 perusahaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
						Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 berkas	240 berkas	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 blok	105 blok	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	11 dokumen	11 dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	9 lokasi	9 lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
							300 Lokasi	250 Lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan	2 lokasi	2 lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Jalan				
						Pemeliharaan Rutin Jalan	1080 lokasi	1440 lokasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	65 dokumen	65 dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	65 dokumen	120 dokumen	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3 Bangunan	3 Bangunan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
							3000 Unit	3000 Unit	Dinas Perhubungan	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2500 Unit	2500 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5 Jenis	5 Jenis	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	6 Lokasi	6 Lokasi	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
							93252 Titik	93252	Dinas	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
								Titik	Perhubungan	
							7447 Rekening	7447 Rekening	Dinas Perhubungan	
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	14 Jam	14 Jam	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1821 Titik	1821 Titik	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	149069 Unit	146069 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	13 Dokumen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	365 Kali	365 Kali	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum	Pengendalian dan Pengawasan	365 Kali	365 Kali	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28 Unit	28 Unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
							8 Unit	8 Unit	Dinas Perhubungan	
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3 dokumen	3 dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	2 dokumen	2 dokumen	Dinas Perumahan Rakyat dan	Dinas Perumahan Rakyat dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Ruang Daerah Kabupaten/Kota	untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Sistem Informasi Penataan Ruang	154 Kelurahan	154 Kelurahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 lokasi	1 lokasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Bangunan	9 Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatkan sumber	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas	Meningkatkan kualitas	PROGRAM PEMBERDAYAA	Pelaksanaan Pembangunan	Orientasi/Pelatihan Teknis	344 keluarga	344 keluarga	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem Pendidikan dan Kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial	pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							54 keluarga	54 keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							113 keluarga	113 keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Pembentukan Kelompok Ketahanan	160 keluarga	160 keluarga	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	28 paket	28 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							10 paket	10 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Penyediaan Biaya	31	31	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kecamatan	kecamatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14 keluarga	14 keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Jenis	6 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	570 orang	570 orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
							5 jenis	5 jenis	Dinas Sosial	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	355 orang	355 orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
							8 jenis	8 jenis	Dinas Sosial	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 Bangunan	1 Bangunan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33 Jenis	33 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	2 Jenis	1 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan				
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	61 Jenis	61 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Obat, Vaksin	4 Jenis	4 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jenis	1 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	5 Dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Bangunan	1 Bangunan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12 Bangunan	12 Bangunan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	154 Kelurahan	154 Kelurahan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1045749 jiwa	1045749 jiwa	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	196 Balita	196 Balita	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Gizi Masyarakat				
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	138 Kunjungan	138 Kunjungan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63 Kegiatan	63 Kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	900 Lokasi	900 Lokasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Penyediaan Telemedicine di	41 Puskesmas	41 Puskesma	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Fasilitas Pelayanan Kesehatan		s		
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	59 lembaga	59 lembaga	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Kelompok	2 Kelompok	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Kelompok	1 Kelompok	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengadaan Alat	1 kelompok	1	RSUD dr.	RSUD dr.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		kelompok	Mohamad Soewandhie	Mohamad Soewandhie
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 lembaga	461 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19 Lokasi	8 Lokasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	260 lembaga	260 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13 kali	13 kali	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat	10 lembaga	10	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Praktik dan Peraga Siswa		lembaga	Pendidikan	Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	56 lembaga	56 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285 lembaga	285 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1842 Orang	1842 Orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
							11376 orang	11376 orang	Dinas Pendidikan	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	667 lembaga	667 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	650 lembaga	650 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	266 Lokasi	266 Lokasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 lokasi	3 lokasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	254 Lembaga	254 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat,	13 kali	13 kali	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Bakat dan Kreativitas Siswa			Pendidikan	Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12 Lembaga	12 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63 lembaga	63 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	641 Orang	641 Orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
							5745 orang	5745 orang	Dinas Pendidikan	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	293 lembaga	293 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300 lembaga	300 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	51 lokasi	51 lokasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	878 lembaga	878 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	2 Lembaga	2 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana	2592	2592	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						BOP PAUD	lembaga	lembaga	Pendidikan	Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	9142 orang	6176 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
							5163 Orang	5163 Orang	Dinas Pendidikan	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2 Lembaga	2 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1316 lembaga	1316 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	102 lembaga	102 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 lembaga	1 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	34 lembaga	34 lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250 orang	250 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya	1 lembaga	1 lembaga	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			Pendidikan	Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	34 Lembaga	34 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
							13000 Orang	11626 Orang	Dinas Pendidikan	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	30 unit	30 unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	50 kegiatan	50 kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	189 kali	189 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga	12 kegiatan	12 kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Rekreasi			serta Pariwisata	serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	35 kegiatan	34 kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	17 Kegiatan	14 Kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	15449 orang	15449 orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	41 kegiatan	40 kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN	Perencanaan Kebutuhan dan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber	28 Kali	28 Kali	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Daya Manusia Kesehatan				
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	130 orang	130 orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
							160 orang	215 orang	Dinas Sosial	
							95 orang	60 orang	Dinas Sosial	
						Pemberian Pelayanan	795 orang	795 orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Reunifikasi Keluarga				
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1100 orang	1100 orang	Dinas Sosial	Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Kedaruratan	4716 kali	4716 kali	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	24 kali	27 kali	Dinas Sosial	Dinas Sosial
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	Dinas Sosial	Dinas Sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24 data	24 data	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya pengarusutamaan gender,	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi	2 lembaga	2 lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	KELUARGA	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 kasus	150 kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 kasus	150 kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	17 kasus	17 kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			Berencana	Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 kasus	20 kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	266 lokasi	266 lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	10 kali	10 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	2 lokasi	2 lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	8 kegiatan	8 kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2 lokasi	2 lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
						Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	7 lokasi	7 lokasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	440 kali	440 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	3 kali	3 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemajuan Tradisi Budaya			dan Olah Raga serta Pariwisata	dan Olah Raga serta Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	770 kali	770 kali	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II tahun 2022. Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKPD Tahun 2022 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.2 tentang Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana berikut:

Tabel V.2
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			**29,665,426,949**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			**29,999,637,643**
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**29,665,426,949**	**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**29,999,637,643**
5.03 KEPEGAWAIAN			**22,935,963,525**	**5.03 KEPEGAWAIAN**			**23,212,489,414**
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**16,461,135,470**	**5.0301 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**16,939,671,482**
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,888,040,000**	**5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,222,250,694**
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,888,040,000	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,222,250,694
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,065,636,039**	**5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,192,470,110**
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,065,636,039	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,192,470,110
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**507,459,431**	**5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**524,950,678**
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam	100%	507,459,431	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam	100%	524,950,678

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kantor	kondisi baik			Kantor	kondisi baik		
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**6,474,828,055**	**5.0302 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**6,272,817,932**
	Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	91%			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	91%	
	Persentase pegawai yang disiplin	96.21 %			Persentase pegawai yang disiplin	96.21 %	
	Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	29.64 %			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	29.64 %	
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	90%	**2,355,387,826**	**5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	90%	**2,279,941,868**
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan yang dikirim tepat waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	1 Dokumen	289,558,894	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan yang dikirim tepat waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	1 Dokumen	253,832,195
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Tahap Seleksi	1,662,556,605	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Tahap Seleksi	1,634,675,154
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dikelola	8537 Data pegawai	403,272,327	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dikelola	8537 Data pegawai	391,434,519
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan	8555 berkas	**1,683,090,090**	**5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah berkas mutasi, promosi dan	8555 berkas	**1,584,926,850**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian									rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian		
					5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas mutasi ASN	100 berkas	587,213,519						5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas mutasi ASN	100 berkas	520,891,050
					5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8437 berkas	594,228,095						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8437 berkas	511,603,800
					5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah berkas promosi dan rotasi jabatan ASN	18 berkas	501,648,476						5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah berkas promosi dan rotasi jabatan ASN	18 berkas	552,432,000
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**2,436,350,139**					**5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**2,407,949,214**
						Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis								Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis	
						Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis								Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis	
					5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	6398 orang	630,976,088						5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	6398 orang	701,858,544
					5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai	5 kali	904,664,000						5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai	5 kali	708,220,000
					5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah jenis intervensi pengelolaan disiplin pegawai yang diberikan	5 jenis	900,710,051						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah jenis intervensi pengelolaan disiplin pegawai yang diberikan	5 jenis	997,870,670

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**6,729,463,424**
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94%	**6,729,463,424**
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1770 orang	**1,765,363,693**
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1770 orang	1,765,363,693
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	630 orang	**4,964,099,731**
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan	630 orang	4,964,099,731

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**6,787,148,229**
5.0402 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94%	**6,787,148,229**
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1770 orang	**2,652,019,210**
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1770 orang	2,652,019,210
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	630 orang	**4,135,129,019**
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan	630 orang	4,135,129,019

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi Manajerial dan Fungsional								Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								**29,672,080,381**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**								**39,624,879,500**
	8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							**29,672,080,381**		**8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**39,624,879,500**
		8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**29,672,080,381**			**8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**39,624,879,500**
			8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**11,643,087,830**				**8.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**13,312,339,309**
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**8,148,820,000**					**8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**9,660,773,620**
					8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	8,148,820,000						8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	9,660,773,620
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**178,808,780**					**8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**160,344,180**
					8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	178,808,780						8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	160,344,180
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**3,315,459,050**					**8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**3,491,221,509**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Pemerintahan Daerah							**Pemerintahan Daerah**						
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	3,315,459,050	8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	3,491,221,509
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	90%	**800,538,080**	**8.0102 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	90%	**862,538,080**
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	317 Orang	**800,538,080**	**8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	317 Orang	**862,538,080**
8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Kali	800,538,080	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Kali	862,538,080
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya	23%	**8,342,438,900**	**8.0103 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya	23%	**16,520,258,900**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					politik								politik		
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	60 Lembaga	**8,342,438,900**					**8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	60 Lembaga	**16,520,258,900**
					8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	120 Orang	8,342,438,900					8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	120 Orang	16,520,258,900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	20%	**48,746,280**				**8.0104 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	20%	**47,213,920**
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	**48,746,280**					**8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	**47,213,920**
					8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah frekuensi pengawasan dan/atau pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	2 kali	48,746,280						8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah frekuensi pengawasan dan/atau pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	2 kali	47,213,920
			8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan	100%	**651,667,320**				**8.0105 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan	100%	**651,667,320**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	narkoba yang dibina				narkoba yang dibina		
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	9 Lembaga	**651,667,320**	**8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	9 Lembaga	**651,667,320**
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42 Kali	651,667,320	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42 Kali	651,667,320
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	**8,185,601,971**	**8.0106 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	**8,230,861,971**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				**FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			
	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	11 Lembaga	**8,185,601,971**	**8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	11 Lembaga	**8,230,861,971**
	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	10 Lembaga			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	10 Lembaga	
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	182 Kali	7,711,476,908	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	182 Kali	7,776,476,908

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.	66 Kali	474,125,063						8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.	66 Kali	454,385,063
Badan Penanggulangan Bencana Daerah								**57,745,604,796**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**								**59,787,925,572**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**57,745,604,796**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**59,787,925,572**
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							**57,745,604,796**		**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**59,787,925,572**
		1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93%	**13,112,040,586**			**1.0501 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93%	**12,222,091,771**
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan			Persentase ketepatan waktu	100%	**10,088,280,000**				**1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan**			Persentase ketepatan waktu	100%	**8,636,004,806**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
Perangkat Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					**Perangkat Daerah**	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,088,280,000			1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	8,636,004,806		
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**1,682,553,132**			**1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2,041,618,218**		
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	1,682,553,132			1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	2,041,618,218		
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**1,341,207,454**			**1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**1,544,468,747**		
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	1,341,207,454			1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	1,544,468,747		
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	**44,633,564,210**			**1.0503 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	**47,565,833,801**		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%					Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%			
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan	31 Kawasan	**21,757,085,181**			**1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan	31 Kawasan	**21,856,912,060**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				terhadap Bencana		kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana							**terhadap Bencana**		kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		
					1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1650 orang	1,079,050,648						1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1650 orang	1,078,419,660
					1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	5 jenis	231,998,763						1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	5 jenis	271,739,900
					1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan	12 Kali	20,446,035,770						1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan	12 Kali	20,506,752,500
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1200 Orang	**22,876,479,029**					**1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6000 Orang	**25,708,921,741**
					1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat	10 jenis	20,681,043,383						1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat	10 jenis	23,524,480,595
					1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	4 Jenis	2,195,435,646						1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	4 Jenis	2,184,441,146
Badan Pendapatan Daerah								**118,157,077,395**	**Badan Pendapatan Daerah**								**69,939,025,374**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**118,157,077,395**	**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**69,939,025,374**
5.02 KEUANGAN			**118,157,077,395**	**5.02 KEUANGAN**			**69,939,025,374**
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	**103,943,683,268**	**5.0201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	**54,109,448,919**
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**96,606,728,000**	**5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**46,016,878,209**
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96,606,728,000	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	46,016,878,209
5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	**241,271,550**	**5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	**270,305,775**
5.02.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	241,271,550	5.02.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	270,305,775
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**7,095,683,718**	**5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**7,822,264,935**
5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,023,786,088	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,280,240,583

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5,071,897,630					5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5,542,024,352
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	**338,407,930**				**5.0202 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	**387,149,866**
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	**338,407,930**					**5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	**387,149,866**
					5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	4 Dokumen	338,407,930					5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	4 Dokumen	387,149,866

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	Lainnya				Lainnya		
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	80%	**13,874,986,197**	**5.0204 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	80%	**15,442,426,589**
	Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	65%			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	65%	
	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	55%			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	55%	
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan Pajak Daerah	297650 Objek Pajak	**13,874,986,197**	**5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Jumlah Objek Pajak Penagihan Pajak Daerah	297650 Objek Pajak	**15,442,426,589**
	Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22537 Objek Pajak			Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22537 Objek Pajak	
	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	219036 Objek Pajak			Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	219036 Objek Pajak	
	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	823518 Objek Pajak			Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	823518 Objek Pajak	
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran	219036 Objek	4,147,887,557	5.02.04.2.01.05 Pendataan dan	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran	253518 Objek	4,941,708,001

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerahh Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Pajak							Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerahh Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Pajak	
					5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	823518 Objek Pajak	6,479,703,041						5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	823518 Objek Pajak	6,880,677,779
					5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan PBB dan BPHTB	297650 Objek Pajak	1,199,670,376						5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan PBB dan BPHTB	547650 Objek Pajak	1,278,221,435
					5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani	22537 Objek Pajak	1,781,630,110						5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani	71268 Objek Pajak	2,029,991,753
					5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	12 bulan	266,095,113						5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	12 bulan	311,827,621

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Daerah dan Retribusi Daerah								Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Daerah dan Retribusi Daerah		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								**111,796,479,760**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**								**136,652,681,700**
	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**111,796,479,760**		**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**136,652,681,700**
		5.02 KEUANGAN						**111,796,479,760**			**5.02 KEUANGAN**						**136,652,681,700**
			5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	**59,630,554,659**				**5.0201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	**51,891,857,809**
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**46,418,571,206**					**5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**38,645,227,834**
					5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	46,418,571,206						5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	38,645,227,834
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90%	**674,555,855**					**5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90%	**961,219,742**
					5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	674,555,855						5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	961,219,742
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**5,299,617,182**					**5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**5,417,898,000**
						Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%								Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	826,677,718					5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	826,181,907
					5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,472,939,464					5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,591,716,093
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	**7,237,810,416**				**5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	**6,867,512,233**
					5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2800 Unit	7,237,810,416					5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2800 Unit	6,867,512,233
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	**14,627,049,710**				**5.0202 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	**44,544,165,764**
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan	7 Dokumen	**2,883,789,162**					**5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan	7 Dokumen	**3,334,171,904**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
					5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	600,807,015						5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	601,372,300
					5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	724,369,806						5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	724,380,400
					5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Laporan	807,387,441						5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Laporan	887,441,270
					5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Laporan	751,224,900						5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Laporan	1,120,977,934
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan		Jumlah Berkas Pencairan Dana	76318 berkas	**1,837,213,530**					**5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan**		Jumlah Berkas Pencairan Dana	76318 berkas	**1,878,146,800**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Perbendaharaan Daerah				secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.			**Perbendaharaan Daerah**				secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.		
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	494,685,379	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	551,309,359
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.	76318 Berkas	1,342,528,151	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.	76318 Berkas	1,326,837,441
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen	**1,082,136,031**	**5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen	**1,081,847,060**
5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen	1,082,136,031	5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen	1,081,847,060
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**8,823,910,987**	**5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**38,250,000,000**
				Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%						Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%	
				Persentase realisasi	25%						Persentase realisasi	25%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dana darurat dan mendesak									dana darurat dan mendesak		
					5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	500,000,000						5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	500,000,000
					5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	7,573,910,987						5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	37,000,000,000
					5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%	750,000,000						5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%	750,000,000
			5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	26,70%	**37,538,875,391**				**5.0203 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	26,70%	**40,216,658,127**
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	**37,538,875,391**					**5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	**40,216,658,127**
						Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%								Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	
					5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diamankan	100 bidang	11,610,541,038						5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diamankan	100 bidang	11,435,892,238
						Jumlah tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada	700 dokumen								Jumlah tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada	700 dokumen	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					tahap peta bidang									tahap peta bidang		
					5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Kasus/Obyek	2,326,797,463						5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Kasus/Obyek	2,326,797,463
					5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan	7679 lokasi	18,935,656,096						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan	7679 lokasi	21,788,087,751
					5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring pencatatan Barang Milik Daerah	58 Lembaga	4,665,880,794						5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring pencatatan Barang Milik Daerah	58 Lembaga	4,665,880,675
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan								**38,552,033,900**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**								**36,505,790,908**
	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**38,552,033,900**		**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**36,505,790,908**
		5.01 PERENCANAAN						**37,599,331,333**			**5.01 PERENCANAAN**						**35,518,528,788**
			5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,40%	**27,722,137,022**				**5.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,40%	**26,067,141,347**
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**181,738,050**					**5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**316,314,724**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	181,738,050					5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	316,314,724
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,582,712,000**					**5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,539,330,818**
					5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24,582,712,000					5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,539,330,818
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2,957,686,972**					**5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3,211,495,805**
					5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	328,756,713					5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	440,623,993
					5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,628,930,259					5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,770,871,812
			5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	**3,665,331,244**				**5.0102 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	**3,511,356,566**
						Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%								Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%	
						Persentase ketepatan waktu penyusunan	100%								Persentase ketepatan waktu penyusunan	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah	2 dokumen	**1,417,994,468**	**5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah	2 dokumen	**1,404,263,525**
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	1,417,994,468	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	1,404,263,525
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	33 data urusan	**1,343,886,845**	**5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah data urusan yang dikelola	33 data urusan	**1,180,103,675**
5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	1,343,886,845	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	1,180,103,675
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	**903,449,931**	**5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	**926,989,366**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	903,449,931					5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	926,989,366
			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,23%	**6,211,863,067**				**5.0103 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,23%	**5,940,030,875**
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dokumen	**1,700,799,640**				**5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dokumen	**1,681,362,901**
					5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dokumen	662,920,619					5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dokumen	643,720,619
					5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen	1,037,879,021					5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen	1,037,642,282

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah Bidang Pembangunan Manusia									Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen	**1,927,487,655**					**5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen	**1,798,899,756**
					5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	2 Dokumen	996,659,510					5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	2 Dokumen	874,987,610
					5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	2 Dokumen	930,828,145					5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	2 Dokumen	923,912,146
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen	**2,583,575,772**					**5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen	**2,459,768,218**
					5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	1,318,563,051					5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	1,222,744,752

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun								Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun		
					5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 Dokumen	1,265,012,721						5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 Dokumen	1,237,023,466
		5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**952,702,567**			**5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**987,262,120**
			5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	**952,702,567**				**5.0502 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	**987,262,120**
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun	4 Dokumen	**952,702,567**					**5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun	4 Dokumen	**987,262,120**
					5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian yang disusun	2 Dokumen	508,369,444						5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian yang disusun	2 Dokumen	532,050,120
					5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang	2 Dokumen	444,333,123						5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang	2 Dokumen	455,212,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	disusun								Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	disusun		
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata								**227,031,770,130**	**Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata**								**210,685,254,686**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**210,339,143,448**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**196,191,769,559**
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**155,793,881,556**		**2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**144,074,138,394**
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	20%	**86,531,632,227**			**2.1902 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	20%	**74,483,585,040**
						Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	20%								Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	20%	
						Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46,48%								Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46,48%	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda		Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	3 jenis	**86,531,632,227**					**2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda**	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	**74,483,585,040**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kader Kabupaten/Kota									**Kader Kabupaten/Kota**				
						Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	35 jenis								Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	33 jenis	
						Jumlah laporan hasil studi mahasiswa yang diterima	15449 laporan								Jumlah laporan hasil studi mahasiswa yang diterima	15449 laporan	
					2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Kegiatan Wirausaha Muda Pemula	17 Kegiatan	1,528,353,120						2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Kegiatan Wirausaha Muda Pemula	14 Kegiatan	917,481,600
					2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Saing Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	35 kegiatan	681,605,100						2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Saing Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	34 kegiatan	395,010,100
					2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah penerima beasiswa pendidikan	15449 orang	80,973,033,827						2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah penerima beasiswa pendidikan	15449 orang	71,042,777,300
					2.19.02.2.01.08 Peningkatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan	41 kegiatan	3,348,640,180						2.19.02.2.01.08 Peningkatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan	40 kegiatan	2,128,316,040

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda								Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		
			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	164 medali	**69,262,249,329**				**2.1903 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	164 medali	**69,590,553,354**
						Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	10%								Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	10%	
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	4 kecamatan	**16,025,795,798**					**2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	4 kecamatan	**11,443,875,152**
					2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Olahraga yang Dibangun dan Ditingkatkan	30 unit	16,025,795,798						2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Olahraga yang Dibangun dan Ditingkatkan	30 unit	11,443,875,152
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	42 cabang olahraga	**28,602,122,525**					**2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	42 cabang olahraga	**34,239,364,240**
					2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM	50 kegiatan	28,602,122,525						2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM	50 kegiatan	34,239,364,240

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kabupaten / Kota	Olahraga Prestasi yang diselenggarakan								Kabupaten / Kota	Olahraga Prestasi yang diselenggarakan		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah jenis pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	12 jenis	**24,634,331,006**					**2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		Jumlah jenis pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	12 jenis	**23,907,313,962**
						Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	149 lokasi								Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	149 lokasi	
					2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	12 kegiatan	3,206,992,077						2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	12 kegiatan	2,785,431,790
					2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana olahraga yang dilakukan	189 kali	21,427,338,929						2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana olahraga yang dilakukan	189 kali	21,121,882,172
		2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**54,545,261,892**			**2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**52,117,631,165**
			2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**39,515,323,767**				**2.2201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**37,473,356,310**
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,803,904,000**					**2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,396,287,765**
					2.22.01.2.02.01	Persentase	100%	22,803,904,000						2.22.01.2.02.01	Persentase	100%	22,396,287,765

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	**16,711,419,767**					**2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	**15,077,068,545**
						Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%								Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	
					2.22.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	1,813,554,312						2.22.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	1,654,093,799
					2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 jenis	14,897,865,455						2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 jenis	13,422,974,746
			2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	60%	**6,045,672,430**				**2.2202 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	60%	**6,244,475,175**
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemanfaatan budaya daerah	440 kali	**5,656,204,505**					**2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pemanfaatan budaya daerah	440 kali	**5,855,007,250**
					2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	440 kali	5,656,204,505						2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	440 kali	5,855,007,250
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional		Jumlah pengembangan	3 kali	**389,467,925**					**2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional**		Jumlah pengembangan	3 kali	**389,467,925**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					tradisi budaya lokal			**yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					tradisi budaya lokal		
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	389,467,925	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	389,467,925
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59,10%	**1,974,479,185**	**2.2203 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59,10%	**1,601,046,521**
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	770 kali	**1,974,479,185**	**2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	770 kali	**1,601,046,521**
2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Jumlah pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional yg difasilitasi	770 kali	1,974,479,185	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Jumlah pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional yg difasilitasi	770 kali	1,601,046,521
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					Persentase siswa yang memahami materi sejarah	72%	**1,085,015,663**	**2.2204 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					Persentase siswa yang memahami materi sejarah	72%	**1,085,015,663**
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	**1,085,015,663**	**2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	**1,085,015,663**
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi					Jumlah pelaksanaan event peningkatan akses masyarakat	10 kali	1,085,015,663	2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi					Jumlah pelaksanaan event peningkatan akses masyarakat	10 kali	1,085,015,663

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sejarah	terhadap nilai sejarah								Sejarah	terhadap nilai sejarah		
			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04%	**1,600,506,077**				**2.2205 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04%	**1,390,051,657**
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	266 lokasi	**1,600,506,077**					**2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	266 lokasi	**1,390,051,657**
					2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring sesuai dengan kaidah pelestarian	266 lokasi	1,600,506,077						2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring sesuai dengan kaidah pelestarian	266 lokasi	1,390,051,657
			2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	**4,324,264,770**				**2.2206 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	**4,323,685,839**
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah museum yang dikembangkan, dipelihara dan disediakan sarana penunjang	8 lokasi	**4,324,264,770**					**2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**		Jumlah museum yang dikembangkan, dipelihara dan disediakan sarana penunjang	8 lokasi	**4,323,685,839**
					2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah museum yang dikembangkan	2 lokasi	450,849,060						2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah museum yang dikembangkan	2 lokasi	450,849,060
					2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr.	8 kegiatan	807,608,640						2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr.	8 kegiatan	807,608,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Soetomo									Soetomo		
					2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2 lokasi	241,542,300						2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2 lokasi	241,542,300
					2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	7 lokasi	2,824,264,770						2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	7 lokasi	2,823,685,839
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**16,692,626,682**	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**14,493,485,127**
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							**16,692,626,682**		**3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**14,493,485,127**
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	35,71%	**5,395,437,087**			**3.2602 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	35,71%	**5,474,622,314**
			3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	**4,445,491,467**				**3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	**4,457,798,864**
					3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2 lokasi	4,341,037,622						3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2 lokasi	4,307,573,364
					3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	60 kali	104,453,845						3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	60 kali	150,225,500
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	**949,945,620**					**3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata**		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	**1,016,823,450**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kabupaten/Kota								**Kabupaten/Kota**							
3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata	1 dokumen	462,771,738	3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata	1 dokumen	317,286,500
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					Jumlah kampung wisata dan wisata terintegrasi yang dikembangkan	1 lokasi	487,173,882	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					Jumlah kampung wisata dan wisata terintegrasi yang dikembangkan	1 lokasi	699,536,950
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	41,50%	**7,431,101,009**	**3.2603 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	41,50%	**6,648,532,479**
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	3 dokumen	**7,431,101,009**	**3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**					Jumlah dokumen laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	3 dokumen	**6,648,532,479**
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri	206 kali	7,431,101,009	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Jumlah penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri	206 kali	6,648,532,479
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	60%	**3,866,088,586**	**3.2605 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	60%	**2,370,330,334**
					Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	20%							Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	20%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	20%			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	20%	
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan	9 kali	**718,192,101**	**3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan	9 kali	**700,997,741**
	Jumlah pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 kelompok			Jumlah pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 kelompok	
3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	6 kali	361,212,744	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	6 kali	338,726,583
3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan yang dilaksanakan	3 kali	356,979,357	3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan yang dilaksanakan	3 kali	362,271,158
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	3 Produk	**3,147,896,485**	**3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku**	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	3 Produk	**1,669,332,593**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Ekonomi Kreatif									**Ekonomi Kreatif**				
					3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	20 Kali	3,147,896,485					3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	20 Kali	1,669,332,593
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								**30,757,743,856**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								**32,128,256,718**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**30,757,743,856**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**32,128,256,718**
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**30,757,743,856**		**2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**32,128,256,718**
		2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	85.77 %	**22,890,894,723**			**2.1201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	85.77 %	**23,545,446,900**
			2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	**69,983,200**				**2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	**69,983,200**
				2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	56,291,600					2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	56,291,600
				2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen Pelaksanaan Pembahasan, konsultasi dan koordinasi DAK Non Fisik	2 Dokumen	13,691,600					2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Pembahasan, konsultasi dan koordinasi DAK Non Fisik	2 Dokumen	13,691,600

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,318,948,000**	**2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,722,392,041**
				2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,318,948,000					2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,722,392,041
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	**525,058,575**	**2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	**525,058,575**
				2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik	100%	525,058,575					2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik	100%	525,058,575
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	**3,798,386,080**	**2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	**4,472,314,470**
					Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan adminduk	100%							Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan adminduk	100%	
				2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	3,798,386,080					2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	4,472,314,470

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelengaraan administrasi kependudukan	100%	**3,178,518,868**	**2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyelengaraan administrasi kependudukan	100%	**3,755,698,614**
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	3,178,518,868	2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	3,755,698,614
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	**2,975,890,869**	**2.1202 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	**3,336,340,562**
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas	**2,267,905,873**	**2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas	**2,549,011,321**
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas	2,267,905,873	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas	2,549,011,321
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	171500 berkas	**707,984,996**	**2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	171500 berkas	**787,329,241**
2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang	171500 berkas	707,984,996	2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang	171500 berkas	787,329,241

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	diterbitkan								Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	diterbitkan		
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	**1,774,830,681**				**2.1203 PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	**2,033,739,047**
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas	**1,280,098,408**					**2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil**		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas	**1,502,238,575**
					2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas	1,280,098,408						2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas	1,502,238,575
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	37000 berkas	**494,732,273**					**2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	37000 berkas	**531,500,472**
					2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan	37000 berkas	494,732,273						2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan	37000 berkas	531,500,472

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pencatatan Sipil	Sipil yang diterbitkan								Pencatatan Sipil	Sipil yang diterbitkan		
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	65%	**3,000,856,783**				**2.1204 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	65%	**3,097,459,409**
						Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	20%								Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	20%	
						Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	95%								Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	95%	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144000 data	**379,347,171**					**2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	119710 data	**431,285,768**
					2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144000 data	379,347,171						2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	119710 data	431,285,768
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	**593,832,663**					**2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	9 Lembaga	**607,985,163**
					2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	271,718,648						2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	271,718,648
					2.12.04.2.03.06 Kerja	Jumlah Lembaga	5	322,114,015						2.12.04.2.03.06 Kerja	Jumlah Lembaga	9	336,266,515

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	yang bekerjasama	Lembaga						sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	yang bekerjasama	Lembaga	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	**2,027,676,949**				**2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	**2,058,188,478**
					2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	2,027,676,949					2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	2,058,188,478
			2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**115,270,800**				**2.1205 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**115,270,800**
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen	**115,270,800**					**2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen	**115,270,800**
					2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan	2 kali	115,270,800					2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan	2 kali	115,270,800
Dinas Kesehatan								**1,406,804,023,510**	**Dinas Kesehatan**								**1,337,785,960,404**
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**1,406,804,023,510**		**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1,337,785,960,404**
		1.02 URUSAN						**1,406,804,023,510**			**1.02 URUSAN**						**1,337,785,960,404**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**510,051,554,064**
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**238,254,878,577**
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	238,254,878,577
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	**3,763,180,855**
1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	4 jenis	3,763,180,855
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**144,715,399,833**
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	144,715,399,833
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan	1 Puskesmas	**123,318,094,799**

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.0201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**566,982,413,323**
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**289,486,270,976**
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	289,486,270,976
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	**3,730,291,955**
1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	4 jenis	3,730,291,955
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**146,769,883,943**
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	146,769,883,943
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan	1 Puskesmas	**126,995,966,449**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanannya (Puskesmas Asemrowo)								pelayanannya (Puskesmas Asemrowo)		
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Bulak Banteng)								(Puskesmas Bulak Banteng)		
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanannya (Puskesmas Kebonsari)								pelayanannya (Puskesmas Kebonsari)		
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Klampis Ngasem)								(Puskesmas Klampis Ngasem)		
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanannya (Puskesmas Pakis)								pelayanannya (Puskesmas Pakis)		
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rangkah)								Rangkah)		
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tanjungsari)	Puskesmas							BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tanjungsari)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
				1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan	Jumlah jenis kebutuhan	2 Jenis	2,021,741,886					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan	Jumlah jenis kebutuhan	2 Jenis	2,091,142,123

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penunjang Pelayanan BLUD	operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Asemrowo)								Penunjang Pelayanan BLUD	operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Asemrowo)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Jenis	631,350,791						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Jenis	612,947,689
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Balongsari)	2 Jenis	1,785,348,297						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Balongsari)	2 Jenis	1,746,209,808
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Bangkingan)	2 Jenis	627,213,301						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Bangkingan)	2 Jenis	646,987,207
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	2,581,189,886						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	2,660,391,495

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Banyu Urip)								Pelayanan BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Banyu Urip)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Benowo)	2 Jenis	2,463,645,493						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Benowo)	2 Jenis	2,554,788,613
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Jenis	1,572,441,250						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Jenis	1,676,176,061
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Jenis	1,977,367,742						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Jenis	2,052,058,187
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan	2 Jenis	2,368,041,846						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan	2 Jenis	2,401,202,411

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dukuh Kupang)									penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dukuh Kupang)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dupak)	2 Jenis	1,403,026,532						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Dupak)	2 Jenis	1,354,263,523
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gading)	2 Jenis	3,099,583,581						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gading)	2 Jenis	3,236,030,603
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gayungan)	2 Jenis	1,803,603,443						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gayungan)	2 Jenis	1,874,086,155
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di	2 Jenis	1,609,753,380						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di	2 Jenis	1,638,499,431

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gundih)									Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gundih)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Jenis	1,662,340,101						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Jenis	1,673,756,878
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jagir)	2 Jenis	2,886,804,875						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jagir)	2 Jenis	2,994,610,641
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jemursari)	2 Jenis	947,893,887						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jemursari)	2 Jenis	966,126,885
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jeruk)	2 Jenis	1,058,038,438						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Jeruk)	2 Jenis	1,072,213,159

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kalijudan)	2 Jenis	1,493,918,577					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kalijudan)	2 Jenis	1,549,608,249
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kalirungkut)	2 Jenis	1,886,908,693					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kalirungkut)	2 Jenis	1,954,855,877
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kebonsari)	2 Jenis	1,861,558,490					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kebonsari)	2 Jenis	1,993,007,037
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kedungdoro)	2 Jenis	2,126,622,098					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kedungdoro)	2 Jenis	2,230,688,439
					1.02.01.2.10.01	Jumlah jenis	2 Jenis	2,419,290,811					1.02.01.2.10.01	Jumlah jenis	2 Jenis	2,472,583,034

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kedurus)								Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kedurus)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kenjeran)	2 Jenis	1,811,458,817						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Kenjeran)	2 Jenis	1,857,364,720
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Keputih)	2 Jenis	1,420,317,177						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Keputih)	2 Jenis	1,426,317,214
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Ketabang)	2 Jenis	1,121,672,485						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Ketabang)	2 Jenis	1,125,717,385
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan	Jumlah jenis kebutuhan	2 Jenis	1,266,704,912						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan	Jumlah jenis kebutuhan	2 Jenis	1,299,591,478

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penunjang Pelayanan BLUD	operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Klampis Ngasem)								Penunjang Pelayanan BLUD	operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Klampis Ngasem)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Jenis	1,956,828,673						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Jenis	2,041,993,389
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Jenis	1,150,313,666						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Jenis	1,245,759,774
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Lontar)	2 Jenis	1,506,313,367						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Lontar)	2 Jenis	1,566,407,191
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	938,617,278						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	913,870,375

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Made)								Pelayanan BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Made)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Jenis	2,860,148,974						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Jenis	2,826,328,738
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Jenis	2,136,199,443						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Jenis	2,233,833,742
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Menur)	2 Jenis	1,813,376,013						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Menur)	2 Jenis	1,889,115,227
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di	2 Jenis	2,825,495,403						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di	2 Jenis	3,093,468,502

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Mojo)									Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Mojo)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Jenis	1,989,056,526						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Jenis	2,033,501,935
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Mulyorejo)	2 Jenis	1,971,300,144						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Mulyorejo)	2 Jenis	2,013,663,934
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Jenis	1,919,078,553						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Jenis	1,981,706,028
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pacar	2 Jenis	2,353,277,947						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pacar	2 Jenis	2,457,400,730

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Keling)									Keling)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pakis)	2 Jenis	1,478,769,147						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pakis)	2 Jenis	1,511,842,791
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pegirian)	2 Jenis	2,390,846,506						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pegirian)	2 Jenis	2,454,706,946
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Peneleh)	2 Jenis	1,620,033,054						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Peneleh)	2 Jenis	1,669,578,781
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Perak Timur)	2 Jenis	3,109,476,771						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Perak Timur)	2 Jenis	3,220,996,351
					1.02.01.2.10.01	Jumlah jenis	2 Jenis	2,351,715,905						1.02.01.2.10.01	Jumlah jenis	2 Jenis	2,394,788,329

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pucangsewu)								Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Pucangsewu)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Putat Jaya)	2 Jenis	1,946,997,084						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Putat Jaya)	2 Jenis	1,994,655,112
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Rangkah)	2 Jenis	2,690,767,831						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Rangkah)	2 Jenis	2,811,681,273
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Jenis	1,490,594,628						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Jenis	1,516,006,897
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan	Jumlah jenis kebutuhan	2 Jenis	2,401,279,875						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan	Jumlah jenis kebutuhan	2 Jenis	2,473,785,215

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penunjang Pelayanan BLUD	operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sawahan)								Penunjang Pelayanan BLUD	operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sawahan)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sememi)	2 Jenis	2,670,513,946						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sememi)	2 Jenis	2,702,779,943
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidosermo)	2 Jenis	1,391,193,083						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidosermo)	2 Jenis	1,423,924,217
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidotopo)	2 Jenis	2,095,337,374						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidotopo)	2 Jenis	2,173,557,129
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	2,724,605,677						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	2,863,383,294

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidotopo Wetan)								Pelayanan BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Sidotopo Wetan)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Simolawang)	2 Jenis	2,143,814,435						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Simolawang)	2 Jenis	2,191,113,252
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Simomulyo)	2 Jenis	3,101,778,426						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Simomulyo)	2 Jenis	3,240,118,073
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Siwalankerto)	2 Jenis	1,102,583,399						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Siwalankerto)	2 Jenis	1,065,776,419
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan	2 Jenis	913,086,912						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan	2 Jenis	939,360,662

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tambak Wedi)									penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tambak Wedi)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tambakrejo)	2 Jenis	2,652,125,745						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tambakrejo)	2 Jenis	2,743,700,200
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Jenis	2,884,734,639						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Jenis	2,899,737,906
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tanjungsari)	2 Jenis	1,136,973,446						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tanjungsari)	2 Jenis	1,209,847,844
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang	2 Jenis	2,421,094,107						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang	2 Jenis	2,508,940,997

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tembok Dukuh)									pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tembok Dukuh)		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tenggilis)	2 Jenis	2,028,513,718						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Tenggilis)	2 Jenis	1,994,391,165
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wiyung)	2 Jenis	2,226,468,509						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wiyung)	2 Jenis	2,299,128,965
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wonokromo)	2 Jenis	1,847,562,485						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wonokromo)	2 Jenis	1,930,792,997
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di	2 Jenis	3,169,385,321						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di	2 Jenis	3,303,097,824

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wonokusumo)				Pukesmas terpenuhi (Puskesmas Wonokusumo)		
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	**734,130,255,947**	**1.0202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	**612,107,759,515**
						Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,03%			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,03%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,45%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,45%	
						Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,17%			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,17%	
						Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	
						Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	77,78%			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	77,78%	
						Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	
						Persentase Jaminan Kesehatan	96,64%			Persentase Jaminan Kesehatan	96,64%	
						Persentase Ketersediaan Obat	100%			Persentase Ketersediaan Obat	100%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan								dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan		
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	
					Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%							Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	
					Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	53%							Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	53%	
					Persentase Rumah Sehat	88,18%							Persentase Rumah Sehat	88,18%	
					Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%							Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	
					Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,10%							Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,10%	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1 lembaga	**263,331,981,790**					**1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1 lembaga	**91,656,841,207**
					Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan	14 Bangunan							Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan	14 Bangunan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dipelihara									dipelihara		
															Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	1 Kegiatan	
						Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	63 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	63 Puskesmas	
						Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	63 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	63 Puskesmas	
						Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat pengembangan sarana	1 lembaga								Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat pengembangan sarana	1 lembaga	
					1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 Bangunan	158,814,635,000						1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 Bangunan	1,001,000,000
					1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	6 Dokumen	224,987,739						1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 Dokumen	127,857,939
					1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	12 Bangunan	46,522,422,397						1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	12 Bangunan	37,555,610,625
					1.02.02.2.01.10	Jumlah Fasilitas	1	942,327,569						1.02.02.2.01.10	Jumlah Fasilitas	1	902,549,569

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara	Bangunan						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara	Bangunan	
					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 Jenis	688,379,528					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 Jenis	688,379,528
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	2 Jenis	9,402,873,500					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	1 Jenis	6,342,884,500
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang diadakan	4 Jenis	2,476,613,000					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang diadakan	4 Jenis	2,246,362,440
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	61 Jenis	24,497,366,703					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	61 Jenis	24,142,366,703
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan diadakan	33 Jenis	19,762,376,354					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan diadakan	33 Jenis	18,370,376,343
					1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta			0					1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke	2 Paket	230,250,560

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Fasilitas Kesehatan Lainnya									Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.01.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			0					1.02.02.2.01.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga	63 Puskesmas	49,203,000
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kegawatdaruratan yang pada posko terpadu	7 dokumen	**469,570,191,214**				**1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen kegawatdaruratan yang pada posko terpadu	7 dokumen	**519,413,520,621**
						Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154 Kelurahan								Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	154 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	154 Kelurahan	
						Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	154 Kelurahan								Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	154 Kelurahan	
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru	63 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru	63 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					lahir								lahir		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gundih)	Puskesmas							yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gundih)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kalirungkut)	as							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kalirungkut)	as	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ketabang)								Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ketabang)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manukan Kulon)								Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manukan Kulon)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Hamil (Puskesmas Ngagel Rejo)								Hamil (Puskesmas Ngagel Rejo)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pucangsewu)								Pucangsewu)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambak Wedi)	Puskesmas							yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambak Wedi)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wonokromo)	Puskesmas							yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wonokromo)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	63 puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	63 puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dukuh Kupang)	as							pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dukuh Kupang)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Gunung Anyar)								(Puskesmas Gunung Anyar)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	as							pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					lingkungan (Puskesmas Ketabang)								lingkungan (Puskesmas Ketabang)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					lingkungan (Puskesmas Mulyorejo)								lingkungan (Puskesmas Mulyorejo)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sawah Pulo)	as							pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sawah Pulo)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					lingkungan (Puskesmas Simolawang)								lingkungan (Puskesmas Simolawang)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tanah	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tanah	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kali Kedinding)								Kali Kedinding)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wonokusumo)	Puskesmas							yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas Wonokusumo)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					PTM) (Puskesmas Bangkingan)								PTM) (Puskesmas Bangkingan)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jagir)	as							pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jagir)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kebonsari)								Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kebonsari)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Ketabang)								Ketabang)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Mulyorejo)	as							pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Mulyorejo)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Menular (bindu PTM) (Puskesmas Peneleh)								Menular (bindu PTM) (Puskesmas Peneleh)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sawahan)								Sawahan)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Simolawang)	Puskesmas							yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Simolawang)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)								Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wonokromo)								Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wonokromo)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bangkingan)								Bangkingan)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dupak)	Puskesmas							yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Dupak)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					penyakit menular (Puskesmas Jagir)								penyakit menular (Puskesmas Jagir)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kedungdoro)	Puskesmas							yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kedungdoro)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pengendalian penyakit menular (Puskesmas Klampis Ngasem)								pengendalian penyakit menular (Puskesmas Klampis Ngasem)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Manukan Kulon)								Manukan Kulon)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pengendalian penyakit menular (Puskesmas Ngagel Rejo)								pengendalian penyakit menular (Puskesmas Ngagel Rejo)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Perak	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Perak	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Timur)								Timur)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sememi)	Puskesmas							yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sememi)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pengendalian penyakit menular (Puskesmas Simomulyo)								pengendalian penyakit menular (Puskesmas Simomulyo)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Tanjungsari)								(Puskesmas Tanjungsari)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat (Puskesmas Dukuh Kupang)								Masyarakat (Puskesmas Dukuh Kupang)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gunung Anyar)								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gunung Anyar)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalirungkut)	as							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalirungkut)	as	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kenjeran)								Kenjeran)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lidah Kulon)								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lidah Kulon)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Menur)	as							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Menur)	as	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pacar Keling)	Puskesmas							yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pacar Keling)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Perak	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Perak	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Timur)								Timur)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sawah Pulo)								Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sawah Pulo)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simolawang)	Puskesmas							yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simolawang)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Tambak Wedi)								(Puskesmas Tambak Wedi)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wiyung)								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wiyung)		
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balas Klumprik)	as							pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balas Klumprik)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Benowo)								Benowo)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					olahraga (Puskesmas Gading)								olahraga (Puskesmas Gading)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jemursari)								pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jemursari)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedungdoro)	Puskesmas							yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedungdoro)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Puskesmas Ketabang)								Puskesmas Ketabang)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Made)								pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Made)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Moro Krembangan)								pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Moro Krembangan)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pegirian)	Puskesmas							yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pegirian)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Putat Jaya)								(Puskesmas Putat Jaya)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidosermo)								pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidosermo)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					olahraga (Puskesmas Tanjungsari)								olahraga (Puskesmas Tanjungsari)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokusumo)	as							pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokusumo)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Banyu Urip)								dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Banyu Urip)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Dupak)								(Puskesmas Dupak)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jemursari)	as							surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jemursari)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Kedungdoro)								(Puskesmas Kedungdoro)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Medokan Ayu)								dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Medokan Ayu)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pucangsewu)								dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pucangsewu)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Sememi)								(Puskesmas Sememi)		
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	as							surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	as	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan	63 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan	63 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					imunisasi								imunisasi		
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gundih)	Puskesmas							Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gundih)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalirungkut)	as							Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalirungkut)	as	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ketabang)								Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ketabang)		
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Manukan Kulon)								Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Manukan Kulon)		
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					lanjut (Puskesmas Ngagel Rejo)								lanjut (Puskesmas Ngagel Rejo)		
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pucangsewu)								Pucangsewu)		
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambak Wedi)	Puskesmas							Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambak Wedi)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokromo)	Puskesmas							Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokromo)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas							Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kegiatannya (Puskesmas Bangkingan)								kegiatannya (Puskesmas Bangkingan)		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Dupak)								(Puskesmas Dupak)		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jeruk)	Puskesmas							yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Jeruk)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kegiatannya (Puskesmas Kenjeran)								kegiatannya (Puskesmas Kenjeran)		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kegiatannya (Puskesmas Lontar)								kegiatannya (Puskesmas Lontar)		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					operasional kegiatannya (Puskesmas Mulyorejo)	as							operasional kegiatannya (Puskesmas Mulyorejo)	as	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Perak Timur)								(Puskesmas Perak Timur)		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sememi)								Sememi)		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wiyung)	Puskesmas								yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wiyung)	Puskesmas	
						Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
						Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
						Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	63 Puskesmas								Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	63 Puskesmas	
						Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa								Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa	
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63 Puskesmas	7,370,598,911						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63 Puskesmas	7,370,598,911
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	4 Kegiatan	7,339,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	4 Kegiatan	7,339,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Ibu Hamil	kesehatan ibu hamil (Puskesmas Asemrowo)							Kesehatan Ibu Hamil	kesehatan ibu hamil (Puskesmas Asemrowo)		
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Balas Klumprik)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Balas Klumprik)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Balongsari)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Balongsari)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Bangkingan)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Bangkingan)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Banyu Urip)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Banyu Urip)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Benowo)	4 Kegiatan	8,449,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Benowo)	4 Kegiatan	8,449,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	5,119,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Bulak Banteng)									(Puskesmas Bulak Banteng)		
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dr. Soetomo)	4 Kegiatan	7,339,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dr. Soetomo)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dukuh Kupang)	4 Kegiatan	8,532,000						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dukuh Kupang)	4 Kegiatan	8,532,000
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dupak)	4 Kegiatan	5,119,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Dupak)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gading)	4 Kegiatan	7,339,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gading)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gayungan)	4 Kegiatan	8,532,000						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gayungan)	4 Kegiatan	8,532,000
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gundih)	4 Kegiatan	6,229,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gundih)	4 Kegiatan	6,229,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gunung Anyar)	4 Kegiatan	8,532,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Gunung Anyar)	4 Kegiatan	8,532,000
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jagir)	4 Kegiatan	7,422,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jagir)	4 Kegiatan	7,422,000
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jemursari)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jemursari)	4 Kegiatan	5,119,500
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jeruk)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Jeruk)	4 Kegiatan	6,229,500
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kalijudan)	4 Kegiatan	7,422,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kalijudan)	4 Kegiatan	7,422,000
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kalirungkut)	4 Kegiatan	7,422,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kalirungkut)	4 Kegiatan	7,422,000
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	4 Kegiatan	8,532,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	4 Kegiatan	8,532,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Ibu Hamil	kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kebonsari)							Kesehatan Ibu Hamil	kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kebonsari)		
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kedungdoro)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kedungdoro)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kedurus)	4 Kegiatan	8,532,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kedurus)	4 Kegiatan	8,532,000
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kenjeran)	4 Kegiatan	8,449,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Kenjeran)	4 Kegiatan	8,449,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Keputih)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Keputih)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Ketabang)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Ketabang)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	6,229,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Klampis Ngasem)									(Puskesmas Klampis Ngasem)		
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Krembangan Selatan)	4 Kegiatan	7,339,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Krembangan Selatan)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Lidah Kulon)	4 Kegiatan	6,229,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Lidah Kulon)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Lontar)	4 Kegiatan	6,229,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Lontar)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Made)	4 Kegiatan	6,229,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Made)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Manukan Kulon)	4 Kegiatan	7,339,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Manukan Kulon)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Medokan Ayu)	4 Kegiatan	7,422,000						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Medokan Ayu)	4 Kegiatan	7,422,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Menur)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Menur)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Mojo)	4 Kegiatan	7,422,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Mojo)	4 Kegiatan	7,422,000
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Moro Krembangan)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Moro Krembangan)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Mulyorejo)	4 Kegiatan	7,422,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Mulyorejo)	4 Kegiatan	7,422,000
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Ngagel Rejo)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Ngagel Rejo)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pacar Keling)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pacar Keling)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	4 Kegiatan	5,119,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Ibu Hamil	kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pakis)							Kesehatan Ibu Hamil	kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pakis)		
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pegirian)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pegirian)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Peneleh)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Peneleh)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Perak Timur)	4 Kegiatan	9,559,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Perak Timur)	4 Kegiatan	9,559,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pucangsewu)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Pucangsewu)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Putat Jaya)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Putat Jaya)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas	4 Kegiatan	7,339,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Rangkah)									Rangkah)		
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sawah Pulo)	4 Kegiatan	5,119,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sawah Pulo)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sawahan)	4 Kegiatan	6,229,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sawahan)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sememi)	4 Kegiatan	8,449,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sememi)	4 Kegiatan	8,449,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidosermo)	4 Kegiatan	7,422,000						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidosermo)	4 Kegiatan	7,422,000
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidotopo)	4 Kegiatan	6,229,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidotopo)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidotopo Wetan)	4 Kegiatan	5,119,500						1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Sidotopo Wetan)	4 Kegiatan	5,119,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Simolawang)	4 Kegiatan	6,229,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Simolawang)	4 Kegiatan	6,229,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Simomulyo)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Simomulyo)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Siwalankerto)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Siwalankerto)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tambak Wedi)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tambak Wedi)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tambakrejo)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tambakrejo)	4 Kegiatan	7,339,500
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	4 Kegiatan	5,119,500
					1.02.02.2.02.01	Jumlah kegiatan	4	7,339,500					1.02.02.2.02.01	Jumlah kegiatan	4	7,339,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tanjungsari)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tanjungsari)	Kegiatan	
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tembok Dukuh)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tembok Dukuh)	4 Kegiatan	7,339,500
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tenggilis)	4 Kegiatan	8,532,000					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Tenggilis)	4 Kegiatan	8,532,000
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wiyung)	4 Kegiatan	7,339,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wiyung)	4 Kegiatan	7,339,500
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wonokromo)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wonokromo)	4 Kegiatan	5,119,500
				1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wonokusumo)	4 Kegiatan	5,119,500					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Puskesmas Wonokusumo)	4 Kegiatan	5,119,500
				1.02.02.2.02.02 Pengelolaan	Jumlah Kunjungan Ibu dan Bayi Baru	138 Kunjunga	457,501,000					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan	Jumlah Kunjungan Ibu dan Bayi Baru	138 Kunjunga	457,501,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	n						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	n	
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu PTM)	63 Puskesmas	1,825,182,600					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu PTM)	63 Puskesmas	1,391,802,960
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Asemrowo)	3 Kegiatan	10,661,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Asemrowo)	3 Kegiatan	10,661,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Balas Klumprik)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Balas Klumprik)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Balongsari)	3 Kegiatan	5,547,300					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Balongsari)	3 Kegiatan	5,547,300
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Bangkingan)	3 Kegiatan	91,3					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Bangkingan)	3 Kegiatan	91,3
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	10,661,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	10,661,640

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Banyu Urip)								Produktif	(Puskesmas Banyu Urip)		
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Benowo)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Benowo)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Bulak Banteng)	3 Kegiatan	5,546,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Bulak Banteng)	3 Kegiatan	5,546,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dr. Soetomo)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dr. Soetomo)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dukuh Kupang)	3 Kegiatan	4,864,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dukuh Kupang)	3 Kegiatan	4,864,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dupak)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dupak)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gading)	3 Kegiatan	10,662,300						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gading)	3 Kegiatan	10,662,300

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gayungan)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gayungan)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gundih)	3 Kegiatan	91,3					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gundih)	3 Kegiatan	91,3
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gunung Anyar)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Gunung Anyar)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jagir)	3 Kegiatan	5,546,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jagir)	3 Kegiatan	5,546,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jemursari)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jemursari)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jeruk)	3 Kegiatan	10,661,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Jeruk)	3 Kegiatan	10,661,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada	3 Kegiatan	5,546,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada	3 Kegiatan	5,546,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				pada Usia Produktif	Usia Produktif (Puskesmas Kalijudan)							Kesehatan pada Usia Produktif	Usia Produktif (Puskesmas Kalijudan)		
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kalirungkut)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kalirungkut)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kebonsari)	3 Kegiatan	91,3					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kebonsari)	3 Kegiatan	91,3
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedungdoro)	3 Kegiatan	4,864,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedungdoro)	3 Kegiatan	4,864,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedurus)	3 Kegiatan	7,251,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedurus)	3 Kegiatan	7,251,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kenjeran)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kenjeran)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	10,661,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	10,661,640

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Keputih)								Produktif	(Puskesmas Keputih)		
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Ketabang)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Ketabang)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Klampis Ngasem)	3 Kegiatan	91,3						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Klampis Ngasem)	3 Kegiatan	91,3
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Krembangan Selatan)	3 Kegiatan	5,546,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Krembangan Selatan)	3 Kegiatan	5,546,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Lidah Kulon)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Lidah Kulon)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Lontar)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Lontar)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Made)	3 Kegiatan	10,661,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Made)	3 Kegiatan	10,661,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Manukan Kulon)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Manukan Kulon)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Medokan Ayu)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Medokan Ayu)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Menur)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Menur)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mojo)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mojo)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Moro Krembangan)	3 Kegiatan	10,661,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Moro Krembangan)	3 Kegiatan	10,661,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mulyorejo)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mulyorejo)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada	3 Kegiatan	5,547,300					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada	3 Kegiatan	5,547,300

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				pada Usia Produktif	Usia Produktif (Puskesmas Ngagel Rejo)							Kesehatan pada Usia Produktif	Usia Produktif (Puskesmas Ngagel Rejo)		
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pacar Keling)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pacar Keling)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pakis)	3 Kegiatan	5,546,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pakis)	3 Kegiatan	5,546,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pegirian)	3 Kegiatan	4,864,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pegirian)	3 Kegiatan	4,864,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Peneleh)	3 Kegiatan	91,3					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Peneleh)	3 Kegiatan	91,3
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Perak Timur)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Perak Timur)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas	3 Kegiatan	10,662,300					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas	3 Kegiatan	10,662,300

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pucangsewu)									Pucangsewu)		
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Putat Jaya)	3 Kegiatan	4,864,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Putat Jaya)	3 Kegiatan	4,864,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Rangkah)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Rangkah)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sawah Pulo)	3 Kegiatan	90,64						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sawah Pulo)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sawahan)	3 Kegiatan	91,3						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sawahan)	3 Kegiatan	91,3
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sememi)	3 Kegiatan	10,320,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sememi)	3 Kegiatan	10,320,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidosermo)	3 Kegiatan	4,864,640						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidosermo)	3 Kegiatan	4,864,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidotopo)	3 Kegiatan	4,865,300					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidotopo)	3 Kegiatan	4,865,300
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidotopo Wetan)	3 Kegiatan	5,546,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sidotopo Wetan)	3 Kegiatan	5,546,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simolawang)	3 Kegiatan	4,864,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simolawang)	3 Kegiatan	4,864,640
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simomulyo)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simomulyo)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Siwalankerto)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Siwalankerto)	3 Kegiatan	90,64
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tambak Wedi)	3 Kegiatan	10,662,300					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tambak Wedi)	3 Kegiatan	10,662,300
					1.02.02.2.02.06	Jumlah kegiatan	3	4,864,640					1.02.02.2.02.06	Jumlah kegiatan	3	4,864,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tambakrejo)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tambakrejo)	Kegiatan	
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tanjungsari)	3 Kegiatan	4,864,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tanjungsari)	3 Kegiatan	4,864,640
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tembok Dukuh)	3 Kegiatan	91,3					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tembok Dukuh)	3 Kegiatan	91,3
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tenggilis)	3 Kegiatan	90,64					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tenggilis)	3 Kegiatan	90,64
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wiyung)	3 Kegiatan	91,08					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wiyung)	3 Kegiatan	91,08
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan	Jumlah kegiatan Pelayanan	3 Kegiatan	10,320,640					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan	Jumlah kegiatan Pelayanan	3 Kegiatan	10,320,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wonokromo)								Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wonokromo)		
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wonokusumo)	3 Kegiatan	10,662,300						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Wonokusumo)	3 Kegiatan	10,662,300
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	116,100,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	116,100,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Asemrowo)	1 Kegiatan	68,020,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Asemrowo)	1 Kegiatan	68,020,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Kegiatan	43,680,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Kegiatan	43,680,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balongsari)	1 Kegiatan	90,690,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Balongsari)	1 Kegiatan	90,690,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bangkingan)	1 Kegiatan	33,900,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bangkingan)	1 Kegiatan	33,900,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan	Jumlah Kegiatan Pelayanan	1 Kegiatan	77,360,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan	Jumlah Kegiatan Pelayanan	1 Kegiatan	77,360,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Banyu Urip)								Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Banyu Urip)		
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Benowo)	1 Kegiatan	138,160,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Benowo)	1 Kegiatan	138,160,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Kegiatan	19,494,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Kegiatan	19,494,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Kegiatan	53,240,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Kegiatan	53,240,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Kegiatan	67,580,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Kegiatan	67,580,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dupak)	1 Kegiatan	14,978,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Dupak)	1 Kegiatan	14,978,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gading)	1 Kegiatan	48,372,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gading)	1 Kegiatan	48,372,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas	1 Kegiatan	62,074,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas	1 Kegiatan	62,074,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Gayungan)								Lanjut	Gayungan)		
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gundih)	1 Kegiatan	91,108,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gundih)	1 Kegiatan	91,108,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Kegiatan	24,296,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Kegiatan	24,296,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jagir)	1 Kegiatan	81,920,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jagir)	1 Kegiatan	81,920,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jemursari)	1 Kegiatan	29,120,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jemursari)	1 Kegiatan	29,120,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jeruk)	1 Kegiatan	38,724,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Jeruk)	1 Kegiatan	38,724,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalijudan)	1 Kegiatan	66,920,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalijudan)	1 Kegiatan	66,920,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalirungkut)	1 Kegiatan	33,790,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kalirungkut)	1 Kegiatan	33,790,000
					1.02.02.2.02.07	Jumlah Kegiatan	1	53,020,000						1.02.02.2.02.07	Jumlah Kegiatan	1	53,020,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kebonsari)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kebonsari)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedungdoro)	1 Kegiatan	29,142,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedungdoro)	1 Kegiatan	29,142,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedurus)	1 Kegiatan	77,096,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kedurus)	1 Kegiatan	77,096,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kenjeran)	1 Kegiatan	77,316,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Kenjeran)	1 Kegiatan	77,316,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Keputih)	1 Kegiatan	34,010,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Keputih)	1 Kegiatan	34,010,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ketabang)	1 Kegiatan	38,658,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ketabang)	1 Kegiatan	38,658,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Kegiatan	43,504,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Kegiatan	43,504,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia	1 Kegiatan	48,020,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia	1 Kegiatan	48,020,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pada Usia Lanjut	lanjut (Puskesmas Krembangan Selatan)								Kesehatan pada Usia Lanjut	lanjut (Puskesmas Krembangan Selatan)		
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Kegiatan	53,240,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Kegiatan	53,240,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lontar)	1 Kegiatan	53,240,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Lontar)	1 Kegiatan	53,240,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Made)	1 Kegiatan	34,010,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Made)	1 Kegiatan	34,010,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Kegiatan	114,304,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Kegiatan	114,304,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Kegiatan	91,988,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Kegiatan	91,988,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Menur)	1 Kegiatan	48,592,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Menur)	1 Kegiatan	48,592,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas	1 Kegiatan	105,470,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas	1 Kegiatan	105,470,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Mojo)								Lanjut	Mojo)		
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Kegiatan	36,210,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Kegiatan	36,210,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mulyorejo)	1 Kegiatan	48,592,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Mulyorejo)	1 Kegiatan	48,592,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Kegiatan	77,536,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Kegiatan	77,536,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pacar Keling)	1 Kegiatan	87,030,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pacar Keling)	1 Kegiatan	87,030,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pakis)	1 Kegiatan	48,592,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pakis)	1 Kegiatan	48,592,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pegirian)	1 Kegiatan	53,460,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pegirian)	1 Kegiatan	53,460,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Peneleh)	1 Kegiatan	26,584,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Peneleh)	1 Kegiatan	26,584,000
					1.02.02.2.02.07	Jumlah Kegiatan	1	118,908,000						1.02.02.2.02.07	Jumlah Kegiatan	1	118,908,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Perak Timur)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Perak Timur)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pucangsewu)	1 Kegiatan	72,888,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Pucangsewu)	1 Kegiatan	72,888,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Putat Jaya)	1 Kegiatan	53,460,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Putat Jaya)	1 Kegiatan	53,460,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Rangkah)	1 Kegiatan	31,056,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Rangkah)	1 Kegiatan	31,056,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Kegiatan	43,724,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Kegiatan	43,724,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawahan)	1 Kegiatan	90,932,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sawahan)	1 Kegiatan	90,932,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sememi)	1 Kegiatan	53,460,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sememi)	1 Kegiatan	53,460,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia	1 Kegiatan	63,174,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia	1 Kegiatan	63,174,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pada Usia Lanjut	lanjut (Puskesmas Sidosermo)								Kesehatan pada Usia Lanjut	lanjut (Puskesmas Sidosermo)		
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo)	1 Kegiatan	100,162,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo)	1 Kegiatan	100,162,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Kegiatan	28,790,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Kegiatan	28,790,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simolawang)	1 Kegiatan	28,284,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simolawang)	1 Kegiatan	28,284,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simomulyo)	1 Kegiatan	77,448,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Simomulyo)	1 Kegiatan	77,448,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Siwalankerto)	1 Kegiatan	19,912,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Siwalankerto)	1 Kegiatan	19,912,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Kegiatan	21,166,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Kegiatan	21,166,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambakrejo)	1 Kegiatan	68,020,000						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tambakrejo)	1 Kegiatan	68,020,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Kegiatan	43,724,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Kegiatan	43,724,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanjungsari)	1 Kegiatan	29,142,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tanjungsari)	1 Kegiatan	29,142,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Kegiatan	95,514,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Kegiatan	95,514,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tenggilis)	1 Kegiatan	34,560,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Tenggilis)	1 Kegiatan	34,560,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wiyung)	1 Kegiatan	58,306,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wiyung)	1 Kegiatan	58,306,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokromo)	1 Kegiatan	38,878,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokromo)	1 Kegiatan	38,878,000
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokusumo)	1 Kegiatan	68,052,000					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut (Puskesmas Wonokusumo)	1 Kegiatan	68,052,000
					1.02.02.2.02.15	Jumlah balita yang	196 Balita	3,766,584,643					1.02.02.2.02.15	Jumlah balita yang	196	6,826,404,643

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	mendapatkan layanan perbaikan gizi								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	mendapatkan layanan perbaikan gizi	Balita	
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Asemrowo)	1 Kegiatan	10,054,728						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Asemrowo)	1 Kegiatan	10,054,728
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Kegiatan	9,515,171						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Kegiatan	9,515,171
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Balongsari)	1 Kegiatan	16,099,330						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Balongsari)	1 Kegiatan	16,099,330
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Bangkingan)	1 Kegiatan	15,547,137						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Bangkingan)	1 Kegiatan	15,547,137
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Banyu Urip)	1 Kegiatan	12,088,945						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Banyu Urip)	1 Kegiatan	12,088,945
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi	1 Kegiatan	32,392,933						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi	1 Kegiatan	32,392,933

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Gizi Masyarakat	masyarakat (Puskesmas Benowo)								Kesehatan Gizi Masyarakat	masyarakat (Puskesmas Benowo)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Kegiatan	13,680,398						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Kegiatan	13,680,398
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Kegiatan	10,186,865						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Kegiatan	10,186,865
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Kegiatan	21,267,535						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Kegiatan	21,267,535
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dupak)	1 Kegiatan	12,629,444						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Dupak)	1 Kegiatan	12,629,444
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gading)	1 Kegiatan	9,911,580						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gading)	1 Kegiatan	9,911,580
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas	1 Kegiatan	10,166,467						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas	1 Kegiatan	10,166,467

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Gayungan)									Gayungan)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gundih)	1 Kegiatan	9,944,615						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gundih)	1 Kegiatan	9,944,615
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Kegiatan	9,856,524						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Kegiatan	9,856,524
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jagir)	1 Kegiatan	16,517,763						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jagir)	1 Kegiatan	16,517,763
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jemursari)	1 Kegiatan	9,946,239						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jemursari)	1 Kegiatan	9,946,239
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jeruk)	1 Kegiatan	9,994,102						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Jeruk)	1 Kegiatan	9,994,102
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kalijudan)	1 Kegiatan	10,355,285						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kalijudan)	1 Kegiatan	10,355,285
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan	Jumlah kegiatan pelayanan	1 Kegiatan	11,017,592						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan	Jumlah kegiatan pelayanan	1 Kegiatan	11,017,592

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kalirungkut)								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kalirungkut)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	1 Kegiatan	10,341,024						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	1 Kegiatan	10,341,024
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kedungdoro)	1 Kegiatan	14,663,660						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kedungdoro)	1 Kegiatan	14,663,660
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kedurus)	1 Kegiatan	17,513,660						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kedurus)	1 Kegiatan	17,513,660
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kenjeran)	1 Kegiatan	13,990,341						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Kenjeran)	1 Kegiatan	13,990,341
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Keputih)	1 Kegiatan	13,581,296						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Keputih)	1 Kegiatan	13,581,296
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi	1 Kegiatan	13,150,228						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi	1 Kegiatan	13,150,228

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Gizi Masyarakat	masyarakat (Puskesmas Ketabang)								Kesehatan Gizi Masyarakat	masyarakat (Puskesmas Ketabang)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Kegiatan	12,719,159						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Kegiatan	12,719,159
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Kegiatan	10,243,547						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Kegiatan	10,243,547
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Kegiatan	12,343,148						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Kegiatan	12,343,148
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Lontar)	1 Kegiatan	12,862,307						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Lontar)	1 Kegiatan	12,862,307
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Made)	1 Kegiatan	9,629,102						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Made)	1 Kegiatan	9,629,102
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas	1 Kegiatan	18,738,489						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas	1 Kegiatan	18,738,489

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Manukan Kulon)									Manukan Kulon)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Kegiatan	12,618,433						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Kegiatan	12,618,433
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Menur)	1 Kegiatan	9,669,330						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Menur)	1 Kegiatan	9,669,330
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Mojo)	1 Kegiatan	10,230,911						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Mojo)	1 Kegiatan	10,230,911
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Kegiatan	11,160,740						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Kegiatan	11,160,740
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Mulyorejo)	1 Kegiatan	9,724,387						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Mulyorejo)	1 Kegiatan	9,724,387
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Kegiatan	12,849,672						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Kegiatan	12,849,672
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan	Jumlah kegiatan pelayanan	1 Kegiatan	11,404,615						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan	Jumlah kegiatan pelayanan	1 Kegiatan	11,404,615

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pacar Keling)								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pacar Keling)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pakis)	1 Kegiatan	13,834,558						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pakis)	1 Kegiatan	13,834,558
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pegirian)	1 Kegiatan	9,614,273						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pegirian)	1 Kegiatan	9,614,273
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Peneleh)	1 Kegiatan	18,122,535						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Peneleh)	1 Kegiatan	18,122,535
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Perak Timur)	1 Kegiatan	14,199,558						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Perak Timur)	1 Kegiatan	14,199,558
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pucangsewu)	1 Kegiatan	13,115,569						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Pucangsewu)	1 Kegiatan	13,115,569
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	10,762,706						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	10,762,706

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Putat Jaya)								Masyarakat	(Puskesmas Putat Jaya)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Rangkah)	1 Kegiatan	11,415,626						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Rangkah)	1 Kegiatan	11,415,626
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Kegiatan	10,410,341						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Kegiatan	10,410,341
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sawahan)	1 Kegiatan	16,321,865						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sawahan)	1 Kegiatan	16,321,865
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sememi)	1 Kegiatan	20,053,717						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sememi)	1 Kegiatan	20,053,717
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidosermo)	1 Kegiatan	12,750,569						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidosermo)	1 Kegiatan	12,750,569
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas	1 Kegiatan	13,979,330						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas	1 Kegiatan	13,979,330

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Sidotopo)									Sidotopo)		
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Kegiatan	13,370,455						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Kegiatan	13,370,455
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Simolawang)	1 Kegiatan	12,950,398						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Simolawang)	1 Kegiatan	12,950,398
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Simomulyo)	1 Kegiatan	24,745,967						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Simomulyo)	1 Kegiatan	24,745,967
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Siwalankerto)	1 Kegiatan	9,548,245						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Siwalankerto)	1 Kegiatan	9,548,245
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Kegiatan	9,858,148						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Kegiatan	9,858,148
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tambakrejo)	1 Kegiatan	16,429,672						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tambakrejo)	1 Kegiatan	16,429,672

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Kegiatan	9,823,489					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Kegiatan	9,823,489
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	1 Kegiatan	16,539,273					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	1 Kegiatan	16,539,273
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Kegiatan	10,364,672					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Kegiatan	10,364,672
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tenggilis)	1 Kegiatan	13,436,524					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Tenggilis)	1 Kegiatan	13,436,524
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wiyung)	1 Kegiatan	11,129,330					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wiyung)	1 Kegiatan	11,129,330
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wonokromo)	1 Kegiatan	9,735,398					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wonokromo)	1 Kegiatan	9,735,398
					1.02.02.2.02.15	Jumlah kegiatan	1	13,856,580					1.02.02.2.02.15	Jumlah kegiatan	1	13,856,580

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wonokusumo)	Kegiatan							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Puskesmas Wonokusumo)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Asemrowo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Asemrowo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balongsari)	2 Kegiatan	16,939,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Balongsari)	2 Kegiatan	16,939,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bangkingan)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bangkingan)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan	2 Kegiatan	9,019,762

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						olahraga (Puskesmas Banyu Urip)								Olahraga	olahraga (Puskesmas Banyu Urip)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Benowo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Benowo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Kegiatan	11,659,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Kegiatan	11,659,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dupak)	2 Kegiatan	9,019,761						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Dupak)	2 Kegiatan	9,019,761

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gading)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gading)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gayungan)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gayungan)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gundih)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gundih)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jagir)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jagir)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	2 Kegiatan	9,019,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kerja dan Olahraga	kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jemursari)								Kesehatan Kerja dan Olahraga	kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jemursari)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jeruk)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Jeruk)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalijudan)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalijudan)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalirungkut)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kalirungkut)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kebonsari)	2 Kegiatan	9,019,761						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kebonsari)	2 Kegiatan	9,019,761
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas	2 Kegiatan	9,019,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kedungdoro)									Kedungdoro)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedurus)	2 Kegiatan	14,299,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kedurus)	2 Kegiatan	14,299,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kenjeran)	2 Kegiatan	14,299,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Kenjeran)	2 Kegiatan	14,299,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Keputih)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Keputih)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ketabang)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ketabang)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16	Jumlah kegiatan	2	11,659,762						1.02.02.2.02.16	Jumlah kegiatan	2	11,659,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Krembangan Selatan)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Krembangan Selatan)	Kegiatan	
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lontar)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Lontar)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Made)	2 Kegiatan	9,019,761					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Made)	2 Kegiatan	9,019,761
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Kegiatan	11,659,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Kegiatan	11,659,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan	2 Kegiatan	11,659,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan	2 Kegiatan	11,659,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						olahraga (Puskesmas Medokan Ayu)								Olahraga	olahraga (Puskesmas Medokan Ayu)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Menur)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Menur)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mojo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mojo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mulyorejo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Mulyorejo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Kegiatan	11,659,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Kegiatan	11,659,762
					1.02.02.2.02.16	Jumlah kegiatan	2	9,019,762						1.02.02.2.02.16	Jumlah kegiatan	2	9,019,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pacar Keling)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pacar Keling)	Kegiatan	
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pakis)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pakis)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pegirian)	2 Kegiatan	9,019,761					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Pegirian)	2 Kegiatan	9,019,761
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Peneleh)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Peneleh)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Perak Timur)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Perak Timur)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan	2 Kegiatan	9,019,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						olahraga (Puskesmas Pucangsewu)								Olahraga	olahraga (Puskesmas Pucangsewu)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Putat Jaya)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Putat Jaya)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Rangkah)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Rangkah)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawahan)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sawahan)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas	2 Kegiatan	14,299,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas	2 Kegiatan	14,299,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Sememi)									Sememi)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidosermo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidosermo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo)	2 Kegiatan	9,019,761						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo)	2 Kegiatan	9,019,761
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simolawang)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simolawang)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simomulyo)	2 Kegiatan	9,019,762						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Simomulyo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16	Jumlah kegiatan	2	9,019,762						1.02.02.2.02.16	Jumlah kegiatan	2	9,019,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Siwalankerto)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Siwalankerto)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Kegiatan	16,939,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Kegiatan	16,939,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanjungsari)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tanjungsari)	2 Kegiatan	9,019,762
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan	2 Kegiatan	9,019,762

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kerja dan Olahraga	kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tembok Dukuh)							Kesehatan Kerja dan Olahraga	kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tembok Dukuh)		
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tenggilis)	2 Kegiatan	9,019,761					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Tenggilis)	2 Kegiatan	9,019,761
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wiyung)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wiyung)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokromo)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokromo)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokusumo)	2 Kegiatan	9,019,762					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas Wonokusumo)	2 Kegiatan	9,019,762
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4 Kegiatan	22,166,500					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4 Kegiatan	22,166,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Kegiatan	1,125,844,138					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Kegiatan	965,241,388
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Asemrowo)	3 Kegiatan	33,878,600					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Asemrowo)	3 Kegiatan	33,878,600
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Balas Klumprik)	3 Kegiatan	21,393,800					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Balas Klumprik)	3 Kegiatan	21,393,800
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Balongsari)	3 Kegiatan	39,565,600					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Balongsari)	3 Kegiatan	39,565,600
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bangkingan)	3 Kegiatan	22,686,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bangkingan)	3 Kegiatan	22,686,200
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banyu Urip)	3 Kegiatan	26,514,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banyu Urip)	3 Kegiatan	26,514,200
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan	Jumlah kegiatan Pelayanan	3 Kegiatan	42,907,000					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan	Jumlah kegiatan Pelayanan	3 Kegiatan	42,907,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Benowo)								Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Benowo)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bulak Banteng)	3 Kegiatan	30,160,800						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bulak Banteng)	3 Kegiatan	30,160,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dr. Soetomo)	3 Kegiatan	23,978,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dr. Soetomo)	3 Kegiatan	23,978,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dukuh Kupang)	3 Kegiatan	35,047,500						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dukuh Kupang)	3 Kegiatan	35,047,500
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dupak)	3 Kegiatan	23,340,800						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Dupak)	3 Kegiatan	23,340,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gading)	3 Kegiatan	36,353,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gading)	3 Kegiatan	36,353,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	27,658,000						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	27,658,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Gayungan)								Lingkungan	(Puskesmas Gayungan)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gundih)	3 Kegiatan	22,686,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gundih)	3 Kegiatan	22,686,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gunung Anyar)	3 Kegiatan	38,171,500						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gunung Anyar)	3 Kegiatan	38,171,500
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jagir)	3 Kegiatan	43,341,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jagir)	3 Kegiatan	43,341,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jemursari)	3 Kegiatan	25,889,500						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jemursari)	3 Kegiatan	25,889,500
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jeruk)	3 Kegiatan	20,211,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jeruk)	3 Kegiatan	20,211,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalijudan)	3 Kegiatan	33,408,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalijudan)	3 Kegiatan	33,408,600
					1.02.02.2.02.17	Jumlah kegiatan	3	37,139,500						1.02.02.2.02.17	Jumlah kegiatan	3	37,139,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalirungkut)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalirungkut)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	3 Kegiatan	35,996,000					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	3 Kegiatan	35,996,000
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedungdoro)	3 Kegiatan	23,511,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedungdoro)	3 Kegiatan	23,511,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedurus)	3 Kegiatan	43,223,000					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedurus)	3 Kegiatan	43,223,000
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kenjeran)	3 Kegiatan	28,420,000					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kenjeran)	3 Kegiatan	28,420,000
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Keputih)	3 Kegiatan	28,461,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Keputih)	3 Kegiatan	28,461,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan	Jumlah kegiatan Pelayanan	3 Kegiatan	21,036,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan	Jumlah kegiatan Pelayanan	3 Kegiatan	21,036,200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ketabang)								Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ketabang)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Klampis Ngasem)	3 Kegiatan	29,242,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Klampis Ngasem)	3 Kegiatan	29,242,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Krembangan Selatan)	3 Kegiatan	33,749,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Krembangan Selatan)	3 Kegiatan	33,749,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lidah Kulon)	3 Kegiatan	21,547,700						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lidah Kulon)	3 Kegiatan	21,547,700
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lontar)	3 Kegiatan	31,673,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Lontar)	3 Kegiatan	31,673,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Made)	3 Kegiatan	23,544,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Made)	3 Kegiatan	23,544,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	37,618,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	37,618,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Manukan Kulon)								Lingkungan	(Puskesmas Manukan Kulon)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Medokan Ayu)	3 Kegiatan	39,120,100						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Medokan Ayu)	3 Kegiatan	39,120,100
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Menur)	3 Kegiatan	28,928,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Menur)	3 Kegiatan	28,928,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mojo)	3 Kegiatan	33,312,100						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mojo)	3 Kegiatan	33,312,100
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Moro Krembangan)	3 Kegiatan	26,280,000						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Moro Krembangan)	3 Kegiatan	26,280,000
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mulyorejo)	3 Kegiatan	37,992,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mulyorejo)	3 Kegiatan	37,992,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngagel Rejo)	3 Kegiatan	61,035,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngagel Rejo)	3 Kegiatan	61,035,200
					1.02.02.2.02.17	Jumlah kegiatan	3	34,148,200						1.02.02.2.02.17	Jumlah kegiatan	3	34,148,200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pacar Keling)	Kegiatan						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pacar Keling)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pakis)	3 Kegiatan	23,868,800					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pakis)	3 Kegiatan	23,868,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pegirian)	3 Kegiatan	25,518,800					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pegirian)	3 Kegiatan	25,518,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Peneleh)	3 Kegiatan	22,727,600					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Peneleh)	3 Kegiatan	22,727,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Perak Timur)	3 Kegiatan	40,533,100					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Perak Timur)	3 Kegiatan	40,533,100
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pucangsewu)	3 Kegiatan	39,378,600					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pucangsewu)	3 Kegiatan	39,378,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan	3 Kegiatan	26,343,800					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan	3 Kegiatan	26,343,800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Lingkungan	Lingkungan (Puskesmas Putat Jaya)							Kesehatan Lingkungan	Lingkungan (Puskesmas Putat Jaya)	
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Rangkah)	3 Kegiatan	34,659,600					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Rangkah)	3 Kegiatan	34,659,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sawah Pulo)	3 Kegiatan	23,483,800					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sawah Pulo)	3 Kegiatan	23,483,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sawahan)	3 Kegiatan	29,286,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sawahan)	3 Kegiatan	29,286,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sememi)	3 Kegiatan	34,852,000					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sememi)	3 Kegiatan	34,852,000
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidosermo)	3 Kegiatan	32,745,600					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidosermo)	3 Kegiatan	32,745,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	29,154,200					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	29,154,200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Sidotopo)								Lingkungan	(Puskesmas Sidotopo)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	3 Kegiatan	35,374,800						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	3 Kegiatan	35,374,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Simolawang)	3 Kegiatan	26,382,200						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Simolawang)	3 Kegiatan	26,382,200
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Simomulyo)	3 Kegiatan	33,834,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Simomulyo)	3 Kegiatan	33,834,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Siwalankerto)	3 Kegiatan	23,780,800						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Siwalankerto)	3 Kegiatan	23,780,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tambak Wedi)	3 Kegiatan	25,917,800						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tambak Wedi)	3 Kegiatan	25,917,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas	3 Kegiatan	33,262,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas	3 Kegiatan	33,262,600

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Tambakrejo)									Tambakrejo)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	3 Kegiatan	31,018,800						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	3 Kegiatan	31,018,800
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	3 Kegiatan	27,806,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	3 Kegiatan	27,806,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tembok Dukuh)	3 Kegiatan	36,455,600						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tembok Dukuh)	3 Kegiatan	36,455,600
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tenggilis)	3 Kegiatan	35,171,000						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tenggilis)	3 Kegiatan	35,171,000
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wiyung)	3 Kegiatan	33,053,468						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wiyung)	3 Kegiatan	33,053,468
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokromo)	3 Kegiatan	29,192,668						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokromo)	3 Kegiatan	29,192,668

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokusumo)	3 Kegiatan	30,083,664					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokusumo)	3 Kegiatan	30,083,664
					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	63 Puskesmas	206,649,878					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	63 Puskesmas	206,649,878
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Kegiatan	426,324,825					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Kegiatan	426,324,825
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Asemrowo)	4 Kegiatan	170,592,370					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Asemrowo)	4 Kegiatan	170,592,370
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balas Klumprik)	4 Kegiatan	139,824,590					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Balas Klumprik)	4 Kegiatan	139,824,590
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan	4 Kegiatan	174,724,820					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan	4 Kegiatan	174,724,820

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						imunisasi (Puskesmas Balongsari)									imunisasi (Puskesmas Balongsari)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bangkingan)	4 Kegiatan	129,691,790						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bangkingan)	4 Kegiatan	129,691,790
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Banyu Urip)	4 Kegiatan	220,728,020						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Banyu Urip)	4 Kegiatan	220,728,020
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Benowo)	4 Kegiatan	253,097,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Benowo)	4 Kegiatan	253,097,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bulak Banteng)	4 Kegiatan	131,078,990						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Bulak Banteng)	4 Kegiatan	131,078,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dr.	4 Kegiatan	178,865,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dr.	4 Kegiatan	178,865,390

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Soetomo)									Soetomo)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	4 Kegiatan	252,300,020						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	4 Kegiatan	252,300,020
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dupak)	4 Kegiatan	128,460,020						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Dupak)	4 Kegiatan	128,460,020
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gading)	4 Kegiatan	296,138,990						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gading)	4 Kegiatan	296,138,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gayungan)	4 Kegiatan	271,896,590						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gayungan)	4 Kegiatan	271,896,590
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gundih)	4 Kegiatan	154,831,790						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gundih)	4 Kegiatan	154,831,790
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	313,996,820						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	313,996,820

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Surveilans Kesehatan	surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gunung Anyar)								Surveilans Kesehatan	surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Gunung Anyar)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jagir)	4 Kegiatan	225,074,420						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jagir)	4 Kegiatan	225,074,420
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jemursari)	4 Kegiatan	164,885,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jemursari)	4 Kegiatan	164,885,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jeruk)	4 Kegiatan	149,930,990						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Jeruk)	4 Kegiatan	149,930,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalijudan)	4 Kegiatan	263,772,590						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kalijudan)	4 Kegiatan	263,772,590
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas	4 Kegiatan	244,430,990						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas	4 Kegiatan	244,430,990

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kalirungkut)									Kalirungkut)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kebonsari)	4 Kegiatan	331,644,020						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kebonsari)	4 Kegiatan	331,644,020
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedungdoro)	4 Kegiatan	175,721,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedungdoro)	4 Kegiatan	175,721,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedurus)	4 Kegiatan	318,466,820						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kedurus)	4 Kegiatan	318,466,820
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kenjeran)	4 Kegiatan	187,505,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Kenjeran)	4 Kegiatan	187,505,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Keputih)	4 Kegiatan	243,381,620						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Keputih)	4 Kegiatan	243,381,620
					1.02.02.2.02.20	Jumlah kegiatan	4	133,512,590						1.02.02.2.02.20	Jumlah kegiatan	4	133,512,590

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ketabang)	Kegiatan						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ketabang)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	4 Kegiatan	177,422,990					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	4 Kegiatan	177,422,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	4 Kegiatan	209,155,220					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	4 Kegiatan	209,155,220
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lidah Kulon)	4 Kegiatan	174,833,390					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lidah Kulon)	4 Kegiatan	174,833,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lontar)	4 Kegiatan	334,966,190					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Lontar)	4 Kegiatan	334,966,190
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	144,144,590					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	144,144,590

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Made)									dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Made)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Manukan Kulon)	4 Kegiatan	259,382,420						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Manukan Kulon)	4 Kegiatan	259,382,420
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Medokan Ayu)	4 Kegiatan	404,664,020						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Medokan Ayu)	4 Kegiatan	404,664,020
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Menur)	4 Kegiatan	255,528,590						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Menur)	4 Kegiatan	255,528,590
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mojo)	4 Kegiatan	387,545,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mojo)	4 Kegiatan	387,545,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Moro Krembangan)	4 Kegiatan	137,657,390						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Moro Krembangan)	4 Kegiatan	137,657,390
					1.02.02.2.02.20	Jumlah kegiatan	4	255,369,970						1.02.02.2.02.20	Jumlah kegiatan	4	255,369,970

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mulyorejo)	Kegiatan						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Mulyorejo)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	4 Kegiatan	251,102,990					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	4 Kegiatan	251,102,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pacar Keling)	4 Kegiatan	214,267,790					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pacar Keling)	4 Kegiatan	214,267,790
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pakis)	4 Kegiatan	167,157,970					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pakis)	4 Kegiatan	167,157,970
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pegirian)	4 Kegiatan	112,675,790					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pegirian)	4 Kegiatan	112,675,790
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan	4 Kegiatan	183,000,590					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan	4 Kegiatan	183,000,590

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						imunisasi (Puskesmas Peneleh)									imunisasi (Puskesmas Peneleh)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Perak Timur)	4 Kegiatan	173,762,990					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Perak Timur)	4 Kegiatan	173,762,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pucangsewu)	4 Kegiatan	279,929,390					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Pucangsewu)	4 Kegiatan	279,929,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Putat Jaya)	4 Kegiatan	172,085,390					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Putat Jaya)	4 Kegiatan	172,085,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Rangkah)	4 Kegiatan	262,385,390					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Rangkah)	4 Kegiatan	262,385,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawah	4 Kegiatan	129,718,190					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawah	4 Kegiatan	129,718,190

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pulo)									Pulo)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawahan)	4 Kegiatan	227,587,790						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sawahan)	4 Kegiatan	227,587,790
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sememi)	4 Kegiatan	244,166,770						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sememi)	4 Kegiatan	244,166,770
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidosermo)	4 Kegiatan	222,668,990						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidosermo)	4 Kegiatan	222,668,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo)	4 Kegiatan	121,180,190						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo)	4 Kegiatan	121,180,190
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	4 Kegiatan	173,759,170						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	4 Kegiatan	173,759,170
					1.02.02.2.02.20	Jumlah kegiatan	4	111,152,990						1.02.02.2.02.20	Jumlah kegiatan	4	111,152,990

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simolawang)	Kegiatan						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simolawang)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simomulyo)	4 Kegiatan	200,077,570					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Simomulyo)	4 Kegiatan	200,077,570
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Siwalankerto)	4 Kegiatan	181,630,820					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Siwalankerto)	4 Kegiatan	181,630,820
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambak Wedi)	4 Kegiatan	162,728,990					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambak Wedi)	4 Kegiatan	162,728,990
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambakrejo)	4 Kegiatan	124,535,390					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tambakrejo)	4 Kegiatan	124,535,390
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	216,510,020					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	216,510,020

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)									dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanjungsari)	4 Kegiatan	185,319,620						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tanjungsari)	4 Kegiatan	185,319,620
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	4 Kegiatan	201,198,590						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	4 Kegiatan	201,198,590
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tenggilis)	4 Kegiatan	317,389,220						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Tenggilis)	4 Kegiatan	317,389,220
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wiyung)	4 Kegiatan	307,546,820						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wiyung)	4 Kegiatan	307,546,820
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	172,160,990						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	172,160,990

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Wonokromo)									(Puskesmas Wonokromo)		
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokusumo)	4 Kegiatan	143,261,951						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi (Puskesmas Wonokusumo)	4 Kegiatan	143,261,951
					1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Lokasi Kegawatdaruratan yang dilayani	900 Lokasi	810,993,884						1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Lokasi Kegawatdaruratan yang dilayani	900 Lokasi	806,266,484
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 Kelurahan	3,807,500,290						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 Kelurahan	3,807,500,290
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Asemrowo)	2 Kegiatan	77,906,300						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Asemrowo)	2 Kegiatan	77,906,300
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Kegiatan	63,616,869						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Kegiatan	63,616,869
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas	2 Kegiatan	88,138,100						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas	2 Kegiatan	88,138,100

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Balongsari)									Balongsari)		
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Bangkingan)	2 Kegiatan	67,773,380						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Bangkingan)	2 Kegiatan	67,773,380
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Banyu Urip)	2 Kegiatan	73,912,460						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Banyu Urip)	2 Kegiatan	73,912,460
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Benowo)	2 Kegiatan	100,416,260						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Benowo)	2 Kegiatan	100,416,260
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Kegiatan	65,727,020						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Kegiatan	65,727,020
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Kegiatan	61,634,300						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Kegiatan	61,634,300
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Kegiatan	98,340,209						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Kegiatan	98,340,209

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dupak)	2 Kegiatan	67,773,380					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Dupak)	2 Kegiatan	67,773,380
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gading)	2 Kegiatan	75,958,820					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gading)	2 Kegiatan	75,958,820
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gayungan)	2 Kegiatan	83,981,369					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gayungan)	2 Kegiatan	83,981,369
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gundih)	2 Kegiatan	61,634,300					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gundih)	2 Kegiatan	61,634,300
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Kegiatan	92,230,820					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Kegiatan	92,230,820
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jagir)	2 Kegiatan	67,773,380					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jagir)	2 Kegiatan	67,773,380
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit	2 Kegiatan	61,570,289					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit	2 Kegiatan	61,570,289

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Tidak Menular	Menular (Puskesmas Jemursari)							Menular dan Tidak Menular	Menular (Puskesmas Jemursari)		
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jeruk)	2 Kegiatan	69,819,740					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Jeruk)	2 Kegiatan	69,819,740
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kalijudan)	2 Kegiatan	118,833,500					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kalijudan)	2 Kegiatan	118,833,500
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kalirungkut)	2 Kegiatan	90,184,460					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kalirungkut)	2 Kegiatan	90,184,460
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kebonsari)	2 Kegiatan	79,888,649					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kebonsari)	2 Kegiatan	79,888,649
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kedungdoro)	2 Kegiatan	81,999,020					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kedungdoro)	2 Kegiatan	81,999,020
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas	2 Kegiatan	106,525,649					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas	2 Kegiatan	106,525,649

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kedurus)									Kedurus)		
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kenjeran)	2 Kegiatan	86,091,740						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Kenjeran)	2 Kegiatan	86,091,740
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Keputih)	2 Kegiatan	80,051,540						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Keputih)	2 Kegiatan	80,051,540
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Ketabang)	2 Kegiatan	61,634,300						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Ketabang)	2 Kegiatan	61,634,300
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Kegiatan	69,819,740						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Kegiatan	69,819,740
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Kegiatan	96,422,420						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Kegiatan	96,422,420
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Lidah	2 Kegiatan	84,045,380						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Lidah	2 Kegiatan	84,045,380

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kulon)									Kulon)		
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Lontar)	2 Kegiatan	100,416,260						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Lontar)	2 Kegiatan	100,416,260
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Made)	2 Kegiatan	65,727,020						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Made)	2 Kegiatan	65,727,020
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Kegiatan	80,051,540						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Kegiatan	80,051,540
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Kegiatan	102,561,500						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Kegiatan	102,561,500
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Menur)	2 Kegiatan	90,184,460						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Menur)	2 Kegiatan	90,184,460
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Mojo)	2 Kegiatan	67,773,380						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Mojo)	2 Kegiatan	67,773,380
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	86,091,740						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	86,091,740

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Moro Krembangan)								Menular	(Puskesmas Moro Krembangan)		
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Mulyorejo)	2 Kegiatan	63,680,660						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Mulyorejo)	2 Kegiatan	63,680,660
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Kegiatan	88,207,289						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Kegiatan	88,207,289
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pacar Keling)	2 Kegiatan	63,680,660						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pacar Keling)	2 Kegiatan	63,680,660
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pakis)	2 Kegiatan	75,958,820						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pakis)	2 Kegiatan	75,958,820
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pegirian)	2 Kegiatan	75,958,820						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pegirian)	2 Kegiatan	75,958,820
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Peneleh)	2 Kegiatan	81,999,020						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Peneleh)	2 Kegiatan	81,999,020

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Perak Timur)	2 Kegiatan	92,230,820					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Perak Timur)	2 Kegiatan	92,230,820
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pucangsewu)	2 Kegiatan	79,952,660					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Pucangsewu)	2 Kegiatan	79,952,660
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Putat Jaya)	2 Kegiatan	120,879,860					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Putat Jaya)	2 Kegiatan	120,879,860
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Rangkah)	2 Kegiatan	79,952,660					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Rangkah)	2 Kegiatan	79,952,660
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Kegiatan	79,888,649					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Kegiatan	79,888,649
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sawahan)	2 Kegiatan	71,866,100					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sawahan)	2 Kegiatan	71,866,100
					1.02.02.2.02.25	Jumlah kegiatan	2	110,648,060					1.02.02.2.02.25	Jumlah kegiatan	2	110,648,060

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sememi)	Kegiatan						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sememi)	Kegiatan	
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidosermo)	2 Kegiatan	77,842,289					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidosermo)	2 Kegiatan	77,842,289
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidotopo)	2 Kegiatan	82,097,900					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidotopo)	2 Kegiatan	82,097,900
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Kegiatan	65,727,020					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Kegiatan	65,727,020
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Simolawang)	2 Kegiatan	90,184,460					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Simolawang)	2 Kegiatan	90,184,460
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Simomulyo)	2 Kegiatan	82,097,900					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Simomulyo)	2 Kegiatan	82,097,900
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan	2 Kegiatan	69,755,729					1.02.02.2.02.25 Pelayanan	Jumlah kegiatan Pelayanan	2 Kegiatan	69,755,729

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Siwalankerto)							Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Siwalankerto)		
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Kegiatan	84,045,380					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Kegiatan	84,045,380
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tambakrejo)	2 Kegiatan	78,005,180					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tambakrejo)	2 Kegiatan	78,005,180
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Kegiatan	73,912,460					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Kegiatan	73,912,460
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tanjungsari)	2 Kegiatan	86,091,740					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tanjungsari)	2 Kegiatan	86,091,740
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tembok Dukuh)	2 Kegiatan	114,740,780					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Tembok Dukuh)	2 Kegiatan	114,740,780
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit	2 Kegiatan	98,369,900					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit	2 Kegiatan	98,369,900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tidak Menular	Menular (Puskesmas Tenggilis)							Menular dan Tidak Menular	Menular (Puskesmas Tenggilis)		
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wiyung)	2 Kegiatan	96,293,849					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wiyung)	2 Kegiatan	96,293,849
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wonokromo)	2 Kegiatan	86,091,740					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wonokromo)	2 Kegiatan	86,091,740
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wonokusumo)	2 Kegiatan	92,329,700					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Puskesmas Wonokusumo)	2 Kegiatan	92,329,700
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	1045749 jiwa	389,742,510,455					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	1045749 jiwa	391,864,650,514
					1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan Telemedicine	41 Puskesmas	1,490,985,500					1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan Telemedicine	41 Puskesmas	1,485,801,050
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	461,048,955					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	1,049,019,656

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Asemrowo)									(Puskesmas Asemrowo)		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Balas Klumprik)	9 Kegiatan	438,625,960						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Balas Klumprik)	9 Kegiatan	591,061,890
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Balongsari)	9 Kegiatan	332,070,925						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Balongsari)	9 Kegiatan	908,440,574
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Bangkingan)	9 Kegiatan	546,512,822						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Bangkingan)	9 Kegiatan	693,822,759
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Banyu Urip)	9 Kegiatan	584,323,875						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Banyu Urip)	9 Kegiatan	1,423,614,658
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Benowo)	9 Kegiatan	535,415,480						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Benowo)	9 Kegiatan	1,335,627,211
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Bulak	9 Kegiatan	646,778,545						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Bulak	9 Kegiatan	1,095,175,574

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Banteng)									Banteng)		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dr. Soetomo)	9 Kegiatan	458,091,488						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dr. Soetomo)	9 Kegiatan	1,345,810,548
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dukuh Kupang)	9 Kegiatan	331,991,435						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dukuh Kupang)	9 Kegiatan	1,636,170,252
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dupak)	9 Kegiatan	669,073,035						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Dupak)	9 Kegiatan	1,018,528,148
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gading)	9 Kegiatan	668,006,440						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gading)	9 Kegiatan	2,488,081,111
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gayungan)	9 Kegiatan	439,729,217						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gayungan)	9 Kegiatan	1,006,989,373
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gundih)	9 Kegiatan	332,132,060						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gundih)	9 Kegiatan	813,165,449
					1.02.02.2.02.33	Jumlah kegiatan	9	539,036,621						1.02.02.2.02.33	Jumlah kegiatan	9	1,239,840,447

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gunung Anyar)	Kegiatan						Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Gunung Anyar)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jagir)	9 Kegiatan	886,448,007					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jagir)	9 Kegiatan	1,603,077,009
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jemursari)	9 Kegiatan	240,582,920					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jemursari)	9 Kegiatan	639,128,208
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	9 Kegiatan	521,601,662					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	9 Kegiatan	865,040,411
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kalijudan)	9 Kegiatan	303,563,895					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kalijudan)	9 Kegiatan	810,547,072
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kalirungkut)	9 Kegiatan	626,598,830					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kalirungkut)	9 Kegiatan	1,499,050,220
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	490,149,672					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	1,152,688,417

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Kebonsari)									(Puskesmas Kebonsari)		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kedungdoro)	9 Kegiatan	543,206,160						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kedungdoro)	9 Kegiatan	1,728,488,495
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kedurus)	9 Kegiatan	477,561,395						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kedurus)	9 Kegiatan	1,101,787,782
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kenjeran)	9 Kegiatan	682,716,240						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Kenjeran)	9 Kegiatan	1,232,084,671
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Keputih)	9 Kegiatan	512,787,767						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Keputih)	9 Kegiatan	870,084,412
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Ketabang)	9 Kegiatan	521,769,020						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Ketabang)	9 Kegiatan	887,639,976
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas	9 Kegiatan	442,450,572						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas	9 Kegiatan	756,863,260

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Klampis Ngasem)									Klampis Ngasem)		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Krembangan Selatan)	9 Kegiatan	590,426,804						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Krembangan Selatan)	9 Kegiatan	1,210,323,238
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Lidah Kulon)	9 Kegiatan	433,897,160						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Lidah Kulon)	9 Kegiatan	847,684,911
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Lontar)	9 Kegiatan	526,747,045						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Lontar)	9 Kegiatan	989,870,767
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Made)	9 Kegiatan	267,540,364						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Made)	9 Kegiatan	553,981,255
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Manukan Kulon)	9 Kegiatan	316,189,805						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Manukan Kulon)	9 Kegiatan	1,171,607,886
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Medokan Ayu)	9 Kegiatan	382,115,127						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Medokan Ayu)	9 Kegiatan	1,197,019,805
					1.02.02.2.02.33	Jumlah kegiatan	9	464,956,416						1.02.02.2.02.33	Jumlah kegiatan	9	1,037,671,683

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Menur)	Kegiatan						Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Menur)	Kegiatan	
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Mojo)	9 Kegiatan	405,959,980					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Mojo)	9 Kegiatan	1,098,324,687
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Moro Krembangan)	9 Kegiatan	662,611,680					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Moro Krembangan)	9 Kegiatan	1,293,072,064
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Mulyorejo)	9 Kegiatan	413,494,650					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Mulyorejo)	9 Kegiatan	966,855,565
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Ngagel Rejo)	9 Kegiatan	557,679,000					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Ngagel Rejo)	9 Kegiatan	1,112,530,426
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pacar Keling)	9 Kegiatan	443,023,950					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pacar Keling)	9 Kegiatan	1,245,088,851
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	370,736,397					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	776,703,577

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Pakis)									(Puskesmas Pakis)		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pegirian)	9 Kegiatan	371,334,697						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pegirian)	9 Kegiatan	1,916,516,324
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Peneleh)	9 Kegiatan	319,946,195						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Peneleh)	9 Kegiatan	892,784,646
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Perak Timur)	9 Kegiatan	747,322,828						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Perak Timur)	9 Kegiatan	2,166,386,048
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pucangsewu)	9 Kegiatan	417,553,246						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Pucangsewu)	9 Kegiatan	1,486,739,440
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Putat Jaya)	9 Kegiatan	622,935,463						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Putat Jaya)	9 Kegiatan	1,220,360,176
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Rangkah)	9 Kegiatan	480,368,779						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Rangkah)	9 Kegiatan	1,739,725,453

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sawah Pulo)	9 Kegiatan	526,710,360					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sawah Pulo)	9 Kegiatan	1,009,496,829
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sawahan)	9 Kegiatan	346,935,100					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sawahan)	9 Kegiatan	1,244,588,666
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sememi)	9 Kegiatan	536,539,700					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sememi)	9 Kegiatan	1,383,739,054
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidosermo)	9 Kegiatan	506,437,705					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidosermo)	9 Kegiatan	925,259,177
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidotopo)	9 Kegiatan	567,534,326					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidotopo)	9 Kegiatan	1,596,698,199
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidotopo Wetan)	9 Kegiatan	792,026,272					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Sidotopo Wetan)	9 Kegiatan	1,590,870,460
				1.02.02.2.02.33	Jumlah kegiatan	9	610,859,539					1.02.02.2.02.33	Jumlah kegiatan	9	1,388,153,620

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Simolawang)	Kegiatan						Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Simolawang)	Kegiatan	
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Simomulyo)	9 Kegiatan	599,541,725					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Simomulyo)	9 Kegiatan	1,746,341,069
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Siwalankerto)	9 Kegiatan	459,146,621					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Siwalankerto)	9 Kegiatan	700,260,715
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tambak Wedi)	9 Kegiatan	519,824,752					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tambak Wedi)	9 Kegiatan	836,150,273
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tambakrejo)	9 Kegiatan	460,329,470					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tambakrejo)	9 Kegiatan	1,678,826,415
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	9 Kegiatan	986,359,397					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	9 Kegiatan	1,665,169,315
					1.02.02.2.02.33 Operasional	Jumlah kegiatan operasional	9 Kegiatan	567,445,975					1.02.02.2.02.33 Operasional	Jumlah kegiatan operasional	9 Kegiatan	888,588,535

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Puskesmas	pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)								Pelayanan Puskesmas	pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tembok Dukuh)	9 Kegiatan	573,621,949						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tembok Dukuh)	9 Kegiatan	1,736,895,185
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tenggilis)	9 Kegiatan	436,009,660						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Tenggilis)	9 Kegiatan	1,132,575,138
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wiyung)	9 Kegiatan	522,435,007						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wiyung)	9 Kegiatan	1,236,587,298
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wonokromo)	9 Kegiatan	417,122,503						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wonokromo)	9 Kegiatan	1,083,029,655
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wonokusumo)	9 Kegiatan	801,434,325						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas (Puskesmas Wonokusumo)	9 Kegiatan	2,973,386,570
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana	1 Jenis	42,600,000						1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana	1 Jenis	33,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Lainnya	operasional pelayanan puskesmas								Kesehatan Lainnya	operasional pelayanan puskesmas		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	**252,208,138**					**1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	**252,208,138**
					1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan	1 Aplikasi	252,208,138						1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan	1 Aplikasi	252,208,138
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	**975,874,805**					**1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	**785,189,549**
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas	1								Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Bangkingan)	Puskesmas							yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Bangkingan)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dupak)	as							peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Dupak)	as	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jemursari)								Jemursari)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kenjeran)	Puskesmas							yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Kenjeran)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Lontar)	Puskesmas							yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Lontar)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm							Jumlah puskesmas yang melaksanakan	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Perak Timur)	as							peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Perak Timur)	as	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan (Puskesmas Sememi)								pelayanan (Puskesmas Sememi)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Siwalankerto)								(Puskesmas Siwalankerto)		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Tenggilis)									Tenggilis)		
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pemantapan mutu fasilitas kesehatan	63 Puskesmas	436,242,678					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pemantapan mutu fasilitas kesehatan	63 Puskesmas	378,587,550
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Asemrowo)	1 Kegiatan	5,563,200					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Asemrowo)	1 Kegiatan	4,139,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Kegiatan	4,610,400					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Kegiatan	3,481,800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Balongsari)	1 Kegiatan	6,079,200					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Balongsari)	1 Kegiatan	4,189,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Bangkingan)	1 Kegiatan	4,252,800					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Bangkingan)	1 Kegiatan	3,189,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Banyu Urip)	1 Kegiatan	6,475,200					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Banyu Urip)	1 Kegiatan	5,036,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Benowo)	1 Kegiatan	6,002,400					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Benowo)	1 Kegiatan	4,501,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Kegiatan	4,332,000					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Kegiatan	3,322,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	5,404,799					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	3,603,199

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dr. Soetomo)								Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dr. Soetomo)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Kegiatan	6,520,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Kegiatan	5,220,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dupak)	1 Kegiatan	6,194,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Dupak)	1 Kegiatan	4,236,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gading)	1 Kegiatan	5,688,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gading)	1 Kegiatan	798,6
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gayungan)	1 Kegiatan	5,762,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gayungan)	1 Kegiatan	5,762,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	4,293,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	3,059,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Gundih)									(Puskesmas Gundih)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Kegiatan	7,512,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Kegiatan	4,476,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jagir)	1 Kegiatan	9,132,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jagir)	1 Kegiatan	2,409,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jemursari)	1 Kegiatan	4,929,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jemursari)	1 Kegiatan	3,141,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	1 Kegiatan	4,452,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	1 Kegiatan	3,528,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kalijudan)	1 Kegiatan	5,448,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kalijudan)	1 Kegiatan	3,816,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	6,566,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	6,566,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kalirungkut)								Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kalirungkut)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kebonsari)	1 Kegiatan	7,272,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kebonsari)	1 Kegiatan	5,025,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kedungdoro)	1 Kegiatan	5,088,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kedungdoro)	1 Kegiatan	1,372,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kedurus)	1 Kegiatan	6,952,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kedurus)	1 Kegiatan	4,792,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kenjeran)	1 Kegiatan	5,524,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Kenjeran)	1 Kegiatan	4,323,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	6,120,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	4,047,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Puskesmas (Puskesmas Keputih)									Puskesmas (Puskesmas Keputih)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Ketabang)	1 Kegiatan	5,371,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Ketabang)	1 Kegiatan	3,757,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Kegiatan	5,047,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Kegiatan	4,016,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Kegiatan	6,477,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Kegiatan	5,098,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Kegiatan	5,289,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Kegiatan	3,347,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	5,762,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	4,158,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Puskesmas Lontar)									(Puskesmas Lontar)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Made)	1 Kegiatan	5,560,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Made)	1 Kegiatan	4,170,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Kegiatan	7,351,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Kegiatan	5,114,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Kegiatan	7,432,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Kegiatan	5,215,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Menur)	1 Kegiatan	5,925,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Menur)	1 Kegiatan	4,711,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Mojo)	1 Kegiatan	7,322,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Mojo)	1 Kegiatan	6,061,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	4,689,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	3,323,400

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Puskesmas (Puskesmas Moro Krembangan)									Puskesmas (Puskesmas Moro Krembangan)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Mulyorejo)	1 Kegiatan	6,076,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Mulyorejo)	1 Kegiatan	4,276,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Kegiatan	5,923,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Kegiatan	3,925,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pacar Keling)	1 Kegiatan	5,726,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pacar Keling)	1 Kegiatan	4,433,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pakis)	1 Kegiatan	5,604,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pakis)	1 Kegiatan	4,053,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pegirian)	1 Kegiatan	5,244,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pegirian)	1 Kegiatan	3,381,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Peneleh)	1 Kegiatan	6,045,600					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Peneleh)	1 Kegiatan	3,953,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Perak Timur)	1 Kegiatan	6,799,200					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Perak Timur)	1 Kegiatan	4,189,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pucangsewu)	1 Kegiatan	7,123,200					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Pucangsewu)	1 Kegiatan	4,203,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Putat Jaya)	1 Kegiatan	5,844,000					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Putat Jaya)	1 Kegiatan	3,783,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Rangkah)	1 Kegiatan	6,007,200					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Rangkah)	1 Kegiatan	3,425,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	5,126,400					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	3,828,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sawah Pulo)								Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sawah Pulo)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sawahan)	1 Kegiatan	5,253,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sawahan)	1 Kegiatan	3,610,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sememi)	1 Kegiatan	6,952,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sememi)	1 Kegiatan	4,792,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidosermo)	1 Kegiatan	5,848,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidosermo)	1 Kegiatan	4,746,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidotopo)	1 Kegiatan	5,246,401						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Sidotopo)	1 Kegiatan	4,084,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	5,481,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	3,923,400

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Puskesmas (Puskesmas Sidotopo Wetan)									Puskesmas (Puskesmas Sidotopo Wetan)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Simolawang)	1 Kegiatan	5,642,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Simolawang)	1 Kegiatan	3,738,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Simomulyo)	1 Kegiatan	6,715,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Simomulyo)	1 Kegiatan	4,633,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Siwalankerto)	1 Kegiatan	5,997,600						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Siwalankerto)	1 Kegiatan	4,697,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Kegiatan	4,452,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Kegiatan	3,240,000
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas	1 Kegiatan	5,760,000						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas	1 Kegiatan	4,320,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Tambakrejo)									Tambakrejo)		
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Kegiatan	6,592,800						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Kegiatan	4,522,200
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)	1 Kegiatan	6,319,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)	1 Kegiatan	3,868,800
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Kegiatan	5,923,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Kegiatan	1,644,600
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tenggilis)	1 Kegiatan	8,251,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Tenggilis)	1 Kegiatan	5,813,400
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wiyung)	1 Kegiatan	7,195,200						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wiyung)	1 Kegiatan	2,237,400
					1.02.02.2.04.03	Jumlah kegiatan	1	5,328,000						1.02.02.2.04.03	Jumlah kegiatan	1	3,966,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wonokromo)	Kegiatan							Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wonokromo)	Kegiatan	
					1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wonokusumo)	1 Kegiatan	5,642,400						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas (Puskesmas Wonokusumo)	1 Kegiatan	4,381,800
					1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi	59 lembaga	165,102,527						1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi	59 lembaga	151,914,400
			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	46,82%	**31,619,871,314**				**1.0203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	46,82%	**23,243,445,381**
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	**31,619,871,314**					**1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	**23,243,445,381**
						Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas	1 Puskesmas								Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Balas Klumprik)								Balas Klumprik)		
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Balongsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dukuh Kupang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jagir)	Puskesmas							dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jagir)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jemursari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kedungdoro)	Puskesmas							dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kedungdoro)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kedurus)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Krembangan Selatan)	Puskesmas							dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Krembangan Selatan)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Lidah Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas	1							Jumlah Puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Menur)	Puskesmas							dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Menur)	Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Moro Krembangan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pakis)	as							promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pakis)	as	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Peneleh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesm							Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Rangkah)	as							promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Rangkah)	as	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					administasi sesuai standar (Puskesmas Sidotopo Wetan)								administasi sesuai standar (Puskesmas Sidotopo Wetan)		
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Siwalankerto)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					standar (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)								standar (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)		
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Tenggilis)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai standar (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai	1 Puskesmas							Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administasi sesuai	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						standar (Puskesmas Wonokusumo)									standar (Puskesmas Wonokusumo)		
						Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1794 Orang								Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1794 Orang	
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Asemrowo)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Asemrowo)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Balongsari)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Balongsari)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Bangkingan)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Bangkingan)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Banyu	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Banyu	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan sesuai Standar	Urip)								Kesehatan sesuai Standar	Urip)		
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Benowo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Benowo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dupak)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Dupak)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gading)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gading)	2 Orang	137,019,269

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Standar									Standar			
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gayungan)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gayungan)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gundih)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gundih)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jagir)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jagir)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jemursari)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jemursari)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jeruk)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Jeruk)	2 Orang	137,019,269

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kalijudan)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kalijudan)	2 Orang	137,019,269
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kalirungkut)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kalirungkut)	2 Orang	137,019,269
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kebonsari)	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kebonsari)	2 Orang	137,019,268
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kedungdoro)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kedungdoro)	2 Orang	137,019,269
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kedurus)	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kedurus)	2 Orang	137,019,268
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kenjeran)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Kenjeran)	2 Orang	137,019,269
				1.02.03.2.02.02	Jumlah pemenuhan	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02	Jumlah pemenuhan	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Keputih)								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Keputih)		
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Ketabang)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Ketabang)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Lontar)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Lontar)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan	2 Orang	137,019,269

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga administrasi (Puskesmas Made)								Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga administrasi (Puskesmas Made)		
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Menur)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Menur)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Mojo)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Mojo)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	(Puskesmas Mulyorejo)								Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	(Puskesmas Mulyorejo)		
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pacar Keling)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pacar Keling)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pakis)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pakis)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pegirian)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pegirian)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Peneleh)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Peneleh)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Perak	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Perak	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan sesuai Standar	Timur)								Kesehatan sesuai Standar	Timur)		
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pucangsewu)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Pucangsewu)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Putat Jaya)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Putat Jaya)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Rangkah)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Rangkah)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sawahan)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sawahan)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sememi)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sememi)	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Standar									Standar			
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidosermo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidosermo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidotopo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidotopo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Simolawang)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Simolawang)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Simomulyo)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Simomulyo)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Siwalankerto)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Siwalankerto)	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tambakrejo)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tambakrejo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tanjungsari)	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tanjungsari)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	2 Orang	137,019,269					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tembok Dukuh)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tenggilis)	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Tenggilis)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02	Jumlah pemenuhan	2 Orang	137,019,268					1.02.03.2.02.02	Jumlah pemenuhan	2 Orang	137,019,268

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wiyung)								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wiyung)		
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wonokromo)	2 Orang	137,019,269						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wonokromo)	2 Orang	137,019,269
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wonokusumo)	2 Orang	137,019,268						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi (Puskesmas Wonokusumo)	2 Orang	137,019,268
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dengan pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	63 Puskesmas	21,799,255,682						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dengan pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	63 Puskesmas	13,841,130,985
					1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	28 Kali	1,188,401,712						1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	28 Kali	770,100,476
			1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	**612,678,425**				**1.0204 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	**612,678,425**
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional				**0**				**1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional**	Jumlah kegiatan pemberian izin apotek,toko obat,toko alat,kesehatan dan	1 Kegiatan	**52,218,000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
(UMOT)								**(UMOT)**					optikal,usaha mikro obat tradisional		
1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							0	1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	180 Sarana	52,218,000
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	**612,678,425**	**1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	**560,460,425**
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Jumlah sampel yang diperiksa	2230 Sampel	612,678,425	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Jumlah sampel yang diperiksa	2230 Sampel	560,460,425
1.02.05 PROGRAM					Persentase Upaya	100%	**130,389,663,760**	**1.0205 PROGRAM**					Persentase Upaya	100%	**134,839,663,760**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif		
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	**244,887,941**	**1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	**244,887,941**
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas dengan penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 Puskesmas	244,887,941	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas dengan penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 Puskesmas	244,887,941
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	154 Kelurahan	**130,144,775,819**	**1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	154 Kelurahan	**134,594,775,819**
	Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Asemrowo)	1 Puskesmas	
	Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Balas Klumprik)	1 Puskesmas	
	Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Balongsari)								(Puskesmas Balongsari)		
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Bangkingan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Banyu Urip)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Benowo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Bulak Banteng)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dr. Soetomo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dukuh	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dukuh	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kupang)								Kupang)		
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Dupak)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gading)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gayungan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gundih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Gunung Anyar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jagir)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi	1 Puskesm							Jumlah puskesmas yang mendampingi	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jemursari)	as							pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jemursari)	as	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Jeruk)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kalijudan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kalirungkut)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kebonsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kedungdoro)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Kedurus)								(Puskesmas Kedurus)		
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Kenjeran)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Keputih)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Ketabang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Klampis Ngasem)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Krembangan Selatan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Puskesmas Lidah Kulon)								(Puskesmas Lidah Kulon)		
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Lontar)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Made)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Made)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Manukan Kulon)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Medokan Ayu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Menur)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Mojo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					di tingkat kelurahan (Puskesmas Moro Krembangan)								di tingkat kelurahan (Puskesmas Moro Krembangan)		
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Mulyorejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Ngagel Rejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pacar Keling)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pakis)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pegirian)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peneleh)								Peneleh)		
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Perak Timur)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Pucangsewu)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Putat Jaya)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Rangkah)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sawahan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sawah Pulo)	1 Puskesmas	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sememi)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidosermo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidotopo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Sidotopo Wetan)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Simolawang)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Simomulyo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas	1							Jumlah puskesmas	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Siwalankerto)	Puskesmas							yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Siwalankerto)	Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tambakrejo)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tambak Wedi)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tanjungsari)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas							Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tembok Dukuh)	1 Puskesmas	
					Jumlah puskesmas yang mendampingi	1 Puskesm							Jumlah puskesmas yang mendampingi	1 Puskesm	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tenggilis)	as								pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Tenggilis)	as	
						Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wiyung)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wonokromo)	1 Puskesmas	
						Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas								Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan (Puskesmas Wonokusumo)	1 Puskesmas	
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Jenis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	6 Jenis	127,571,835,959						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Jenis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	6 Jenis	132,021,835,959
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas	2 Kegiatan	43,582,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas	2 Kegiatan	43,582,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Masyarakat (UKBM)	Asemrowo)							Masyarakat (UKBM)	Asemrowo)		
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Kegiatan	21,167,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Balas Klumprik)	2 Kegiatan	21,167,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Balongsari)	2 Kegiatan	33,223,560					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Balongsari)	2 Kegiatan	33,223,560
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bangkingan)	2 Kegiatan	23,612,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bangkingan)	2 Kegiatan	23,612,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banyu Urip)	2 Kegiatan	47,247,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banyu Urip)	2 Kegiatan	47,247,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	2 Kegiatan	64,244,900					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	2 Kegiatan	64,244,900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Benowo)								Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Benowo)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Kegiatan	28,167,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bulak Banteng)	2 Kegiatan	28,167,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Kegiatan	47,652,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dr. Soetomo)	2 Kegiatan	47,652,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Kegiatan	43,497,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dukuh Kupang)	2 Kegiatan	43,497,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dupak)	2 Kegiatan	28,607,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Dupak)	2 Kegiatan	28,607,400
					1.02.05.2.03.01	Jumlah kegiatan	2	43,997,400						1.02.05.2.03.01	Jumlah kegiatan	2	43,997,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gading)	Kegiatan							Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gading)	Kegiatan	
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gayungan)	2 Kegiatan	49,977,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gayungan)	2 Kegiatan	49,977,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gundih)	2 Kegiatan	46,982,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gundih)	2 Kegiatan	46,982,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Kegiatan	45,104,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gunung Anyar)	2 Kegiatan	45,104,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	46,117,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	46,117,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(Puskesmas Jagir)								Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(Puskesmas Jagir)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jemursari)	2 Kegiatan	39,084,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jemursari)	2 Kegiatan	39,084,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jeruk)	2 Kegiatan	23,027,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jeruk)	2 Kegiatan	23,027,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalijudan)	2 Kegiatan	33,067,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalijudan)	2 Kegiatan	33,067,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalirungkut)	2 Kegiatan	41,062,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalirungkut)	2 Kegiatan	41,062,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	2 Kegiatan	54,632,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	2 Kegiatan	54,632,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kebonsari)								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kebonsari)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedungdoro)	2 Kegiatan	40,784,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedungdoro)	2 Kegiatan	40,784,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedurus)	2 Kegiatan	57,112,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedurus)	2 Kegiatan	57,112,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kenjeran)	2 Kegiatan	46,952,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kenjeran)	2 Kegiatan	46,952,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Keputih)	2 Kegiatan	29,232,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Keputih)	2 Kegiatan	29,232,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ketabang)	2 Kegiatan	35,772,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ketabang)	2 Kegiatan	35,772,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Kegiatan	36,544,900					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Klampis Ngasem)	2 Kegiatan	36,544,900
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Kegiatan	48,992,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Krembangan Selatan)	2 Kegiatan	48,992,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Kegiatan	34,567,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lidah Kulon)	2 Kegiatan	34,567,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	2 Kegiatan	40,157,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	2 Kegiatan	40,157,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lontar)								Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Lontar)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Made)	2 Kegiatan	22,817,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Made)	2 Kegiatan	22,817,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Kegiatan	48,397,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manukan Kulon)	2 Kegiatan	48,397,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Kegiatan	38,022,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Medokan Ayu)	2 Kegiatan	38,022,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Menur)	2 Kegiatan	36,619,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Menur)	2 Kegiatan	36,619,900
					1.02.05.2.03.01	Jumlah kegiatan	2	51,432,400						1.02.05.2.03.01	Jumlah kegiatan	2	51,432,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Mojo)	Kegiatan							Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Mojo)	Kegiatan	
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Kegiatan	46,977,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Moro Krembangan)	2 Kegiatan	46,977,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Mulyorejo)	2 Kegiatan	37,244,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Mulyorejo)	2 Kegiatan	37,244,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Kegiatan	40,137,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngagel Rejo)	2 Kegiatan	40,137,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	41,454,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	41,454,900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(Puskesmas Pacar Keling)								Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(Puskesmas Pacar Keling)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pakis)	2 Kegiatan	32,467,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pakis)	2 Kegiatan	32,467,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pegirian)	2 Kegiatan	25,022,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pegirian)	2 Kegiatan	25,022,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Peneleh)	2 Kegiatan	48,267,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Peneleh)	2 Kegiatan	48,267,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Perak Timur)	2 Kegiatan	60,209,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Perak Timur)	2 Kegiatan	60,209,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	2 Kegiatan	50,322,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	2 Kegiatan	50,322,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pucangsewu)								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pucangsewu)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Putat Jaya)	2 Kegiatan	46,242,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Putat Jaya)	2 Kegiatan	46,242,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Rangkah)	2 Kegiatan	45,659,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Rangkah)	2 Kegiatan	45,659,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Kegiatan	36,212,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sawah Pulo)	2 Kegiatan	36,212,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sawahan)	2 Kegiatan	44,782,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sawahan)	2 Kegiatan	44,782,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sememi)	2 Kegiatan	59,859,900					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sememi)	2 Kegiatan	59,859,900
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidosermo)	2 Kegiatan	51,034,900					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidosermo)	2 Kegiatan	51,034,900
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidotopo)	2 Kegiatan	31,137,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidotopo)	2 Kegiatan	31,137,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Kegiatan	31,702,400					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sidotopo Wetan)	2 Kegiatan	31,702,400
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2 Kegiatan	34,039,900					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2 Kegiatan	34,039,900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Simolawang)								Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Simolawang)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Simomulyo)	2 Kegiatan	63,569,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Simomulyo)	2 Kegiatan	63,569,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Siwalankerto)	2 Kegiatan	22,322,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Siwalankerto)	2 Kegiatan	22,322,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Kegiatan	20,887,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambak Wedi)	2 Kegiatan	20,887,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambakrejo)	2 Kegiatan	45,559,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambakrejo)	2 Kegiatan	45,559,900
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan dan	2 Kegiatan	43,889,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan dan	2 Kegiatan	43,889,900

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)								dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanah Kali Kedinding)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanjungsari)	2 Kegiatan	31,262,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanjungsari)	2 Kegiatan	31,262,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tembok Dukuh)	2 Kegiatan	43,557,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tembok Dukuh)	2 Kegiatan	43,557,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tenggilis)	2 Kegiatan	52,552,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tenggilis)	2 Kegiatan	52,552,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas	2 Kegiatan	35,157,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas	2 Kegiatan	35,157,400

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat (UKBM)	Wiyung)								Masyarakat (UKBM)	Wiyung)		
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokromo)	2 Kegiatan	42,522,400						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokromo)	2 Kegiatan	42,522,400
					1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokusumo)	2 Kegiatan	37,419,900						1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokusumo)	2 Kegiatan	37,419,900
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								**89,579,770,371**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**								**74,950,813,922**
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**28,012,914,189**		**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26,119,799,328**
		2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**28,012,914,189**			**2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**26,119,799,328**
			2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**24,717,048,822**				**2.0901 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**23,366,345,626**
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20,549,828,000**					**2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,049,971,927**
					2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,549,828,000						2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,049,971,927

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4,167,220,822**	**2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**4,316,373,699**
2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkup DKPP	80%	797,635,185	2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkup DKPP	80%	931,220,558
2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,369,585,637	2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,385,153,141
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,11	**2,434,894,950**	**2.0903 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,11	**2,036,805,227**
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Laporan	**721,836,606**	**2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Laporan	**584,035,992**
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Kali	721,836,606	2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Kali	584,035,992
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	1 Laporan	**1,713,058,344**	**2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target**	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	1 Laporan	**1,452,769,235**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			**Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan dan Jumlah pelaksanaan pengembangan Diversifikasi Pangan	31 Kali	1,713,058,344	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan dan Jumlah pelaksanaan pengembangan Diversifikasi Pangan	39 Kali	1,452,769,235
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,87%	**860,970,417**	**2.0905 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,87%	**716,648,475**
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	**860,970,417**	**2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	**716,648,475**
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel pangan segar yang diperiksa	1500 sampel	860,970,417	2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel pangan segar yang diperiksa	1500 sampel	716,648,475
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**61,566,856,182**	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**48,831,014,594**
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**23,847,842,299**	**3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**15,049,223,864**
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana	30%	**15,545,358,359**	**3.2503 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana	30%	**8,879,525,725**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	perikanan tangkap yang memadai				perikanan tangkap yang memadai		
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	**15,545,358,359**	**3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	**8,879,525,725**
3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap	50 unit	15,545,358,359	3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap	50 unit	8,879,525,725
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	20 orang/kelompok	**5,033,508,699**	**3.2504 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	20 orang/kelompok	**3,229,734,663**
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	32 kali	**359,916,962**	**3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	32 kali	**327,980,000**
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Jumlah peserta pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	640 orang	359,916,962	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Jumlah peserta pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	640 orang	327,980,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	**4,673,591,737**					**3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	**2,901,754,663**
					3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana budidaya ikan yang diadakan	86 unit	4,673,591,737						3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana budidaya ikan yang diadakan	86 unit	2,901,754,663
			3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	**2,089,300,136**				**3.2505 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	**1,995,301,227**
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Laporan	**2,089,300,136**					**3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Laporan	**1,995,301,227**
					3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 kali	2,089,300,136						3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 kali	1,995,301,227

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	60%	**1,179,675,105**	**3.2506 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	60%	**944,662,249**
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra	**1,179,675,105**	**3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra	**944,662,249**
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diberikan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	250 pelaku usaha	1,179,675,105	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diberikan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	250 pelaku usaha	944,662,249
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**37,719,013,883**	**3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**33,781,790,730**
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25 Orang	**7,829,298,281**	**3.2702 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25 Orang	**7,071,904,425**
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	**5,857,700,452**	**3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	**5,431,440,269**
3.27.02.2.01.02 Pendampingan	Jumlah Peserta Pembinaan	500 Orang	5,857,700,452	3.27.02.2.01.02 Pendampingan	Jumlah Peserta Pembinaan	500 Orang	5,431,440,269

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengguna Sarana Pemanfaatan Lahan Pekarangan								Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengguna Sarana Pemanfaatan Lahan Pekarangan		
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	**1,971,597,829**				**3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	**1,640,464,156**
					3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Monitoring penyediaan benih/bibit ternak	12 kali	1,971,597,829					3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Monitoring penyediaan benih/bibit ternak	12 kali	1,640,464,156
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	14 Lokasi	**25,954,404,711**			**3.2703 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	14 Lokasi	**22,948,095,748**
						Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha								Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**1,848,042,076**				**3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian**			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**1,224,679,373**
					3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan	Jumlah lahan aset yang direalisasikan	4 Lokasi	1,848,042,076					3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan	Jumlah lahan aset yang direalisasikan	4 Lokasi	1,224,679,373

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	untuk kegiatan budidaya pertanian								Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	untuk kegiatan budidaya pertanian		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan	**24,106,362,635**					**3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian**		Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan	**21,723,416,375**
					3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah lokasi taman hutan raya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	13 lokasi	24,106,362,635						3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah lokasi taman hutan raya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	13 lokasi	21,723,416,375
			3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	3 kelompok	**1,171,964,617**				**3.2704 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	3 kelompok	**1,044,501,436**
						Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,38%								Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,38%	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	**868,026,960**					**3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	**868,889,497**
					3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan	2750 ekor	868,026,960						3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan	2750 ekor	868,889,497

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						penyakit hewan serta Zoonosis									penyakit hewan serta Zoonosis		
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	25 Unit	**303,937,657**					**3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	25 Unit	**175,611,939**
					3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya peternakan	8 Kali	303,937,657						3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya peternakan	8 Kali	175,611,939
			3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	**110,148,927**				**3.2706 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	**117,090,570**
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses	80%	**110,148,927**					**3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses	80%	**117,090,570**
					3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian	80%	110,148,927						3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian	80%	117,090,570
			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	**2,653,197,347**				**3.2707 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	**2,600,198,551**
						Tingkat Produktivitas	5,8 ton/ha								Tingkat Produktivitas	5,8 ton/ha	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Pertanian				Pertanian		
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	6 Kelompok	**2,653,197,347**	**3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	6 Kelompok	**2,600,198,551**
	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan bimtek/pelatihan untuk penguatan SDM Penyuluh	5 kali	996,590,295	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan bimtek/pelatihan untuk penguatan SDM Penyuluh	5 kali	943,862,974
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	6 Kali	1,656,607,052	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	6 Kali	1,656,335,577
Dinas Komunikasi dan Informatika			**98,635,555,356**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**			**98,409,201,295**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**98,635,555,356**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**98,409,201,295**
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**92,822,913,687**	**2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**92,082,875,262**
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,54%	**16,345,807,799**	**2.1601 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,54%	**16,260,994,746**
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan	Persentase ketepatan waktu	100%	**14,351,452,000**	**2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan**	Persentase ketepatan waktu	100%	**14,286,638,947**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perangkat Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN							**Perangkat Daerah**	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
				2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,351,452,000					2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,286,638,947
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,445,748,889**					**2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,382,996,982**
				2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	1,445,748,889					2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	1,382,996,982
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**548,606,910**					**2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**591,358,817**
				2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	548,606,910					2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	591,358,817
			2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	85%	**14,412,240,449**				**2.1602 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	85%	**14,301,404,899**
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	**14,412,240,449**					**2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	**14,301,404,899**
					Kecepatan respon terhadap	100%							Kecepatan respon terhadap	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja									permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja		
					2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan publikasi melalui media	2834 Kali	10,923,204,232						2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan publikasi melalui media	2834 Kali	10,936,164,232
						Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun	360 Konten								Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun	360 Konten	
					2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan koordinasi dalam pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik	50 Kali	843,058,969						2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan koordinasi dalam pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik	50 Kali	803,196,569
					2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100 Kali	2,645,977,248						2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100 Kali	2,562,044,098
			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	**62,064,865,439**				**2.1603 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	**61,520,475,617**
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam	100%	**34,647,727,408**					**2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah**	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam	100%	**35,296,367,578**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kabupaten/Kota		b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam							**Kabupaten/Kota**		b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam		
					2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah lokasi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara dan pengembangan sarana dan prasarana TIK	220 lokasi	34,647,727,408						2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah lokasi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara dan pengembangan sarana dan prasarana TIK	220 lokasi	35,296,367,578
				2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pusat data yang mengelola satu server	2 Pusat data	**27,417,138,031**					**2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pusat data yang mengelola satu server	2 Pusat data	**26,224,108,039**
						Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%							Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	
					2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TIK	58 PD	366,668,220						2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TIK	58 PD	386,668,220
					2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengecekan Pusat Data yang dikelola	364 Kali	3,147,176,948						2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengecekan Pusat Data yang dikelola	364 Kali	2,036,203,698
					2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses	Jumlah pengelolaan / pengembangan aplikasi / proses	190 Aplikasi	1,886,240,587						2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses	Jumlah pengelolaan / pengembangan aplikasi / proses	190 Aplikasi	1,696,349,187

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	bisnis								Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	bisnis		
					2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya TIK (service desk tier 1 dan tier 2)	58 PD	22,017,052,276						2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya TIK (service desk tier 1 dan tier 2)	58 PD	22,104,886,934
		2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**510,356,139**			**2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**498,356,139**
			2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**510,356,139**				**2.2002 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**498,356,139**
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	**510,356,139**					**2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	**498,356,139**
					2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan pengumpulan data statistik sektoral	12 Kali	510,356,139						2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan pengumpulan data statistik sektoral	12 Kali	498,356,139
		2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						**5,302,285,530**			**2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**5,827,969,894**
			2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	8%	**5,302,285,530**				**2.2102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	8%	**5,827,969,894**
				2.21.02.2.01		Jumlah	3 kali/per	**3,129,659,216**					**2.21.02.2.01**		Jumlah	3 kali/per	**3,028,075,793**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	hari		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	hari	
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan informasi	13 PD	3,129,659,216	2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan informasi	13 PD	3,028,075,793
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	**2,172,626,314**	**2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	**2,799,894,101**
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola	1489 Unit	2,172,626,314	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola	1489 Unit	2,799,894,101
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			**51,912,005,197**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**			**50,584,592,525**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**40,780,176,765**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**38,448,965,210**
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**40,780,176,765**	**2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**38,448,965,210**
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**33,439,544,626**	**2.1701 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**32,170,398,914**
2.17.01.2.02	Persentase	100%	**27,395,110,638**	**2.17.01.2.02**	Persentase	100%	**26,067,697,966**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,395,110,638				2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	26,067,697,966			
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan	**6,044,433,988**				**2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan	**6,102,700,948**			
	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan						Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan				
2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	935,259,607				2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,371,293,061			
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5,109,174,381				2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,731,407,887			
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	15%	**442,600,291**				**2.1702 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	15%	**323,601,688**			
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	**442,600,291**				**2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	**323,601,688**			
2.17.02.2.01.01	Jumlah koperasi	30	442,600,291				2.17.02.2.01.01	Jumlah koperasi	30	323,601,688			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	67%	**750,496,301**				**2.1703 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	67%	**681,723,304**
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	**750,496,301**				**2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	**681,723,304**
					2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	415 koperasi	750,496,301						2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	415 koperasi	681,723,304
			2.17.05 PROGRAM			Persentase	14%	**404,200,000**				**2.1705 PROGRAM**			Persentase	14%	**404,200,000**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.		
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	179 Orang	**404,200,000**
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	179 orang	404,200,000
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	20%	**393,865,153**
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	**393,865,153**
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan	Jumlah koperasi yang mengikuti	83 koperasi	393,865,153

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.		
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	179 Orang	**404,200,000**
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	179 orang	404,200,000
2.1706 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	20%	**409,609,915**
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	**409,609,915**
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan	Jumlah koperasi yang mengikuti	83 koperasi	409,609,915

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	bimtek pengembangan unit usaha							Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	bimtek pengembangan unit usaha		
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	9,97%	**4,177,676,208**				**2.1707 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	9,97%	**2,938,607,753**
						Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	69%								Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	69%	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	135 0rang	**4,177,676,208**					**2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan**		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	135 0rang	**2,938,607,753**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Para Pemangku Kepentingan									**Para Pemangku Kepentingan**				
						Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra								Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	
					2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	135 orang	259,246,839						2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	135 orang	253,249,675
					2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produk	10 sentra	3,918,429,369						2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produk	10 sentra	2,685,358,078
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	52%	**1,171,794,186**				**2.1708 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	52%	**1,520,823,636**
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	**1,171,794,186**					**2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	**1,520,823,636**
					2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	500 orang	1,171,794,186						2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	525 orang	1,520,823,636

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	dan pendampingan manajemen usaha								Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	dan pendampingan manajemen usaha		
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**11,131,828,432**	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**12,135,627,315**
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							**11,131,828,432**		**3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**12,135,627,315**
		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Persentase ketepatan waktu pelayanan	92%	**1,005,200,323**			**3.3002 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				Persentase ketepatan waktu pelayanan	92%	**1,005,200,323**
			3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha	**259,582,216**				**3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**			Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha	**256,124,535**
				3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	450 pelaku usaha	259,582,216				3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	450 pelaku usaha	256,124,535
			3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Jumlah sektor usaha pergudangan yang difasilitasi	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan	**184,536,424**				**3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		Jumlah sektor usaha pergudangan yang difasilitasi	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan	**185,760,188**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang difasilitasi	450 Pelaku usaha	184,536,424					3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang difasilitasi	450 Pelaku usaha	185,760,188
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah sektor usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	1 Sektor usaha	**100,748,419**				**3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**		Jumlah sektor usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	1 Sektor usaha	**96,680,095**
					3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	55 Pelaku usaha	100,748,419					3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	55 Pelaku usaha	96,680,095
				3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Jumlah sektor usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	1 Sektor Usaha	**49,846,528**				**3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**		Jumlah sektor usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	1 Sektor Usaha	**40,100,000**
					3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	24 Pelaku Usaha	49,846,528					3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	24 Pelaku Usaha	40,100,000
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman		Jumlah sektor usaha penjualan Langsung Minuman	1 Pelaku usaha	**295,938,316**					**3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman**	Jumlah sektor usaha penjualan Langsung Minuman	1 Pelaku usaha	**316,055,409**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Beralkohol yang difasilitasi						**Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Beralkohol yang difasilitasi					
3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	380 Pelaku usaha	295,938,316				3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	380 Pelaku usaha	316,055,409			
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sektor usaha fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	1 Sektor usaha	**114,548,420**				**3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah sektor usaha fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	1 Sektor usaha	**110,480,096**			
3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa	20 lokasi	114,548,420				3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa	20 lokasi	110,480,096			
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	**3,154,372,598**				**3.3003 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	**3,585,736,335**			
3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	**3,154,372,598**				**3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	**3,585,736,335**			
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan	Jumlah pasar yang dikelola	12 lokasi	3,154,372,598				3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan	Jumlah pasar yang dikelola	12 lokasi	3,585,736,335			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
						Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan								Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	500 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	
			3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	**812,252,131**				**3.3004 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	**732,897,998**
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	**812,252,131**					**3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	**732,897,998**
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan								Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	
					3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 kali	568,173,372						3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 kali	473,765,052
					3.30.04.2.02.03	Jumlah Kegiatan	217 kali	244,078,759						3.30.04.2.02.03	Jumlah Kegiatan	217 kali	259,132,946

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus								Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus		
			3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	**1,126,579,910**				**3.3006 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	**1,136,465,622**
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	**1,126,579,910**					**3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	**1,136,465,622**
					3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	22430 Unit	1,013,187,891						3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	22430 Unit	1,027,141,927
					3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4750 unit	113,392,019						3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4750 unit	109,323,695
			3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	**5,033,423,470**				**3.3007 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	**5,675,327,037**
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	**5,033,423,470**					**3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	**5,675,327,037**
					3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	5220 orang	5,033,423,470						3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	5220 orang	5,675,327,037

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Dinas Lingkungan Hidup								**556,329,208,925**	**Dinas Lingkungan Hidup**								**584,562,455,292**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**556,329,208,925**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**584,562,455,292**
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							**556,329,208,925**		**2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**584,562,455,292**
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85%	**70,330,556,810**			**2.1101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85%	**67,300,060,439**
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**52,190,224,000**				**2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**49,478,891,402**
				2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	52,190,224,000					2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	49,478,891,402
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**17,547,729,173**				**2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**17,289,777,167**
				2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	17,547,729,173					2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	17,289,777,167
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**592,603,637**				**2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**531,391,870**
				2.11.01.2.09.10		Persentase	100%	592,603,637					2.11.01.2.09.10		Persentase	100%	531,391,870

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		
			2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	42%	**4,633,960,751**				**2.1103 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	42%	**4,838,086,146**
						Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	82%								Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	82%	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	**1,912,355,600**					**2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	**2,043,853,150**
						jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 kegiatan								jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 kegiatan	
					2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah data kualitas air dan data kualitas udara ambien sesaat selama 1 tahun	1010 data	463,848,591						2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah data kualitas air dan data kualitas udara ambien sesaat selama 1 tahun	1010 data	476,032,886
					2.11.03.2.01.02 Koordinasi,	jumlah lokasi pendampingan audit	23 lokasi	1,448,507,009						2.11.03.2.01.02 Koordinasi,	jumlah lokasi pendampingan audit	23 lokasi	1,567,820,264

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	energi, pelaksanaan CFD dan pendampingan proklim								Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	energi, pelaksanaan CFD dan pendampingan proklim		
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	**2,721,605,151**					**2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	**2,794,232,996**
						Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%								Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%	
					2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	365 data	839,187,657						2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	365 data	848,779,502
					2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah jamban termasuk instalasi septic tank yang terpasang	300 unit	1,882,417,494						2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah jamban termasuk instalasi septic tank yang terpasang	300 unit	1,945,453,494
			2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	98,98%	**87,283,947,014**				**2.1104 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	98,98%	**95,627,050,508**
				2.11.04.2.01 Pengelolaan		Jumlah dokumen kajian pemeliharaan	3 dokumen	**87,283,947,014**					**2.11.04.2.01 Pengelolaan**	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan	3 dokumen	**95,627,050,508**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	lingkungan hidup daerah yang disusun							**Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	lingkungan hidup daerah yang disusun		
					Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.79 Ha							Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.79 Ha	
				2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah ekosistem keanekaragaman hayati yang disurvey	7 ekosistem	216,488,257					2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah ekosistem keanekaragaman hayati yang disurvey	7 ekosistem	241,430,281
				2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	463 lokasi	64,654,605,470					2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	463 lokasi	69,850,387,615
				2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara	14 lokasi	13,318,926,067					2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara	14 lokasi	15,346,180,823
				2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	79 Lokasi	9,093,927,220					2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	79 Lokasi	10,189,051,789
			2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	**3,782,372,880**				**2.1105 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	**3,904,731,094**
					Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah	80%							Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah	80%	

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	spesifik				spesifik		
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	**268,318,068**	**2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	200 berkas	**283,895,087**
2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses	300 Berkas	268,318,068	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses	200 Berkas	283,895,087
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**3,514,054,812**	**2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**3,620,836,007**
2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah lokasi penanganan limbah B3 atau sampah spesifik yang dilakukan	8 lokasi	3,514,054,812	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah lokasi penanganan limbah B3 atau sampah spesifik yang dilakukan	8 lokasi	3,620,836,007
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha	50%	**1,374,519,615**	**2.1106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha	50%	**1,409,471,718**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	terhadap aspek lingkungan			**TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	terhadap aspek lingkungan		
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	**1,374,519,615**	**2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	**1,409,471,718**
	Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang diterbitkan	200 Berkas	905,784,906	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang diterbitkan	150 Berkas	890,207,886
	Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan	250 Berkas			Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan	250 Berkas	
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	178 lokasi	468,734,709	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	178 lokasi	519,263,832

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 Lembaga								Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 Lembaga	
			2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	50,27%	**6,735,544,950**				**2.1108 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	50,27%	**6,735,544,950**
						Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	55,70%								Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	55,70%	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	**6,735,544,950**					**2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	**6,735,544,950**
						Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali								Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	
					2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di	12 kali	6,735,544,950					2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di	12 kali	6,735,544,950

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						bidang lingkungan yang diselenggarakan									bidang lingkungan yang diselenggarakan		
						Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kader lingkungan	3 kegiatan								Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kader lingkungan	3 kegiatan	
			2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	50,40%	**389,484,715**				**2.1109 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	50,40%	**342,283,583**
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	**389,484,715**					**2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	**342,283,583**
					2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen	389,484,715						2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen	342,283,583
						Jumlah lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10 lokasi								Jumlah lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10 lokasi	
			2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi	50 obyek	**321,551,261**				**2.1110 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi	50 obyek	**275,285,555**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				administrasi dan non sanksi administrasi							administrasi dan non sanksi administrasi		
			2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**321,551,261**				**2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**275,285,555**
			2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 Obyek	321,551,261				2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 Obyek	275,285,555
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	2,56%	**381,477,270,929**			**2.1111 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	2,56%	**404,129,941,299**
				Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	87,27%						Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	87,27%	
				Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	50%						Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	50%	
			2.11.11.2.01	Jumlah jenis	3 jenis	**381,477,270,929**				**2.11.11.2.01**	Jumlah jenis	3 jenis	**404,129,941,299**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Sampah		kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan							**Pengelolaan Sampah**		kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan		
						Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis								Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	
						Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis								Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis	
					2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	39 lokasi	138,259,007,715						2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	39 lokasi	141,678,331,965
					2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	148,434,439,738						2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	226,008,471,857
						Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah	939 lokasi								Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah	939 lokasi	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	190 lokasi	94,783,823,476	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	190 lokasi	36,443,137,477
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			**106,787,117,296**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**			**108,371,843,897**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**106,787,117,296**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**108,371,843,897**
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**106,787,117,296**	**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**108,371,843,897**
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	**36,998,235,200**	**1.0501 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	**35,041,404,107**
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**33,378,468,000**	**1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**31,421,636,907**
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	33,378,468,000	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	31,421,636,907
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya	100%	**531,923,354**	**1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya	100%	**531,923,354**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara	100%	531,923,354					1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara	100%	531,923,354
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa pelayanan perkantoran	100%	**3,087,843,846**					**1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa pelayanan perkantoran	100%	**3,087,843,846**
					1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan kantor	12 Bulan	3,087,843,846					1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan kantor	12 Bulan	3,087,843,846
			1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	48	**69,788,882,096**				**1.0504 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	48	**73,330,439,790**
						Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%							Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	810 Petugas Pemadam Terlatih	**68,876,169,691**				**1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	764 Petugas Pemadam Terlatih	**72,417,727,385**
					1.05.04.2.01.02	Jumlah pelaksana	756	33,980,688,269					1.05.04.2.01.02	Jumlah pelaksana	632	37,508,539,810

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	operasional pemadaman kebakaran dan Penyelamatan yang dipenuhi kebutuhannya	Orang						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	operasional pemadaman kebakaran dan Penyelamatan yang dipenuhi kebutuhannya	Orang	
					1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya	220 Unit	7,123,080,520					1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya	220 Unit	7,123,080,520
					1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan	785 Unit	26,938,898,728					1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan	785 Unit	26,952,604,881
					1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan kompetensi aparatur	10 Kali	833,502,174					1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan kompetensi aparatur	10 Kali	833,502,174
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Berkas permohonan pemeriksaan siaten proteksi kebakaran pemilik bangunan/gedung guna pencegahan kebakaran di Kota Surabaya	440 Berkas	**393,795,229**				**1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		Berkas permohonan pemeriksaan siaten proteksi kebakaran pemilik bangunan/gedung guna pencegahan kebakaran di Kota Surabaya	440 Berkas	**393,795,229**
					1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik	520 Bangunan/Gedung	393,795,229					1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik	520 Bangunan/Gedung	393,795,229

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						fungsi dari sistem proteksi kebakaran									fungsi dari sistem proteksi kebakaran		
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	70 Kegiatan	**518,917,176**					**1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	70 Kegiatan	**518,917,176**
					1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan	120 Kali	518,917,176					1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan	120 Kali	518,917,176
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								**47,408,326,074**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								**46,477,953,222**
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**47,408,326,074**		**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46,477,953,222**
		2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**20,327,580,440**			**2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**20,604,576,703**
			2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**13,619,806,024**				**2.0801 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**13,496,813,397**
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan		Persentase ketepatan waktu	100%	**10,489,742,638**					**2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan**		Persentase ketepatan waktu	100%	**10,401,173,302**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
Perangkat Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					**Perangkat Daerah**	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				
2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,489,742,638			2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,401,173,302		
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2,645,193,754**			**2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2,630,966,677**		
2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	15 Rekening	2,645,193,754			2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	15 Rekening	2,630,966,677		
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**484,869,632**			**2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**464,673,418**		
2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	6 Rekening	484,869,632			2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	6 Rekening	464,673,418		
2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	**2,033,389,808**			**2.0802 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	**2,138,359,574**		
	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%					Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%			
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat	3 Dokumen	**701,934,668**			**2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan**	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat	3 Dokumen	**732,270,218**		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				daerah			**Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				daerah		
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58 Lembaga	701,934,668	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58 Lembaga	732,270,218
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	**371,498,935**	**2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	**362,024,863**
2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4 Kali	371,498,935	2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4 Kali	362,024,863
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	**959,956,205**	**2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	**1,044,064,493**
2.08.02.2.03.02				jumlah peserta	740	959,956,205	2.08.02.2.03.02				jumlah peserta	740	1,044,064,493

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Orang						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Orang	
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**497,873,885**				**2.0803 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**439,687,141**
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	32.25 %								Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	32.25 %	
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**0**					**2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	**35,377,040**
					2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan			0						2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	1 Dokumen	35,377,040

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	**247,914,273**					**2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	**152,712,000**
					2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	20 kasus	98,515,200					2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	20 kasus	89,500,000
					2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	17 kasus	149,399,073					2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	17 kasus	63,212,000
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat		Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan	10 kecamatan	**249,959,612**					**2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat**	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan	10 kecamatan	**251,598,101**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Daerah Kabupaten/Kota	perempuan							**Daerah Kabupaten/Kota**	perempuan		
				2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	100 orang	249,959,612					2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	100 orang	251,598,101
			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	209	**507,502,922**				**2.0804 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	209	**511,997,654**
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	**507,502,922**					**2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	**511,997,654**
				2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga	507,502,922					2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga	511,997,654
			2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	**296,170,117**				**2.0805 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	**296,175,042**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	**296,170,117**	**2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	**296,175,042**
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2 Kali	296,170,117	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2 Kali	296,175,042
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	47.4 %	**2,247,247,822**	**2.0806 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Kelurahan Layak Anak	47.4 %	**2,491,678,037**
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	**558,256,660**	**2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	**558,575,890**
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	20 Kelurahan	558,256,660	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	20 Kelurahan	558,575,890
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian	3 kegiatan	**1,688,991,162**	**2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia**	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian	3 kegiatan	**1,933,102,147**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	indikator Kota Layak Anak						**Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	indikator Kota Layak Anak		
			2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2 Lembaga	1,154,065,668				2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2 Lembaga	1,335,268,652
			2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga	534,925,494				2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga	597,833,495
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1,125,589,862**				**2.0807 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	**1,229,865,858**
				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	32.25 %						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	32.25 %	
			2.08.07.2.01 Pencegahan			**0**				**2.08.07.2.01 Pencegahan**	Jumlah kegiatan Pencegahan	3 Kegiatan	**77,572,960**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								**Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**					Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
				2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0					2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	77,572,960
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	10 lembaga	**1,125,589,862**	**2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	10 lembaga	**1,075,486,898**
					Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus							Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	
				2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah pengaduan yang diterima	150 kasus	780,588,935					2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah pengaduan yang diterima	150 kasus	876,654,898

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kabupaten/Kota									Kabupaten/Kota			
					2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	345,000,927						2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	198,832,000
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**0**				**2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	**76,806,000**
					2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0						2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76,806,000
		2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA						**27,080,745,634**			**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**				**25,873,376,519**

Sebelum Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
BERENCANA			
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	30.15 %	**373,773,670**
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	70 Sekolah	**251,752,066**
2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	140 Orang	251,752,066
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	**122,021,604**
	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	
2.14.02.2.02.11			0

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
BERENCANA			
2.1402 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	30.15 %	**371,711,100**
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	70 Sekolah	**206,313,000**
2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	140 Orang	206,313,000
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	**165,398,100**
	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	
2.14.02.2.02.11 Jumlah Data dan		1	45,510,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga									Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	
					2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1 Dokumen	122,021,604						2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1 Dokumen	119,888,100
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.55 %	**10,825,255,851**				**2.1403 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.55 %	**10,367,407,511**
						Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	82%								Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	82%	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				**0**				**2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 kecamatan	**523,600,000**
					2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat			0						2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana	1 Laporan	483,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
					2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK			0						2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	40,000,000
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	**1,946,459,600**				**2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	**1,937,449,599**
					2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12 kali	1,105,995,000						2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12 kali	1,096,984,999
					2.14.03.2.02.04	Jumlah IMP yang	1566	840,464,600						2.14.03.2.02.04	Jumlah IMP yang	1566	840,464,600

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	Orang							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	Orang	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	416911 Orang	**8,247,196,251**				**2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	416911 Orang	**7,317,357,912**
					2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	414961 Orang	1,932,652,851					2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	275739 Orang	1,002,814,512
					2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950 orang	5,294,543,400					2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950 orang	5,294,543,400
					2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	19 Unit	1,020,000,000					2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	19 Unit	1,020,000,000
				2.14.03.2.04		Jumlah laporan	4	**631,600,000**					**2.14.03.2.04**	Jumlah laporan	4	**589,000,000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	Laporan						**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	Laporan	
					Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4 Laporan							Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4 Laporan	
					2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		0					2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31 Kecamatan	399,572,500
					2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	631,600,000					2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31 Kecamatan	189,427,500
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	**15,881,716,113**				**2.1404 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	**15,134,257,908**
					Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.53 %							Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.53 %	
					Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	39.24 %							Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	39.24 %	
					Persentase peserta UPPKA yang	40%							Persentase peserta UPPKA yang	40%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	meningkat pendapatannya				meningkat pendapatannya		
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	1 laporan	**15,881,716,113**	**2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	1 laporan	**15,134,257,908**
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	1 laporan			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	1 laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporan			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	1 laporan			Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	1 laporan	
2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	160 keluarga	938,744,914	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	160 keluarga	931,104,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
					2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	10 paket	790,466,000						2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	10 paket	747,866,000
						Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28 paket								Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28 paket	
					2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	113 keluarga	354,269,092						2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	113 keluarga	279,689,657
						Jumlah keluarga BKB yang	344 keluarga								Jumlah keluarga BKB yang	344 keluarga	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
						Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	54 keluarga									Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	54 keluarga	
					2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31 kecamatan	13,432,070,000						2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31 kecamatan	12,820,360,000
					2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	14 keluarga	366,166,107						2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	14 keluarga	355,238,251

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Keluarga/UPPKS)									Keluarga/UPPKS)			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								**19,506,489,036**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**								**19,951,098,259**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**19,506,489,036**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**19,951,098,259**
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							**19,506,489,036**		**2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**19,951,098,259**
		2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**13,691,362,880**			**2.1801 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	**13,676,577,544**
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**9,986,926,638**				**2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**10,010,065,104**
				2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	9,986,926,638					2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10,010,065,104
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	**3,704,436,242**				**2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	**3,666,512,440**
						Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%								Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	
				2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	100%	751,583,076					2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	100%	786,389,458
				2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	2,952,853,166					2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	2,880,122,982

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	150 Perusahaan	**414,451,163**	**2.1802 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor PMA/PMDN	150 Perusahaan	**423,039,184**
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	70%	**414,451,163**	**2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	70%	**423,039,184**
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	4 Dokumen	414,451,163	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	4 Dokumen	423,039,184
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	50%	**617,485,101**	**2.1803 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	50%	**625,232,104**
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	200 Calon Investor / Investor	**617,485,101**	**2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	200 Calon Investor / Investor	**625,232,104**
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	617,485,101	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	625,232,104
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	**3,618,919,480**	**2.1804 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	**4,055,420,760**
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan	80000 berkas	**3,618,919,480**	**2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara**	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan	80000 berkas	**4,055,420,760**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	yang diterbitkan							**Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	yang diterbitkan		
					Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha							Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha	
				2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	80000 berkas	2,840,639,661					2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	80000 berkas	3,254,019,505
				2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 Pelaku Usaha	778,279,819					2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 Pelaku Usaha	801,401,255
			2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	42%	**919,851,295**				**2.1805 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	42%	**916,101,295**
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah perusahaan yang menyampaikan	1100 perusahaan	**919,851,295**					**2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan**	Jumlah perusahaan yang menyampaikan	1100 perusahaan	**916,101,295**

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek							**Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek		
					2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	190 peserta	363,696,725						2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	258 peserta	363,696,725
					2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK)	170 proyek	556,154,570						2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK)	170 proyek	552,404,570
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD)	2700 perusahaan								Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD)	2700 perusahaan	
			2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	**244,419,117**				**2.1806 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	**254,727,372**
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	300 perusahaan	**244,419,117**					**2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	300 perusahaan	**254,727,372**
					2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan	Jumlah data investasi yang dikelola	46054 data	244,419,117						2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan	Jumlah data investasi yang dikelola	46054 data	254,727,372

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Dinas Pendidikan								**2,122,337,514,785**	**Dinas Pendidikan**								**2,126,577,296,738**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**2,122,337,514,785**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**2,126,577,296,738**
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**2,122,337,514,785**		**1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2,126,577,296,738**
		1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90.96 %	**976,953,472,545**			**1.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90.96 %	**915,573,472,326**
			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	14 dokumen	**2,113,185,000**				**1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	14 dokumen	**2,113,185,000**
				1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,113,185,000					1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,113,185,000
						jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	1213 lembaga								jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	1207 lembaga	
				1.01.01.2.02		Persentase	100%	**947,162,357,984**					**1.01.01.2.02**		Persentase	100%	**882,703,081,560**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	947,162,357,984	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	882,703,081,560
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**1,031,570,504**	**1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**1,031,570,504**
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 jenis	1,031,570,504	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 jenis	1,031,570,504
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**4,054,299,244**	**1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**4,054,299,244**
1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 jenis	4,054,299,244	1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 jenis	4,054,299,244
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**22,592,059,813**	**1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**25,671,336,018**
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	2,367,821,411	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	2,237,795,223
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 laporan	20,224,238,402	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 laporan	23,433,540,795

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kantor	Kantor			Kantor	Kantor		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	**1,112,149,965,505**	**1.0102 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	**1,171,299,747,677**
	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	
	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	
	Persentase guru PAUD yang kompeten	100%			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	
	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	19%			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	19%	
	Persentase lembaga PAUD berkualitas	83,33%			Persentase lembaga PAUD berkualitas	83,33%	
	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	85,44%			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	85,44%	
	Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	80%			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	80%	
	Persentase SD terakreditasi minimal B	93,24%			Persentase SD terakreditasi minimal B	93,24%	
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79%			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79%	
1.01.02.2.01	Jumlah laporan	1	**577,753,912,108**	**1.01.02.2.01**	Jumlah laporan	1	**609,442,988,830**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	Laporan						**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	Laporan	
						Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan								Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan	
						Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga								Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga	
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%								Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan								Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	19 Lokasi	18,357,490,069						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	8 Lokasi	14,662,480,843
					1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	266 Lokasi	7,540,379,884						1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	266 Lokasi	5,210,071,018
					1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	56 lembaga	5,687,233,540						1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	56 lembaga	5,687,233,540
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar tepat waktu	667 lembaga	316,581,663,686						1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar tepat waktu	667 lembaga	350,188,825,322

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang mendapat alokasi Penyediaan Sarana Prasarana yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10 lembaga	1,250,000,004					1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang mendapat alokasi Penyediaan Sarana Prasarana yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10 lembaga	1,250,000,004
				1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	650 lembaga	246,400,000					1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	650 lembaga	246,400,000
				1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali	2,954,576,655					1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali	2,954,576,655
				1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	11376 orang	831,988,270					1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	11376 orang	831,988,270
					Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	1842 Orang							Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	1842 Orang	
				1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	260 lembaga	141,800,000					1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	260 lembaga	141,800,000
				1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD Penerima BOS	285 lembaga	224,162,380,000					1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD Penerima BOS	285 lembaga	228,269,613,178

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**336,358,556,973**					**1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**343,317,729,468**
						Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga								Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga	
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%								Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan								Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	
						Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan								Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	12 lokasi	7,421,962,266						1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	3 lokasi	6,986,814,597
					1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhabiltasi	51 lokasi	2,258,556,107						1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhabiltasi	51 lokasi	1,548,878,899
					1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	12 Lembaga	6,745,452,127						1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	12 Lembaga	6,745,452,127
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik	293 lembaga	176,398,778,976						1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik	293 lembaga	185,535,374,456

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Menengah Pertama	Sekolah Menengah tepat waktu								Menengah Pertama	Sekolah Menengah tepat waktu		
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300 lembaga	217,590,000						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300 lembaga	217,590,000
					1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali	4,496,066,386						1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali	3,158,449,549
					1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	5745 orang	620,451,111						1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	5745 orang	620,451,111
						Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	641 Orang								Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	641 Orang	
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah	254 Lembaga	314,600,000						1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah	254 Lembaga	275,600,000
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima BOS	63 lembaga	137,885,100,000						1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima BOS	63 lembaga	138,229,118,729
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**127,670,213,434**					**1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**137,972,946,389**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan								Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan	
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan								Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	
					1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan PAUD	2 Lembaga	8,023,369,473						1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan PAUD	2 Lembaga	8,490,502,428
					1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Biaya personil Peserta Didik PAUD	2 Lembaga	167,400,000						1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Biaya personil Peserta Didik PAUD	2 Lembaga	491,800,000
					1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan proses belajar PAUD	1316 lembaga	45,602,460,961						1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan proses belajar PAUD	1316 lembaga	55,113,660,961
					1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	5163 Orang	1,895,400,000						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	5163 Orang	1,895,400,000
						Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan Pengembangan Karir	9142 orang								Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan Pengembangan Karir	6176 orang	
					1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	878 lembaga	644,543,000						1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	878 lembaga	644,543,000
					1.01.02.2.03.18	Jumlah lembaga	2592	71,337,040,000						1.01.02.2.03.18	Jumlah lembaga	2592	71,337,040,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	lembaga						Pengelolaan Dana BOP PAUD	yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	lembaga	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**70,367,282,990**					**1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	**80,566,082,990**
						Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan								Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	
						Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari								Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari	
					1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 lembaga	104,651,400					1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 lembaga	104,651,400
					1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat penyediaan biaya personil	1 lembaga	707,087,200					1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat penyediaan biaya personil	1 lembaga	707,087,200
					1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraa	Jumlah Tenaga Pendidik Keagamaan yang Difasilitasi dalam	13000 Orang	64,228,790,860					1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraa		Jumlah Tenaga Pendidik Keagamaan yang Difasilitasi dalam	11626 Orang	74,427,590,860

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					n	Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik Keagamaan								n	Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik Keagamaan		
						Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan proses Belajar mengajar pendidikan Kesetaraan	34 Lembaga								Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan proses Belajar mengajar pendidikan Kesetaraan	34 Lembaga	
					1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non formal yang mendapatkan pelatihan	250 orang	103,103,530						1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non formal yang mendapatkan pelatihan	250 orang	103,103,530
					1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina	102 lembaga	79,000,000						1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina	102 lembaga	79,000,000
					1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga yang mendapatkan BOP	34 lembaga	5,144,650,000						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga yang mendapatkan BOP	34 lembaga	5,144,650,000
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	**33,234,076,735**				**1.0104 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	**39,704,076,735**
						Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20								Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20	
				1.01.04.2.01		Jumlah	12685	**33,234,076,735**					**1.01.04.2.01**		Jumlah	12685	**39,704,076,735**

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang					**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	
						Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang							Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	
					1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan	2 Dokumen	552,409,479					1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan	2 Dokumen	552,409,479
					1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	350 lembaga	32,681,667,256					1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	461 lembaga	39,151,667,256
Dinas Perhubungan								**472,072,396,594**	**Dinas Perhubungan**								**473,112,874,699**
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							**472,072,396,594**		**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**							**473,112,874,699**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PELAYANAN DASAR				**PELAYANAN DASAR**			
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**472,072,396,594**	**2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**473,112,874,699**
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**84,864,310,420**	**2.1501 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**77,033,161,650**
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**67,276,920,000**	**2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**61,745,955,772**
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	67,276,920,000	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	61,745,955,772
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**6,078,052,061**	**2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**6,096,353,754**
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	6,078,052,061	2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	6,096,353,754
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**11,509,338,359**	**2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**9,190,852,124**
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	11,509,338,359	2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	9,190,852,124
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan	40 km/jam	**379,748,316,386**	**2.1502 PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan	40 km/jam	**388,637,355,698**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kewenangan kota			**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	kewenangan kota		
	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,65%			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,65%	
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%	
	Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%	
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	**236,054,995,265**	**2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	**241,625,091,025**
	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	
2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	3 Bangunan	79,709,518,377	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	3 Bangunan	70,195,331,046
	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	3000 Unit			Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	3000 Unit	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan dan Dipasang	2500 Unit	16,772,736,275						2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan dan Dipasang	2500 Unit	13,092,689,241
					2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi	6 Lokasi	110,272,672,246						2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi	6 Lokasi	127,947,236,314
						Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	7447 Rekening								Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	7447 Rekening	
						Jumlah titik PJU yang dipelihara	93252 Titik								Jumlah titik PJU yang dipelihara	93252 Titik	
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	29,300,068,367						2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	30,389,834,424
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	**19,832,249,194**					**2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	**20,170,048,164**
					2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jam Pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Kota Surabaya	14 Jam	19,832,249,194						2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jam Pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Kota Surabaya	14 Jam	20,170,048,164
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	**22,129,225,192**					**2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	**22,128,529,776**
					2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK)	1821 Titik	22,129,225,192						2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK)	1821 Titik	22,128,529,776

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit	**12,137,539,501**					**2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit	**11,244,262,882**
					2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR di Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor	149069 Unit	12,137,539,501					2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR di Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor	146069 Unit	11,244,262,882
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	**17,209,176,254**					**2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	**18,113,763,075**
						Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi								Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	
					2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 Dokumen	3,451,976,020					2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 Dokumen	3,380,813,683
					2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan	365 Kali	13,757,200,234					2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan	365 Kali	14,732,949,392

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	**68,702,873,024**					**2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	**71,768,811,322**
						Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang								Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	
					2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	28 Unit	33,673,976,195						2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	28 Unit	41,025,880,962
						Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan	8 Unit								Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan	8 Unit	
					2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan	365 Kali	35,028,896,829						2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan	365 Kali	30,742,930,360

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**3,682,257,956**	**2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**3,586,849,454**
	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10 Dokumen	3,682,257,956		2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	9 Dokumen	3,586,849,454
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**2,642,680,212**	**2.1503 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**2,640,960,112**
2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**2,642,680,212**	**2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**					Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**2,640,960,112**
	2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan				Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Transportasi Perairan	100 Orang	2,642,680,212		2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan				Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Transportasi Perairan	100 Orang	2,640,960,112

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota			
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	**4,817,089,576**	**2.1505 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	**4,801,397,239**
2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	2 Kali	**4,817,089,576**	**2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	2 Kali	**4,801,397,239**
2.15.05.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Perkeretaapian	50 Orang	4,817,089,576	2.15.05.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Perkeretaapian	50 Orang	4,801,397,239
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			**28,892,508,707**	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**			**29,600,782,313**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**27,604,078,658**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27,767,799,064**
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**27,604,078,658**	**2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**27,767,799,064**
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**13,801,304,255**	**2.0701 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	**14,188,937,948**
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**12,322,314,638**	**2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**12,460,189,444**
2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,322,314,638	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,460,189,444
2.07.01.2.08	Jumlah Laporan	12	**1,478,989,617**	**2.07.01.2.08**	Jumlah Laporan	12	**1,728,748,504**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Laporan						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Laporan	
						Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan								Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan	
					2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	256,194,600						2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	336,678,480
					2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	1,222,795,017						2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	1,392,070,024
			2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	77,02%	**8,784,126,850**				**2.0703 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	77,02%	**8,783,042,089**
						Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,05%								Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,05%	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan atau pemagangan	720 Orang	**5,397,772,866**					**2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan atau pemagangan	720 Orang	**5,404,235,226**
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	720 Orang								Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	720 Orang	
					2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	5,019,685,752						2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	5,030,648,112

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					berdasarkan Klaster Kompetensi									berdasarkan Klaster Kompetensi			
					2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti magang	120 Orang	378,087,114						2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti magang	120 Orang	373,587,114
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	**510,667,802**					**2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	**506,167,802**
					2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah dokumen Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1 Dokumen	510,667,802						2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah dokumen Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1 Dokumen	506,167,802
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta yang difasilitasi uji sertifikasi kompetensi	912 Orang	**2,875,686,182**					**2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah peserta yang difasilitasi uji sertifikasi kompetensi	912 Orang	**2,872,639,061**
					2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti sertifikasi	912 Orang	2,875,686,182						2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti sertifikasi	912 Orang	2,872,639,061
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2%	**2,954,281,519**				**2.0704 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2%	**2,669,788,846**
				2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti	1460 orang	**1,775,625,440**					**2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah**		Jumlah peserta yang mengikuti	1460 orang	**1,875,032,767**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kabupaten/Kota						pelatihan dan bimbingan teknis			**Kabupaten/Kota**						pelatihan dan bimbingan teknis		
				2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja		Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja	60 orang	63,540,058					2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja		Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja	60 orang	59,040,058
				2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan	1000 orang	662,267,184					2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan	1000 orang	681,860,518
				2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja	400 orang	1,049,818,198					2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja	400 orang	1,134,132,191
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Laporan	**305,536,064**				**2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Laporan	**305,536,064**
				2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Kali	305,536,064					2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Kali	305,536,064
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	2 Laporan	**873,120,015**				**2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**			Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	2 Laporan	**489,220,015**
				2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia		Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi	100 Orang	873,120,015					2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia		Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi	100 Orang	489,220,015

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	CPMI/PMI			(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	CPMI/PMI		
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	12,51%	**2,064,366,034**	**2.0705 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	12,51%	**2,126,030,181**
	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	20%			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	20%	
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	**1,187,726,109**	**2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	**1,216,428,991**
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang mendapatkan Pengesahan	220 Berkas	46,300,000	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang mendapatkan Pengesahan	220 Berkas	46,300,000
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 Dokumen	1,141,426,109	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 Dokumen	1,170,128,991

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengupahan									Pengupahan			
						Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	500 Lembaga								Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	500 Lembaga	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	**876,639,925**				**2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	**909,601,190**
					2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	500 Orang	609,497,324						2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	500 Orang	621,059,657
					2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	267,142,601						2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	288,541,533

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kabupaten/Kota										Kabupaten/Kota			
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**1,288,430,049**	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**1,832,983,249**
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							**1,288,430,049**		**3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1,832,983,249**
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	15%	**784,331,498**			**3.3102 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	15%	**1,333,930,298**
			3.31.02.2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	**784,331,498**				**3.31.02.2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	**1,333,930,298**
				3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0					3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	426,665,740
				3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	444 Pelaku usaha	784,331,498					3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	450 Pelaku usaha	907,264,558
			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	80%	**281,259,111**				**3.3103 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	80%	**278,463,511**
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	**281,259,111**					**3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),**		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	**278,463,511**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)						**Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**					
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinannya	350 Pelaku usaha	281,259,111			3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinannya	350 Pelaku usaha	278,463,511		
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	**222,839,440**			**3.3104 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	**220,589,440**		
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	1 Laporan	**222,839,440**			**3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	1 Laporan	**220,589,440**		
3.31.04.2.01.01	Jumlah dokumen	1	222,839,440			3.31.04.2.01.01	Jumlah dokumen	1	220,589,440		

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	dokumen		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			**35,029,620,624**	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**35,029,620,624**	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**31,969,473,259**	
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,05%	**18,162,053,924**	
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,485,556,000**	
2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,485,556,000	
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**205,730,547**	
2.23.01.2.06.02	Persentase	100%	205,730,547	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	dokumen	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			**36,917,314,877**
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**36,917,314,877**
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**33,918,192,179**
2.2301 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,05%	**17,856,867,636**
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,119,319,628**
2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,119,319,628
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**205,730,547**
2.23.01.2.06.02	Persentase	100%	205,730,547

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	**700,669,939**					**2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	**579,277,305**
					2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	700,669,939					2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	579,277,305
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,770,097,438**					**2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,952,540,156**
					2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	359,694,101					2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	250,965,312
					2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,410,403,337					2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,701,574,844
			2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Persentase event literasi yang diselenggarakan	19,20%	**13,807,419,335**				**2.2302 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		Persentase event literasi yang diselenggarakan	19,20%	**16,061,324,543**
						Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	19,95%							Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	19,95%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	56.28 %			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	56.28 %	
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	**13,319,539,463**	**2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	**15,589,565,604**
	Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga	
	Tingkat Kepuasan Pemustaka	81.5 nilai			Tingkat Kepuasan Pemustaka	81.5 nilai	
2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	11,775,884,524	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	14,098,784,123
2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya yang dibina	30 lembaga	67,348,271	2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya yang dibina	30 lembaga	59,098,210
2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dibina	200 lembaga	208,115,134	2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dibina	200 lembaga	199,056,620
2.23.02.2.01.06	Jumlah tenaga	500	264,477,705	2.23.02.2.01.06	Jumlah tenaga	500	234,010,212

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan dan pustakawan yang dibina	orang						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan dan pustakawan yang dibina	orang	
					2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	1496 Examplar	1,003,713,829					2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	1496 Examplar	998,616,439
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	3493 orang	**487,879,872**				**2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah bibit penulis dan pendongeng	3493 orang	**471,758,939**
					2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	240 kali	487,879,872					2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	240 kali	471,758,939
		2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**3,060,147,365**			**2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**2,999,122,698**
			2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	27,66%	**2,848,663,795**				**2.2402 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	27,66%	**2,933,127,768**
						Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	52,07%							Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	52,07%	
						Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam	10,16%							Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam	10,16%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	SIKN melalui JIKN				SIKN melalui JIKN		
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	**801,723,461**	**2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	**669,352,300**
	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	42 lembaga			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	42 lembaga	
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	11 Item	656,185,703	2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	11 Item	513,752,960
2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan kearsipan internal perangkat Daerah dan BUMD yang dilakukan	66 Kali	145,537,758	2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan kearsipan internal perangkat Daerah dan BUMD yang dilakukan	66 Kali	155,599,340
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	7500 Lembar	**1,657,744,317**	**2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Arsip yang dialih mediakan	7500 Lembar	**1,945,043,519**
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	5 Kegiatan	1,657,744,317	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	5 Kegiatan	1,945,043,519
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5200 item	**389,196,017**	**2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5200 item	**318,731,949**

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	
Tingkat Kabupaten/Kota				
	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga		
2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	204,806,298	
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	70 Lembaga	184,389,719	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	19,95%	**211,483,570**	
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	**211,483,570**	
2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian, penetapan dalam	338 Item arsip	211,483,570	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Tingkat Kabupaten/Kota			
	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga	
2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	197,001,989
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	70 Lembaga	121,729,960
2.2403 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	19,95%	**65,994,930**
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	**65,994,930**
2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian, penetapan dalam	338 Item arsip	65,994,930

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	rangka pelaksanaan pemusnahan arsip		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			**421,614,100,169**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**415,082,367,238**
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**247,308,708,006**
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2,06%	**242,678,851,744**
	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,22%	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	80%	
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	241 Bangunan	**242,678,851,744**
	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan	2281 Berkas	

Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	rangka pelaksanaan pemusnahan arsip		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			**453,730,331,791**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**441,004,080,412**
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**272,105,242,479**
1.0308 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2,06%	**267,348,348,849**
	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,22%	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	80%	
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	241 Bangunan	**267,348,348,849**
	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan	3054 Berkas	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang diproses									yang diproses		
						Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	75 Berkas								Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	150 Berkas	
						Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 Dokumen								Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 Dokumen	
						Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	150 Lokasi								Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	150 Lokasi	
						Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	2281 Berkas								Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	2281 Berkas	
					1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah berkas permohonan SLF yang terbit dan telah disahkan	15 Berkas	3,676,449,712						1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang terbit dan telah disahkan	2437 Berkas	3,322,023,164
						Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang terbit dan telah disahkan	1711 Berkas								Jumlah berkas permohonan SLF yang terbit dan telah disahkan	30 Berkas	
					1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun/Direhab	140 Bangunan	193,312,066,469						1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun/Direhab	156 Bangunan	217,343,877,478

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah Kabupaten/Kota									Daerah Kabupaten/Kota			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun	58 Dokumen								Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun	68 Dokumen	
					1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan	2 Dokumen	584,844,713						1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan	2 Dokumen	584,400,000
					1.03.08.2.01.09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti	150 Lokasi	1,716,111,216						1.03.08.2.01.09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti	150 Lokasi	1,649,244,109
						Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan kedalam peta	1711 Data								Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan kedalam peta	1711 Data	
					1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah	173 Bangunan	43,389,379,634						1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah	173 Bangunan	44,448,804,098
			1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	91%	**815,230,443**				**1.0311 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	91%	**815,230,443**
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan		Jenis perusahaan jasa konstruksi yang	5 jenis	**815,230,443**					**1.03.11.2.01 Penyelenggaraan**		Jenis perusahaan jasa konstruksi yang	5 jenis	**815,230,443**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	dibina dan ditingkatkan kapasitasnya							**Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		
				1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	100 perusahaan	815,230,443					1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	100 perusahaan	815,230,443
			1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase pelayanan penataan ruang	95%	**3,814,625,819**				**1.0312 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		Persentase pelayanan penataan ruang	95%	**3,941,663,187**
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**1,971,698,254**					**1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota**	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**1,971,698,254**
				1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau kajian teknis pendukung penataan ruang daerah yang disusun	3 dokumen	1,971,698,254					1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau kajian teknis pendukung penataan ruang daerah yang disusun	3 dokumen	1,971,698,254
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen pemanfaatan	3 dokumen	**1,842,927,565**					**1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi**	Jumlah dokumen pemanfaatan	3 dokumen	**1,969,964,933**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun						**Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun					
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	844,027,438				1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	906,190,971			
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang	154 Kelurahan	998,900,127				1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang	154 Kelurahan	1,063,773,962			
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**167,773,659,232**				**1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**168,898,837,933**			
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87,50%	**35,301,174,519**				**1.0401 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87,50%	**34,726,765,497**			
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**60,698,000**				**1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**60,698,000**			
1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	60,698,000				1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	60,698,000			
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan	Persentase ketepatan waktu	100%	**28,339,378,638**				**1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan**	Persentase ketepatan waktu	100%	**27,763,050,116**			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perangkat Daerah		pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN							**Perangkat Daerah**		pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
					1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28,339,378,638						1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,763,050,116
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	**4,638,607,931**					**1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	**4,841,532,125**
					1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	85%	4,638,607,931						1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	85%	4,841,532,125
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 Jenis	**2,262,489,950**					**1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 Jenis	**2,061,485,256**
					1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik	100%	2,262,489,950						1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik	100%	2,061,485,256
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	50%	**23,070,402,395**				**1.0402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	50%	**24,296,825,556**
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya	5708 ijin/sewa	**23,070,402,395**					**1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya	5708 ijin/sewa	**24,296,825,556**
					1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok	23,070,402,395						1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok	24,296,825,556

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan/atau Rumah Khusus									dan/atau Rumah Khusus			
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	89%	**37,987,234,790**				**1.0403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	89%	**38,457,871,903**
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	**37,987,234,790**					**1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	**38,457,871,903**
					1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	800 unit	37,987,234,790						1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	900 unit	38,457,871,903
			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	**70,410,184,018**				**1.0404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	**70,086,626,267**
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	7 lokasi	**70,410,184,018**					**1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	9 lokasi	**70,086,626,267**
					1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi	7 Bangunan	70,410,184,018						1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi	9 Bangunan	70,086,626,267

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	20%	**1,004,663,510**	**1.0405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	20%	**1,330,748,710**
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	11 dokumen	**1,004,663,510**	**1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	11 dokumen	**1,330,748,710**
1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang disusun	11 dokumen	1,004,663,510	1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang disusun	11 dokumen	1,330,748,710
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**6,531,732,931**	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12,726,251,379**
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**6,531,732,931**	**2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**12,726,251,379**
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	30.081,90 M2	**6,531,732,931**	**2.1005 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	30.081,90 M2	**12,726,251,379**
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen tahap pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur	1 dokumen	**6,531,732,931**	**2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen tahap pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur	1 dokumen	**12,726,251,379**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kabupaten/Kota				**Kabupaten/Kota**			
2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	1 lokasi	6,531,732,931	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	1 lokasi	12,726,251,379
Dinas Sosial			**76,275,280,091**	**Dinas Sosial**			**87,252,933,099**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**76,275,280,091**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**87,252,933,099**
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**76,275,280,091**	**1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**87,252,933,099**
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	**18,443,572,480**	**1.0601 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	**19,409,443,053**
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,633,142,638**	**1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,042,954,488**
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,633,142,638	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,042,954,488
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**2,138,649,608**	**1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**1,953,162,523**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dan dipelihara	135 unit	2,138,649,608						1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dan dipelihara	135 unit	1,953,162,523
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,671,780,234**					**1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,413,326,042**
					1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	1,671,780,234						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	1,413,326,042
			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	76.47 %	**6,823,520,559**				**1.0602 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	76.47 %	**5,732,701,298**
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	84.94 %								Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	84.94 %	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis PSKS dan lembaga kepahlawanan yang dibina	13 jenis	**6,823,520,559**					**1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah jenis PSKS dan lembaga kepahlawanan yang dibina	13 jenis	**5,732,701,298**
						Jumlah peserta	925								Jumlah peserta	925	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pembinaan pemberdayaan PSKS	orang								pembinaan pemberdayaan PSKS	orang	
					1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	5 jenis	5,549,185,970						1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	5 jenis	4,781,976,845
						Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS perorangan	570 orang								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS perorangan	570 orang	
					1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	355 orang	1,274,334,589						1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	355 orang	950,724,453
						Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina	8 jenis								Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina	8 jenis	
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	**35,290,455,349**				**1.0604 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	**36,041,533,755**
						Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di	100%								Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di	100%	

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	luar panti sosial				luar panti sosial		
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	
	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	**15,518,370,826**	**1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	**17,124,315,213**
	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali	
	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	
	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali	
1.06.04.2.01.04 Pemberian	Jumlah PMKS yang Mendapat	795 orang	444,619,399	1.06.04.2.01.04 Pemberian	Jumlah PMKS yang Mendapat	795 orang	367,593,700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi								Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi		
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	130 orang	15,073,751,427						1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	130 orang	16,756,721,513
						Jumlah Lanjut Usia yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	160 orang								Jumlah Lanjut Usia yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	215 orang	
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	95 orang								Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	60 orang	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	**19,772,084,523**					**1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	**18,917,218,542**
						Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan								Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	
					1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah fasilitasi layanan kedaruratan	4716 kali	3,350,514,725						1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah fasilitasi layanan kedaruratan	4716 kali	3,228,848,688
					1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1100 orang	16,421,569,798						1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1100 orang	15,688,369,854

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	**14,048,132,588**	**1.0605 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	**24,024,205,115**
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	**14,048,132,588**	**1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	**24,024,205,115**
	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemutakhiran data MBR dan PMKS	12 kali	7,632,105,383	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemutakhiran data MBR dan PMKS	12 kali	6,335,167,771
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data yang dikelola	24 data	339,432,602	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data yang dikelola	24 data	231,181,520
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	24 kali	6,076,594,603	1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	27 kali	14,520,089,024
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			0	1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	478 Orang	2,937,766,800
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	Persentase taman makam pahlawan	100%	**1,669,599,115**	**1.0607 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN**	Persentase taman makam pahlawan	100%	**2,045,049,878**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
MAKAM PAHLAWAN	yang dikelola dalam kondisi baik			**MAKAM PAHLAWAN**	yang dikelola dalam kondisi baik		
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	7 lokasi	**1,669,599,115**	**1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	7 lokasi	**2,045,049,878**
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 jenis	1,669,599,115	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 jenis	2,045,049,878
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			**1,385,413,854,423**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**			**1,370,298,609,471**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1,385,413,854,423**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1,370,298,609,471**
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**1,385,413,854,423**	**1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**1,370,298,609,471**
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	90%	**115,516,605,033**	**1.0301 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	90%	**124,126,094,588**
	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,00%			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,00%	
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**119,812,735**	**1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**130,966,010**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	119,812,735					1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	130,966,010
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**49,129,284,000**					**1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**48,972,634,020**
					1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	49,129,284,000					1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	48,972,634,020
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**7,331,638,530**					**1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**7,285,371,443**
					1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	7,331,638,530					1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	7,285,371,443
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	315 unit	**58,935,869,768**					**1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	315 unit	**67,737,123,115**
						Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%							Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	
					1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	243 unit	13,416,166,132					1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	243 unit	14,142,130,481

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan								Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan		
					1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan dan alat besar yang dipelihara selama 12 bulan	72 unit	14,688,559,031						1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan dan alat besar yang dipelihara selama 12 bulan	72 unit	13,571,637,562
					1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	30,831,144,605						1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	40,023,355,072
			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	**53,064,987,352**				**1.0302 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	**70,588,773,071**
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	60 unit	**53,064,987,352**					**1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	60 unit	**70,588,773,071**
					1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah unit pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	264 unit	53,064,987,352						1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah unit pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	264 unit	70,588,773,071
			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan	99%	**34,985,625,000**				**1.0303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan	99%	**34,985,625,000**
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan		Jumlah lokasi penerima intervensi	2 Kecamat	**34,985,625,000**					**1.03.03.2.01 Pengelolaan dan**	Jumlah lokasi penerima intervensi	2 Kecamat	**34,985,625,000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		jaringan perpipaan	an						**Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		jaringan perpipaan	an	
					1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah lokasi perluasan SPAM jaringan perpipaan (DAK Air Minum)	1 Lokasi	34,985,625,000						1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah lokasi perluasan SPAM jaringan perpipaan (DAK Air Minum)	1 Lokasi	34,985,625,000
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	**6,676,149,903**				**1.0305 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	**8,956,617,173**
						Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	901 m3								Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	901 m3	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	**6,676,149,903**					**1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	**8,956,617,173**
						Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis								Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis	
					1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	2 Lokasi	1,214,098,482						1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	3 Lokasi	1,214,098,482
					1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	5,462,051,421						1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	7,742,518,691

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelolaan Air Limbah Domestik									Pengelolaan Air Limbah Domestik			
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	**584,852,668,643**				**1.0306 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	**544,921,532,880**
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	**584,852,668,643**					**1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	**544,921,532,880**
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1099 lokasi								Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1099 lokasi	
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 Lokasi								Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 Lokasi	
					1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun	50 dokumen	13,449,537,159						1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun	50 dokumen	12,887,721,159
					1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi sistem drainase perkotaan yang disusun	30 dokumen	14,309,156,227						1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi sistem drainase perkotaan yang disusun	30 dokumen	10,674,394,273
					1.03.06.2.01.05	Jumlah lokasi	24 lokasi	237,131,156,204						1.03.06.2.01.05	Jumlah lokasi	70 lokasi	210,173,473,076

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun		
					1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi saluran yang direhabilitasi	25 lokasi	114,014,625,683						1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi saluran yang direhabilitasi	50 lokasi	105,147,286,515
					1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi pengerukan saluran	1050 lokasi	74,664,851,429						1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi pengerukan saluran	1050 lokasi	85,518,499,229
					1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun	200 Lokasi	131,283,341,941						1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun	230 Lokasi	120,520,158,628
			1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7%	**2,968,646,006**				**1.0307 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7%	**2,968,646,006**
						Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%								Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%	
				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	**2,968,646,006**					**1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	**2,968,646,006**
						Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen								Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen	
					1.03.07.2.01.02	Jumlah Surat	12	1,092,985,336						1.03.07.2.01.02	Jumlah Surat	12	1,092,985,336

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemberitahuan Nilai Sewa kepada pemohon	Dokumen							Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemberitahuan Nilai Sewa kepada pemohon	Dokumen	
					1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang memenuhi syarat	240 berkas	1,875,660,670						1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang memenuhi syarat	240 berkas	1,875,660,670
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Luas jalan yang diperbaiki	130 m2	**587,349,172,486**				**1.0310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			Luas jalan yang diperbaiki	130 m2	**583,751,320,753**
						Luas jalan yang diperbaiki	130.000 m2								Luas jalan yang diperbaiki	130.000 m2	
						Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10.850 meter								Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10.850 meter	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	130 dokumen	**587,349,172,486**					**1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	130 dokumen	**583,751,320,753**
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	309 lokasi								Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	309 lokasi	
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya	1081 lokasi								Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya	1081 lokasi	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dipelihara									yang dipelihara		
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1081 lokasi								Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1081 lokasi	
						Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur	5550 m2								Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur	5550 m2	
					1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	65 dokumen	9,080,405,523						1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	120 dokumen	14,907,935,323
					1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi	172,893,831,435						1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi	172,893,831,435
					1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun	300 Lokasi	317,233,987,008						1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun	250 Lokasi	291,022,079,879
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	9 lokasi								Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	9 lokasi	
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Jumlah lokasi pembangunan / rekonstruksi jalan (DAK Fisik)	1 lokasi	3,557,334,000						1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Jumlah lokasi pembangunan / rekonstruksi jalan (DAK Fisik)	1 lokasi	0
					1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan			0						1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Jumlah lokasi pembangunan /	1 Lokasi	3,557,334,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
														rekonstruksi jalan (DAK Fisik)		
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dilakukan pemeliharaan	1080 lokasi	71,246,036,613						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dilakukan pemeliharaan	1440 lokasi	89,397,533,739
					1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	65 dokumen	13,337,577,907						1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	65 dokumen	11,972,606,377
Inspektorat								**28,079,477,555**	**Inspektorat**								**27,476,428,483**
	6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							**28,079,477,555**		**6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**27,476,428,483**
		6.01 INSPEKTORAT DAERAH						**28,079,477,555**			**6.01 INSPEKTORAT DAERAH**						**27,476,428,483**
			6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**25,428,325,555**				**6.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**24,912,373,083**
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,170,323,914**					**6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,475,698,388**
					6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24,170,323,914						6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,475,698,388
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**243,295,500**					**6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**260,525,150**
					6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	243,295,500						6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	260,525,150
				6.01.01.2.08		Persentase	100%	**1,014,706,141**					**6.01.01.2.08**		Persentase	100%	**1,176,149,545**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah							**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
				6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	1,014,706,141					6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	1,176,149,545
			6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	**1,781,634,000**				**6.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	**1,748,483,400**
					Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%							Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	
					Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%							Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	12 Dokumen	**1,526,290,000**					**6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	12 Dokumen	**1,490,329,000**
					Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	12 Rekomendasi							Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	12 Rekomendasi	
					Jumlah lembaga yang dilakukan	69 lembaga							Jumlah lembaga yang dilakukan	69 lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pengawasan internal									pengawasan internal		
					6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan keuangan	69 Kali	141,530,000						6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan keuangan	69 Kali	132,543,000
					6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah frekuensi reviu laporan kinerja	10 Kali	129,500,000						6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah frekuensi reviu laporan kinerja	10 Kali	120,510,000
					6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah frekuensi reviu laporan keuangan	5 Kali	126,240,000						6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah frekuensi reviu laporan keuangan	5 Kali	117,244,000
					6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah lembaga atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang dimonitoring	60 Lembaga	1,129,020,000						6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah lembaga atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang dimonitoring	60 Lembaga	1,120,032,000
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	**255,344,000**					**6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	**258,154,400**
					6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Kali	126,064,000						6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Kali	127,466,400
					6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah frekuensi pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 kali	129,280,000						6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah frekuensi pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 kali	130,688,000
			6.01.03 PROGRAM			Persentase PD	100%	**869,518,000**				**6.0103 PROGRAM**			Persentase PD	100%	**815,572,000**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi			**PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi		
	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%	
	Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	**337,044,000**	**6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	**319,064,400**
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah frekuensi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	4 kali	207,522,000	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah frekuensi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	4 kali	198,532,200
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah frekuensi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4 kali	129,522,000	6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah frekuensi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4 kali	120,532,200
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan	60 Lembaga	**532,474,000**	**6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan	60 Lembaga	**496,507,600**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Korupsi dan Penegakan Integritas									Korupsi dan Penegakan Integritas		
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Lembaga								Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Lembaga	
					6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah frekuensi pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	60 Kali	158,538,000						6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah frekuensi pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	60 Kali	149,544,000
					6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Kali	124,080,000						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Kali	115,088,000
					6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48 Kali	124,938,000						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48 Kali	115,953,800
					6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 Kali	124,918,000						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 Kali	115,921,800
Kec. Asemrowo								**27,446,443,823**	**Kec. Asemrowo**								**28,562,890,012**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**27,446,443,823**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**28,562,890,012**
		7.01 KECAMATAN						**27,446,443,823**			**7.01 KECAMATAN**						**28,562,890,012**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.98 %	**18,209,646,345**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.98 %	**19,388,394,784**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,977,188,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,726,093,953**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,977,188,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,726,093,953
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,104,069,745**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,513,431,781**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	3,104,069,745	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	3,513,431,781
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**128,388,600**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**148,869,050**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	128,388,600	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	148,869,050
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**2,565,976,700**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**2,496,401,450**
	Persentase jenis	100%			Persentase jenis	100%	

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat						pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat					
Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27%					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27%				
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**780**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**780**		
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	40 Orang	780			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	40 Orang	780		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	**2,538,876,700**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	**2,470,092,620**		
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	2,538,876,700			7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	2,470,092,620		
7.01.02.2.04	Jumlah Bidang	6 Bidang	**26,320,000**			**7.01.02.2.04**	Jumlah Bidang	6 Bidang	**25,528,830**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	494 berkas	8,400,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	494 berkas	8,400,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1543 berkas	6,400,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1543 berkas	5,692,500
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	11,520,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	11,436,330

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	yang dilimpahkan				yang dilimpahkan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**6,543,953,578**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**6,543,953,578**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Asemrowo)	1 Kelurahan	**6,535,313,578**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Asemrowo)	1 Kelurahan	**6,535,313,578**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Genting Kalianak)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Genting Kalianak)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Sarioso)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Sarioso)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 keluraha n	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	6 Kali	5,340,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	6 Kali	5,340,000
7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	8 RW	2,185,666,810	7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	8 RW	2,185,666,810

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Asemrowo)								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Asemrowo)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Genting Kalianak)	3 RW	174,578,412						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Genting Kalianak)	3 RW	174,578,412
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Sarioso)	6 RW	525,619,868						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Sarioso)	6 RW	525,619,868
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Asemrowo)	8 RW	1,866,331,250						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Asemrowo)	8 RW	1,866,331,250
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Genting Kalianak)	3 RW	823,575,298						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Genting Kalianak)	3 RW	823,575,298
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak	6 RW	954,201,940						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak	6 RW	954,201,940

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Sarioso)									Sarioso)		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	62 Unit Usaha	**8,640,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	62 Unit Usaha	**8,640,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,640,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,640,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**112,867,200**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**120,157,250**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**112,867,200**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**120,157,250**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	112,867,200						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	120,157,250
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**14,000,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,982,950**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**14,000,000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**13,982,950**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	2,000,000	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	2,000,000
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 Kasus	12,000,000	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 Kasus	11,982,950
Kec. Benowo			**32,794,639,577**	**Kec. Benowo**			**34,279,570,471**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**32,794,639,577**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**34,279,570,471**
7.01 KECAMATAN			**32,794,639,577**	**7.01 KECAMATAN**			**34,279,570,471**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.72 %	**21,480,401,444**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.72 %	**23,017,950,502**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,886,700,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,091,600,238**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,886,700,000					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,091,600,238
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,454,900,095**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,787,548,915**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,454,900,095					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,787,548,915
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**138,801,349**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**138,801,349**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	138,801,349					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	138,801,349
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,650,338,790**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,597,720,626**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.88 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.88 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan		Jumlah unsur lembaga yang hadir	6 lembaga	**4,950,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir	6 lembaga	**4,950,000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan							**Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	4,950,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	4,950,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	**3,623,307,110**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	**3,570,688,946**
				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,623,307,110					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,570,688,946
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**22,081,680**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**22,081,680**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						perizinan yang dilimpahkan kepada Camat									perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	7,360,560					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	7,360,560
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4440 berkas	7,360,560					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4440 berkas	7,360,560
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,360,560					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,360,560
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,503,093,093**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,503,093,093**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan		Jumlah kelurahan	1	**7,488,065,283**					**7.01.03.2.02 Kegiatan**		Jumlah kelurahan	1	**7,488,065,283**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemberdayaan Kelurahan		yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kandangan)	Kelurahan						**Pemberdayaan Kelurahan**		yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kandangan)	Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Romokalisari)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Romokalisari)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sememi)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sememi)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	6,510,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	6,510,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan	9 RW	423,111,431						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan	9 RW	423,111,431

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kandangan)									Kandangan)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Romokalisari)	3 RW	212,592,859						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Romokalisari)	3 RW	213,854,297
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sememi)	10 RW	1,005,288,708						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sememi)	10 RW	1,005,288,708
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	4 RW	84,638,484						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	4 RW	84,638,484
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kandangan)	9 RW	1,845,835,319						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kandangan)	9 RW	1,845,835,319
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Romokalisari)	3 RW	364,293,937						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Romokalisari)	3 RW	363,032,499
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	10 RW	2,916,944,716						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	10 RW	2,916,944,716

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						direalisasikan (Kelurahan Sememi)									direalisasikan (Kelurahan Sememi)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	4 RW	628,849,829						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Oso Wilangun)	4 RW	628,849,829
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	**15,027,810**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	**15,027,810**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	15,027,810					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	15,027,810
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**147,506,500**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**147,506,500**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**147,506,500**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**147,506,500**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	147,506,500					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	147,506,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,299,750**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,299,750**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**13,299,750**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**13,299,750**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	7,040,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	7,040,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus	6,259,750						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus	6,259,750
Kec. Bubutan								**49,426,650,798**	**Kec. Bubutan**								**50,629,857,899**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**49,426,650,798**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**50,629,857,899**
		7.01 KECAMATAN						**49,426,650,798**			**7.01 KECAMATAN**						**50,629,857,899**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.94 %	**24,147,554,564**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.94 %	**26,252,288,257**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,423,860,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20,127,878,200**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,423,860,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,127,878,200
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,567,453,255**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,968,168,748**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,567,453,255	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,968,168,748
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**156,241,309**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**156,241,309**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	156,241,309	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	156,241,309
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,267,398,060**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,364,488,160**
	Persentase jenis	100%			Persentase jenis	100%	

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat						pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat				
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,500,000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,500,000**		
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 Orang	4,500,000			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 Orang	4,500,000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	**7,231,137,500**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	**6,328,227,600**		
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	7,231,137,500			7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,328,227,600		
7.01.02.2.04	Jumlah Bidang	6 Bidang	**31,760,560**			**7.01.02.2.04**	Jumlah Bidang	6 Bidang	**31,760,560**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	14,400,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	14,400,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2697 Berkas	10,000,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2697 Berkas	10,000,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	7,360,560						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	7,360,560

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	yang dilimpahkan				yang dilimpahkan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**17,859,230,734**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**17,860,614,042**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Alun-Alun Contong)	1 Kelurahan	**17,850,714,042**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Alun-Alun Contong)	1 Kelurahan	**17,850,714,042**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bubutan)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bubutan)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gundih)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gundih)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jepara)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jepara)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tembok Dukuh)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tembok Dukuh)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	
7.01.03.2.02.01	Jumlah Musbangkel	10 Kali	32,500,000	7.01.03.2.02.01	Jumlah Musbangkel	10 Kali	32,500,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi								Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Alun-Alun Contong)	6 RW	917,145,756						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Alun-Alun Contong)	6 RW	918,867,202
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bubutan)	9 RW	1,258,921,575						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bubutan)	9 RW	1,258,921,575
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gundih)	10 RW	3,273,665,830						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gundih)	10 RW	3,273,665,830
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jepara)	9 RW	1,315,347,230						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jepara)	9 RW	1,315,347,230
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tembok Dukuh)	10 RW	680,517,775						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tembok Dukuh)	10 RW	680,517,775
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	6 RW	648,685,517						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	6 RW	646,964,071

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Alun-Alun Contong)								Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Alun-Alun Contong)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bubutan)	9 RW	1,740,642,682						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bubutan)	9 RW	1,740,642,682
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gundih)	10 RW	2,274,400,860						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gundih)	10 RW	2,274,400,860
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jepara)	9 RW	3,360,700,210						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jepara)	9 RW	3,360,700,210
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tembok Dukuh)	10 RW	2,348,186,607						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tembok Dukuh)	10 RW	2,348,186,607
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	400 Lembaga	**8,516,692**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	400 Lembaga	**9,900,000**
					7.01.03.2.03.04	Jumlah frekuensi	48 Kali	8,516,692						7.01.03.2.03.04	Jumlah frekuensi	48 Kali	9,900,000

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**136,706,880**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**136,706,880**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**136,706,880**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**136,706,880**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	136,706,880	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	136,706,880
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15,760,560**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15,760,560**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	39 Kasus	**15,760,560**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	39 Kasus	**15,760,560**
	Jumlah topik	2 Topik			Jumlah topik	2 Topik	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional									fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	8,400,000					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	8,400,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 Kasus	7,360,560					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 Kasus	7,360,560
Kec. Bulak								**34,157,235,366**	**Kec. Bulak**								**34,431,447,092**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**34,157,235,366**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**34,431,447,092**
		7.01 KECAMATAN						**34,157,235,366**			**7.01 KECAMATAN**						**34,431,447,092**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.98 %	**24,046,103,424**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.98 %	**24,481,259,850**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,265,000,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,153,287,316**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,265,000,000					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,153,287,316
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum	100%	**6,610,248,980**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum	100%	**6,151,290,590**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang disediakan									yang disediakan		
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,610,248,980					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,151,290,590
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**170,854,444**			**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**176,681,944**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	170,854,444					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	176,681,944
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**2,882,347,100**			**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**2,721,402,400**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**2,860,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**2,860,000**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada	60 Orang	2,860,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada	60 Orang	2,860,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	tingkat kecamatan								Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	**2,868,567,100**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	**2,707,622,400**
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	2,868,567,100						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	2,707,622,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**10,920,000**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**10,920,000**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						non usaha yang dilimpahkan kepada Camat									non usaha yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	2,460,000					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	2,460,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1983 Berkas	2,060,000					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1983 Berkas	2,060,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6,400,000					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6,400,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,153,710,442**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,153,710,442**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bulak)	1 Kelurahan	**7,146,710,442**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bulak)	1 Kelurahan	**7,146,710,442**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kedung	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kedung	1 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Cowek)									Cowek)		
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kenjeran)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kenjeran)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sukolilo Baru)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sukolilo Baru)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	6,400,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	6,400,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bulak)	5 RW	999,189,395						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bulak)	5 RW	997,004,896
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedung Cowek)	3 RW	314,356,302						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedung Cowek)	3 RW	311,386,302
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	3 RW	650,249,003						7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	3 RW	650,249,003

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kenjeran)								Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kenjeran)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sukolilo Baru)	3 RW	1,417,441,742						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sukolilo Baru)	3 RW	1,019,769,472
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedung Cowek)	3 RW	949,155,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedung Cowek)	3 RW	952,125,500
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kenjeran)	3 RW	1,060,999,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kenjeran)	3 RW	1,060,999,500
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sukolilo Baru)	4 RW	859,331,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sukolilo Baru)	4 RW	1,257,003,770
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bulak)	5 RW	889,587,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bulak)	5 RW	891,771,999

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	400 Lembaga / **7,000,000**	**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	400 Lembaga / **7,000,000**
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali / 7,000,000	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali / 7,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100% / **64,994,400**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100% / **64,994,400**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	13 Lokasi / **64,994,400**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	13 Lokasi / **64,994,400**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali / 64,994,400	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali / 64,994,400
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100% / **10,080,000**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100% / **10,080,000**
7.01.05.2.01	Jumlah potensi	12 Kasus / **10,080,000**	**7.01.05.2.01**	Jumlah potensi	12 Kasus / **10,080,000**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas		
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	2 kali	3,680,000	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	2 kali	3,680,000
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus	6,400,000	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus	6,400,000
Kec. Dukuh Pakis			**31,609,251,918**	**Kec. Dukuh Pakis**			**32,533,826,332**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**31,609,251,918**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**32,533,826,332**
7.01 KECAMATAN			**31,609,251,918**	**7.01 KECAMATAN**			**32,533,826,332**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.31 %	**21,012,703,718**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.31 %	**22,312,413,931**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,805,796,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,730,370,414**
7.01.01.2.02.01	Persentase	100%	16,805,796,000	7.01.01.2.02.01	Persentase	100%	17,730,370,414

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,072,692,718**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,448,871,247**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,072,692,718						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,448,871,247
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**134,215,000**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**133,172,270**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	134,215,000						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	133,172,270
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,766,880,300**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,391,736,701**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan	4 Lembaga	**4,600,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan	4 Lembaga	**3,600,000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				di Tingkat Kecamatan	musrenbang pada tingkat kecamatan							**di Tingkat Kecamatan**	musrenbang pada tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang	4,600,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang	3,600,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	195 Lembaga	**3,753,220,300**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	**3,381,621,480**
				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,753,220,300					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,381,621,480
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**9,060,000**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**6,515,221**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dilimpahkan kepada Camat									dilimpahkan kepada Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	2,160,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	2,170,390
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2559 berkas	1,950,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2559 berkas	1,050,060
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4,950,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	3,294,771
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**6,673,130,072**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**6,673,130,072**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan	2 Keluraha	**6,667,530,072**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan	2 Keluraha	**6,667,530,072**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kelurahan	potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Kupang)	n						**Kelurahan**	potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Kupang)	n	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Pakis)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Pakis)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gunungsari)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gunungsari)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pradah Kalikendal)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pradah Kalikendal)	2 Kelurahan	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	9,200,000					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	9,200,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Kupang)	6 RW	979,289,995					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Kupang)	6 RW	752,783,428

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Pakis)	5 RW	1,516,755,034					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Pakis)	7 RW	1,075,842,962
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunungsari)	6 RW	573,791,649					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunungsari)	6 RW	573,791,649
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pradah Kalikendal)	7 RW	979,356,484					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pradah Kalikendal)	4 RW	1,084,770,166
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Kupang)	6 RW	446,690,000					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Kupang)	6 RW	673,196,567
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Pakis)	5 RW	633,891,500					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Pakis)	7 RW	1,074,803,572
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	961,707,710					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	961,707,710

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Gunungsari)									(Kelurahan Gunungsari)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pradah Kalikendal)	7 RW	566,847,700						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pradah Kalikendal)	4 RW	461,434,018
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	25 Lembaga	**5,600,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	25 Lembaga	**5,600,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	25 Kali	5,600,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	25 Kali	5,600,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**140,099,328**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**140,099,328**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**140,099,328**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**140,099,328**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	140,099,328						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	140,099,328

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,438,500**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,446,300**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	72 Kasus	**16,438,500**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	72 Kasus	**16,446,300**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	9,650,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	9,650,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	72 Kasus	6,788,500						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	72 Kasus	6,796,300
Kec. Gayungan								**32,553,487,535**	**Kec. Gayungan**								**34,087,656,306**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**32,553,487,535**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**34,087,656,306**
		7.01 KECAMATAN						**32,553,487,535**			**7.01 KECAMATAN**						**34,087,656,306**
			7.01.01 PROGRAM			Tingkat kepuasan	97.98 %	**22,818,927,157**				**7.0101 PROGRAM**			Tingkat kepuasan	97.98 %	**24,410,620,588**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,183,860,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,678,025,465**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,183,860,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,678,025,465
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,491,946,966**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,606,722,460**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,491,946,966	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,606,722,460
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**143,120,191**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**125,872,663**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	143,120,191	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	125,872,663
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,799,772,790**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,744,702,490**
	Persentase jenis pelayanan yang	100%			Persentase jenis pelayanan yang	100%	

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				dinilai baik oleh masyarakat							dinilai baik oleh masyarakat		
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.54 %						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.54 %	
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**6,133,800**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,000,000**
			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 orang	6,133,800				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 orang	3,000,000
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	**3,778,228,400**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	**3,726,291,900**
			7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,778,228,400				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,726,291,900
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan	Jumlah Bidang urusan	6 Bidang Urusan	**15,410,590**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan**	Jumlah Bidang urusan	6 Bidang Urusan	**15,410,590**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat							**Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	1,440,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	1,440,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2861 berkas	7,970,590						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2861 berkas	7,970,590
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6,000,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6,000,000

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**5,762,800,036**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**5,760,345,676**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Menanggal)	1 Kelurahan	**5,751,759,196**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Menanggal)	1 Kelurahan	**5,749,304,836**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gayungan)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gayungan)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ketintang)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ketintang)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Menanggal)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Menanggal)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	12,054,360	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	9,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Menanggal)	9 RW	724,235,930					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Menanggal)	9 RW	724,235,930
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gayungan)	4 RW	1,159,050,803					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gayungan)	7 RW	1,091,486,627
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ketintang)	8 RW	755,889,408					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ketintang)	8 RW	755,889,408
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Menanggal)	6 RW	912,599,427					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Menanggal)	6 RW	912,599,427
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Menanggal)	9 RW	434,371,680					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Menanggal)	9 RW	434,371,680
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	4 RW	718,610,518					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	7 RW	786,174,694

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gayungan)								Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gayungan)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ketintang)	8 RW	659,882,680						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ketintang)	8 RW	659,882,680
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Menanggal)	6 RW	375,064,390						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Menanggal)	6 RW	375,064,390
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	**11,040,840**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	**11,040,840**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	11,040,840						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	11,040,840
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138,039,752**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138,039,752**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	24 Lokasi	**138,039,752**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	24 Lokasi	**138,039,752**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Ketertiban Umum		ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							**Ketertiban Umum**		ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	138,039,752						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	138,039,752
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33,947,800**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**33,947,800**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	**33,947,800**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	**33,947,800**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	10 Kali	27,197,800						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	10 Kali	27,197,800
					7.01.05.2.01.05	Jumlah potensi	45 Kasus	6,750,000						7.01.05.2.01.05	Jumlah potensi	45 Kasus	6,750,000

Sebelum Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	konflik sosial yang ditangani			
Kec. Genteng			**45,347,890,856**	
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**45,347,890,856**	
7.01 KECAMATAN			**45,347,890,856**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30 %	**24,741,980,596**	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,556,656,000**	
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,556,656,000	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,024,176,540**	
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,024,176,540	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**161,148,056**	
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau	100%	161,148,056	

Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	konflik sosial yang ditangani			
Kec. Genteng			**46,257,024,850**	
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**46,257,024,850**	
7.01 KECAMATAN			**46,257,024,850**	
7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30 %	**26,446,684,930**	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,797,523,501**	
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,797,523,501	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,488,013,373**	
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,488,013,373	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**161,148,056**	
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau	100%	161,148,056	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara								Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara		
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,274,781,680**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,476,016,760**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	16.67 %								Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	16.67 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,500,000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,400,000**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 Orang	4,500,000						7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	80 Orang	2,400,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**7,250,271,000**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	**6,466,288,730**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	7,250,271,000					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,466,288,730
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**20,010,680**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**7,328,030**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 berkas	7,200,000					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 berkas	6,171,600
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2453 Berkas	12,570,000					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2453 Berkas	915,75

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Nonperizinan									Nonperizinan			
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	240,68						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	240,68
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,062,184,620**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,065,379,200**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Embong Kaliasin)	1 Kelurahan	**13,046,484,620**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Embong Kaliasin)	1 Kelurahan	**13,049,679,200**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Genteng)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Genteng)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kapasari)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kapasari)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ketabang)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ketabang)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan	1								Jumlah kelurahan	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Peneleh)	Kelurahan								yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Peneleh)	Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	14,000,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	17,194,580
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Embong Kaliasin)	6 RW	496,529,598						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Embong Kaliasin)	6 RW	353,751,057
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Genteng)	5 RW	1,065,339,443						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Genteng)	5 RW	1,065,339,443
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasari)	11 RW	940,262,246						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasari)	11 RW	634,621,860
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	8 RW	710,336,115						7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	8 RW	706,364,866

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ketabang)								Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ketabang)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Peneleh)	16 RW	465,608,491						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Peneleh)	16 RW	465,608,491
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Embong Kaliasin)	5 RW	2,167,720,769						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Embong Kaliasin)	5 RW	2,310,499,310
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Genteng)	5 RW	509,312,216						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Genteng)	5 RW	509,312,216
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasari)	11 RW	2,110,284,986						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasari)	11 RW	2,415,925,372
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan	8 RW	1,630,892,400						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan	8 RW	1,634,863,649

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Ketabang)									Ketabang)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Peneleh)	16 RW	2,936,198,356						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Peneleh)	16 RW	2,936,198,356
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	8 Lembaga	**15,700,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	8 Lembaga	**15,700,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	15,700,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	15,700,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**246,492,960**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**246,492,960**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**246,492,960**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**246,492,960**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	246,492,960						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	246,492,960

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22,451,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22,451,000**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	**22,451,000**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	**22,451,000**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	11,720,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	11,720,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	9 Kasus	10,731,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	9 Kasus	10,731,000
Kec. Gubeng								**56,261,637,969**	**Kec. Gubeng**								**57,531,799,872**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**56,261,637,969**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**57,531,799,872**
		7.01 KECAMATAN						**56,261,637,969**			**7.01 KECAMATAN**						**57,531,799,872**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN			Tingkat kepuasan pegawai terhadap	96.85 %	**28,697,672,414**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap	96.85 %	**30,841,850,827**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan kesekretariatan			**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	pelayanan kesekretariatan		
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,648,428,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,397,217,749**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,648,428,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,397,217,749
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,744,639,114**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7,246,617,821**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,744,639,114	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	7,246,617,821
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**304,605,300**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**198,015,257**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	304,605,300	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	198,015,257
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**8,547,674,060**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,644,695,730**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	masyarakat				masyarakat		
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20.59 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20.59 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,580,000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,580,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	86 Orang	2,580,000	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	86 Orang	2,580,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	**8,527,413,500**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	**7,625,196,420**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	8,527,413,500	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	7,625,196,420
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	6 Bidang Urusan	**17,680,560**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	6 Bidang Urusan	**16,919,310**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Dilimpahkan kepada Camat	kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat							**Dilimpahkan kepada Camat**	kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
				7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	2,700,000					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	2,700,000
				7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 berkas	7,620,000					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 berkas	6,858,750
				7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,360,560					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,360,560
			7.01.03 PROGRAM		Persentase	12.5 %	**18,879,917,575**				**7.0103 PROGRAM**		Persentase	12.5 %	**18,891,737,575**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi		
	Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Airlangga)	2 Kelurahan	**18,872,717,575**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Airlangga)	2 Kelurahan	**18,869,537,575**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Baratajaya)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Baratajaya)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gubeng)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gubeng)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kertajaya)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kertajaya)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Mojo)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Mojo)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pucang Sewu)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pucang Sewu)	2 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	6 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	6 kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						berdasarkan konsep inovasi									berdasarkan konsep inovasi		
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	12,180,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	9,000,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Airlangga)	8 RW	1,641,332,519						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Airlangga)	4 RW	1,641,332,519
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Baratajaya)	8 RW	1,113,211,719						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Baratajaya)	8 RW	1,123,311,369
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gubeng)	4 RW	1,071,331,857						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gubeng)	4 RW	1,071,331,857
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kertajaya)	11 RW	1,269,205,934						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kertajaya)	11 RW	1,269,205,932
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	13 RW	3,720,982,753						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	3,720,982,753

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Mojo)									(Kelurahan Mojo)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pucang Sewu)	8 RW	1,619,330,061						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pucang Sewu)	8 RW	1,619,330,061
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Airlangga)	8 RW	1,125,306,962						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Airlangga)	8 RW	1,125,306,962
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Baratajaya)	8 RW	1,703,024,247						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Baratajaya)	8 RW	1,692,924,597
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gubeng)	4 RW	1,053,409,400						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gubeng)	4 RW	1,053,409,400
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kertajaya)	11 RW	1,916,014,330						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kertajaya)	11 RW	1,916,014,332
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	13 RW	1,832,199,173						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	13 RW	1,832,199,173

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Mojo)								Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Mojo)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pucang Sewu)	8 RW	795,188,620						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pucang Sewu)	8 RW	795,188,620
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	90 Unit Kerja	**7,200,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	90 Unit Kerja	**22,200,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	7,200,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	22,200,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**114,929,280**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**132,071,100**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**114,929,280**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**132,071,100**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	114,929,280						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	132,071,100

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21,444,640**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**21,444,640**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**21,444,640**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**21,444,640**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	6,700,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	6,700,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	10 Kasus	14,744,640						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	10 Kasus	14,744,640
Kec. Gunung Anyar								**34,307,663,676**	**Kec. Gunung Anyar**								**34,960,558,826**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**34,307,663,676**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**34,960,558,826**
		7.01 KECAMATAN						**34,307,663,676**			**7.01 KECAMATAN**						**34,960,558,826**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.96 %	**21,445,672,176**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.96 %	**22,543,246,411**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,585,612,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,296,245,727**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,585,612,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,296,245,727
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,754,460,176**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,141,400,684**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,754,460,176	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,141,400,684
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**105,600,000**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**105,600,000**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	105,600,000	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	105,600,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**4,062,467,542**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,617,788,436**
	Persentase jenis	100%			Persentase jenis	100%	

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat						pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat				
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.14 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.14 %			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,400,000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,400,000**		
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	80 orang	2,400,000			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	80 orang	2,400,000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga	**4,043,874,800**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga	**3,599,150,240**		
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	4,043,874,800			7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,599,150,240		
7.01.02.2.04	Jumlah Bidang	6 Bidang	**16,192,742**			**7.01.02.2.04**	Jumlah Bidang	6 Bidang	**16,238,196**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	1,440,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	1,440,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2107 berkas	5,000,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2107 berkas	5,045,454
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	9,752,742						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	9,752,742

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	yang dilimpahkan				yang dilimpahkan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**8,657,614,278**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**8,657,614,299**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gunung Anyar)	1 Kelurahan	**8,651,854,278**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gunung Anyar)	1 Kelurahan	**8,651,854,299**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Menanggal)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Menanggal)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Tengah)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Tengah)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	18,740,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	18,740,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar)	8 RW	1,266,231,406						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar)	8 RW	1,266,231,406
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)	8 RW	596,140,568						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)	8 RW	596,140,589
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Menanggal)	4 RW	231,970,118						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Menanggal)	4 RW	284,514,518
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Tengah)	9 RW	687,711,013						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Tengah)	9 RW	693,942,023
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar)	8 RW	1,876,359,252						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar)	8 RW	1,876,359,252
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	8 RW	528,551,826						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	8 RW	528,551,826

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)								Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gunung Anyar Tambak)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Tengah)	9 RW	1,665,882,003						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Tengah)	9 RW	1,659,650,993
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Menanggal)	4 RW	1,780,268,092						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Menanggal)	4 RW	1,727,723,692
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**5,760,000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**5,760,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	5,760,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	5,760,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**125,662,080**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**125,662,080**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Objek yang berpotensi mengganggu	15 Lokasi	**125,662,080**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**		Objek yang berpotensi mengganggu	15 Lokasi	**125,662,080**

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum		ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							**Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	125,662,080						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	125,662,080
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,247,600**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,247,600**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**16,247,600**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**16,247,600**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	3,980,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	3,980,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 kasus	12,267,600						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 kasus	12,267,600
Kec. Jambangan								**31,082,161,056**	**Kec. Jambangan**								**33,490,603,789**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**31,082,161,056**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**33,490,603,789**
		7.01 KECAMATAN						**31,082,161,056**			**7.01 KECAMATAN**						**33,490,603,789**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.21 %	**21,327,366,870**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.21 %	**24,359,629,932**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,474,412,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,903,746,408**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,474,412,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,903,746,408
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,754,801,638**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,336,681,525**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	3,754,801,638						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,336,681,525
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**98,153,232**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**119,201,999**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabi	Persentase sarana dan prasarana	100%	98,153,232						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabi	Persentase sarana dan prasarana	100%	119,201,999

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara								litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara		
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,272,068,820**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**2,646,190,370**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,22%								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24,22%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,066,900**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,066,900**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	178 Orang	3,066,900						7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	178 Orang	3,066,900
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 lLmbaga	**3,216,881,300**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 lLmbaga	**2,604,390,300**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kecamatan								**Kecamatan**							
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,216,881,300	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	2,604,390,300
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**52,120,620**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**38,733,170**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	920,07	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	920,07
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang					Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4277 berkas	23,600,000	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang					Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4277 berkas	23,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					terkait dengan Nonperizinan									terkait dengan Nonperizinan			
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	27,600,550						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	14,213,100
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**6,302,348,458**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**6,302,348,458**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jambangan)	1 Kelurahan	**6,298,298,458**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jambangan)	1 Kelurahan	**6,298,298,458**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Karah)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Karah)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kebonsari)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kebonsari)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pagesangan)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pagesangan)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan	4								jumlah kelurahan	4	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	kelurahan								yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	1,533,450						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	1,533,450
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karah)	12 RW	1,078,973,029						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karah)	12 RW	1,078,973,029
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jambangan)	7 RW	870,728,611						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jambangan)	7 RW	870,728,611
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kebonsari)	3 RW	84,551,500						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kebonsari)	3 RW	84,551,500
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pagesangan)	4 RW	359,413,303						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pagesangan)	4 RW	359,413,303
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	12 RW	786,629,320						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	12 RW	786,629,320

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karah)			Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karah)		
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jambangan)	7 RW	1,040,256,592	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jambangan)	7 RW	1,040,256,592
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kebonsari)	3 RW	1,123,954,972	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kebonsari)	3 RW	1,123,954,972
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pagesangan)	4 RW	952,257,681	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pagesangan)	4 RW	952,257,681
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Lembaga	**4,050,000**	**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Lembaga	**4,050,000**
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	4,050,000	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	4,050,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI	Persentase koordinasi	100%	**143,616,908**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI**	Persentase koordinasi	100%	**162,973,429**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan			**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan		
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**143,616,908**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**162,973,429**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	143,616,908	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	162,973,429
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**36,760,000**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,461,600**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	40 Kasus	**36,760,000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	40 Kasus	**19,461,600**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02	Jumlah	4 Kali	16,600,000	7.01.05.2.01.02	Jumlah	4 Kali	16,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT								Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT		
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	40 Kasus	20,160,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	40 Kasus	2,861,600
Kec. Karangpilang								**34,761,045,229**	**Kec. Karangpilang**								**35,839,934,256**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**34,761,045,229**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**35,839,934,256**
		7.01 KECAMATAN						**34,761,045,229**			**7.01 KECAMATAN**						**35,839,934,256**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.76 %	**22,808,615,413**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.76 %	**24,247,735,495**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,215,288,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,455,101,545**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,215,288,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,455,101,545
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,463,276,771**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,662,583,308**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,463,276,771						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,662,583,308
				7.01.01.2.09		Persentase Barang	100%	**130,050,642**					**7.01.01.2.09**		Persentase Barang	100%	**130,050,642**

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	130,050,642		7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	130,050,642	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**4,022,923,880**		**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,643,167,465**	
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.8 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.8 %		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**8,100,000**		**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,100,000**	
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	270 Orang	8,100,000		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	270 Orang	2,100,000	
7.01.02.2.02	Jumlah lembaga	220	**3,990,449,800**		**7.01.02.2.02**	Jumlah lembaga	220	**3,616,356,470**	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	Lembaga						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	Lembaga	
				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,990,449,800					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,616,356,470
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**24,374,080**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**24,710,995**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
				7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	9,814,080					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	10,105,995

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 Berkas	4,950,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 Berkas	4,995,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	9,610,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	9,610,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,756,753,736**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,756,779,096**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Karang Pilang)	1 Kelurahan	**7,747,753,736**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Karang Pilang)	1 Kelurahan	**7,747,779,096**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kebraon)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kebraon)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan	1 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kedurus)								Kedurus)		
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Waru Gunung)	1 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Waru Gunung)	1 Kelurahan	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 keluraha n	
				7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	9,074,640					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	9,100,000
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karang Pilang)	4 RW	538,440,425					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karang Pilang)	4 RW	580,179,425
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kebraon)	13 RW	1,987,103,758					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kebraon)	13 RW	1,947,919,163
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedurus)	9 RW	1,929,998,008					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedurus)	9 RW	1,930,269,401

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Waru Gunung)	3 RW	313,184,732					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Waru Gunung)	3 RW	313,184,732
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karang Pilang)	4 RW	774,171,681					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karang Pilang)	4 RW	732,432,681
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kebraon)	13 RW	835,729,737					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kebraon)	13 RW	874,914,332
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedurus)	9 RW	883,580,255					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedurus)	9 RW	883,308,862
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Waru Gunung)	3 RW	476,470,500					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Waru Gunung)	3 RW	476,470,500
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	**9,000,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	**9,000,000**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	9,000,000	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	9,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**137,059,200**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**156,559,200**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**137,059,200**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**156,559,200**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	137,059,200	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	156,559,200
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**35,693,000**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**35,693,000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	73 Kasus	**35,693,000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	73 Kasus	**35,693,000**

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penugasan Kepala Daerah		Babinsa/Babinkamtibmas							**Penugasan Kepala Daerah**		Babinsa/Babinkamtibmas		
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	3,500,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	3,500,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	73 Kasus	32,193,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	73 Kasus	32,193,000
Kec. Kenjeran								**49,099,606,747**	**Kec. Kenjeran**								**49,170,183,879**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**49,099,606,747**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**49,170,183,879**
		7.01 KECAMATAN						**49,099,606,747**			**7.01 KECAMATAN**						**49,170,183,879**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.69 %	**22,507,300,490**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.69 %	**23,534,148,232**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,977,512,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,494,815,822**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,977,512,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,494,815,822
				7.01.01.2.06		Persentase barang	100%	**5,364,000,490**					**7.01.01.2.06**		Persentase barang	100%	**5,930,898,410**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan					
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,364,000,490				7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,930,898,410			
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**165,788,000**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**108,434,000**			
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	165,788,000				7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	108,434,000			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,773,382,900**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,817,112,290**			
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17.19 %						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17.19 %				
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**1,320,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**1,320,000**			
7.01.02.2.01.01	Jumlah masyarakat	150	1,320,000				7.01.02.2.01.01	Jumlah masyarakat	150	1,320,000			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	orang						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	orang	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	**7,751,212,900**				**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	**6,756,459,800**
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	7,751,212,900					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,756,459,800
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**20,850,000**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**59,332,490**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang	1 Bidang							Jumlah Bidang	1 Bidang	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan								urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	1,260,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	2,934,990
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7044 berkas	12,390,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7044 berkas	49,197,500
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,200,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,200,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**18,654,399,357**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**18,654,399,357**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bulak Banteng)	1 Kelurahan	**18,634,519,357**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bulak Banteng)	1 Kelurahan	**18,634,519,357**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidotopo Wetan)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidotopo Wetan)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Wedi)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambak Wedi)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	2,520,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	2,520,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo Wetan)	14 RW	2,694,353,275						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo Wetan)	14 RW	3,579,569,234
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya	12 RW	4,624,081,595						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya	10 RW	4,669,201,395

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Prasarana Kelurahan	direalisasikan (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)							Prasarana Kelurahan	direalisasikan (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)		
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bulak Banteng)	8 RW	1,257,594,096					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bulak Banteng)	8 RW	1,271,270,773
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Wedi)	4 RW	927,887,261					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambak Wedi)	3 RW	927,887,261
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo Wetan)	14 RW	3,955,801,918					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo Wetan)	14 RW	3,070,585,959
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	12 RW	2,161,777,200					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tanah Kali Kedinding)	12 RW	2,116,657,400
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bulak Banteng)	8 RW	1,739,928,235					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bulak Banteng)	8 RW	1,726,251,558
				7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	4 RW	1,270,575,777					7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	4 RW	1,270,575,777

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Wedi)								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambak Wedi)		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	**19,880,000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	**19,880,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	19,880,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	19,880,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**145,644,000**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**145,644,000**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	**145,644,000**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	**145,644,000**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	145,644,000						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	145,644,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**18,880,000**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**18,880,000**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**18,880,000**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**18,880,000**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	11,680,000	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	11,680,000
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus	7,200,000	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus	7,200,000
Kec. Krembangan			**48,415,523,063**	**Kec. Krembangan**			**47,707,176,400**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**48,415,523,063**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**47,707,176,400**
7.01 KECAMATAN			**48,415,523,063**	**7.01 KECAMATAN**			**47,707,176,400**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25 %	**24,321,847,433**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25 %	**23,617,528,770**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,194,272,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,180,361,899**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,194,272,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,180,361,899
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,979,742,104**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,289,333,542**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,979,742,104	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,289,333,542
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**147,833,329**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**147,833,329**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	147,833,329	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	147,833,329
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,649,404,800**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,650,853,600**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan	37,11%			Persentase usulan	37,11%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan				musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,400,000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**4,500,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 orang	2,400,000	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 orang	4,500,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	**7,642,204,800**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	**7,642,204,800**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	7,642,204,800	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	7,642,204,800
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	6 Bidang Urusan	**4,800,000**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	6 Bidang Urusan	**4,148,800**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kepada Camat									kepada Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 berkas	2,640,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 berkas	1,988,800
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6060 berkas	1,080,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6060 berkas	1,080,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	1,080,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	1,080,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	12.5 %	**16,298,378,831**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	12.5 %	**16,298,378,831**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
KELURAHAN	konsep inovasi			**DAN KELURAHAN**	konsep inovasi		
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dupak)	1 Kelurahan	**16,277,978,831**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dupak)	1 Kelurahan	**16,277,978,831**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kemayoran)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kemayoran)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Krembangan Selatan)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Krembangan Selatan)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Morokrembangan)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Morokrembangan)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Barat)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Barat)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep	10 Kali	24,340,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep	10 Kali	24,340,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	inovasi								Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	inovasi		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Barat)	9 RW	1,612,095,572						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Barat)	9 RW	1,612,095,572
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dupak)	5 RW	2,204,976,007						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dupak)	5 RW	2,204,976,007
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Morokrembangan)	9 RW	2,432,063,966						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Morokrembangan)	9 RW	1,871,456,405
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Selatan)	13 RW	784,607,954						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Selatan)	13 RW	349,200,454
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kemayoran)	8 RW	295,947,412						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kemayoran)	8 RW	295,947,412
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	9 RW	1,428,323,254						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	9 RW	1,428,323,254

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Barat)								Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Barat)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dupak)	5 RW	2,036,791,803						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dupak)	5 RW	2,036,791,803
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Selatan)	13 RW	1,432,422,851						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Selatan)	13 RW	1,867,830,351
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kemayoran)	8 RW	1,769,341,402						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kemayoran)	8 RW	1,769,341,402
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Morokrembangan)	9 RW	2,257,068,610						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Morokrembangan)	9 RW	2,817,676,171
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**20,400,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**20,400,000**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
Tingkat Kecamatan			**Tingkat Kecamatan**		
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali / 20,400,000	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali / 20,400,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100% / **121,815,000**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100% / **129,086,250**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi / **121,815,000**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi / **129,086,250**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali / 121,815,000	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali / 129,086,250
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100% / **24,076,999**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100% / **11,328,949**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamti	24 Kasus / **24,076,999**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamti	24 Kasus / **11,328,949**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
Daerah	bmas						**Daerah**	bmas					
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	6,499,999				7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	6,499,999			
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 kasus	17,577,000				7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 kasus	4,828,950			
Kec. Lakarsantri			**39,186,185,934**				**Kec. Lakarsantri**			**41,251,325,785**			
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**39,186,185,934**				**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**41,251,325,785**			
7.01 KECAMATAN			**39,186,185,934**				**7.01 KECAMATAN**			**41,251,325,785**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.23 %	**26,481,217,152**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.23 %	**29,003,578,583**			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,533,060,000**				**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,451,026,272**			
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,533,060,000				7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,451,026,272			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum	Persentase barang dan jasa untuk	100%	**4,861,225,152**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum**	Persentase barang dan jasa untuk	100%	**5,465,503,311**			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perangkat Daerah		menunjang administrasi umum yang disediakan							**Perangkat Daerah**	menunjang administrasi umum yang disediakan		
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,861,225,152						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,465,503,311
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**86,932,000**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**87,049,000**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	86,932,000						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	87,049,000
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**4,015,134,538**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,559,313,308**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9,875,418**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9,875,418**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi	Jumlah masyarakat yang hadir dalam	322 Orang	9,875,418						7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi	Jumlah masyarakat yang hadir dalam	322 Orang	9,875,418

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan								Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	**3,969,337,300**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	**3,511,853,590**
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,969,337,300						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	3,511,853,590
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**35,921,820**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**37,584,300**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat									pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	685 berkas	14,721,120						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	685 berkas	14,833,867
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2923 berkas	12,000,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2923 berkas	13,772,338
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	9,200,700						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	8,978,095
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**8,535,609,284**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**8,534,209,284**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bangkingan)	2 Kelurahan	**8,526,969,284**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bangkingan)	2 Kelurahan	**8,525,569,284**
						Jumlah kelurahan	2								Jumlah kelurahan	2	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jeruk)	Kelurahan							yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jeruk)	Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lakarsantri)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lakarsantri)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lidah Kulon)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lidah Kulon)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lidah Wetan)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lidah Wetan)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sumurwelut)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sumurwelut)	2 Kelurahan	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
				7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	5,316,884					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	3,916,884
				7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	5 RW	584,433,740					7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	5 RW	584,433,740

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bangkingan)							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bangkingan)		
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jeruk)	4 RW	297,228,103					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jeruk)	3 RW	297,228,103
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lakarsantri)	4 RW	403,802,504					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lakarsantri)	4 RW	403,802,504
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lidah Kulon)	8 RW	1,147,554,852					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lidah Kulon)	8 RW	1,147,554,852
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lidah Wetan)	7 RW	745,390,698					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lidah Wetan)	7 RW	745,390,698
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sumurwelut)	3 RW	316,211,577					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sumurwelut)	3 RW	316,211,577
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	5 RW	790,298,145					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	5 RW	790,298,145

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bangkingan)								Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bangkingan)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jeruk)	4 RW	1,207,356,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jeruk)	3 RW	1,207,356,500
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lakarsantri)	4 RW	866,740,031						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lakarsantri)	4 RW	866,740,031
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lidah Kulon)	8 RW	1,215,733,750						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lidah Kulon)	8 RW	1,215,733,750
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lidah Wetan)	7 RW	418,519,000						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lidah Wetan)	7 RW	418,519,000
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan	3 RW	528,383,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan	3 RW	528,383,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Sumurwelut)									Sumurwelut)		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	124 Lembaga	**8,640,000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	124 Lembaga	**8,640,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,640,000					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,640,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138,854,400**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**138,854,050**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**138,854,400**				**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**138,854,050**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	138,854,400					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	138,854,050
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15,370,560**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**15,370,560**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	**15,370,560**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	**15,370,560**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	8,010,000	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	8,010,000
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 kasus	7,360,560	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 kasus	7,360,560
Kec. Mulyorejo			**47,161,962,433**	**Kec. Mulyorejo**			**49,109,846,786**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**47,161,962,433**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**49,109,846,786**
7.01 KECAMATAN			**47,161,962,433**	**7.01 KECAMATAN**			**49,109,846,786**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.94 %	**29,839,257,444**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.94 %	**32,486,906,583**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,077,476,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,013,230,604**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,077,476,000					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24,013,230,604
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7,562,971,543**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**8,274,866,078**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	7,562,971,543					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	8,274,866,078
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**198,809,901**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**198,809,901**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	198,809,901					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	198,809,901
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,650,270,900**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,946,043,800**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan		Jumlah unsur lembaga yang hadir	6 Lembaga	**6,000,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir	6 Lembaga	**3,600,000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan							**Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	120 orang	6,000,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	120 orang	3,600,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	**6,607,468,100**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	**5,913,024,600**
				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,607,468,100					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,913,024,600
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**36,802,800**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**29,419,200**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						perizinan yang dilimpahkan kepada Camat									perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	12,000,000					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	12,000,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 berkas	12,267,600					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 berkas	4,884,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	12,535,200					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	12,535,200
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**10,493,483,617**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**10,504,893,531**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan		Jumlah kelurahan	2	**10,467,565,577**					**7.01.03.2.02 Kegiatan**		Jumlah kelurahan	2	**10,478,975,491**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
Pemberdayaan Kelurahan	yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	Kelurahan					**Pemberdayaan Kelurahan**	yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	Kelurahan				
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kalijudan)	2 Kelurahan						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kalijudan)	2 Kelurahan				
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kalisari)	2 Kelurahan						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kalisari)	2 Kelurahan				
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	2 Kelurahan						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	2 Kelurahan				
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Manyar Sabrangan)	2 Kelurahan						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Manyar Sabrangan)	2 Kelurahan				
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Mulyorejo)	2 Kelurahan						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Mulyorejo)	2 Kelurahan				
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan				
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	1,934,850				7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	4,334,850			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Mulyorejo)	11 RW	867,484,821						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Mulyorejo)	11 RW	682,983,526
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	10 RW	924,382,214						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	10 RW	924,382,214
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalisari)	8 RW	1,176,381,105						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalisari)	8 RW	1,176,381,105
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	4 RW	338,000,935						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	4 RW	338,000,935
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manyar Sabrangan)	13 RW	259,747,769						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manyar Sabrangan)	13 RW	195,479,949
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	827,254,506						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	827,254,506

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Kalijudan)									(Kelurahan Kalijudan)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Mulyorejo)	11 RW	1,099,057,520						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Mulyorejo)	11 RW	1,283,558,814
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	10 RW	974,215,534						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Sutorejo)	10 RW	974,215,534
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalisari)	8 RW	754,886,210						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalisari)	8 RW	754,886,210
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	4 RW	533,683,553						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kejawan Putih Tambak)	4 RW	542,693,467
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manyar Sabrangan)	13 RW	2,167,808,560						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manyar Sabrangan)	13 RW	2,232,076,381
					7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	10 RW	542,728,000						7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	10 RW	542,728,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalijudan)								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalijudan)		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**25,918,040**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**25,918,040**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	25,918,040						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	25,918,040
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**154,147,672**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**154,147,672**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	**154,147,672**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	**154,147,672**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 kali	154,147,672						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 kali	154,147,672

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**24,802,800**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**17,855,200**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**24,802,800**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	**17,855,200**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	12,267,600	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	5,320,000
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	8 kasus	12,535,200	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	8 kasus	12,535,200
Kec. Pabean Cantian			**46,036,085,935**	**Kec. Pabean Cantian**			**47,181,850,062**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**46,036,085,935**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**47,181,850,062**
7.01 KECAMATAN			**46,036,085,935**	**7.01 KECAMATAN**			**47,181,850,062**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,55%	**23,656,743,293**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,55%	**25,138,900,527**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
				KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,915,128,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,801,991,044**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,915,128,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,801,991,044
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,607,067,693**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,199,724,481**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,607,067,693	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,199,724,481
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**134,547,600**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**137,185,002**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	134,547,600	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	137,185,002
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,985,507,000**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,643,162,880**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan	15%			Persentase usulan	15%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan				musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**1,500,000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**1,500,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	50 Orang	1,500,000	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	50 Orang	1,500,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga	**6,955,465,400**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga	**6,613,121,280**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,955,465,400	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,613,121,280
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	6 Bidang Urusan	**28,541,600**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	6 Bidang Urusan	**28,541,600**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kepada Camat									kepada Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	7,200,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	7,200,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2734 Berkas	18,480,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2734 Berkas	18,480,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	2,861,600						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	2,861,600
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	12.5 %	**15,242,315,642**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	12.5 %	**15,242,315,642**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
KELURAHAN	konsep inovasi			**DAN KELURAHAN**	konsep inovasi		
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bongkaran)	1 Kelurahan	**15,204,284,342**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bongkaran)	1 Kelurahan	**15,204,284,342**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Krembangan Utara)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Krembangan Utara)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Nyamplungan)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Nyamplungan)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Timur)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Timur)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Utara)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Perak Utara)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep	10 kali	9,000,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep	10 kali	9,000,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	inovasi								Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	inovasi		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bongkaran)	10 RW	739,113,112						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Bongkaran)	10 RW	739,113,112
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Utara)	10 RW	1,877,480,564						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Utara)	10 RW	1,877,480,564
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Nyamplungan)	12 RW	1,149,488,635						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Nyamplungan)	12 RW	1,149,488,635
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Timur)	10 RW	1,184,305,151						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Timur)	10 RW	1,184,305,151
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Utara)	10 RW	1,005,209,695						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Perak Utara)	10 RW	1,005,209,695
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	10 RW	1,150,025,500						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	10 RW	1,150,025,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bongkaran)								Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bongkaran)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Utara)	10 RW	2,664,563,423						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Krembangan Utara)	10 RW	2,664,563,423
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Nyamplungan)	12 RW	815,992,900						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Nyamplungan)	12 RW	815,992,900
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Timur)	10 RW	1,070,869,010						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Timur)	10 RW	1,070,869,010
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Utara)	10 RW	3,538,236,352						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Perak Utara)	10 RW	3,538,236,352
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	**38,031,300**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	**38,031,300**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Tingkat Kecamatan				**Tingkat Kecamatan**			
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	38,031,300	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	38,031,300
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**121,396,800**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**127,347,813**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**121,396,800**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**127,347,813**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	121,396,800	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	127,347,813
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**30,123,200**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**30,123,200**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamti	20 Kasus	**30,123,200**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamti	20 Kasus	**30,123,200**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Daerah					bmas			**Daerah**					bmas		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	7,600,000					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	7,600,000
				7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	20 Kasus	22,523,200					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	20 Kasus	22,523,200
Kec. Pakal							**34,513,980,993**	**Kec. Pakal**							**35,633,795,209**
7 UNSUR KEWILAYAHAN							**34,513,980,993**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**35,633,795,209**
7.01 KECAMATAN							**34,513,980,993**	**7.01 KECAMATAN**							**35,633,795,209**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,31%	**21,055,963,025**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,31%	**22,888,875,551**
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,110,480,000**				**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,530,438,173**
				7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,110,480,000					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,530,438,173
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum		Persentase barang dan jasa untuk	100%	**4,824,582,057**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum**		Persentase barang dan jasa untuk	100%	**5,286,473,266**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perangkat Daerah		menunjang administrasi umum yang disediakan							**Perangkat Daerah**	menunjang administrasi umum yang disediakan		
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,824,582,057						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,286,473,266
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**120,900,968**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**71,964,112**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	120,900,968						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	71,964,112
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**4,556,266,800**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,815,973,490**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,400,000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,400,000**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi	Jumlah masyarakat yang hadir dalam	120 orang	2,400,000						7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi	Jumlah masyarakat yang hadir dalam	120 orang	2,400,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan								Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	**4,537,043,800**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	**3,786,348,680**
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	4,537,043,800						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	3,786,348,680
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**16,823,000**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**27,224,810**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat									pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat		
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	6,600,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	7,654,750
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3797 Berkas	3,066,900						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3797 Berkas	12,413,960
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,156,100						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	7,156,100
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**8,787,243,068**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**8,787,243,068**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Babat Jerawat)	1 Kelurahan	**8,769,770,548**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Babat Jerawat)	1 Kelurahan	**8,769,770,548**
						Jumlah kelurahan	1								Jumlah kelurahan	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Benowo)	Kelurahan								yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Benowo)	Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pakal)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pakal)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sumberejo)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sumberejo)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	14,300,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	14,300,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Babat Jerawat)	14 RW	2,915,975,423						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Babat Jerawat)	3 RW	2,610,668,457
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pakal)	6 RW	454,181,001						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pakal)	2 RW	454,181,001
					7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	8 RW	591,197,257						7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	1 RW	591,197,257

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sumberejo)								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sumberejo)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Benowo)	6 RW	639,354,787						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Benowo)	5 RW	639,354,787
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Babat Jerawat)	14 RW	1,401,809,357						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Babat Jerawat)	14 RW	1,707,116,323
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pakal)	6 RW	864,481,032						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pakal)	6 RW	864,481,032
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sumberejo)	8 RW	1,016,034,643						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sumberejo)	8 RW	1,016,034,643
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Benowo)	6 RW	872,437,048						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Benowo)	6 RW	872,437,048
				7.01.03.2.03		Jumlah Potensi	100	**17,472,520**					**7.01.03.2.03**		Jumlah Potensi	100	**17,472,520**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Usaha yang difasilitasi	pelaku usaha						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Usaha yang difasilitasi	pelaku usaha	
				7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	17,472,520					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	17,472,520
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**98,352,000**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**125,547,000**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 Lokasi	**98,352,000**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 Lokasi	**125,547,000**
				7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	98,352,000					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	125,547,000
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,156,100**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**16,156,100**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan	Jumlah potensi konflik yang dapat	24 Kasus	**16,156,100**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan**	Jumlah potensi konflik yang dapat	24 Kasus	**16,156,100**

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas							**Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas		
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	9,000,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	9,000,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 Kasus	7,156,100						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	6 Kasus	7,156,100
Kec. Rungkut								**55,141,497,888**	**Kec. Rungkut**								**56,610,115,322**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**55,141,497,888**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**56,610,115,322**
		7.01 KECAMATAN						**55,141,497,888**			**7.01 KECAMATAN**						**56,610,115,322**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,66%	**27,606,808,496**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,66%	**29,887,137,501**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,108,944,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,654,644,473**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan	Persentase Pelayanan Gaji dan	100%	21,108,944,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan	Persentase Pelayanan Gaji dan	100%	22,654,644,473

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tunjangan ASN	Tunjangan ASN								Tunjangan ASN	Tunjangan ASN		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,364,973,157**				**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7,099,601,689**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,364,973,157					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	7,099,601,689
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**132,891,339**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**132,891,339**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	132,891,339					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	132,891,339
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**9,374,944,020**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**8,563,232,449**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	28.00 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	28.00 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada	6 Lembaga	**5,580,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada	6 Lembaga	**1,080,000**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					tingkat kecamatan								tingkat kecamatan		
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	186 Orang	5,580,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	36 Orang	1,080,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga	**9,341,442,900**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga	**8,548,088,509**
				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	9,341,442,900					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	8,548,088,509
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**27,921,120**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**14,063,940**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Camat									Camat		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 Berkas	14,721,120						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 Berkas	863,94
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3612 berkas	7,200,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3612 berkas	7,200,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	6,000,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	6,000,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**17,992,644,672**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**17,992,644,672**
						Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**17,975,364,672**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	**17,975,364,672**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Kelurahan Kalirungkut)								(Kelurahan Kalirungkut)		
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kedung Baruk)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kedung Baruk)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Medokan Ayu)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Medokan Ayu)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Penjaringansari)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Penjaringansari)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Kidul)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rungkut Kidul)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonorejo)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonorejo)	2 Kelurahan	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 keluraha n	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	29,800,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	29,800,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalirungkut)	15 RW	1,922,452,084						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kalirungkut)	11 RW	1,922,452,084
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Kidul)	12 RW	1,046,713,283						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Kidul)	4 RW	1,046,713,283
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedung Baruk)	10 RW	1,158,919,465						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedung Baruk)	10 RW	1,158,919,465
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Penjaringansari)	12 RW	1,048,068,666						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Penjaringansari)	4 RW	1,035,377,776
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Medokan Ayu)	15 RW	3,413,891,612						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Medokan Ayu)	5 RW	3,413,891,612
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	855,771,358						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	3 RW	855,771,358

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Wonorejo)									(Kelurahan Wonorejo)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalirungkut)	15 RW	1,544,197,318						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kalirungkut)	11 RW	1,544,197,318
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Kidul)	12 RW	1,625,954,445						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rungkut Kidul)	12 RW	1,625,954,445
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedung Baruk)	10 RW	1,417,843,355						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedung Baruk)	4 RW	1,417,843,355
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Penjaringansari)	12 RW	1,609,912,685						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Penjaringansari)	7 RW	1,622,603,575
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Medokan Ayu)	15 RW	922,885,001						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Medokan Ayu)	13 RW	922,885,001

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	10 RW	1,378,955,400					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	4 RW	1,378,955,400
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	110 Unit Usaha	**17,280,000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	110 Unit Usaha	**17,280,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	17,280,000					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	17,280,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153,200,700**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**153,200,700**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	**153,200,700**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	**153,200,700**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	153,200,700					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	153,200,700

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Wilayah Kecamatan									Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,900,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**13,900,000**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	**13,900,000**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	**13,900,000**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	6,400,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	6,400,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	10 Kasus	7,500,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	10 Kasus	7,500,000
Kec. Sambikerep								**34,236,895,514**	**Kec. Sambikerep**								**35,720,998,612**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**34,236,895,514**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**35,720,998,612**
		7.01 KECAMATAN						**34,236,895,514**			**7.01 KECAMATAN**						**35,720,998,612**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	98,79%	**20,497,090,174**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	98,79%	**21,981,193,273**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
KABUPATEN/KOTA	kesekretariatan			**DAERAH KABUPATEN/KOTA**	kesekretariatan		
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,007,392,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,252,756,385**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,007,392,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,252,756,385
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,376,834,574**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,615,573,288**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,376,834,574	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,615,573,288
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**112,863,600**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**112,863,600**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	112,863,600	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	112,863,600
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,218,139,800**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,218,139,800**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.37 %					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.37 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**5,100,000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**2,940,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	88 Orang	5,100,000	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	88 Orang	2,940,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga	**5,199,599,800**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga	**5,199,599,800**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,199,599,800	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,199,599,800
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	**13,440,000**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada**			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	**15,600,000**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Camat	yang dilimpahkan kepada Camat							**Camat**	yang dilimpahkan kepada Camat		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	8,520,000					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 Berkas	10,680,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 Berkas	3,060,000					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 Berkas	3,060,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	1,860,000					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	1,860,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase kelurahan yang	12.5 %	**8,326,748,572**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN**		Persentase kelurahan yang	12.5 %	**8,326,748,571**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	menindaklanjuti konsep inovasi			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	menindaklanjuti konsep inovasi		
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Beringin)	1 Kelurahan	**8,312,738,572**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Beringin)	1 Kelurahan	**8,312,738,571**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lontar)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Lontar)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Made)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Made)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sambikerep)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sambikerep)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 keluraha n	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	5,100,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	5,100,000
7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	16 RW	2,758,591,792	7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	14 RW	2,308,144,848

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lontar)							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Lontar)		
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Made)	7 RW	528,074,457					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Made)	6 RW	503,684,427
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sambikerep)	11 RW	1,857,222,400					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sambikerep)	7 RW	1,720,116,310
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Beringin)	3 RW	328,044,442					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Beringin)	3 RW	215,302,739
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lontar)	16 RW	925,729,560					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Lontar)	14 RW	1,364,003,904
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sambikerep)	11 RW	734,784,600					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sambikerep)	7 RW	871,890,690
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	7 RW	684,030,013					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	6 RW	720,592,643

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Made)								Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Made)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Beringin)	3 RW	491,161,308						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Beringin)	3 RW	603,903,010
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	148 Lembaga	**14,010,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	148 Lembaga	**14,010,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	14,010,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	14,010,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**172,855,608**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**172,855,608**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**172,855,608**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**172,855,608**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	172,855,608						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	172,855,608

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22,061,360**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**22,061,360**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	**22,061,360**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	**22,061,360**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	14,720,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	14,720,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	37 Kasus	7,341,360						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	37 Kasus	7,341,360
Kec. Sawahan								**66,419,887,486**	**Kec. Sawahan**								**66,305,624,800**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**66,419,887,486**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**66,305,624,800**
		7.01 KECAMATAN						**66,419,887,486**			**7.01 KECAMATAN**						**66,305,624,800**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,48%	**28,840,126,062**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,48%	**30,883,253,378**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,233,732,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,664,416,203**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,233,732,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,664,416,203
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7,475,162,793**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**8,082,073,381**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	7,475,162,793	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	8,082,073,381
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**131,231,269**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**136,763,794**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	131,231,269	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	136,763,794
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**11,218,665,826**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**9,061,275,825**
	Persentase jenis	100%			Persentase jenis	100%	

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
	pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat						pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat				
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,22%					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,22%			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2,730,000**			**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2,730,000**		
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	91 orang	2,730,000			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	91 orang	2,730,000		
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	**11,187,156,091**			**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	**9,029,766,090**		
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	11,187,156,091			7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	9,029,766,090		
7.01.02.2.04	Jumlah Bidang	6 Bidang	**28,779,735**			**7.01.02.2.04**	Jumlah Bidang	6 Bidang	**28,779,735**		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	10,378,335						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	10,378,335
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6365 berkas	9,200,700						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6365 berkas	9,200,700
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	9,200,700						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	4 Laporan	9,200,700

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	yang dilimpahkan				yang dilimpahkan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**26,199,073,230**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**26,199,073,229**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Banyu Urip)	2 Kelurahan	**26,190,240,558**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Banyu Urip)	2 Kelurahan	**26,190,240,557**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kupang Krajan)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kupang Krajan)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pakis)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pakis)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Petemon)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Petemon)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Putat Jaya)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Putat Jaya)	2 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sawahan)	2 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sawahan)	2 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	8,820,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	8,820,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pakis)	10 RW	1,692,349,638						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pakis)	10 RW	1,692,349,638
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Putat Jaya)	14 RW	1,715,806,809						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Putat Jaya)	14 RW	1,717,944,272
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kupang Krajan)	7 RW	1,229,347,682						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kupang Krajan)	7 RW	1,229,347,682
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Banyu Urip)	9 RW	1,879,852,166						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Banyu Urip)	9 RW	1,858,620,907
					7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	10 RW	1,374,279,328						7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	10 RW	1,374,279,328

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sawahan)								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sawahan)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Petemon)	18 RW	1,760,863,412						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Petemon)	18 RW	1,978,007,764
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Banyu Urip)	9 RW	3,198,346,960						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Banyu Urip)	9 RW	3,219,578,219
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kupang Krajan)	7 RW	1,715,247,300						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kupang Krajan)	7 RW	1,715,247,300
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pakis)	10 RW	2,867,939,900						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pakis)	10 RW	2,867,939,900
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Putat	14 RW	4,073,769,902						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Putat	14 RW	4,071,632,439

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jaya)									Jaya)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sawahan)	10 RW	1,347,865,326						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sawahan)	10 RW	1,347,865,326
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Petemon)	18 RW	3,325,752,135						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Petemon)	18 RW	3,108,607,782
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	**8,832,672**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	**8,832,672**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,832,672						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,832,672
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**135,748,608**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**135,748,608**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	14 Lokasi	**135,748,608**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	14 Lokasi	**135,748,608**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	ditertibkan				ditertibkan		
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	135,748,608	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	135,748,608
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**26,273,760**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**26,273,760**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	**26,273,760**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	**26,273,760**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	8,580,000	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	8,580,000
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	144 Kasus	17,693,760	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	144 Kasus	17,693,760

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perundang-Undangan									Perundang-Undangan			
Kec. Semampir								**64,211,695,663**	**Kec. Semampir**								**63,685,913,616**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**64,211,695,663**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**63,685,913,616**
		7.01 KECAMATAN						**64,211,695,663**			**7.01 KECAMATAN**						**63,685,913,616**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,92%	**25,224,033,084**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,92%	**26,704,700,827**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,180,536,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20,167,782,976**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,180,536,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,167,782,976
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,879,126,273**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,372,572,351**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,879,126,273						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,372,572,351
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**164,370,811**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**164,345,500**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	164,370,811						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	164,345,500

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**11,212,055,446**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**9,205,605,656**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**14,446,566**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**14,446,566**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	285 Orang	14,446,566	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	285 Orang	14,446,566
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	**11,180,863,000**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	**9,174,413,210**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	11,180,863,000	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	9,174,413,210

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**16,745,880**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**16,745,880**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	8,846,880						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	8,846,880
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7927 Berkas	7,899,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7927 Berkas	7,899,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN			Persentase kelurahan yang	12.5 %	**27,617,832,633**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN**			Persentase kelurahan yang	12.5 %	**27,617,832,633**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	menindaklanjuti konsep inovasi			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	menindaklanjuti konsep inovasi		
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ampel)	1 Kelurahan	**27,603,432,633**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ampel)	1 Kelurahan	**27,603,432,633**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pegirian)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pegirian)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidotopo)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidotopo)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ujung)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ujung)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonokusumo)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonokusumo)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	12,500,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	12,500,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ujung)	14 RW	3,328,794,238						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ujung)	14 RW	3,361,235,312
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo)	12 RW	2,571,104,932						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo)	12 RW	2,306,151,526
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pegirian)	11 RW	2,160,934,848						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pegirian)	11 RW	2,153,351,696
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonokusumo)	16 RW	5,789,178,672						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonokusumo)	16 RW	5,966,245,155
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ampel)	17 RW	343,502,508						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ampel)	17 RW	346,553,554
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	1,870,649,092						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	1,838,208,018

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Ujung)									(Kelurahan Ujung)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonokusumo)	16 RW	2,889,998,670						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonokusumo)	16 RW	2,712,932,187
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ampel)	17 RW	3,487,841,685						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ampel)	17 RW	3,484,790,639
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo)	12 RW	2,323,258,735						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidotopo)	12 RW	2,588,212,141
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pegirian)	11 RW	2,825,669,253						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pegirian)	11 RW	2,833,252,405
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha	**14,400,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha	**14,400,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	48 Kali	14,400,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	48 Kali	14,400,000

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Masyarakat	masyarakat			Masyarakat	masyarakat		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**126,586,560**	**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**126,586,560**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	**126,586,560**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	**126,586,560**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	126,586,560	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	126,586,560
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**31,187,940**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**31,187,940**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	**31,187,940**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	**31,187,940**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan	2 Topik	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kebangsaan dan ketahanan nasional									kebangsaan dan ketahanan nasional		
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	10,123,940						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	10,123,940
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	210 Kasus	21,064,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	21 Kasus	21,064,000
Kec. Simokerto								**46,056,856,614**	**Kec. Simokerto**								**46,756,267,027**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**46,056,856,614**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**46,756,267,027**
		7.01 KECAMATAN						**46,056,856,614**			**7.01 KECAMATAN**						**46,756,267,027**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,43%	**23,941,392,385**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,43%	**25,188,115,558**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,555,712,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,688,302,409**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,555,712,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,688,302,409
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,243,580,843**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,357,713,607**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan	Persentase peralatan dan	100%	5,243,580,843						7.01.01.2.06.02 Penyediaan	Persentase peralatan dan	100%	5,357,713,607

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan								Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**142,099,542**				**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**142,099,542**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	142,099,542					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	142,099,542
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,479,102,700**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,931,789,940**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	39,18%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	39,18%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	**3,000,000**				**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	**3,000,000**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	3,000,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	3,000,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	**6,466,297,200**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	**5,918,984,440**
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,466,297,200						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,918,984,440
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**9,805,500**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**9,805,500**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	3,217,500						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	3,217,500
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6249 Berkas	3,370,500						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6249 Berkas	3,370,500
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	3,217,500						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	3,217,500
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**15,515,649,635**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**15,515,649,635**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kapasan)	1 Kelurahan	**15,484,089,635**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kapasan)	1 Kelurahan	**15,484,089,635**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidodadi)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidodadi)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan	1								Jumlah kelurahan	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simokerto)	Kelurahan								yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simokerto)	Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simolawang)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simolawang)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambakrejo)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambakrejo)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	17,200,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	17,200,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasan)	9 RW	1,182,106,228						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasan)	9 RW	1,182,106,228
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	7 RW	961,895,532						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	7 RW	1,056,675,932

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Sidodadi)									(Kelurahan Sidodadi)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simolawang)	8 RW	859,378,435						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simolawang)	8 RW	835,274,435
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambakrejo)	10 RW	1,337,460,383						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambakrejo)	10 RW	1,561,656,722
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simokerto)	14 RW	981,774,557						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simokerto)	14 RW	981,774,557
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasan)	9 RW	1,475,390,595						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasan)	9 RW	1,475,390,595
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambakrejo)	10 RW	1,352,912,176						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambakrejo)	10 RW	1,128,715,837
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	7 RW	2,307,314,856						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	7 RW	2,212,534,456

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidodadi)								Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidodadi)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simokerto)	14 RW	2,447,243,740						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simokerto)	14 RW	2,447,243,740
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simolawang)	8 RW	2,561,413,133						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simolawang)	8 RW	2,585,517,133
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	**31,560,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	**31,560,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	31,560,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	31,560,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**114,371,894**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**114,371,894**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	14 Lokasi	**114,371,894**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	14 Lokasi	**114,371,894**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Ketertiban Umum		ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							**Ketertiban Umum**	ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	114,371,894						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	114,371,894
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**6,340,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**6,340,000**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	**6,340,000**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	**6,340,000**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	5,920,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	5,920,000
					7.01.05.2.01.05	Jumlah potensi	7 Kasus	420						7.01.05.2.01.05	Jumlah potensi	7 Kasus	420

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	konflik sosial yang ditangani								Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	konflik sosial yang ditangani		
Kec. Sukolilo								**54,279,998,897**	**Kec. Sukolilo**								**55,492,791,714**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**54,279,998,897**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**55,492,791,714**
		7.01 KECAMATAN						**54,279,998,897**			**7.01 KECAMATAN**						**55,492,791,714**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,95%	**32,000,895,644**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,95%	**33,855,362,481**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,108,348,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25,532,729,504**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24,108,348,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	25,532,729,504
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7,693,116,016**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**8,129,773,825**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	7,693,116,016						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	8,129,773,825
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**199,431,628**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**192,859,152**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau	100%	199,431,628						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau	100%	192,859,152

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara								Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara		
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**8,527,057,291**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,885,383,271**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.8 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.8 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**13,463,691**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**13,463,691**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	220 Orang	13,463,691						7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	220 Orang	13,463,691
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga	**8,485,991,500**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga	**7,844,317,480**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	8,485,991,500					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	7,844,317,480
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**27,602,100**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**27,602,100**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	988 berkas	9,200,700					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	988 berkas	9,200,700
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4622 berkas	9,200,700					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4622 berkas	9,200,700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Nonperizinan									Nonperizinan			
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	9,200,700						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	9,200,700
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,551,977,391**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,551,977,391**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gebang Putih)	2 Kelurahan	**13,530,937,071**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gebang Putih)	2 Kelurahan	**13,530,937,071**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Keputih)	2 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Keputih)	2 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Klampis Ngasem)	2 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Klampis Ngasem)	2 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Medokan Semampir)	2 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Medokan Semampir)	2 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan	2								Jumlah kelurahan	2	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Menur Pumpungan)	Kelurahan							yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Menur Pumpungan)	Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Nginden Jangkungan)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Nginden Jangkungan)	2 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Semolowaru)	2 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Semolowaru)	2 Kelurahan	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan	
				7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	14 Kali	21,468,300					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	14 Kali	21,468,300
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Keputih)	9 RW	630,493,673					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Keputih)	9 RW	630,493,673
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Klampis	9 RW	928,450,539					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Klampis	3 RW	928,450,539

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Ngasem)									Ngasem)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Medokan Semampir)	9 RW	820,362,531						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Medokan Semampir)	8 RW	718,860,362
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Menur Pumpungan)	10 RW	327,187,633						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Menur Pumpungan)	1 RW	305,247,727
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Nginden Jangkungan)	11 RW	598,515,282						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Nginden Jangkungan)	11 RW	598,515,282
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Semolowaru)	12 RW	1,660,069,813						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Semolowaru)	12 RW	1,660,069,813
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gebang Putih)	7 RW	507,103,605						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Gebang Putih)	7 RW	325,363,305
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	628,795,000						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	810,535,300

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Gebang Putih)									(Kelurahan Gebang Putih)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Keputih)	9 RW	1,059,243,844						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Keputih)	9 RW	1,059,243,844
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Klampis Ngasem)	9 RW	1,228,310,207						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Klampis Ngasem)	6 RW	1,228,310,207
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Medokan Semampir)	9 RW	1,233,886,660						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Medokan Semampir)	8 RW	1,335,388,829
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Menur Pumpungan)	10 RW	1,787,478,252						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Menur Pumpungan)	10 RW	1,809,418,158
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Nginden Jangkungan)	11 RW	1,509,400,077						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Nginden Jangkungan)	11 RW	1,509,400,077

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Semolowaru)	12 RW	590,171,655					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Semolowaru)	8 RW	590,171,655
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	**21,040,320**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	**21,040,320**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	21,040,320					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	21,040,320
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**165,877,824**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**165,877,824**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	**165,877,824**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	**165,877,824**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	165,877,824					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	165,877,824

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Wilayah Kecamatan									Wilayah Kecamatan			
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**34,190,747**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**34,190,747**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	**34,190,747**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	**34,190,747**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	9,268,912						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	9,268,912
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus	24,921,835						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus	24,921,835
Kec. Sukomanunggal								**44,344,930,872**	**Kec. Sukomanunggal**								**45,439,663,082**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**44,344,930,872**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**45,439,663,082**
		7.01 KECAMATAN						**44,344,930,872**			**7.01 KECAMATAN**						**45,439,663,082**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	97,84%	**27,116,052,068**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	97,84%	**28,500,842,722**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
KABUPATEN/KOTA	kesekretariatan			**DAERAH KABUPATEN/KOTA**	kesekretariatan		
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,099,804,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,189,712,863**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,099,804,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,189,712,863
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,850,090,169**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,184,775,859**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,850,090,169	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,184,775,859
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**166,157,899**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**126,354,000**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	166,157,899	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	126,354,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,831,359,888**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,541,301,448**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**7,728,588**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**7,728,588**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	7,728,588	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	7,728,588
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	**5,796,110,600**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	**5,506,690,710**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,796,110,600	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,506,690,710
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	**27,520,700**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain	6 Bidang Urusan	**26,882,150**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Camat	yang dilimpahkan kepada Camat							**Camat**	yang dilimpahkan kepada Camat		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 Berkas	9,200,700					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 Berkas	9,200,700
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5921 berkas	9,160,000					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5921 berkas	8,521,450
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	9,160,000					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	9,160,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase kelurahan yang	12.5 %	**11,211,149,680**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN**		Persentase kelurahan yang	12.5 %	**11,211,149,676**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		menindaklanjuti konsep inovasi						**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		menindaklanjuti konsep inovasi		
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Putat Gede)	0 Kelurahan	**11,202,869,680**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Putat Gede)	0 Kelurahan	**11,202,869,676**
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simomulyo)	0 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simomulyo)	0 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simomulyo Baru)	0 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Simomulyo Baru)	0 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sonokwijenan)	0 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sonokwijenan)	0 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sukomanunggal)	0 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sukomanunggal)	0 Kelurahan	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tanjungsari)	0 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tanjungsari)	0 Kelurahan	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan	6 keluraha	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						musbangkel berdasarkan konsep inovasi									musbangkel berdasarkan konsep inovasi	n	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	27,602,100						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	27,602,100
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Putat Gede)	4 RW	159,235,402						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Putat Gede)	4 RW	159,235,402
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo)	7 RW	1,262,204,823						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo)	3 RW	959,926,024
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo Baru)	10 RW	2,389,610,896						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo Baru)	9 RW	2,358,774,629
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sonokwijenan)	6 RW	472,498,370						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sonokwijenan)	6 RW	472,498,370
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	5 RW	279,014,835						7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	3 RW	400,154,415

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sukomanunggal)								Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sukomanunggal)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tanjungsari)	4 RW	537,038,035						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tanjungsari)	2 RW	537,038,035
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Putat Gede)	4 RW	506,961,310						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Putat Gede)	4 RW	506,961,310
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo)	7 RW	739,388,307						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo)	7 RW	1,041,667,105
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo Baru)	10 RW	2,186,786,990						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Simomulyo Baru)	10 RW	2,217,623,254
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan	6 RW	685,754,800						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan	6 RW	685,754,800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Sonokwijenan)									Sonokwijenan)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sukomanunggal)	5 RW	1,305,148,662						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sukomanunggal)	5 RW	1,184,009,082
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tanjungsari)	4 RW	651,625,150						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tanjungsari)	4 RW	651,625,150
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**8,280,000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**8,280,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,280,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,280,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**168,009,236**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**168,009,236**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	24 Lokasi	**168,009,236**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	24 Lokasi	**168,009,236**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						ditertibkan									ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	168,009,236						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	168,009,236
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**18,360,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**18,360,000**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	**18,360,000**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	**18,360,000**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	9,160,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	9,160,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	8 kasus	9,200,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	8 kasus	9,200,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perundang-Undangan									Perundang-Undangan			
Kec. Tambaksari								**89,156,784,696**	**Kec. Tambaksari**								**88,854,365,016**
7 UNSUR KEWILAYAHAN								**89,156,784,696**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**								**88,854,365,016**
7.01 KECAMATAN								**89,156,784,696**	**7.01 KECAMATAN**								**88,854,365,016**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,20%	**38,848,276,461**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,20%	**39,835,344,750**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27,030,448,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**28,017,516,289**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,030,448,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28,017,516,289
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**11,560,872,665**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**11,560,872,665**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	11,560,872,665						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	11,560,872,665
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**256,955,796**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**256,955,796**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	256,955,796						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	256,955,796

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**13,172,032,750**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**11,901,678,231**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.82 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.82 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**11,040,840**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,000,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	250 orang	11,040,840	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	3,000,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga	**13,127,869,390**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga	**11,869,623,060**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	13,127,869,390	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	11,869,623,060

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**33,122,520**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**29,055,171**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	1112 berkas	11,040,840						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	1112 berkas	6,873,120
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5991 berkas	11,040,840						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5991 berkas	11,141,211
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan	Jumlah laporan/rekomendas	4 laporan	11,040,840						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan	Jumlah laporan/rekomendas	4 laporan	11,040,840

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	i/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	i/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**36,856,003,625**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**36,836,870,175**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Setro)	2 kelurahan	**36,831,468,425**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dukuh Setro)	2 kelurahan	**36,812,334,975**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gading)	2 kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Gading)	2 kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kapasmadya Baru)	2 kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kapasmadya Baru)	2 kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pacarkeling)	2 kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pacarkeling)	2 kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pacarkembang)	2 kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Pacarkembang)	2 kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ploso)	2 kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ploso)	2 kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rangkah)	2 kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Rangkah)	2 kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambaksari)	2 kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tambaksari)	2 kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	16 kali	43,133,450						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	16 kali	24,000,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Setro)	7 RW	3,239,326,066						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Setro)	7 RW	3,239,326,066
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	2,656,775,334						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	2,656,775,334

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Gading)									(Kelurahan Gading)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasmadya Baru)	8 RW	2,425,107,483						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kapasmadya Baru)	8 RW	2,425,107,483
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pacarkeling)	12 RW	2,580,332,632						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pacarkeling)	12 RW	2,580,332,632
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pacarkembang)	11 RW	3,462,908,464						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Pacarkembang)	11 RW	3,462,908,464
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ploso)	11 RW	3,009,283,896						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ploso)	11 RW	3,009,283,896
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rangkah)	9 RW	2,258,378,923						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Rangkah)	9 RW	2,258,378,923
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambaksari)	9 RW	2,339,765,627						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tambaksari)	9 RW	2,339,765,627
					7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	7 RW	1,009,988,137						7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	7 RW	1,009,988,137

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Setro)								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dukuh Setro)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gading)	11 RW	1,610,813,996						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Gading)	11 RW	1,610,813,996
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasmadya Baru)	8 RW	2,337,828,830						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kapasmadya Baru)	8 RW	2,337,828,830
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pacarkeling)	12 RW	1,281,580,680						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pacarkeling)	12 RW	1,281,580,680
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pacarkembang)	11 RW	1,809,026,534						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Pacarkembang)	11 RW	1,809,026,534
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	11 RW	2,076,879,430						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	11 RW	2,076,879,430

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						direalisasikan (Kelurahan Ploso)									direalisasikan (Kelurahan Ploso)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rangkah)	9 RW	1,973,985,243						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Rangkah)	9 RW	1,973,985,243
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambaksari)	9 RW	2,716,353,700						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tambaksari)	9 RW	2,716,353,700
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	**24,535,200**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	**24,535,200**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	24,535,200						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	24,535,200
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**235,342,080**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**235,342,080**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang	25 lokasi	**235,342,080**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang	25 lokasi	**235,342,080**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dipantau dan ditertibkan									dipantau dan ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	235,342,080						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	235,342,080
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**45,129,780**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**45,129,780**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 kasus	**45,129,780**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 kasus	**45,129,780**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	22,020,210						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	22,020,210
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	5 kasus	23,109,570						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	5 kasus	23,109,570

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Kec. Tandes								**48,985,284,476**	**Kec. Tandes**								**50,296,580,317**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**48,985,284,476**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**50,296,580,317**
		7.01 KECAMATAN						**48,985,284,476**			**7.01 KECAMATAN**						**50,296,580,317**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,39%	**28,444,169,806**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,39%	**30,434,382,813**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,034,180,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,963,552,783**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,034,180,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,963,552,783
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,247,679,089**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,290,424,313**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,247,679,089						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,290,424,313
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**162,310,717**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**180,405,717**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	162,310,717						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	180,405,717

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Bangunan Lainnya				Bangunan Lainnya			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**7,250,762,324**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,602,197,958**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**17,665,344**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**6,000,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 Orang	17,665,344	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 Orang	6,000,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**7,199,075,300**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**6,552,744,120**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan	Jumlah Frekuensi pendataan di	12 kali	7,199,075,300	7.01.02.2.02.03 Peningkatan	Jumlah Frekuensi pendataan di	12 kali	6,552,744,120

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	wilayah kecamatan								Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	wilayah kecamatan		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**34,021,680**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**43,453,838**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	22,081,680						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 berkas	9,659,820
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3831 berkas	8,340,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3831 berkas	24,455,318
					7.01.02.2.04.03	Jumlah	4 laporan	3,600,000						7.01.02.2.04.03	Jumlah	4 laporan	9,338,700

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,096,034,314**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,065,681,514**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Balongsari)	1 Kelurahan	**13,078,368,970**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Balongsari)	1 Kelurahan	**13,048,016,170**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Banjar Sugihan)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Banjar Sugihan)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Karangpoh)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Karangpoh)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Manukan Kulon)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Manukan Kulon)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Manukan Wetan)									(Kelurahan Manukan Wetan)		
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tandes)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tandes)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	36,802,800						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	6,450,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tandes)	9 RW	537,252,854						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tandes)	9 RW	537,252,854
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karangpoh)	9 RW	1,161,543,638						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Karangpoh)	9 RW	1,161,543,638
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Balongsari)	7 RW	688,723,620						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Balongsari)	7 RW	279,252,965
					7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	7 RW	488,392,831						7.01.03.2.02.02	Jumlah RW yang	7 RW	488,133,761

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manukan Wetan)								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manukan Wetan)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manukan Kulon)	15 RW	3,536,915,603						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Manukan Kulon)	15 RW	3,537,363,001
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Banjar Sugihan)	4 RW	292,031,412						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Banjar Sugihan)	4 RW	292,031,412
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tandes)	9 RW	804,436,047						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tandes)	9 RW	804,436,047
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karangpoh)	9 RW	1,528,185,683						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Karangpoh)	9 RW	1,528,185,683
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Balongsari)	7 RW	603,996,525						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Balongsari)	7 RW	1,013,467,180

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manukan Wetan)	7 RW	704,223,959					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manukan Wetan)	7 RW	704,483,029
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manukan Kulon)	15 RW	1,728,695,192					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Manukan Kulon)	15 RW	1,728,247,794
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Banjar Sugihan)	4 RW	967,168,806					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Banjar Sugihan)	4 RW	967,168,806
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**17,665,344**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**17,665,344**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	17,665,344					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	17,665,344
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**173,425,632**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**173,425,632**
				7.01.04.2.01 Koordinasi		Objek yang	15 lokasi	**173,425,632**					**7.01.04.2.01 Koordinasi**		Objek yang	15 lokasi	**173,425,632**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							**Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	173,425,632						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	173,425,632
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**20,892,400**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**20,892,400**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**20,892,400**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	**20,892,400**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	4 kali	4,600,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	4 kali	4,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	terhadap RT								Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	terhadap RT		
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	30 Kasus	16,292,400						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	30 Kasus	16,292,400
Kec. Tegalsari								**46,455,951,134**	**Kec. Tegalsari**								**47,117,812,012**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**46,455,951,134**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**47,117,812,012**
		7.01 KECAMATAN						**46,455,951,134**			**7.01 KECAMATAN**						**47,117,812,012**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,95%	**25,763,969,235**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,95%	**26,564,608,213**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,168,104,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,412,739,622**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,168,104,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,412,739,622
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**7,309,888,951**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,865,031,410**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	7,309,888,951						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,865,031,410
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**285,976,284**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**286,837,181**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	285,976,284						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	286,837,181
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,775,424,700**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**6,757,928,350**
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9,000,000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**9,000,000**
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang	9,000,000						7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang	9,000,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan	365 Lembaga	**6,657,599,100**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit**		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan	365 Lembaga	**6,676,718,410**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		urusan pemerintahan							**Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	urusan pemerintahan		
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,657,599,100						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	6,676,718,410
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**108,825,600**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**72,209,940**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	21,600,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	17,802,180
					7.01.02.2.04.02	Jumlah pelayanan	4140	15,600,000						7.01.02.2.04.02	Jumlah pelayanan	4140	15,598,275

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	non perizinan yang ditangani	Berkas						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	non perizinan yang ditangani	Berkas	
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	71,625,600					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	38,809,485
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,578,587,199**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**13,578,587,199**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dr. Soetomo)	1 Kelurahan	**13,555,667,199**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Dr. Soetomo)	1 Kelurahan	**13,555,667,199**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kedungdoro)	1 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kedungdoro)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Keputran)	1 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Keputran)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan							Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						(Kelurahan Tegalsari)									(Kelurahan Tegalsari)		
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonorejo)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wonorejo)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	7,667,250					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	7,667,250
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tegalsari)	7 RW	686,992,144					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tegalsari)	7 RW	707,651,660
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Keputran)	6 RW	653,368,384					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Keputran)	6 RW	357,958,214
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan	11 RW	1,602,378,915					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan	11 RW	1,466,050,965

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Wonorejo)									Wonorejo)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedungdoro)	10 RW	1,761,605,217						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kedungdoro)	10 RW	1,459,765,547
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dr. Soetomo)	14 RW	1,251,122,903						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Dr. Soetomo)	14 RW	1,026,791,433
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tegalsari)	7 RW	2,023,354,776						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tegalsari)	7 RW	2,002,695,260
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Keputran)	6 RW	1,463,728,978						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Keputran)	6 RW	1,759,139,148
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	11 RW	1,389,908,300						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonorejo)	11 RW	1,526,236,250
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	10 RW	1,212,303,994						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	10 RW	1,514,143,664

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedungdoro)								Kelurahan	masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kedungdoro)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dr. Soetomo)	14 RW	1,503,236,338						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Dr. Soetomo)	14 RW	1,727,567,808
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	**22,920,000**				**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	**22,920,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	22,920,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	22,920,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**289,257,600**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**203,975,850**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	**289,257,600**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	**203,975,850**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan	360 Kali	289,257,600						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan	360 Kali	203,975,850

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketertiban umum								Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketertiban umum		
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**48,712,400**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**12,712,400**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	**48,712,400**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	**12,712,400**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	20 Kali	8,420,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	20 Kali	8,420,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	62 Kasus	40,292,400						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	38 Kasus	4,292,400
Kec. Tenggilis Mejoyo								**32,555,969,164**	**Kec. Tenggilis Mejoyo**								**33,081,614,553**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**32,555,969,164**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**33,081,614,553**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
7.01 KECAMATAN			**32,555,969,164**	**7.01 KECAMATAN**			**33,081,614,553**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,93%	**21,691,324,603**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,93%	**22,205,568,892**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,479,672,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,005,317,389**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,479,672,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,005,317,389
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,068,677,803**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,101,794,930**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,068,677,803	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,101,794,930
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**142,974,800**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**98,456,573**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	142,974,800	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	98,456,573
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,384,033,600**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,392,573,100**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	35.21 %			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	35.21 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,000,000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	**3,000,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	3,000,000	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	3,000,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	**3,352,395,000**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	**3,360,934,500**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	3,352,395,000	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	3,360,934,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**28,638,600**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**28,638,600**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	9,600,000						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	9,600,000
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2685 berkas	11,100,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2685 berkas	11,100,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan	4 laporan	7,938,600						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan	4 laporan	7,938,600

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	kewenangan lain yang dilimpahkan				kewenangan lain yang dilimpahkan		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,384,407,633**	**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,384,407,633**
	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kendangsari)	1 Kelurahan	**7,368,587,633**	**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kendangsari)	1 Kelurahan	**7,368,587,633**
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kutisari)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Kutisari)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Panjang Jiwo)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Panjang Jiwo)	1 Kelurahan	
	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	1 Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	1 Kelurahan	
	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	14,800,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	14,800,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kutisari)	6 RW	765,796,379						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kutisari)	6 RW	765,796,379
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kendangsari)	5 RW	780,090,256						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Kendangsari)	5 RW	883,081,656
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	6 RW	731,027,477						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	6 RW	738,273,477
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Panjang Jiwo)	8 RW	832,079,311						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Panjang Jiwo)	8 RW	832,079,311
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kutisari)	6 RW	941,445,670						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Kutisari)	6 RW	941,445,670
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	5 RW	1,066,491,400						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	5 RW	963,500,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						direalisasikan (Kelurahan Kendangsari)									direalisasikan (Kelurahan Kendangsari)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	6 RW	1,069,976,000						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Tenggilis Mejoyo)	6 RW	1,062,730,000
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Panjang Jiwo)	8 RW	1,166,881,140						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Panjang Jiwo)	8 RW	1,166,881,140
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**15,820,000**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	**15,820,000**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	15,820,000						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	15,820,000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**76,403,328**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**79,264,928**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban	14 lokasi	**76,403,328**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban	14 lokasi	**79,264,928**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						masyarakat yang dipantau dan ditertibkan									masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	76,403,328						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	79,264,928
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,800,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,800,000**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**19,800,000**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**19,800,000**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	11,400,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	11,400,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik	Jumlah potensi konflik sosial yang	6 kasus	8,400,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik	Jumlah potensi konflik sosial yang	6 kasus	8,400,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	ditangani								Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	ditangani		
Kec. Wiyung								**32,966,567,757**	**Kec. Wiyung**								**34,320,434,507**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**32,966,567,757**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**34,320,434,507**
		7.01 KECAMATAN						**32,966,567,757**			**7.01 KECAMATAN**						**34,320,434,507**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,37%	**21,160,067,078**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,37%	**22,839,117,848**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,411,088,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,888,360,828**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,411,088,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,888,360,828
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,638,296,975**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,840,074,917**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,638,296,975						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	4,840,074,917
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110,682,103**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110,682,103**
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	110,682,103						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	110,682,103

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Kantor atau Bangunan Lainnya	yang dipelihara			Kantor atau Bangunan Lainnya	yang dipelihara		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**4,230,259,360**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**3,905,075,340**
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	13.21 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	13.21 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2,250,000**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	**2,250,000**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	75 orang	2,250,000	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	75 orang	2,250,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	**4,217,768,800**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	**3,892,584,780**
7.01.02.2.02.03	Jumlah Frekuensi	12 Kali	4,217,768,800	7.01.02.2.02.03	Jumlah Frekuensi	12 Kali	3,892,584,780

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pendataan di wilayah kecamatan								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pendataan di wilayah kecamatan		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**10,240,560**				**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**10,240,560**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	3,680,280						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	618 berkas	3,680,280
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3324 berkas	3,680,280						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3324 berkas	3,680,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	2,880,000					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	2,880,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,431,345,311**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**7,431,345,311**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Babatan)	0 Kelurahan	**7,419,568,415**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Babatan)	0 Kelurahan	**7,419,568,415**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Balas Klumprik)	0 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Balas Klumprik)	0 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jajar Tunggal)	0 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jajar Tunggal)	0 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wiyung)	0 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Wiyung)	0 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	4 Kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	4 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						berdasarkan konsep inovasi									berdasarkan konsep inovasi		
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	5,700,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	5,700,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jajar Tunggal)	6 RW	436,083,910						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jajar Tunggal)	6 RW	513,146,735
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Balas Klumprik)	8 RW	620,444,296						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Balas Klumprik)	4 RW	817,239,800
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wiyung)	9 RW	427,936,378						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wiyung)	5 RW	577,419,257
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Babatan)	11 RW	1,355,610,524						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Babatan)	3 RW	1,481,449,724
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	11 RW	1,450,579,395						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya	11 RW	1,324,740,195

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						direalisasikan (Kelurahan Babatan)									direalisasikan (Kelurahan Babatan)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jajar Tunggal)	6 RW	768,796,042						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jajar Tunggal)	6 RW	691,733,217
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Balas Klumprik)	8 RW	919,424,062						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Balas Klumprik)	8 RW	722,628,558
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wiyung)	9 RW	1,434,993,808						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wiyung)	9 RW	1,285,510,929
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	**11,776,896**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	**11,776,896**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	11,776,896						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	11,776,896
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda	100%	**136,243,608**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda	100%	**136,243,608**

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
	di Kecamatan				di Kecamatan		
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**136,243,608**	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	**136,243,608**
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	136,243,608	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	136,243,608
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**8,652,400**	**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**8,652,400**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**8,652,400**	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	**8,652,400**
	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi,	4 kali	4,360,000	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi,	4 kali	4,360,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT								(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT		
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	2 kasus	4,292,400						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	2 kasus	4,292,400
Kec. Wonocolo								**41,214,828,526**	**Kec. Wonocolo**								**42,593,175,863**
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							**41,214,828,526**		**7 UNSUR KEWILAYAHAN**							**42,593,175,863**
		7.01 KECAMATAN						**41,214,828,526**			**7.01 KECAMATAN**						**42,593,175,863**
			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,18%	**25,282,927,729**				**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,18%	**27,117,124,346**
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,529,932,000**					**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,266,062,486**
					7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,529,932,000						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,266,062,486
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,536,200,785**					**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,634,266,916**
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,536,200,785						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,634,266,916
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%	**216,794,944**					**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%	**216,794,944**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemerintah Daerah yang disediakan		
				7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	216,794,944					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	216,794,944
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,468,382,200**				**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	**5,012,532,920**
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.74 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.74 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	**8,130,000**					**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	**8,130,000**
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	110 Orang	8,130,000					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	110 Orang	8,130,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	280 Lembaga	**5,356,472,200**					**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	280 Lembaga	**4,952,281,340**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan			**yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**					mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan		
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	5,356,472,200	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	4,952,281,340
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**103,780,000**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**52,121,580**
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan					Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	95,860,000	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan					Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	741 Berkas	44,201,580

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Non Usaha									Non Usaha			
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2763 Berkas	1,800,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2763 Berkas	1,800,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6,120,000						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6,120,000
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**10,334,092,997**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**10,334,092,997**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bendul Merisi)	1 Kelurahan	**10,316,946,097**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Bendul Merisi)	1 Kelurahan	**10,316,946,097**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jemur Wonosari)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jemur Wonosari)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Margorejo)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Margorejo)	1 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan	1								Jumlah kelurahan	1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidosermo)	Kelurahan								yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sidosermo)	Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Siwalankerto)	1 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Siwalankerto)	1 Kelurahan	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	15,430,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	15,430,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Siwalankerto)	6 RW	770,193,107						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Siwalankerto)	6 RW	777,761,161
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidosermo)	8 RW	889,137,907						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sidosermo)	8 RW	889,137,907
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya	12 RW	1,144,044,583						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya	12 RW	1,101,375,314

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Prasarana Kelurahan	direalisasikan (Kelurahan Bendul Merisi)							Prasarana Kelurahan	direalisasikan (Kelurahan Bendul Merisi)		
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jemur Wonosari)	10 RW	495,805,661					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jemur Wonosari)	10 RW	495,805,661
				7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Margorejo)	8 RW	762,446,990					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Margorejo)	8 RW	762,446,990
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Siwalankerto)	6 RW	1,310,419,440					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Siwalankerto)	6 RW	1,302,851,386
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jemur Wonosari)	10 RW	2,602,043,115					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jemur Wonosari)	10 RW	2,602,043,115
				7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bendul Merisi)	12 RW	928,471,187					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Bendul Merisi)	12 RW	971,140,456
				7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	8 RW	809,567,738					7.01.03.2.02.03	Jumlah RW yang	8 RW	809,567,738

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Margorejo)								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Margorejo)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidosermo)	8 RW	589,386,369						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sidosermo)	8 RW	589,386,369
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	156 Lembaga	**17,146,900**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	156 Lembaga	**17,146,900**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	17,146,900						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	17,146,900
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**105,705,600**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**105,705,600**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**105,705,600**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**105,705,600**
					7.01.04.2.01.01	Jumlah upaya	360 Kali	105,705,600						7.01.04.2.01.01	Jumlah upaya	360 Kali	105,705,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**23,720,000**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**23,720,000**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	**23,720,000**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	**23,720,000**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	10,160,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	10,160,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	88 Kasus	13,560,000						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	88 Kasus	13,560,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kec. Wonokromo			**64,585,595,251**	**Kec. Wonokromo**			**65,319,059,244**
7 UNSUR KEWILAYAHAN			**64,585,595,251**	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**65,319,059,244**
7.01 KECAMATAN			**64,585,595,251**	**7.01 KECAMATAN**			**65,319,059,244**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,84%	**29,779,253,358**	**7.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,84%	**31,525,221,601**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,795,400,000**	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**24,850,743,580**
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,795,400,000	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24,850,743,580
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,793,221,561**	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,483,846,224**
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	5,793,221,561	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	6,483,846,224
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**190,631,797**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**190,631,797**
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	190,631,797	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	190,631,797
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase data terverifikasi yang	100%	**9,800,446,058**	**7.0102 PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Persentase data terverifikasi yang	100%	**8,787,941,808**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dibutuhkan Perangkat Daerah			**PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	dibutuhkan Perangkat Daerah		
	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.29 %			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.29 %	
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3,434,928**	**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	**3,434,928**
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	102 Orang	3,434,928	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	102 Orang	3,434,928
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	**9,787,477,400**	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	**8,774,973,150**
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	9,787,477,400	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	8,774,973,150

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan									Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**9,533,730**					**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	**9,533,730**
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 Berkas	1,533,450						7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	865 Berkas	1,533,450
					7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5758 Berkas	4,320,000						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5758 Berkas	4,320,000
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan	4 Laporan	3,680,280						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan	4 Laporan	3,680,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan								Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**24,885,565,767**				**7.0103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	**24,885,565,767**
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Darmo)	3 Kelurahan	**24,876,738,867**					**7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Darmo)	3 Kelurahan	**24,876,738,867**
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jagir)	3 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Jagir)	3 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ngagel)	3 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ngagel)	3 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ngagel Rejo)	3 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Ngagel Rejo)	3 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sawunggaling)	3 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan Sawunggaling)	3 Kelurahan	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan	3 Kelurahan								Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya (Kelurahan	3 Kelurahan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Wonokromo)									Wonokromo)		
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 keluraha n	
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	8,940,000						7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	8,940,000
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Darmo)	10 RW	401,442,800						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Darmo)	10 RW	401,442,800
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jagir)	11 RW	1,388,701,689						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Jagir)	11 RW	1,388,701,689
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ngagel)	5 RW	452,030,247						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ngagel)	5 RW	452,030,247
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ngagel Rejo)	12 RW	1,741,393,181						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Ngagel Rejo)	12 RW	1,741,393,181
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	12 RW	1,507,322,351						7.01.03.2.02.02 Pembangunan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	12 RW	1,507,322,351

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sawunggaling)								Sarana dan Prasarana Kelurahan	prasarananya direalisasikan (Kelurahan Sawunggaling)		
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonokromo)	8 RW	1,928,920,640						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan (Kelurahan Wonokromo)	8 RW	1,928,920,640
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Darmo)	10 RW	3,842,808,987						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Darmo)	10 RW	3,842,808,987
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jagir)	11 RW	1,659,611,478						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Jagir)	11 RW	1,659,611,478
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ngagel)	5 RW	1,356,922,438						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ngagel)	5 RW	1,356,922,438
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ngagel Rejo)	12 RW	4,331,590,761						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Ngagel Rejo)	12 RW	4,331,590,761
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	12 RW	2,712,649,198						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan	Jumlah RW yang usulan	12 RW	2,712,649,198

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sawunggaling)								Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Sawunggaling)		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonokromo)	8 RW	3,544,405,097						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan (Kelurahan Wonokromo)	8 RW	3,544,405,097
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	**8,826,900**					**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	**8,826,900**
					7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,826,900						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	8,826,900
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**100,850,688**				**7.0104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	**100,850,688**
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	41 Lokasi	**100,850,688**					**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	41 Lokasi	**100,850,688**
					7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan	Jumlah upaya penyelenggaraan	360 Kali	100,850,688						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan	Jumlah upaya penyelenggaraan	360 Kali	100,850,688

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum								Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum		
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,479,380**				**7.0105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	**19,479,380**
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	116 Kasus	**19,479,380**					**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	116 Kasus	**19,479,380**
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	13,600,000						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	13,600,000
					7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	116 Kasus	5,879,380						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	116 Kasus	5,879,380
RSUD Bhakti Dharma Husada								**268,222,225,280**	**RSUD Bhakti Dharma Husada**								**310,985,564,326**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**268,222,225,280**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**310,985,564,326**
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**268,222,225,280**	**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**310,985,564,326**
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	**260,521,189,797**	**1.0201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	**303,429,551,368**
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**35,787,584,959**	**1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**50,681,322,379**
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	35,787,584,959	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	50,681,322,379
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**44,678,285,313**	**1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**38,748,275,174**
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	44,678,285,313	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	38,748,275,174
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional	100%	**180,055,319,525**	**1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional	100%	**213,999,953,815**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi									Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	12 Jenis	180,055,319,525					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	12 Jenis	213,999,953,815
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	**7,701,035,483**				**1.0202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	**7,556,012,958**
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	**7,701,035,483**					**1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	**7,556,012,958**
					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	1 Kelompok	3,521,770,406					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	1 Kelompok	3,521,770,406
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	2 Kelompok	4,179,265,077					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	2 Kelompok	4,034,242,552
RSUD dr. Mohamad Soewandhie								**557,628,525,795**	**RSUD dr. Mohamad Soewandhie**								**598,178,835,673**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**557,628,525,795**	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**598,178,835,673**
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**557,628,525,795**	**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**598,178,835,673**
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,85%	**410,962,522,795**	**1.0201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,85%	**454,220,906,674**
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,85%			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,85%	
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**89,800,592,515**	**1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**87,261,171,006**
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	89,800,592,515	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	87,261,171,006
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**45,518,655,280**	**1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**32,778,536,271**
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	45,518,655,280	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	32,778,536,271
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang	100%	**275,643,275,000**	**1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang	100%	**334,181,199,397**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi									pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi		
					1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	14 jenis	275,643,275,000						1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	14 jenis	334,181,199,397
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08%	**146,666,003,000**				**1.0202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08%	**143,957,928,999**
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie	100%	**146,666,003,000**					**1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie	100%	**143,957,928,999**
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kelompok alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang diadakan	1 kelompok	146,666,003,000						1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kelompok alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang diadakan	1 kelompok	143,957,928,999
Satuan Polisi Pamong Praja								**54,293,414,858**	**Satuan Polisi Pamong Praja**								**60,817,598,925**
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**54,293,414,858**		**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**60,817,598,925**
		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN						**54,293,414,858**			**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN**						**60,817,598,925**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96%	**31,820,429,729**	**1.0501 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96%	**31,736,318,205**
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27,257,440,000**	**1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27,356,353,582**
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,257,440,000	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,356,353,582
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2,211,363,874**	**1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2,211,363,874**
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2,211,363,874	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2,211,363,874
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2,351,625,855**	**1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2,168,600,749**
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,351,625,855	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,168,600,749
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	**22,472,985,129**	**1.0502 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	**29,081,280,720**

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%							Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	
					Persentase PPNS yang dibina	100%							Persentase PPNS yang dibina	100%	
					Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%							Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	**20,666,974,294**					**1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	**24,294,184,118**
					Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	92 Titik/Lokasi							Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	92 Titik/Lokasi	
					Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	978 Orang							Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	978 Orang	
					Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan	1040 Orang							Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan	1040 Orang	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Perda/Perkada yang mendapatkan layanan									Perda/Perkada yang mendapatkan layanan		
					1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah objek Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan yang ditangani	10080 Objek	17,532,912,192						1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah objek Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan yang ditangani	10080 Objek	21,005,644,888
					1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah potensi unjuk rasa dan kerusuhan massa akibat penertiban pelanggaran perda/perkada yang ditangani	36 Penertiban	1,690,225,000						1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah potensi unjuk rasa dan kerusuhan massa akibat penertiban pelanggaran perda/perkada yang ditangani	36 Penertiban	1,703,947,379
					1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP	192 Kali	876,818,793						1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP	192 Kali	916,520,589

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan hasil kerjasama antar lembaga dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	132 Kali	357,923,210						1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan hasil kerjasama antar lembaga dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	219 Kali	435,384,902
					1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan perda/perkada yang disusun	18 SOP	82,889,760						1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan perda/perkada yang disusun	18 SOP	114,889,760
					1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	jumlah frekuensi pemberian layanan dalam rangka penegakan perda/perkada kepada masyarakat	74 Kali	126,205,339						1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	jumlah frekuensi pemberian layanan dalam rangka penegakan perda/perkada kepada masyarakat	74 Kali	117,796,600
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan	11 Perda/perkada	**1,698,012,835**					**1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan	11 Perda/perkada	**4,679,098,602**
					1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0						1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	2 Laporan	1,769,340,814

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator** / **Alokasi**
1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	250 Objek / 382,427,300	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	250 Objek / 436,427,300
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	530 Objek / 1,315,585,535	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	965 Objek / 2,473,330,488
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang memberikan Pembinaan PPNS	7 Lembaga / **107,998,000**	**1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga yang memberikan Pembinaan PPNS	7 Lembaga / **107,998,000**
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	92 Orang / 107,998,000	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	88 Orang / 107,998,000
Sekretariat Daerah		**282,872,441,787**	**Sekretariat Daerah**		**269,819,792,507**
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		**282,872,441,787**	**4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**269,819,792,507**
4.01 SEKRETARIAT DAERAH		**282,872,441,787**	**4.01 SEKRETARIAT DAERAH**		**269,819,792,507**
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100% / **194,598,368,892**	**4.0101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100% / **198,400,293,053**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%						Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	
				Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	90%						Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	90%	
				Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	80%						Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	80%	
				Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	63,88%						Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	63,88%	
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%						Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil	100%						Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil	100%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Kepala Daerah sesuai dengan standar.				Kepala Daerah sesuai dengan standar.		
	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	
	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97%			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97%	
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**73,506,905,611**	**4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**67,210,321,645**
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	73,506,905,611	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	67,210,321,645
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	**3,149,057,710**	**4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	**7,295,219,032**
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8800 Stel	3,149,057,710	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	33846 Stel	7,295,219,032
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 laporan	**20,902,305,260**	**4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 laporan	**18,326,016,900**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Pemerintah Daerah				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Pemerintah Daerah**				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6018 Unit	20,902,305,260	4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah barang milik daerah yang diadakan	8760 Unit	18,326,016,900
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	**70,734,293,936**	**4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	**77,349,536,401**
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%						Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	
				Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%						Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	
4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu	100%	1,795,881,683	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu	100%	1,795,881,683
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,993,235,111	4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3,278,107,311
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase Ketersediaan jasa pelayanan umum kantor yang tepat waktu dan sasaran	100%	65,945,177,142	4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase Ketersediaan jasa pelayanan umum kantor yang tepat waktu dan sasaran	100%	72,275,547,407
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan				Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan	100%	**6,832,616,780**	**4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan**				Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan	100%	**9,570,496,595**

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Wakil Kepala Daerah		operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah							**Wakil Kepala Daerah**		operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah		
					4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan gaji dan/atau tunjangan	2 Orang	397,676,341						4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan gaji dan/atau tunjangan	2 Orang	397,676,341
					4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan dana penunjang operasiol	2 Orang	6,434,940,439						4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan dana penunjang operasiol	2 Orang	9,172,820,254
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	**2,179,014,240**					**4.01.01.2.13 Penataan Organisasi**		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	**2,228,870,325**
						Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi								Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	
						Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit								Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit	
					4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah kegiatan pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	58 kegiatan	772,380,205						4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah kegiatan pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	58 kegiatan	818,545,440

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						perangkat daerah									perangkat daerah		
					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan pendampingan penerapan SAKIP perangkat daerah	58 kegiatan	785,661,476						4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan pendampingan penerapan SAKIP perangkat daerah	58 kegiatan	789,352,326
					4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas unit penyelenggara pelayanan publik	253 kegiatan	620,972,559						4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas unit penyelenggara pelayanan publik	253 kegiatan	620,972,559
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	**17,294,175,355**					**4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	**16,419,832,155**
						Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%								Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	
					4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	15,919,903,605						4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	15,330,432,605
					4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan	89 kali	1,374,271,750						4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan	89 kali	1,089,399,550
			4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	**55,080,651,719**				**4.0102 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN**			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	**53,146,511,179**

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KESEJAHTERAAN RAKYAT							**KESEJAHTERAAN RAKYAT**			
				Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari						Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari	
				Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	90%						Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	90%	
				Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	82%						Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	82%	
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%						Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	
				Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	19,45%						Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	19,45%	
				Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	97,50%						Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	97,50%	
				Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	70,96%						Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	70,96%	
				Persentase permasalahan	100%						Persentase permasalahan	100%	

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	hukum yang ditindaklanjuti				hukum yang ditindaklanjuti		
	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	
	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	
	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	36 Lembaga	**6,592,493,787**	**4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	36 Lembaga	**7,462,923,487**
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 dokumen			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 dokumen	
	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	22 Kecamatan			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	22 Kecamatan	
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan	185 Peserta	2,057,377,120	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan	185 Peserta	2,097,973,762
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	22 Kecamatan	1,392,437,704	4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	22 Kecamatan	1,374,770,373
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Berkas	3,142,678,963	4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Berkas	3,990,179,352

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi	4 Dokumen	**30,512,615,691**				**4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi	4 Dokumen	**28,472,009,549**			
	Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan						Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan				
	Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Kegiatan						Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Kegiatan				
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	28,660,203,057				4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	27,202,988,598			
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Dokumen	1,852,412,634				4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Dokumen	1,269,020,951			
	Jumlah dokumen laporan outreach	1 Dokumen						Jumlah dokumen laporan outreach	1 Dokumen				
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen				
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum	**9,406,079,883**				**4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum	**8,030,891,388**			
	Jumlah produk	35 produk						Jumlah produk	35				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						hukum yang dipublikasi	hukum								hukum yang dipublikasi	produk hukum	
						Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	35 rancangan produk hukum								Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	35 rancangan produk hukum	
					4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	35 rancangan produk hukum	5,013,807,687					4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	80 rancangan produk hukum	3,643,737,109
					4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum	2,747,406,280					4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum	2,746,009,860
					4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	35 produk hukum	1,644,865,916					4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	80 produk hukum	1,641,144,419
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah laporan evaluasi kerjasama yang dilakukan	12 Laporan	**8,569,462,358**				**4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah**		Jumlah laporan evaluasi kerjasama yang dilakukan	12 Laporan	**9,180,686,755**
						Jumlah laporan kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	12 Laporan							Jumlah laporan kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	12 Laporan	
						Jumlah laporan kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Laporan							Jumlah laporan kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Laporan	
					4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang difasilitasi	20 Lembaga	851,151,734					4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang difasilitasi	20 Lembaga	850,992,528
						Jumlah kerjasama dalam negeri yang	25 Lembaga							Jumlah kerjasama dalam negeri yang	25 Lembaga	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						dievaluasi									dievaluasi		
					4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	7,718,310,624						4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	8,329,694,227
						Jumlah kerja sama luar negeri yang dievaluasi	11 Lembaga								Jumlah kerja sama luar negeri yang dievaluasi	11 Lembaga	
			4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	**33,193,421,176**				**4.0103 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	**18,272,988,275**
						Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	84%								Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	84%	
						Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	75%								Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	75%	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	**19,537,470,830**					**4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	**4,705,957,317**
					4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	2,337,648,020						4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	2,070,380,000
					4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	6,287,322,414						4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	2,054,389,119
					4.01.03.2.01.03	Jumlah koordinasi	4 kali	10,912,500,396						4.01.03.2.01.03	Jumlah koordinasi	4 kali	581,188,198

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil								Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil		
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	3 Dokumen	**8,429,783,462**					**4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	3 Dokumen	**8,489,043,772**
					4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 Dokumen	4,091,159,058						4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 Dokumen	4,021,401,368
					4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	58 lembaga	2,614,236,404						4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	58 lembaga	2,614,236,404
						Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem								Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	
					4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	1,724,388,000						4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	1,853,406,000
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	90%	**5,226,166,884**					**4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	90%	**5,077,987,186**
						Presentase	100%								Presentase	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						ketersediaan barang dan jasa perkantoran									ketersediaan barang dan jasa perkantoran		
					4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,688,948,884						4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,693,155,186
					4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	500 Dokumen	537,218,000						4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	300 Dokumen	384,832,000
Sekretariat DPRD								**221,354,526,667**	**Sekretariat DPRD**								**221,596,674,849**
	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							**221,354,526,667**		**4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**221,596,674,849**
		4.02 SEKRETARIAT DPRD						**221,354,526,667**			**4.02 SEKRETARIAT DPRD**						**221,596,674,849**
			4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**175,999,562,698**				**4.0201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	**174,180,779,315**
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,424,824,000**					**4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,896,433,782**
					4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,424,824,000						4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,896,433,782
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**30,791,760,488**					**4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**33,725,246,979**
					4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran	11 Jenis	30,791,760,488						4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran	11 Jenis	33,725,246,979
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang		Rata-rata waktu penyiapan	≤ 1 Hari	**6,179,161,013**					**4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang**		Rata-rata waktu penyiapan	≤ 1 Hari	**6,769,763,713**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelengkapan sarana dan prasarana rapat			**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kelengkapan sarana dan prasarana rapat		
4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6,179,161,013	4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6,769,763,713
4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**75,087,610,476**	**4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**69,037,801,523**
4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang di dilaksanakan	426 Kali	75,087,610,476	4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang di dilaksanakan	426 Kali	69,037,801,523
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**46,517,638,318**	**4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**46,517,638,318**
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	46,517,638,318	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	46,517,638,318
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**2,998,568,403**	**4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD**	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**3,233,895,000**
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya	36 Kali	2,998,568,403	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya	36 Kali	3,233,895,000
4.02.02 PROGRAM	Persentase	100%	**45,354,963,969**	**4.0202 PROGRAM**	Persentase	100%	**47,415,895,534**

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi			**DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi		
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	**4,300,436,303**	**4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	**4,300,436,303**
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Disusun	6 Dokumen	4,300,436,303	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Disusun	6 Dokumen	4,300,436,303
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**22,132,403,538**	**4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**24,193,335,103**
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan	2 Kali	1,650,000,000	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan	2 Kali	1,650,000,000
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi DPRD	4 Media	20,482,403,538	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi DPRD	4 Media	22,543,335,103
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	**14,511,214,231**	**4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	**14,511,214,231**
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitasi Reses	3 Kali	14,511,214,231	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitasi Reses	3 Kali	14,511,214,231
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	**4,410,909,897**	**4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD**	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	**4,410,909,897**
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan	Jumlah Rapat–Rapat Alat	875 Kali	4,410,909,897	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan	Jumlah Rapat–Rapat Alat	875 Kali	4,410,909,897

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**	**Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Indikator**	**Alokasi**
Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kelengkapan Dewan			Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kelengkapan Dewan		
TOTAL			**10,369,200,797,113**	**TOTAL**			**10,427,036,172,179**

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Perubahan RKPD Kota Surabaya tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2022 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen Perubahan RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2022 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Provinsi Jawa Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Perubahan RKPD tahun 2022 selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja) Perangkat

Daerah Tahun 2022, yang didalam penyusunannya diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2022;
3. Pemenuhan belanja wajib;
4. Efisiensi belanja melalui penyesuaian pos-post belanja sesuai dengan ketentuan;
5. Pemulihan Ekonomi melalui program ekonomi kerakyatan;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
8. Efektifitas dan waktu pelaksanaan kegiatan setelah Perubahan APBD Tahun 2022 ditetapkan

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004